



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

AUDITED

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2024**



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED



**GOVERNOR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 403/UD.08.00
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Representasi Manajemen

12 Juli 2024

Kepada

Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Surat representasi ini disampaikan terbatas pada hal yang sifatnya material, tanpa melihat besarnya nilai atau volume, namun menyangkut kekeliruan dan kesalahan penyajian informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.
2. Berdasarkan keyakinan dan pengetahuan, representasi berikut ini telah disampaikan kepada Tim BPK-RI selama pemeriksaan yaitu:
 - a. laporan keuangan yang telah kami sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - b. semua data material dan informasi yang diperlukan telah kami sampaikan kepada Tim BPK-RI;

- c. seluruh transaksi yang bersifat material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
 - d. seluruh rekening yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
 - e. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
 - f. adanya tindakan pelanggaran hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan, sejauh ini sedang diteliti;
 - g. pada dasarnya semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
 - h. tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
 - i. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi semua aspek Perjanjian Kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
 - j. tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2023 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;
 - k. tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern; dan
 - l. kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
3. Efektivitas sistem pengendalian intern telah dilakukan dalam hal penilaian:
- a. keandalan laporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan
 - b. ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
4. Kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan yang bersifat material, kiranya telah disampaikan secara menyeluruh.

5. Identifikasi dan pengungkapan seluruh peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan, termasuk kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian surat representasi ini kami sampaikan sebagai penjelasan terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	x
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xi
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	xiii
LAPORAN OPERASIONAL	xiv
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xvi
NERACA	xvii
LAPORAN ARUS KAS.....	xxvi
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	4
BAB II - EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	6
2.1 Ekonomi Makro	6
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	15
2.3 Kebijakan Keuangan.....	17
2.4 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2023.....	23
BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	25
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	25
3.1.1 Pendapatan Daerah.....	26
3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer	27
3.1.3 Pembiayaan Daerah	30
BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI	32
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	32
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	34



4.3	Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	34
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	69
BAB V - PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN		70
5.1	Laporan Realisasi Anggaran	70
5.1.1	Pendapatan Daerah	70
5.1.2	Belanja Daerah dan Transfer	133
5.1.3	Pembiayaan	164
5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	167
5.3	Laporan Operasional	168
5.3.1	Kegiatan Operasional	168
5.3.2	Kegiatan Non Operasional	206
5.4	Laporan Perubahan Ekuitas	207
5.5	Neraca	216
5.5.1	Aset	216
5.5.1.1	Aset Lancar	216
5.5.1.2	Investasi Jangka Panjang	297
5.5.1.3	Properti Investasi	318
5.5.1.4	Aset Tetap	322
5.5.1.5	Aset Lainnya	379
5.5.2	Kewajiban	423
5.5.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	424
5.5.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	447
5.5.3	Ekuitas	452
5.6	Laporan Arus Kas	452
BAB VI – CATATAN PENTING LAINNYA		466
6.1	Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi	466
6.2	Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional	467
6.3	Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	471
6.4	Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	473



6.5	Pengalihan Rumah Sakit Umum Adhyaksa ke Kejaksaan Agung RI.....	475
6.6	Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi.....	477
6.7	Penugasan kepada BUMD	485
BAB VII - PENUTUP.....		494



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 - Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Periode 2018-2023	7
Grafik 2.2 - Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Periode 2019-2023.....	8
Grafik 2.3 - Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2023	9
Grafik 2.4 - Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta dan Nasional Tahun 2018 - 2023	10
Grafik 2.5 - Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 (%)	11
Grafik 2.6 - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam Juta Rupiah Periode 2019-2023.....	12
Grafik 2.7 - Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta.....	13
Grafik 2.8 - Realisasi Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	13



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 - Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	6
Tabel 2.2 - Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2023.....	15
Tabel 2.3 - Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 2.4 - Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023	23
Tabel 3.1 - Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023	25
Tabel 5.1 - Rekapitulasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	70
Tabel 5.2 - Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	71
Tabel 5.3 - Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022	100
Tabel 5.4 - Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 dan 2022	101
Tabel 5.5 - Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 dan 2022	106
Tabel 5.6 - Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	112
Tabel 5.7 - Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dan 2022	114
Tabel 5.8 - Realisasi Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	115
Tabel 5.9 - Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2023 dan 2022	116
Tabel 5.10 - Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	117
Tabel 5.11 - Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023	118
Tabel 5.12 - Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	122
Tabel 5.13 - Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022	127
Tabel 5.14 - Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	134
Tabel 5.15 - Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2023 dan 2022	150
Tabel 5.16 - Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	164
Tabel 5.17 - Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022.....	165
Tabel 5.18 - Rekapitulasi Pendapatan-LO Tahun 2023 dan 2022	169
Tabel 5.19 - Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022.....	169



Tabel 5.20 - Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah -LO Tahun 2023 dan 2022	170
Tabel 5.21 - Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022	178
Tabel 5.22 – Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023	178
Tabel 5.23 – Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2023.....	179
Tabel 5.24 – Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2023.....	180
Tabel 5.25 – Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2023	181
Tabel 5.26 - Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan 2022	181
Tabel 5.27 - Rekapitulasi Lain-lain Asli Daerah (PAD) – LO Tahun 2023 dan 2022.....	184
Tabel 5.28 - Rekapitulasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 dan 2022	194
Tabel 5.29 - Rekapitulasi Beban Daerah Tahun 2023 dan 2022.....	198
Tabel 5.30 - Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022	216
Tabel 5.31 - Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih Per 31 Desember 2023 dan 2022	241
Tabel 5.32 - Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2023 dan 2022	244
Tabel 5.33 - Piutang BLUD Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	254
Tabel 5.34 – Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD	256
Tabel 5.35 - Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung Per 31 Desember 2023 dan 2022	258
Tabel 5.36 - Rincian Piutang Hasil Kerjasama BLUD Per 31 Desember 2023 dan 2022	259
Tabel 5.37 - Daftar Nilai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) Per 31 Desember 2023 dan 2022	272
Tabel 5.38 - Rincian Pengembang yang Dikenakan Penyerahan Lahan Pengganti s.d 31 Desember 2023	274
Tabel 5.39 – Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022	295
Tabel 5.40 - Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2023.....	299
Tabel 5.41 - Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Per 31 Desember 2023.....	303
Tabel 5.42 – Investasi Permanen Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	303
Tabel 5.43 - Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas Per 31 Desember 2023 dan 2022	305
Tabel 5.44 - Investasi Permanen dengan Metode Biaya Per 31 Desember 2023 dan 2022	318
Tabel 5.45 – Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 2022	322
Tabel 5.46 - Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	379



Tabel 5.47 - Rincian Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	381
Tabel 5.48 - Rincian Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2023 dan 2022	381
Tabel 5.49 - Aset Lain-lain Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	389
Tabel 5.50 – Kewajiban Per 31 Desember 2023 dan 2022	423
Tabel 5.51 - Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	424
Tabel 5.52 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	424
Tabel 5.53 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD Per 31 Desember 2023 dan 2022	426
Tabel 5.54 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD Per 31 Desember 2023 dan 2022	426
Tabel 5.55 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	427
Tabel 5.56 - Perhitungan Utang Bunga (Akrual) JEDI.....	428
Tabel 5.57 - Perhitungan Utang Bunga (Akrual) MRT	428
Tabel 5.58 - Perhitungan Utang Bunga Per 31 Desember 2023	429
Tabel 5.59 - Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	430
Tabel 5.60 - Rincian Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2023 dan 2022	434
Tabel 5.61 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	440
Tabel 5.62 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD Per 31 Desember 2023 dan 2022 ..	440
Tabel 5.63 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	441
Tabel 5.64 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	442
Tabel 5.65 - Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2023 dan 2022	453
Tabel 5.66 - Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2023 dan 2022	458
Tabel 5.67 - Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2023 dan 2022	460
Tabel 5.68 - Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2023 dan 2022.....	461
Tabel 5.69 - Penerimaan Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2023	463
Tabel 5.70 - Pengeluaran Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2023	464
Tabel 6.1 - Realisasi Pinjaman PEN Tahun 2020-2022	471
Tabel 6.2 - Daftar Badan Layanan Umum Daerah dan SKPD Penggabungnya Tahun 2023.....	473
Tabel 6.3 - Daftar Tugas Pembantuan Tahun 2023	478
Tabel 6.4 - Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta Per 31 Desember 2023	479
Tabel 6.5 - Penugasan kepada BUMD yang Masih Berlangsung Sampai Dengan Tahun 2023	485



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Daftar Rincian Realisasi Belanja Operasi Per 31 Desember 2023
Lampiran	2	Daftar Saldo Kas dan Setara Kas BLUD Per 31 Desember 2023
Lampiran	3	Daftar Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023
Lampiran	4	Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran	5.1	Daftar Piutang Kerjasama atas Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Bentuk Sewa Per 31 Desember 2023
Lampiran	5.2	Daftar Piutang Kerjasama atas Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Bentuk BOT/BTO Per 31 Desember 2023
Lampiran	5.3	Rekapitulasi Pendapatan dan Piutang Sewa Pemanfaatan Titik Reklame Per 31 Desember 2023
Lampiran	6	Rekapitulasi Persediaan Usang/Rusak Per 31 Desember 2023
Lampiran	7	Ikhtisar Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2023
Lampiran	8	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2023
Lampiran	9	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi) Tahun 2023
Lampiran	10	Daftar Aset Properti Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2023
Lampiran	11	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Per 31 Desember 2023
Lampiran	12	Daftar Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Atas Nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2023
Lampiran	13.1	Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BOT, BTO, dan KSP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2023



Lampiran	13.2	Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan dan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan Per 31 Desember 2023
Lampiran	14	Pendapatan Diterima di Muka atas Pemanfaatan Aset dalam Bentuk Sewa Per 31 Desember 2023
Lampiran	15	Pendapatan Diterima di Muka Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Per 31 Desember 2023
Lampiran	16.1	Daftar Utang Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2023
Lampiran	16.2	Daftar Utang Belanja Barang, Belanja Jasa, dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2023
Lampiran	16.3	Daftar Utang Belanja BLUD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2023
Lampiran	17	Monitoring Atas Penyelesaian Pekerjaan Yang Melewati Tahun Anggaran 2023 Per 31 Desember 2023
Lampiran	18	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pendapatan, Beban, dan Surplus (Defisit) Per 31 Desember 2023
Lampiran	19	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Per 31 Desember 2023



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 12 Juli 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono



**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI APBD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)						
No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 31 Desember 2023 (Audited)	(%)	Realisasi 31 Desember 2022 (Audited)
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	43.000.000.000.000	43.516.481.672.833	101,20	40.275.148.196.210
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	462.105.437.613	454.697.560.911	98,40	376.977.989.704
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	545.869.249.882	545.869.249.987	100,00	402.424.109.447
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	4.434.068.961.336	4.622.697.231.503	104,25	4.553.854.434.140
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		48.442.043.648.831	49.139.745.715.234	101,44	45.608.404.729.501
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT					
9	Dana Perimbangan		20.189.140.030.470	20.124.459.645.034	99,68	18.831.174.546.549
10	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	17.025.414.266.070	17.049.968.580.672	100,14	16.062.089.109.337
11	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	22.179.718.000	22.179.718.000	-	-
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.3	3.076.020.400	3.076.020.400	100,00	34.127.101.188
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.4	3.138.470.026.000	3.049.235.325.962	97,16	2.734.958.336.024
14	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-		29.684.233.000
15	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2	-	-	-	29.684.233.000
16	Dana Insentif Fiskal		35.175.027.000	35.175.027.000	100,00	-
17	Insentif Fiskal	5.1.1.2.3	35.175.027.000	35.175.027.000	100,00	-
18	Total Pendapatan Transfer (9 + 14 + 16)		20.224.315.057.470	20.159.634.672.034	99,68	18.860.858.779.549
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
20	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	1.996.577.429.044	1.766.153.820.454	88,46	2.821.215.663.258
21	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (20)		1.996.577.429.044	1.766.153.820.454	88,46	2.821.215.663.258
22	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 18 + 21)		70.662.936.135.345	71.065.534.207.722	100,57	67.290.479.172.308
23	BELANJA					
24	BELANJA OPERASI					
25	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.1.a	18.778.026.066.648	17.977.776.327.870	95,74	17.705.440.378.717
26	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.1.1.b	27.281.511.012.549	25.824.444.605.296	94,66	23.613.048.650.099
27	Belanja Bunga	5.1.2.1.1.1.c	258.000.000.000	229.704.491.741	89,03	270.632.758.937
28	Belanja Subsidi	5.1.2.1.1.1.d	5.908.311.604.139	5.539.653.281.534	93,76	6.278.332.984.915
29	Belanja Hibah	5.1.2.1.1.1.e	3.707.368.399.302	3.621.682.896.507	97,69	2.639.327.211.335
30	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.1.f	4.450.476.435.774	4.363.641.476.668	98,05	5.035.404.985.749
31	Jumlah Belanja Operasi (25 s/d 30)		60.383.693.518.412	57.556.903.079.616	95,32	55.542.186.969.752
32	BELANJA MODAL					
33	Belanja Tanah	5.1.2.1.1.2.a	837.728.164.500	442.600.308.470	52,83	880.953.900.338
34	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.1.1.2.b	3.085.131.092.839	2.822.976.130.249	91,50	1.798.854.059.095
35	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.1.2.c	2.556.806.970.333	1.653.055.663.410	64,65	1.735.904.917.006
36	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.1.1.2.d	4.222.738.767.561	3.799.027.573.476	89,97	4.264.727.292.528
37	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.1.1.2.e	147.778.730.773	139.600.392.693	94,47	127.754.673.737
38	Jumlah Belanja Modal (33 s/d 37)		10.850.183.726.006	8.857.260.068.298	81,63	8.808.194.842.704
39	BELANJA TAK TERDUGA					
40	Belanja Tak Terduga	5.1.2.1.1.3	554.562.887.668	-	-	29.976.747.630
41	Jumlah Belanja Tak Terduga (40)		554.562.887.668	-	-	29.976.747.630
42	Jumlah Belanja (31 + 38 + 41)		71.788.440.132.086	66.414.163.147.914	92,51	64.380.358.560.086
43	TRANSFER					
44	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN					
45	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.2.1.1.4	356.446.480.500	356.446.480.500	100,00	484.762.660.210
46	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (45)		356.446.480.500	356.446.480.500	100,00	484.762.660.210
47	Jumlah Transfer		356.446.480.500	356.446.480.500	100,00	484.762.660.210
48	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (42 + 47)		72.144.886.612.586	66.770.609.628.414	92,55	64.865.121.220.296
49	SURPLUS/DEFISIT (22 - 48)		(1.481.950.477.241)	4.294.924.579.308		2.425.357.952.012
50	PEMBIAYAAN					
51	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
52	Penggunaan SiLPA	5.1.3.1.1	8.600.096.664.254	8.600.096.664.254	100,00	9.721.718.831.341
53	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2	295.220.990.938	286.277.630.136	96,97	979.251.480.334
54	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.1.3.1.3	-	190.589.666	-	393.892.140
55	Jumlah Penerimaan (52 s/d 54)		8.895.317.655.192	8.886.564.884.056	99,90	10.701.364.203.815

No.	Uraian	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 31 Desember 2023 (Audited)	(%)	Realisasi 31 Desember 2022 (Audited)
56	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	5.434.678.551.982	4.836.397.306.901	88,99	3.492.066.426.925
58	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.3.2.2	1.802.671.036.394	1.802.671.036.394	100,00	1.034.559.064.648
59	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	5.1.3.2.3	176.017.589.575	-	-	-
60	Jumlah Pengeluaran (57 s/d 59)		7.413.367.177.951	6.639.068.343.295	89,56	4.526.625.491.573
61	PEMBIAYAAN NETO (55 - 60)		1.481.950.477.241	2.247.496.540.761		6.174.738.712.242
62	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (49 + 61)			6.542.421.120.069		8.600.096.664.254

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 12 Juli 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono



**LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Saldo Anggaran Lebih Awal		8.600.096.664.254	9.721.718.831.341
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		(8.600.096.664.254)	(9.721.718.831.341)
Subtotal	5.2	-	-
Pendapatan		71.065.534.207.722	67.290.479.172.308
Belanja		(66.770.609.628.414)	(64.865.121.220.296)
Surplus (Defisit)	5.2	4.294.924.579.308	2.425.357.952.012
Penerimaan Pembiayaan		8.886.564.884.056	10.701.364.203.815
Pengeluaran Pembiayaan		(6.639.068.343.295)	(4.526.625.491.573)
Pembiayaan - Neto	5.2	2.247.496.540.761	6.174.738.712.242
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	5.2	6.542.421.120.069	8.600.096.664.254
Saldo Anggaran Lebih Akhir Setelah Penyesuaian		6.542.421.120.069	8.600.096.664.254

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 12 Juli 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono



LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
<u>PENDAPATAN</u>					
Pendapatan Asli Daerah					
Pendapatan Pajak Daerah	5.3.1.1.1.1	44.365.069.145.521	41.170.048.269.526	3.195.020.875.995	7,76
Pendapatan Retribusi Daerah	5.3.1.1.1.2	461.646.047.887	405.377.342.340	56.268.705.547	13,88
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.1.3	3.393.855.897.994	2.531.874.123.030	861.981.774.964	34,05
Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.1.4	28.284.884.221.263	11.003.576.347.463	17.281.307.873.800	157,05
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		76.505.455.312.665	55.110.876.082.359	21.394.579.230.306	38,82
Pendapatan Transfer					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	5.3.1.1.2.1	20.669.456.449.952	18.206.765.299.557	2.462.691.150.395	13,53
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.3.1.1.2.2	22.179.718.000	-	22.179.718.000	-
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	5.3.1.1.2.3	3.076.020.400	34.127.101.188	(31.051.080.788)	(90,99)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	5.3.1.1.2.4	3.049.066.285.962	2.734.958.336.024	314.107.949.938	11,48
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Dana Insentif Daerah (DID) - LO	5.3.1.1.2.5	-	29.684.233.000	(29.684.233.000)	(100,00)
Insentif Fiskal - LO					
Insentif Fiskal - LO	5.3.1.1.2.6	35.175.027.000	-	35.175.027.000	-
Jumlah Pendapatan Transfer		23.778.953.501.314	21.005.534.969.769	2.773.418.531.545	13,20
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah					
Pendapatan Hibah	5.3.1.1.3	3.584.721.532.629	117.982.425.171.075	(114.397.703.638.446)	(96,96)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		3.584.721.532.629	117.982.425.171.075	(114.397.703.638.446)	(96,96)
JUMLAH PENDAPATAN		103.869.130.346.608	194.098.836.223.203	(90.229.705.876.595)	(46,49)
<u>BEBAN</u>					
Beban Operasi					
Beban Pegawai	5.3.1.2.1.a	17.978.251.780.755	17.737.442.650.078	240.809.130.677	1,36
Beban Barang	5.3.1.2.1.b	8.368.039.918.686	7.443.125.677.688	924.914.240.998	12,43
Beban Jasa	5.3.1.2.1.c	15.897.400.048.649	15.506.193.249.916	391.206.798.733	2,52
Beban Pemeliharaan	5.3.1.2.1.d	2.347.768.127.910	1.371.502.229.140	976.265.898.770	71,18
Beban Perjalanan Dinas	5.3.1.2.1.e	144.239.199.856	129.352.797.885	14.886.401.971	11,51
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.3.1.2.1.f	179.286.179.744	105.016.438.189	74.269.741.555	70,72
Beban Bunga	5.3.1.2.1.g	229.413.542.369	273.264.992.536	(43.851.450.167)	(16,05)
Beban Subsidi	5.3.1.2.1.h	5.482.558.366.839	6.108.748.040.172	(626.189.673.333)	(10,25)
Beban Hibah	5.3.1.2.1.i	3.623.927.568.369	2.453.481.993.510	1.170.445.574.859	47,71
Beban Bantuan Sosial	5.3.1.2.1.j	4.300.981.697.194	4.842.998.268.395	(542.016.571.201)	(11,19)
Beban Penyisihan Piutang	5.3.1.2.1.k	1.018.310.129.789	1.005.397.111.523	12.913.018.266	1,28
Beban Lain-lain	5.3.1.2.1.l	1.470.465.936.556	864.723.070.489	605.742.866.067	70,05
Jumlah Beban Operasi		61.040.642.496.716	57.841.246.519.521	3.199.395.977.195	5,53
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.3.1.2.2	7.207.960.765.111	6.901.334.391.937	306.626.373.174	4,44
Beban Transfer					
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.2.3	356.446.480.500	484.762.660.210	(128.316.179.710)	(26,47)
Jumlah Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		356.446.480.500	484.762.660.210	(128.316.179.710)	(26,47)
JUMLAH BEBAN		68.605.049.742.327	65.227.343.571.668	3.377.706.170.659	5,18
JUMLAH SURPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL		35.264.080.604.281	128.871.492.651.535	(93.607.412.047.254)	(72,64)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
<u>SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>					
Surplus Non Operasional	5.3.2.1				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		3.722.940.118	17.172.952.663	(13.450.012.545)	(78,32)
Jumlah Surplus Non Operasional		3.722.940.118	17.172.952.663	(13.450.012.545)	(78,32)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		3.722.940.118	17.172.952.663	(13.450.012.545)	(78,32)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		35.267.803.544.399	128.888.665.604.198	(93.620.862.059.799)	(72,64)
<u>POS LUAR BIASA</u>	5.3.3				
Beban Luar Biasa					
Beban Luar Biasa		3.025.742.350	-	3.025.742.350	-
Jumlah Beban Luar Biasa		3.025.742.350	-	3.025.742.350	-
POS LUAR BIASA		(3.025.742.350)	-	(3.025.742.350)	-
SURPLUS	5.3.4	35.264.777.802.049	128.888.665.604.198	(93.623.887.802.149)	(72,64)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 12 Juli 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono





**LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
EKUITAS AWAL	5.4.1	665.549.886.851.294	524.529.268.466.569
KOREKSI EKUITAS	5.4.2		
Koreksi Penyajian Piutang	5.4.2.a	78.718.584.165	120.514.793.012
Koreksi Penyajian Penyisihan Piutang	5.4.2.b	94.027.206.176	70.142.702.662
Koreksi Penyajian Persediaan	5.4.2.c	104.112.303.551	(47.028.964.901)
Koreksi Penyajian Investasi:	5.4.2.d		
Koreksi Penyajian Nilai Investasi Permanen		-	297.477.899.072
Koreksi Penyajian Nilai Investasi Non Permanen		190.589.666	393.892.140
Koreksi Penyajian Saldo Awal Aset Tetap dan Aset Lainnya	5.4.2.e	(2.960.315.473.964)	12.093.014.360.845
Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya	5.4.2.f	(311.042.566.786)	(422.343.884.636)
Koreksi Penyajian Kewajiban	5.4.2.g	251.929.325.224	(2.218.060.196)
Penyesuaian Lainnya:	5.4.2.h		
Hasil Perkembangbiakan Hewan/Tanaman		-	2.702.910.315
Pengakuan Kas atas Bantuan Sosial yang belum disalurkan		-	19.297.132.214
Jumlah Koreksi Ekuitas		(2.742.380.031.968)	12.131.952.780.527
SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL	5.4.3	35.264.777.802.049	128.888.665.604.198
EKUITAS AKHIR	5.4.4	698.072.284.621.375	665.549.886.851.294

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 12 Juli 2024
 Pj. Gubernur Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta,

 Heru Budi Hartono



NERACA
TAHUN ANGGARAN 2023
AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1	5.454.832.626.327	6.030.074.927.473
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.2	109.645.250	24.701.154
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.3	329.382.648	3.275.220.034
Kas dan Setara Kas BLUD	5.5.1.1.4	1.008.514.643.569	2.490.726.625.269
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	5.5.1.1.5	85.056.746.795	81.840.507.972
Kas Lainnya	5.5.1.1.6	13.543.921.396	32.709.285.735
Piutang Pajak Daerah	5.5.1.2.1	11.679.786.241.137	10.995.901.553.320
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(6.386.116.946.848)	(5.665.302.404.549)
Piutang Retribusi	5.5.1.2.2	68.096.444.794	63.956.433.222
Penyisihan Piutang Retribusi		(51.563.663.295)	(57.157.173.058)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.2.3	3.030.838.594.857	3.104.392.252.746
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(1.696.690.000.868)	(1.594.910.423.302)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.2.4	8.295	359.067.395.091
Piutang Lainnya	5.5.1.2.5	374.339.155.304	156.416.094.213
Penyisihan Piutang Lainnya		(139.785.192.718)	(32.502.879.207)
Beban Dibayar di Muka	5.5.1.3	501.750.677.798	751.750.847.755
Persediaan	5.5.1.4	1.263.775.601.406	1.483.957.714.569
Jumlah Aset Lancar		15.206.617.885.847	18.204.220.678.437
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Nonpermanen	5.5.1.2.1	550.000.000.000	550.000.000.000
Investasi dalam Dana Bergulir		1.099.780.201.964	1.099.970.791.630
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		(549.780.201.964)	(549.970.791.630)
Investasi Permanen	5.5.1.2.2	84.009.599.245.749	77.764.759.088.872
Jumlah Investasi Jangka Panjang		84.559.599.245.749	78.314.759.088.872
Properti Investasi			
Properti Investasi - Tanah	5.5.1.3	3.367.064.778.502	1.074.729.363.502
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	5.5.1.3	1.542.937.242.079	453.001.595.872
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.1.3	14.163.299.823	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(448.002.283.626)	(296.493.181.290)
Jumlah Properti Investasi		4.476.163.036.778	1.231.237.778.084
Aset Tetap			
Tanah	5.5.1.4.1	515.882.640.362.479	466.211.312.146.548
Peralatan dan Mesin	5.5.1.4.2	32.771.280.763.093	30.534.777.685.455
Gedung dan Bangunan	5.5.1.4.3	47.160.243.335.958	46.684.316.665.100
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.1.4.4	61.937.757.653.148	55.993.465.847.492
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.4.5	1.388.435.196.833	1.305.487.303.782
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.1.4.6	2.516.920.525.377	3.489.601.572.718
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.5.1.4.7	(82.370.545.608.448)	(76.113.631.291.993)
Jumlah Aset Tetap		679.286.732.228.440	528.105.329.929.102
Aset Lainnya			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.5.1	36.651.951.367	36.714.362.261
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.1.5.2	6.524.489.356.721	6.561.259.793.794
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		(393.892.000.498)	(394.222.183.759)
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.3	634.599.864.666	566.900.953.743
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(537.631.910.464)	(364.438.170.410)
Aset Lain-lain	5.5.1.5.4	33.076.672.679.419	59.324.093.700.875
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(7.371.702.525.617)	(6.609.534.324.657)
Jumlah Aset Lainnya		31.969.187.415.594	59.120.774.131.847
JUMLAH ASET		715.498.299.812.408	684.976.321.606.342

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang PFK	5.5.2.1.1	652.047.503	1.303.569.666
Utang Bunga Pinjaman	5.5.2.1.2	14.739.619.252	15.030.568.624
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.5.2.1.3	1.861.669.834.064	1.684.301.177.092
Pendapatan Diterima di Muka	5.5.2.1.4	216.488.454.965	505.256.654.326
Utang Belanja	5.5.2.1.5	2.147.127.573.272	2.344.638.184.948
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.1.6	16.377.359.980	13.126.032.102
Utang Jaminan	5.5.2.1.7	6.188.082.151	6.244.285.214
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.263.242.971.187	4.569.900.471.972
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.2.2	13.162.772.219.846	14.856.534.283.076
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		13.162.772.219.846	14.856.534.283.076
JUMLAH KEWAJIBAN		17.426.015.191.033	19.426.434.755.048
EKUITAS	5.5.3	698.072.284.621.375	665.549.886.851.294
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		715.498.299.812.408	684.976.321.606.342

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 12 Juli 2024
Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	6.562.186.965.985	8.638.651.267.637
Kas di Kas Daerah	5.454.632.626.327	6.030.074.927.473
Kas Daerah	5.454.632.626.327	6.030.074.927.473
Kas di Bendahara Penerimaan	109.645.250	24.701.154
Pendapatan yang Belum Disetor	108.493.750	22.393.654
Asuransi yang Belum Disetor	1.151.500	2.307.500
Kas di Bendahara Pengeluaran	329.382.648	3.275.220.034
Sisa Belanja UP/GU	329.382.648	244.180.601
Sisa Belanja TU	-	1.102.651.076
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	-	391.677.050
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya	-	1.536.711.307
Kas dan Setara Kas BLUD	1.008.514.643.569	2.490.726.625.269
Kas Tunai	1.197.791.647	864.757.395
Kas di Bank	1.000.840.280.678	2.484.380.139.568
Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	123.669.297	117.310.520
Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	134.902.031	196.548.284
Uang Muka Pasien RSUD/K	375.151.361	594.485.630
Uang Jaminan Kerjasama	3.289.499.147	2.052.981.500
Uang Titipan	2.474.424.408	2.515.902.372
Uang Muka Jasa BLUD	78.925.000	4.500.000
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	85.056.746.795	81.840.507.972
Kas Dana BOS	84.918.734.579	81.649.359.328
Kas Dana BOP Kesetaraan	138.012.216	191.148.644
Kas Lainnya	13.543.921.396	32.709.285.735
Kas Lainnya	13.543.921.396	32.709.285.735
Piutang Pajak Daerah	11.679.786.241.137	10.995.901.553.320
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	127.437.900.750	127.849.640.260
Piutang Pajak Hotel	31.223.713.068	34.179.090.012
Piutang Pajak Restoran	141.327.184.933	145.189.427.505
Piutang Pajak Hiburan	77.344.622.956	83.960.193.416
Piutang Pajak Reklame	555.601.209.780	575.358.665.199
Piutang Pajak Parkir	12.081.179.716	13.533.755.103
Piutang Pajak Air Tanah	591.166.273.424	576.008.114.970
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.926.116.872.186	9.231.328.177.637
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	217.487.284.324	208.494.489.218
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(6.386.116.946.848)	(5.665.302.404.549)
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	(96.636.018.561)	(89.538.528.062)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(24.914.164.674)	(24.962.381.089)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(111.902.947.023)	(112.549.417.285)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(62.686.463.649)	(61.193.283.428)
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(425.829.255.268)	(414.793.616.564)
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(10.703.994.829)	(10.427.227.576)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(556.743.033.749)	(552.074.638.153)
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	(4.972.172.331.387)	(4.332.996.877.566)
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(124.528.737.708)	(66.766.434.826)
Piutang Pajak Daerah - Neto	5.293.669.294.289	5.330.599.148.771

Uraian	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
Piutang Retribusi	68.096.444.794	63.956.433.222
Piutang Retribusi Jasa Umum	7.795.430.587	6.050.702.596
Piutang Retribusi Jasa Usaha	51.635.978.940	49.270.009.786
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	8.665.035.267	8.635.720.840
Penyisihan Piutang Retribusi	(51.563.663.295)	(57.157.173.058)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(4.309.044.201)	(4.855.572.925)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(42.283.623.220)	(48.702.048.113)
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(4.970.995.874)	(3.599.552.020)
Piutang Retribusi - Neto	16.532.781.499	6.799.260.164
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	540.968.971	540.968.971
Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	540.968.971	540.968.971
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	(540.968.971)	(540.968.971)
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	(540.968.971)	(540.968.971)
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - Neto	-	-
Piutang Jasa Giro	1.775.710.904	-
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	1.775.342.466	-
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	368.438	-
Piutang Pendapatan Bunga	4.787	-
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.787	-
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	17.053.387.096	17.053.387.096
Piutang Kerugian Uang Daerah	17.053.387.096	17.053.387.096
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(15.681.385.349)	(15.681.385.349)
Penyisihan Piutang Kerugian Uang Daerah	(15.681.385.349)	(15.681.385.349)
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - Neto	1.372.001.747	1.372.001.747
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.130.615.950	1.072.130.519
Penyisihan Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	(5.653.080)	(5.360.652)
Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - Neto	1.124.962.870	1.066.769.867
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	1.164.762.928
Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	(5.823.815)
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - Neto	-	1.158.939.113
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	865.718.779.090	692.866.383.801
Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah Tak Tertagih	(509.610.862.514)	(461.455.566.033)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Neto	356.107.916.576	231.410.817.768
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	17.821.739.466	17.531.173.998
Penyisihan Piutang Denda Retribusi	(17.624.758.053)	(17.529.418.885)
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah - Neto	196.981.413	1.755.113
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	16.431.747.538	23.923.877.879
Piutang BLUD	414.630.180.236	424.333.700.559
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	381.034.672.279	418.413.792.756
Piutang Hasil Kerjasama BLUD	31.553.049.422	4.981.374.258
Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	2.042.458.535	938.533.545
Penyisihan Piutang BLUD	(93.592.778.733)	(83.977.555.225)
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	(65.500.600.696)	(83.098.652.895)
Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD	(26.286.983.260)	(835.114.946)
Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	(1.805.194.777)	(43.787.384)
Piutang BLUD - Neto	321.037.401.503	340.356.145.334

Uraian	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	26.743.584.888	26.549.569.976
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah	(25.991.600.505)	(26.109.033.342)
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - Neto	751.984.383	440.536.634
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	6.390.310.880	4.094.591.130
Penyisihan Piutang Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	(1.387.787.838)	(1.419.431.479)
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - Neto	5.002.523.042	2.675.159.651
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	44.146.360.933	24.658.706.066
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(24.506.039.621)	(18.419.998.328)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Neto	19.640.321.312	6.238.707.738
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.618.455.204.118	1.870.602.999.823
Piutang Rekomendasi HGB HPL	-	11.098.384.477
Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah	842.311.305.796	952.640.141.931
Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN	41.923.253.432	41.939.812.481
Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	26.444.238.419	23.146.462.311
Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	121.230.000	148.518.000
Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	707.655.176.471	841.629.680.623
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	(1.007.748.166.204)	(969.765.881.223)
Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB HPL	-	(60.418.625)
Penyisihan Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah	(324.828.688.287)	(206.893.931.053)
Penyisihan Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN	(41.923.253.432)	(41.939.812.481)
Penyisihan Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	(22.665.126.114)	(20.043.307.941)
Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	(69.609.000)	(23.610.600)
Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(618.261.489.371)	(700.804.800.523)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - Neto	610.707.037.914	900.837.118.600
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	8.295	359.067.395.091
Piutang Dana Transfer Umum-DBH	8.295	359.067.395.091
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Neto	8.295	359.067.395.091
Piutang Lainnya	374.339.155.304	156.416.094.213
Uang Muka	229.757.096.738	118.214.382.454
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	229.757.096.738	118.214.382.454
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	406.051.698	384.050.319
Piutang Tunjangan DPRD	4.419.140.000	4.419.140.000
Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD	(4.419.140.000)	(4.419.140.000)
Piutang Tunjangan DPRD - Neto	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	130.297.979.742	23.822.460.000
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan pengembalian UMK pengadaan Trans Jakarta	(130.297.979.742)	(23.822.460.000)
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta - Neto	-	-
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	9.458.887.126	9.576.061.440
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(5.068.072.976)	(4.261.279.207)
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah - Neto	4.390.814.150	5.314.782.233

Uraian	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
Beban Dibayar di Muka	501.750.677.798	751.750.847.755
Beban Barang Dibayar di Muka	198.718.344.133	243.190.739.166
Beban Jasa Dibayar di Muka	290.653.783.872	454.214.500.840
Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka	12.378.549.793	54.345.607.749
Persediaan	1.263.775.601.406	1.483.957.714.569
Barang Pakai Habis	1.256.899.948.763	1.477.991.389.619
Barang Tak Habis Pakai	6.875.652.643	5.966.324.950
JUMLAH ASET LANCAR	15.206.617.885.847	18.204.220.678.437
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	550.000.000.000	550.000.000.000
Dana Bergulir	1.099.780.201.964	1.099.970.791.630
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(549.780.201.964)	(549.970.791.630)
Investasi Permanen	84.009.599.245.749	77.764.759.088.872
Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Jaya	3.449.544.925.780	2.047.609.883.109
Penyertaan Modal kepada Perumda Dharma Jaya	466.125.029.737	154.096.219.186
Penyertaan Modal kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya	5.554.928.504.064	5.633.090.329.007
Penyertaan Modal kepada Perumda Pasar Jaya	1.530.748.892.361	1.496.500.990.790
Penyertaan Modal kepada Perumda PAL Jaya	1.246.431.260.941	1.218.549.464.647
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Propertindo	23.991.197.246.177	21.990.961.378.992
Penyertaan Modal kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta	23.887.901.546.678	21.848.148.326.004
Penyertaan Modal kepada PT Bank DKI Jakarta	10.982.535.682.062	10.192.081.387.000
Penyertaan Modal kepada PT Food Station Tjipinang	617.635.223.340	653.040.548.449
Penyertaan Modal kepada PT Transportasi Jakarta	4.701.221.698.896	5.309.862.763.903
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Tourisindo	567.235.405.681	657.565.447.494
Penyertaan Modal kepada PT Penjamin Kredit Daerah	413.139.843.427	393.933.853.943
Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya Ancol	1.185.955.200.453	1.113.095.520.425
Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya	4.688.253.593.788	4.337.534.937.488
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	187.918.474.113	162.303.174.969
Penyertaan Modal kepada PT Delta Djakarta Tbk	244.322.763.251	261.880.908.466
Penyertaan Modal kepada PT Cemani Toka	27.059.360.000	27.059.360.000
Penyertaan Modal kepada PT Kawasan Berikat Nusantara	209.692.695.000	209.692.695.000
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta International Expo	39.375.000.000	39.375.000.000
Penyertaan Modal kepada PT Grahasahari Suryajaya	3.951.000.000	3.951.000.000
Penyertaan Modal kepada PT Asuransi Bangun Askrida	13.080.000.000	13.080.000.000
Penyertaan Modal kepada PT Pakuan International	1.345.900.000	1.345.900.000
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	84.559.599.245.749	78.314.759.088.872
PROPERTI INVESTASI	4.924.165.320.404	1.527.730.959.374
Properti Investasi - Tanah	3.367.064.778.502	1.074.729.363.502
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	1.542.937.242.079	453.001.595.872
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.163.299.823	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(448.002.283.626)	(296.493.181.290)
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	(447.294.118.634)	(296.493.181.290)
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(708.164.992)	-
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	4.476.163.036.778	1.231.237.778.084
ASET TETAP	661.657.277.836.888	604.218.961.221.095
Tanah	515.882.640.362.479	466.211.312.146.548
Peralatan dan Mesin	32.771.280.763.093	30.534.777.685.455
Gedung dan Bangunan	47.160.243.335.958	46.684.316.665.100
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	61.937.757.653.148	55.993.465.847.492
Aset Tetap Lainnya	1.388.435.196.833	1.305.487.303.782
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.516.920.525.377	3.489.601.572.718
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(82.370.545.608.448)	(76.113.631.291.993)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(26.998.498.994.240)	(25.456.989.093.024)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(24.426.328.768.702)	(23.208.341.191.467)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(30.843.293.737.787)	(27.352.039.476.218)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(102.424.107.719)	(96.261.531.284)
JUMLAH ASET TETAP	579.286.732.228.440	528.105.329.929.102

Uraian	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	36.651.951.367	36.714.362.261
Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	36.651.951.367	36.714.362.261
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	1.029.914.960.000	1.078.782.537.270
Kerja Sama Pemanfaatan	1.901.175.286.258	1.896.239.648.072
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	1.209.123.512.500	1.209.123.512.500
Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	1.045.325.528.858	1.040.247.148.858
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan	1.338.950.069.105	1.336.866.947.094
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(393.892.000.498)	(394.222.183.759)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	(11.053.796.400)	(33.307.741.563)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	(46.926.468.758)	(41.990.830.572)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	(2.700.000)	(2.250.000)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	(285.579.528.800)	(272.111.956.667)
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan	(50.329.508.540)	(46.809.404.957)
Jumlah Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.130.597.356.223	6.167.037.610.035
Aset Tidak Berwujud		
Software	269.888.332.098	-
Aset Tidak Berwujud Lainnya	364.711.532.568	566.900.953.743
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(537.631.910.464)	(364.438.170.410)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(245.990.650.846)	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(291.641.259.618)	(364.438.170.410)
Jumlah Aset Tidak Berwujud	96.967.954.202	202.462.783.333
Aset Lain-Lain		
Aset Rusak Berat/Usang	4.382.335.026.906	3.483.214.038.893
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	489.746.555.352	354.972.901.227
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	973.782.683.243	973.782.683.243
Aset Tetap - Fasilitasi Fasum	16.290.870.877.648	48.326.465.918.565
Kas Dikonsinyasikan	27.413.446.297	-
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	573.280.906.692	861.505.080.661
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	4.475.775.978.273	3.117.706.595.495
Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya	10.697.454.729	271.331.320.218
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.852.769.750.279	1.935.115.162.573
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(7.371.702.525.617)	(6.609.534.324.657)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(3.487.075.355.149)	(2.778.232.763.483)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasilitasi Fasum	(2.193.154.079.554)	(2.562.307.880.756)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	(7.402.394.895)	(7.402.394.895)
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(84.618.783.387)	(109.823.114.458)
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(1.547.280.825.586)	(1.125.297.861.193)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(52.171.087.046)	(26.470.309.872)
Jumlah Aset Lain-Lain	25.704.970.153.802	52.714.559.376.218
JUMLAH ASET LAINNYA	31.969.187.415.594	59.120.774.131.847
JUMLAH ASET	715.498.299.812.408	684.976.321.606.342

Uraian	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	652.047.503	1.303.569.666
Utang Bunga Pinjaman	14.739.619.252	15.030.568.624
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	14.739.619.252	15.030.568.624
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.861.669.834.064	1.684.301.177.092
Bagian Lancar Utang - IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)	33.629.623.430	33.629.623.430
Bagian Lancar Utang - PEN	1.828.040.210.634	1.650.671.553.662
Pendapatan Diterima di Muka	216.488.454.965	505.256.654.326
Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah	3.506.186.150	168.989.781.534
Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah	24.944.175.550	25.787.212.504
Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	112.033.643.034	138.394.810.082
Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	39.266.042.398	42.936.900.358
Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	910.687.396	765.169.321
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	2.988.648.669	3.185.354.028
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD	19.909.645.124	10.649.066.238
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD yang Sah	12.929.419.406	29.086.263.275
Pendapatan Diterima di Muka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	7.238	85.462.096.986
Utang Belanja	2.147.127.573.272	2.344.638.184.948
Utang Belanja SKPD	1.264.677.003.896	1.045.818.249.360
Utang Belanja Pegawai	897.763.135.326	886.733.206.383
Utang Belanja Barang dan Jasa	216.423.240.256	88.883.621.570
Utang Belanja Barang	12.002.332.272	2.143.947.736
Utang Belanja Jasa Non TALI	119.392.881.363	4.272.085.742
Utang Belanja TALI	56.801.584.954	53.612.444.308
Utang Belanja Pemeliharaan	27.093.304.167	28.855.143.784
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.133.137.500	-
Utang Belanja Modal	150.490.628.314	70.201.421.407
Utang Belanja Modal Tanah	-	356.250.700
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.425.902	1.917.400.000
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.447.682.079	47.063.723.415
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	72.808.520.333	20.864.047.292
Utang Belanja BLUD	193.623.555.598	302.426.691.303
Utang Belanja Pegawai BLUD	14.696.755.850	24.783.167.032
Utang Belanja Barang Jasa BLUD	176.808.371.586	234.214.471.547
Utang Belanja Modal BLUD	2.118.428.162	43.429.052.724
Utang Belanja Subsidi	688.827.013.778	993.924.457.622
Utang Belanja Hibah	-	2.468.786.663
Utang Jangka Pendek Lainnya	16.377.359.980	13.126.032.102
Utang Kompensasi Pajak	4.247.474.531	3.682.084.268
Utang Restitusi Pajak	1.178.722.745	963.302.495
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	169.040.000	-
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang Sah	60.600.192	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	10.628.454.363	8.440.296.226
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	93.068.149	40.349.113
Utang Jaminan	6.188.082.151	6.244.285.214
Utang Jaminan Pajak Daerah	2.958.583.004	4.251.303.714
Utang Jaminan BLUD	3.229.499.147	1.992.981.500
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.263.242.971.187	4.569.900.471.972

Uraian	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	13.162.772.219.846	14.856.534.283.076
Utang Dalam Negeri - IBRD (Proyek JUFMP/JEDI)	252.727.124.999	286.356.748.429
Utang Dalam Negeri - JICA (Proyek MRT)	7.576.369.926.244	7.290.092.296.108
Utang PEN	5.333.675.168.603	7.280.085.238.539
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	13.162.772.219.846	14.856.534.283.076
JUMLAH KEWAJIBAN	17.426.015.191.033	19.426.434.755.048
JUMLAH EKUITAS	698.072.284.621.375	665.549.886.851.294
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	715.498.299.812.408	684.976.321.606.342

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 12 Juli 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono



LAPORAN ARUS KAS TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 Audited (Rp)	31 Desember 2022 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk:	5.6.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.a	43.516.481.672.833	40.275.148.196.210
Penerimaan Retribusi daerah	5.6.1.1.b	454.697.560.911	376.977.989.704
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.c	545.869.249.987	402.424.109.447
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.6.1.1.d	4.583.119.605.650	4.524.662.808.134
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.6.1.1.e	16.304.845.339.366	16.062.089.109.337
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.6.1.1.f	3.076.020.400	34.127.101.188
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.6.1.1.g	2.263.034.544.382	1.978.740.030.341
Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	5.6.1.1.h	22.179.718.000	-
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.6.1.1.i	-	29.684.233.000
Penerimaan Insentif Fiskal	5.6.1.1.j	35.175.027.000	-
Penerimaan Hibah	5.6.1.1.k	30.905.119.064	168.308.655.464
Jumlah Arus Kas Masuk		67.759.383.857.593	63.852.162.232.825
Arus Kas Keluar:	5.6.1.2		
Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.a	17.977.776.327.870	17.705.440.378.717
Pembayaran Barang	5.6.1.2.b	25.824.444.605.296	23.611.834.997.891
Pembayaran Bunga	5.6.1.2.c	229.704.491.741	270.632.758.937
Pembayaran Subsidi	5.6.1.2.d	5.539.653.281.534	6.278.332.984.915
Pembayaran Hibah	5.6.1.2.e	2.835.482.114.927	1.883.108.905.652
Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.2.f	4.363.641.476.668	5.009.775.852.095
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.2.g	356.446.480.500	484.762.660.210
Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.2.h	-	29.976.747.630
Jumlah Arus Kas Keluar		57.127.148.778.536	55.273.865.285.847
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		10.632.235.079.057	8.578.296.946.978
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk:	5.6.2.1		
Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang	5.6.2.1.a	3.145.400.000	12.033.389.424
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	5.6.2.1.b	1.435.586.998	6.637.610.808
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.6.2.1.b	2.287.353.120	10.535.341.855
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.6.2.1.c	190.589.666	393.892.140
Jumlah Arus Kas Masuk		7.058.929.784	29.600.234.227
Arus Kas Keluar:	5.6.2.2		
Perolehan Tanah	5.6.2.2.a	442.600.308.470	880.953.900.338
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2.2.a	2.822.976.130.249	1.796.060.808.255
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.2.2.a	1.653.055.663.410	1.733.311.157.080
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.2.a	3.799.027.573.476	4.264.727.292.528
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2.a	139.600.392.693	129.483.946.737
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.6.2.2.b	2.814.870.975.375	822.570.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar		11.672.131.043.673	9.627.107.104.938
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(11.665.072.113.889)	(9.597.506.870.711)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk:	5.6.3.1		
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	957.790.671.029
Jumlah Arus Kas Masuk		-	957.790.671.029
Arus Kas Keluar:	5.6.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		1.057.547.795.088	1.034.559.064.648
Jumlah Arus Kas Keluar		1.057.547.795.088	1.034.559.064.648
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(1.057.547.795.088)	(76.768.393.619)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 Audited (Rp)	31 Desember 2022 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk:	5.6.4.1		
Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga	5.6.4.1.a	-	10.000.000
Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	5.6.4.1.b	1	72.063.772
Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama	5.6.4.1.c	1.684.920.147	252.244.000
Penerimaan Deposit Pasien - BLUD	5.6.4.1.d	6.759.297.420	9.700.878.680
Penerimaan Deposit Jasa BLUD	5.6.4.1.e	1.487.097.500	15.100.000
Penerimaan Uang Titipan	5.6.4.1.f	1.701.917.859	1.062.940.346
Penerimaan Kas Lainnya	5.6.4.1.g	13.543.921.396	7.065.436.000
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.1.h	3.778.990.123.701	3.750.728.015.790
Jumlah Arus Kas Masuk		3.804.167.278.024	3.768.906.678.588
Arus Kas Keluar:	5.6.4.2		
Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama	5.6.4.2.a	448.402.500	197.500.000
Pengembalian Uang Titipan BLUD	5.6.4.2.b	1.743.395.823	3.573.974.766
Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	5.6.4.2.c	22.001.380	2
Pengeluaran Deposit Pasien - BLUD	5.6.4.2.d	6.978.631.689	9.559.168.149
Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD	5.6.4.2.e	1.412.672.500	13.700.000
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.2.f	3.779.641.645.864	3.753.333.948.054
Jumlah Arus Kas Keluar		3.790.246.749.756	3.766.678.290.971
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		13.920.528.268	2.228.387.617
Kenaikan (Penurunan) Kas	5.6.5	(2.076.464.301.652)	(1.093.749.929.735)
Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD		8.638.651.267.637	9.732.401.197.372
Saldo Akhir Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD		6.562.186.965.985	8.638.651.267.637

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 12 Juli 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono



**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka kepala daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan Peraturan Perundang-undangan;
- c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- e. posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
- n. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- o. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- q. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;
- r. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang



- Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;
- s. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
 - t. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
 - u. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 - v. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - w. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 911 Tahun 2023 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2023;
 - x. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2023.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, indikator kinerja utama, kebijakan keuangan, perubahan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2023.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran dan pengakuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Dan Laporan Arus Kas.
- BAB VI : Berisi penjelasan atas catatan penting lainnya.
- BAB VII : Berisi penutup yang memuat kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.



BAB II

**EKONOMI MAKRO,
KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi makro digambarkan dalam bentuk capaian kinerja makro yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Selisih
1.	Indeks Pembangunan Manusia	82,77	83,55	0,78
2.	Angka Kemiskinan	4,61%	4,44%	(0,17%)
3.	Angka Pengangguran	7,18%	6,53%	(0,65%)
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,25%	5,00%	(0,25%)
5.	Pendapatan Per Kapita	Rp299,67 Juta	Rp322,62 Juta	Rp22,95 Juta
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,412	0,431	0,019

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024

Penjelasan atas capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

- 1) dimensi pertama pembentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. UHH saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir.
- 2) dimensi kedua adalah pengetahuan yang diukur dengan pendidikan, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan penduduk sejak umur tertentu.



- 3) dimensi ketiga adalah standar hidup layak yang diukur dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Data IPM Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta yang dirilis pada 29 Desember 2023. IPM DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 83,55 meningkat 0.78 poin atau 0,94% dibandingkan tahun 2022 dengan status IPM sangat tinggi ($IPM \geq 80$).

Selama kurun waktu 2020-2023, IPM DKI Jakarta terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 81,92 dan meningkat 1,63 poin menjadi 83,55 pada tahun 2023 atau tumbuh 1,99% selama 4 tahun terakhir. Penguatan ini didukung oleh pertumbuhan semua komponen pembentuknya yakni UHH, HLS RLS dan PPP. Proses pemulihan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat yang terus berlangsung diharapkan mampu mendorong pertumbuhan IPM.

Grafik 2.1

Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Periode 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024

Jika dibandingkan dengan pencapaian IPM se-Indonesia, DKI Jakarta selalu menduduki peringkat tertinggi di antara 34 Provinsi di Indonesia. Bahkan IPM Indonesia yang mencerminkan rata-rata IPM seluruh provinsi sebesar 74,39 berada cukup jauh di bawah angka IPM DKI Jakarta.

b. Angka Kemiskinan

Penjabaran angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 menggunakan data persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret dan September. Data terakhir yang dipublikasi oleh BPS adalah data periode sampai dengan Maret 2023 yang dipublikasi pada tanggal 27 Desember 2023.



Persentase penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2023 mencapai 4,44%. Angka ini menurun 0,17 poin dibandingkan September 2022 dan menurun 0,25 poin dibandingkan Maret 2022. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah upaya meningkatkan pendapatan khususnya pada kelompok masyarakat miskin.

Jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2023 mencapai 478 ribu orang. Angka ini berkurang 17 ribu orang dari September 2022 dan berkurang 24 ribu orang dari Maret 2022. Perekonomian Jakarta terus menunjukkan geliat positif. Hal ini didorong dengan sudah kembali mulai normalnya aktivitas masyarakat setelah diberhentikannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat Covid-19.

Tren jumlah dan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta periode 2019-2023 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2.2

Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Periode 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024

c. Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan laman resmi BPS Provinsi DKI Jakarta, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan pengangguran didefinisikan sebagai berikut:

- 1) angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran;
- 2) pengangguran adalah:
 - a) penduduk yang aktif mencari pekerjaan;
 - b) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;



- c) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; dan
- d) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dalam laman resmi Situs Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2024), dijabarkan bahwa TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Jakarta pada bulan Agustus 2023 sebesar 6,53 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,65 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

Oleh karena itu, menurunnya nilai TPT Provinsi DKI Jakarta di 2023, yakni dari 7,18% di 2022 menjadi 6,53% di 2023, menunjukkan semakin banyaknya suplai tenaga kerja yang termanfaatkan di Provinsi DKI Jakarta pada 2023. Tren TPT Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2023 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2.3

Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan volume barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kategori dalam kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

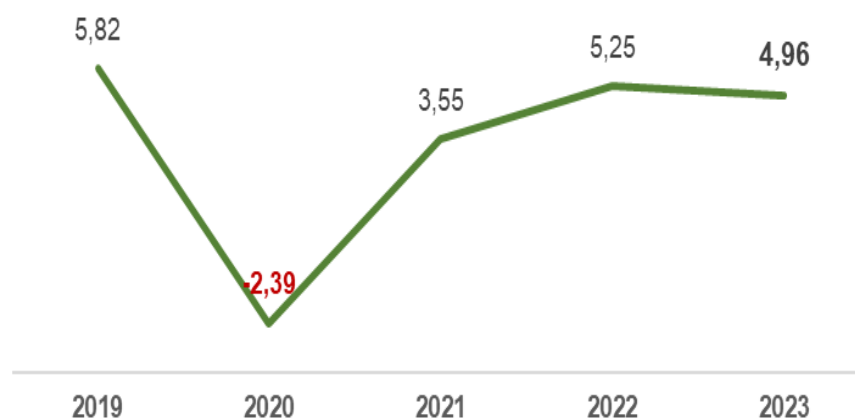
Data pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6 Februari 2024 menunjukkan



ekonomi Jakarta tahun 2023 tumbuh sebesar 4,96 persen, lebih lambat dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,25 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,05 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPR) mengalami pertumbuhan tertinggi 9,84 persen. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta dan Nasional Tahun 2018 - 2023 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2.4

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta dan Nasional Tahun 2018 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024

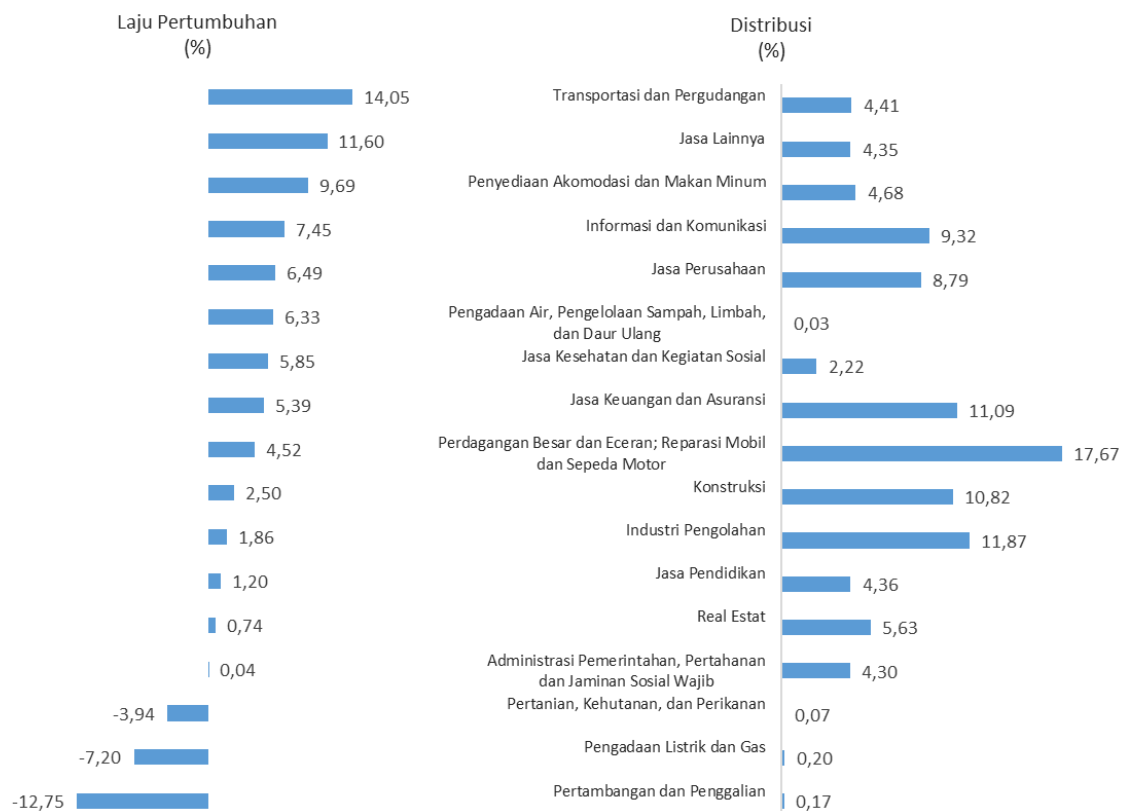
Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,05 persen. Tingginya kinerja transportasi di Jakarta terutama ditopang oleh peningkatan penumpang dan barang pada hampir seluruh moda transportasi. Pertumbuhan tertinggi berikutnya dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 11,60 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,69 persen. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai kontributor perekonomian terbesar tumbuh sebesar 4,52 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian terkontraksi 12,75 persen; Pengadaan Listrik Gas terkontraksi 7,20 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terkontraksi 3,94 persen.

Struktur ekonomi Jakarta menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian Jakarta masih didominasi oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor sebesar 17,67 persen; Industri Pengolahan sebesar 11,87 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 11,09 persen; dan Konstruksi sebesar 10,82 persen. Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 disajikan melalui grafik berikut.



Grafik 2.5

Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024

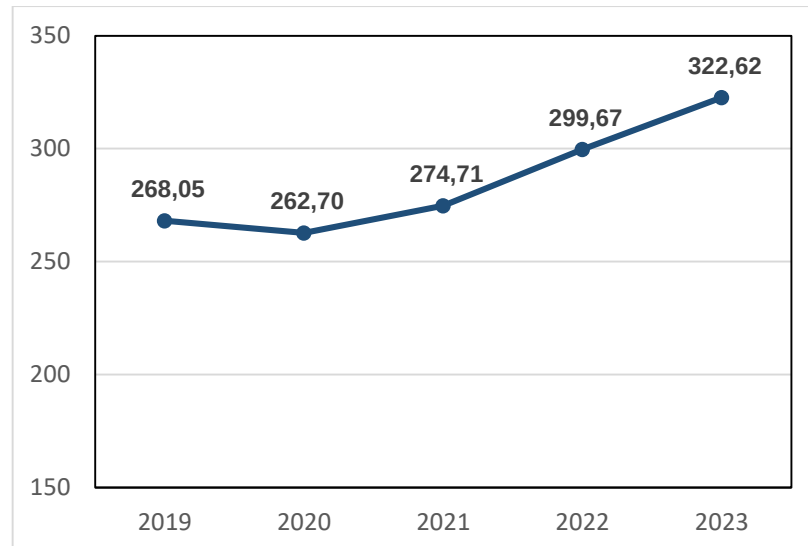
e. Pendapatan Per Kapita

Indikator pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa pendekatan (*proxy*) yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu daerah di mana pendekatan yang paling sering digunakan adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah. Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dan 2023 pada dokumen ini merupakan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang bersumber dari Berita Resmi Statistik yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 6 Februari 2024.

Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Pada 2023, PDRB per kapita tercatat sebesar 322,62 juta rupiah atau meningkat 7,66% dibandingkan tahun 2022. Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta terus meningkat sejak tahun 2019, meskipun sempat mengalami penurunan karena pandemi Covid-19. PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2019-2023 disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 2.6
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
atas Dasar Harga Berlaku dalam Juta Rupiah
Periode 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024

PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2019-2023 menunjukkan tren meningkat meskipun sempat turun pada 2020 dikarenakan pandemi Covid-19.

f. Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DKI Jakarta pada 2023 menggunakan Indeks Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta setiap bulan Maret dan September. Data terakhir yang dipublikasi oleh BPS adalah data periode sampai dengan Maret 2023 yang dipublikasi pada tanggal 27 Desember 2023. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1 di mana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna di mana satu orang dapat memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki apapun. Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2019-2023 disajikan dalam grafik berikut.



Grafik 2.7
Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta



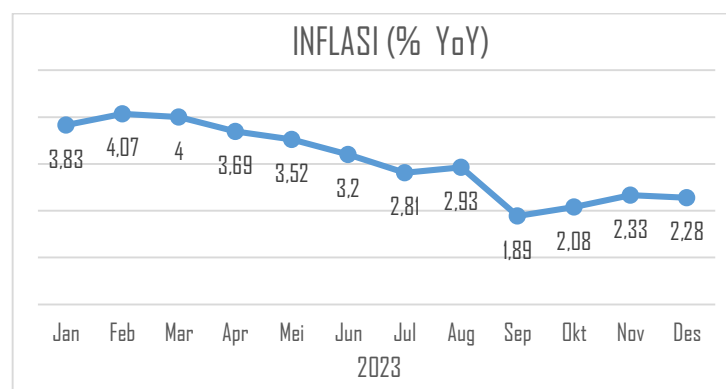
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024

Naiknya ketimpangan yang terjadi pada periode ini menunjukkan gap antara pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas justru semakin tinggi. Angka ketimpangan pada Maret 2023 sebesar 0,431 atau naik 0,019 persen poin dibandingkan kondisi September 2022. Pada periode ini, distribusi penduduk pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah turun 0,60 persen poin menjadi 16,39 persen dibandingkan periode September 2022. Walaupun demikian, menurut kategori Bank Dunia, angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk Jakarta masih berada pada kategori ketimpangan menengah.

g. Inflasi

Berbeda dengan tren inflasi dua tahun sebelumnya yang meningkat akibat adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, pergerakan inflasi (*y-on-y*) sepanjang tahun 2023 di DKI Jakarta menunjukkan tren menurun. Peningkatan inflasi pada tahun 2023 hanya terjadi empat kali yaitu pada bulan Februari, Agustus, Oktober dan November, dengan puncak inflasi sebesar 4,07 persen pada bulan Februari 2023. Hal ini menunjukkan inflasi di Jakarta cukup terkendali di tengah kembali pulihnya perekonomian.

Grafik 2.8
Realisasi Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024



Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Dari sebelas kelompok pengeluaran, sepuluh di antaranya mengalami peningkatan indeks harga atau inflasi dan hanya satu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga atau deflasi. Sepuluh kelompok tersebut yaitu kelompok makanan minuman dan tembakau (6,40 persen), perawatan pribadi dan jasa lainnya (2,84 persen), transportasi (1,42 persen), perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (2,33 persen), penyediaan makanan dan minuman/restoran (1,84 persen), pendidikan (1,69 persen), perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,34 persen), kesehatan (1,56 persen), informasi, komunikasi dan jasa keuangan (0,41 persen), dan rekreasi, olahraga dan budaya (0,91 persen). Sementara kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok pakaian dan alas kaki (1,43 persen).

Dibandingkan kota-kota lain di Indonesia, inflasi Jakarta pada Desember 2023 (y-on-y) relatif moderat, yaitu menempati peringkat ke-69 dari 90 kota dengan urutan inflasi tertinggi. Sementara itu, di antara kota-kota satelit, inflasi Jakarta merupakan yang terendah secara y-on-y namun berada di posisi tengah secara m-to-m. Inflasi Jakarta (m-to-m) lebih rendah dibandingkan Bekasi (0,54 persen) dan Tangerang (0,51 persen), tetapi lebih tinggi dari Depok (0,27 persen) dan Bogor (0,22 persen).

Realisasi inflasi di DKI Jakarta yang relatif masih terkendali tidak terlepas dari dukungan berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta. Program pengendalian inflasi TPID di DKI Jakarta utamanya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang mengacu pada pedoman 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Adapun berbagai pengendalian inflasi dilakukan TPID DKI Jakarta dengan fokus penguatan untuk memastikan berbagai kebutuhan komoditas strategis masyarakat tetap tersedia cukup dan mudah terjangkau.

h. Kinerja Belanja Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Kinerja belanja Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebesar 57,78% dari total belanja keseluruhan sebesar Rp66.771.086.897.592 ,00 yang terdiri atas urusan Pendidikan sebesar 24,26%, urusan Kesehatan sebesar 16,06%, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 9,29%, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 2,18%, urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar 3,64%, dan urusan Sosial sebesar 2,34%. Kinerja belanja urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dijelaskan pada tabel berikut.



Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2023		%	% Terhadap Total Belanja
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	41.545.631.634.134	38.580.032.579.763	92,86	57,78
1	Pendidikan	16.962.181.787.043	16.201.439.626.040	95,52	24,26
2	Kesehatan	11.524.631.795.262	10.724.304.443.276	93,06	16,06
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.181.746.447.727	6.203.038.764.647	86,37	9,29
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.705.976.159.928	1.457.866.291.925	85,46	2,18
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.549.764.230.040	2.428.980.997.223	95,26	3,64
6	Sosial	1.621.331.214.134	1.564.402.456.652	96,49	57,78

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, diolah 2024

Penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran dan realisasi belanja urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dijelaskan pada CaLK 5.1.2.2 Klasifikasi Urusan.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu capaian kinerja Pemerintah Daerah diukur dengan akuntabilitas kinerja. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis.

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa satu periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 4 Tujuan dengan 4 Indikator Kinerja Tujuan dan 17 Sasaran dan 22 Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 340 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023.

Realisasi capaian akuntabilitas kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dari 22 indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2023, sebanyak 22 indikator terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja, 13 indikator belum



tercapai sesuai target yang ditetapkan, serta realisasi tiga indikator masih dalam proses penilaian Pemerintahan Pusat, hal tersebut secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.3
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja
Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran		No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni		Indeks	65	71,03	109,69%
	1	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas		Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Persen	69,06	77,24	111,84%
	2	Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit		Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	Persen	18,78	18,86	100,43%
	3	Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,93	54,57	99,34%
			2	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persen	19,3	25,4	131,61%
	4	Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota		Indeks Risiko Bencana	Indeks	60,12	61,31	104,09%
2	Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif		Indeks	7,69	7,93	103,12%
	5	Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah		Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,6-6,2	4,96	91,85%
	6	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja		Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)	Persen	8,21	6,53	120,46%
	7	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	1	Rasio Gini	Koefisien	0,411	0,431	95,36%
			2	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,13	4,44	93,02%
			3	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	1,06	0,57	185,96%
	8	Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,96	4,01	101,26%
3	Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia		Indeks	81,55	83,55	102,45%
	9	Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat		Indeks dimensi pendidikan	Tahun	12,14	12,39	97,98%
	10	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,21	75,81	103,50%
			2	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Persen	13,7	9,2	149%
	11	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsive gender		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95.04.00	94,93	99,88%



No	Tujuan / Sasaran		No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	12	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebhinekaan masyarakat		Indeks Demokrasi	Indeks	76.82	82,13	106,91%
4	Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82	82,47	100,57%
	13	Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88.05.00	91,76	103,68%
	14	Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	03.05	4,21	120,28%
	15	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	82 (A)	81,06	98,85%
			2	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	70	76,96	109,94%
	16	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100%
	17	Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur		Indeks Sistem Merit	Indeks	326	335,5	107,50%

Sumber: Data Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

2.3 Kebijakan Keuangan

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.3.1.1 Kebijakan Pajak Daerah

Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah:

- Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah pada tahun 2022.
- Implementasi Pergub Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame pada tahun 2022.
- Pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022.
- Strategi Pajak Daerah: Intensifikasi
 - pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.



- 2) pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster*/sensus pajak daerah untuk pemetaan data potensi dan data intelijen pajak daerah.
- 3) penyempurnaan data subjek dan objek pajak daerah.
- 4) pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment* dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah.
- 5) *law enforcement*/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah.
- 6) peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
 - a) peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital.
 - b) peningkatan integritas SDM.
 - c) penambahan SDM pada JFU tertentu.
 - d) pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital.
- 7) peningkatan koordinasi kelembagaan:
 - a) koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (*Tax Clearance*).
 - b) koordinasi dalam rangka *Law Enforcement*.
 - c) koordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air.
 - d) koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.
 - e) koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (*One Map, One Data, One Policy*).
 - f) koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan Diskominfo melalui *mobile apps* Jaki (Jakarta Kini).
- e. Strategi Pajak Daerah: Ekstensifikasi:
 - 1) pertumbuhan kendaraan bermotor baru (Kbm Baru) secara nasional sebesar 900.000 Kbm roda 4 dan 5.400.000 Kbm roda 2.
 - 2) pertumbuhan penjualan properti meningkat.
 - 3) stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
 - 4) pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster*/sensus pajak daerah, pendataan, dan *startup*.

2.3.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa hal yang mempengaruhi kebijakan retribusi daerah, sebagai berikut:

- a. Kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, antara lain:



- 1) pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (*e-retribusi*);
 - 2) menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - 3) menerapkan transaksi non tunai;
 - 4) memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online dan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - 5) penggalan potensi berupa objek baru retribusi yang berada di SKPD pemungut;
 - 6) penyesuaian tarif terhadap objek retribusi yang ada saat ini.
- b. Kebijakan yang berpengaruh terhadap kemungkinan penurunan capaian terhadap penerimaan retribusi daerah, antara lain:
- 1) terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 dan yang diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Kepada Wajib Retribusi yang terdampak Bencana *Corona Viruse Disease* 2019 (Covid-19) yang berlaku sejak 1 April 2020 hingga saat ini;
 - 2) masih terdapat SKPD pemungut retribusi daerah yang memiliki piutang namun belum dapat menyajikan data rinci;
 - 3) pelaksanaan pendataan, penggalan potensi dan ekstensifikasi retribusi daerah belum maksimal karena adanya keterbatasan pada saat pandemi;
 - 4) adanya objek retribusi yang berkontribusi besar dalam penerimaan retribusi daerah kondisinya rusak sehingga tidak memungkinkan untuk dinikmati Wajib Retribusi, contohnya gedung Nyi Ageng Serang dan *Reverse Osmosis* (RO) yang sedang dilakukan renovasi;
 - 5) pemungutan retribusi IMTA yang sudah tidak dibayarkan di DPMPTSP (Retribusi IMTA adalah penyumbang terbesar ke-2 setelah IMB) dikarenakan akun DPMPTSP DKI Jakarta diblokir oleh Kementerian Tenaga Kerja disebabkan belum adanya Perda untuk Perpanjangan Tenaga Kerja Asing sesuai UU Cipta Kerja; dan
 - 6) tarif pada Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang belum berubah.

2.3.1.3 Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain-



lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak ketiga;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga melalui BLUD UPMA;
- c. mengimplementasikan kebijakan pengelolaan BMD atas penjualan tanah melalui mekanisme tukar menukar;
- d. mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *debt management*; dan
- e. mengoptimalkan pengelolaan BLUD.

2.3.1.4 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa, sementara transfer antar daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan, di mana dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan DAK Non Fisik dan meningkatkan kerja sama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring WP baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Setiap tahun Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan dan penetapan besaran alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per daerah. Penentuan alokasi TKDD yang akan diterima oleh setiap daerah ditentukan oleh 3 hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Formula (*By Formula*)

Sebagian besar pengalokasian TKDD dilakukan berdasarkan formula. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan data dasar sebagai sumber/input untuk dilakukan perhitungan alokasi. Daerah tidak bisa melakukan pengurusan/lobi untuk menaikkan jumlah alokasi yang akan diterimanya. Daerah hanya bisa memastikan bahwa data yang ada sudah benar dan *valid*. Oleh sebab itu, diperlukan rekonsiliasi data khususnya dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah masing-masing, karena data yang biasa digunakan dalam perhitungan



berasal dari lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah dalam mengeluarkan data. Jenis alokasi TKDD yang menggunakan formula antara lain: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) kecuali yang berdasarkan usulan/proposal, Dana Desa.

b. Berdasarkan Daerah Penghasil (*By Origin*)

Daerah yang telah memiliki kekayaan alam berupa sumber daya alam maka daerah tersebut akan mendapatkan kembali dalam bentuk bagi hasil apabila ada penerimaan negaranya. Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan kembali ke daerah penghasil dalam rangka mengatasi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) karena daerah penghasil mendapatkan eksternalitas sebagai dampak dari eksploitasi sumber daya alam tersebut. Daerah yang tidak memiliki sumber daya alam akan diberikan oleh pemerintah dalam bentuk DAU yang mana berfungsi sebagai *horizontal imbalance*.

c. Berdasarkan Kinerja (*By Performance*)

TKDD yang alokasinya ke daerah berdasarkan *performance* atau kinerja adalah Dana Insentif Daerah (DID). Setiap daerah memiliki kesempatan yang sama dan berupaya untuk mendapatkan insentif ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Daerah dengan kinerja yang baik, salah satunya terkait pengelolaan keuangannya maka akan mendapatkan insentif dalam bentuk alokasi dana, sebaliknya daerah yang kinerja kurang baik maka tidak akan mendapatkannya.

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, kebijakan belanja daerah tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- a. rasionalisasi Belanja Pegawai.
- b. rasionalisasi Belanja Barang/ Jasa sekurang-kurangnya 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk perjalanan dinas, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas dan atributnya serta pakaian khusus hari-hari tertentu, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, jasa kantor, jasa konsultasi, tenaga ahli/ instruktur/ narasumber, uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat, makanan dan minuman serta paket rapat dikantor dan di luar kantor dan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan dan FGD serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.
- c. rasionalisasi Belanja Modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi belanja pengadaan kendaraan dinas/ operasional, pengadaan mesin dan alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruangan/ gedung, meubelair dan perlengkapan



perkantoran, pembangunan gedung baru, serta pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

2.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (*gap*) antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam perkembangannya, Pembiayaan Daerah dimanfaatkan pula untuk menjalankan proyek penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Kebijakan Pembiayaan Daerah terkait sumber dari sisi penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Adapun kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang di antaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik, pembentukan Dana Cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, Pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal daerah. Adapun skala prioritas program/kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pada pelayanan publik, mampu memberikan manfaat lebih, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah penyelesaian pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diimplementasikan dalam bentuk program/kegiatan pelayanan dasar masyarakat.

Adapun beberapa sumber pendanaan yang perlu dijajaki antara lain dan tidak terbatas pada sumber pendanaan melalui Pembiayaan Utang Daerah seperti Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, Sinergi Pendanaan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah, pihak swasta, badan usaha milik Negara, BUMD, dan/atau dengan Pemerintah Daerah lainnya, skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerja sama secara *B to B* serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility (CSR)* dan swa-pendanaan lainnya, sesuai Peraturan Perundang-undangan.

2.4 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2023

Seiring perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional di mana konflik Rusia-Ukraina berdampak pada kenaikan harga pangan dan energi di berbagai negara yang berakibat pada terganggunya rantai pasok dunia maka inflasi global tidak dapat dihindari. Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II juga memperkuat bahwa Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 harus dilakukan penyesuaian.

APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 semula direncanakan sebesar Rp83.781.085.902.192,00. Namun pada APBD Perubahan 2023 mengalami penurunan 5,04% menjadi Rp79.558.253.790.537,00. Berikut merupakan beberapa alasan dilakukan perubahan atau pergeseran anggaran sampai dengan 31 Desember 2023:

- adanya pergeseran anggaran untuk memenuhi belanja dana alokasi umum, *Meeting of Governors of ASEAN Capitals*, hibah penyediaan sarana pendukung kantor gedung baru Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan kebutuhan mendesak dan prioritas satuan kerja perangkat daerah/ unit satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- pemetaan, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2023 dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2023, dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus, serta pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib dan prioritas perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah lainnya.
- sebagai perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 4 September tahun 2023.

Tabel 2.4

Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023

(dalam rupiah)

APBD	Perda No. 5 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023	Perda No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
1	2	3
PENDAPATAN DAERAH	74.380.646.088.137	70.662.936.135.345
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.773.523.659.701	48.442.043.648.831
Pajak Daerah	43.600.000.000.000	43.000.000.000.000
Retribusi Daerah	600.000.000.000	462.105.437.613
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	542.500.000.000	545.869.249.882
Lain-lain PAD yang Sah	8.031.023.659.701	4.434.068.961.336
PENDAPATAN TRANSFER	18.457.238.970.000	20.224.315.057.470



APBD	Perda No. 5 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023	Perda No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
1	2	3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.149.883.458.436	1.996.577.429.044
BELANJA DAERAH	74.613.763.379.256	72.144.886.612.586
Belanja Pegawai	18.322.002.724.743	18.778.026.066.648
Belanja Barang dan Jasa	27.533.456.404.426	27.281.511.012.549
Belanja Bunga	258.000.000.000	258.000.000.000
Belanja Subsidi	6.016.099.339.168	5.908.311.604.139
Belanja Hibah	2.963.126.545.202	3.707.368.399.302
Belanja Bantuan Sosial	4.556.982.983.280	4.450.476.435.774
Belanja Modal	13.703.221.170.855	10.850.183.726.006
Belanja Tidak Terduga	904.427.731.082	554.562.887.668
Belanja Bantuan Keuangan	356.446.480.500	356.446.480.500
PEMBIAYAAN DAERAH	233.117.291.119	1.481.950.477.241
Penerimaan Pembiayaan	9.400.439.814.055	8.895.317.655.192
Pengeluaran Pembiayaan	9.167.322.522.936	7.413.367.177.951
Total APBD	83.781.085.902.192	79.558.253.790.537

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta, 2023



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pada tahun 2023 terdapat Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 disajikan dalam ringkasan Realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	%	Realisasi Tahun 2022
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PENDAPATAN	70.662.936.135.345	71.065.534.207.722	100,57	67.290.479.172.308
1.1	Pendapatan Asli Daerah	48.442.043.648.831	49.139.745.715.234	101,44	45.608.404.729.501
1.2	Pendapatan Transfer	20.224.315.057.470	20.159.634.672.034	99,68	18.860.858.779.549
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.996.577.429.044	1.766.153.820.454	88,46	2.821.215.663.258
2	BELANJA dan TRANSFER	72.144.886.612.586	66.770.609.628.414	92,55	64.865.121.220.296
2.1	Belanja Operasi	60.383.693.518.412	57.556.903.079.616	95,32	55.542.186.969.752
2.2	Belanja Modal	10.850.183.726.006	8.857.260.068.298	81,63	8.808.194.842.704
2.3	Belanja Tak Terduga	554.562.887.668	0	0,00	29.976.747.630
2.4	Transfer - Bantuan Keuangan	356.446.480.500	356.446.480.500	100,00	484.762.660.210
Surplus/Defisit		(1.481.950.477.241)	4.294.924.579.308		2.425.357.952.012
3	PEMBIAYAAN	1.481.950.477.241	2.247.496.540.761		6.174.738.712.242
3.1	Penerimaan Pembiayaan	8.895.317.655.192	8.886.564.884.056	99,90	10.701.364.203.815
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	7.413.367.177.951	6.639.068.343.295	89,56	4.526.625.491.573
4	SiLPA		6.542.421.120.069		8.600.096.664.254

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta 2023



Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp71.065.534.207.722,00 atau 100,57% dari target yang ditetapkan sebesar Rp70.662.936.135.345,00. Realisasi Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp49.139.745.715.234,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp20.159.634.672.034,00, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp1.766.153.820.454,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp49.139.745.715.234,00 atau 101,44% dari target sebesar Rp48.442.043.648.831,00. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp45.608.404.729.501,00, realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.531.340.985.733,00 atau 7,74%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp3.241.333.476.623,00 atau 8,05%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp43.516.481.672.833,00 atau 101,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp43.000.000.000.000,00. Kenaikan ini disebabkan membaiknya kondisi makro ekonomi yang dibuktikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang terjaga di level aman sampai dengan akhir tahun 2023 di Provinsi DKI Jakarta. Kenaikan realisasi juga dikarenakan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang maksimal hingga akhir tahun 2023 dan pemberian kebijakan insentif PBB P2 dan PKB di Tahun 2023;
- b. realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp454.697.560.911,00 atau 98,40% dari target yang ditetapkan sebesar Rp462.105.437.613,00. Capaian Retribusi Daerah di antaranya terkendala pada Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung karena investor memiliki opsi tambahan dalam diversifikasi investasi yang berdampak kepada bidang konstruksi/pembangunan gedung di Jakarta;
- c. realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp545.869.249.987,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp545.869.249.882,00. Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp143,445.140.540,00 dibandingkan tahun lalu; dan
- d. realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp4.622.697.231.503,00 atau 104,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.434.068.961.336,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp68.842.797.363,00 dibandingkan dengan tahun lalu. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dan pendapatan jasa BLUD.



Realisasi Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 sebesar Rp20.159.634.672.034,00 atau 99,68% dari target sebesar Rp20.224.315.057.470,00. Sisa yang tidak terealisasi dikarenakan faktor kebijakan pemerintah di mana penyaluran DAK Non Fisik memperhitungkan sisa dana tahun yang lalu yang ada di Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp17.049.968.580.672,00 atau 100,14% dari target yang ditetapkan sebesar Rp17.025.414.266.070,00;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp22.179.718.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp22.179.718.000,00;
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp3.076.020.400,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.076.020.400,00;
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp3.049.235.325.962,00 atau 97,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp Rp3.138.470.026.000,00; dan
- e. Insentif Fiskal Daerah sebesar Rp35.175.027.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp35.175.027.000,00.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.298.775.892.485,00 atau 6,89% dibandingkan tahun 2022. Kenaikan ini disebabkan karena terdapat penyaluran *Treasury Deposit Facility* (TDF) ke Rekening Kas Umum Daerah di tahun 2023.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun anggaran 2023 merupakan Pendapatan Hibah yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.766.153.820.454,00 atau 88,46% dari target sebesar Rp1.996.577.429.044,00. Pendapatan Hibah tidak mencapai target anggaran disebabkan adanya pergeseran pekerjaan proyek MRT Jakarta dan adanya selisih kurs pada saat perencanaan dengan realisasi. Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.055.061.842.804,00 atau 37,40% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp2.821.215.663.258,00.

3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2023 sebesar Rp66.770.609.628.414,00 atau 92,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp72.144.886.612.586,00. Apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat Rp64.865.121.220.296,00, maka realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.905.488.408.118,00 atau 2,94%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah dan Transfer tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa jenis belanja mengalami kenaikan



di Tahun 2023 yaitu Belanja Peralatan dan Mesin yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.024.122.071.154,00 atau 56,93% dibanding tahun anggaran 2022, selain itu Belanja Hibah juga mengalami kenaikan sebesar Rp982.355.685.172,00 atau 37,22% dibanding tahun anggaran 2022.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer terdiri dari:

- a. realisasi Belanja Operasi sebesar Rp57.556.903.079.616,00 atau 95,32% dari anggaran sebesar Rp60.383.693.518.412,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:
 - 1) realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp17.977.776.327.870,00 atau 95,74% dari anggaran sebesar Rp18.778.026.066.648,00. Belanja Pegawai tidak terserap di antaranya disebabkan adanya kekosongan jabatan struktural ASN yang pensiun dan meninggal dan alokasi penerimaan ASN dan P3K yang tidak terpenuhi;
 - 2) realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp25.824.444.605.296,00 atau 94,66% dari anggaran sebesar Rp27.281.511.012.549,00. Belanja Barang dan Jasa tidak terserap di antaranya adanya kegiatan yang gagal lelang dan tidak terealisasinya Belanja Barang dan Jasa BLUD karena Pergub Tarif Layanan belum diterbitkan sehingga anggaran BLUD tidak dapat digunakan;
 - 3) realisasi Belanja Bunga sebesar Rp229.704.491.741,00 atau 89,03% dari anggaran sebesar Rp258.000.000.000,00. Tidak optimalnya realisasi Belanja Bunga disebabkan penyesuaian kurs dan tingkat suku bunga dari LIBOR menjadi SOFR dan adanya penyesuaian pagu pinjaman;
 - 4) realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp5.539.653.281.534,00 atau 93,76% dari anggaran sebesar Rp5.908.311.604.139,00. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Belanja Subsidi dikarenakan adanya efisiensi pada PSO PT Transjakarta. Efisiensi ini berdasarkan hasil verifikasi terhadap PSO yang dilaksanakan mulai Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 4;
 - 5) realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.621.682.896.507,00 atau 97,69% dari anggaran sebesar Rp3.707.368.399.302,00. Belanja Hibah tidak terserap 100% dikarenakan terdapat beberapa Yayasan/Lembaga yang sudah mengajukan sebagai penerima hibah namun tidak melengkapi persyaratan proses pencairan hibah terdapat pada SKPD Dinas Sosial, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - 6) realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4.363.641.476.668,00 atau 98,05% dari anggaran sebesar Rp4.450.476.435.774,00. Belanja Bantuan Sosial tidak terserap 100% di antaranya disebabkan oleh verifikasi yang lebih selektif untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial KJP Plus dan KJMU, sehingga penyerapan khususnya untuk penerima baru kurang dari kuota yang dianggarkan.



- b. realisasi Belanja Modal sebesar Rp8.857.260.068.298,00 atau 81,63% dari anggaran sebesar Rp10.850.183.726.006,00, terdiri dari:
- 1) realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp442.600.308.470,00 atau 52,83% dari anggaran sebesar Rp837.728.164.500,00;
 - 2) realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.822.976.130.249,00 atau 91,50% dari anggaran sebesar Rp3.085.131.092.839,00;
 - 3) realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.653.055.663.410,00 atau 64,65% dari anggaran sebesar Rp2.556.806.970.333,00;
 - 4) realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.799.027.573.476,00 atau 89,97% dari anggaran sebesar Rp4.222.738.767.561,00; dan
 - 5) realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp139.600.392.693,00 atau 94,47% dari anggaran sebesar Rp147.778.730.773,00.

Tidak tercapainya realisasi belanja modal antara lain disebabkan oleh:

- 1) adanya permasalahan pembebasan tanah atas tanah wakaf, tanah sengketa, tanah belum bersertifikat, dan tanah dikuasai pihak lain di Dinas Sumber Daya Air;
- 2) pengadaan tanah jalan yang masih dalam proses penunjukan lokasi di Dinas Bina Marga;
- 3) pelaksanaan pembebasan lahan atas pembangunan MRT Fase 2 rute kawasan Bundaran HI - Ancol Barat bergeser menjadi tahun 2024 di Dinas Perhubungan;
- 4) tidak tersedianya beberapa alat kedokteran yang sesuai spesifikasi kebutuhan pada Dinas Kesehatan;
- 5) penyelesaian proses lelang pada Belanja Modal Gedung dan bangunan yang membutuhkan waktu di antaranya terdapat pada kegiatan pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan wilayah Jakarta Selatan di Dinas Pemuda dan Olahraga, pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah susun di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dan renovasi sekolah berupa 26 gedung rehab berat dan 16 gedung rehab total di Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan;
- 6) kegiatan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan Infrastruktur Pengendali Banjir Pesisir Pantai belum berkontrak karena jadwal lelang yang berubah-ubah dan kendala teknis lainnya di lapangan;
- 7) penyedia kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sub Polder Marunda (JGC-Metland) dan Pompa Tipala Adhiyaksa tidak dapat menyelesaikan keseluruhan volume pekerjaan sesuai kontrak (wanprestasi) sehingga dilakukan pemutusan kontrak;
- 8) kegiatan revitalisasi pompa di wilayah Jakarta Barat dan kegiatan lain yang belum selesai dan dilakukan perpanjangan waktu hingga 50 hari;
- 9) tidak terealisasinya pengadaan *software* karena *software* pada Unit Pengelola Jakarta *Smart City* masih dapat digunakan; dan



- 10) efisiensi realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari Dana BOS pada Dinas Pendidikan.
- c. realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp554.562.887.668,00. Tidak terserapnya Belanja Tidak Terduga disebabkan karena tidak ada kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak yang mengharuskan penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- d. realisasi Transfer atau Bantuan Keuangan sebesar Rp356.446.480.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp356.446.480.500,00.

Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp71.065.534.207.722,00 dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2023 sebesar Rp66.770.609.628.414,00 menyebabkan kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2023 mengalami surplus sebesar Rp4.294.924.579.308,00 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Neto tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.247.496.540.761,00. Rincian realisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp8.886.564.884.056,00 atau 99,90% dari anggaran sebesar Rp8.895.317.655.192,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 terdiri dari:
- 1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang tercatat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp8.600.096.664.254,00 atau 100,00%;
 - 2) realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp286.277.630.136,00 atau 96,97%; dan
 - 3) penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp190.589.666,00.
- b. realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.639.068.343.295,00 atau 89,56% dari anggaran sebesar Rp7.413.367.177.951,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2023 terdiri dari:
- 1) realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp4.836.397.306.901,00 atau 88,99% dari anggaran sebesar Rp5.434.678.551.982,00; dan
 - 2) realisasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp1.802.671.036.394,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp1.802.671.036.394,00.



Tidak tercapainya pengeluaran pembiayaan daerah terdapat pada realisasi Penyertaan Modal Daerah (PMD), disebabkan oleh sebagai berikut:

- 1) pergeseran pekerjaan proyek MRT Jakarta dan terdapat selisih kurs pada saat perencanaan dengan realisasi;
- 2) belum ditetapkannya Perda pembentukan BUMD PT JIEP sehingga PMD atas PT JIEP tidak terealisasi; dan
- 3) adanya kegiatan yang diusulkan akan didanai dari sumber pembiayaan lain pada Perumda Air Minum Jaya sehingga tidak terealisasi.

Dari data realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan maka posisi SiLPA tahun anggaran 2023 tercatat sebesar Rp6.542.421.120.069,00. Penjelasan lebih rinci masing-masing komponen LRA disajikan dalam CaLK Bab 5.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Laporan keuangan yang disusun terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. entitas tersebut dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan



akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan konsolidasian dari 752 Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku entitas akuntansi. Pada proses konsolidasi, dilakukan penggabungan 752 Laporan Keuangan entitas akuntansi menjadi 42 laporan keuangan entitas akuntansi penggabung sebagai berikut.

No.	Entitas Penggabung	Jumlah Entitas Akuntansi
1	Sekretariat DPRD	1
2	Dinas Pendidikan	33
3	Dinas Kesehatan	89
4	Dinas Bina Marga	6
5	Dinas Sumber Daya Air	7
6	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	9
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17
8	Satuan Polisi Pamong Praja	7
9	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	8
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
11	Dinas Sosial	31
12	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	16
13	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	10
14	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	13
15	Dinas Lingkungan Hidup	10
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9
17	Dinas Perhubungan	21
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	12
22	Dinas Kebudayaan	14
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7
24	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11
25	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	8
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	8
28	Badan Pengelolaan Aset Daerah	10
29	Badan Pendapatan Daerah	6
30	Badan Kepegawaian Daerah	7
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7
33	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	10
34	Inspektorat	7
35	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1
36	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	1
37	Kota Administrasi Jakarta Pusat	53



No.	Entitas Penggabung	Jumlah Entitas Akuntansi
38	Kota Administrasi Jakarta Utara	38
39	Kota Administrasi Jakarta Barat	65
40	Kota Administrasi Jakarta Selatan	76
41	Kota Administrasi Jakarta Timur	76
42	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	9
	Jumlah	752

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

- pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD;
- pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;



- d. pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan
- e. pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Kelompok Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

- a. penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai Pendapatan-LRA yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening operasional (d.h rekening penampungan);



- d. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan-LRA; dan
- e. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat:

- a. terjadi pengeluaran dari RKUD;
- b. khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA;
- c. dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada Peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- d. dalam hal Belanja Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Pemerintah Pusat, belanja diakui dengan mengacu pada Peraturan perundangan yang mengatur mengenai penggunaan dan penatausahaan Dana BOS.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- c. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja non modal.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi Aset Tetap) jika pemeliharaan tersebut memenuhi seluruh kriteria huruf a dan b sebagai berikut:

- a. manfaat ekonomi atas barang/Aset Tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas; dan
- b. nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/Aset Tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset Tetap sebagai berikut.

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2023 Lampiran I (poin J) adalah dalam hal pelaksanaan pekerjaan kontraktual tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan akan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. PA/KPA wajib menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala SBPKD, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan dilampiri:
 - 1) fotokopi surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa yang telah dilegalisir oleh PA/KPA;
 - 2) BAPP sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
 - 3) Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Daerah sesuai dengan Format 10 Lampiran II; dan
 - 4) Surat permintaan pencairan/Klaim Jaminan Pembayaran kepada Kepala SBPKD yang dibuat sesuai dengan Format 12 Lampiran II.



- b. berdasarkan surat pemberitahuan, SBPKD melakukan klaim jaminan sesuai surat kuasa klaim pencairan jaminan dari PA/KPA sebesar prestasi pekerjaan yang belum terselesaikan atau sebesar termin pekerjaan yang belum terselesaikan;
- c. dilakukan penyelesaian dengan mengacu ketentuan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023; dan
- d. dalam hal SKPD/Unit SKPD tidak menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya kepada Kepala SBPKD, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tahun anggaran berkenaan atau paling lambat tanggal 15 Januari 2024, maka dilakukan klaim jaminan oleh SBPKD berdasarkan surat kuasa klaim pencairan jaminan dari PA/KPA sebesar nilai jaminan.

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.3.4 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait; dan
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:



- a. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan; dan
- b. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk Pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.5 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan Aset Tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. terjadinya konsumsi aset, yaitu:



- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 - 2) konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
- c. timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- d. dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan Peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam defisit non operasional antara lain defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar dan defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang. Sedangkan pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai Aset Tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.6 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui



(*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalan mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal; dan
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.6.1 Aset Lancar

- a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - 1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
 - 2) berupa kas dan setara kas; dan
 - 3) semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.
- d. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.



Piutang Pemerintah Daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih Pemerintah Daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.
- c) Penyisihan Piutang Tak Tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2) Kualitas Piutang

- a) kualitas Piutang adalah perkiraan atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
- b) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.
- c) dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
 1. menilai dan menentukan kualitas piutang;
 2. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.



- d) penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan;
- e) kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - 1. kualitas lancar;
 - 2. kualitas kurang lancar;
 - 3. kualitas diragukan; dan
 - 4. kualitas macet.
- f) penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;
 - 2. kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - 3. kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun; dan
 - 4. kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.
- g) penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - 1. kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
 - 2. kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
 - 3. kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
 - 4. kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- h) khusus untuk piutang transfer Pemerintah Pusat tidak dilakukan penggolongan kualitas piutang,
- i) penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer antar daerah, dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. kualitas Lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun;
 - 2. kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - 3. kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
 - 4. kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.
- j) persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebagai berikut.

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)
1.	Lancar	0,5
2.	Kurang Lancar	10



No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)
3.	Diragukan	50
4.	Macet	100

- k) setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 2. rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
 3. penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang tuntutan ganti kerugian daerah yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan;
 4. jaminan atau sita jaminan jika ada; dan
 5. informasi lainnya yang dianggap penting.
- e. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:
- 1) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - 3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - 4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

- 1) barang konsumsi;
- 2) amunisi;
- 3) bahan untuk pemeliharaan;
- 4) suku cadang;
- 5) persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- 6) pita cukai;
- 7) bahan baku;
- 8) barang dalam proses/setengah jadi;
- 9) tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 10) hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat



Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/ sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaan berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada di gudang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan jika potongan tersebut tercantum dalam bukti pembelian, jika tidak tercantum diakui sebagai pendapatan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual dan dinilai dengan menggunakan metode sistematis *FIFO*.

- f. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 (tiga) – 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergilir.



Penilaian kualitas Investasi Non Permanen dana bergulir dilakukan berdasarkan umur Investasi Non Permanen dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir ditetapkan sebesar:

- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b) 10% (sepuluh perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergulir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) 50% (lima puluh perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) 100% (seratus perseratus) dari Investasi Non Permanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Metode penilaian Investasi Non Permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Metode biaya diterapkan untuk:

- 1. investasi jangka pendek dalam bentuk saham, deposito, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), SPN, dan investasi jangka pendek lainnya; dan
 - 2. investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk obligasi, proyek pembangunan, surat utang jangka panjang, deposito jangka panjang, maupun investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk lainnya yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.
- b) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk Investasi Non Permanen berupa dana bergulir. Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap Investasi Non Permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan



penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terrealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terrealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terrealisasi.

Pengukuran Investasi Non Permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai Investasi Non Permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai Investasi Non Permanen awal yang dicatat sebesar harga perolehan. Investasi Non Permanen dapat dihapuskan jika Investasi Non Permanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih/direalisasikan dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- b) Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya (*cost method*)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.



b) Metode Ekuitas (*equity method*)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laba/rugi Perusahaan

Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2. Penerimaan Dividen

Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham.

Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi Pemerintah Daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.



4.3.6.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah klasifikasi Aset Tetap yang digunakan meliputi:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - a) alat-alat berat;
 - b) alat-alat angkutan;
 - c) alat-alat bengkel dan alat ukur;
 - d) alat-alat pertanian/peternakan;
 - e) alat-alat kantor dan rumah tangga;
 - f) alat studio dan alat komunikasi;
 - g) alat-alat kedokteran;
 - h) alat-alat laboratorium;
 - i) alat keamanan; dan
 - j) alat olahraga.
 - 3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - a) bangunan gedung; dan
 - b) bangunan monumen.
 - 4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - a) jalan dan jembatan;
 - b) bangunan air/irigasi;
 - c) instalasi; dan
 - d) jaringan.
 - 5) Aset Tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - a) buku dan perpustakaan;
 - b) alat peraga pendidikan;
 - c) barang bercorak kesenian/kebudayaan;
 - d) hewan/ternak dan tumbuhan; dan
 - e) Aset Tetap-renovasi.
 - 6) Konstruksi dalam pengerjaan
- c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset



tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- 2) biaya perolehan Aset Tetap selain harga beli atau konstruksinya yang dapat diatribusikan langsung seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan dan/atau biaya lainnya yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit Aset Tetap induk, maka di kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional ke masing-masing Aset Tetap induk;
- 3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
- 4) biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
- 5) biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
- 6) biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
- 7) biaya perolehan Aset Tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
- 8) biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat



didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;

- 9) biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
 - 10) setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian; dan
 - 11) biaya appraisal untuk pengadaan Aset Tetap tanah secara gabungan, namun tidak seluruh pengadaan tersebut terealisasi maka atas biaya appraisal tersebut dikapitalisasi ke aset yang pengadaannya terealisasi dan dialokasikan secara proporsional berdasarkan luasan aset tetap tanah tersebut.
- d. Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomtabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/*vertical blind*/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai Aset Tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).
- e. Jika suatu belanja modal/Aset Tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam CaLK.

4.3.6.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta Aset Tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak



konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- 4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 1) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- 2) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- 1) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
- 3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) uang muka kerja yang diberikan;
- 5) uang Jaminan/Retensi; dan



- 6) KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

4.3.6.4 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai Aset Tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.
- b. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
- c. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap.

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
2.10	Alat Olahraga	5
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan



No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan
5.5	Aset Tetap - renovasi	Masa kerja sama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

- d. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomi mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- e. Penyusutan atas Aset Tetap mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2015.
- f. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- g. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (*Aset Idle*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- h. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Aset Tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi Aset Tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut.

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Olahraga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

4.3.6.5 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- Aset Tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.



- b. Apabila Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi Aset Tetap, maka harus dipindahkan ke pos Aset Lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan.
- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluwarsa dihapus.

4.3.6.6 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, Aset Tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:
 - 1) Tagihan Jangka Panjang;
 - 2) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - 3) Aset tidak berwujud; dan
 - 4) Aset Lain-lain.
- b. Tagihan Jangka Panjang merupakan jumlah tagihan yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima/dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran. Antara lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
- d. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

TP merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum



yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Atas TGR yang belum diterbitkan SKP2K dapat diakui sepanjang sudah terdapat kata sepakat antara pemeriksa auditor internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK) dengan pihak terperiksa dan hasil temuan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sudah teregister, TGR tersebut dicatat pada kelompok aset lainnya.

- e. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerja sama pemanfaatan (KSP).
- f. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- g. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- h. Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerja sama.
- i. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.



- j. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.
- k. Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.
- l. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Tidak Berwujud. Termasuk di dalam Aset Lain-lain di antaranya Aset Rusak Berat/Usang, Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah, Aset Tetap - Fasos Fasum, Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB), Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya, dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
- m. Kewajiban Penyerahan Fasos Fasum.

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Fasos-Fasum selanjutnya disebut PPK-Fasos-Fasum merupakan perjanjian Pemprov DKI Jakarta dengan Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan. Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan PPK-Fasos-Fasum merupakan dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kewajiban Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang menyerahkan fasos-fasum pada Pemprov DKI Jakarta. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi.

Piutang Fasos-Fasum dan Pendapatan Fasos Fasum - LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.



Apabila tidak terdapat dokumen yang sah yang menyatakan nilai kewajiban fasos-fasum yang harus diserahkan oleh Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan/atau nilai Fasos-Fasum tidak dapat diukur atau diestimasi secara andal, dokumen Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang dan PPK-Fasos-Fasum dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat disajikan informasi antara lain:

- 1) jumlah keseluruhan Izin yang diterbitkan (jumlah Izin Pemanfaatan Ruang keseluruhan);
- 2) jumlah lokasi wilayah dan luas lahan kewajiban;
- 3) jumlah izin yang telah dilakukan BAST;
- 4) jumlah sisa kewajiban yang belum dilakukan BAST; dan
- 5) informasi pendukung lainnya.

Fasos-fasum yang telah diterima dari kewajiban pengembang dicatat sebagai aset fasos fasum dan sekaligus diakui sebagai pendapatan LO berkenaan pada saat berita acara serah terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah serta diungkapkan secara memadai. Aset Fasos Fasum dicatat sebagai Aset Tetap/aset berkenaan pada saat BAST/SK Gubernur kepada SKPD Pengguna telah diterbitkan.

Aset Tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tidak ada nilai dalam BAST, fasom fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur Fasos Fasum. Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban fasos fasum serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai. Aset Fasos Fasum selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Dalam rangka pencatatan secara ekstrakomptabel atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai jumlah kewajiban Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang yang belum diserahkan.

Perolehan Aset Tetap sebagai pemenuhan kewajiban fasos fasum diperlakukan sebagai pendapatan operasional dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

- n. Konversi Kewajiban SP3L dalam Bentuk Penyetoran Dana.

Dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS) dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas konversi kewajiban SP3L dalam bentuk penyetoran dana.



Sanksi SP3L untuk membangun/menyediakan Rumah Susun Murah (RSM) yang dikonversi dalam bentuk penyetoran dana kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai Pendapatan Sanksi SP3L – LO dan Piutang Sanksi SP3L senilai jumlah yang tercantum dalam dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS).

Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang menjadi bagian dari Lain-lain PAD yang sah dan diakui saat Sanksi tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Piutang atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang berkurang saat diterimanya pembayaran. Pendapatan Sanksi SP3L – LO, Piutang Sanksi SP3L, dan Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

o. Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK-KLB dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK- KLB merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan KLB yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang sah – LO dan Piutang Koefisien Luas Bangunan (KLB) sebesar jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK- KLB).

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB) disajikan dalam neraca untuk dapat mengetahui nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLB serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai.



Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KLB selain tanah, disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap. Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO, Piutang Kompensasi KLB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KLB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

p. Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Surat ketetapan pengenaan denda atas pelampauan KDB/dokumen lainnya yang sah yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan lahan pengganti dan/aset lainnya dapat dijadikan sebagai sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KDB).

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang kompensasi pelampauan KDB dan Pendapatan kompensasi pelampauan KDB - LO diakui dan dicatat dalam Neraca saat nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah.

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam bentuk aset lahan tanah dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan menambah aset lahan tanah sebesar jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), Jika terdapat beda nilai antara pengakuan piutang awal dengan nilai saat serah terima maka diakui sebagai Pendapatan Lain-lain Yang Sah – LO.

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KDB serta BAST dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LO dan aset berkenaan serta diungkapkan secara memadai.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KDB – LO, Piutang Kompensasi KDB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KDB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

q. Pemenuhan Kewajiban Lainnya oleh Pihak Ketiga



Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Lainnya, selanjutnya disebut PPK-Lainnya merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan uang dan/atau aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian pemenuhan kewajiban lainnya (PPK-Lainnya), seperti kewajiban kontribusi reklamasi dan tambahan kewajiban kontribusi reklamasi dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban lainnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang atas pemenuhan kewajiban lainnya dan pendapatan lainnya LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam PPK-Lainnya dan/atau dokumen lainnya yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. dokumen PPK-Lainnya atau dokumen lainnya yang sah dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstra komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- r. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang dan menambah Aset sebesar jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengakuan Aset Tetap akibat dari pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang piutang dan Pendapatan Lain-lain yang sah-LO. Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban lainnya selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

4.3.6.7 Amortisasi Aset

- a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
- b. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai Tabel Amortisasi Aset Tak Berwujud berikut ini.

Uraian	Masa Manfaat
Software Komputer	5
Lisensi	10
Franchise	5
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70



Uraian	Masa Manfaat
Hak Paten Sederhana	10
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan	50
Hak Ekonomi Prosedur Fonogram	50
Hak ekonomi Lembaga Penyiaran	20
Paten Biasa	20
Merek	10
Desain Industri	10
Rahasia Dagang	10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Peta RBI Skala Kecil (1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000)	20
Peta BRI Skala Menengah (1:100.000, 1:50.000, 1:25.000)	10
Peta RBI Skala Besar (1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, 1:1.000)	5
Peta LLN Skala Kecil (1:500.000, 1:250.000)	20
Peta LLN Skala Menengah (1:50.000)	12
Peta LPI Skala Kecil (1:250.000)	20
Peta LPI Skala Menengah (1:50.000, 1:25.000)	12
Peta LPI Skala Besar (1:10.000)	5
Peta Batas Wilayah Administrasi	10
Peta Delineasi Batas Wilayah Administrasi	5
Peta Batas Negara	10
Data Pasang Surut	20
Data GNSS	20
Data Gayaberat	20
Data Pengukuran Sifat Datar Teliti	10
Citra Satelit Resolusi Tinggi (4 meter atau lebih halus)	5
Citra Satelit Resolusi Sedang (lebih kasar dari 4 meter)	10
Foto Udara	5
Peta Tematik Morfometri	5
Peta Tematik Penutup Lahan	5
Peta Tematik Sistem Lahan	5
Peta Tematik Lainnya	5
Atlas	10

- c. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat Aset Tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- d. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.

4.3.6.8 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.



- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau Peraturan Perundang-undangan.
- d. Kewajiban Pemerintah Daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
 - a) suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b) Kewajiban Jangka Pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima di muka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya. Misalnya Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang
 - a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b) Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
 - c) Utang Luar Negeri Pemerintah Daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundangan-undangan.



e. Pengukuran Kewajiban

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- 2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- 3) Utang Bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
- 4) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 5) Pendapatan Diterima di Muka dicatat sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang / jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
- 6) Utang Belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.
- 7) Utang Jangka Pendek Lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.



- 8) Utang Jaminan dicatat sebesar kas yang disepakati oleh Pihak Ketiga dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - 9) Utang Dalam Negeri (utang yang diperoleh dari dalam negeri) merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- f. Kewajiban kontinjensi merupakan:
- 1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau
 - 2) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) Pemerintah Daerah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

4.3.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai Aset Tetap karena revaluasi Aset Tetap.
- c. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan
- d. Ekuitas Akhir.

4.3.8 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dan dijabarkan



menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan Peraturan Perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media “*adjustment*” atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “*auditable*” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp70.662.936.135.345,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp71.065.534.207.722.00 atau 100,57% dari target.

Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.775.055.035.414.00 atau 5,61% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp67.290.479.172.308,00.

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp49.139.745.715.234.00, Pendapatan Transfer sebesar Rp20.159.634.672.034.00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp1.766.153.820.454.00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	6	5=(4:3)	6
1	Pendapatan Asli Daerah	48.442.043.648.831	49.139.745.715.234	101.44	45.608.404.729.501
2	Pendapatan Transfer	20.224.315.057.470	20.159.634.672.034	99.68	18.860.858.779.549



No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	6	5=(4:3)	6
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.996.577.429.044	1.766.153.820.454	88,46	2.821.215.663.258
	Jumlah	70.662.936.135.345	71.065.534.207.722	100,57	67.290.479.172.308

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp43.516.481.672.833,00 atau 101,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp43.000.000.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Daerah tahun anggaran 2023 melampaui target sebesar Rp516.481.672.833,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.241.333.476.623,00 atau 8,05% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp40.275.148.196.210,00. Rincian realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	6	5 (4:3)	6
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.100.000.000.000	9.416.563.568.950	103,48	9.404.927.298.262
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.250.000.000.000	6.643.605.545.100	106,30	6.297.765.879.900
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.600.000.000.000	1.680.813.642.600	105,05	1.434.159.136.139
4	Pajak Rokok	880.000.000.000	855.303.949.037	97,19	884.786.370.249
5	Pajak Hotel	1.600.000.000.000	1.898.844.468.744	118,68	1.487.837.412.464
6	Pajak Restoran	3.800.000.000.000	3.949.482.690.461	103,93	3.390.509.193.253
7	Pajak Hiburan	600.000.000.000	686.623.192.014	114,44	399.637.279.558
8	Pajak Reklame	900.000.000.000	975.808.842.214	108,42	1.095.916.078.306
9	Pajak Penerangan Jalan	800.000.000.000	889.487.806.146	111,19	821.983.859.750
10	Pajak Parkir	450.000.000.000	477.331.127.230	106,07	414.806.253.990
11	Pajak Air Tanah	70.000.000.000	83.718.755.701	119,60	48.445.015.008



No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	6	5 (4:3)	6
12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.000.000.000.000	9.048.682.494.705	100,54	8.246.374.877.931
13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.950.000.000.000	6.910.215.589.931	86,92	6.347.999.541.400
	JUMLAH	43.000.000.000.000	43.516.481.672.833	101,20	40.275.148.196.210

Penjelasan mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- 1) kereta api;
- 2) kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- 4) objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- 1) nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- 2) bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.



Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berikut ini tarifnya:

- 1) tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi;
 - a) kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan
 - b) kepemilikan kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen); dan
- 3) tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp9.416.563.568.950,00 atau 103,48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.100.000.000.000,00. Dengan demikian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2023 telah melampaui target sebesar Rp316.563.568.950,00 atau 3,48%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.636.270.688,00 atau 0,12% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2022 sebesar Rp9.404.927.298.262,00.

Rincian Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	859.130.000.000	897.514.216.225	104,47
2	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	1.513.538.000.000	1.558.630.767.050	102,98
3	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	4.835.421.000.000	4.992.411.567.475	103,25
4	PKB-Mobil Bus-Microbus	55.721.000.000	65.577.664.250	117,69
5	PKB-Mobil Bus-Bus	8.135.000.000	7.798.666.700	95,87
6	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	199.281.000.000	209.171.530.665	104,96
7	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	73.279.000.000	73.834.490.200	100,76
8	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	37.038.000.000	40.064.668.750	108,17
9	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	270.435.000.000	269.832.529.335	99,78
10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	990.888.000.000	1.026.660.855.375	103,61
11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	1.840.000.000	1.702.246.600	92,51
12	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	40.000.000	-	0,00
13	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	255.214.000.000	273.364.366.325	107,11
14	PKB-Mobil Roda Tiga	40.000.000	-	0,00
	JUMLAH	9.100.000.000.000	9.416.563.568.950	103,48



Sebagai upaya untuk pencapaian dan optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tahun anggaran 2023, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan beberapa kegiatan secara maksimal guna mengoptimalkan penerimaan PKB tersebut. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan selama 2023:

- 1) implementasi Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Insentif Pajak Daerah berupa Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, yang diharapkan secara gradual dapat meningkatkan realisasi penerimaan PKB khususnya penerimaan PKB dari KBm BDU;
- 2) meningkatkan motivasi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Daerah, khususnya PKB dengan memberikan stimulus insentif fiskal sebagaimana tertuang dalam Implementasi Surat Keputusan Kepala Bapenda No e-0035 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian penerimaan PKB pada seluruh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UPPPKB);
- 4) pelaksanaan kegiatan Razia Gabungan dengan mengikutsertakan peran serta Media Massa/Media Sosial secara masif di 5 (lima) wilayah kota administrasi;
- 5) pembukaan pelayanan gerai Samsat oleh UP PKB (Samsat) pada hari Senin s.d. Sabtu mulai bulan Oktober 2023;
- 6) sosialisasi secara masif terkait penggunaan aplikasi SIGNAL dan pembayaran pajak menggunakan teknologi QRIS bagi seluruh Wajib Pajak;
- 7) menggiatkan kembali upaya *tax clearance* sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020;
- 8) melalui UPPPKB dilakukan penyampaian himbauan pembayaran PKB kepada Wajib Pajak, himbauan BDU PKB, pelaksanaan razia *door to door* yang melibatkan unit/instansi terkait, khususnya unsur Walikota/Kecamatan/Kelurahan dan penyampaian himbauan KBm BDU termasuk kepada KBm Perusahaan dan kategori mewah;
- 9) melakukan kegiatan verifikasi piutang dan upaya penagihan piutang PKB yang diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan piutang PKB; dan



10) penambahan sarana pembayaran PKB dan BBNKB, melalui pembukaan gerai samsat baru pada beberapa tempat di Jakarta.

Walaupun realisasi PKB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan Pajak Alat Berat tahun 2023 mengamanatkan Pengenaan PKB dan BBN-KB KBL Berbasis Baterai ditetapkan 0% dari DPP PKB dan DPP BBN-KB;
- 2) masih terdapat wajib pajak yang belum patuh terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- 3) terdapat surat himbauan dan pemberitahuan tunggakan PKB Belum Daftar Ulang (BDU) yang tidak tersampaikan, salah satu penyebabnya adalah data alamat pada sistem PKB belum akurat.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Realisasi BBN-KB tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp6.643.605.545.100,00 atau 106,30% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.250.000.000.000,00, dengan demikian realisasi BBN-KB tahun anggaran 2023 telah melampaui target sebesar Rp393.605.545.100,00 atau 6,30%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp345.839.665.200,00 atau 5,49% jika dibandingkan dengan realisasi BBN-KB tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.297.765.879.900,00.

Rincian BBN-KB tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	453.551.000.000	469.886.083.900	103,60
2	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	895.801.000.000	1.001.439.350.800	111,79
3	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	3.503.256.000.000	3.687.349.539.000	105,25
4	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	71.491.000.000	87.343.797.500	122,17
5	BBNKB-Mobil Bus-Bus	3.033.000.000	3.051.230.500	100,60
6	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	255.932.000.000	249.745.747.500	97,58
7	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	18.512.000.000	18.275.487.000	98,72
8	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	23.112.000.000	26.932.916.000	116,53
9	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	78.569.000.000	93.865.765.500	119,47
10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	659.132.000.000	669.784.062.500	101,62
11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	3.490.000.000	2.723.055.000	78,02
12	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	10.000.000	-	0,00



No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
13	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	284.101.000.000	333.208.509.900	117,29
14	BBNKB-Mobil Roda Tiga	10.000.000	-	0,00
	JUMLAH	6.250.000.000.000	6.643.605.545.100	106,30

Langkah-langkah dan upaya intensif yang telah dilakukan dalam pencapaian realisasi Pajak BBN KB, antara lain:

- 1) proses percepatan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagai dasar APM, *Dealer*, *Leasing* untuk menerbitkan faktur pajak, menjadi hal yang patut untuk tetap dipertahankan;
- 2) implementasi Peraturan Gubernur Nomor 29 tahun 2023 tentang Insentif Pajak Daerah berupa Pengenaan sebesar 0% (Nol Persen) Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan tertib administrasi registrasi dan kepemilikan kendaraan bermotor; dan
- 3) implementasi SK Kepala Badan Pendapatan Daerah No. e-0035/2023 tentang penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB.

Walaupun realisasi Pajak BBN KB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) belum pulihnya daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor baru yang disebabkan oleh kecenderungan masyarakat masih memprioritaskan pada kebutuhan dasar, perlambatan ekonomi nasional dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada akhir 2023; dan
- 2) asumsi *Loss Potency* penerimaan BBNKB yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan kendaraan Listrik yang mendapatkan insentif fiskal mengacu pada Permendagri No 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan Pajak Alat Berat tahun 2023 mengamanatkan Pengenaan PKB dan BBN-KB KBL Berbasis Baterai ditetapkan 0% dari DPP PKB dan DPP BBN-KB.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Realisasi PBB-KB Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.680.813.642.600,00 atau 105,05% dari target yang



ditetapkan sebesar Rp1.600.000.000.000,00, dengan demikian realisasi PBB-KB melampaui target sebesar Rp80.813.642.600,00 atau 5,05%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp246.654.506.461,00 atau 17,20% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.434.159.136.139,00.

Rincian PBB-KB tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	1.599.970.000.000	1.680.813.642.600	105,05
2	PBBKB-Bahan Bakar Solar	10.000.000	-	0,00
3	PBBKB-Bahan Bakar Gas	10.000.000	-	0,00
4	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	10.000.000	-	0,00
	JUMLAH	1.600.000.000.000	1.680.813.642.600	105,05

Langkah-langkah dan upaya intensif yang dilakukan dalam pencapaian realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, antara lain:

- 1) ekstensifikasi melalui pendataan Perusahaan Niaga Bahan Bakar Minyak/BBM/Hasil Olahan, khususnya terhadap perusahaan yang telah memiliki IUNU;
- 2) memaksimalkan pelaporan wajib pajak secara *online* (pajak *online*), khususnya terhadap badan usaha dengan kontribusi penerimaan PBBKB terbesar;
- 3) melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan BPH Migas Kementerian ESDM dalam rangka penelusuran data pembanding terkait dengan jumlah volume pendistribusian BBM di DKI Jakarta; dan
- 4) penyampaian himbauan kepada para WP PBBKB untuk menyampaikan laporan secara baik dan benar.

Walaupun realisasi PBB-KB mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) peralihan penggunaan bahan bakar minyak ke penggunaan tenaga listrik sebagai penggerak kendaraan bermotor menjadi tantangan dalam pemungutan PBBKB; dan
- 2) masih sulitnya mendapatkan data riil atas penjualan bahan bakar (*delivery order/DO*) dari Wajib Pajak PBBKB.

d. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Dikecualikan dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan



sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak Rokok merupakan jenis pajak yang secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menarik cukai dari produksi rokok di Indonesia.

Secara umum mekanisme pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan disetorkan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Kas Negara serta dilakukan pengelolaan penyetoran ke RKUD Provinsi pada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI, berdasarkan komposisi jumlah penduduk per Provinsi/Daerah. Melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, setiap tahun telah ditetapkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi/Daerah, berdasarkan proporsi jumlah penduduk per provinsi/daerah yang ditetapkan seiring dengan penetapan estimasi penerimaan tersebut.

Realisasi Pajak Rokok tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp855.303.949.037,00 atau 97,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp880.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Rokok tidak mencapai target sebesar Rp24.696.050.963,00 atau 2,81%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp29.482.421.212,00 atau 3,33% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok tahun anggaran 2022 sebesar Rp884.786.370.249,00.

Analisis singkat terkait dengan penerimaan Pajak Rokok di tahun anggaran 2023, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pajak Rokok merupakan jenis pajak yang secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menarik cukai dari produksi rokok di Indonesia;
- 2) secara umum mekanisme pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan disetorkan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Kas Negara serta dilakukan pengelolaan penyetoran ke RKUD Provinsi pada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI, berdasarkan komposisi jumlah penduduk per Provinsi/Daerah;
- 3) melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, setiap tahun telah ditetapkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi/Daerah, berdasarkan proporsi jumlah penduduk per provinsi/daerah yang ditetapkan seiring dengan penetapan estimasi penerimaan tersebut;
- 4) penerimaan Pajak Rokok akan menunjukkan tren positif, jika penjualan pita cukai rokok positif; dan
- 5) ditetapkannya kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui PMK Nomor 192/PMK.010/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang



Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, yang mengamanatkan kenaikan tarif cukai, rata-rata sebesar 12,5% dan efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimisasi penerimaan Pajak Rokok antara lain:

- 1) percepatan pembuatan Surat Kuasa Gubernur dan berkas penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi, Kesepakatan dan Kompilasi Kesepakatan Kontribusi daerah dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023; dan
- 2) koordinasi intensif sehingga transfer pajak rokok dan validasi penerimaan pajak rokok ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap triwulan dapat direalisasikan tepat waktu.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pajak rokok tahun anggaran 2023 antara lain:

- 1) sulitnya mendapatkan data riil pemungutan pajak rokok yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia; dan
- 2) turunnya daya beli dan keinginan masyarakat terhadap rokok, sebagai dampak dari pola hidup masyarakat untuk hidup sehat dan harga rokok yang secara perlahan mulai naik.

e. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- 1) jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;



- 2) jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- 3) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- 4) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- 5) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Hotel tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.898.844.468.744,00 atau 118,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.600.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Hotel melampaui target sebesar Rp298.844.468.744,00 atau 18,68%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp411.007.056.280,00 atau 27,62% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.487.837.412.464,00. Rincian Pajak Hotel tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pajak Hotel	1.516.361.000.000	1.802.207.786.717	118,85
2	Pajak Motel	2.163.000.000	2.314.842.495	107,02
3	Pajak Losmen	8.796.000.000	9.946.532.080	113,08
4	Pajak Gubuk Pariwisata	2.241.000.000	2.573.274.941	114,83
5	Pajak Wisma Pariwisata	7.261.000.000	8.486.216.995	116,87
6	Pajak Pesanggrahan	10.000.000	-	0,00
7	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.000.000	-	0,00
8	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	63.158.000.000	73.315.815.516	116,08
	JUMLAH	1.600.000.000.000	1.898.844.468.744	118,68

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- 1) monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak tidak melakukan setoran masa dan tidak melakukan pelaporan SPTPD;
- 2) kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- 3) implementasi Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Analisa Setoran Masa Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- 4) pengimplementasian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hotel yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT), termasuk pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara pemeriksaan secara berkala untuk memastikan proses pemeriksaan



sesuai ketentuan dan target pemeriksaan pajak daerah tahun 2023 tercapai;

- 5) penagihan atas tunggakan SKPDKB objek pajak hotel sekaligus upaya pemasangan stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan daerah;
- 6) penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- 7) penggiatan kembali upaya *tax clearance* sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020; dan
- 8) optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak *online* sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib pajak hotel berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2022.

Walaupun realisasi Pajak Hotel mencapai target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya, antara lain:

- 1) indikasi tingkat kepatuhan Pajak Hotel masih belum optimal;
- 2) pada bulan Desember 2023, aktivitas perhotelan dan tingkat hunian hotel di Jakarta cenderung mengalami perlambatan karena libur akhir tahun bisnis, dan pelaku bisnis cenderung menunggu dan melihat situasi secara nasional, terutama dengan persiapan pemilihan presiden yang sedang berlangsung; dan
- 3) adanya kecenderungan masyarakat untuk memilih sewa apartemen dibandingkan memanfaatkan hotel sebagai sarana menginap.

f. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai



penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Restoran tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.949.482.690.461,00 atau 103,93% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.800.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Restoran melampaui target sebesar Rp149.482.690.461,00 atau 3,93%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp558.973.497.208,00 atau 16,49% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.390.509.193.253,00.

Rincian Pajak Restoran tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.668.411.000.000	2.797.627.805.129	104,84
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	530.733.000.000	531.452.793.853	100,14
3	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	457.421.000.000	467.171.418.689	102,13
4	Pajak Kantin dan Sejenisnya	82.538.000.000	87.517.987.545	106,03
5	Pajak Warung dan Sejenisnya	10.000.000	-	0,00
6	Pajak Bar dan Sejenisnya	10.000.000	-	0,00
7	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	60.877.000.000	65.712.685.245	107,94
	JUMLAH	3.800.000.000.000	3.949.482.690.461	103,93

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target antara lain:

- 1) monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa dan tidak melakukan pelaporan SPTPD;
- 2) kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- 3) implementasi Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Analisa Setoran Masa Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- 4) implementasi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Restoran yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT), termasuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi secara pemeriksaan secara berkala untuk memastikan proses pemeriksaan sesuai ketentuan dan target pemeriksaan pajak daerah tahun 2023 tercapai;
- 5) penagihan atas tunggakan SKPKDB objek pajak restoran sekaligus upaya pemasangan stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan daerah;



- 6) penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- 7) optimalisasi penerimaan pajak restoran melalui pelibatan Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) dalam melakukan konseling dan klarifikasi pemenuhan kewajiban pembayaran kepada wajib pajak;
- 8) proses penagihan terhadap Wajib Pajak Restoran melalui kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- 9) penggiatan kembali upaya *tax clearance* sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020; dan
- 10) optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak *online* sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak restoran berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2022.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran tahun anggaran 2023, antara lain:

- 1) indikasi tingkat kepatuhan Pajak Restoran masih belum optimal;
- 2) terdapat beberapa objek pajak yang tahun sebelumnya masih dipungut pajak restoran, namun saat ini dipungut PPN karena amanat UU HKPD; dan
- 3) makin berkembangnya usaha restoran dan kuliner di daerah penyangga DKI Jakarta yang disinyalir menjadi *loss potency* pajak restoran.

g. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

- 1) tontonan film;
- 2) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- 3) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- 4) pameran;
- 5) diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- 6) sirkus, akrobat, dan sulap;
- 7) permainan bilyar, golf, dan boling;
- 8) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- 9) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan



10) pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Hiburan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp686.623.192.014,00 atau 114,44% dari target yang ditetapkan sebesar Rp600.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Hiburan melampaui target sebesar Rp86.623.192.014,00 atau 14,44%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp286.985.912.456,00 atau 71,81% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan tahun anggaran 2022 sebesar Rp399.637.279.558,00.

Rincian Pajak Hiburan tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pajak Tontonan Film	78.722.000.000	82.480.200.676	104,77
2	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	20.849.000.000	24.225.325.459	116,19
3	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	10.000.000	5.865.000	58,65
4	Pajak Pameran	159.000.000	540.771.954	340,11
5	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	121.733.000.000	138.513.863.911	113,78
6	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	10.000.000	398.091.625	3980,92
7	Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>	7.468.000.000	8.861.359.767	118,66
8	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	174.800.000.000	18.423.339.306	104,93
9	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (<i>Fitness Center</i>)	182.665.000.000	227.214.759.061	124,39
10	Pajak Pertandingan Olahraga	13.584.000.000	20.959.615.255	154,30
	JUMLAH	600.000.000.000	686.623.192.014	114,44

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target antara lain:

- 1) monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa dan tidak melakukan pelaporan SPTPD;
- 2) kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;



- 3) implementasi Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Analisa Setoran Masa Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- 4) implementasi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hiburan yang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT), termasuk pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara pemeriksaan secara berkala untuk memastikan proses pemeriksaan sesuai ketentuan dan target pemeriksaan pajak daerah tahun 2023 tercapai;
- 5) penagihan atas tunggakan SKPKDB objek pajak hiburan sekaligus upaya pemasangan stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan daerah;
- 6) penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- 7) optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui pelibatan Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) dalam konseling dan klarifikasi pemenuhan kewajiban pembayaran kepada wajib pajak;
- 8) intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Hiburan melalui penerapan Instruksi Kepala Bapenda No 2 tahun 2023 tentang Implementasi Pemungutan Pajak Hiburan dan atau Pajak Restoran Terhadap Pelaku Usaha yang Menyelenggarakan Kegiatan Hiburan dan Menyediakan Pelayanan Makanan dan atau Minuman pada 1 (satu) Tempat yang Sama;
- 9) penggiatan kembali upaya *tax clearance* sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020; dan
- 10) optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak *online* sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak restoran berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada tahun anggaran 2023 antara lain:

- 1) indikasi tingkat kepatuhan pajak hiburan masih belum optimal;
- 2) stagnasi pada pertumbuhan objek pajak hiburan baru karena kemampuan daya beli masyarakat dan dunia bisnis khususnya sektor pariwisata yang masih belum sepenuhnya pulih karena pandemi;



- 3) perkembangan yang semakin dinamis pada industri hiburan malam salah satunya bentuk transformasi dan pergeseran dari diskotik, klub dan bar konvensional menjadi restoran formal yang menyediakan hiburan malam berupa pentas musik hidup/DJ, konser band; dan Adanya peralihan habit dan *culture* masyarakat dalam menikmati hiburan tontonan (contoh: Bioskop ke *Netflix*, *Disney Hotstar+*, Vidio dan sebagainya) menyebabkan penurunan secara gradual atas kunjungan masyarakat atau okupansi bioskop.

h. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame meliputi:

- 1) reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
- 2) reklame kain;
- 3) reklame melekat, stiker;
- 4) reklame selebaran;
- 5) reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- 6) reklame udara;
- 7) reklame apung;
- 8) reklame suara;
- 9) reklame film/*slide*; dan
- 10) reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- 1) penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- 2) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- 3) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- 4) reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- 5) penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan



berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Reklame tahun anggaran 2023 sebesar Rp975.808.842.214,00 atau 108,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp900.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Reklame melampaui target sebesar Rp75.808.842.214,00 atau 8,42%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp120.107.236.092,00 atau 10,96% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.095.916.078.306,00.

Rincian Pajak Reklame tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/ Megatron</i>	825.868.000.000	889.541.909.227	107,71
2	Pajak Reklame Kain	44.801.000.000	49.041.961.736	109,47
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker	69.000.000	195.617.500	283,50
4	Pajak Reklame Selebaran	9.000.000	13.000.000	144,44
5	Pajak Reklame Berjalan	26.900.000.000	34.024.530.334	126,49
6	Pajak Reklame Udara	185.000.000	167.000.000	90,27
7	Pajak Reklame Apung	9.000.000	-	0,00
8	Pajak Reklame Suara	33.000.000	20.928.000	63,42
9	Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>	2.125.000.000	2.802.595.417	131,89
10	Pajak Reklame Peragaan	1.000.000	1.300.000	130,00
	JUMLAH	900.000.000.000	975.808.842.214	108,42

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan pada tahun anggaran 2023 antara lain:

- 1) Kebijakan insentif fiskal untuk pajak reklame melalui penetapan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame.
- 2) penagihan untuk piutang SKPD pajak reklame dengan prioritas sebagai berikut:
 - a) penagihan pasif dan penagihan aktif terhadap 48 tunggakan wajib pajak reklame terbesar (*WP group*) dengan total tunggakan Rp23 miliar;



- b) penagihan serentak wajib pajak badan seperti PT KAI (Reklame Stasiun Kereta) dan wajib pajak PT Pertamina-PT Pertamina Retail (Reklame SPBU); dan
 - c) penagihan piutang SKPD pajak reklame lainnya.
- 3) ekstensifikasi melalui pendataan reklame perkantoran, insidental dan reklame berjalan pada kendaraan.
 - 4) penyampaian himbauan reklame yang belum daftar ulang (BDU) kelompok tertentu.
 - 5) simplifikasi persyaratan pendaftaran/perpanjangan reklame guna mendorong Wajib Pajak melakukan pendaftaran dan perpanjangan secara daring melalui pajakonline.jakarta.go.id.
 - 6) simplifikasi persyaratan, prosedur penetapan dan pembatalan Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame guna mendorong pertumbuhan Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Bapenda Nomor 1588 Tahun 2023.
 - 7) sosialisasi dan penyamaan persepsi tentang pengenaan pajak reklame kepada *stakeholders* atas reklame pengenalan usaha; reklame dalam ruang; hingga dan penyelenggaraan reklame kegiatan politik.

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak reklame tahun anggaran 2023, antara lain:

- 1) Wajib Pajak terkendala untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang disebabkan lamanya waktu penyelesaian proses perizinan reklame;
- 2) revisi/perubahan Pergub Nilai Sewa Reklame (NSR) yang masih menjadi perdebatan di kalangan penyelenggara reklame;
- 3) adanya konstruksi reklame yang tidak berizin dan masih berdiri, yang belum dibongkar oleh Satpol PP, sehingga memberi celah bagi para wajib pajak/biro reklame untuk memasang reklame secara ilegal;
- 4) berkurangnya penyelenggaraan reklame, yang disebabkan oleh kemampuan ekonomi penyelenggara reklame, sebagai dampak dari bencana wabah COVID-19; dan
- 5) perubahan *mindset* penyelenggara reklame untuk lebih memilih media sosial sebagai sarana penyelenggaraan/penayangan reklame/iklan, dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

i. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:



- 1) penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 2) penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- 3) penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- 4) penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam hal:

- 1) tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
- 2) tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp889.487.806.146,00 atau 111,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp800.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Penerangan Jalan melampaui target sebesar Rp89.487.806.146,00 atau 11,19%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp67.503.946.396,00 atau 8,21% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun anggaran 2022 sebesar Rp821.983.859.750,00.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun anggaran 2023, antara lain:

- 1) menghimbau kepada WP agar lebih tertib administrasi dalam pembayaran dan pelaporan pajak;
- 2) rencana penggalan terhadap potensi penerimaan PPJ dari penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (contoh penggunaan genset badan/perorangan);



- 3) Analisis Potensi Setoran Masa PPJ yang didasarkan pada data Laporan Statistik PT. PLN (Persero); dan
- 4) rencana koordinasi dengan PT. PLN (Persero) di tingkat pusat, terkait integrasi data.

Kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan tahun anggaran 2023, antara lain:

- 1) belum tertib administrasinya PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan PT. PLN (Persero) Distribusi Banten, terkait data pendukung pelaporan SPTPD; dan
- 2) pelaksanaan penggalan potensi objek PPJ baru di antaranya objek tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri belum optimal yang disebabkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pemungutan PPJ atas objek dimaksud.

j. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:

- 1) penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 2) penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- 3) penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- 4) penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir, tarifnya paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Parkir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp477.331.127.230,00 atau 106,07% dari target yang ditetapkan sebesar Rp450.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Parkir melampaui target sebesar Rp27.331.127.230,00 atau 6,07%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp62.524.873.240,00 atau 15,07% jika



dibandingkan dengan realisasi Pajak Parkir tahun anggaran 2022 sebesar Rp414.806.253.990,00.

Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2023 antara lain:

- 1) monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa dan tidak melakukan pelaporan SPTPD;
- 2) kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
- 3) implementasi Instruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Analisa Setoran Masa Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir;
- 4) pencantuman dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT), termasuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi secara pemeriksaan secara berkala untuk memastikan proses pemeriksaan sesuai ketentuan dan target pemeriksaan pajak daerah tahun 2023 tercapai;
- 5) penagihan atas tunggakan SKPDKB objek pajak parkir sekaligus upaya pemasangan stiker/plang atas objek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan daerah;
- 6) penagihan aktif melalui surat paksa, sita dan lelang dengan mengoptimalkan peran serta Juru Sita Pajak;
- 7) optimalisasi pelaporan data secara elektronik melalui kanal pajak online sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak restoran berdasarkan Pergub Nomor 98 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2022;
- 8) penyampaian himbauan pembetulan SPTPD/perbaikan setoran masa kepada Wajib Pajak Parkir;
- 9) penggiatan kembali upaya *tax clearance* sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020; dan
- 10) ekstensifikasi Pajak Parkir melalui pemberlakuan SE Kepala Badan Nomor 18/SE/2023 tentang Pendataan Penyelenggaraan Parkir yang bekerjasama Dengan Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan koordinasi secara intensif dengan UPT Parkir Dishub DKI Jakarta dalam rangka penyamaan persepsi dan pertukaran data usaha perparkiran yang dikerjasamakan dengan pihak swasta.



Kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Parkir tahun anggaran 2023, antara lain:

- 1) menghimbau kepada WP agar lebih tertib administrasi dalam pembayaran dan pelaporan pajak;
- 2) rencana penggalian terhadap potensi penerimaan PPJ dari penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (contoh penggunaan genset badan/perorangan);
- 3) analisis Potensi Setoran Masa PPJ yang didasarkan pada data Laporan Statistik PT. PLN (Persero); dan
- 4) Rencana koordinasi dengan PT. PLN (Persero) di tingkat pusat, terkait integrasi data.

k. Pajak Air Tanah (PAT)

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

- 1) pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- 2) pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- 1) jenis sumber air;
- 2) lokasi sumber air;
- 3) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- 4) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- 5) kualitas air; dan
- 6) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Penggunaan faktor-faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

Realisasi Pajak Air Tanah tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp83.718.755.701,00 atau 119,60% dari target yang ditetapkan sebesar Rp70.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Air Tanah melampaui target sebesar Rp13.718.755.701,00 atau 19,60%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp35.273.740.693,00 atau 72,81% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Pemanfaatan Air Tanah tahun anggaran 2022 sebesar Rp48.445.015.008,00.



Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- 1) ekstensifikasi melalui pendataan dan pengukuhan wajib pajak yang bergerak disektor bisnis dan komersial seperti hotel, restoran besar, dan perkantoran;
- 2) koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk percepatan pengklasifikasian (*mapping*) objek maupun penyesuaian ulang data/klasifikasi ulang objek pajak berdasarkan Pergub Nomor 94 Tahun 2021;
- 3) penagihan atas piutang SKPD Pajak Air Tanah dan penagihan serentak untuk Wajib Pajak Badan seperti PT KAI untuk Pajak Air Tanah Stasiun Kereta dan PT Pertamina- PT Pertamina Retail untuk Pajak Air Tanah SPBU di seluruh wilayah DKI Jakarta;
- 4) verifikasi objek yang telah dilakukan pengklasifikasian objek atas jenis perusahaan dan kualitas air oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta guna mengidentifikasi objek aktif, tidak aktif, tutup, tidak ditemukan dan keadaan objek lainnya;
- 5) pemutakhiran data wajib pajak dengan memasukkan *email* wajib pajak untuk percepatan penyampaian SKPD Reklame secara elektronik; dan
- 6) pemberian dukungan atas usulan Dinas SDA untuk perubahan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 untuk mengamankan PAT dari kegiatan *dewatering*.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Air Tanah tahun anggaran 2023, antara lain:

- 1) adanya Wajib Pajak yang hanya menggunakan air tanah sebagai cadangan, apabila air perpipaan mati/tidak stabil, sehingga penggunaan/pemanfaatan atas air tanah seminimal mungkin yang mempengaruhi nilai ketetapan pajaknya;
- 2) adanya pembatasan penggunaan/pemanfaatan air tanah oleh Wajib Pajak, karena buruknya kualitas air tanah, terutama terhadap objek air tanah yang berada di lokasi dekat dengan daerah pesisir pantai/laut;
- 3) masih adanya perhitungan pemanfaatan air tanah yang tidak akurat, disebabkan karena adanya meteran air yang rusak/mati/tidak stabil yang belum dan/atau terlambat mendapat penggantian dari Dinas terkait;
- 4) masih adanya pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah tanpa melakukan kewajiban perpajakannya;
- 5) tidak terdeteksinya pemanfaatan air tanah oleh proyek berskala besar (*dewatering*) karena belum terpasangnya meteran air yang terkendala dengan proses perizinan;



- 6) proses pemetaan/pengklasifikasian/*mapping* OP PAT, yang merupakan tindak lanjut diundangkannya Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah, sampai dengan saat ini belum selesai dilakukan oleh Dinas terkait. Hal tersebut menjadi penghambat dilakukannya penetapan dan penagihan PAT, mengingat pemetaan/pengklasifikasian/*mapping* tersebut menjadi komponen penetapan Nilai Perolehan Air tanah (NPA) sebagai DPP PAT;
- 7) untuk penetapan PAT *dewatering* belum dapat dilakukan, mengingat adanya kesalahan rumus pada Pasal di Pergub 94 Tahun 2021 yang mengatur tentang perhitungan NPA *dewatering*; dan
- 8) penurunan pemanfaatan air tanah, khususnya pada perkantoran, yang masih menerapkan pembatasan kegiatan di kantor akibat bencana wabah COVID-19.

I. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

- 1) Objek Pajak yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- 3) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- 4) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- 5) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- 6) digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak



tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi PBB-P2 tahun anggaran 2023 sebesar Rp9.048.682.494.705,00 atau 100,54% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.000.000.000.000,00, dengan demikian realisasi PBB-P2 melampaui target sebesar Rp46.682.494.705,00 atau 0,54%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp802.307.616.774,00 atau 9,73% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-P2 tahun anggaran 2022 sebesar Rp8.246.374.877.931,00.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak ini pada tahun anggaran 2023 antara lain:

- 1) kebijakan insentif fiskal untuk PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2023.
- 2) penagihan pasif dan penagihan aktif PBB-P2 yang terdiri dari upaya penagihan sebagai berikut:
 - a) himbauan untuk piutang PBB-P2 tahun 2013 s.d. 2022 agar memanfaatkan stimulus keringanan piutang pokok dan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023;
 - b) himbauan terhadap Wajib Pajak dengan ketetapan pajak per tahun sebesar 100 juta ke atas untuk melakukan permohonan PBB-P2 secara angsuran berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023;
 - c) pemberian teguran terhadap Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran s.d 31 Desember 2023 dengan pelibatan Lurah, Camat, Walikota/Bupati di kota administrasi; dan
 - d) penagihan aktif dengan surat paksa dan penagihan melibatkan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
- 3) penambahan kanal dan metode pembayaran PBB-P2 untuk memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran secara digital seperti melalui QRIS.
- 4) pemutakhiran data PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah melalui Sistem Informasi Geospasial.



- 5) simplifikasi dan digitalisasi pelayanan pengurangan dan pembebasan PBB-P2 yang diajukan secara daring melalui kanal pajakonline.jakarta.go.id.
- 6) pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pendataan NIK dan Data Pendukung Lainnya Terhadap Objek PBB-P2 oleh petugas Kelurahan guna mendapatkan data narahubung Wajib PBB-P2.

Walaupun realisasi PBB-P2 s.d 31 Desember 2023 telah mencapai target, dalam pelaksanaan pemungutannya di tahun 2023, terdapat kendala yang menghambat pencapaian. Kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) adanya penurunan kemampuan ekonomi untuk Badan dan Orang Pribadi yang mengalami kesulitan melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran PBB-P2; dan
- 2) terdapat objek pajak yang mempunyai nilai ketetapan pajak besar tetapi status objek pajak tersebut sudah tidak ada, objek ganda (*double object*), objek-subjek tidak dapat ditemukan, hingga objek sengketa sehingga kesulitan melakukan penagihan dan berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pencapaian *collection rate* dan meningkatnya piutang PBB-P2 setiap tahunnya.

m. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari:

- 1) perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- 2) negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- 3) badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; dan
- 4) orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama orang pribadi atau



Badan karena wakaf dan orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan mengenai pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan adanya penambahan jenis pungutan BPHTB diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keuangan daerah yang selama ini dirasakan belum mencukupi.

Mekanisme mengenai pemungutan BPHTB diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2011 tanggal 4 April 2011. Dalam surat keputusan tersebut mengatur mengenai penunjukan Bank sebagai tempat pembayaran dan rekening penampungan penerimaan BPHTB. Adapun bank yang ditunjuk sebagai bank penerima dan penampung pendapatan BPHTB adalah Bank DKI sebanyak 6 (enam) rekening penampungan, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI masing-masing 1 (satu) rekening penampungan. Untuk lebih mengikat, maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur mengenai mekanisme penerimaan, hak dan kewajiban bank pengelola rekening penampungan penerimaan BPHTB dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mekanisme pelimpahan saldo penerimaan BPHTB, tata cara pelaporan dan sanksi.

Pada semester II tahun 2023 terjadi perubahan pada mekanisme pelaporan BPHTB di mana pelaporan BPHTB dilakukan secara elektronik (e-BPHTB). Hal tersebut untuk mendukung kemudahan dan percepatan pelayanan pelaporan BPHTB sebagai salah satu pajak *self-assessment* yang dilakukan pelaporan secara mandiri oleh wajib pajak. Pelaporan e-BPHTB bertujuan untuk digitalisasi pengadministrasian pajak, efisiensi dan efektivitas dan pengawasan pelaporan oleh petugas.

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.910.215.589.931,00 atau 86,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.950.000.000.000,00, dengan demikian realisasi BPHTB tidak mencapai target sebesar Rp1.039.784.410.069,00 atau 13,08%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp562.216.048.531,00 atau 8,86% jika dibandingkan dengan realisasi BPHTB tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.347.999.541.400,00.



Rincian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun anggaran 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	BPHTB-Pemindahan Hak	7.949.990.000.000	6.910.215.589.931	86,92
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru	10.000.000	-	0,00
	JUMLAH	7.950.000.000.000	6.910.215.589.931	86,92

Langkah-langkah dan upaya yang intensif dilakukan pada tahun anggaran 2023 antara lain:

- 1) penerbitan Surat Keputusan NJOP tahun 2023 yang dilakukan secara daring melalui kanal pajakonline.jakarta.go.id untuk kemudahan melakukan transaksi peralihan/ perolehan objek;
- 2) pengembangan sistem BPHTB secara elektronik (e-BPHTB) sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelaporan, Pelayanan, dan Pengawasan BPHTB secara Elektronik untuk efisiensi dan efektivitas pemungutan BPHTB;
- 3) penetapan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembebasan BPHTB terhadap Perolehan Hak Pertama Kali dengan Nilai Perolehan Objek Pajak sampai dengan Nilai Tertentu yang berkontribusi atas penerimaan BPHTB dari objek non-tapak;
- 4) penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemecahan SPPT PBB-P2 atas Satuan Rumah Susun untuk mendorong percepatan penerimaan BPHTB sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh hak-hak pertanahannya; dan
- 5) kemudahan pelaporan BPHTB yang dilakukan oleh WNA berdasarkan dokumen keimigrasian berupa KITAP atau paspor.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target BPHTB tahun 2023 antara lain:

- 1) BPHTB termasuk salah satu jenis pajak daerah yang sulit dilakukan proyeksi untuk realisasi penerimaan karena hal-hal sebagai berikut:
 - a) sulit melakukan proyeksi tujuan perolehan Wajib Pajak akan kebutuhan properti (tanah/bangunan), baik untuk tujuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk tinggal, untuk berusaha, maupun untuk tujuan investasi; dan
 - b) dibandingkan barang konsumsi lainnya, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk membeli properti lebih kompleks dibandingkan dengan pembelian/konsumsi produk lainnya;
- 2) pengembangan sistem BPHTB secara elektronik (e-BPHTB) sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan baru terimplementasi



pada akhir semester I Tahun 2023 dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Bapenda Nomor 1154 tahun 2023; dan

- 3) implementasi Nota Kesepakatan Pengintegrasian Data dan Layanan Administrasi Pertanahan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional perlu ditingkatkan cakupan data yang dipertukarkan untuk lebih optimal.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp454.697.560.911,00 atau 98,40% dari anggaran sebesar Rp462.105.437.613,00, dengan demikian realisasi tidak mencapai target sebesar Rp7.407.876.702,00 atau 1,60%.

Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp376.977.989.704,00, maka pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp77.719.571.207,00 atau 20,62%.

Kebijakan terkait Retribusi Daerah cukup memiliki pengaruh terhadap kenaikan dan penurunan penerimaan selama tahun anggaran 2023, antara lain:

- a. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi Yang Terdampak Bencana Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
Setelah kebijakan ini dicabut per 22 November 2023, beberapa unit pemungut retribusi mengalami kenaikan penerimaan setelah tanggal tersebut.
- b. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi *Corona Virus Disease*-2019 memberikan penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Retribusi.
- c. Pencabutan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)
Dengan berhentinya PPKM, banyak kegiatan masyarakat yang mulai normal di berbagai bidang seperti industri, perdagangan, rekreasi, keagamaan, kebudayaan, kesenian dan olahraga. Perekonomian yang berangsur normal berdampak pada kenaikan penerimaan dari retribusi daerah.

Walaupun beberapa kebijakan di atas berpengaruh cukup signifikan dalam kenaikan penerimaan dari retribusi daerah, Unit Pemungut retribusi tetap melakukan berbagai upaya yang intensif untuk mengoptimalkan penerimaan seperti:



- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;
- b. memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan *online* dan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- c. mengembangkan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (*e-retribusi*);
- d. menerapkan *Banking System* dan transaksi non tunai dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- e. meningkatkan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
- f. mengadakan *event-event* dan perpanjangan waktu pelayanan untuk menarik minat pengunjung, seperti yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif; dan
- g. menjalin hubungan baik dengan pengguna jasa, kolaborasi dan promosi dengan *travel agent* serta *tenant* (Wajib Retribusi).

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Jasa Umum	118.383.731.748	130.712.761.587	110,41	126.309.977.657
2	Retribusi Jasa Usaha	70.469.421.513	87.591.704.800	124,30	76.177.559.722
3	Retribusi Perizinan Tertentu	273.252.284.352	236.393.094.524	86,51	174.490.452.325
Jumlah		462.105.437.613	454.697.560.911	98,40	376.977.989.704

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp130.712.761.587,00 atau 110,41% dari anggaran sebesar Rp118.383.731.748,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum melampaui target sebesar Rp12.329.029.839,00 atau 10,41%.



Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum tahun anggaran 2022 Rp126.309.977.657,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.402.783.930,00 atau 3,49%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	46.964.000.000	56.637.395.482	120,60	54.402.829.911
2	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	13.863.000.000	13.709.730.000	98,89	13.772.315.000
3	Retribusi Pelayanan Pasar	785.000.000	1.091.168.400	139,00	990.993.100
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	47.954.731.748	49.360.885.500	102,93	48.424.214.000
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.904.900.000	1.669.692.705	87,65	1.855.830.146
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	100.000	228.000	228,00	149.000
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	6.912.000.000	8.243.661.500	119,27	6.863.646.500
Jumlah		118.383.731.748	130.712.761.587	110,41	126.309.977.657

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp46.964.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp56.637.395.482,00 atau 120,60%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp9.673.395.482,00 atau 20,60%.

Kenaikan Realisasi Retribusi ini sebagian besar dipengaruhi oleh bertambahnya wajib retribusi pada pengangkutan sampah dari lokasi industri.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun anggaran 2022 sebesar Rp54.402.829.911,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.234.565.571,00 atau 4,11%.



Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan antara lain:

- a) pendataan Wajib Retribusi yang dilakukan secara intensif;
- b) penggunaan aplikasi *e-retribusi* dalam pendataan, penetapan, penyetoran dan pelaporan retribusi; dan
- c) adanya standarisasi pemungutan retribusi dengan mengacu kepada metode hitung yang terukur.

2) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp13.863.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp13.709.730.000,00 atau 98,89%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tidak mencapai target sebesar Rp153.270.000,00 atau 1,11%. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena masih berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2023 salah satunya pada Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat terdapat keringanan 100% untuk makam baru dan penghapusan sanksi administratif berupa bunga terlambat bayar.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan perpanjangan sewa tanah makam.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman tahun anggaran 2022 sebesar Rp13.772.315.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp62.585.000,00 atau 0,45%.

Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat antara lain:

- a) peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank; dan
- b) penyuluhan yang intensif kepada masyarakat bekerjasama dengan yayasan yang bergerak di bidang pemakaman, dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya seperti perpanjangan sewa tanah makam agar dapat dilakukan tepat pada waktunya.



3) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp785.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp1.091.168.400,00 atau 139,00 %, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar melampaui target sebesar Rp306.168.400,00 atau 39,00%.

Kenaikan Realisasi Retribusi ini dipengaruhi oleh kenaikan penggunaan lokasi sementara, pujasera, lokasi promosi dan lokasi binaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Sedangkan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target disebabkan di antaranya karena masih berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 sampai dengan 22 November 2023 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga terlambat bayar kepada wajib retribusi yang terdampak bencana wabah Covid-19 salah satunya pada Retribusi Pelayanan Pasar terdapat keringanan 100% dan penghapusan sanksi administratif berupa bunga terlambat bayar.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tahun anggaran 2022 sebesar Rp990.993.100,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp100.175.300,00 atau 10,11%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar antara lain:

- a) peningkatan sosialisasi kepada Wajib Retribusi secara berkala;
- b) penagihan secara aktif dan kontinyu baik kunjungan langsung dan media elektronik (telepon dan pesan *Whatsapp*);
- c) pemberitahuan secara berkala melalui media *speaker* aktif yang ada di Pasar Bunga Rawabelong berkaitan dengan adanya kunjungan *Mobile Branch* Bank DKI untuk mempermudah pembayaran retribusi; dan
- d) temu mitra yang dihadiri oleh beberapa ketua kelompok perwakilan pedagang Pasar Bunga Rawabelong setiap bulannya.

4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp47.954.731.748,00. Realisasinya mencapai Rp49.360.885.500,00 atau 102,93%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor melampaui target sebesar Rp1.406.153.752,00 atau 2,93%.



Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2022 sebesar Rp48.424.214.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp936.671.500,00 atau 1,93%.

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain:

- a) peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan kemudahan, dan cepat dalam proses Pengujian KIR sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku;
- b) peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- c) peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum;
- d) melaksanakan pengujian dengan cepat dan mudah dengan sistem *Drive Thru*; dan
- e) melakukan penyuluhan kepada awak angkutan umum dan mengadakan penertiban di lapangan.

5) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.904.900.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.669.692.705,00 atau 87,65%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp235.207.295,00 atau 12,35%.

Realisasi retribusi pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta melampaui target sebesar Rp915.500,00 atau 0,92%. Sedangkan realisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tidak mencapai target sebesar Rp236.122.795,00 atau 13,08%. Hal ini disebabkan oleh realisasi diperoleh apabila bangunan sudah selesai dibangun maka akan dikenakan retribusi ini, seiring menurunnya permohonan IMB/PBG maka permohonan retribusi ini juga terdampak. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.855.830.146,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp186.137.441,00 atau 10,03%.

6) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp100.000,00. Realisasi sampai dengan akhir



tahun anggaran 2023 mencapai Rp228.000,00 atau 228,00%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta melampaui target sebesar Rp128.000,00 atau 128,00%. Hal tersebut disebabkan di antaranya karena adanya pencetakan peta diganti dengan peta digital. Realisasi retribusi ini sudah beralih menjadi peta digital sehingga tidak dipungut retribusi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Realisasi tahun anggaran 2023 merupakan pembayaran piutang.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tahun anggaran 2022 sebesar Rp149.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp79.000,00 atau 53,02%.

7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp6.912.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp8.243.661.500,00 atau 119,27%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang melampaui target sebesar Rp1.331.661.500,00 atau 19,27%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.863.646.500,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.380.015.000,00 atau 20,11%.

Upaya yang telah dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk mencapai target pendapatan retribusi dengan melakukan komunikasi yang intens untuk menjaga hubungan baik dengan klien atau *customer* yang pernah melakukan pengujian di UPPISP PPKUKM, UPKB2T dan UP Metrologi dengan harapan klien tersebut akan melakukan pengujian kembali di Dinas PPKUKM.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp70.469.421.513,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp87.591.704.800,00 atau 124,30%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp17.122.283.287,00 atau 24,30%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun anggaran 2022 sebesar Rp76.177.559.722,00, maka terlihat realisasi di tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.414.145.078,00 atau 14,98%.



Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.5
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	42.834.647.513	54.905.199.122	128,18	51.755.753.231
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	200.000.000	595.668.080	297,83	466.666.000
3	Retribusi Terminal	3.149.300.000	2.430.250.462	77,17	2.471.895.141
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	116.000.000	196.700.000	169,57	0
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	775.000.000	967.896.250	124,89	767.261.250
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	21.090.274.000	25.845.219.800	122,55	18.339.535.700
7	Retribusi Penyeberangan di Air	1.500.000.000	1.630.105.000	108,67	1.548.660.000
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	804.200.000	1.020.666.086	126,92	827.788.400
Jumlah		70.469.421.513	87.591.704.800	124,30	76.177.559.722

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha tahun anggaran 2023 antara lain sebagai berikut:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp42.834.647.513,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp54.905.199.122,00 atau 128,18%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp12.070.551.609,00 atau 28,18%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp51.755.753.231,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.149.445.891,00 atau 6,09%.

Kenaikan realisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) adanya peningkatan permohonan sewa lahan dan bangunan dari pihak swasta dan instansi di luar Pemprov DKI Jakarta;
- b) adanya *event-event* di berbagai bidang sudah mulai diadakan dengan dicabutnya status PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) selama pandemi COVID-19;



- c) adanya peningkatan permohonan uji laboratorium untuk mutu hasil perikanan seiring peningkatan ekspor hasil perikanan;
- d) adanya pembayaran piutang dari tahun-tahun sebelumnya; dan
- e) dicabutnya Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 per 22 November 2023.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian laboratorium, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- a) optimalisasi pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pelayanan;
- b) optimalisasi jasa layanan yang disediakan;
- c) optimalisasi koordinasi antar unit terkait layanan kepada wajib retribusi; dan
- d) kolaborasi dan promosi kawasan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh SKPD terkait sebagai destinasi wisata, lokasi *shooting*, pertunjukkan seni budaya, pertandingan olahraga, seminar dan berbagai kegiatan lainnya kepada seluruh masyarakat.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh SKPD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain: Badan Pengelolaan Aset Daerah; Dinas Bina Marga; Dinas Sumber Daya Air; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Pertamanan dan Hutan Kota; dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp595.668.080,00 atau 297,83%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp395.668.080,00 atau 197,83%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tahun anggaran 2022



sebesar Rp466.666.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp129.002.080,00 atau 27,64%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3) Retribusi Terminal

Retribusi Terminal tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.149.300.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp2.430.250.462,00 atau 77,17%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp719.049.538,00 atau 22,83%.

Kendala yang dihadapi unit pemungut Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan dalam mencapai target adalah masih adanya pendapatan dalam bentuk manual/cash (belum *cashless*) pada lokasi Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, Terminal Tanjung Priok, Terminal Tanah Merdeka, Terminal Pulo Gebang, dan Terminal Pulo Gadung.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.471.895.141,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp41.644.679,00 atau 1,68%.

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal antara lain:

- a) mengusulkan penyesuaian tarif retribusi pada beberapa akun, dan telah diakomodir pada Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) mendorong UKPD Pemungut Retribusi agar terus berkoordinasi dengan Bank DKI dalam rangka percepatan proses pelimpahan dana dari bank DKI ke rekening; dan
- c) koordinasi dan monitoring secara intensif kepada UKPD pemungut retribusi.

4) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp116.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp196.700.000,00, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp80.700.000,00 atau 69,57%. Pencapaian target ini disebabkan antaranya sudah tidak adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada masa Pandemi COVID-19 dan dicabutnya Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2021 efektif per 22 November 2023.



Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp196.700.000,00 karena tahun anggaran 2022 tidak terdapat realisasi.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp775.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp967.896.250,00 atau 124,89%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp192.896.250,00 atau 24,89%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tahun anggaran 2022 sebesar Rp767.261.250,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp200.635.000,00 atau 26,15%. Hal ini disebabkan di antara karena dicabutnya Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2021 efektif per 22 November 2023.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Dinas Kebudayaan.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp21.090.274.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp25.845.219.800,00 atau 122,55%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp4.754.945.800,00 atau 22,55%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari pemakaian tempat untuk rekreasi kebudayaan dan permuseuman, gedung olahraga, kolam renang, pertunjukan planetarium dan observatorium serta pemakaian stadion olahraga. Semua unit pemungut dapat merealisasikan dengan melebihi target yang telah ditetapkan, terutama Dinas Pemuda dan Olahraga karena tingginya animo masyarakat untuk berolahraga pasca pandemi COVID-19.



Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun anggaran 2022 sebesar Rp18.339.535.700,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp7.505.684.100,00 atau 40,93%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

- a) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pemeliharaan fasilitas terkait;
- b) melakukan promosi melalui media sosial maupun kolaborasi dengan *travel agent*;
- c) mengadakan *event-event* dan perpanjangan waktu pelayanan untuk menarik minat pengunjung, seperti yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- d) menganggarkan kegiatan wajib kunjung museum bagi kalangan pelajar dalam APBD Dinas Kebudayaan sebagai salah satu upaya pengenalan museum ke masyarakat.

7) Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penyeberangan di Air tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp1.630.105.000,00 atau 108,67%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp130.105.000,00 atau sebesar 8,67%. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Meskipun melebihi target, Dinas Perhubungan mempunyai beberapa kendala mencapai target, di antaranya:

- a) tarif pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (UPPD) dan Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang (UP AP) masih belum ada penyesuaian dari Tahun 2015; dan
- b) implementasi sistem *Jaket Boat* masih dalam proses penyempurnaan dalam hal pelayanan ke Masyarakat.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyeberangan di Air tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.548.660.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp81.445.000,00 atau 5,26%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Penyeberangan di Air antara lain:

- a) mengusulkan penyesuaian tarif retribusi pada beberapa akun, dan telah diakomodir pada Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



- b) mendorong UKPD Pemungut Retribusi agar terus berkoordinasi dengan Bank DKI dalam rangka percepatan proses pelimpahan dana dari bank DKI ke rekening serta penyempurnaan sistem *Jaket Boat*; dan
- c) koordinasi dan monitoring secara intensif kepada UKPD pemungut retribusi.

8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp804.200.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp1.020.666.086,00 atau 126,92%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp216.466.086,00 atau 26,92%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp827.788.400,00, maka penerimaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp192.877.686,00 atau 23,30%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; Dinas Sumber Daya Air; dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah antara lain:

- a) melakukan beberapa inovasi dan perbaikan sarana di beberapa kebun, seperti Kebun Bibit Ragunan, Cibubur, Ciganjur, Agrowisata Cilangkap sehingga kunjungan ke kebun bibit meningkat sehingga penjualan bibit tanaman dan buah mengalami peningkatan; dan
- b) membuka kerja sama dengan pedagang-pedagang ikan di Tempat Promosi Hasil Perikanan (TPHP) agar membeli benih ikan yang diproduksi oleh Balai Benih Ikan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp273.252.284.352,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp236.393.094.524,00 atau 86,51%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp36.859.189.828,00 atau 13,49%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2022 sebesar Rp174.490.452.325,00, maka realisasi retribusi di tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp61.902.642.199,00 atau 35,48%.



Retribusi ini dilakukan pemungutan secara terpusat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.6
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0	0	0,00	173.182.252.325
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.205.000.000	1.672.500.000	75,85	865.000.000
3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	521.000.000	384.925.000	73,88	443.200.000
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	270.526.284.352	234.335.669.524	86,62	0
	Jumlah	273.252.284.352	236.393.094.524	86,51	174.490.452.325

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2023 antara lain:

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung disebut Persetujuan Bangunan Gedung. Oleh karena itu, nomenklatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diganti dengan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).



2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.205.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp1.672.500.000,00 atau 75,85%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi tidak mencapai target sebesar Rp532.500.000,00 atau 24,15%. Terdapat perubahan kebijakan terkait proses perizinan yang sebelumnya melalui aplikasi milik Jakevo berubah ke aplikasi OSS dibawah wewenang Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehingga mengakibatkan penurunan permohonan.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tahun anggaran 2022 sebesar Rp865.000.000,00, maka realisasi retribusi ini di tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp807.500.000,00 atau 93,35%.

3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu.

Retribusi Izin Trayek tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp521.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp384.925.000,00 atau 73,88%, dengan demikian realisasi izin trayek tidak mencapai target sebesar Rp136.075.000,00 atau 26,12%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek tahun anggaran 2022 sebesar Rp443.200.000,00, maka realisasi mengalami penurunan di tahun anggaran 2023 sebesar Rp58.275.000,00 atau 13,15%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan permohonan dari Wajib Retribusi.

4) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah retribusi atas perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun anggaran sebelumnya menggunakan nomenklatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.



Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp270.526.284.352,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp234.335.669.524,00 atau 86,62%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp36.190.614.828,00 atau 13,38%. Hal ini disebabkan di antaranya pencairan rencana pemindahan Ibukota Negara dari DKI Jakarta ke IKN.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun anggaran 2022 sebesar Rp173.182.252.325,00, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp61.153.417.199,00 atau 35,31%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun anggaran 2023, ditetapkan sebesar Rp545.869.249.882,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp545.869.249.987,00 atau 100,00%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan akhir 31 Desember 2023 mencapai target.

Apabila realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp402.424.109.447,00, terjadi kenaikan sebesar Rp143.445.140.540,00 atau 35,65%.

Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.7

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	14.833.909.790	14.833.909.895	100,00	11.446.583.055
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	531.035.340.092	531.035.340.092	100,00	390.977.526.392
Jumlah		545.869.249.882	545.869.249.987	100,00	402.424.109.447

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:



a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN tahun anggaran 2023, ditargetkan sebesar Rp14.833.909.790,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp14.833.909.895,00 atau 100,00%. Dengan demikian realisasi Penerimaan bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sampai dengan akhir 31 Desember 2023 mencapai target.

Apabila Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah tahun anggaran 2022 yang jumlahnya sebesar Rp11.446.583.055,00 maka di tahun anggaran 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp3.387.326.840,00 atau 29,59%. Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN tahun anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.8

Realisasi Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	4.783.042.097	4.783.042.097	100,00	8.522.799.131
2	PT Kawasan Berikat Nusantara	10.050.867.693	10.050.867.798	100,00	2.923.783.924
Jumlah		14.833.909.790	14.833.909.895	100,00	11.446.583.055

b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp531.035.340.092,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 Rp531.035.340.092,00 atau 100,00%, dengan demikian pendapatan dari penyertaan modal mencapai target.

Apabila Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat



sebesar Rp390.977.526.392,00, maka di tahun anggaran 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp140.057.813.700,00 atau 35,82%.

Rincian lebih lanjut realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tahun anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.9
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada BUMD
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Asuransi Bangun Askrida	2.302.711.241	2.302.711.241	100,00	2.095.749.671
2	PT Bank DKI Jakarta	281.670.562.798	281.670.562.798	100,00	218.157.132.721
3	Perumda Pasar Jaya	5.897.211.097	5.897.211.097	100,00	3.848.042.866
4	PT Cemani Toka	1.758.443.960	1.758.443.960	100,00	1.426.876.360
5	PT Food Station Tjipinang	14.426.245.892	14.426.245.892	100,00	10.100.000.000
6	PT Pembangunan Jaya	20.320.000.000	20.320.000.000	100,00	17.680.000.000
7	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	33.407.999.971	33.407.999.971	100,00	0
8	PT Transportasi Jakarta	88.529.116.811	88.529.116.811	100,00	60.654.099.878
9	PT Delta Jakarta, Tbk	68.315.227.500	68.315.227.500	100,00	63.060.210.000
10	Perumda PAL Jaya	14.407.820.822	14.407.820.822	100,00	13.955.414.896
Jumlah		531.035.340.092	531.035.340.092	100,00	390.977.526.392

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lain-lain PAD yang Sah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp4.434.068.961.336,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp4.622.697.231.503,00 atau 104,25%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp4.553.854.434.140,00, maka di tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp68.842.797.363,00 atau 1,51%.

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.10
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	11.413.849.047	6.868.340.118	60,18	29.206.342.087
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	330.956.195.962	94.789.704.974	28,64	253.237.521.840
3	Hasil Kerja Sama Daerah	11.505.000.000	7.933.605.456	68,96	11.505.480.015
4	Jasa Giro	168.564.688.469	163.754.037.012	97,15	150.005.286.455
5	Pendapatan Bunga	125.646.805.824	350.699.189.334	279,12	114.224.368.931
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	43.181.623.835	15.412.050.340	35,69	39.406.939.028
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	16.010.465.685	15.509.900.579	96,87	15.012.963.994
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	17.205.883.824	43.692.667.644	253,94	13.481.793.039
9	Pendapatan Denda Pajak Daerah	457.000.528.740	288.999.391.997	63,24	407.401.378.119
10	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	138.345.660	314.556.868	227,37	245.352.473
11	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.108.272.500	204.862.000	18,48	457.715.100
12	Pendapatan dari Pengembalian	0	102.706.935.656	100,00	200.105.565.598
13	Pendapatan BLUD	3.160.554.933.611	3.469.930.800.522	109,79	3.249.970.868.495
14	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	355.074.000	416.272.363	117,24	189.100.000
15	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	-	0,00	1.409.551.917
16	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	90.427.294.179	61.464.916.640	67,97	67.994.207.049
Jumlah		4.434.068.961.336	4.622.697.231.503	104,25	4.553.854.434.140

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tahun anggaran 2023 antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam tahun anggaran 2023 di antaranya diperoleh dari:

- 1) penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan; dan
- 2) penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah, seperti kendaraan bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta inventaris kantor yang tidak terpakai.



Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp11.413.849.047,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp6.868.340.118,00 atau 60,18%, dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp4.545.508.929,00 atau 39,82%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp29.206.342.087,00, maka realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp22.338.001.969,00 atau 76,48%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.11

Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5 (4:3)
1	Hasil Penjualan Tanah	1.506.778.752	3.145.400.000	208,75
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	3.051.226.973	1.435.586.998	47,05
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	6.855.843.322	2.287.353.120	33,36
Jumlah		11.413.849.047	6.868.340.118	60,18

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp330.956.195.962,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp94.789.704.974,00 atau 28,64%, dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp236.166.490.988,00 atau 71,36%.

Realisasi penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp94.789.704.974,00 merupakan penerimaan atas Hasil Sewa BMD.

Realisasi penerimaan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp94.789.704.974,00 berasal dari:

- 1) Pendapatan Sewa Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp51.597.993.179,00;
- 2) Pendapatan Sewa Listrik dan Air Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Sederhana sebesar Rp43.062.969.795,00;
- 3) Pendapatan Sewa Pemakaian Ruang Serba Guna PKK Melati Jaya sebesar Rp58.524.000,00;



- 4) Pendapatan cicilan atas sewa beli rumah bermis yang berlokasi di Muara Angke sebesar Rp42.930.000,00; dan
- 5) Pendapatan Izin Penyelenggaraan Reklame sebesar Rp27.288.000,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp253.237.521.840,00, maka realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp158.447.816.866,00 atau 62,57%.

Penurunan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan mengalami penurunan karena masih banyaknya pemanfaatan yang masih dalam proses persetujuan dan proses perjanjian kerja sama pemanfaatan serta untuk pemanfaatan titik reklame masih dalam proses sidang proposal untuk selanjutnya akan diproses perjanjian kerja sama pemanfaatannya.

c. Hasil Kerja Sama Daerah

Hasil Kerja Sama Daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp11.505.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.933.605.456,00 atau 68,96%, dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp3.571.394.544,00 atau 31,04%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Kerja Sama Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp11.505.480.015,00, maka realisasi Hasil Kerja Sama Daerah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.571.874.559 atau 31,04%.

Realisasi penerimaan Hasil Kerja Sama Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.933.605.456,00 merupakan penerimaan kontribusi kerja sama dalam bentuk Bangun Guna Serah sebesar Rp4.846.251.531,00 dan Bangun Serah Guna sebesar Rp3.087.353.925,00.

d. Jasa Giro

Jasa Giro tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp168.564.688.469,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai sebesar Rp163.754.037.012,00 atau 97,15%, dengan demikian realisasi Jasa Giro tidak mencapai target sebesar Rp4.810.651.457,00 atau 2,85%.

Realisasi penerimaan Jasa Giro tahun anggaran 2023 sebesar Rp163.754.037.012,00 terdiri dari:

- 1) Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp158.290.237.169,00;
- 2) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp3.768.903.594,00; dan
- 3) Jasa Giro pada Rekening Dana BOS sebesar Rp1.694.896.249,00.



Realisasi penerimaan Jasa Giro tahun anggaran 2023 sebesar Rp163.754.037.012,00 termasuk penerimaan Jasa Giro PEN atas bulan Desember 2022 sampai Desember 2023 sebesar Rp5.311.659.396,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Jasa Giro tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp150.005.286.455,00 maka realisasi Jasa Giro tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp13.748.750.557,00 atau 9,17%.

e. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp125.646.805.824,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp350.699.189.334,00 atau 279,12%, dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga tercapai melebihi target. Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bunga tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp114.224.368.931,00, maka realisasi Pendapatan Bunga tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp236.474.820.403,00 atau 207,03%.

f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan Rp43.181.623.835,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp15.412.050.340,00 atau 35,69%, realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tidak mencapai target sebesar Rp27.769.573.495,00 atau 64,31%.

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tersebut diperoleh dari:

- 1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp14.430.443.467,00; dan
- 2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp981.606.873,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp39.406.939.028,00, maka realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp23.994.888.687,00 atau 60,89%.

g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp16.010.465.685,00. Realisasi sampai dengan akhir



tahun anggaran 2023 sebesar Rp15.509.900.579,00 atau 96,87%, realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain tidak mencapai target sebesar Rp500.565.106,00 atau 3,13%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp15.012.963.994,00, maka realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp496.936.585,00 atau 3,31%.

Penerimaan komisi di antaranya merupakan komisi bagi hasil Premi Program Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) atas bulan Desember 2023 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi yaitu sebesar Rp13.671.251.572,00 dan pendapatan sewa Rusunami pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.822.089.958,00.

h. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp17.205.883.824,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp43.692.667.644,00 atau 253,94%, dengan demikian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi melebihi target.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp13.481.793.039,00, maka realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp30.210.874.605,00 atau 224,09%.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan terjadi pada kegiatan pengadaan barang sebesar Rp10.325.492.441,00; jasa sebesar Rp481.440.507,00; dan konstruksi sebesar Rp32.885.734.696,00.

i. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp457.000.528.740,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp288.999.391.997,00 atau 63,24%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah belum mencapai target sebesar Rp168.001.136.743,00 atau 36,76%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp407.401.378.119,00, maka realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp118.401.986.122,00 atau 29,06%.



Lebih rinci mengenai realisasi Pendapatan Denda Pajak tahun anggaran 2023 digambarkan sebagai berikut.

Tabel 5.12
Pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	6	5 (4:3)	6
1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	297.558.716.407	163.536.491.522	54,96	281.804.551.336
2	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.787.910.622	1.411.779.560	24,39	2.057.910.542
3	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	836.847	43.658.362	5217,01	53.894.964
4	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.277.187.587	4.412.662.709	345,50	4.206.504.866
5	Pendapatan Denda Pajak Restoran	6.385.937.935	23.936.140.368	374,83	21.464.993.145
6	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.021.750.069	5.591.896.141	547,29	4.111.414.011
7	Pendapatan Denda Pajak Reklame	21.855.745.994	16.126.764.812	73,79	15.221.071.668
8	Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.398.758.677	3.079.614.787	220,17	2.144.561.841
9	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	869.729.069	818.631.512	94,12	298.980.477
10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	95.182.525.389	64.250.642.083	67,50	44.319.047.829
11	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.661.430.144	5.791.110.141	22,57	31.718.447.440
	Jumlah	457.000.528.740	288.999.391.997	63,24	407.401.378.119

j. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp138.345.660,00. Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp314.556.868,00 atau 227,37%, dengan demikian Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi melebihi target.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 tersebut terdiri atas perolehan:

- 1) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp125.159.788,00;
- 2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp163.680.958,00; dan
- 3) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp25.716.122,00.



Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp245.352.473,00, maka realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp69.204.395,00 atau 28,21%.

k. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.108.272.500,00. Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp204.862.000,00 atau 18,48%, dengan demikian realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan belum mencapai target sebesar Rp903.410.500,00 atau 81,52 %.

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tersebut diperoleh dari Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp457.715.100,00 maka realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp252.853.100,00 atau 55,24%.

l. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian tahun anggaran 2023 tidak ditargetkan, namun terdapat realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp102.706.935.656,00.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun anggaran 2023 tersebut terdiri atas perolehan:

- 1) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp6.761.224.680,00;
- 2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp98.985.987,00;
- 3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp32.672.769,00;
- 4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Subsidi kepada BUMD sebesar Rp73.500.000,00;
- 5) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp11.529.687.857,00;



- 6) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba sebesar Rp6.254.829.799,00;
- 7) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS sebesar Rp1.529.970.000,00;
- 8) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp72.409.742.623,00;
- 9) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp65.007.264,00;
- 10) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp41.149.476,00; dan
- 11) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.910.165.201,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan dari Pengembalian tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp200.105.565.598,00, maka realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp97.398.629.942,00 atau 48,67%.

m. Pendapatan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari



jasa layanan, hasil kerja sama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah.

Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3BP kepada BUD. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima BLUD.

Pendapatan BLUD tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp3.160.554.933.611,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.469.930.800.522,00 atau 109,79%, dengan demikian realisasi Pendapatan BLUD telah mencapai target.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan BLUD tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp3.249.970.868.495,00, maka realisasi Pendapatan BLUD tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp219.959.932.027,00 atau 6,77%.

Selain pengesahan pendapatan BLUD tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.249.970.868.495,00, terdapat Pendapatan Operasional BLUD yang belum disahkan pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp16.881.743.513,00. Nilai tersebut merupakan pendapatan yang diterima dan telah dibelanjakan oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Permukiman Pulogadung pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

n. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp355.074.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp416.272.363,00 atau 117,24%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD tercapai melebihi target.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut merupakan Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp189.100.000,00, maka realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp227.172.363,00 atau 120,13%.



o. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)

Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) tahun anggaran 2023 tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.409.551.917,00, maka realisasi Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) tahun anggaran 2023 mengalami penurunan 100%. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) tahun anggaran 2022 merupakan pendapatan yang berasal dari Pengembalian TGR berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2341 K/Pid.Sus/2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 50/PID/TPK/2016/PT.DKI jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 04/Pid:Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2017 atas kasus Tindak Pidana Korupsi.

p. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp90.427.294.179,00. Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp61.464.916.640,00 atau 67,97%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah di tahun anggaran 2023 tidak mencapai target sebesar Rp28.962.377.539,00 atau 32,03%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp67.994.207.049,00, maka realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.529.290.409,00 atau 9,60%.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan



Pemerintah Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran atas kurang dan/atau lebih bayar tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada tahun 2022.

Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp20.224.315.057.470,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp20.159.634.672.034,00 atau 99,68%. Apabila realisasi Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp18.860.858.779.549,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.298.775.892.485,00 atau 6,89%.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.13
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
A	Dana Perimbangan	20.189.140.030.470	20.124.459.645.034	99,68	18.831.174.546.549
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	17.025.414.266.070	17.049.968.580.672	100,14	16.062.089.109.337
a	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	31.525.639.306	31.525.639.306	100,00	37.227.643.640
b	DBH PPh Pasal 21	15.765.573.822.731	15.790.018.049.333	100,16	14.985.036.592.697
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.187.186.308.155	1.187.186.308.155	100,00	988.558.397.000
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.027.698.459	1.137.786.459	110,71	1.061.888.000
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	33.972.535.563	33.972.535.563	100,00	48.246.295.000
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	6.128.261.856	6.128.261.856	100,00	1.958.293.000
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	22.179.718.000	22.179.718.000	100,00	0
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	3.076.020.400	3.076.020.400	100,00	34.127.101.188
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.138.470.026.000	3.049.235.325.962	97,16	2.734.958.336.024
B	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	-	29.684.233.000
C	Insentif Fiskal	35.175.027.000	35.175.027.000	100,00	0
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	20.224.315.057.470	20.159.634.672.034	99,68	18.860.858.779.549

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan bagian daerah dari Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 sebagai berikut.



5.1.1.2.1 Dana Perimbangan

5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp17.025.414.266.070,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp17.049.968.580.672,00 atau 100,14%, dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2023 telah melebihi target sebesar Rp24.554.314.602,00 atau 0,14%.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp987.879.471.335,00 atau 6,15% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp16.062.089.109.337,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2023 terdiri dari:

- a. realisasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp31.525.639.306,00 atau 100,00%;
- b. realisasi DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp15.790.018.049.333,00 atau 100,16%;
- c. realisasi DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sebesar Rp1.187.186.308.155,00 atau 100,00%;
- d. realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp1.137.786.459,00 atau 110,71%;
- e. realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp33.972.535.563,00 atau 100,00%; dan
- f. realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp6.128.261.856,00 atau 100,00%.

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil tahun anggaran 2023 termasuk di dalamnya realisasi melalui mekanisme Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang diatur dalam Keputusan



Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2023 sebesar Rp745.123.241.306,00 yang terdiri dari:

- a. pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Fasilitas I sebesar Rp390.385.927.362,00 sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 yang jatuh tempo untuk periode bulan Maret, Juni, dan September tahun 2023.
- b. pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Fasilitas II sebesar Rp354.737.313.944,00 sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020 yang jatuh tempo untuk periode bulan Juni dan September 2023.

5.1.1.2.1.2 Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07.2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Dana Alokasi Umum yang didapat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk pendanaan kelurahan.

Pendanaan kelurahan tahun anggaran 2023 diperuntukkan sebanyak 267 kelurahan sebesar Rp22.179.718.000,00. Pendanaan Kelurahan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Transfer Umum-DAU tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan sebesar Rp22.179.718.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp22.179.718.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik diatur dalam Dana Alokasi Khusus Fisik diatur dalam PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Fisik yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu jenis DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu jenis DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu jenis DAK Fisik Penugasan. Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar. Dana Transfer Khusus-DAK Fisik tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp3.076.020.400,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023



mencapai Rp3.076.020.400,00 atau 100,00%, dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Fisik tahun anggaran 2023 telah mencapai target 100%.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Fisik tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp31.051.080.788,00 atau 90,99% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Khusus-DAK Fisik tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp34.127.101.188,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Fisik tahun anggaran 2023 terdiri dari:

- a. realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar Rp1.997.500.000,00 atau 100%; dan
- b. realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit sebesar Rp1.078.520.400,00 atau 100%.

5.1.1.2.1.4 Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Penyaluran DAK Non Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan Laporan secara lengkap dan benar.

Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp3.138.470.026.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp3.049.235.325.962,00 atau 97,16%, dengan demikian Penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik tahun anggaran 2023 tidak mencapai target sebesar Rp89.234.700.038,00 atau 2,84%.

Realisasi Penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik tahun anggaran 2023 juga mengalami kenaikan sebesar Rp314.276.989.938,00 atau 11,49% jika dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp2.734.958.336.024,00.

Realisasi penerimaan Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik tahun anggaran 2023 terdiri dari:

- a. realisasi DAK Non Fisik-BOS Reguler sebesar Rp1.721.492.558.032,00 atau 97,19%;
- b. realisasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp38.892.500.000,00 atau 99,68%;
- c. realisasi DAK Non Fisik-TPG PNSD sebesar Rp1.131.452.590.226,00 atau 97,32%;
- d. realisasi DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp30.800.993.274,00 atau 99,74%;



- e. realisasi DAK Non Fisik-BOP PAUD sebesar Rp77.969.877.102,00 atau 97,90%;
- f. realisasi DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp36.075.038.371,00 atau 98,44%;
- g. realisasi DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum sebesar Rp5.908.171.128,00 atau 98,47%;
- h. realisasi DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp4.063.982.070,00 atau 42,69%;
- i. realisasi DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp663.867.340,00 atau 87,41%;
- j. realisasi DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp582.128.960,00 atau 97,35%; dan
- k. realisasi DAK Non Fisik-PK2UMK sebesar Rp1.333.619.459,00 atau 83,96%.

5.1.1.2.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah TA 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan TA 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah TA 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022. Dana Insentif Daerah (DID) adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID), sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN tahun anggaran 2023. Sedangkan tahun anggaran 2022 realisasi Dana Insentif Daerah (DID) tercatat sebesar Rp29.684.233.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.2.3 Insentif Fiskal

Insentif fiskal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada tahun anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2023 Tanggal 21 September 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan



Masyarakat Pada tahun anggaran 2023. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada tahun anggaran 2023 dialokasikan untuk 2 (dua) kelompok kategori kinerja, yang terdiri atas:

- a. kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah; dan
- b. kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah dihitung berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah. Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, kategori kinerja penurunan *stunting*, kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri, dan kategori kinerja percepatan belanja daerah.

Insentif Fiskal tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditargetkan sebesar Rp35.175.027.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp35.175.027.000,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. realisasi Insentif Fiskal kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebesar Rp21.849.020.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp21.849.020.000,00;
- b. realisasi Insentif Fiskal kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp5.964.818.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp5.964.818.000,00; dan
- c. realisasi Insentif Fiskal kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk penurunan *stunting* sebesar Rp7.361.189.000,00 atau 100,00% dari target sebesar Rp7.361.189.000,00.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.996.577.429.044,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.766.153.820.454,00 atau 88,46% dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT sebesar Rp1.735.248.701.390,00 yang dicatat



berdasarkan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Pendapatan hibah tersebut berasal dari pemberian pinjaman *Japan International Cooperation Agency* (JICA) kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan *Loan Agreement* Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen *Loan Agreement* Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008;

- b. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp18.785.251.064,00, merupakan pendapatan hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan yang berasal dari rekomendasi HGB; dan
- c. Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri sebesar Rp12.119.868.000,00, merupakan pendapatan hibah dari PT Jasa Raharja berupa kontribusi biaya operasional/hibah kantor bersama Samsat periode bulan Januari sampai dengan Desember 2023 sesuai dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) VIII Perjanjian Hibah Daerah Nomor SKEB/21/2014 Nomor 65 Tahun 2014 antara PT Jasa Raharja (Persero) Cabang DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi Pendapatan Hibah tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.055.061.842.804,00 atau 37,40% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp2.821.215.663.258,00.

5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD.

Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Belanja Daerah dan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijabarkan menurut klasifikasi ekonomi sesuai penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penyajian Belanja Daerah sesuai dokumen APBD adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang dijabarkan menurut klasifikasi kelompok dan urusan.

5.1.2.1 Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan Belanja dan Transfer yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi Ekonomi berdasarkan



jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Transfer.

Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp72.144.886.612.586,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2023 sebesar Rp66.770.609.628.414,00 atau 92,55%. Adapun sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp5.374.276.984.172,00 atau 7,45%. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.905.488.408.118,00 atau 2,94% dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp64.865.121.220.296,00.

Rincian realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.14
Realisasi Belanja Daerah dan Transfer
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023			Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	6	5 (4:3)	6
I	Belanja Operasi	60.383.693.518.412	57.556.903.079.616	95,32	55.542.186.969.752
1	Belanja Pegawai	18.778.026.066.648	17.977.776.327.870	95,74	17.705.440.378.717
2	Belanja Barang dan Jasa	27.281.511.012.549	25.824.444.605.296	94,66	23.613.048.650.099
3	Belanja Bunga	258.000.000.000	229.704.491.741	89,03	270.632.758.937
4	Belanja Subsidi	5.908.311.604.139	5.539.653.281.534	93,76	6.278.332.984.915
5	Belanja Hibah	3.707.368.399.302	3.621.682.896.507	97,69	2.639.327.211.335
6	Belanja Bantuan Sosial	4.450.476.435.774	4.363.641.476.668	98,05	5.035.404.985.749
II	Belanja Modal	10.850.183.726.006	8.857.260.068.298	81,63	8.808.194.842.704
1	Belanja Tanah	837.728.164.500	442.600.308.470	52,83	880.953.900.338
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.085.131.092.839	2.822.976.130.249	91,5	1.798.854.059.095
3	Belanja Gedung dan Bangunan	2.556.806.970.333	1.653.055.663.410	64,65	1.735.904.917.006
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.222.738.767.561	3.799.027.573.476	89,97	4.264.727.292.528
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	147.778.730.773	139.600.392.693	94,47	127.754.673.737
III	Belanja Tak Terduga	554.562.887.668	0	0	29.976.747.630
1	Belanja Tak Terduga	554.562.887.668	0	0	29.976.747.630
IV	Transfer	356.446.480.500	356.446.480.500	100	484.762.660.210
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	356.446.480.500	356.446.480.500	100	484.762.660.210
	Jumlah (I,II, III, dan IV)	72.144.886.612.586	66.770.609.628.414	92,55	64.865.121.220.296

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi tahun anggaran 2023, dijelaskan sebagai berikut.



5.1.2.1.1 Belanja

5.1.2.1.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp60.383.693.518.412,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai Rp57.556.903.079.616,00 atau 95,32%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp55.542.186.969.752,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.014.716.109.864,00 atau 3,63%. Rincian realisasi belanja operasi terdapat pada lampiran 1.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

5.1.2.1.1.1.a Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp18.778.026.066.648,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp17.977.776.327.870,00 atau 95,74%.

Berikut rincian realisasi belanja pegawai sampai dengan akhir tahun Anggaran 2023.

Jenis Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.791.760.960.278	5.468.151.210.151	94,41
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.646.756.499.515	10.345.714.225.433	97,17
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.839.356.268.067	1.687.448.298.540	91,74
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	162.356.421.440	158.930.418.065	97,89
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.829.678.000	1.428.710.040	50,49
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	69.814.379.493	68.481.799.377	98,09
Belanja Pegawai BLUD	265.151.859.855	247.621.666.264	93,39
Total Belanja Pegawai	18.778.026.066.648	17.977.776.327.870	95,74

5.1.2.1.1.1.b Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.



Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp27.281.511.012.549,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp25.824.444.605.296,00 atau 94,66%.

Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa di antaranya adalah:

- a. realisasi Belanja Jasa sebesar Rp15.618.478.600.323,00 di antaranya terdapat pada:
 - 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP Kelas 3 sebagai bentuk kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan sebesar Rp1.853.601.540.000,00;
 - 2) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum dalam rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan sebesar Rp1.332.773.026.084,00;
 - 3) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagai upaya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar sebesar Rp1.188.921.104.621,00;
 - 4) Belanja Jasa Pengolahan Sampah dalam rangka Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional sebesar Rp1.099.827.887.308,00; dan
 - 5) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp900.113.674.949,00;
- b. realisasi Belanja Barang Jasa BLUD sebesar Rp3.625.585.805.425,00;
- c. realisasi Belanja Barang sebesar Rp3.097.379.208.659,00, terdiri dari:
 - 1) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp3.085.482.044.168,00; dan
 - 2) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp11.897.164.491,00.
- d. realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.457.392.159.788,00; dan
- e. realisasi Belanja Barang Jasa BOS sebesar Rp703.073.708.848,00.

Dari jumlah belanja barang dan jasa tersebut, di antaranya terdapat belanja yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp376.470.666.648,00 (sebagaimana dijelaskan dalam CaLK 5.5.1.4 tentang Aset Tetap) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi. Rincian belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap terdapat pada Lampiran 11 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah. Selain itu terdapat belanja yang diakui sebagai beban barang dan jasa dibayar di muka sebesar Rp339.701.688.997,00 yang di antaranya merupakan jumlah nilai BBM yang belum digunakan berdasarkan saldo yang ada pada *Radio Frequency Identification (RFID)*.



5.1.2.1.1.1.c Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Bunga tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp258.000.000.000,00 terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp229.704.491.741,00 atau 89,03%.

Apabila realisasi Belanja Bunga tahun anggaran 2023 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga tahun anggaran 2022 sebesar Rp270.632.758.937,00 terdapat penurunan realisasi di tahun anggaran 2023 sebesar Rp40.928.267.196,00 atau 15,12%.

Realisasi belanja bunga dirinci sebagai berikut:

- a. pembayaran bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta (Proyek JEDI) sebesar Rp32.329.993.054,00;
- b. pembayaran bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA 1263/DSMI/2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan *Phase II* (Jakarta Kota – Bundaran HI) sebesar Rp26.349.770.402,00; dan
- c. pembayaran bunga utang pinjaman Sumber Lainnya dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp171.024.728.285,00.

5.1.2.1.1.1.d Belanja Subsidi

Belanja Subsidi tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp5.908.311.604.139,00. Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.539.653.281.534,00 atau 93,76%. Realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran 2023 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran 2022 sebesar Rp6.278.332.984.915,00 terdapat penurunan realisasi di tahun anggaran 2023 sebesar Rp738.679.703.381,00 atau 11,77%.

Realisasi belanja subsidi dirinci dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bidang Transportasi
Belanja subsidi dalam bidang transportasi dianggarkan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.841.319.346.084,00 dan terealisasi sebesar Rp4.493.547.544.107,00 atau 92,82%, dengan rincian sebagai berikut:



1) PT. Trans Jakarta

Belanja subsidi pada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) merupakan belanja subsidi barang dan jasa untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum guna menyelenggarakan transportasi publik di DKI Jakarta. Belanja subsidi pada PT Trans Jakarta tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.573.740.398.539,00 dan terealisasi sebesar Rp3.246.133.778.465,00 atau 90,83%.

2) PT. MRT Jakarta

Belanja subsidi pada PT MRT Jakarta merupakan belanja barang dan jasa untuk memberikan dukungan pembiayaan menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik berupa layanan angkutan dengan Moda Raya Terpadu di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Belanja subsidi pada PT MRT Jakarta tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp871.137.657.439,00 dan terealisasi sebesar Rp854.939.489.560,00 atau 98,14%.

3) PT. Jakarta Propertindo

Belanja subsidi pada PT Jakarta Propertindo (LRT) merupakan belanja barang dan jasa untuk memberikan dukungan pembiayaan menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik berupa layanan angkutan dengan Lintas Raya Terpadu di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Belanja subsidi pada PT Jakarta Propertindo tahun anggaran 2023 untuk pelayanan Lintas Raya Terpadu (LRT) dianggarkan sebesar Rp396.441.290.106,00 dan terealisasi sebesar Rp392.474.276.082,00 atau 99,00%.

b. Bidang Pangan

Belanja subsidi dalam bidang pangan dianggarkan pada Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.051.363.869.070,00 dan terealisasi sebesar Rp1.046.105.737.427,00 atau 99,50%.

5.1.2.1.1.1.e Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Belanja Hibah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.707.368.399.302,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.621.682.896.507,00 atau 97,69%, dengan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp85.685.502.795,00 atau 2,31%. Apabila realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2023 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.639.327.211.335,00 terdapat kenaikan realisasi di tahun anggaran 2023 sebesar Rp982.355.685.172,00 atau 37,22%. Realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.666.881.706.847	1.658.024.674.664	99,47
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	1.302.481.924.955	1.236.837.502.041	94,96
3	Belanja Hibah Dana BOS	697.122.050.000	685.938.002.302	98,40
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	40.882.717.500	40.882.717.500	100,00
	Jumlah	3.707.368.399.302	3.621.682.896.507	97,69

a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat adalah hibah yang diberikan kepada instansi Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional instansi Pemerintah Pusat yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp1.666.881.706.847,00 terealisasi sebesar Rp1.658.024.674.664,00 atau 99,47%.

b. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia adalah hibah yang diberikan kepada Badan/Lembaga kemasyarakatan bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah berbadan hukum, memiliki surat keterangan terdaftar dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam



Negeri atau Gubernur atau pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan nilai manfaat serta mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.302.481.924.955,00 dan terealisasi sebesar Rp1.236.837.502.041,00 atau 94,96%.

c. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja Hibah Dana BOS adalah hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer secara langsung ke rekening sekolah swasta. Nilai Belanja Hibah BOS adalah sebesar nilai transfer dana BOS ke rekening sekolah swasta.

Belanja Hibah Dana BOS dianggarkan sebesar Rp697.122.050.000,00 terealisasi sebesar Rp685.938.002.302,00 atau 98,40% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Dana BOS ke SLB Swasta	18.781.750.000	18.646.313.868	99,28
2	Belanja Hibah Dana BOS ke SD/MI Swasta	166.574.820.000	163.759.855.169	98,31
3	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta	134.338.510.000	132.347.849.054	98,52
4	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	130.119.890.000	126.771.081.433	97,43
5	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	247.307.080.000	244.412.902.778	98,83
	Total	697.122.050.000	685.938.002.302	98,40

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah Bantuan keuangan dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Partai Politik berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp40.882.717.500,00 dan terealisasi sebesar Rp40.882.717.500,00 atau 100,00%.

5.1.2.1.1.1.f Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah



dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp4.450.476.435.774,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.363.641.476.668,00 atau 98,05%.

Apabila realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2023 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp5.035.404.985.749,00 terdapat penurunan realisasi di tahun 2023 sebesar Rp671.763.509.081,00 atau 13,34%.

Jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin) melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/ Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sebesar Rp3.329.008.425.893,00;
- b. realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp 17.458.412.775,00;
- c. realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu melalui Biaya Pendidikan Awal Tahun (Uang Pangkal) Pelajaran 2023/2024 sebesar Rp 151.958.838.000,00; dan
- d. realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp865.215.800.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia (Bantuan Sosial untuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)	734.152.080.000	724.757.180.000	98,72
2	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas (Bantuan Sosial untuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)	76.457.400.000	75.689.340.000	99,00
3	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak (Bantuan Sosial untuk Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta)	56.188.320.000	54.988.435.000	97,86
4	Bantuan Sosial bagi Anak dan Remaja yang Orang Tua atau Wali Meninggal karena Terkonfirmasi <i>Coronavirus Disease</i> 2019	9.237.840.000	9.138.845.000	98,93
5	Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Dalam Penanganan <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (COVID 19) tahun anggaran 2022 (Bansos untuk peserta didik)	678.000.000	642.000.000	94,69
	Jumlah	876.713.640.000	865.215.800.000	98,69



5.1.2.1.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya. Belanja Modal tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp10.850.183.726.006,00. Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp8.857.260.068.298,00 atau 81,63% mengalami kenaikan sebesar Rp49.065.225.594,00 atau 0,56% bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp8.808.194.842.704,00.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1.1.2.a Belanja Tanah

Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp837.728.164.500,00. Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp442.600.308.470,00 atau 52,83% dan mengalami penurunan sebesar Rp438.353.591.868,00 atau 49,76% bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp880.953.900.338,00.

Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal Tanah untuk bangunan jaringan pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp471.991.000.515,00 terealisasi sebesar Rp266.207.852.260,00 atau 56,40%;
- b. Belanja Modal Tanah untuk jalan pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp275.891.530.000,00 terealisasi sebesar Rp122.343.452.843,00 atau 44,34%;
- c. Belanja Modal Tanah untuk bangunan perumahan / gedung tempat tinggal pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp64.916.457.285,00 terealisasi sebesar Rp37.130.919.897,00 atau 57,20%;
- d. Belanja Modal Tanah non persil pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp24.117.300.000,00 terealisasi sebesar Rp16.210.398.000,00 atau 67,21%; dan
- e. Belanja Modal Tanah untuk taman pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp454.139.270,00 atau 90,83%.

Dari realisasi Belanja Modal Tanah tahun anggaran 2023 sebesar Rp442.600.308.470,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Tanah sebesar Rp438.729.389.570,00 dan belanja modal yang tidak memenuhi



kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Tanah sebesar Rp31.284.365.197,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal yang diakui sebagai Kas Dikonsinyasikan sebesar Rp27.413.446.297,00;
2. Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang menjadi beban sebesar Rp3.162.988.260,00;
3. Pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp297.920.200,00; dan
4. Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp410.010.440,00.

5.1.2.1.1.2.b Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.085.131.092.839,00. Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.822.976.130.249,00 atau 91,50% mengalami kenaikan sebesar Rp1.024.122.071.154,00 atau 56,93% bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.798.854.059.095,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BOS serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp280.024.440.637,00 terealisasi sebesar Rp276.715.553.718,00 atau 98,82%;
- b. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp219.285.640.006,00 terealisasi sebesar Rp211.622.798.945,00 atau 96,51%;
- c. Belanja Modal alat angkutan, alat-alat besar, alat kantor dan rumah tangga serta peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp165.872.289.731,00 terealisasi sebesar Rp152.995.263.689,00 atau 92,24%;
- d. Belanja Modal komputer, alat studio serta peralatan dan mesin lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp150.409.636.126,00 terealisasi sebesar Rp148.612.490.050,00 atau 98,81%; dan
- e. Belanja Modal alat kedokteran, unit alat laboratorium dan peralatan dan mesin lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja dianggarkan sebesar



Rp125.956.044.083,00 terealisasi sebesar Rp119.208.353.961,00 atau 94,64%.

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.822.976.130.249,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.726.242.386.015,00 dan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp96.733.744.234,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp19.520.774.858,00;
2. realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang menjadi beban sebesar Rp17.123.899.525,00;
3. pengembalian Belanja Modal sebesar Rp55.601.945,00;
4. Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp56.272.733.978,00;
5. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka sebesar Rp1.439.024.963,00; dan
6. Hibah keluar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.321.708.965,00.

5.1.2.1.1.2.c Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.556.806.970.333,00. Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.653.055.663.410,00 atau 64,65% mengalami penurunan sebesar Rp82.849.253.596,00 atau 4,77% bila dibandingkan dengan Realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.735.904.917.006,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal bangunan gedung tempat olahraga, gedung kantor, pagar dan taman pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp425.806.769.892,00 terealisasi sebesar Rp263.762.631.085,00 atau 61,94%.
- b. Belanja Modal bangunan gedung tempat pendidikan dan gedung kantor pada Unit Pengelola Prasarana dan Saran Pendidikan dianggarkan sebesar Rp552.319.374.346,00 terealisasi sebesar Rp192.193.185.562,00 atau 34,80%.
- c. Belanja Modal bangunan gedung kantor, gedung pelabuhan dan gedung menara pelabuhan pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dianggarkan sebesar Rp193.662.320.203,00 terealisasi sebesar Rp186.590.823.128,00 atau 96,35%.



- d. Belanja Modal untuk flat/rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp363.065.583.985,00 terealisasi sebesar Rp176.394.096.746,00 atau 48,58%.
- e. Belanja Modal untuk bangunan gedung kantor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp110.902.165.504,00 terealisasi sebesar Rp97.021.737.969,00 atau 87,48%.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.653.055.663.410,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp806.208.661.325,00 dan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp826.442.765.973,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp68.839.920.260,00;
- 2. realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang menjadi beban sebesar Rp7.066.258.135,00;
- 3. pengembalian Belanja Modal sebesar Rp2.640.635.181,00;
- 4. Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp669.580.859.687,00;
- 5. Belanja Modal yang diakui sebagai Uang Muka sebesar Rp35.337.761.418,00;
- 6. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka sebesar Rp42.854.271.592,00; dan
- 7. Hibah keluar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp123.059.700,00.

5.1.2.1.1.2.d Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp4.222.738.767.561,00. Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.799.027.573.476,00 atau 89,97% mengalami penurunan sebesar Rp465.699.719.052,00 atau 10,92% bila dibandingkan dengan Realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.264.727.292.528,00.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal bangunan air irigasi, bangunan pengamanan sungai dan instalasi air kotor pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp1.381.691.901.008,00 terealisasi sebesar Rp1.084.369.969.372,00 atau 78,48%.



- b. Belanja Modal untuk jalan provinsi dan jembatan penyebrangan pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp1.062.476.588.983,00 terealisasi sebesar Rp1.024.054.238.518,00 atau 96,38%.
- c. Belanja Modal untuk jalan dan bangunan air irigasi pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp170.743.289.929,00 terealisasi sebesar Rp165.029.669.309,00 atau 96,65%.
- d. Belanja Modal bangunan air irigasi, bangunan pengamanan sungai dan instalasi air kotor pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp127.833.289.177,00 terealisasi sebesar Rp124.131.679.881,00 atau 97,10%.
- e. Belanja Modal bangunan air irigasi dan instalasi air kotor pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp117.920.941.269,00 terealisasi sebesar Rp114.682.156.516,00 atau 97,25%.

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.799.027.573.476,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.082.521.374.360,00 dan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp716.506.199.116,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang masih dalam proses pengerjaan sebesar Rp333.957.842.470,00;
- 2. Belanja Modal yang diakui sebagai Uang Muka sebesar Rp194.419.335.320,00;
- 3. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka sebesar Rp104.760.307.176,00;
- 4. realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang menjadi beban sebesar Rp58.255.328.286,00;
- 5. pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp24.366.085.298,00; dan
- 6. pengembalian Belanja Modal sebesar Rp747.300.566,00.

5.1.2.1.1.2.e Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp147.778.730.773,00. Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 sebesar Rp139.600.392.693,00 atau 94,47% mengalami kenaikan sebesar



Rp11.845.718.956,00 atau 9,27% bila dibandingkan dengan Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp127.754.673.737,00.

Realisasi belanja Aset Tetap lainnya tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BOS dan buku pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp100.184.992.691,00 terealisasi sebesar Rp94.763.247.240,00 atau 94,59%.
- b. Belanja Modal lisensi dan *software* pada Unit Pengelola Jakarta Smart City dianggarkan sebesar Rp19.252.338.834,00 terealisasi sebesar Rp18.114.246.402,00 atau 94,09%.
- c. Belanja Modal audio visual, lisensi dan *software* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp16.406.521.862,00 terealisasi sebesar Rp16.059.095.940,00 atau 97,88%.
- d. Belanja Modal buku, lisensi dan *software* pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp5.200.683.558,00 terealisasi sebesar Rp4.514.805.553,00 atau 86,81%.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BLUD pada Unit Pengelola Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp1.453.820.300,00 terealisasi sebesar Rp1.432.911.019,00 atau 98,56%.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2023 sebesar Rp139.600.392.693,00, Belanja Modal yang menghasilkan Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp110.988.009.560,00 dan belanja modal yang tidak memenuhi kriteria atau tidak menghasilkan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp28.628.416.466,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang menjadi beban sebesar Rp28.612.383.133,00; dan
2. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka sebesar Rp16.033.333,00.

5.1.2.1.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan belanja yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya atau keadaan darurat mendesak.

Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp554.562.887.668,00. Realisasi BTT tahun anggaran 2023 tercatat sebesar Rp0,00 dikarenakan tidak adanya kebutuhan yang bersifat darurat dan mendesak selama tahun 2023.



Sedangkan realisasi BTT tahun anggaran 2022 tercatat sebesar Rp29.976.747.630,00, digunakan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 sebesar Rp22.997.847.630,00 dan pengembalian kelebihan pembayaran Pendapatan Sewa Titik Reklame dari PT Magna Astro Prontonusa Persada sebesar Rp6.978.900.000,00.

5.1.2.1.1.4 Belanja Transfer

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan. Transfer/Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Transfer/Bantuan Keuangan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp356.446.480.500,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp356.446.480.500,00 atau 100,00%. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp356.446.480.500,00 berasal dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bekasi.

Apabila realisasi Belanja Transfer tahun anggaran 2023 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer tahun anggaran 2022 sebesar Rp484.762.660.210,00 terdapat penurunan realisasi di tahun anggaran 2023 sebesar Rp128.316.179.710,00 atau 26,47%.

Belanja BLUD

Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal tahun anggaran 2023 termasuk belanja BLUD yang didanai oleh Pendapatan BLUD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 55 Belanja BLUD terdiri dari Belanja Operasi BLUD dan Belanja Modal BLUD. Total anggaran Belanja BLUD tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.964.572.942.503,00 dan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp4.409.326.951.219,00 atau 88,82%.

Belanja Operasi BLUD mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi BLUD. Tahun anggaran 2023, Belanja Operasi BLUD dianggarkan sebesar Rp4.274.853.734.096,00 dan terealisasi sebesar Rp3.873.207.471.689,00 atau 90,60% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai BLUD dianggarkan sebesar Rp265.151.859.855,00 dan terealisasi sebesar Rp247.621.666.264,00 atau 93,39%.



- b. Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp4.009.701.874.241,00 dan terealisasi sebesar Rp3.625.585.805.425,00 atau 90,42%.

Belanja Modal BLUD mencakup seluruh Belanja BLUD untuk perolehan Aset Tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

Tahun anggaran 2023, Belanja Modal BLUD dianggarkan sebesar Rp689.719.208.407,00 dan terealisasi sebesar Rp536.119.479.530,00 atau 77,73% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp568.658.734.282,00 dan terealisasi sebesar Rp464.507.820.797,00 atau 81,68%.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp91.823.463.026,00 dan terealisasi sebesar Rp55.242.533.259,00 atau 60,16%.
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp27.505.690.799,00 dan terealisasi sebesar Rp14.752.248.438,00 atau 53,63%.
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp1.731.320.300,00 dan terealisasi sebesar Rp1.616.877.036,00 atau 93,39%.

5.1.2.2 Klasifikasi Urusan

Belanja Daerah menurut Klasifikasi Urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Klasifikasi Urusan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan, dan Kewilayahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan.

Belanja Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk



peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan tahun anggaran 2023, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.15

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	41.545.631.634.134	38.580.032.579.763	92,86	36.678.217.311.939
1	Pendidikan	16.962.181.787.043	16.201.439.626.040	95,52	14.602.299.770.054
2	Kesehatan	11.524.631.795.262	10.724.304.443.276	93,06	10.301.374.267.406
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.181.746.447.727	6.203.038.764.647	86,37	6.310.168.623.077
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.705.976.159.928	1.457.866.291.925	85,46	1.489.036.499.006
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.549.764.230.040	2.428.980.997.223	95,26	2.476.134.210.797
6	Sosial	1.621.331.214.134	1.564.402.456.652	96,49	1.499.203.941.599
II	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	16.995.592.378.176	15.795.000.407.689	92,94	16.067.362.418.466
1	Tenaga Kerja	498.985.660.402	465.648.252.934	93,32	400.777.828.383
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22.129.199.070	21.282.381.599	96,17	194.016.167.885
3	Pangan	1.283.577.049.940	1.263.489.279.283	98,44	1.478.577.773.275
4	Pertanahan	2.671.800.000	2.544.200.000	95,22	1.773.781.700
5	Lingkungan Hidup	3.742.365.759.913	3.564.073.321.008	95,24	4.171.321.676.624
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	323.244.060.545	307.347.244.494	95,08	302.357.611.835
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	467.307.069.412	465.818.037.592	99,68	459.859.829.439
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	211.643.209.114	200.427.200.629	94,70	24.530.910.340
9	Perhubungan	6.773.195.930.618	6.250.475.611.783	92,28	6.695.656.506.182
10	Komunikasi dan Informatika	665.107.465.093	592.057.315.269	89,02	655.435.117.180
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	232.159.565.296	218.412.113.931	94,08	37.543.235.442
12	Penanaman Modal	740.860.538.098	715.395.751.782	96,56	701.810.413.800
13	Kepemudaan dan Olahraga	1.278.077.411.026	1.018.397.155.065	79,68	440.571.145.064
14	Statistik	6.722.194.638	5.879.373.700	87,46	6.631.971.100
15	Persandian	15.262.419.623	14.710.520.000	96,38	12.267.093.180
16	Kebudayaan	501.481.725.770	469.070.578.956	93,54	330.396.731.867



No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
17	Perpustakaan	81.361.168.840	77.232.292.878	94,93	145.408.089.742
18	Kearsipan	149.440.150.778	142.739.776.786	95,52	8.426.535.428
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	1.138.391.566.856	1.052.586.716.964	92,46	1.077.943.876.635
1	Kelautan dan Perikanan	53.543.987.627	49.913.442.011	93,22	21.333.575.885
2	Pariwisata	410.607.693.406	375.055.403.592	91,34	394.588.284.912
3	Pertanian	45.109.140.866	42.956.177.389	95,23	26.517.720.611
4	Kehutanan	432.331.890.732	403.539.403.791	93,34	294.776.942.682
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	38.015.476.010	32.132.609.833	84,53	26.880.892.286
6	Perdagangan	48.244.411.847	46.263.829.324	95,89	40.547.676.750
7	Perindustrian	110.538.966.368	102.725.851.024	92,93	273.298.783.509
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2.285.160.840.927	2.182.729.677.500	95,52	2.612.930.805.920
1	Sekretariat Daerah	1.481.034.850.186	1.412.902.105.296	95,40	1.987.478.083.167
2	Sekretariat DPRD	804.125.990.741	769.827.572.204	95,73	625.452.722.753
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	3.644.771.173.494	2.809.707.455.104	77,09	3.149.370.601.000
1	Perencanaan	127.448.963.490	120.142.823.053	94,27	128.701.539.344
2	Keuangan	3.242.909.933.019	2.432.059.695.795	75,00	2.304.497.403.697
3	Kepegawaian	167.028.089.097	157.542.734.250	94,32	618.419.579.853
4	Pendidikan dan Pelatihan	105.596.476.455	98.415.261.406	93,20	97.092.679.106
5	Penelitian dan Pengembangan	1.787.711.433	1.546.940.600	86,53	659.399.000
VI	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	216.685.140.833	164.905.452.694	76,10	130.840.143.575
1	Inspektorat Daerah	216.685.140.833	164.905.452.694	76,10	130.840.143.575
VII	Unsur Kewilayahan	5.068.136.719.816	4.941.531.029.169	97,50	5.041.266.165.617
1	Kecamatan Administrasi	3.028.701.509.770	2.979.376.794.645	98,37	4.975.015.635.391
2	Kota Administrasi	1.911.680.230.256	1.841.857.205.696	96,35	65.461.938.936
3	Kabupaten Administrasi	127.754.979.790	120.297.028.828	94,16	788.591.290
VII I	Kesatuan Bangsa dan Politik	1.250.517.158.350	1.244.116.309.531	99,49	107.189.897.144
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	1.250.517.158.350	1.244.116.309.531	99,49	107.189.897.144
	Jumlah (I. II. III. IV. V. VI. VII. dan VIII)	72.144.886.612.586	66.770.609.628.414	92,55	64.865.121.220.296

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	9.494.541.170.405	8.866.165.915.613	93,38
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.467.640.616.638	7.335.273.710.427	98,23
Jumlah		16.962.181.787.043	16.201.439.626.040	95,52

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.390.545.737.606	6.721.191.417.447	90,94
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.906.931.512.295	2.811.710.970.235	96,72
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.226.371.230.102	1.190.673.817.594	97,09
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	486.385.968	470.214.000	96,68
5.	Program Sediaan Farmasi, Kesehatan Alat dan Makanan Minuman	296.929.291	258.024.000	86,90
Jumlah		11.524.631.795.262	10.724.304.443.276	93,06

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	2.031.958.594.955	1.814.247.156.957	89,29
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.602.095.680.887	1.496.782.611.583	93,43
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.930.051.362.748	1.479.028.032.854	76,63
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	854.930.242.954	809.029.129.440	94,63
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	482.749.732.073	382.847.448.021	79,31
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	132.561.187.268	100.539.160.337	75,84
7.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	109.457.273.900	97.425.867.794	89,01
8.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	37.434.348.497	22.713.617.101	60,68
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	508.024.445	425.740.560	83,80
Jumlah		7.181.746.447.727	6.203.038.764.647	86,37

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	698.865.417.709	629.183.555.994	90,03
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	520.729.893.068	491.579.337.715	94,40



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Daerah Provinsi			
3.	Program Pengembangan Perumahan	486.380.849.151	337.103.398.216	69,31
Jumlah		1.705.976.159.928	1.457.866.291.925	85,46

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.729.112.412.867	1.633.529.449.120	94,47
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	503.533.384.757	485.871.660.310	96,49
3.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	277.829.948.028	271.090.661.798	97,57
4.	Program Penanggulangan Bencana	39.288.484.388	38.489.225.995	97,97
Jumlah		2.549.764.230.040	2.428.980.997.223	95,26

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	932.761.376.705	921.133.435.676	98,75
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	338.478.677.640	320.150.978.539	94,59
3.	Program Rehabilitasi Sosial	293.856.123.346	274.351.799.257	93,36
4.	Program Penanganan Bencana	35.493.660.579	29.297.026.644	82,54
5.	Program Pemberdayaan Sosial	20.741.375.864	19.469.216.536	93,87
Jumlah		1.621.331.214.134	1.564.402.456.652	96,49

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Realisasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	351.559.943.719	322.130.108.944	91,63
2.	Program Pelatihan Kerja	101.065.159.084	98.037.272.956	97,00



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	dan Produktivitas Tenaga Kerja			
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	41.057.513.856	40.211.148.899	97,94
4.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	3.014.144.763	2.984.245.135	99,01
5.	Program Hubungan Industrial	2.191.998.980	2.188.577.000	99,84
6.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	96.900.000	96.900.000	100,00
	Jumlah	498.985.660.402	465.648.252.934	93,32

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Perlindungan Perempuan	13.433.071.456	13.094.538.232	97,48
2.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	3.195.969.012	2.897.013.050	90,65
3.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.403.076.307	2.322.812.927	96,66
4.	Program Perlindungan Khusus Anak	2.245.641.679	2.155.693.070	95,99
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA),	801.940.616	767.224.320	95,67
6.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	49.500.000	45.100.000	91,11
	Jumlah	22.129.199.070	21.282.381.599	96,17

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.053.542.364.790	1.048.134.122.561	99,49
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	226.914.412.051	212.316.114.362	93,57
3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	3.120.273.099	3.039.042.360	97,40
	Jumlah	1.283.577.049.940	1.263.489.279.283	98,44

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penatagunaan Tanah	2.671.800.000	2.544.200.000	95,22
	Jumlah	2.671.800.000	2.544.200.000	95,22

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Persampahan	1.792.237.266.152	1.735.130.408.359	96,81
2.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	999.809.221.078	963.061.432.587	96,32
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	890.138.859.328	809.162.138.395	90,90
4.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	46.387.533.941	44.994.594.017	97,00
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	4.370.970.786	4.095.977.935	93,71
6.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	3.755.224.811	2.552.805.923	67,98
7.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	2.861.301.907	2.513.796.500	87,85
8.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2.607.505.242	2.402.712.792	92,15
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	197.876.668	159.454.500	80,58
	Jumlah	3.742.365.759.913	3.564.073.321.008	95,24

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	255.870.178.995	240.109.860.369	93,84
2.	Program Pendaftaran Penduduk	61.501.937.551	61.390.898.028	99,82
3.	Program Pencatatan Sipil	4.430.503.762	4.409.288.593	99,52
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.158.842.728	1.158.842.704	100,00
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	282.597.509	278.354.800	98,50
	Jumlah	323.244.060.545	307.347.244.494	95,08

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	467.307.069.412	465.818.037.592	99,68
	Jumlah	467.307.069.412	465.818.037.592	99,68



8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	191.918.618.843	183.293.796.829	95,51
2.	Program Pengendalian Penduduk	8.707.565.148	7.759.444.451	89,11
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	7.783.906.947	7.016.603.910	90,14
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	3.233.118.176	2.357.355.439	72,91
	Jumlah	211.643.209.114	200.427.200.629	94,70

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.683.767.951.369	5.230.109.781.148	92,02
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	851.713.933.056	794.440.273.689	93,28
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	234.383.177.796	222.847.349.623	95,08
4.	Program Pengelolaan Perkeretaapian	3.330.868.397	3.078.207.323	92,41
	Jumlah	6.773.195.930.618	6.250.475.611.783	92,28

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	497.348.825.317	440.993.320.947	88,67
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	106.821.556.040	97.148.168.697	90,94
3.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	60.937.083.736	53.915.825.625	88,48
	Jumlah	665.107.465.093	592.057.315.269	89,02

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	188.905.756.094	176.105.845.157	93,22
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	42.643.939.733	41.830.624.162	98,09



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	211.847.280	209.312.517	98,80
4.	Program Pengembangan UMKM	145.446.189	140.356.095	96,50
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	241.776.000	116.976.000	48,38
6.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	10.800.000	9.000.000	83,33
	Jumlah	232.159.565.296	218.412.113.931	94,08

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	564.969.359.429	543.621.267.523	96,22
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	151.190.302.822	149.437.581.318	98,84
3.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	13.923.482.113	13.382.227.687	96,11
4.	Program Promosi Penanaman Modal	7.941.480.966	6.505.863.490	81,92
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.790.091.870	1.496.989.464	83,63
6.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.045.820.898	951.822.300	91,01
	Jumlah	740.860.538.098	715.395.751.782	96,56

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengembangan daya saing keolahragaan	995.511.230.147	753.718.970.182	75,71
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	255.045.074.883	238.117.471.814	93,36
3.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	18.788.084.371	17.870.041.803	95,11
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	8.733.021.625	8.690.671.266	99,52
	Jumlah	1.278.077.411.026	1.018.397.155.065	79,68

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	6.722.194.638	5.879.373.700	87,46
	Jumlah	6.722.194.638	5.879.373.700	87,46



15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	15.262.419.623	14.710.520.000	96,38
	Jumlah	15.262.419.623	14.710.520.000	96,38

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	255.972.073.408	239.215.195.933	93,45
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	155.910.244.972	145.637.800.356	93,41
3.	Program Pengelolaan Permuseuman	73.775.412.604	70.590.128.203	95,68
4.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	15.823.994.786	13.627.454.464	86,12
	Jumlah	501.481.725.770	469.070.578.956	93,54

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	80.715.544.020	76.600.927.472	94,90
2.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	645.624.820	631.365.406	97,79
	Jumlah	81.361.168.840	77.232.292.878	94,93

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	122.932.208.019	118.664.792.222	96,53
2.	Program Pengelolaan Arsip	26.507.942.759	24.074.984.564	90,82
	Jumlah	149.440.150.778	142.739.776.786	95,52

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	29.506.559.733	27.454.854.450	93,05
2.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	8.689.119.430	8.343.478.434	92,21
3.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	8.690.010.501	8.013.240.377	96,02
4.	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	5.965.214.719	5.475.646.151	91,79
5.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	693.083.244	626.222.599	90,35
	Jumlah	53.543.987.627	49.913.442.011	93,22

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	175.491.263.353	164.523.622.205	93,75
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	83.636.931.305	78.223.204.749	93,53
3.	Program Pemasaran Pariwisata	77.910.931.904	69.412.215.454	89,09
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	65.262.933.412	56.467.096.322	86,52
5.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8.305.633.432	6.429.264.862	90,35
	Jumlah	410.607.693.406	375.055.403.592	91,34

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	16.121.132.743	14.568.121.077	90,37
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.922.127.204	9.746.224.319	98,23
3.	Program Penyuluhan Pertanian	9.403.038.712	9.286.539.252	98,76
4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	9.017.530.589	8.718.627.050	96,69
5.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	645.311.618	636.665.691	98,66
	Jumlah	45.109.140.866	42.956.177.389	95,23

4) Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	384.585.458.632	358.327.319.366	93,17
2.	Program Pengelolaan Hutan	45.785.002.568	43.383.470.472	94,75
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.180.413.588	1.098.820.311	93,09
4.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	496.973.225	471.274.750	94,83
5.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	284.042.719	258.518.892	91,01
	Jumlah	432.331.890.732	403.539.403.791	93,34

5) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	19.474.425.477	15.856.683.078	81,42
2.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	16.141.797.604	14.832.029.920	91,89
3.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.399.252.929	1.443.896.835	60,18
	Jumlah	38.015.476.010	32.132.609.833	84,53

6) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	34.050.835.089	32.972.631.826	96,83
2.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	7.869.452.046	7.049.958.998	89,59
3.	Program Pengembangan Ekspor	6.324.124.712	6.241.238.500	98,69
	Jumlah	48.244.411.847	46.263.829.324	95,89

7) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	110.534.654.018	102.721.621.369	92,93
2.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4.312.350	4.229.655	98,08
	Jumlah	110.538.966.368	102.725.851.024	92,93

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Realisasi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.



1) Sekretariat Daerah

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	925.167.859.480	890.877.050.152	96,29
2.	Program Kesejahteraan Rakyat	445.157.220.765	430.113.929.346	96,62
3.	Program Penataan Organisasi	72.651.584.629	57.409.153.129	79,02
4.	Program Penataan Organisasi	25.809.721.419	23.128.923.847	89,61
5.	Program Perekonomian dan Pembangunan	5.477.784.557	4.974.882.800	90,82
6.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	3.980.260.232	3.752.590.240	94,28
7.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.669.789.984	2.550.575.782	95,53
8.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	120.629.120	95.000.000	78,75
	Jumlah	1.481.034.850.186	1.412.902.105.296	95,40

2) Sekretariat DPRD

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	482.290.979.955	460.253.052.565	95,43
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	321.835.010.786	309.574.519.639	96,19
	Jumlah	804.125.990.741	769.827.572.204	95,73

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Belanja Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan sampai dengan Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Urusan Perencanaan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	108.254.903.910	102.569.770.926	94,75
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	16.283.911.188	14.832.891.127	91,09
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.910.148.392	2.740.161.000	94,16
	Jumlah	127.448.963.490	120.142.823.053	94,27



2) Urusan Keuangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.652.208.735.443	1.445.535.571.981	87,49
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.236.689.915.064	650.826.794.148	52,63
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	245.783.075.396	234.264.359.692	95,31
4.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	108.228.207.116	101.432.969.974	93,72
	Jumlah	3.242.909.933.019	2.432.059.695.795	75,00

3) Urusan Kepegawaian

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	129.411.316.759	127.476.685.896	98,51
2.	Program Kepegawaian Daerah	37.616.772.338	30.066.048.354	79,93
	Jumlah	167.028.089.097	157.542.734.250	94,32

4) Pendidikan dan Pelatihan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	64.973.174.135	62.066.326.162	95,53
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.623.302.320	36.348.935.244	89,48
	Jumlah	105.596.476.455	98.415.261.406	93,20

5) Penelitian dan Pengembangan

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penelitian dan Pengembangan	1.787.711.433	1.546.940.600	86,53
	Jumlah	1.787.711.433	1.546.940.600	86,53

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Realisasi Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Inspektorat

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pembangunan	149.753.483.290	142.737.928.895	95,32



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Daerah Provinsi			
2.	Program Penyelenggara Pengawasan	43.884.527.262	11.829.787.500	26,96
3.	Program Perumusan kebijakan Pendampingan dan Asistensi	23.047.130.281	10.337.736.299	44,85
	Jumlah	216.685.140.833	164.905.452.694	76,10

g. Unsur Kewilayahan

Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Kewilayahan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Kecamatan Administrasi

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pembangunan Daerah Provinsi	2.468.358.307.859	2.442.438.951.045	98,95
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	544.688.027.287	522.247.036.029	95,88
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.655.174.624	14.690.807.571	93,84
	Jumlah	3.028.701.509.770	2.979.376.794.645	98,37

2) Kota Administrasi

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.899.739.545.286	1.830.531.146.783	96,36
2.	Program Pengelolaan Kota Administrasi	11.940.684.970	11.326.058.913	94,85
	Jumlah	1.911.680.230.256	1.841.857.205.696	96,35

3) Kabupaten Administrasi

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	127.154.187.672	119.837.087.328	94,25
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan	600.792.118	459.941.500	76,56
	Jumlah	127.754.979.790	120.297.028.828	94,16

h. Unsur Pemerintahan Umum

Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Umum tahun anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.



1) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program-program pada pelaksanaan urusan ini sebagai berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	651.216.977.078	650.902.687.400	99,95
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	524.195.040.235	523.958.272.820	99,95
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	53.791.555.112	51.140.990.311	95,07
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp13.048.636.400	Rp10.043.988.000	76,97
5.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6.922.529.585	6.729.568.400	97,21
6.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.342.419.940	1.340.802.600	99,88
Jumlah		1.250.517.158.350	1.244.116.309.531	99,49

5.1.3 Pembiayaan

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp8.895.317.655.192,00. Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 mencapai Rp8.886.564.884.056,00 atau 99,90%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.16
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	6	6
1	Penggunaan SiLPA	8.600.096.664.254	8.600.096.664.254	100,00	9.721.718.831.341
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	295.220.990.938	286.277.630.136	96,97	979.251.480.334
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	190.589.666	~	393.892.140
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		8.895.317.655.192	8.886.564.884.056	99,90	10.701.364.203.815

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:



5.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA

Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.600.096.664.254,00 dan Rp9.721.718.831.341,00, merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran Sebelumnya berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diaudit oleh BPK-RI.

5.1.3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing tercatat sebesar Rp286.277.630.136,00 dan Rp979.251.480.334,00. Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp286.277.630.136,00 merupakan Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat untuk Proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta yang kemudian dijadikan penyertaan modal kepada PT *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta.

5.1.3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman tahun anggaran 2023 dan 2022 masing-masing tercatat sebesar Rp190.589.666,00 dan Rp393.892.140,00, merupakan Penyetoran Pokok Dana Bergulir Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) ke Kas Daerah.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp7.413.367.177.951,00. Realisasi sampai dengan tahun anggaran 2023 mencapai Rp6.639.068.343.295,00 atau 89,56%. Untuk lebih jelasnya realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2023 disajikan pada berikut.

Tabel 5.17
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023		%	Realisasi Tahun Anggaran 2022
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.434.678.551.982	4.836.397.306.901	88,99	3.492.066.426.925
2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.802.671.036.394	1.802.671.036.394	100,00	1.034.559.064.648
3	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	176.017.589.575	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.413.367.177.951	6.639.068.343.295	89,56	4.526.625.491.573

Penjelasan lebih lanjut realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.639.068.343.295,00 adalah sebagai berikut:



5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp4.836.397.306.901,00 terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Jaya sebesar Rp135.000.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan Perumda Air Minum Jaya tahun anggaran 2003 Nomor 703/-UD.02 tanggal 1 November 2023;
- b. Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Dharma Jaya sebesar Rp250.000.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan Perumda Dharma Jaya tahun anggaran 2023 Nomor 742/-UD.02 tanggal 17 November 2023;
- c. Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Propertindo sebesar Rp2.416.000.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Propertindo tahun anggaran 2023 Nomor 392/HK.01.11 tanggal 31 Mei 2023;
- d. Penyertaan Modal Daerah pada PT Jakarta Tourisindo sebesar Rp13.870.975.375,00 sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Tourisindo tahun anggaran 2023 Nomor 406/HK.01.11 tanggal 07 Juni 2023; dan
- e. Penyertaan Modal Daerah pada PT *Mass Rapid Transit* Jakarta sebesar Rp2.021.526.331.526,00 yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan *Phase II* (Bundaran HI – Kota).

5.1.3.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tahun anggaran 2023 tercatat sebesar Rp1.802.671.036.394,00 terdiri dari pembayaran cicilan melalui mekanisme pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp745.123.241.306,00 dan melalui mekanisme pembayaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp1.057.547.795.088 merupakan pengeluaran pembiayaan pinjaman yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat atas proyek JEDI dan pendanaan PEN.

5.1.3.2.3 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat

Pada periode tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat sebesar Rp176.017.589.575,00, namun tidak terdapat realisasi Pinjaman Daerah kepada Masyarakat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan akhir



31 Desember 2023. Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat untuk membiayai Program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dikelola oleh Unit Pengelola Dana Perumahan di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan. Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp6.542.421.120.069,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tahun 2022

SAL per 31 Desember 2022	8.600.096.664.254,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	<u>(8.600.096.664.254,00)</u>
Subtotal	0,00

Tahun 2023

Pendapatan	71.065.534.207.722,00
Belanja dan Transfer	<u>(66.770.609.628.414,00)</u>
Surplus	4.294.924.579.308,00
Penerimaan Pembiayaan	8.886.564.884.056,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>(6.639.068.343.295,00)</u>
Pembiayaan Neto	<u>2.247.496.540.761,00</u>
SAL 31 Desember 2023	6.542.421.120.069,00

SAL/SiLPA sebesar Rp6.542.421.120.069,00 tersebut berbeda dengan saldo kas di Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.562.186.965.985,00. Saldo Kas merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selisih antara SiLPA tahun anggaran 2023 dengan Kas di Neraca sebesar Rp19.765.845.916,00 dirinci sebagai berikut.

Rincian Selisih SiLPA:

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	409.976.303,00
Uang Muka Pasien RSUD/K	375.151.361,00
Uang Jaminan Kerja Sama	3.289.499.147,00
Uang Titipan	2.474.424.408,00
Uang Muka Jasa BLUD	78.925.000,00
Kas Lainnya	13.543.921.396,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	(406.051.698,00)
Pembulatan	(1,00)
Total	19.765.845.916,00



SiLPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.542.421.120.069,00 dengan rincian sebagai berikut:

1	Kas Daerah	5.454.632.626.327,00
2	Pendapatan yang Belum Disetor	108.493.750,00
3	Sisa Belanja UP/GU	329.382.648,00
4	Kas BLUD - Kas Tunai	1.197.791.647,00
5	Kas BLUD - Kas di Bank	1.000.840.280.678,00
6	Kas Bank BOS	84.768.659.304,00
7	Kas Bank BOP Kesetaraan	137.834.016,00
8	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	406.051.698,00
9	Pembulatan	1,00
Jumlah		6.542.421.120.069,00

5.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.3.1 Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode tahun 2023, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp35.264.080.604.281,00. Nilai tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp103.869.130.346.608,00 dikurangi dengan jumlah Beban-LO sebesar Rp68.605.049.742.327,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut.

5.3.1.1 Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah.

Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp103.869.130.346.608,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp76.505.455.312.665,00, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp23.778.953.501.314,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp3.584.721.532.629,00.

Rincian Pendapatan-LO tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.



Tabel 5.18
Rekapitulasi Pendapatan-LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	76.505.455.312.665	55.110.876.082.359	21.394.579.230.306	38,82
2.	Pendapatan Transfer	23.778.953.501.314	21.005.534.969.769	2.773.418.531.545	13,20
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.584.721.532.629	117.982.425.171.075	(114.397.703.638.446)	(96,96)
Jumlah		103.869.130.346.608	194.098.836.223.203	(90.229.705.876.595)	(46,49)

5.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp76.505.455.312.665,00. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.19
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah-LO	44.365.069.145.521	41.170.048.269.526	3.195.020.875.995	7,76
2.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	461.646.047.887	405.377.342.340	56.268.705.547	13,88
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan-LO	3.393.855.897.994	2.531.874.123.030	861.981.774.964	34,05
4.	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	28.284.884.221.263	11.003.576.347.463	17.281.307.873.800	157,05
Jumlah		76.505.455.312.665	55.110.876.082.359	21.394.579.230.306	38,82

Bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp55.110.876.082.359,00 terjadi kenaikan sebesar Rp21.394.579.230.306,00 atau 38,82%. Penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO adalah sebagai berikut.

5.3.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO adalah pendapatan yang diakui ketika adanya penetapan terlebih dahulu, di mana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pendapatan ini diakui ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.

Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau RKUD tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan ketetapan.



Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan sistem *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Perpajakan. Timbulnya hak menagih adalah pada saat telah diterbitkannya ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Perpajakan-LO.

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp44.365.069.145.521,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022 sebesar Rp41.170.048.269.526,00 terjadi kenaikan sebesar Rp3.195.020.875.995,00 atau 7,76%.

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LO tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.20
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah-LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	9.416.151.829.440	9.412.374.626.548	3.777.202.892	0,04
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.643.605.545.100	6.297.765.879.900	345.839.665.200	5,49
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.680.813.642.600	1.434.159.136.139	246.654.506.461	17,20
4	Pajak Rokok	855.303.949.037	884.786.370.249	(29.482.421.212)	(3,33)
5	Pajak Hotel	1.895.889.091.799	1.487.336.415.827	408.552.675.972	27,47
6	Pajak Restoran	3.945.693.475.875	3.397.311.028.843	548.382.447.032	16,14
7	Pajak Hiburan	680.062.836.647	413.460.756.031	266.602.080.616	64,48
8	Pajak Reklame	966.696.053.486	1.145.167.993.369	(178.471.939.883)	(15,58)
9	Pajak Penerangan Jalan	889.487.806.146	821.983.859.750	67.503.946.396	8,21
10	Pajak Parkir	475.866.788.716	411.356.222.272	64.510.566.444	15,68
11	Pajak air tanah	98.876.897.239	45.129.913.727	53.746.983.512	119,09
12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.750.581.424.261	9.065.649.014.833	684.932.409.428	7,56
13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.066.039.805.175	6.353.567.052.038	712.472.753.137	11,21
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO		44.365.069.145.521	41.170.048.269.526	3.195.020.875.995	7,76

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO tahun 2023 mencapai Rp9.416.151.829.440,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp9.412.374.626.548,00, terjadi kenaikan sebesar Rp3.777.202.892,00 atau 0,04%. Rincian Pendapatan PKB-LO tahun 2023 sebagai berikut.



No	Keterangan	Pendapatan PKB-LO (Rp)
a	Ketetapan	995.676.041.515
	Surat Ketetapan Pajak (SKP) Tahun 2023	995.676.041.515
b	Pendapatan:	8.430.923.178.635
	Pembayaran SKKP	8.430.923.178.635
c	Koreksi	(10.447.390.710)
	Pembatalan SKP	(10.447.390.710)
d	Pendapatan PKB-LO (a + b + c)	9.416.151.829.440

Pendapatan PKB-LO merupakan nilai pemungutan pajak yang ditetapkan secara *Official Assessment* dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) ditambah dengan pembayaran Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP). SKP adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang dengan masa pajak terutang lebih dari 12 (dua belas) bulan, sedangkan SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya PKB untuk masa pajak kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pendapatan PKB-LO tidak termasuk kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah jatuh tempo tetapi Belum Daftar Ulang (BDU) ke Samsat. Jumlah Kendaraan yang telah jatuh tempo pada tahun 2023 tetapi BDU sebanyak 2.983.177 KBM dengan potensi penerimaan PKB sebesar Rp2.308.838.137.373,00. Berikut disajikan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah yang berasal dari BDU di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023 sebagai berikut.

No	Jenis	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Jumlah	
		KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)
1	Sedan dan Sejenisnya	7.430	16.433.513.720	9.223	23.115.893.525	7.884	20.559.643.676	11.533	39.060.186.485	24.156	112.400.604.250	60.226	211.569.841.656
2	Jeep Segala Merk	2.745	12.187.316.670	3.662	18.464.048.075	3.419	18.120.560.450	6.947	41.196.161.576	22.071	160.290.069.400	38.844	250.258.156.171
3	Mini Bus, Micro Bus	23.359	57.251.147.810	33.285	89.351.698.240	28.772	78.429.471.735	57.031	166.231.588.073	171.234	561.572.666.190	313.681	952.836.572.048
4	Pick Up, Light Truck, Truck dan Sejenisnya	4.390	6.131.981.845	5.343	8.089.510.710	4.780	7.637.586.755	6.889	11.597.938.826	14.551	26.721.916.500	35.953	60.178.934.636
5	Bus Tingkat, Wagon, Box, Delivery Van	2.359	5.911.170.475	3.155	8.321.317.655	3.167	8.261.364.015	4.833	13.993.460.628	12.000	36.483.549.085	25.514	72.970.861.858
6	Dum Truck, Truck Tangki dan Sejenisnya	1.609	5.479.253.175	1.850	6.697.142.525	1.620	6.442.173.440	1.874	5.628.859.800	4.254	11.218.294.150	11.207	35.465.723.090
7	Otolet/Opelet, Microlet	452	61.030.600	619	75.161.025	475	60.098.965	412	54.085.900	768	112.956.200	2.726	363.332.690
8	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	3.058	236.569.900	5.407	353.739.600	2.969	204.446.830	2.676	194.340.061	3.626	365.531.000	17.736	1.354.627.391
9	Sepeda Motor	369.316	86.362.125.875	464.458	119.223.766.675	367.625	94.316.904.211	454.735	130.412.101.587	804.375	250.706.480.675	2.460.509	681.021.379.023
10	Alat-Alat Berat	1.968	4.515.913.710	2.443	5.747.461.805	2.148	5.242.614.290	2.708	6.357.296.305	7.514	20.955.422.700	16.781	42.818.708.810
TOTAL		416.686	194.570.023.780	529.445	279.439.739.835	422.859	239.274.864.367	549.638	414.726.019.241	1.064.549	1.180.827.490.150	2.983.177	2.308.838.137.373



b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO tahun 2023 mencapai Rp6.643.605.545.100,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp6.297.765.879.900,00, terjadi kenaikan sebesar Rp345.839.665.200,00 atau 5,49%. Rincian Pendapatan BBNKB-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan BBNKB-LO (Rp)
a	Pendapatan:	6.643.605.545.100
	Pembayaran SKKP Tahun 2023	6.643.605.545.100
b	Pendapatan BBNKB-LO	6.643.605.545.100

Pendapatan BBNKB-LO merupakan nilai pendapatan BBNKB secara *official assessment* yang terdapat dalam Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP).

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO

Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO tahun 2023 mencapai Rp1.680.813.642.600,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.434.159.136.139,00, terjadi kenaikan sebesar Rp246.654.506.461,00 atau 17,20%. Rincian Pendapatan PBBKB-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan PBBKB-LO (Rp)
a	Ketetapan	74.966.134
	SKPDKB Tahun 2023	74.966.134
b	Pendapatan:	1.680.738.676.466
	Setoran Masa PBBKB	1.680.738.676.466
c	Pendapatan PKB-LO (a + b)	1.680.813.642.600

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*, di mana nilai Pendapatan PBBKB-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

d. Pajak Rokok-LO

Pendapatan Pajak Rokok-LO tahun 2023 mencapai Rp855.303.949.037,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp884.786.370.249,00, terjadi penurunan sebesar Rp29.482.421.212,00 atau 3,33%. Rincian Pendapatan Pajak Rokok-LO tahun 2023 sebagai berikut.



No	Keterangan	Pendapatan Pajak Rokok-LO (Rp)
a	Pendapatan:	855.303.949.037
	Setoran Pajak Rokok	855.303.949.037
b	Pendapatan Pajak Rokok-LO	855.303.949.037

Pajak Rokok merupakan nilai pemungutan pajak yang ditetapkan secara *self-assessment*. Pendapatan Pajak Rokok-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penyetoran Pajak Rokok dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

e. Pajak Hotel-LO

Pendapatan Pajak Hotel-LO tahun 2023 mencapai Rp1.895.889.091.799,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.487.336.415.827,00, terjadi kenaikan sebesar Rp408.552.675.972,00 atau 27,47%. Rincian Pendapatan Pajak Hotel-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Hotel-LO (Rp)
a	Ketetapan	7.320.670.492
	SKPDKB Tahun 2023	7.320.670.492
b	Pendapatan:	1.888.568.421.307
	Setoran Masa Pajak Hotel	1.888.568.421.307
c	Pendapatan Pajak Hotel-LO (a + b)	1.895.889.091.799

Pajak Hotel memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*. Pendapatan Pajak Hotel-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

f. Pajak Restoran-LO

Pendapatan Pajak Restoran-LO tahun 2023 mencapai Rp3.945.693.475.875,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.397.311.028.843,00, terjadi kenaikan sebesar Rp548.382.447.032,00 atau 16,14%. Rincian Pendapatan Pajak Restoran-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Restoran-LO (Rp)
a	Ketetapan	49.497.734.964
	SKPDKB Tahun 2023	49.497.734.964
b	Pendapatan:	3.896.195.740.911
	Setoran Masa Pajak Restoran	3.896.122.712.912
	Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka	73.027.999
c	Pendapatan Pajak Restoran-LO (a + b)	3.945.693.475.875



Pajak Restoran memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*. Pendapatan Pajak Restoran-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

g. Pajak Hiburan-LO

Pendapatan Pajak Hiburan-LO tahun 2023 mencapai Rp680.062.836.647,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp413.460.756.031,00, terjadi kenaikan sebesar Rp266.602.080.616,00 atau 64,48%. Rincian Pendapatan Pajak Hiburan-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Hiburan-LO (Rp)
a	Ketetapan	41.702.338.461
	SKPDKB Tahun 2023	41.702.338.461
b	Pendapatan:	638.360.498.186
	Setoran Masa Pajak Hiburan	638.305.070.941
	Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka	55.427.245
c	Pendapatan Pajak Hiburan-LO (a + b)	680.062.836.647

Pajak Hiburan memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*, di mana nilai pendapatan Pajak Hiburan-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan.

h. Pajak Reklame-LO

Pendapatan Pajak Reklame-LO tahun 2023 mencapai Rp966.696.053.486,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.145.167.993.369,00, terjadi penurunan sebesar Rp178.471.939.883,00 atau 15,58%. Rincian Pendapatan Pajak Reklame-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Reklame-LO (Rp)
a	Ketetapan	954.769.320.484
	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2023	955.151.140.497
	Pengurangan / Keringanan Ketetapan Tahun 2023	(381.820.013)
b	Pendapatan:	12.493.102.580
	Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka	12.493.102.580
c	Koreksi:	(566.369.578)
	Kompensasi	(291.523.744)
	Pembebasan / Pengenaan Ketetapan Tahun Sebelumnya	(274.845.832)



No	Keterangan	Pendapatan Pajak Reklame-LO (Rp)
	Pembulatan	(2)
d	Pendapatan Pajak Reklame-LO (a + b + c)	966.696.053.486

Pajak Reklame-LO merupakan nilai pemungutan pajak yang ditetapkan secara *official assessment* dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

i. Pajak Penerangan Jalan-LO

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)-LO tahun 2023 mencapai Rp889.487.806.146,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp821.983.859.750,00, terjadi kenaikan sebesar Rp67.503.946.396,00 atau 8,21%. Rincian Pendapatan PPJ-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan PPJ-LO (Rp)
a	Pendapatan:	889.487.806.146
	Setoran Masa PPJ	889.487.806.146
b	Pendapatan PPJ-LO	889.487.806.146

Pajak Penerangan Jalan memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*. Pendapatan PPJ-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

j. Pajak Parkir-LO

Pendapatan Pajak Parkir-LO tahun 2023 mencapai Rp475.866.788.716,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp411.356.222.272,00, terjadi kenaikan sebesar Rp64.510.566.444,00 atau 15,68%. Rincian Pendapatan Pajak Parkir-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Parkir-LO (Rp)
a	Ketetapan	2.761.227.416
	SKPDKB Tahun 2023	2.761.227.416
b	Pendapatan:	473.105.561.296
	Setoran Masa Pajak Parkir	473.105.561.296
c	Koreksi:	4
	Koreksi Pembulatan	4
d	Pendapatan Pajak Parkir-LO (a + b + c)	475.866.788.716

Pajak Parkir memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*. Pendapatan Pajak Parkir-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak



Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan. Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

k. Pajak Air Tanah-LO

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO tahun 2023 mencapai Rp98.876.897.239,00, dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp45.129.913.727,00, terjadi kenaikan sebesar Rp53.746.983.512,00 atau 119,09%. Rincian Pendapatan Pajak Air Tanah-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Air Tanah-LO (Rp)
a	Ketetapan	98.876.897.235
	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2023	98.876.897.235
b	Koreksi:	4
	Koreksi Pembulatan	4
c	Pendapatan Pajak Air Tanah-LO (a + b)	98.876.897.239

Pajak Air Tanah-LO merupakan nilai pemungutan pajak yang ditetapkan secara *official assessment* dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

l. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO tahun 2023 mencapai Rp9.750.581.424.261,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp9.065.649.014.833,00, terjadi kenaikan sebesar Rp684.932.409.428,00 atau 7,56%. Rincian Pendapatan PBBP2-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan PBBP2-LO (Rp)
a	Ketetapan	10.132.823.877.342
	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Tahun 2023	13.493.080.456.917
	Pengurangan/Keringanan atas ketetapan tahun 2023	(798.390.806.386)
	Pembebasan/Pengenaan atas ketetapan tahun 2023	(2.561.865.773.189)
b	Pendapatan:	8.728.665.935
	Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka	8.728.665.935
c	Koreksi	(390.971.119.016)
	Penambahan Utang Kompensasi	15.352.124
	Kompensasi	(2.180.482.320)
	Pengurangan / Keringanan Tahun Sebelumnya	(92.719.256.082)
	Pembebasan / Pengenaan Tahun Sebelumnya	(296.086.732.738)
d	Pendapatan PBBP2-LO (a + b + c)	9.750.581.424.261

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO merupakan nilai pemungutan pajak yang ditetapkan secara *official*



assessment dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBBP2.

m. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO tahun 2023 mencapai Rp7.066.039.805.175,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp6.353.567.052.038,00, terjadi kenaikan sebesar Rp712.472.753.137,00 atau 11,21%. Rincian Pendapatan BPHTB-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Keterangan	Pendapatan BPHTB-LO (Rp)
a	Ketetapan:	40.243.128.049
	SKPDKB dan STPD Tahun 2023	40.243.128.049
b	Pendapatan:	7.026.604.814.763
	Pembayaran Setoran BPHTB	6.878.965.256.988
	Pengakuan Pendapatan Diterima di Muka	147.639.557.775
c	Koreksi:	(808.137.637)
	Penambahan Utang Restitusi	(215.420.250)
	Penambahan Utang Kompensasi	(580.742.387)
	Kompensasi	(11.975.000)
d	Pendapatan BPHTB-LO (a + b + c)	7.066.039.805.175

BPHTB memiliki sistem pemungutan secara *self-assessment*. Pendapatan BPHTB-LO diakui berdasarkan realisasi pendapatan pajak yang diterima pada RKUD sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ditambahkan dengan nilai ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang merupakan hasil pemeriksaan dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang merupakan hasil penelitian. Dalam *self-assessment* wajib pajak melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

5.3.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO diakui apabila SKPD/UKPD telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp461.646.047.887,00 dan Rp405.377.342.340,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 dibandingkan dengan 2022, maka terdapat



kenaikan sebesar Rp56.268.705.547,00, atau 13,88%. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.21
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Jasa Umum-LO	133.274.713.759	124.108.206.782	9.166.506.977	7,39
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	90.834.578.853	76.724.094.495	14.110.484.358	18,39
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	237.536.755.275	204.545.041.063	32.991.714.212	16,13
Jumlah		461.646.047.887	405.377.342.340	56.268.705.547	13,88

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Per 31 Desember 2023 terdiri dari Penetapan Retribusi Daerah setelah keringanan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021, Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 dan Pembatalan SKRD dikurangi Penetapan Retribusi Daerah Tahun 2023 yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah-LO setelah Tahun 2023 ditambah Penetapan Retribusi Daerah sebelum Tahun 2023 yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dan koreksi. Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.22
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi	Ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2023	Keringanan (Pergub 87 Tahun 2021)	Keringanan (Pergub 36 Tahun 2023)	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Retribusi Daerah setelah keringanan Pergub 87 Tahun 2021, Pergub 36 Tahun 2023 dan Pembatalan SKRD	Penetapan Retribusi Daerah Tahun 2023 yang menjadi pendapatan Retribusi Daerah LO setelah Tahun 2023	Penetapan Retribusi Daerah sebelum Tahun 2023 yang menjadi Pendapatan Retribusi Daerah LO - 2023	Koreksi	Pendapatan Retribusi Daerah-LO Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4-5-6	8	9	10	11 = (7-8+9-10)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	144.644.228.154	10.836.940.200	605.709.500	661.471.750	132.540.106.704	11.547.074.028	12.281.681.083	0	133.274.713.759
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	222.992.978.408	126.979.257.573	49.422.881	176.247.000	95.788.050.954	599.468.280	733.996.179	5.088.000.000	90.834.578.853
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	237.536.755.275	0	0	0	237.536.755.275	0	0	0	237.536.755.275
	Jumlah	605.173.961.837	137.816.197.773	655.132.381	837.718.750	465.864.912.933	12.146.542.308	13.015.677.262	5.088.000.000	461.646.047.887

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 sebagai berikut:



a. Retribusi Jasa Umum – LO

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp133.274.713.759,00 dan Rp124.108.206.782,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO tahun 2023 dibandingkan dengan 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp9.166.506.977,00 atau 7,39%. Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.23
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO
Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD/UKPD	Ketetapan Retribusi Jasa Umum Tahun 2023	Keringanan (Pergub 87 Tahun 2021)	Keringanan (Pergub 36 Tahun 2023)	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Retribusi Jasa Umum setelah keringanan Pergub 87 Tahun 2021, Pergub 36 Tahun 2023 dan Pembatalan SKRD	Penetapan Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 yang menjadi pendapatan Retribusi Jasa Umum LO setelah Tahun 2023	Penetapan Retribusi Jasa Umum sebelum Tahun 2023 yang menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Umum LO - 2023	Koreksi	Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4-5-6	8	9	10	11 = (7-8+9-10)
1	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	100.915.500	0	0	0	100.915.500	0	0	0	100.915.500
2	Dinas Lingkungan Hidup	58.715.388.310	0	0	0	58.715.388.310	0	0	0	58.715.388.310
3	Dinas Perhubungan	50.208.767.000	243.651.000	605.709.500	0	49.359.406.500	0	0	0	49.359.406.500
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18.897.263.250	9.156.215.000	0	661.471.750	9.079.576.500	0	0	0	9.079.576.500
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.279.832.094	1.061.900.000	0	0	15.217.932.094	11.547.074.028	12.281.681.083	0	15.952.539.149
6	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	442.062.000	375.174.200	0	0	66.887.800	0	0	0	66.887.800
	Jumlah	144.644.228.154	10.836.940.200	605.709.500	661.471.750	132.540.106.704	11.547.074.028	12.281.681.083	0	133.274.713.759

b. Retribusi Jasa Usaha – LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp90.834.578.853,00 dan Rp76.724.094.495,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO tahun 2023 dibandingkan 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp14.110.484.358,00 atau 18,39%. Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Usaha-LO tahun 2023 sebagai berikut.



Tabel 5.24
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO
Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD/UKPD	Ketetapan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023	Keringanan (Pergub 87 Tahun 2021)	Keringanan (Pergub 36 Tahun 2023)	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Retribusi Jasa Usaha setelah keringanan Pergub 87 Tahun 2021, Pergub 36 Tahun 2023 dan Pembatalan SKRD	Penetapan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 yang menjadi pendapatan Retribusi Jasa Usaha LO - setelah Tahun 2023	Penetapan Retribusi Jasa Usaha sebelum Tahun 2023 yang menjadi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LO - 2023	Koreksi	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4-5-6	8	9	10	11 = (7-8+9-10)
1	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	286.950.000	0	0	0	286.950.000	0	0	0	286.950.000
2	Dinas Lingkungan Hidup	4.523.121.500	0	0	0	4.523.121.500	0	0	0	4.523.121.500
3	Dinas Perhubungan	17.842.881.139	3.468.540.767	49.422.881	0	14.324.917.491	0	0	5.088.000.000	9.236.917.491
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.466.631.500	6.338.461.000	0	176.247.000	4.951.923.500	0	0	0	4.951.923.500
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.992.677.065	0	0	0	4.992.677.065	0	0	0	4.992.677.065
6	Dinas Bina Marga	2.509.634.820	0	0	0	2.509.634.820	0	0	0	2.509.634.820
7	Dinas Sumber Daya Air	1.903.156.220	0	0	0	1.903.156.220	0	0	0	1.903.156.220
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	129.345.702.050	116.203.409.150	0	0	13.142.292.900	0	0	0	13.142.292.900
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	2.845.164.044	18.213.983	0	0	2.826.950.061	0	0	0	2.826.950.061
10	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	15.574.550.590	377.396.000	0	0	15.197.154.590	599.468.280	733.996.179	0	15.331.682.489
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	16.250.792.800	6.550.000	0	0	16.244.242.800	0	0	0	16.244.242.800
12	Dinas Kebudayaan	6.961.874.750	0	0	0	6.961.874.750	0	0	0	6.961.874.750
13	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.659.052.250	0	0	0	6.659.052.250	0	0	0	6.659.052.250
14	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	1.647.789.680	566.686.673	0	0	1.081.103.007	0	0	0	1.081.103.007
15	Badan Pengelolaan Aset Daerah	183.000.000	0	0	0	183.000.000	0	0	0	183.000.000
	Jumlah	222.992.978.408	126.979.257.573	49.422.881	176.247.000	95.788.050.954	599.468.280	733.996.179	5.088.000.000	90.834.578.853

c. Retribusi Perizinan Tertentu – LO

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp237.536.755.275,00 dan Rp204.545.041.063,00. Jika realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO tahun 2023 dibandingkan dengan 2022, maka terdapat kenaikan sebesar Rp32.991.714.212,00 atau 16,13%. Penjelasan lebih lanjut rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO tahun 2023 sebagai berikut.



Tabel 5.25
Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO
Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD/UKPD	Ketetapan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023	Keringanan (Pergub 87 Tahun 2021)	Keringanan (Pergub 36 Tahun 2023)	Pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah	Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu setelah keringanan Pergub 87 Tahun 2021, Pergub 36 Tahun 2023 dan Pembatalan SKRD	Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 yang menjadi pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu LO - setelah Tahun 2023	Penetapan Retribusi Perizinan Tertentu sebelum Tahun 2023 yang menjadi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu LO - 2023	Koreksi	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4-5-6	8	9	10	11 = (7-8+9-10)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	237.536.755.275	0	0	0	237.536.755.275	0	0	0	237.536.755.275
	Jumlah	237.536.755.275	0	0	0	237.536.755.275	0	0	0	237.536.755.275

5.3.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2023 adalah sebesar Rp3.393.855.897.994,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan dividen atas investasi dengan metode biaya dan pendapatan dari kenaikan nilai investasi dengan metode ekuitas.

Pencatatan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode biaya, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Sedangkan pencatatan investasi dengan menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) tidak diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Tetapi kenaikan nilai investasi yang diperoleh dari bagian laba perusahaan diakui sebagai pendapatan LO.

Rekapitulasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.26
Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	PT Kawasan Berikat Nusantara	10.050.867.798	2.923.783.924	7.127.083.874	243,76
2	PT Cemani Toka	1.758.443.960	1.426.876.360	331.567.600	23,24



No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
3	PT Asuransi Bangun Askrida	2.302.711.241	2.095.749.671	206.961.570	9,88
4	Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi	3.379.743.874.995	2.525.427.713.075	854.316.161.920	33,83
Jumlah		3.393.855.897.994	2.531.874.123.030	861.981.774.964	34,05

a. PT Kawasan Berikat Nusantara

Penerimaan dividen dari PT Kawasan Berikat Nusantara tahun 2023 sebesar Rp10.050.867.798,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 3 tanggal 28 Juni 2023. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

b. PT Cemani Toka

Penerimaan dividen dari PT Cemani Toka tahun 2023 sebesar Rp1.758.443.960,00, sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 3 tanggal 13 Juni 2023. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

c. PT Asuransi Bangun Askrida

Penerimaan dividen dari PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2023 sebesar Rp2.302.711.241,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 17 tanggal 20 Maret 2023. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

d. Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi

Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp3.379.743.874.995,00 merupakan pendapatan atas laba dan komponen ekuitas lainnya BUMD dan PT Patungan yang menggunakan metode ekuitas, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Perusahaan Daerah	% Kepemilikan	Bagian Laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 (Rp)	Komponen Ekuitas Lainnya Tahun 2023 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
1	Perumda Air Minum Jaya	100%	1.247.359.474.526	43.851.403.620	1.291.210.878.146
2	Perumda Dharma Jaya	100%	62.390.243.180	0	62.390.243.180
3	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	100%	0	34.804.379.198	34.804.379.198
4	Perumda Pasar Jaya	100%	54.911.297.143	0	54.911.297.143
5	Perumda PAL Jaya	100%	36.738.750.882	5.550.866.234	42.289.617.116
6	PT Pembangunan Jaya	38,80%	339.918.345.698	33.383.765.050	373.302.110.748
7	PT Food Station Tjipinang	99,98%	6.189.855.826	13.563.326	6.203.419.152



No.	Perusahaan Daerah	% Kepemilikan	Bagian Laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 (Rp)	Komponen Ekuitas Lainnya Tahun 2023 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
8	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50,00%	30.398.341.241	0	30.398.341.241
9	PT Delta Djakarta, Tbk	26,25%	52.269.085.968	0	52.269.085.968
10	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	72,00%	169.324.560.065	0	169.324.560.065
11	PT Bank DKI Jakarta	99,98%	1.019.883.853.108	54.135.577.223	1.074.019.430.331
12	PT Jakarta Tourisindo	99,57%	0	642.476.493	642.476.493
13	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,998%	20.452.536.414	119.451.879	20.571.988.293
14	PT Transportasi Jakarta	99,70%	145.928.219.934	1.993.772.311	147.921.992.245
15	PT Penjamin Kredit Daerah	98,75%	19.216.885.827	267.169.849	19.484.055.676
	TOTAL		3.204.981.449.812	174.762.425.183	3.379.743.874.995

5.3.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang sah-LO merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah-LO meliputi antara lain jasa giro, bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dari pengembalian, dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dari angsuran/cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, BLUD dan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum dapat diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya dokumen penagihan atau ketetapan. Dalam hal hak atas pendapatan diterima atau direalisasi tanpa penetapan, maka pendapatan LO diakui ketika hak diterima atau direalisasi.

Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum diukur sebesar nilai nominal atas Surat Ketetapan / Surat Tagihan / dokumen ketetapan lainnya / naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan. Pendapatan LO berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi.

Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-LO per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp28.284.884.221.263,00 dan Rp11.003.576.347.463,00. Bila dibandingkan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah-LO tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp17.281.307.873.800,00 atau 157,05% Realisasi penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-LO tahun 2023 dan 2022, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.27
Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
a	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	3.145.400.000	12.033.389.424	(8.887.989.424)	(73,86)
b	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	23.736.855.686.349	185.630.052.203	23.551.225.634.146	12687,18
c	Jasa Giro-LO	165.515.031.835	150.020.002.536	15.495.029.299	10,33
d	Pendapatan Bunga-LO	350.699.194.121	114.219.176.130	236.480.017.991	207,04
e	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	13.259.035.958	195.285.422.782	(182.026.386.824)	(93,21)
f	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	15.489.416.067	16.004.308.915	(514.892.848)	3,22
g	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	42.527.904.716	14.612.898.932	27.915.005.784	191,03
h	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	478.008.631.155	351.051.819.113	126.956.812.042	36,16
i	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	1.045.541.564	1.450.181.803	(404.640.239)	(27,90)
j	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	204.862.000	457.715.100	(252.853.100)	(55,24)
k	Pendapatan dari Pengembalian-LO	26.850.883.877	147.188.125.915	(120.337.242.038)	(81,76)
l	Pendapatan BLUD-LO	3.364.232.258.340	2.942.310.026.531	421.922.231.809	14,34
m	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0	5.700.000	(5.700.000)	(100)
n	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	0	1.409.551.917	(1.409.551.917)	(100)
o	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	86.440.088.006	65.174.232.148	21.265.855.858	32,63
p	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO	610.287.275	0	610.287.275	100
q	Pendapatan Rekomendasi HGB HPL-LO	0	165.375.140.942	(165.375.140.942)	(100)
r	Pendapatan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah-LO	0	46.529.185.701	(46.529.185.701)	(100)
s	Perolehan Aset Lainnya yang Sah-LO	0	6.594.629.443.269	(6.594.629.443.269)	(100)
t	Pendapatan Lain-lain-LO	0	189.974.102	(189.974.102)	(100)
	Jumlah	28.284.884.221.263	11.003.576.347.463	17.281.307.873.800	157,05

Penjelasan lebih lanjut Penerimaan Lain-lain PAD-LO tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2023 sebesar Rp3.145.400.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar



Rp12.033.389.424,00 terjadi penurunan sebesar Rp8.887.989.424,00 atau 73,86%.

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO merupakan penerimaan atas biaya kompensasi bekas tanah Brandgang yang berada di 1 (satu) lokasi yang sebelumnya tidak tercatat sebagai Aset Tetap atau Aset Lainnya.

Hasil penjualan tersebut diakui pada saat Surat Keputusan Gubernur tentang Biaya Kompensasi Penggunaan/pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang terbit, sedangkan nilainya diukur berdasarkan besaran biaya kompensasi yang tercantum pada SK Gubernur.

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO adalah pendapatan yang bersumber dari hasil sewa BMD, hasil kerja sama pemanfaatan BMD, hasil dari Bangun Guna Serah (BGS), dan hasil dari Bangun Serah Guna (BSG). Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO berupa hasil sewa BMD, BGS, dan BSG diakui saat diterbitkan Surat Tagihan kepada pihak ketiga dan dilakukan penyesuaian di akhir tahun sesuai dengan hak Pemerintah Daerah yang sudah dapat diakui di tahun berkenaan. Nilai Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen Surat Tagihan kepada pihak ketiga.

Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO berupa pemenuhan kewajiban pihak ketiga atas penerbitan SIPPT dan SP3L berupa Aset Fasos Fasum diakui pada saat serah terima aset dan nilainya diakui pada dokumen BAST yang dikeluarkan.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp23.736.855.686.349,00 dan sebesar Rp185.630.052.203,00, terjadi kenaikan sebesar Rp23.551.225.634.146,00 atau 12.687,18%.

Adapun rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Nama Akun	Nilai (Rp)
1	Hasil Sewa BMD-LO	141.767.128.683
2	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	23.581.577.612.325
3	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	13.510.945.341
	Jumlah	23.736.855.686.349

Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp23.581.577.612.325,00 terdiri dari Rp2.479.300.000,00 merupakan pendapatan dari Aset Kerja Sama Bangun Serah Guna (BSG) dan Rp23.579.098.312.325,00 merupakan



pemenuhan kewajiban pihak ketiga atas SIPPT dan SP3L berupa Aset Fasos Fasum.

c. Jasa Giro – LO

Jasa Giro-LO adalah penerimaan jasa giro atas penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk rekening pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur, baik yang dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Daerah maupun Bendaharawan Daerah.

Pendapatan Jasa Giro-LO diakui secara periodik, yaitu pada saat hak Pemerintah Daerah atas penerimaan jasa giro telah jatuh tempo setiap bulan. Sedangkan nilainya diukur sebesar nilai nominal yang tercantum pada Bukti Penerimaan beserta dokumen ketetapan piutang jasa giro pada akhir periode penyusunan laporan keuangan.

Pendapatan Jasa Giro-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp165.515.031.835,00 dan sebesar Rp150.020.002.536,00.

Pendapatan Jasa Giro-LO tahun 2023 jika dibandingkan dengan Pendapatan Jasa Giro-LO tahun 2022 sebesar Rp150.020.002.536,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp15.495.029.299,00 atau 10,33%. Adapun rincian Pendapatan Jasa Giro-LO sebagai berikut.

No	Nama Akun	Nilai (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	160.065.579.635
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	3.754.555.951
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	1.694.896.249
Jumlah		165.515.031.835

d. Pendapatan Bunga – LO

Pendapatan Bunga-LO adalah pendapatan bunga yang berasal dari penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito, obligasi, dan lain sebagainya.

Pendapatan Bunga-LO diakui sesuai dengan hak pendapatan Pemerintah Daerah atas pendapatan bunga yang timbul selama periode laporan keuangan. Sedangkan nilainya disajikan sebesar nilai nominal deposito/obligasi/lainnya.

Pendapatan Bunga-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp350.699.194.121,00 dan sebesar Rp114.219.176.130,00, yang diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatan dana dalam pada rekening bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2023 dan pengakuan bunga akrual berdasarkan jatuh tempo deposito. Pendapatan Bunga-LO tahun 2023 jika dibandingkan dengan Pendapatan Bunga-LO tahun 2022 sebesar Rp114.219.176.130,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp236.480.017.991,00 atau 207,04%.



e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO adalah penyetoran/pengembalian baik kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Institusi Pengawas baik internal maupun eksternal. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO diakui berdasarkan penetapan tuntutan ganti rugi dan Surat Tagih yang ditetapkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi pada tahun 2023.

Nilai Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO diukur berdasarkan nilai (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara SKP2KS.

Pada tahun 2023 seluruh Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO berbentuk uang. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.259.035.958,00 dan sebesar Rp195.285.422.782,00, atau terjadi penurunan sebesar Rp182.026.386.824,00 atau 93,21%.

f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO adalah penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa, dan kerja sama oleh Pemerintah Daerah. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO diakui saat timbulnya dokumen ketetapan. Sedangkan nilainya diukur sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO tahun 2023 tercatat sebesar Rp15.489.416.067,00, terdiri atas:

- 1) sebesar Rp13.729.737.003,00 merupakan penerimaan komisi bagi hasil Premi Program Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; dan



- 2) sebesar Rp1.759.679.064,00 merupakan penerimaan angsuran/cicilan uang muka rumah susun dan sewa beli rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp16.004.308.915,00, terjadi penurunan sebesar Rp514.892.848,00 atau 3,22%.

g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO adalah penerimaan atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama dan didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO diakui ketika terbitnya dokumen ketetapan berupa Berita Acara Serah Terima (BAST). Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen BAST.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO tahun 2023 sebesar Rp42.527.904.716,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO tahun 2022 sebesar Rp14.612.898.932,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp27.915.005.784 atau 191,03%.

h. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO

Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO adalah pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah setelah jatuh tempo. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO diakui saat terbit Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen STPD/SKPD/SKPDKB.

Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO tahun 2023 tercatat sebesar Rp478.008.631.155,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp351.051.819.113,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp126.956.812.042,00 atau 36,16%. dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	162.670.168.287
2	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.411.779.560
3	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	471.245.178
4	Pendapatan Denda Pajak Hotel	6.721.409.604
5	Pendapatan Denda Pajak Restoran	35.227.057.592
6	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	24.600.755.016



No	Uraian	Nilai (Rp)
7	Pendapatan Denda Pajak Reklame	23.560.715.575
8	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.563.365.513
9	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.977.494.102
10	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	69.793.986.271
11	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	149.010.654.457
	Jumlah	478.008.631.155

i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO adalah Pendapatan denda Retribusi Daerah yang berasal dari denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah setelah jatuh tempo, yang bersumber dari pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO diakui pada saat dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terbit. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai tercantum pada dokumen SKRD.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO tahun 2023 tercatat sebesar Rp1.045.541.564,00, merupakan pendapatan sanksi retribusi sesuai dengan ketetapan SKRD. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp1.450.181.803,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp404.640.239,00 atau 27,90%. Adapun rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO tahun 2022 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	48.059.336
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	950.492.654
3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	46.989.574
	Jumlah	1.045.541.564

j. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO adalah pendapatan yang bersumber dari hasil eksekusi atas jaminan pengadaan barang/jasa. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, BUD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan. Nilai Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO tahun 2023 sebesar Rp204.862.000,00 seluruhnya merupakan hasil eksekusi atas jaminan



pengadaan barang/jasa di Dinas Sosial. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp457.715.100,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp252.853.100,00 atau 55,24%.

k. Pendapatan dari Pengembalian-LO

Pendapatan dari Pengembalian-LO merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja sebelum tahun 2023 yang diterima pada tahun 2023.

Pendapatan dari Pengembalian-LO diakui pada saat pengembalian diterima atau hak atas pengembalian ditetapkan, di antaranya melalui penerbitan dokumen Surat Tanda Setoran (STS) pengembalian belanja. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen STS atau dokumen ketetapan lainnya.

Pendapatan dari Pengembalian-LO tahun 2023 sebesar Rp26.850.883.877,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp147.188.125.915,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp120.337.242.038,00 atau 81,76%. Adapun rincian Pendapatan dari Pengembalian-LO tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.844.783.178
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa	2.026.674.910
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	919.884.956
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis	2.126.429
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa/Beasiswa Tugas Belajar	10.753.303
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	32.672.769
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi	73.500.000
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Hibah	837.902.680
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bantuan Sosial	15.151.270.975
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	41.149.476
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	3.910.165.201
Jumlah		26.850.883.877

l. Pendapatan BLUD-LO

Pendapatan-LO dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan umum BLUD, pendapatan hibah BLUD, pendapatan hasil kerja sama BLUD, dan pendapatan lain-lain BLUD yang sah.

Pendapatan BLUD diakui dengan kriteria:



- 1) telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi Pendapatan dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut;
- 2) telah diterbitkan surat ketetapan; dan atau
- 3) telah diterbitkan surat penagihan.

Pendapatan-LO dari BLUD-LO tahun 2023 sebesar Rp3.364.232.258.340,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2.942.310.026.531,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp421.922.231.809,00 atau 14,34%. Adapun rincian Pendapatan-LO dari BLUD-LO tahun 2023 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD-LO	3.235.584.835.825
2	Pendapatan Hibah BLUD-LO	1.214.100.000
3	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD-LO	63.980.577.760
4	Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Komisi dan Pengembangan Usaha-LO	63.452.744.755
	Jumlah	3.364.232.258.340

m. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO adalah pendapatan denda yang timbul atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyetorkan pokok sewa atau kontribusi Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) ke Kas Daerah sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Aset.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO diakui pada saat dokumen Surat Tagih terbit. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen Surat Tagih.

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp5.700.000,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp5.700.000,00 atau 100%.

n. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)-LO

Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)-LO adalah putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)-LO dilaksanakan berdasarkan pada dokumen surat keputusan pengadilan. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen surat keputusan pengadilan.



Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*)-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.409.551.917, maka terjadi penurunan sebesar Rp1.409.551.917 atau 100%.

o. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO adalah pendapatan yang berasal dari denda atas pelanggaran Peraturan Daerah. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO diakui pada saat terbitnya dokumen penetapan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai tercantum pada dokumen penetapan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp86.440.088.006,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp65.174.232.148,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp21.265.855.858,00 atau 32,63%.

p. Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO

Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO adalah pendapatan denda yang timbul atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyetorkan pokok hasil kerja sama penyediaan infrastruktur dan hasil dari pengakhiran sewa BMD ke Kas Daerah sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset.

Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO diakui pada saat dokumen Surat Tagih terbit. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen Surat Tagih.

Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp610.287.275,00 dan sebesar Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp610.287.275,00. atau 100%.

q. Pendapatan Rekomendasi HGB HPL-LO

Pendapatan Rekomendasi HGB HPL-LO adalah penerimaan atas pemberian rekomendasi dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan sesuatu hak atas bidang tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL), tanah eks desa, dan tanah eks Kota Praja milik/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengenaan permohonan HPL ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 217 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu Hak di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



Pendapatan Rekomendasi HGB HPL-LO diakui pada saat terbitnya dokumen penetapan berupa Surat Perintah Setor (SPS). Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen SPS dimaksud.

Pendapatan Rekomendasi HGB HPL-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp165.375.140.942,00 dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp165.375.140.942,00 atau 100%.

r. Pendapatan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah-LO

Pendapatan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah-LO adalah penerimaan kompensasi kewajiban untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk uang.

Pendapatan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah-LO diakui pada saat terbitnya dokumen penetapan berupa Surat Persetujuan Prinsip Konversi kewajiban SP3L. Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen penetapan dimaksud.

Pendapatan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp46.529.185.701,00, dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp46.529.185.701,00 atau 100%.

s. Perolehan Aset Lainnya yang Sah-LO

Perolehan Aset Lainnya yang Sah-LO adalah penerimaan aset dari hasil pemenuhan kewajiban fasos fasum, hasil pemenuhan kewajiban Kompensasi Pelampauan Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB), hasil kerjasama daerah, dan hasil pemenuhan kewajiban lainnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Perolehan Aset Lainnya yang Sah-LO diakui pada saat terbitnya dokumen penetapan berupa Surat Keputusan Gubernur dan/atau Berita Acara Serah Terima (BAST). Sedangkan nilainya diukur berdasarkan nilai yang tercantum pada dokumen penetapan dimaksud.

Perolehan Aset Lainnya yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp6.594.629.443.269,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp6.594.629.443.269,00 atau 100%.

t. Pendapatan Lain-lain-LO

Pendapatan Lain-lain-LO yaitu Pendapatan Selisih Pengakuan Aset Tetap dan Penyelesaian Piutang KDB/KLB. Pendapatan Lain-lain-LO diakui pada saat terbitnya dokumen Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dan BAST.



Sedangkan nilainya diukur berdasarkan selisih antara nilai yang tercantum pada dokumen PPK dan BAST.

Pendapatan Lain-lain-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp189.974.102,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp189.974.102,00 atau 100%.

5.3.1.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Transfer (LO) merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan. Realisasi Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp23.778.953.501.314,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp21.005.534.969.769,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp2.773.418.531.545,00 atau 13,20%. Rekapitulasi Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.28

Rekapitulasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	20.669.456.449.952	18.206.765.299.557	2.462.691.150.395	13,53
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	22.179.718.000	0	22.179.718.000	0
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	3.076.020.400	34.127.101.188	(31.051.080.788)	(90,99)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	3.049.066.285.962	2.734.958.336.024	314.107.949.938	11,48
5	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	0	29.684.233.000	-29.684.233.000	(100,00)
6	Insentif Fiskal - LO	35.175.027.000	0	35.175.027.000	0
Jumlah		23.778.953.501.314	21.005.534.969.769	2.773.418.531.545	13,20

Rincian Pendapatan Transfer-LO terdiri dari sebagai berikut:

5.3.1.1.2.1 Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Realisasi DBH-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp20.669.456.449.952,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp18.206.765.299.557,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp2.462.691.150.395,00 atau 13,53%. DBH-LO tahun 2023 terdiri dari penetapan pendapatan transfer, penambahan alokasi, penetapan kurang bayar, dan penetapan lebih bayar, dengan penjelasan sebagai berikut:



- a. penetapan pendapatan transfer dana bagi hasil tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 sebesar Rp15.307.479.799.000,00;
- b. terdapat Penambahan alokasi dana bagi hasil berdasarkan PMK 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp2.815.159.810.000,00;
- c. penetapan kurang bayar dana bagi hasil tahun 2023 berdasarkan PMK 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023, yang belum diakui sebagai Pendapatan Transfer-LO tahun 2022 sebesar Rp2.547.354.256.204,00;
- d. pengurangan atas lebih bayar Pendapatan Transfer-LO tahun 2022 sebesar Rp537.415.252,00 berdasarkan PMK 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023.

5.3.1.1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Penetapan DAU tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.179.718.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp0,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp22.179.718.000,00 atau 100%.

5.3.1.1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

DAK Fisik-LO tahun 2023 berdasarkan ketentuan PMK 215/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Fisik, realisasi penyaluran sesuai nilai kontrak kegiatan DAK Fisik yaitu sebesar Rp3.076.020.400,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp34.127.101.188,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp31.051.080.788,00 atau 90,99%.

5.3.1.1.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

DAK Non Fisik-LO tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 sebesar Rp3.049.066.285.962,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp2.734.958.336.024,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp314.107.949.938,00 atau 11,48%. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO terdiri dari:

- a. realisasi DAK Non Fisik tahun 2023 sebesar Rp3.049.235.325.962,00; dan
- b. pengembalian DAK Non Fisik-BOS Reguler ke RKUN berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat sebesar Rp169.040.000,00.



5.3.1.1.2.5 Dana Insentif Daerah (DID)-LO

DID-LO tahun 2023 tercatat sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp29.684.233.000,00, maka mengalami penurunan sebesar Rp29.684.233.000,00 atau 100%.

5.3.1.1.2.6 Insentif Fiskal-LO

Penetapan Insentif Fiskal tahun 2023 berdasarkan KMK Nomor 271 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, KMK Nomor 336 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Kedua Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, dan KMK Nomor 350 Tahun tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan total sebesar Rp35.175.027.000,00.

5.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah-LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diakui pada saat hak diterima atau terealisasi berdasarkan dokumen penetapan pendapatan-LO terkait. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diukur berdasarkan pada nilai yang tercantum pada dokumen pendapatan-LO terkait.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp3.584.721.532.629,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2022 adalah sebesar Rp117.982.425.171.075,00, sehingga terdapat penurunan sebesar 96,96%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2023 terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk Pembangunan MRT dan Pendapatan Hibah dari Jasa Raharja kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dengan total nilai sebesar Rp1.747.475.819.390,00;
- b. Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Tanah, Peralatan dan Mesin, dan Gedung dan Bangunan dengan total nilai Rp1.339.901.503.462,00 kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD);
- c. Pendapatan Hibah dari Kementerian Kesehatan dalam bentuk Persediaan kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp399.517.253.769,00;
- d. Pendapatan Hibah dari Kementerian Kesehatan berbentuk Reagen sebesar Rp31.915.217.173,00 kepada Laboratorium Kesehatan Daerah;



- e. Pendapatan Hibah dari BKKBN berbentuk Alat Kontrasepsi dan Non Alat Kontrasepsi sebesar Rp14.153.395.335,00 kepada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- f. Pendapatan Hibah dari Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp8.279.522.000,00; dan
- g. Hibah Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bentuk alat lab pertanian senilai Rp1.155.000.000,00 kepada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.
- h. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO lainnya sebesar Rp42.323.821.500,00.

5.3.1.2 Beban Daerah

Beban Daerah tahun 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa sehubungan dengan berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset saat adanya pengeluaran kas maupun konsumsi aset non kas, dan timbulnya kewajiban saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Nilai beban dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen tagihan pihak ketiga atau dokumen sumber seperti *listing* pegawai, nota perjanjian, Surat Keputusan dan dokumen lainnya yang direkonsiliasi dengan Utang, reklasifikasi, kapitalisasi Belanja, Beban Dibayar di Muka, dan akun lainnya.

Beban tahun 2023 sebesar Rp68.605.049.742.327,00 terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp61.040.642.496.716,00, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp7.207.960.765.111,00, dan Beban Transfer sebesar Rp356.446.480.500,00.

Rincian Beban tahun 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut.



Tabel 5.29
Rekapitulasi Beban Daerah
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Operasi		61.040.642.496.716	57.841.246.519.521	3.199.395.977.195	5,53
1	Beban Pegawai	17.978.251.780.755	17.737.442.650.078	240.809.130.677	1,36
2	Beban Barang	8.368.039.918.686	7.443.125.677.688	924.914.240.998	12,43
3	Beban Jasa	15.897.400.048.649	15.506.193.249.916	391.206.798.733	2,52
4	Beban Pemeliharaan	2.347.768.127.910	1.371.502.229.140	976.265.898.770	71,18
5	Beban Perjalanan Dinas	144.239.199.856	129.352.797.885	14.886.401.971	11,51
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	179.286.179.744	105.016.438.189	74.269.741.555	70,72
7	Beban Bunga	229.413.542.369	273.264.992.536	(43.851.450.167)	(16,05)
8	Beban Subsidi	5.482.558.366.839	6.108.748.040.172	(626.189.673.333)	(10,25)
9	Beban Hibah	3.623.927.568.369	2.453.481.993.510	1.170.445.574.859	47,71
10	Beban Bantuan Sosial	4.300.981.697.194	4.842.998.268.395	(542.016.571.201)	(11,19)
11	Beban Penyisihan Piutang	1.018.310.129.789	1.005.397.111.523	12.913.018.266	1,28
12	Beban Lain-lain	1.470.465.936.556	864.723.070.489	605.742.866.067	70,05
Beban Penyusutan dan Amortisasi		7.207.960.765.111	6.901.334.391.937	306.626.373.174	4,44
1	Beban Penyusutan	7.093.345.755.464	6.829.029.934.099	264.315.821.365	3,87
2	Beban Amortisasi	114.615.009.647	72.304.457.838	42.310.551.809	58,52
Beban Transfer		356.446.480.500	484.762.660.210	(128.316.179.710)	(26,47)
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	356.446.480.500	484.762.660.210	(128.316.179.710)	(26,47)
Jumlah Beban		68.605.049.742.327	65.227.343.571.668	3.377.706.170.659	5,18

5.3.1.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi disajikan berdasarkan perhitungan belanja-belanja operasi pada tahun 2023 yang direkonsiliasi dengan nilai utang per 31 Desember 2023 dan 2022, Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022, koreksi lebih/kurang catat utang tahun 2022, reklasifikasi Belanja Modal dan Aset Tetap ke Beban Operasi, kapitalisasi belanja ke Aset Tetap dan akun-akun terkait lainnya.

Beban Operasi tahun 2023 sebesar Rp61.040.642.496.716,00 terdiri dari beban berikut ini.

5.3.1.2.1.a Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2023 sebesar Rp17.978.251.780.755,00 disajikan berdasarkan pengeluaran Belanja Pegawai yang di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai tahun 2023 yang diperhitungkan dengan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022. Apabila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2022 sebesar Rp17.737.442.650.078,00, terjadi kenaikan sebesar Rp240.809.130.677,00 atau 1,36%.

Beban Pegawai tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.



No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Pegawai - Non BLUD	17.741.803.659.345
	Beban Gaji dan Tunjangan	5.306.808.711.680
	Beban Non Gaji dan Tunjangan	12.434.994.947.665
2	Beban Pegawai – BLUD	236.448.121.410
	Jumlah	17.978.251.780.755

Beban Pegawai tahun 2023 di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.213.071.427.368,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp1.961.622.430.072,00, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp846.402.527.818,00, Satpol PP sebesar Rp762.246.224.484,00, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp693.873.851.662,00.

5.3.1.2.1.b **Beban Barang**

Beban Barang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yakni pengeluaran kas terhadap pihak lain dan penggunaan barang-barang yang bukan merupakan Aset Tetap selama tahun 2023. Beban Barang tahun 2023 sebesar Rp8.368.039.918.686,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Barang tahun 2022 sebesar Rp7.443.125.677.688,00, terjadi kenaikan sebesar Rp924.914.240.998,00 atau 12,43%. Beban Barang tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban barang di SKPD	5.820.303.814.983
2	Beban barang di BLUD	2.547.736.103.703
	Total	8.368.039.918.686

Beban barang di SKPD sebesar Rp5.820.303.814.983,00 tersebut terdiri atas beban persediaan dan beban non-persediaan yang masing-masing nilainya sebesar Rp4.010.585.786.013,00 dan Rp1.809.718.028.970,00. Nilai beban persediaan dicatat sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan telah memperhitungkan persediaan awal tahun 2023, pembelian atau perolehan persediaan selama tahun 2023, persediaan akhir per 31 Desember 2023, belanja barang dibayar di muka dan transaksi-transaksi penambahan/pengurangan persediaan lainnya. Atas beban persediaan sebesar Rp4.010.585.786.013,00 tersebut, terdapat beban persediaan yang terjadi karena persediaan usang sebesar Rp172.060.690,00.

Beban Barang sebesar Rp8.368.039.918.686,00 di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp624.101.429.223,00, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp397.160.574.640,00, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp394.874.938.189,00, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp348.848.711.949,00, dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebesar Rp 303.993.538.603,00.



5.3.1.2.1.c Beban Jasa

Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp15.897.400.048.649,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Jasa tahun 2022 sebesar Rp15.506.193.249.916,00, terjadi kenaikan sebesar Rp391.206.798.733,00 atau 2,52%. Beban Jasa tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	12.324.596.781.707
2	Beban Jasa Iuran Jaminan/Asuransi	2.301.027.623.187
3	Beban Jasa Sewa Aset Tetap	546.688.556.150
4	Beban Jasa Konsultasi	633.474.625.591
5	Beban Jasa Pendidikan dan Pelatihan	88.610.227.014
6	Beban Jasa Insentif ASN	3.002.235.000
Jumlah		15.897.400.048.649

Beban jasa di antaranya terdapat pada Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta sebesar Rp2.249.068.913.477,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp1.069.683.664.998,00, Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp485.178.662.680,00, Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp290.217.295.555,00, dan Dinas Bina Marga sebesar Rp284.135.153.747,00.

5.3.1.2.1.d Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp2.347.768.127.910,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp1.371.502.229.140,00, terjadi kenaikan sebesar Rp976.265.898.770,00 atau 71,18%. Beban Pemeliharaan tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	2.186.759.761
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	926.321.998.996
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	953.390.427.534
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	445.191.341.234
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	16.819.462.385
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	3.858.138.000
Jumlah		2.347.768.127.910

Beban pemeliharaan tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp179.958.810.315,00, Unit Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp110.546.955.183,00, Sudin Pendidikan I – Jakarta Timur sebesar Rp104.746.656.122,00, Sudin Pendidikan II – Jakarta Timur sebesar Rp91.111.557.464,00, dan Sudin Pendidikan I – Jakarta Selatan sebesar Rp80.717.563.917,00.

Nilai Beban Pemeliharaan tahun 2023 di antaranya termasuk belanja modal tahun 2023 yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp59.312.178.146,00.



5.3.1.2.1.e **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp144.239.199.856,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 sebesar Rp129.352.797.885,00, terjadi kenaikan sebesar Rp14.886.401.971,00 atau 11,51%. Beban perjalanan dinas terdiri dari beban perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas luar negeri. Beban Perjalanan Dinas tersebut di antaranya terdapat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp56.845.881.315,00, Biro Kerjasama Daerah sebesar Rp50.478.370.962,00, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp7.661.172.706,00, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp5.928.811.412,00, dan Inspektorat sebesar Rp5.312.380.000,00.

5.3.1.2.1.f **Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2023 sebesar Rp179.286.179.744,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2022 sebesar Rp105.016.438.189,00, terjadi kenaikan sebesar Rp74.269.741.555,00 atau 70,72%. Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdapat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp79.260.000.000,00, Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp58.343.932.050,00, Suku Dinas Kebudayaan Kota – Jakarta Barat sebesar Rp4.380.292.050,00, Sudin Pemuda dan Olah Raga – Jakarta Timur sebesar Rp4.124.672.325,00, dan Suku Dinas Kebudayaan Kota – Jakarta Selatan sebesar Rp4.003.315.100,00.

Pada Beban Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat di SKPD tersebut di atas, di antaranya merupakan pembayaran untuk sosialisasi peraturan ke masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

5.3.1.2.1.g **Beban Bunga**

Beban Bunga tahun 2023 sebesar Rp229.413.542.369,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Bunga tahun 2022 sebesar Rp273.264.992.536,00, terjadi penurunan sebesar Rp43.851.450.167,00 atau 16,05%. Beban Bunga tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Bunga Proyek JEDI	32.973.543.205
2	Beban Bunga Proyek MRT	26.412.410.575
3	Beban Bunga Program PEN	170.027.588.589
	Jumlah	229.413.542.369



a. Beban Bunga Proyek JEDI

Beban Bunga Proyek JEDI sebesar Rp32.973.543.205,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek JEDI sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor SLA-1247/DSMI/2012. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

b. Beban Bunga Proyek MRT

Beban Bunga Proyek MRT sebesar Rp26.412.410.575,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek MRT sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor 1263/DSMI/2016. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembangunan proyek MRT *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan *Phase II* (Jakarta Kota – Bundaran HI).

c. Beban Bunga Program PEN

Beban Bunga Program PEN sebesar Rp170.027.588.589,00 merupakan beban bunga yang timbul atas pinjaman dalam rangka mendukung program PEN Provinsi DKI Jakarta. Pinjaman tersebut diberikan antara lain untuk pembangunan fasilitas RDF *Plant* dan fasilitas *Landfill Mining* TPST Bantargebang.

5.3.1.2.1.h Beban Subsidi

Beban Subsidi tahun 2023 sebesar Rp5.482.558.366.839,00. Nilai tersebut telah direkonsiliasi dengan utang belanja subsidi tahun 2023 dan 2022. Apabila dibandingkan dengan Beban Subsidi tahun 2022 sebesar Rp6.108.748.040.172,00, terjadi penurunan sebesar Rp626.189.673.333,00 atau 10,25%. Beban Subsidi tahun 2023 yang diberikan kepada BUMD dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	PT Transjakarta	3.246.133.778.465
2	Perumda Dharma Jaya	603.944.387.172
3	PT Food Tjipinang Station	437.281.962.558
4	PT MRT Jakarta	743.280.886.218
5	PT LRT Jakarta	451.917.352.426
Jumlah		5.482.558.366.839

5.3.1.2.1.i Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp3.623.927.568.369,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2022 sebesar Rp2.453.481.993.510,00,



terjadi kenaikan sebesar Rp1.170.445.574.859,00 atau 47,71%. Beban Hibah tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	1.655.555.459.501
2	Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat	1.236.101.669.559
3	Beban Hibah Dana BOS ke SD/SDLB Swasta	296.107.704.223
4	Beban Hibah Dana BOS ke SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Swasta	371.183.984.211
5	Beban Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	18.646.313.868
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	40.882.717.500
7	Beban Hibah aset yang diserahkan ke pihak lain di luar Pemprov DKI Jakarta	5.449.719.507
Jumlah		3.623.927.568.369

Beban Hibah tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.545.526.565.550,00, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp1.166.243.795.238,00, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp419.721.275.175,00, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp241.866.275.445,00, dan Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas sebesar Rp75.472.594.318,00.

5.3.1.2.1.j **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp4.300.981.697.194,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp4.842.998.268.395,00, terjadi penurunan sebesar Rp542.016.571.201,00 atau 11,19%. Beban Bantuan Sosial tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	17.458.412.775
2	Bantuan Sosial Kepada Individu	4.283.523.284.419
Jumlah		4.300.981.697.194

Beban Bantuan Sosial tahun 2023 tidak termasuk dengan belanja bantuan sosial yang belum disalurkan kepada penerima di tahun berjalan dan yang akan disalurkan di tahun 2024. Pencatatan belanja bantuan sosial tersebut disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya.

Bantuan Sosial yang diberikan antara lain Bantuan Sosial Kepada Individu berupa uang yang diberikan untuk biaya personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar



(KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS), beasiswa pendidikan untuk anak tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19, serta pemenuhan kebutuhan dasar untuk penyandang disabilitas dan lansia.

5.3.1.2.1.k **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan risiko ketidaktertagihan piutang. Penentuan tingkat risiko ketidaktertagihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang penelitiannya dilakukan berdasarkan umur piutang pada tanggal laporan keuangan.

Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp1.018.310.129.789,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp1.005.397.111.523,00, terjadi kenaikan sebesar Rp12.913.018.266,00 atau 1,28%. Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	721.487.503.570
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	3.197.961.574
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	187.149.144.903
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	106.475.519.742
Jumlah		1.018.310.129.789

5.3.1.2.1.l **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain tahun 2023 sebesar Rp1.470.465.936.556,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Lain-lain tahun 2022 sebesar Rp864.723.070.489,00, terjadi kenaikan sebesar Rp605.742.866.067,00 atau 70,05%. Beban Lain-lain tahun 2023 sebagian besar terdiri atas beban kerugian penghapusan Aset Tetap (selain diperhitungkan surplus defisit) sebesar Rp30.922.138.525,00 yang terdapat pada Pejabat Pengelolaan Aset Daerah dan beban penurunan nilai investasi sebesar Rp1.439.543.798.031,00 atas pengumuman rugi BUMD dan PT patungan tahun 2023 dengan metode pencatatan ekuitas dan kejadian lain yang mengurangi ekuitas dalam laporan keuangan *unaudited investee* dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama	Rugi Tahun 2023 (Rp)	Pengakuan Beban atas Kejadian selain Pengumuman Rugi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	PD AM Jaya		24.275.835.475	24.275.835.475
2	PD Dharma Jaya		361.432.629	361.432.629
3	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	98.486.101.866	14.480.102.275	112.966.204.141
4	PD Pasar Jaya		14.766.184.475	14.766.184.475
5	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)		2.263.454.448	2.263.454.448
6	PT Food Station Tjipinang	-	27.182.498.369	27.182.498.369



No.	Nama	Rugi Tahun 2023 (Rp)	Pengakuan Beban atas Kejadian selain Pengumuman Rugi (Rp)	Jumlah (Rp)
7	PT Delta Djakarta Tbk (Konsolidasi)		1.512.003.683	1.512.003.683
8	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Konsolidasi)	-	63.056.880.066	63.056.880.066
9	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	415.715.547.530	48.585.285	415.764.132.815
10	PT Bank DKI Jakarta	-	1.894.572.471	1.894.572.471
11	PT Jakarta Tourisindo	104.843.493.681	-	104.843.493.681
12	PT Mass Rapid Transit Jakarta		2.345.099.145	2.345.099.145
13	PT Transportasi Jakarta	-	668.033.940.441	668.033.940.441
14	PT Penjamin Kredit Daerah		278.066.192	278.066.192
	Jumlah	619.045.143.077	820.498.654.954	1.439.543.798.031

5.3.1.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Beban Amortisasi adalah alokasi nilai Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp7.207.960.765.111,00 terdiri dari beban berikut ini.

a. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp7.093.345.755.464,00. Apabila dibandingkan dengan Beban Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp6.829.029.934.099,00, terjadi kenaikan sebesar Rp264.315.821.365,00 atau 3,87%. Beban Penyusutan tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	2.176.950.901.662
2	Gedung dan Bangunan	1.830.307.942.892
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.938.834.751.080
4	Aset Tetap Lainnya	3.552.176.619
5	Aset Lainnya	143.699.983.211
	Jumlah	7.093.345.755.464

Beban Penyusutan tahun 2023 di antaranya terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp1.540.247.724.974,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp451.528.030.951,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp413.087.412.117,00, Sudin Bina Marga – Jakbar sebesar Rp168.559.867.341,00, dan Suku Dinas Sumber Daya Air - Jakpus sebesar Rp140.619.983.342,00.



b. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp114.615.009.647,00 yang merupakan amortisasi atas aset tidak berwujud antara lain Lisensi *Oracle* dan *Operating System Windows*. Apabila dibandingkan dengan Beban Amortisasi tahun 2022 sebesar Rp72.304.457.838,00, terjadi kenaikan sebesar Rp42.310.551.809,00 atau 58,52%.

Beban Amortisasi antara lain terdapat pada Unit Pengelola Jakarta Smart City sebesar Rp92.462.638.130,00, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp7.240.291.359,00, Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp5.080.919.734,00, Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp4.665.129.922,00, dan Pusat Data dan Informasi Keuangan sebesar Rp1.494.268.607,00.

5.3.1.2.3 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Belanja Transfer.

Beban Transfer tahun 2023 sebesar Rp356.446.480.500,00 merupakan Bantuan Keuangan Khusus Antar Daerah Kabupaten/Kota. Apabila dibandingkan dengan Beban Transfer tahun 2022 sebesar Rp484.762.660.210,00, terjadi penurunan sebesar Rp128.316.179.710,00 atau 26,47%.

5.3.2 Kegiatan Non Operasional

Kelompok kegiatan non operasional terdiri dari Surplus Non Operasional dan Beban Non Operasional yang dihasilkan dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode tahun 2023, surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp3.722.940.118,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai Surplus Non Operasional dan Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

5.3.2.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional merupakan surplus yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, di mana nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih besar daripada nilai bukunya.

Selama periode tahun 2023, surplus dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.722.940.118,00, merupakan Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp1.435.586.998,00 dan penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp2.287.353.120,00.



Sedangkan Surplus Non Operasional tahun 2022 sebesar Rp17.172.952.663,00, merupakan Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp6.637.610.808,00 dan penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp10.535.341.855,00.

5.3.3 Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa pada tahun 2023 tercatat sebesar (Rp3.025.742.350,00), sedangkan tahun 2022 tercatat sebesar Rp0,00.

Saldo Pos Luar Biasa tahun 2023 sebesar (Rp3.025.742.350,00) merupakan perhitungan atas Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0,00 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp3.025.742.350,00.

Beban Luar Biasa tahun 2023 sebesar Rp3.025.742.350,00 tersebut merupakan pengakuan beban atas penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mengacu pada Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebanyak 70 (Tujuh Puluh) Register.

5.3.4 Surplus – LO

Surplus - LO tahun 2023 adalah sebesar Rp35.264.777.802.049,00. Perhitungan Surplus – LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan – LO	103.869.130.346.608	
Beban	(68.605.049.742.327)	
Surplus Kegiatan Operasional		35.264.080.604.281
Surplus Kegiatan Non Operasional		3.722.940.118
Pos Luar Biasa		(3.025.742.350)
Surplus – LO		35.264.777.802.049

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus/defisit-LO, dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya selama periode tahun 2023. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 adalah sebesar Rp698.072.284.621.375,00

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah Rp665.549.886.851.294,00.



5.4.2 Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023 adalah sebesar (Rp2.742.380.031.968,00), yang terdiri dari:

5.4.2.a Koreksi Penyajian Piutang

Koreksi Ekuitas atas Penyajian Piutang adalah sebesar Rp78.718.584.165,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Koreksi Kurang Catat Piutang	87.964.384.976
2	Koreksi Lebih Catat Piutang	(9.245.800.811)
Jumlah		78.718.584.165

- 1) Koreksi Kurang Catat Piutang sebesar Rp87.964.384.976,00 di antaranya terdapat pada:
 - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp87.336.624.113,00 merupakan koreksi atas piutang BPJS yang disebabkan Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) Piutang BPJS atas pelayanan sebelum tahun 2023 baru dicatat pada tahun 2023 yang di antaranya terdapat pada RSUD Tarakan sebesar Rp72.873.941.691,00, RSUD Adhyaksa sebesar Rp2.665.017.017,00, RSUD Pesanggrahan sebesar Rp2.062.155.560,00, RSUD Tugu Koja sebesar Rp1.989.191.054,00, dan RSUD Kramat Jati sebesar Rp1.720.225.619,00; dan
 - b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp511.187.187,00 yang terdiri dari koreksi kurang catat Piutang Retribusi sebesar Rp53.544.588,00 atas dikarenakan terdapat wajib retribusi yang melakukan pembayaran atas permohonan pelayanan sebelum tahun 2023 dengan didasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang terbit sebelum tahun 2023 dan koreksi kurang catat Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp457.642.599,00 merupakan denda progresif atas Piutang Retribusi sebelum tahun 2023.
- 2) Koreksi Lebih Catat Piutang sebesar (Rp9.245.800.811,00), di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
 - a) Dinas Kesehatan sebesar (Rp3.149.371.845,00) merupakan koreksi pengurangan atas piutang BPJS yang disebabkan terdapat koreksi BAHV atas pelayanan sebelum tahun 2023 yang baru dicatat pada tahun 2023 yang di antaranya terdapat pada RSUD Tarakan sebesar (Rp1.247.365.860,00), RSUD Tugu Koja sebesar (Rp997.757.900,00), dan RSUD Mampang Prapatan sebesar (Rp783.965.500,00);



- b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar (Rp4.153.481.831,00) yang terdiri dari koreksi lebih catat Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar (Rp1.427.384.932,00) dikarenakan terdapat pembatalan permohonan pelayanan atas Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebelum tahun 2023 dan koreksi lebih catat Piutang Pendapatan Hibah sebesar (Rp2.726.096.899,00) berupa pembatalan permohonan pengajuan perpanjangan pelayanan Hak Guna Bangunan (HGB); dan
- c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar (Rp1.778.208.327,00) yang terdiri dari koreksi lebih catat Piutang Retribusi sebesar (Rp966.047.000,00) dan koreksi lebih catat Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar (Rp812.161.327,00).

5.4.2.b Koreksi Penyajian Penyisihan Piutang

Koreksi Ekuitas atas Penyajian Penyisihan Piutang adalah sebesar Rp94.027.206.176,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang	2.852.482.859
2	Penyisihan atas Piutang yang terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang	91.408.659.621
3	Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang	(233.936.304)
Jumlah		94.027.206.176

- 1) Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang sebesar Rp2.852.482.859,00 di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
 - a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.776.738.327,00 yang terdiri dari koreksi lebih catat Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp964.577.000,00 dan koreksi lebih catat Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp812.161.327,00;
 - b) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp169.119.635,00 yang merupakan koreksi lebih catat Penyisihan Piutang dan denda atas Piutang Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp22.976.250,00 yang merupakan koreksi lebih catat Penyisihan Piutang atas Penyisihan Piutang Retribusi.
- 2) Penyisihan atas Piutang yang Terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang sebesar Rp91.408.659.621,00 di antaranya terdapat pada SKPD berikut:



- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp83.313.902.066,00 yaitu atas pembatalan Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB yang telah dibayar; dan
 - b) Dinas Perhubungan sebesar Rp5.120.502.189,00 yaitu koreksi lebih catat atas Penyisihan Piutang yang terbayar/pembatalan Penyisihan Piutang Retribusi.
- 3) Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang sebesar (Rp233.936.304,00) di antaranya terdapat pada SKPD berikut:
- a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar (Rp215.397.321,00) merupakan koreksi kurang catat Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - b) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar (Rp10.958.768,00) yang merupakan koreksi kurang catat Penyisihan Piutang Retribusi; dan
 - c) Dinas Kesehatan sebesar (Rp6.987.265,00) yang di antaranya terdapat pada RSUD Kalideres sebesar (Rp2.683.718,00), RSUD Tanjung Priok sebesar (Rp2.515.574,00), dan RSUD Pademangan sebesar (Rp1.709.373,00).

5.4.2.c Koreksi Penyajian Persediaan

Koreksi Ekuitas pada Penyajian Persediaan yaitu sebesar Rp104.112.303.551,00 yang di antaranya terdapat pada SKPD berikut:

- 1) Koreksi Kurang Catat Persediaan Awal sebesar Rp244.910.165.355,00 yang di antaranya terdapat pada:
 - a) Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur sebesar Rp191.923.143.277,00;
 - b) Dinas Pendidikan sebesar Rp38.524.295.314,00;
 - c) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp13.146.505.557,00; dan
 - d) Dinas Sosial sebesar Rp10.313.685.797,00.
- 2) Lebih Catat Persediaan Awal sebesar Rp140.797.861.804,00 yang di antaranya terdapat pada:
 - a) Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur sebesar Rp122.775.348.298,00;
 - b) Suku Dinas Pendidikan II Jakarta Timur sebesar Rp11.427.129.104,00; dan
 - c) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp2.361.859.047,00.

5.4.2.d Koreksi Penyajian investasi

Koreksi Ekuitas Penyajian Investasi yaitu sebesar Rp190.589.666,00 yang merupakan koreksi atas penyajian Investasi Non Permanen terkait pembatalan atas penyisihan Piutang Dana Bergulir yang telah terbayar di tahun 2023.



5.4.2.e Koreksi Penyajian Saldo Awal Aset Tetap dan Aset Lainnya

Koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar (Rp2.960.315.473.964,00) dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Kurang Catat Saldo Awal Aset Tetap dan Lain-lain	4.631.337.043.340
2	Lebih Catat Saldo Awal Aset Tetap dan Lain-lain	(7.178.722.066.201)
3	Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2023 atas Temuan	(181.251.961)
4	Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Sebelum Tahun 2023	(35.673.601.172)
5	Koreksi Reklasifikasi Ekstrakomptabel menjadi Aset Tetap	7.336.000
6	Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomptabel	(377.082.933.970)
Jumlah		(2.960.315.473.964)

- 1) Kurang catat saldo awal Aset Tetap dan Aset Lain-lain sebesar Rp4.631.337.043.340,00 merupakan Aset Tetap dan Aset Lain-lain yang tahun perolehannya sebelum tahun 2023 namun baru dilakukan pencatatan pada tahun 2023 sebagaimana dijelaskan pada CaLK bagian Aset Tetap dan aset lainnya. Aset-aset tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Nama Akun	CaLK	Nilai (Rp)
Tanah	5.5.1.4.1.a.5)	2.890.994.376.970
Peralatan dan Mesin	5.5.1.4.2.a.8)	4.495.575.637
Gedung dan Bangunan	5.5.1.4.3.a.8)	185.950.763.293
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.1.4.4.a.7)	918.581.575
Aset Tetap - Rusak Berat	5.5.1.5.4.1.a.2)	269.952.530
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.3.a.2)	20.344.117.084
Aset Tetap Fasos Fasum	5.5.1.5.4.4.1.a.3) 5.5.1.5.4.4.2.a.3) 5.5.1.5.4.4.3.a.3) 5.5.1.5.4.4.4.a.3) 5.5.1.5.4.4.5.a.2)	1.456.936.276.240
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.5.1.5.2.5.a.1)	1.608.500.011
Properti Investasi	5.5.1.3.a.2)	69.818.900.000
Jumlah		4.631.337.043.340

- 2) Lebih catat saldo awal Aset Tetap dan Aset Lain-lain sebesar (Rp7.178.722.066.201,00 merupakan kelebihan pencatatan aset yang disebabkan karena aset tercatat ganda, penghapusan yang SK Penghapusan diterbitkan tahun sebelumnya, dan koreksi kelebihan nilai aset sebagaimana dijelaskan dalam CaLK bagian Aset Tetap dan Aset Lain-lain. Koreksi lebih catat Aset Tetap dan Aset Lain-lain dapat dirinci sebagai berikut.

Nama Akun	CaLK	Nilai (Rp)
Tanah	5.5.1.4.1.b.4)	5.638.001.560.548
Peralatan dan Mesin	5.5.1.4.2.b.6)	928.876.206
Gedung dan Bangunan	5.5.1.4.3.b.7)	36.256.613.228
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.1.4.4.b.5)	111.923.465



Nama Akun	CaLK	Nilai (Rp)
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.4.5.b.5)	518.717.442
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.3.b.4)	20.400.000
Aset Tetap – Rusak Berat	5.5.1.5.4.1.b.3)	23.046.400
Aset Tetap – Fasos Fasum	5.5.1.5.4.4.1.b.7) 5.5.1.5.4.4.4.b.5)	1.242.227.063.423
Tuntutan Ganti Rugi Yang Belum Ditetapkan Statusnya	5.5.1.5.4.7	260.633.865.489
Jumlah		7.178.722.066.201

- 3) Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2023 atas Temuan sebesar Rp181.251.961,00 merupakan pengurangan nilai Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2023 sebagai dampak dari hasil pemeriksaan terdapat pada aset Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- 4) Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Sebelum Tahun 2023 sebesar Rp35.673.601.172,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Nama Akun	Nilai (Rp)
Peralatan dan Mesin	80.555.410
Gedung dan Bangunan	12.552.080.998
Aset Tetap – Rusak Berat	23.040.964.764
Jumlah	35.673.601.172

- 5) Koreksi Reklasifikasi Ekstrakomptabel menjadi Aset Tetap sebesar Rp7.336.000,00 merupakan reklasifikasi daftar aset ekstrakomptabel menjadi Aset Tetap yang terdapat pada RSUD Jagakarsa dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Timur.
- 6) Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomptabel sebesar Rp377.082.933.970,00 merupakan aset yang sebelumnya berada di Aset Tetap dan aset lainnya menjadi ke ekstrakomptabel dengan rincian sebagai berikut.

Nama Akun	CaLK	Nilai (Rp)
Peralatan dan Mesin	5.5.1.4.2.b.5).a)	338.024.183.498
Gedung dan Bangunan	5.5.1.4.3.b.6).a)	307.647.153
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.1.4.4.b.4)	89.065.927
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.4.5.b.4)	14.814.797.120
Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.5.1.5.3.b.3)	23.178.420.992
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	5.5.1.5.4.2	668.819.280
Jumlah		377.082.933.970

5.4.2.f Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya

Koreksi Penyajian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar (Rp311.042.566.786,00) dapat dirinci sebagai berikut.



No	Jenis Koreksi	Nilai (Rp)
1	Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi	330.827.807.015
2	Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi	(918.491.267.618)
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Aset Tetap dan Aset Lainnya atas Temuan	9.443.350
4	Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel	276.611.450.467
Jumlah		(311.042.566.786)

- 1) Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Rp330.827.807.015,00 merupakan koreksi lebih catat akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut.

Nama Akun	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	18.589.101.446
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	231.254.919.328
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	20.663.161.085
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	125.233.944
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (<i>Build, Transfer and Operate/BTO</i>)	2
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampaikan	96.281.666
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	1.233.909.547
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	82.000.004
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	11.908.477.514
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	46.073.073.604
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	57
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	801.648.818
Jumlah	330.827.807.015

- 2) Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Rp918.491.267.618,00 merupakan koreksi kurang catat akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut.

Nama Akun	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	32.560.771.508
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	614.535.553.040
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	152.332.780.377
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	178.239.246
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	16.797.763.575
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampaikan	1.608.500.011
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	65.053.490.322
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	33.043.342.175
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	36
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	2.380.827.328
Jumlah	918.491.267.618



- 3) Koreksi Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Aset Tetap dan Aset Lainnya atas Temuan Rp9.443.350,00 merupakan koreksi lebih catat akumulasi penyusutan atas Aset Tetap dan/atau aset lainnya yang berasal dari pengadaan sebelum tahun 2023 berupa Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.
- 4) Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel Rp276.611.450.467,00 merupakan koreksi lebih catat akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut.

Nama Akun	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	259.617.943.141
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.996.457.032
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.540.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	203.393.121
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	6.792.117.173
Jumlah	276.611.450.467

5.4.2.g Koreksi Penyajian Kewajiban

Koreksi Ekuitas Penyajian Kewajiban sebesar Rp251.929.325.224,00 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Nama Akun	Nilai (Rp)
1	Utang Belanja Modal	839.605.643
2	Utang Belanja Pemeliharaan	(1.565.771.101)
3	Utang Belanja Barang Jasa	81.466.395
4	Utang Belanja Subsidi	252.881.916.846
5	Pendapatan Diterima di Muka	(36.192.807)
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	(272.104.752)
7	Koreksi Uang Titipan BLUD	405.000
	Jumlah	251.929.325.224

- 1) Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Belanja Modal sebesar Rp839.605.643,00 di antaranya terdapat pada:
 - a) Dinas Sumber Daya air sebesar Rp560.597.739,00 yang merupakan koreksi lebih catat atas utang belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - b) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp183.826.562,00 yang merupakan utang belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
- 2) Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Belanja Pemeliharaan sebesar (Rp1.565.771.101,00) yang terdapat pada:
 - a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan koreksi kurang catat Utang Belanja Pemeliharaan pada pekerjaan fisik pemeliharaan berkala rumah susun 3 (Muara Baru) sebesar (Rp1.083.521.686,00) dan pekerjaan fisik pemeliharaan berkala rumah susun 2 (Pinus Elok) sebesar (Rp928.189.815,00); dan



- b) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Timur sebesar Rp445.940.400,00 yang merupakan koreksi lebih catat Utang Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Susun Bekasi KM.2 Tahun 2019.
- 3) Koreksi Penyajian Kewajiban atas Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp81.466.395,00 di antaranya terdapat pada:
 - a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp93.840.725,00 yang merupakan koreksi kurang catat Utang Belanja barang dan jasa pada pekerjaan fisik pengawasan berkala rumah susun 3 (Muara Baru) sebesar Rp52.726.168,00 dan pekerjaan fisik pengawasan berkala rumah susun 2 (Pinus Elok) sebesar Rp41.114.557,00; dan
 - b) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp88.990.000,00 atas koreksi lebih catat utang belanja barang dan jasa yang merupakan utang atas jasa appraisal.
 - c) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kembangan – Jakbar sebesar Rp48.872.225,00 yang merupakan koreksi lebih catat utang belanja barang dan jasa BLUD.
- 4) Koreksi Penyajian Kewajiban atas Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp36.192.807,00 yang terdapat pada:
 - a) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar Rp20.872.000,00 yang merupakan Pendapatan Diterima di Muka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp10.094.807,00 yang merupakan Pendapatan Diterima di Muka BLUD; dan
 - c) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp5.226.000,00 yang terdiri dari pendapatan diterima di muka atas retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp1.761.000,00 dan retribusi pelayanan penguburan/pemakaman sebesar Rp3.465.000,00..
- 5) Koreksi Ekuitas atas Koreksi Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar (Rp272.104.752,00) yang merupakan koreksi kas atas utang kelebihan pembayaran denda retribusi daerah.
- 6) Koreksi Ekuitas atas Penyesuaian Lainnya sebesar Rp405.000,00 merupakan koreksi ekuitas atas Penerimaan Kas BLUD sebelum terbit Pergub Tarif BLUD yang terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan 63 Jakarta.



5.4.3 Surplus Laporan Operasional

Surplus Laporan Operasional per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp35.264.777.802.049,00 yang dijelaskan pada CaLK 5.3.4 Surplus-LO.

5.4.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 adalah Rp698.072.284.621.375,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Ekuitas Awal	665.549.886.851.294
2.	Koreksi Ekuitas	(2.742.380.031.968)
3.	Surplus Laporan Operasional	35.264.777.802.049
4.	Ekuitas Akhir (1+2+3)	698.072.284.621.375

5.5 Neraca

5.5.1 Aset

5.5.1.1 Aset Lancar

5.5.1.1.1 Kas

5.5.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh *item*. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.454.632.626.327,00 dan Rp6.030.074.927.473,00. Dalam rangka pengelolaan kas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyimpan dana dalam bentuk giro. Rincian dari saldo Kas di Kas Daerah tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.30

Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Nomor rekening	Peruntukan Rekening	Dasar Penetapan Rekening	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Bank DKI Cab. Utama Balaikota	108-02-01575-9	RKUD Prov DKI Jakarta	Kepgub No. 301 Tahun 2022	5.436.711.258.110	5.982.867.214.290
2	Bank DKI Cab. Utama Juanda	101.02.06015	Rekening Penampungan Jasa Giro dan	Kepgub No. 301 Tahun 2022	56.981	1.321.955



No	Nama Bank	Nomor rekening	Peruntukan Rekening	Dasar Penetapan Rekening	31 Desember 2023	31 Desember 2022
			Penerimaan Lainnya			
3	Bank Mandiri Cab. Wisma Alia	123.00981.57979	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	Kepgub No. 301 Tahun 2022	1.957.641	1.688.179.967
4	Bank BTN Cab. Harmoni	00014.01.30.0017 56.6	Rekening Penerimaan BPKD Provinsi DKI Jakarta	Kepgub No. 301 Tahun 2022	2.233.584	2.164.859.889
5	Bank DKI	108.16.17010.7	Rekening Penerimaan RTGS SIMPAD (Escrow)	PKS Addendum Pemprov DKI dengan PT Bank DKI No. 1387/-072	1.600.000	268.728.635
6	Bank DKI	108.16.17009.3	Rekening Penerimaan E-Channel SIMPAD (Escrow)	PKS Addendum Pemprov DKI dengan PT Bank DKI No. 1387/-072	1.016.683.842	35.174.997.060
7	Bank DKI	108.16.17095.6	Rekening Penerimaan RTGS Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank DKI No. 1336/-072	320.115.900	1.985.095.664
8	Bank DKI	108.16.17094.8	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank DKI No. 1336/-072	12.973.650.209	4.215.925.395
9	Bank BRI	0019-01-001755-30-2	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank DKI No. 2369/-1.722.4	0	62.460.038
10	Bank Mandiri	104-00-22062017	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank Mandiri No. 1345/-072	2.982.912.557	1.419.913.524
11	Bank BNI	6000686867	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT BNI No. 1339/-072	359.596.408	81.962.879
12	Bank Cimb Niaga	800034210900	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank CIMB Niaga No. 1342/-072	95.507.807	119.851.648
13	Bank Danamon	003600807519	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank Danamon Indonesia No. 1343/-072	1.600.473	0
14	Bank OCBC NISP	545800052213	Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)	PKS Pemprov DKI dengan PT Bank OCBC NISP No. 1347/-072	78.188.543	24.416.529
15	PT POS Indonesia		Rekening Penerimaan Pajak Daerah (Escrow)		87.264.272	0
		Jumlah			5.454.632.626.327	6.030.074.927.473

Saldo Kas di Kas Daerah di Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.454.632.626.327,00 termasuk setoran dalam perjalanan (*Deposit in Transit*) yang berasal dari Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - Dana Bagi Hasil



Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp64.831.000,00, di mana Pemerintah Pusat telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 29 Desember 2023 dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah 2 Januari 2024.

Pada saldo Kas di Kas Daerah di Neraca per 31 Desember 2023 terdapat pengembalian Dana BOS yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah selama tahun 2023 sebesar Rp10.139.816.381,00. Dana BOS tersebut akan dikembalikan ke Kas Negara setelah divalidasi oleh Inspektorat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Nilai yang telah divalidasi oleh Inspektorat pada tahun 2023 sebesar Rp169.040.000,00 dan yang belum divalidasi sebesar Rp9.970.776.381,00. Nilai yang telah divalidasi dicatat sebagai Utang Kelebihan Pembayaran Transfer.

5.5.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp109.645.250,00 dan Rp24.701.154,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang belum disetor dan asuransi yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan berupa kas tunai dan saldo pada rekening bank SKPD yang sampai dengan akhir periode 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian Rekening	Pendapatan yang Belum Disetor (Rp)	Asuransi yang belum disetor (Rp)	Total (Rp)
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	200.000	0	200.000
2.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	25.546.000	1.151.500	26.697.500
3.	Dinas Kebudayaan	82.347.750	0	82.347.750
4.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	400.000	0	400.000
	Jumlah	108.493.750	1.151.500	109.645.250

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp200.000,00 merupakan penerimaan hasil sewa BMD atas pembayaran sarana dan prasarana fasilitas rusun sewa- pembayaran listrik rusun sewa di Unit Pengelola Rumah Susun 6. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 pada Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan penerimaan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dengan rincian sebagai berikut.

No.	UKPD	Nilai (Rp)
1.	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara	12.194.000
2.	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur	1.600.000



No.	UKPD	Nilai (Rp)
3.	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat	2.836.000
4.	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan	3.316.000
5.	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat	5.600.000
	Total	25.546.000

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 pada Dinas Kebudayaan merupakan penerimaan retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dengan rincian sebagai berikut.

No.	UKPD	Nilai (Rp)
1.	Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	2.654.500
2.	Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	39.888.250
3.	Unit Pengelola Museum Seni	39.805.000
	Total	82.347.750

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp400.000,00 merupakan penerimaan retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang terdapat di Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata.

Asuransi yang belum disetor pada Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.151.500,00 merupakan asuransi pengunjung gelanggang remaja yang belum disetorkan kepada penyedia asuransi sampai dengan 31 Desember 2023, dan telah disetor pada tahun 2024.

5.5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp329.382.648,00 dan Rp3.275.220.034,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Sisa Belanja UP/GU	329.382.648	244.180.601
2	Sisa Belanja TU	0	1.102.651.076
3	Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	0	391.677.050
4	Kas Pengeluaran yang dibatasi Penggunaannya	0	1.536.711.307
	Jumlah	329.382.648	3.275.220.034

Rincian dan penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sisa Belanja UP/GU

Sisa Belanja UP/GU per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp329.382.648,00 dan Rp244.180.601,00. Sisa Belanja UP/GU per 31 Desember 2023 terdapat di Dinas Kebudayaan merupakan Sisa Belanja UP/GU yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 dan telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2024.



b. Sisa Belanja TU

Sisa Belanja TU per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.102.651.076,00.

c. Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor

Saldo Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp391.677.050,00.

d. Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.536.711.307,00.

5.5.1.1.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan Setara Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional BLUD meliputi Kas BLUD, Setara Kas BLUD, Potongan PFK di BLUD, Uang Muka Pelayanan dan lainnya.

Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.008.514.643.569,00 dan Rp2.490.726.625.269,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas Tunai	1.197.791.647	864.757.395
2	Kas di Bank	1.000.840.280.678	2.484.380.139.568
3	Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	123.669.297	117.310.520
4	Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	134.902.031	196.548.284
5	Uang Muka Pasien RSUD/K	375.151.361	594.485.630
6	Uang Jaminan Kerjasama	3.289.499.147	2.052.981.500
7	Uang Titipan	2.474.424.408	2.515.902.372
8	Uang Muka Jasa BLUD	78.925.000	4.500.000
	Jumlah	1.008.514.643.569	2.490.726.625.269

Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 terdapat pada unit sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Unit Pengelola Dana Perumahan	17.448.397.226	22.733.323.952
2	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	7.104.503.363	26.540.484.472
3	Unit Pengelola Perparkiran	11.665.718.611	18.523.596.638
4	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	681.842.881	1.429.355.871
5	BLUD di bawah koordinasi Dinas Kesehatan	812.428.462.579	2.406.360.891.143
6	BLUD di bawah koordinasi Dinas Pendidikan	1.181.862.044	787.422.100
7	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	1.029.808.571	946.681.951
8	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung	8.396.044.390	8.303.860.425
9	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	4.281.907.067	4.703.722.552
10	Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center	143.278.215.776	0



No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
11	Unit Pengelola Sampah Terpadu	420.513.813	0
12	Unit Pengelola Jakarta <i>Smart City</i>	597.367.248	397.286.165
	Jumlah	1.008.514.643.569	2.490.726.625.269

Rincian dan Penjelasan Kas dan Setara Kas BLUD tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kas Tunai dan Kas di Bank

Saldo Kas Tunai per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.197.791.647,00 dan Rp864.757.395,00, sedangkan saldo Kas di Bank per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.000.840.280.678,00 dan Rp2.484.380.139.568,00. Kas Tunai dan Kas di Bank milik BLUD tersebut pada akhir periode tahun 2023 tidak disetorkan ke kas daerah karena pengelolaannya bersifat khusus, dan untuk menjamin fleksibilitas pelaksanaan kegiatan operasional BLUD pada periode tahun berikutnya.

Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan neraca pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam rangka pemenuhan kebutuhan kas daerah pada tahun 2023, dikeluarkan Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyetoran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp543.788.672.562,00.

b. Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp123.669.297,00 dan Rp117.310.520,00 merupakan potongan pajak yang berasal dari dana operasional BLUD yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2023.

Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor tersebut telah dilakukan penyetoran pada tahun 2024.

c. Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp134.902.031,00 dan Rp196.548.284,00 adalah potongan iuran BPJS Kesehatan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:



1. BLUD Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo sebesar Rp24.133.257,00 untuk luran BPJS Ketenagakerjaan;
2. BLUD Puskesmas Kecamatan Ciracas sebesar Rp8.594.913,00 untuk luran BPJS Kesehatan dan sebesar Rp22.947.025,00 untuk luran BPJS Ketenagakerjaan; dan
3. BLUD RSUD Koja sebesar Rp79.226.836,00 untuk luran BPJS Kesehatan.

Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor tersebut telah dilakukan penyetoran pada tahun 2024.

d. Uang Muka Pasien RSUD/K

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD sebagai uang muka di awal sebelum dilakukan tindakan terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka.

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp375.151.361,00 dan Rp594.485.630,00. Rincian Saldo Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	BLUD RS Tarakan	259.097.149	159.939.536
2	BLUD RS Cengkareng	79.002.779	374.017.837
3	BLUD RS Koja	17.226.433	38.931.257
4	BLUD RS Pasar Minggu	10.625.000	8.105.000
5	BLUD RS Pasar Rebo	9.200.000	8.550.000
6	BLUD RS Budhi Asih	0	4.500.000
7	BLUD RS Kebayoran Baru	0	442.000
	Jumlah	375.151.361	594.485.630

e. Uang Jaminan Kerjasama

Uang Jaminan Kerjasama merupakan uang jaminan yang diserahkan oleh pihak yang melakukan kerjasama pengelolaan kawasan parkir dengan BLUD Unit Pengelola Perparkiran dan BLUD RSUD Koja. Uang Jaminan Kerjasama akan dikembalikan saat perjanjian kerjasama tersebut berakhir. Pada BLUD Unit Pengelola Perparkiran, uang jaminan tersebut berasal dari 68 perjanjian kerjasama yaitu 58 perjanjian kerjasama yang ditandatangani sebelum tahun 2023 dan masih aktif serta 10 Perjanjian Kerjasama yang baru ditandatangani pada tahun 2023. Pada RSUD Koja Uang Jaminan Kerjasama atas penyewaan lahan parkir dengan PT Stellar.

Uang Jaminan Kerjasama per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.289.499.147,00 dan Rp2.052.981.500,00. Uang Jaminan Kerjasama per 31 Desember 2023 terdapat pada:



- 1) Unit Pengelola Perparkiran sebesar Rp3.229.499.147,00 yang tersimpan di Rekening penampungan sebesar Rp2.655.136.647,00 dalam bentuk Bank Garansi sebesar Rp574.362.500,00; dan
- 2) RSUD Koja sebesar Rp60.000.000,00 dalam bentuk Kas di Bank.

f. Uang Titipan

Uang Titipan adalah uang pihak ketiga yang terdapat di Rekening Bank BLUD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.474.424.408,00 dan sebesar Rp2.515.902.372,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	BLUD RSUD Matraman	2.398.597.850	2.398.597.850
2	BLUD Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	41.156.603	0
3	BLUD RSUD Koja	29.854.958	2.519.403
4	BLUD Unit Pengelola Perparkiran	2.497.100	58.730.616
5	BLUD RSUD Pasar Minggu	1.912.897	1.912.897
6	BLUD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta	405.000	0
7	BLUD RSUD Kebayoran Baru	0	383.546
8	BLUD Puskesmas Kecamatan Kembangan	0	53.758.060
	Jumlah	2.474.424.408	2.515.902.372

1. Saldo uang titipan pada RSUD Matraman sebesar Rp2.398.597.850,00 merupakan sisa saldo Penerimaan Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim Covid-19 Kemenkes RI yang diterima pada Tahun 2021. Penerimaan Kelebihan Pembayaran Piutang Klaim Covid-19 Kemenkes RI merupakan Pendapatan Diterima di Muka yang akan diperhitungkan dengan pengajuan klaim pada tahun berikutnya;
2. Saldo uang titipan yang terdapat pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp41.156.603,00 merupakan uang yang sebagian besarnya ada di rekening *escrow* yang dilimpahkan ke rekening kas dan belum dilakukan rekonsiliasi pendapatan di rekening tersebut;
3. Saldo uang titipan yang terdapat pada RSUD Koja sebesar Rp29.854.958,00 merupakan pengembalian *outstanding* pembayaran kepada penyedia sebesar Rp28.724.060,00, kelebihan penerimaan uang pasien peserta Jasa Raharja sebesar Rp1.130.898,00;
4. Saldo uang titipan yang terdapat pada Unit Pengelola Perparkiran sebesar Rp2.497.100,00 merupakan retur pengembalian gaji pegawai Sunter Nirwana;
5. Saldo uang titipan yang terdapat di RSUD Pasar Minggu sebesar Rp1.912.897,00 terdiri dari uang titipan atas kelebihan penerimaan transaksi non tunai melalui mesin *EDC* sebesar Rp866.460,00 dan



kelebihan penerimaan atas transfer dari Bank DKI sebesar Rp1.046.437,00; dan

6. Saldo uang titipan yang terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta sebesar Rp405.000,00 merupakan penerimaan jasa layanan yang belum ada Pergub tarif jasa layanan pada saat terjadinya transaksi tersebut.

g. Uang Muka Jasa BLUD

Uang Muka Jasa BLUD adalah dana yang dibayarkan oleh pengguna Jasa BLUD kepada BLUD sebagai uang muka sebelum jasa diberikan. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan BLUD. Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2023 adalah Uang Muka Jasa BLUD selain Uang Muka Pasien RSUD/K.

Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp78.925.000,00 dan Rp4.500.000,00. Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2023 terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta sebesar Rp41.925.000,00 merupakan uang muka sewa gedung dan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta sebesar Rp37.000.000,00 merupakan uang muka sewa ballroom dan kamar hotel sebesar Rp27.000.000,00 dan uang muka pemesanan makanan pada Ragoon Restoran sebesar Rp10.000.000,00.

Rincian saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tersaji pada lampiran 2.

5.5.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah

Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah adalah saldo dana yang mencakup seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran sekolah yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan, meliputi Sisa Pengisian Kas dan Utang Pajak di Bendahara Pengeluaran Sekolah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Pasal 36 ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa Sisa Dana BOSP pada akhir tahun anggaran dilaporkan ke PPKD selaku BUD dan tetap di rekening bank satuan pendidikan serta diakui sebagai SiLPA. Pasal 36 ayat 6 menyatakan bahwa SiLPA Dana BOSP diperhitungkan pada penyaluran anggaran tahun berikutnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Non Fisik.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan Satuan Pendidikan, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp85.056.746.795,00 dan



Rp81.840.507.972,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2023 terdiri dari:

- Kas Dana BOS sebesar Rp84.918.734.579,00 yang terdiri dari SiLPA sebesar Rp84.768.659.304,00 dan Utang Pajak sebesar Rp150.075.275,00; dan
- Kas Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp138.012.216,00 yang terdiri dari SiLPA sebesar Rp137.834.016,00 dan Utang Pajak sebesar Rp178.200,00.

Penjelasan secara rinci sebagai berikut.

No.	Jenjang		Saldo SiLPA BOS Sekolah Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)	
			Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SiLPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)				(6)	(7=3-4-5-6)
Kas Dana BOS											
1	Sekolah Dasar	SD	22.542.254.342	13.863.810	36.661.427	117.054.337	22.374.674.768	92.182.065	22.466.856.833	22.583.911.170	
2	Sekolah Menengah Pertama	SMP	21.261.368.501	7.931.943	-	6.305.271	21.247.131.287	19.221.830	21.266.353.117	21.272.658.388	
3	Sekolah Menengah Atas	SMA	26.296.693.486	5.186.905	599.400	6.429.321	26.284.477.860	6.827.556	26.291.305.416	26.297.734.737	
4	Sekolah Menengah Kejuruan	SMK	13.590.239.781	2.797.100	-	20.286.346	13.567.156.335	9.943.655	13.577.099.990	13.597.386.336	
5	Sekolah Luar Biasa	SLB	1.167.043.948	-	-	-	1.167.043.948	-	1.167.043.948	1.167.043.948	
Jumlah BOS			84.857.600.058	29.779.758	37.260.827	150.075.275	84.640.484.198	128.175.106	84.768.659.304	84.918.734.579	
Kas Dana BOP Kesetaraan											
6	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	PKBM	106.547.459	-	-	178.200	106.369.259	-	106.369.259	106.547.459	
7	Kelompok Belajar	KB	3.227.367	-	-	-	3.227.367	-	3.227.367	3.227.367	
8	Satuan PAUD Sejenis	SPS	5.760.134	-	85.776	-	5.674.358	-	5.674.358	5.674.358	
9	Taman Kanak-Kanak	TK	20.806.193	-	-	-	20.806.193	-	20.806.193	20.806.193	
10	Taman Penitipan Anak	TPA	1.756.839	-	-	-	1.756.839	-	1.756.839	1.756.839	
Jumlah BOP Kesetaraan			138.097.992	-	85.776	178.200	137.834.016	-	137.834.016	138.012.216	
Jumlah BOS dan BOP Kesetaraan			84.995.698.050	29.779.758	37.346.603	150.253.475	84.778.318.214	128.175.106	84.906.493.320	85.056.746.795	

Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2023 sebesar Rp84.918.734.579,00 terdiri dari Saldo Rekening Bank di Sekolah sebesar Rp84.857.600.058 dan dana *Outstanding* (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari pihak ketiga) sebesar Rp128.175.106,00, setelah dikurangi Retur belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia sebesar Rp29.779.758,00 dan Kelebihan pengembalian oleh pihak ketiga yang akan dipindahbukukan sebesar Rp37.260.827,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Kas Dana BOS tahun 2023 pada lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta diuraikan sebagai berikut:



a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2023 pada Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebesar Rp22.583.911.170,00. Saldo Kas tersebut terdiri atas SiLPA BOS sebesar Rp22.466.856.833,00 di 1.341 sekolah dan Utang Pajak sebesar Rp117.054.337,00 tersebar di 58 Sekolah Dasar Negeri.

Saldo Rekening Bank BOS Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.542.254.342,00, terdapat hak pihak lain yaitu Utang Pajak sebesar Rp117.054.337,00 tersebar di 58 Sekolah, Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia sebesar Rp13.863.810,00 tersebar di 4 sekolah dan Kelebihan pengembalian oleh pihak ketiga yang akan dipindahbukukan sebesar Rp36.661.427,00 tersebar di 8 sekolah.

SiLPA BOS Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebesar Rp22.466.856.833,00 terdiri atas SiLPA di Rekening Bank sebesar Rp22.374.674.768,00 dan dana pengembalian belanja yang masih outstanding (di luar rekening bank) sebesar Rp92.182.065,00 tersebar di 14 Sekolah.

Berdasarkan hasil tindak lanjut atas rekonsiliasi dana BOS adalah sebagai berikut:

- 1) Dana pengembalian belanja yang masih *outstanding* telah berhasil disetor ke rekening BOS sekolah sebesar Rp91.565.955,00. Adapun sisa sebesar Rp616.110,00 pada SDN Lenteng Agung 05 merupakan kurang pungut PPN ke pihak ketiga yang masih dalam proses pengembalian ke rekening sekolah untuk pembayaran utang PPN 2023.
- 2) Utang pajak yang berhasil disetorkan senilai Rp2.474.000,00 oleh SDN Grogol Utara 16 pada tanggal 17 Februari 2024, nilai ini hanya sebagian dari utang pajak sekolah tersebut. Sisanya sebesar Rp114.580.337,00 pada 58 sekolah masih dalam upaya penyetoran ke kas negara yang akan dilakukan secara serentak.
- 3) Retur belanja telah berhasil ditransfer kembali sebesar Rp1.600.900,00 oleh SDN Kelapa Dua Wetan 03 pada tanggal 10 Januari 2024. Sisanya sebesar Rp12.262.910,00 pada 3 sekolah masih dalam upaya transfer ulang ke rekening pihak ketiga.
Kelebihan pengembalian oleh pihak ketiga telah berhasil dipindahbukukan sebesar Rp34.412.050,00 dari 6 rekening BOS Sekolah Dasar Negeri. Sisanya sebesar Rp2.249.377,00 pada 2 sekolah masih dalam upaya pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga.

b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2023 pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebesar Rp21.272.658.388,00. Saldo Kas tersebut



terdiri atas SiLPA BOS sebesar Rp21.266.353.117,00 tersebar di 293 Sekolah dan Utang Pajak sebesar Rp6.305.271,00 tersebar di 15 Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Saldo Rekening Bank BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMPN) per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.261.368.501,00, terdapat hak pihak lain yaitu Utang Pajak sebesar Rp6.305.271,00 tersebar di 15 Sekolah dan Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia sebesar Rp7.931.943,00 oleh SMPN 269 Jakarta serta SMPN 163 Jakarta.

SiLPA BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebesar Rp21.266.353.117,00 terdiri atas SiLPA di Rekening Bank sebesar Rp21.247.131.287,00 dan dana pengembalian belanja yang masih outstanding (di luar rekening bank) sebesar Rp19.221.830,00 tersebar di 8 Sekolah.

Berdasarkan hasil tindak lanjut atas rekonsiliasi dana BOS adalah sebagai berikut:

- 1) Dana pengembalian belanja yang masih outstanding telah berhasil disetor ke rekening BOS sekolah sebesar Rp18.210.835,00. Adapun sisa sebesar Rp1.010.995,00 pada SMPN 259 Jakarta merupakan belum terpotongnya PPh ke pihak ketiga yang masih dalam proses pengembalian ke rekening sekolah untuk pembayaran utang PPh 2023.
- 2) Utang pajak sebesar Rp6.305.271,00 masih dalam upaya penyetoran ke kas negara yang akan dilakukan secara serentak.
- 3) Retur belanja sebesar Rp7.931.943,00 masih dalam upaya transfer ulang ke rekening pihak ketiga.

c. Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2023 pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebesar Rp26.297.734.737,00 tersebar di 117 sekolah. Saldo Kas tersebut terdiri atas SiLPA BOS sebesar Rp26.291.305.416,00 dan Utang Pajak sebesar Rp6.429.321,00 tersebar di 5 Sekolah Menengah Atas Negeri.

Saldo Rekening Bank BOS jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.296.693.486,00, terdapat hak pihak lain yaitu Utang Pajak sebesar Rp6.429.321,00 tersebar di 5 Sekolah, Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia sebesar Rp5.186.905,00 di SMA Negeri 80 Jakarta dan Kelebihan pengembalian oleh pihak ketiga yang akan dipindahbukukan sebesar Rp599.400,00 di SMA Negeri 32 Jakarta.

SiLPA BOS Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebesar Rp26.291.305.416,00 terdiri atas SiLPA di Rekening Bank sebesar Rp26.284.477.860,00 dan dana pengembalian belanja yang masih



outstanding (di luar rekening bank) sebesar Rp6.827.556,00 tersebar di 3 Sekolah.

Berdasarkan hasil tindak lanjut atas rekonsiliasi dana BOS adalah sebagai berikut:

- 1) Dana pengembalian belanja yang masih outstanding telah berhasil semua disetor ke rekening BOS sekolah sebesar Rp6.827.556,00.
- 2) Utang pajak sebesar Rp6.429.321,00 masih dalam upaya penyetoran ke kas negara yang akan dilakukan secara serentak.
- 3) Retur belanja sebesar Rp5.186.905,00 masih dalam upaya transfer ulang ke rekening pihak ketiga.
- 4) Kelebihan pengembalian oleh pihak ketiga telah berhasil dipindahbukukan sebesar Rp599.400,00 oleh SMA Negeri 32 Jakarta pada tanggal 5 Januari 2024.

d. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2023 pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebesar Rp13.597.386.336,00 tersebar di 73 sekolah. Saldo Kas tersebut terdiri atas SiLPA BOS sebesar Rp13.577.099.990,00 dan Utang Pajak sebesar Rp20.286.346,00 tersebar di 4 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

Saldo Rekening Bank BOS jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.590.239.781,00, terdapat hak pihak lain yaitu Utang Pajak sebesar Rp20.286.346,00 tersebar di 4 Sekolah dan Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia sebesar Rp2.797.100,00 di SMK Negeri 27 Jakarta.

SiLPA BOS Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebesar Rp13.577.099.990,00 terdiri atas SiLPA di Rekening Bank sebesar Rp13.567.156.335,00 dan dana pengembalian belanja yang masih outstanding (di luar rekening bank) sebesar Rp9.943.655,00 pada SMK Negeri 58 Jakarta.

Berdasarkan hasil tindak lanjut atas rekonsiliasi dana BOS adalah sebagai berikut:

- 1) Dana pengembalian belanja yang masih outstanding sebesar Rp9.943.655,00 pada SMK Negeri 58 Jakarta merupakan kurang pungut PPN ke pihak ketiga yang masih dalam proses pengembalian ke rekening sekolah untuk pembayaran utang PPN 2023.
- 2) Utang pajak sebesar Rp20.286.346,00 masih dalam upaya penyetoran ke kas negara yang akan dilakukan secara serentak.
- 3) Retur belanja sebesar Rp2.797.100,00 masih dalam upaya transfer ulang ke rekening pihak ketiga.



e. Jenjang Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN)

Saldo kas BOS per 31 Desember 2023 pada Jenjang Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) sebesar Rp1.167.043.948,00 tersebar di 13 sekolah pada lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

Kas BOP Kesetaraan

Pada saldo Rekening Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP Kesetaraan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp138.012.216,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai Kas Dana BOP Kesetaraan Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri (PKBMN)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan per 31 Desember 2023 pada Jenjang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri (PKBMN) sebesar Rp106.547.459,00, tersebar di 39 lembaga pendidikan.

Saldo sebesar Rp106.547.459,00 pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri (PKBMN) terdiri dari SiLPA BOP Kesetaraan sebesar Rp106.369.259,00 dan Utang Pajak sebesar Rp178.200,00 di PKBM Negeri 11 Jakarta yang masih dalam upaya penyetoran ke kas negara yang akan dilakukan secara serentak.

b. Kelompok Belajar Negeri (KBN)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan berupa SiLPA per 31 Desember 2023 pada Jenjang Kelompok Belajar Negeri (KBN) sebesar Rp3.227.367,00, tersebar di 22 lembaga pendidikan.

c. Satuan PAUD Sejenis Negeri (SPSN)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan berupa SiLPA BOP Kesetaraan per 31 Desember 2023 pada Jenjang Satuan PAUD Sejenis Negeri (SPSN) sebesar Rp5.674.358,00, tersebar di 43 lembaga pendidikan.

SiLPA BOP Kesetaraan pada Jenjang Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebesar Rp5.674.358,00 merupakan sisa dana BOP Kesetaraan yang ada di rekening Bank sekolah sebesar Rp5.760.134,00 setelah dikurangi kelebihan pengembalian oleh pihak ketiga yang akan dipindahbukukan sebesar Rp85.776,00 di SPS Negeri Bale Bermain Abdi Praja, dana ini telah dipindahbukukan ke pihak ketiga tanggal 16 Februari 2024.

d. Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan berupa SiLPA BOP Kesetaraan per 31 Desember 2023 pada Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) sebesar Rp20.806.193,00, tersebar di 79 lembaga pendidikan.



e. Taman Penitipan Anak Negeri (TPAN)

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dana BOP Kesetaraan berupa SiLPA BOP Kesetaraan per 31 Desember 2023 pada Jenjang Taman Penitipan Anak Negeri (TPAN) sebesar Rp1.756.839,00, tersebar di 22 lembaga pendidikan.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2023 secara rinci disajikan pada lampiran 3.

5.5.1.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.543.921.396,00 dan Rp32.709.285.735,00. Saldo tersebut merupakan bagian dari dana bantuan sosial di Dinas Pendidikan sebesar Rp1.129.321.396,00 dan Dinas Sosial sebesar Rp12.414.600.000,00 yang tidak berhasil disalurkan di antaranya karena rekening tujuan tutup dan pindah domisili. Atas saldo tersebut akan disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tahun 2024.

5.5.1.1.2 Piutang

5.5.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak daerah terjadi pada saat hak daerah untuk menagih timbul yaitu pada saat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan. Piutang pajak daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp11.679.786.241.137,00 dan Rp10.995.901.553.320,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	127.437.900.750	127.849.640.260
2.	Piutang Pajak Air Tanah	591.166.273.424	576.008.114.970
3.	Piutang Pajak Hotel	31.223.713.068	34.179.090.012
4.	Piutang Pajak Restoran	141.327.184.933	145.189.427.505
5.	Piutang Pajak Hiburan	77.344.622.956	83.960.193.416
6.	Piutang Pajak Reklame	555.601.209.780	575.358.665.199
7.	Piutang Pajak Parkir	12.081.179.716	13.533.755.103
8.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.926.116.872.186	9.231.328.177.637
9.	Piutang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	217.487.284.324	208.494.489.218
	Jumlah	11.679.786.241.137	10.995.901.553.320

Pada tahun 2023, terjadi kenaikan nilai piutang pajak daerah sebesar 6,22% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan nilai piutang pajak daerah tersebut berasal dari 3 (tiga) jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah (PAT) sebesar 2,63%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 4,31%, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 7,53%.



Kenaikan nilai piutang pajak air tanah selama tahun 2023 dikarenakan adanya penambahan ketetapan yang diterbitkan yaitu sebesar 7.679 surat ketetapan atau meningkat sebesar 68,27% dibandingkan tahun 2022 dengan peningkatan nilai ketetapan sebesar 120,20%. Adapun penyebab penambahan ketetapan yang diterbitkan dikarenakan telah tersedianya data pencatatan meter air pemanfaatan air tanah dan data *mapping* kategori penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) pada lokasi pemanfaatan air tanah baik untuk masa tahun 2023 maupun untuk tahun sebelumnya.

Kenaikan nilai Piutang BPHTB tahun 2023 disebabkan adanya penurunan kemampuan wajib pajak untuk membayar ketetapan pajak (*collectability*) sebesar 15,55%. Pada tahun 2023 kemampuan wajib pajak untuk membayar ketetapan pajak (*collectability*) sebesar 68,90% sedangkan tahun 2022 sebesar 84,45%.

Kenaikan Piutang PBB-P2 sebesar Rp694.788.694.549,00 atau 7,53% dibandingkan tahun 2022 disebabkan karena adanya penurunan jumlah wajib pajak yang mengajukan pengurangan, keringanan, pembebasan, pembetulan, dan pembatalan atas ketetapan PBB-P2 (baik dari kuantitas permohonan maupun nilai PBB-P2 yang dimohon pengurangan, keringanan dan pembebasan). Pengurangan dan keringanan atas ketetapan PBB-P2 Tahun 2023 menurun sebesar Rp429.340.071.720 atau 34,97% dibandingkan tahun lalu serta penurunan pembebasan dan pembetulan sebesar Rp570.526.760.496,00 atau 18,21% dibandingkan tahun lalu. Rincian Piutang Pajak Daerah disajikan dalam Lampiran 4.

a. Mutasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp127.437.900.750,00 dan Rp127.849.640.260,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang PKB			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	127.849.640.260
	Pembatalan SKP	Rp.	(10.447.390.710)
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(1.303.936.100)
	Saldo atas Piutang yang Diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	116.098.313.450
b.	Mutasi Piutang Tahun 2023		
	Ketetapan Piutang	Rp.	995.676.041.515
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(984.336.454.215)
	Saldo atas Piutang yang Diperoleh pada tahun 2023	Rp.	11.339.587.300
c.	Saldo Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	127.437.900.750

Piutang PKB dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan dan belum terbayar sampai dengan akhir tahun. Hal ini telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengenai Piutang Pajak yang menjelaskan bahwa piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya



Surat Ketetapan Pajak (SKP). Pada tahun 2023, terdapat pembatalan SKP atas tahun 2022 dan sebelumnya sebesar Rp10.447.390.710,00 karena telah terbit ketetapan baru pada tahun 2023.

Mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, menjelaskan bahwa Surat Ketetapan Pajak PKB diterbitkan setelah dilakukan tahapan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) kendaraan bermotor. Hal tersebut sejalan dengan Surat Jawaban Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atas pertanyaan Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Se-Indonesia (APPDI) Nomor: S-12.2/K.1/ KSAP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 terkait dengan Pengakuan Piutang PKB dan BBN-KB.

Sedangkan untuk kendaraan Bermotor (Kbm) yang telah jatuh tempo pembayaran dan belum melakukan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang belum daftar ulang atau yang lebih dikenal dengan Kbm BDU. Terhadap Kbm BDU tersebut tidak terbit surat ketetapan pajak sehingga Kbm BDU tidak dicatat sebagai piutang PKB, melainkan merupakan perkiraan penerimaan PKB.

Terhitung sejak 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat 2.983.177 Kbm yang belum melakukan daftar ulang dengan perkiraan penerimaan PKB sebesar Rp2.308.838.137.373,00. Perkiraan penerimaan PKB tersebut dihitung dengan menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun terutang.

Berikut disajikan tabel Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Perhitungan Perkiraan Penerimaan PKB Periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2023.

No	Jenis	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Jumlah	
		KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)	KBM	PKB POKOK (Rp)
1	Sedan dan Sejenisnya	7.430	16.433.513.720	9.223	23.115.893.525	7.884	20.559.643.676	11.533	39.060.186.485	24.156	112.400.604.250	60.226	211.569.841.656
2	Jeep Segala Merk	2.745	12.187.316.670	3.662	18.464.048.075	3.419	18.120.560.450	6.947	41.196.161.576	22.071	160.290.069.400	38.844	250.258.156.171
3	Mini Bus, Micro Bus	23.359	57.251.147.810	33.285	89.351.698.240	28.772	78.429.471.735	57.031	166.231.588.073	171.234	561.572.666.190	313.681	952.836.572.048
4	Pick Up, Light Truck, Truck dan Sejenisnya	4.390	6.131.981.845	5.343	8.089.510.710	4.780	7.637.586.755	6.889	11.597.938.826	14.551	26.721.916.500	35.953	60.178.934.636
5	Bus Tingkat, Wagon, Box, Delivery Van	2.359	5.911.170.475	3.155	8.321.317.655	3.167	8.261.364.015	4.833	13.993.460.628	12.000	36.483.549.085	25.514	72.970.861.858
6	Dum Truck, Truck Tangki dan Sejenisnya	1.609	5.479.253.175	1.850	6.697.142.525	1.620	6.442.173.440	1.874	5.628.859.800	4.254	11.218.294.150	11.207	35.465.723.090
7	Otolet/Opelet, Microlet	452	61.030.600	619	75.161.025	475	60.098.965	412	54.085.900	768	112.956.200	2.726	363.332.690
8	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	3.058	236.569.900	5.407	353.739.600	2.969	204.446.830	2.676	194.340.061	3.626	365.531.000	17.736	1.354.627.391
9	Sepeda Motor	369.316	86.362.125.875	464.458	119.223.766.675	367.625	94.316.904.211	454.735	130.412.101.587	804.375	250.706.480.675	2.460.509	681.021.379.023
10	Alat-Alat Berat	1.968	4.515.913.710	2.443	5.747.461.805	2.148	5.242.614.290	2.708	6.357.296.305	7.514	20.955.422.700	16.781	42.818.708.810
Total		416.686	194.570.023.780	529.445	279.439.739.835	422.859	239.274.864.367	549.638	414.726.019.241	1.064.549	1.180.827.490.150	2.983.177	2.308.838.137.373



Terhadap kendaraan bermotor yang belum daftar ulang tersebut di atas, telah dilakukan upaya optimalisasi agar wajib pajak segera melakukan daftar ulang (registrasi dan identifikasi) dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun upaya yang dilakukan meliputi:

- 1) Penyampaian surat himbauan kendaraan bermotor yang belum daftar ulang kepada wajib pajak perorangan dan badan secara mandiri, maupun dengan menggunakan pihak ketiga seperti PT. Pos Indonesia. Selain itu penyampaian surat himbauan juga dilakukan dengan melibatkan Walikota, Camat dan Lurah. Selama tahun 2023 telah disampaikan 105.645 surat himbauan kepada wajib pajak agar segera melakukan pendaftaran ulang kendaraan bermotornya dengan nilai perkiraan penerimaan PKB sebesar Rp555.688.423.764,00;
- 2) Melakukan pemanggilan dan konfirmasi kepada Wajib Pajak Badan (Perusahaan) terkait dengan Kendaraan Bermotor yang belum daftar ulang;
- 3) Razia gabungan kendaraan bermotor secara *door to door* dengan Kepolisian Republik Indonesia, Jasa Raharja dan Bank DKI;
- 4) Pemberian sosialisasi dan pelayanan pembayaran pajak pada setiap Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi wajib pajak untuk melakukan daftar ulang di antaranya:

- 1) Masih adanya wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya namun tidak melaporkan ke samsat dan tidak melakukan blokir atas kendaraan yang telah dijual serta pembeli belum melakukan balik nama kendaraan bermotor.
- 2) Adanya kendaraan yang hilang, rusak, dicuri yang tidak dilaporkan ke Kepolisian.
- 3) Adanya kendaraan bekas kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang tidak dilakukan pemutakhiran data.
- 4) Adanya wajib pajak yang telah berpindah alamat dan tidak melakukan pemutakhiran data.
- 5) Adanya alamat wajib pajak yang tidak ditemukan, tidak jelas di lapangan, Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya dan tidak dikenal.

b. Mutasi Piutang Pajak Air Tanah (PAT)

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp591.166.273.424,00 dan Rp576.008.114.970,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.



Piutang PAT			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	576.008.114.970
	Koreksi Pembulatan	Rp.	4
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(7.291.097.147)
	PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023	Rp.	16.916
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	568.717.034.743
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023		
	Ketetapan Piutang	Rp.	98.876.897.235
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(76.427.658.554)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023	Rp.	22.449.238.681
c.	Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	591.166.273.424

Pada tahun 2023, terdapat PDM tahun lalu sebesar Rp16.916,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023.

c. Mutasi Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp31.223.713.068,00 dan Rp34.179.090.012,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang Pajak Hotel			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	34.179.090.012
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(5.292.910.021)
	PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023	Rp.	1
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	28.886.179.992
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023		
	Ketetapan Piutang	Rp.	7.320.670.492
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(4.983.137.416)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023	Rp.	2.337.533.076
c.	Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	31.223.713.068

Pada tahun 2023, terdapat PDM tahun lalu sebesar Rp1,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023.

d. Mutasi Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp141.327.184.933,00 dan Rp145.189.427.505,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang Pajak Restoran			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	145.189.427.505
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(13.123.878.437)
	PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023	Rp.	10
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	132.065.549.078
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023		



Piutang Pajak Restoran			
	Ketetapan Piutang	Rp.	49.497.734.964
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(40.236.099.112)
	PDM atas ketetapan tahun 2023	Rp.	3
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023	Rp.	9.261.635.855
c.	Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	141.327.184.933

Pada tahun 2023, terdapat PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023 sebesar Rp10,00 dan tahun berjalan sebesar Rp3,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023 dan tahun berjalan.

e. Mutasi Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp77.344.622.956,00 dan Rp83.960.193.416,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang Pajak Hiburan			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	83.960.193.416
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(12.926.931.780)
	PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023	Rp.	133.500
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	71.033.395.136
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023		
	Ketetapan Piutang	Rp.	41.702.338.461
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(35.391.189.293)
	PDM atas ketetapan tahun 2023	Rp.	78.652
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023	Rp.	6.311.227.820
c.	Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	77.344.622.956

Pada tahun 2023, terdapat PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023 sebesar Rp133.500,00 dan tahun berjalan sebesar Rp78.652,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023 dan tahun berjalan.

f. Mutasi Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing Rp555.601.209.780,00 dan Rp575.358.665.199,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang Pajak Reklame			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	575.358.665.199
	Koreksi Pembulatan	Rp.	(2)
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(107.908.925.755)
	Pemindahbukuan	Rp.	(289.524.469)
	Pembetulan SKP	Rp.	(274.845.832)
	PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023		1.374.795.173
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	468.260.164.314
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023		
	Ketetapan Piutang	Rp.	955.151.140.497
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(867.899.916.459)



Piutang Pajak Reklame			
	Pemindahbukuan	Rp.	(1.999.275)
	Keringanan	Rp.	(381.820.013)
	PDM atas ketetapan tahun 2023	Rp.	473.640.716
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023	Rp.	87.341.045.466
c.	Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	555.601.209.780

Pada tahun 2023, terdapat koreksi pembulatan atas jumlah piutang pajak reklame tahun lalu sebesar Rp2,00. Selain itu, terdapat mutasi kurang piutang tahun lalu sebesar Rp289.524.469,00 dan tahun berjalan sebesar Rp1.999.275,00 karena adanya pemindahbukuan pembayaran pajak reklame. Pemindahbukuan pajak reklame adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak reklame untuk dibukukan pada penerimaan pajak reklame yang sesuai. Pemindahbukuan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017.

Pembetulan atas SKPD pajak reklame tahun lalu di tahun 2023 sebesar Rp274.845.832,00 dilakukan karena terjadi kesalahan penerapan masa pajak atau tahun pajak. Pembetulan SKPD Reklame dilaksanakan berdasarkan Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

Pada tahun 2023, terdapat PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023 sebesar Rp1.374.795.173,00 dan tahun berjalan sebesar Rp473.640.716,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023 dan tahun berjalan.

g. Mutasi Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp12.081.179.716,00 dan Rp13.533.755.103,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang Pajak Parkir			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	13.533.755.103
	Koreksi Pembulatan	Rp.	4
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(1.843.406.457)
	PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023	Rp.	11.763.127
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	11.702.111.777
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023		
	Ketetapan Piutang	Rp.	2.761.227.416



Piutang Pajak Parkir			
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(2.382.159.477)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023	Rp.	379.067.939
c.	Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	12.081.179.716

Pada tahun 2023, terdapat PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023 sebesar Rp4,00 dan tahun berjalan sebesar Rp11.763.127,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023 dan tahun berjalan.

h. Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.926.116.872.186,00 dan Rp9.231.328.177.637,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang PBB-P2			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	9.231.328.177.637
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(802.962.330.180)
	Kompensasi	Rp.	(42.783.942)
	Pemindahbukuan	Rp.	(843.343.132)
	Keringanan	Rp.	(90.540.983.899)
	Pengurangan	Rp.	(2.178.272.183)
	Pembebasan	Rp.	(9.734.975.902)
	Pengenaan	Rp.	(991.689.419)
	Pembetulan	Rp.	(101.796.959.443)
	Pembatalan	Rp.	(183.563.107.974)
	PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023	Rp.	522.994.384
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	8.039.196.725.947
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023		
	Ketetapan Piutang	Rp.	13.493.080.456.917
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(8.245.736.779.121)
	Kompensasi	Rp.	(53.717.817)
	Pemindahbukuan	Rp.	(1.224.022.833)
	Keringanan	Rp.	(748.136.064.232)
	Pengurangan	Rp.	(50.254.742.154)
	Pembebasan	Rp.	(2.432.511.481.726)
	Pengenaan	Rp.	(129.354.291.463)
	PDM atas ketetapan tahun 2023	Rp.	1.110.788.668
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023	Rp.	1.886.920.146.239
c.	Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	9.926.116.872.186

Pada tahun 2023, terdapat mutasi kurang piutang tahun lalu sebesar Rp886.127.074,00 dan tahun berjalan sebesar Rp1.277.740.650,00 karena adanya kompensasi pembayaran PBB-P2. Kompensasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah. Kompensasi pembayaran pajak adalah pembayaran pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas daerah.

Selain itu, terdapat mutasi kurang piutang tahun lalu sebesar Rp843.343.132,00 dan tahun berjalan sebesar Rp1.224.022.833,00 karena



adanya pemindahbukuan pembayaran pajak reklame. Pemindahbukuan pajak reklame adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak reklame untuk dibukukan pada penerimaan pajak reklame yang sesuai. Pemindahbukuan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017.

Pada tahun 2023, terdapat PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023 sebesar Rp522.994.384,00 dan tahun berjalan sebesar Rp1.110.788.668,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023 dan tahun berjalan.

Pembebasan dan Keringanan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur 5 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan ekonomi Tahun 2023 memberikan pembebasan sebesar 100% (seratus persen) kepada Objek PBB-P2 Tahun Pajak 2023 atas Rumah Tapak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan Wajib Pajak orang pribadi dengan NJOP PBB-P2 s.d kurang dari Rp2.000.000.000,00.

Peraturan Gubernur tersebut juga memberikan pembebasan sebagian ketetapan PBB tahun pajak 2023 terhadap Objek PBB-P2 dengan NJOP PBB-P2 Rp2.000.000.000,00 atau lebih berupa:

- a. pembebasan sebagian untuk bumi seluas 60m² dan bangunan seluas 36 m² dari PBB terutang; dan
- b. tambahan pembebasan sebagian sebesar 5% dari sisa PBB-P2 yang terutang setelah diberikan pembebasan pada poin a.

Selain itu, Gubernur juga memberikan pembebasan sebagian terhadap objek PBB-P2 di luar rumah tapak berupa pembebasan sebagian sebesar 10% dari PBB-P2 yang terutang.

Kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran ketetapan PBB-P2 Tahun Pajak 2023 pada periode tertentu diberikan keringanan sebesar 5%-10% dan untuk ketetapan sebelum tahun 2023 diberikan keringanan sebesar 10%-20%. Adapun besaran keringanan PBB-P2 yang diberikan selama tahun 2023 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp90.540.983.899,00 dan sebesar Rp748.136.064.232,00 atas ketetapan tahun berjalan.

Sedangkan besaran pembebasan atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp9.734.975.902,00 dan ketetapan tahun berjalan sebesar Rp2.432.511.481.726,00. Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen, dan Tenaga



Kependidikan Perguruan Tinggi, Veteran Republik Indonesia, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan Nasional, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Kebijakan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk rumah sakit swasta, telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta. Bersamaan dengan hal tersebut, Gubernur juga membuat kebijakan di bidang pendidikan yang dituangkan pada Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta.

Adapun besaran pengenaan PBB-P2 yang diberikan selama tahun 2023 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp991.689.419,00 dan sebesar Rp129.354.291.463,00 atas ketetapan tahun berjalan.

Kebijakan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun besaran pengurangan PBB-P2 yang diberikan selama tahun 2023 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp2.178.272.183,00 dan sebesar Rp50.254.742.154,00 atas ketetapan tahun berjalan.

Pembetulan SPPT PBB-P2 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Adapun besaran pembetulan PBB-P2 selama tahun 2023 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp101.796.959.443,00 Pembatalan SPPT PBB-P2 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembatalan SPPT PBB-P2. Adapun besaran pembatalan PBB-P2 selama tahun 2023 atas ketetapan tahun lalu sebesar Rp183.563.107.974,00.

i. Mutasi Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp217.487.284.324,00 dan Rp208.494.489.218,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Piutang BPHTB			
a.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023		
	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022	Rp.	208.494.489.218
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(3.521.968.634)



Piutang BPHTB			
	Kompensasi dan Pemindahbukuan	Rp.	(11.975.000)
	PDM atas ketetapan sebelum tahun 2023	Rp.	11.975.000
	Saldo atas Piutang yang diperoleh sebelum tahun 2023	Rp.	204.972.520.584
b.	Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023		
	Ketetapan Piutang	Rp.	40.243.128.049
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(27.728.364.309)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada tahun 2023	Rp.	12.514.763.740
c.	Piutang Per 31 Desember 2023 (a+b)	Rp.	217.487.284.324

Pada tahun 2023, terdapat PDM tahun lalu sebesar Rp11.975.000,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023.

Pada tahun 2023, terdapat PDM tahun lalu sebesar Rp10,00 dan tahun berjalan sebesar Rp3,00 karena kelebihan pembayaran pokok atas ketetapan sebelum tahun 2023 dan tahun berjalan.

Kompensasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah. Kompensasi pembayaran pajak adalah pembayaran pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas daerah.

Optimalisasi penagihan BPHTB dilakukan melalui :

- Penyampaian surat himbauan pembayaran BPHTB kepada 4.790 wajib pajak yang memiliki status kurang bayar BPHTB
- Menggiatkan kembali upaya *tax clearance* sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 pada saat wajib pajak mengajukan pelayanan pelaporan BPHTB;
- Pemberitahuan (notifikasi) atas kurang bayar wajib pajak melalui aplikasi/akun pajak *online* wajib pajak/*email* wajib pajak.

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Daerah adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Persentase penyisihan piutang pajak tak tertagih tergantung pada kualitas piutang yang penggolongannya didasarkan pada jatuh tempo dan upaya penagihan piutang. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan sesuai dengan kebijakan akuntansi.



Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp5.293.669.294.289,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp11.679.786.241.137,00 dikurangi dengan penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp6.386.116.946.848,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2023 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.31
Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Kriteria Piutang				Jumlah Piutang Per Jenis Pajak	NRV
		Piutang Pokok Lancar (X < 1 Tahun)	Piutang Pokok Kurang Lancar (1 < X < 3 Tahun)	Piutang Pokok Diragukan (3 < X < 5 Tahun)	Piutang Pokok Macet (X > 5 Tahun)		
		Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang		
		0,50%	10%	50%	100%		
1	PKB	11.339.587.300	12.983.185.889	15.668.251.050	87.446.876.511	127.437.900.750	30.801.882.189
		56.697.937	1.298.318.589	7.834.125.525	87.446.876.511	96.636.018.561	
2	P A T	22.449.238.681	9.150.500.108	7.701.594.180	551.864.940.455	591.166.273.424	34.423.239.675
		112.246.193	915.050.011	3.850.797.090	551.864.940.455	556.743.033.749	
3	Hotel	2.337.533.076	4.420.968.209	9.663.190	24.455.548.593	31.223.713.068	6.309.548.394
		11.687.665	442.096.821	4.831.595	24.455.548.593	24.914.164.674	
4	Restoran	9.261.635.855	14.782.354.155	13.809.582.989	103.473.611.934	141.327.184.933	29.424.237.910
		46.308.179	1.478.235.416	6.904.791.495	103.473.611.934	111.902.947.023	
5	Hiburan	6.311.227.820	7.995.600.084	2.364.895.102	60.672.899.950	77.344.622.956	14.658.159.308
		31.556.139	799.560.008	1.182.447.551	60.672.899.950	62.686.463.649	
6	Reklame	87.341.045.466	33.595.757.811	25.262.864.486	409.401.542.017	555.601.209.780	129.771.954.512
		436.705.227	3.359.575.781	12.631.432.243	409.401.542.017	425.829.255.268	
7	Parkir	379.067.939	675.641.592	783.869.710	10.242.600.475	12.081.179.716	1.377.184.887
		1.895.340	67.564.159	391.934.855	10.242.600.475	10.703.994.829	
8	BPHTB	12.514.763.740	11.557.659.617	140.208.926.077	53.205.934.889	217.487.284.324	92.958.546.615
		62.573.819	1.155.765.962	70.104.463.039	53.205.934.889	124.528.737.708	
9	PBB-P2	1.886.920.146.239	2.373.371.642.310	1.880.849.034.425	3.784.976.049.212	9.926.116.872.186	4.953.944.540.799
		9.434.600.731	237.337.164.231	940.424.517.213	3.784.976.049.212	4.972.172.331.387	
Total		2.038.854.246.116	2.468.533.309.775	2.086.658.681.209	5.085.740.004.036	11.679.786.241.137	5.293.669.294.287
		10.194.271.231	246.853.330.978	1.043.329.340.605	5.085.740.004.036	6.386.116.946.848	

5.5.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp68.096.444.794,00 dan Rp63.956.433.222,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	7.795.430.587	6.050.702.596
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	51.635.978.940	49.270.009.786
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	8.665.035.267	8.635.720.840
	Jumlah	68.096.444.794	63.956.433.222



a. Piutang Retribusi Jasa Umum

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp7.795.430.587,00 merupakan nilai piutang yang telah dikurangi eliminasi piutang internal SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp17.337.000,00. Piutang Retribusi Jasa Umum tersebut terdapat pada:

- 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.473.592.850,00 merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dan Piutang Retribusi Kios;
- 2) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.236.297.328,00 di antaranya merupakan Piutang Retribusi Pengangkutan Sampah dari Lokasi Industri dan sejenisnya dan Piutang Retribusi Pengangkutan Sampah dari Lokasi Pedagang Kaki Lima/Usaha Mikro. Atas Piutang Retribusi tersebut terdapat eliminasi antar SKPD sebesar Rp17.337.000,00 yang merupakan Piutang kepada beberapa Puskesmas dan RSUD serta Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil-Jakarta Timur;
- 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.377.609,00 di antaranya merupakan Piutang Retribusi Perpanjangan Sewa Tanah Makam dan Piutang Retribusi Pemeriksaan atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran dan Pengujian terhadap pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran;
- 4) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp86.238.800,00 merupakan Piutang Retribusi pemakaian kios promosi bunga dan Piutang Retribusi pemakaian kios promosi bunga;
- 5) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp261.000,00 merupakan Piutang Retribusi mobil barang, mobil bus dan kendaraan khusus.

b. Piutang Retribusi Jasa Usaha

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp51.635.978.940,00 di antaranya terdapat pada:

- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp39.994.429.558,00 merupakan Piutang Pemakaian Unit Hunian dan Unit Usaha;
- 2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.909.385.000,00 merupakan Retribusi Pemakaian Penginapan



Graha Wisata Ragunan dan retribusi Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan;

- 3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.261.727.120,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian tempat usaha di lokasi binaan usaha kecil dan Piutang Retribusi Pemakaian tempat usaha di lokasi promosi dan pusat perdagangan UKM;
- 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.344.210.860,00 di antaranya merupakan Retribusi Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan lengkap dan Retribusi Pemakaian lokasi taman dan jalur hijau;
- 5) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp722.697.007,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian mobil derek dan Pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus;
- 6) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp271.880.000,00 merupakan Retribusi Jasa Pemakaian Laboratorium;
- 7) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp102.682.595,00 merupakan Retribusi Pemakaian Tempat Penimbunan Hasil Hutan dan Retribusi Pemakaian peralatan pengeringan, Retribusi Pengawetan dan Pengolahan Kayu; dan
- 8) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Rp28.966.800,00 merupakan Retribusi Pemakaian Fasilitas/Sarana dan Prasarana Perikanan, Retribusi Pemakaian Lahan Usaha Promosi Penangkar Bibit dan Pemakaian Lahan Taman Anggrek Ragunan, dan Retribusi Pemakaian Laboratorium.

c. Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp8.665.035.267,00 terdapat pada:

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.611.973.667,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung; dan
- 2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp53.061.600,00 merupakan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung periode 2008 sampai dengan 2014.

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sebesar Rp16.532.781.499,00, yaitu berasal



dari Nilai Bruto sebesar Rp68.096.444.794,00 dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp51.563.663.295,00.

Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) retribusi berdasarkan jenis retribusi per 31 Desember 2023 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.32

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah Piutang per Jenis Retribusi	Jumlah Penyisihan Piutang per Jenis Retribusi
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
		(0 s.d 1 Bulan)	(1 s.d 3 Bulan)	(3 s.d 5 bulan)	lebih dari 12 bulan		
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	3.254.665.982	247.301.100	47.822.739	4.245.640.766	7.795.430.587	4.309.044.201
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	9.333.063.255	44.242.943	52.292.965	42.206.379.777	51.635.978.940	42.283.623.220
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	3.382.786.375	16.000.000	627.533.899	4.638.714.993	8.665.035.267	4.970.995.874
Jumlah Piutang Retribusi		15.970.515.612	307.544.043	727.649.603	51.090.735.536	68.096.444.794	51.563.663.295
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih		78.348.553	30.754.404	363.824.802	51.090.735.536	51.563.663.295	
NRV Piutang Retribusi		15.892.167.059	276.789.639	363.824.802	0	16.532.781.499	

5.5.1.1.2.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah piutang selain Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah di antaranya piutang hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, denda pajak, denda retribusi, BLUD, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.030.838.594.857,00 dan Rp3.104.392.252.746,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	540.968.971	540.968.971
2.	Piutang Jasa Giro	1.775.710.904	0
3.	Piutang Pendapatan Bunga	4.787	0



No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	17.053.387.096	17.053.387.096
5.	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.130.615.950	1.072.130.519
6.	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	1.164.762.928
7.	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	865.718.779.090	692.866.383.801
8.	Piutang Pendapatan Denda Retribusi	17.821.739.466	17.531.173.998
9.	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	16.431.747.538	23.923.877.879
10.	Piutang BLUD	414.630.180.236	424.333.700.559
11.	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	26.743.584.888	26.549.569.976
12.	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	6.390.310.880	4.094.591.130
13.	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	44.146.360.933	24.658.706.066
14.	Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	0	11.098.384.477
15.	Piutang Kompensasi Rumah susun, susun sederhana/murah (SP3L)	842.311.305.796	952.640.141.931
16.	Piutang Hasil Tagih	41.923.253.432	41.939.812.481
17.	Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	26.444.238.419	23.146.462.311
18.	Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	121.230.000	148.518.000
19.	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	707.655.176.471	841.629.680.623
Jumlah		3.030.838.594.857	3.104.392.252.746

1) Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penerimaan atas hasil penjualan barang milik daerah. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan masing-masing per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp540.968.971,00 dan Rp540.968.971,00. Saldo Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan tersebut merupakan tagihan atas penjualan barang bergerak berupa kendaraan dinas.

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Nilai Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp540.968.971,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp540.968.971,00.



Nilai penyisihan piutang sama dengan nilai piutang karena piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang macet.

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dikategorikan macet karena klasifikasi umur piutang sudah melebihi 5 tahun, dan upaya yang sedang dilakukan adalah tetap memberikan surat penagihan dan melakukan peninjauan untuk diusulkan penghapusan.

2) Piutang Jasa Giro

Jasa Giro adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan jasa giro yang berasal dari penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk giro. Piutang jasa giro per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.775.710.904,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.775.342.466,00 pada rekening Bank DKI nomor 10802015759 dengan nama RKUD PROV DKI Jakarta. Piutang tersebut telah disetorkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan divalidasi pada tanggal 15 Januari 2024; dan
- b) Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp368.438,00 pada rekening Bank DKI nomor 10102060153 dengan nama rekening RS Adhyaksa. Piutang tersebut telah disetorkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan divalidasi pada tanggal 29 Januari 2024.

3) Piutang Pendapatan Bunga

Piutang Pendapatan Bunga adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan bunga yang berasal dari penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito. Piutang Pendapatan Bunga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.787,00 dan Rp0,00. Piutang tersebut merupakan piutang yang diklasifikasi lancar karena piutang tersebut terbit pada tahun 2023.

4) Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penyetoran/pengembalian baik kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Institusi Pengawas baik internal maupun eksternal. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 berupa Piutang Kerugian Uang Daerah. Saldo Piutang Kerugian Uang Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp17.053.387.096,00.

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Tuntutan Perbendaharaan tersebut merupakan Piutang TP/TGR yang telah ditetapkan berdasarkan SKTJM dan Keputusan Pembebanan dari Majelis Pertimbangan TP/TGR.



Jumlah tersebut tidak termasuk tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses penghapusan dan informasi kerugian daerah, yang belum diakui sebagai piutang.

Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih

Nilai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp1.372.001.747,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp17.053.387.096,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp15.681.385.349,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) berdasarkan jenis tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Badan Peradilan	-	-	-	900.648.728	900.648.728
2	Kasus Kehilangan Mobil	-	-	-	676.219.939	676.219.939
3	Kasus Kehilangan Motor	-	-	-	22.305.625	22.305.625
4	Kasus Ketekoran Kas	-	96.000.000	2.571.203.494	11.075.832.448	13.743.035.942
5	Kasus Lain-Lain	-	-	-	9.200.000	9.200.000
6	Kasus Biro Perlengkapan (P3D)	-	-	-	88.695.279	88.695.279
7	Kasus Walikotamadya Jakarta Selatan	-	-	-	393.181.816	393.181.816
8	Wisma Jaya raya	-	-	-	1.220.099.767	1.220.099.767
	Jumlah Piutang TGR (I)	-	96.000.000	2.571.203.494	14.386.183.602	17.053.387.096
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang TGR Tak Tertagih (I x II) 2023	-	9.600.000	1.285.601.747	14.386.183.602	15.681.385.349
	Nilai Piutang Neto 2023	-	86.400.000	1.285.601.747	-	1.372.001.747

5) Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa dan kerjasama oleh Pemerintah Daerah.

Saldo Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.130.615.950,00 dan Rp1.072.130.519,00, merupakan Piutang Penerimaan komisi bagi hasil Premi Program Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi.

Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya

Nilai Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net*



Realizable Value) adalah sebesar Rp1.124.962.870,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.130.615.950,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lainnya sebesar Rp5.653.080,00.

6) Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Piutang Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan atas sanksi yang dikenakan kepada penyedia barang atau jasa oleh pejabat pembuat komitmen dalam hal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Saldo Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.164.762.928,00 yang merupakan piutang pada penyedia barang/jasa atas denda keterlambatan penyelesaian pengadaan barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	0	199.128.538	Pembangunan Puskesmas Kelurahan Balimester
2	Dinas Kesehatan	0	459.184.503	Pembangunan Puskesmas Kelurahan Pulo Gebang
3	Dinas Kesehatan	0	506.449.887	Pembangunan Puskesmas Kelurahan Duren Tiga
	Jumlah	0	1.164.762.928	

Penyisihan Piutang Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Nilai Piutang Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00.

7) Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp865.718.779.090,00 dan Rp.692.866.383.801,00 sedangkan untuk Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp.509.610.862.514,00.

Rincian Piutang Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

No	Jenis Piutang Denda Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	30.721.221.254	31.587.544.489
2	Piutang Pendapatan Denda PBB-KB	4.122.218.865	3.694.632.049
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	68.298.990.900	65.990.244.005
4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	204.724.555.666	193.433.638.442
5	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	105.535.767.767	102.683.752.761
6	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	114.364.258.147	106.930.307.384
7	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	28.822.994.356	29.339.243.630



No	Jenis Piutang Denda Pajak	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
8	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	31.368.589.198	30.209.726.608
9	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	80.620.906.199	75.077.562.011
10	Piutang Pendapatan Denda BPHTB	197.139.276.738	53.919.732.422
	Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	865.718.779.090	692.866.383.801

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

Nilai Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp356.107.916.576,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp865.718.779.090,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tak Tertagih sebesar Rp509.610.862.514,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) berdasarkan jenis denda pajak per 31 Desember 2023 tersebut adalah sebagai berikut.

No	Jenis Pajak	Kriteria Piutang (Rp)				Jumlah Piutang Per Jenis Pajak (Rp)	Jumlah Penyisihan Piutang Per Jenis Pajak (Rp)
		Lancar (X < 1 Tahun)	Kurang Lancar (1 < X < 3 Tahun)	Diragukan (3 < X < 5 Tahun)	Macet (X > 5 Tahun)		
1	PKB	1.516.686.350	2.947.395.575	5.025.409.910	21.231.729.419	30.721.221.254	24.046.757.363
2	BBN-KB	-	-	-	-	-	-
3	PBB-KB	427.757.490	211.965.059	3.017.621.322	464.874.994	4.122.218.865	1.997.020.948
4	P A T	1.166.838.917	1.196.194.013	696.836.229	28.308.720.039	31.368.589.198	28.782.591.749
5	Hotel	4.082.831.121	9.195.510.067	7.933.725.273	47.086.924.439	68.298.990.900	51.993.752.238
6	Restoran	16.621.035.921	25.795.063.479	28.993.393.987	133.315.062.279	204.724.555.666	150.474.370.800
7	Hiburan	3.445.121.588	7.331.979.483	3.554.082.911	91.204.583.785	105.535.767.767	93.732.048.797
8	Reklame	8.507.665.011	29.040.973.809	20.340.609.466	56.475.009.861	114.364.258.147	69.591.950.300
9	PPJ	-	-	-	-	-	-
10	Parkir	1.058.258.257	1.123.273.458	2.706.987.611	23.934.475.030	28.822.994.356	25.405.587.473
11	BPHTB	143.324.082.065	25.289.365.069	24.370.990.489	4.154.839.115	197.139.276.738	19.585.891.277
12	PBB-P2	5.665.756.246	14.421.268.487	36.006.891.053	24.526.990.413	80.620.906.199	44.000.891.569
	Total	185.816.032.966	116.552.988.499	132.646.548.251	430.703.209.374	865.718.779.090	509.610.862.514
	%	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%		
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	929.080.165	11.655.298.850	66.323.274.125	430.703.209.374	509.610.862.514	-
	NRV Piutang	184.886.952.801	104.897.689.649	66.323.274.126	-	356.107.916.576	

8) Piutang Pendapatan Denda Retribusi

Piutang Pendapatan Denda Retribusi adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah setelah jatuh tempo yang bersumber dari pendapatan denda retribusi jasa umum, pendapatan denda retribusi jasa usaha, dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu. Piutang Pendapatan Denda Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp17.821.739.466,00 dan Rp17.531.173.998,00 dengan rincian sebagai berikut.



No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.049.823.841	1.184.987.170
2	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	16.129.398.947	15.942.261.652
3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	642.516.678	403.925.176
	Jumlah	17.821.739.466	17.531.173.998

Penjelasan secara lebih rinci atas piutang pendapatan denda retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.049.823.841,00 terdapat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp1.035.375.906,00, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp4.467.707,00 dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian sebesar Rp9.980.228,00.

b) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp16.129.398.947,00 terdapat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp15.025.107.073,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp2.630.831,00, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar Rp931.113.312,00, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp167.551.926,00, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp538.105,00 dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian sebesar Rp2.457.700,00.

c) Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp642.516.678,00 terdapat di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp401.123.166,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp241.393.512,00.

Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Pendapatan Denda Retribusi per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp196.981.413,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp17.821.739.466,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih sebesar Rp17.624.758.053,00.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) berdasarkan denda retribusi per 31 Desember 2023 tersebut adalah sebagai berikut.



No	Uraian	Kriteria Piutang (Rp)				Jumlah Piutang Denda Retribusi (Rp)
		Lancar (X < 1 Tahun)	Kurang Lancar (1 < X < 3 Tahun)	Diragukan (3 < X < 5 Tahun)	Macet (X > 5 Tahun)	
1	Denda Retribusi	39.435.618	15.246.861	288.041.596	17.479.015.391	17.821.739.466
	Total	39.435.618	15.246.861	288.041.596	17.479.015.391	17.821.739.466
	%	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	197.178	1.524.686	144.020.798	17.479.015.391	17.624.758.053
	NRV Piutang	39.238.440	13.722.175	144.020.798	0	196.981.413

9) Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Piutang Pendapatan dari Pengembalian merupakan piutang yang timbul karena belum diterimanya nilai pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja tahun berjalan dan telah disetorkan pada tahun berikutnya. Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.431.747.538,00 dan Rp23.923.877.879,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian sebesar Rp4.879.387.697,00 atas kelebihan pembayaran subsidi pangan murah PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp2.804.912.869,00 dan kelebihan pembayaran subsidi pangan murah PT Dharma Jaya Rp2.074.474.828,00.
- b) Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.365.034.431,00 terdiri atas:
 1. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 3 di KS. Tubun - Gedung sebesar Rp1.218.253.000,00;
 2. kekurangan volume aset atas pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Nagrak sebesar Rp286.698.950,00;
 3. kekurangan volume aset atas pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Rawa Bebek Rp274.771.700,00;
 4. kekurangan volume aset atas pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Rorotan IV sebesar Rp248.672.200,00;
 5. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 3 di KS. Tubun - Kawasan sebesar Rp180.561.900,00;
 6. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 2 di Tipar Cakung - Kawasan sebesar Rp78.999.630,00;
 7. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun 2 di Tipar Cakung - Gedung sebesar Rp54.672.951,00, dan
 8. kekurangan volume atas pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Pulo Jahe sebesar Rp22.404.100,00.



- c) Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi sebesar Rp1.981.887.696,00 terdiri atas:
1. belanja barang atas pelaksanaan kegiatan Pelatihan Mengemudi SIM A yang tidak sesuai ketentuan di wilayah Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi - Jaksel sebesar Rp609.871.560,00;
 2. belanja barang atas pelaksanaan kegiatan Pelatihan Mengemudi SIM A yang tidak sesuai ketentuan di wilayah Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi - Jaktim sebesar Rp609.871.560,00;
 3. belanja barang atas pelaksanaan kegiatan Pelatihan Mengemudi SIM A yang tidak sesuai ketentuan di Wilayah Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi - Jakbar sebesar Rp548.884.404,00;
 4. kekurangan volume aset atas Pembangunan Gedung Kantor Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Pusat sebesar Rp.139.479.441,00;
 5. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Lapangan PPKD Jakarta Timur sebesar Rp63.053.600,00; dan
 6. kekurangan volume atas hasil pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Disnakertransgi sebesar Rp10.727.131,00.
- d) Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.967.662.159,00 terdiri atas:
1. kekurangan volume aset atas pekerjaan Rehabilitasi Gedung RSUD Tarakan sebesar Rp604.075.473,00;
 2. pembayaran remunerasi PNS RSUD Budhi Asih yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp549.118.883,00;
 3. pembayaran remunerasi PNS RSUD Tebet yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp190.608.920,00;
 4. pembayaran remunerasi PNS RSUD Tarakan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp107.096.035,00;
 5. kekurangan volume berdasarkan atas pekerjaan Pemeliharaan Gedung RSUD Tarakan sebesar Rp101.221.959,00;
 6. kekurangan volume aset atas pekerjaan renovasi ruang IGD pada RSUD Cengkareng sebesar Rp95.139.657,00
 7. pembayaran remunerasi PLT RSKD Duren Sawit yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp85.481.599,00;
 8. pembayaran remunerasi PNS RSUD Kramat Jati yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp60.060.712,00;
 9. Kelebihan pembayaran THR dan Gaji 13 RSUD Kramat Jati sebesar Rp48.830.734,00;



10. pembayaran remunerasi PNS RSUD Cengkareng yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp42.708.340,00;
 11. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Gedung RSUD Pasar Minggu sebesar Rp34.503.920,00;
 12. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Gedung RSKD Duren Sawit sebesar Rp15.771.170,00;
 13. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Gedung RSUD Budhi Asih sebesar Rp11.883.455,00;
 14. kelebihan pembayaran Belanja Obat-obatan RSUD Cipayung sebesar Rp5.663.644,00;
 15. kekurangan volume atas pekerjaan Pemasangan Vinyl pada RSUD Pasar Rebo sebesar Rp5.334.600,00;
 16. pembayaran remunerasi PNS RSUD Cilincing yang tidak sesuai ketentuan berdasarkan sebesar Rp3.228.449,00;
 17. kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Sunda Plafon) dan pengecatan dinding pada RSUD Pasar Rebo sebesar Rp2.742.100,00;
 18. kelebihan pembayaran Belanja Obat-obatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu sebesar Rp2.258.304,00; dan
 19. kelebihan pembayaran Belanja Obat-obatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Gambir - Jakpus sebesar Rp1.934.203,00.
- e) Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.002.946.177,00 terdiri atas:
1. kekurangan volume aset atas pekerjaan pada Gedung Abdul Muis sebesar Rp404.942.120,00;
 2. kekurangan volume aset atas pekerjaan pada UPPPD Cempaka Putih sebesar Rp350.894.230,00; dan
 3. kekurangan volume aset atas pekerjaan pada Gedung UPPPD Kramat Jati dan Pasar Rebo sebesar Rp247.109.827,00.
- f) Piutang Pendapatan dari Pengembalian lainnya pada 40 PD/UPD sebesar Rp4.234.829.378,00.

10) Piutang BLUD

Piutang BLUD adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD, Pendapatan Hibah BLUD, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD, dan Pendapatan Lain-Lain BLUD yang sah. Piutang BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp414.630.180.236,00 dan Rp424.333.700.559,00. Rincian saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.



Tabel 5.33
Piutang BLUD
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Piutang Jasa Layanan Umum BLUD, terdiri dari:	381.034.672.279	418.413.792.756
a.	Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa	381.034.672.279	418.413.792.756
	Pusat Kesehatan Masyarakat	5.075.943.970	2.634.932.310
	RSUD/RSKD	370.652.952.005	385.869.855.485
	Laboratorium Kesehatan Daerah	282.621.000	518.250.000
	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	12.650.000	0
	Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
	Unit Pengelola Perparkiran	721.254.452	721.254.452
	Unit Pengelola Kawasan Pulogadung	4.195.265.340	28.575.514.997
b.	Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta (neto)	0	0
	Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	271.278.000	446.005.228
	Eliminasi Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	(271.278.000)	(446.005.228)
2	Piutang Hasil Kerjasama BLUD, terdiri dari:	31.553.049.422	4.981.374.258
a.	RSUD Pademangan	0	2.795.829
b.	RSUD Tanjung Priok	800.000	0
c.	RSU Adhyaksa	250.000	5.500.000
d.	RSUD Koja	550.263.352	119.137.500
e.	RSUD Tarakan	2.219.962.242	2.251.608.179
f.	RSUD Cengkareng	728.658.325	938.705.325
g.	RSUD Budhi Asih	22.400.000	4.800.000
h.	RSUD Pasar Minggu	225.532.000	0
i.	Puskesmas Pasar Minggu	680.000	0
j.	Puskesmas Pasar Rebo	2.700.000	0
k.	Unit Pengelola Perparkiran	1.570.103.645	1.658.827.425
l.	Unit Pengelola Kawasan Pulogadung	24.341.578.000	0
m.	Unit Pengelola Sampah Terpadu	1.890.121.858	0
3	Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari:	2.042.458.535	938.533.545
	RSUD/RSKD	317.641.168	335.579.314
	Puskesmas	41.152.910	602.954.231
	Unit Pengelola Kawasan Pulogadung	1.683.664.457	0
	Jumlah	414.630.180.236	424.333.700.559

a) Piutang Jasa Layanan Umum BLUD

1. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa

i. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Kesehatan Masyarakat

Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah piutang pelayanan kesehatan



Puskesmas terhadap BPJS, Askes, KB, dan sebagainya. Saldo Piutang BLUD Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.075.943.970,00 dan Rp2.634.932.310,00.

Saldo Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.075.943.970,00 terdiri dari:

- i) Piutang BPJS sebesar Rp5.009.942.961,00; dan
- ii) Piutang KB sebesar Rp66.001.009,00.

Piutang BPJS Puskesmas

Saldo piutang layanan kesehatan Puskesmas terhadap BPJS per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.009.942.961,00 dicatat berdasarkan Berita Acara Verifikasi yang terbit sampai dengan 26 April 2024 untuk pelayanan tahun 2023 dengan penjelasan mutasi sebagai berikut.

	Uraian	Jumlah (Rp)
(a)	Saldo awal piutang Tahun 2022 <i>audited</i>	2.568.841.301
	Mutasi Kurang:	
(b)	- Penerimaan Pembayaran atas piutang pelayanan Tahun 2022 dan tahun sebelumnya yang telah diterima selama Tahun 2023	2.546.701.301
(c)	Saldo Piutang Tahun 2022 setelah koreksi dan pembayaran (d= a+b-c)	22.140.000
	Mutasi tambah:	
(d)	- Jumlah klaim layanan kesehatan periode 2023 hasil verifikasi BPJS atas klaim yang diajukan	26.543.748.473
	Mutasi Kurang:	
(e)	- Pembayaran klaim dari BPJS per 31 Desember 2023	21.555.945.512
(f)	Saldo Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2023 (f= c+d-e)	5.009.942.961

Piutang BPJS per 31 Desember 2023 tersebut di atas tidak termasuk nilai layanan kesehatan periode 2023 yang belum diajukan klaim ke BPJS dan klaim yang masih dalam proses verifikasi BPJS sampai dengan 31 Desember 2023.

ii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD

Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD adalah piutang pelayanan kesehatan RSUD terhadap BPJS, Kementerian Kesehatan, KB, dan lain sebagainya. Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp370.652.952.005,00 dan Rp385.869.855.485,00. Rincian saldo Piutang Jasa Hubungan



Non Istimewa RSUD per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.34
Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	81.147.611.547	79.339.641.989
2	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	77.922.180.036	64.338.204.430
3	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	22.879.548.294	24.473.451.825
4	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	11.736.984.868	59.135.564.691
5	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	33.560.210.385	41.396.285.130
6	Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit	36.042.255.464	17.226.261.941
7	Rumah Sakit Umum Adhyaksa	3.107.896.280	8.703.195.906
8	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	29.349.543.998	25.335.867.052
9	RSUD 5 wilayah kota administrasi	74.906.721.133	65.921.382.521
	Jumlah	370.652.952.005	385.869.855.485

Saldo Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa RSUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp370.652.952.005,00 terdiri dari:

- Piutang BPJS sebesar Rp255.131.747.665,00;
- Piutang Klaim Covid terhadap Kementerian Kesehatan sebesar Rp12.559.125.710,00;
- Piutang KB sebesar Rp1.775.000,00; dan
- Piutang Lainnya sebesar Rp102.960.303.630,00.

Piutang BPJS RSUD

Saldo piutang layanan kesehatan RSUD terhadap BPJS per 31 Desember 2023 sebesar Rp255.131.747.665,00 dicatat berdasarkan Berita Acara Verifikasi yang terbit sampai dengan 26 April 2024 untuk pelayanan tahun 2023 dengan penjelasan mutasi sebagai berikut.

	Uraian	Jumlah (Rp)
(a)	Saldo awal piutang Tahun 2022 <i>audited</i>	272.651.841.615
	Mutasi tambah:	
(b)	- Penambahan piutang atas koreksi Tahun 2022	101.099.430.224
	Mutasi Kurang:	
(c)	- Pengurangan piutang atas koreksi Tahun 2022	1.446.442.286
	Penerimaan Pembayaran atas piutang pelayanan Tahun 2022 dan tahun sebelumnya yang telah diterima selama Tahun 2023	372.304.829.553



	Uraian	Jumlah (Rp)
(d)	Saldo Piutang Tahun 2022 setelah koreksi dan pembayaran (d= a+b-c)	0
	Mutasi tambah:	
(e)	Jumlah klaim layanan kesehatan - periode 2023 hasil verifikasi BPJS atas klaim yang diajukan	2.054.640.624.509
	Mutasi Kurang:	
(f)	Pembayaran klaim dari BPJS per 31 Desember 2023	1.799.508.876.844
(g)	Saldo Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2023 (g= d+e-f)	255.131.747.665

Piutang BPJS per 31 Desember 2023 tersebut di atas tidak termasuk nilai layanan kesehatan periode 2023 yang belum diajukan klaim ke BPJS dan klaim yang masih dalam proses verifikasi BPJS sampai dengan 31 Desember 2023.

Piutang Klaim Covid RSUD

Saldo Piutang Klaim Covid RSUD kepada Kemenkes sebesar Rp12.559.125.710,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

	Uraian	Jumlah (Rp)
(a)	Saldo awal piutang Tahun 2022 <i>audited</i>	26.403.558.597
(b)	Mutasi tambah:	
	- Penambahan piutang atas koreksi Tahun 2022	24.532.354.500
(c)	Mutasi Kurang:	
	- Pengurangan piutang atas koreksi Tahun 2022	17.938.619.800
	Pembayaran klaim dari Kemenkes RI atas Piutang Tahun 2022 dan Tahun sebelumnya di Tahun 2023	21.317.915.897
(d)	Nilai Piutang Tahun 2022 setelah koreksi dan pembayaran (d= a+b-c)	11.679.377.400
(e)	Mutasi tambah:	
	Jumlah klaim layanan kesehatan - periode 2023 hasil verifikasi atas klaim yang diajukan	26.126.194.600
(f)	Mutasi Kurang:	
	- Pembayaran klaim dari Kemenkes RI per 31 Desember 2023	25.246.446.290
(g)	Saldo Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Desember 2023 (g= d+e-f)	12.559.125.710

iii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Laboratorium Kesehatan Daerah

Saldo Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember 2023 dan per 2022 masing-masing sebesar Rp282.621.000,00 dan Rp518.250.000,00 di antaranya adalah piutang pelayanan laboratorium di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



iv. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan

Saldo Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan per 31 Desember 2023 dan per 2022 masing-masing sebesar Rp12.650.000,00 dan Rp0,00, merupakan piutang atas jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi.

v. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda

Saldo Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda per 31 Desember 2023 dan per 2022 adalah sama yaitu sebesar Rp93.985.512,00. Saldo tersebut merupakan saldo piutang sewa tenant di BLUD UPT Stadion Lebak Bulus. Pada tahun 2015 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus dilikuidasi, selama proses pemeriksaan oleh Inspektorat pencatatan piutang disajikan sebagai piutang di Dinas Pemuda dan Olah Raga.

vi. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Pengelola Perparkiran

Saldo Piutang BLUD Unit Pengelola Perparkiran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama yaitu sebesar Rp721.254.452,00 di antaranya adalah piutang pada operator penyedia jasa parkir.

vii. Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa Unit Pengelola Kawasan Pulogadung

Saldo Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.195.265.340,00 dan Rp28.575.514.997,00. Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.35

Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Piutang Sewa SKH	4.182.228.800	3.152.796.000
2	Piutang Tanah Kavling Siap Bangun	11.596.540	11.596.540
3	Piutang Tanah Sarana Kerja dan Hunian	1.440.000	1.440.000
4	Piutang Tanah Hasil PHU dari KSO Jatinegara Baru	0	23.726.018.000
5	Piutang Pra Operasional Business Center	0	1.274.052.348
6	Piutang Partisipasi Pengembangan Wilayah	0	80.000.000



No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
7	Piutang PBB Pengusaha	0	25.712.109
8	Piutang Karyawan	0	303.900.000
	Jumlah	4.195.265.340	28.575.514.997

Piutang PHU dari KSO Jatinegara Baru merupakan saldo piutang pembagian hasil usaha atas pengembangan aset kerjasama operasi yang dilakukan BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung Provinsi DKI Jakarta dengan PT Cakra Sarana Persada untuk tanah seluas 1,5 Ha dan 0,394 Ha.

2. Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta

Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta adalah piutang antar BLUD di bawah Dinas Kesehatan. Saldo piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp271.278.000,00 dan Rp446.005.228,00. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi sehingga tidak disajikan dalam Neraca Provinsi DKI Jakarta.

b) Piutang Hasil Kerjasama BLUD

Saldo Piutang Hasil Kerjasama BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp31.553.049.422,00 dan Rp4.981.374.258,00. Rincian Piutang Hasil Kerjasama BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.36

Rincian Piutang Hasil Kerjasama BLUD
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Puskesmas Pasar Minggu	680.000	0
2	Puskesmas Pasar Rebo	2.700.000	0
3	RSUD Pasar Minggu	225.532.000	0
4	RSUD Tanjung Priok	800.000	0
5	RSU Adhyaksa	250.000	5.500.000
6	RSUD Koja	550.263.352	119.137.500
7	RSUD Tarakan	2.219.962.242	2.251.608.179
8	RSUD Cengkareng	728.658.325	938.705.325
9	RSUD Budhi Asih	22.400.000	4.800.000
10	RSUD Pademangan	0	2.795.829
11	Unit Pengelola Perpustakaan	1.570.103.645	1.658.827.425
12	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	24.341.578.000	0
13	Unit Pengelola Sampah Terpadu	1.890.121.858	0
	Jumlah	31.553.049.422	4.981.374.258



c) Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.042.458.535,00 dan Rp938.533.545,00. Saldo piutang tersebut di antaranya merupakan saldo piutang denda sebesar Rp191.711.234,00 pada RSUD Cengkareng.

Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih

Nilai Piutang BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp321.037.401.503,00 dan Rp340.356.145.334,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan piutang.

Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp93.592.778.733,00 dan Rp83.977.555.225,00. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Rincian Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD terdiri dari:	65.500.600.696	83.098.652.895
a.	Penyisihan Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa	65.500.600.696	83.098.652.895
	Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	91.050.723	65.823.993
	Penyisihan Piutang BLUD RSUD	63.097.367.080	55.154.115.641
	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	721.254.452	721.254.452
	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	1.492.685.549	27.063.473.297
	Penyisihan Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	4.194.130	0
	Penyisihan Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	63.250	0
b.	Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	1.356.391	2.182.577
	(Eliminasi Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta)	(1.356.391)	(2.182.577)
2	Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD, terdiri dari:	26.286.983.260	835.114.946
a.	RSUD Pademangan	0	13.979
b.	RSUD Tanjung Priok	4.000	0



No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
c.	RSU Adhyaksa	1.250	27.500
d.	RSUD Koja	2.751.317	3.363.750
e.	RSUD Tarakan	893.955.537	280.516.652
f.	RSUD Cengkareng	219.156.309	68.398.695
g.	RSUD Budhi Asih	112.000	24.000
h.	RSUD Pasar Minggu	1.127.660	0
i.	Puskesmas Pasar Minggu	3.400	0
j.	Puskesmas Pasar Rebo	13.500	0
k.	Unit Pengelola Perpustakaan	783.242.202	482.770.370
l.	Unit Pengelola Kawasan Pulogadung	24.341.578.000	0
m.	Unit Pengelola Sampah Terpadu	45.038.085	0
3	Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari:	1.805.194.777	43.787.384
a.	RSUD/RSKD	121.530.320	43.787.384
b.	Unit Pengelola Kawasan Pulogadung	1.683.664.457	0
	Jumlah	93.592.778.733	83.977.555.225

11) Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyetorkan pokok sewa atau kontribusi Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) ke Kas Daerah sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp26.743.584.888,00 dan Rp26.549.569.976,00.

Rincian saldo Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	19.788.879.170	19.438.329.869
2	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	6.954.705.718	7.111.240.107
	Jumlah	26.743.584.888	26.549.569.976

Mutasi Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur tersaji dalam lampiran 5.1 dan lampiran 5.2.

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Nilai Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp751.984.383,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp26.743.584.888,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang



Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tak Tertagih sebesar Rp25.991.600.505,00.

Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	166.557.301	183.992.000	124.390.957	19.313.938.912	19.788.879.170
2	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	235.218.252	42.560.000	172.250.861	6.504.676.605	6.954.705.718
	Jumlah Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan (I)	401.775.553	226.552.000	296.641.818	25.818.615.517	26.743.584.888
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tak Tertagih (I x II)	2.008.879	22.655.200	148.320.909	25.818.615.517	25.991.600.505
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	399.766.674	203.896.800	148.320.909	0	751.984.383

12) Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan yang berasal dari denda atas pelanggaran Peraturan Daerah. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.390.310.880,00 dan Rp4.094.591.130,00. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2023 merupakan Piutang Pendapatan Denda Kelebihan Debit Air Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.336.257.738,00 dan Piutang Pelanggaran atas Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp5.054.053.142,00 yang mengalami perubahan kode rekening berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019.

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Nilai Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp5.002.523.042,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp6.390.310.880,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp1.387.787.838,00.



13) Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah merupakan piutang yang berasal dari:

- Piutang hasil sewa barang milik daerah atas hak tagih pemerintah atas pemberian fasilitas/jasa kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa.
- Piutang hasil lelang titik reklame atas hak tagih pemerintah atas pemanfaatan titik reklame oleh pihak ketiga pada aset milik Pemerintah Daerah.
- Piutang hasil kerja sama daerah atas hak tagih pemerintah atas kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dalam bentuk Bangun Guna Serah (*Build, Operate, Transfer/BOT*) atau Bangun Serah Guna (*Build, Transfer, Operate/BTO*).

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp44.146.360.933,00 dan Rp24.658.706.066,00 dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
I	Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah	37.301.370.242	19.865.715.375
II	Piutang Hasil Lelang Titik Reklame	2.871.178.295	2.871.178.295
III	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	3.973.812.396	1.921.812.396
Total Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		44.146.360.933	24.658.706.066

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas atas hasil sewa barang milik daerah sebesar Rp51.597.993.179,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.4.b dan hasil kerja sama daerah sebesar Rp7.933.605.456,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.4.c, yang sudah diperhitungkan dalam penyajian piutang.

Mutasi Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah tersaji pada lampiran 5.1, lampiran 5.2, dan lampiran 5.3.

Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Nilai Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp19.640.321.312,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp44.146.360.933,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp24.506.039.621,00.

Nilai Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut.



No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah	9.656.250.792	5.236.072.721	6.556.292.651	15.852.754.078	37.301.370.242
2	Piutang Hasil Lelang Titik Reklame	0	0	0	2.871.178.295	2.871.178.295
3	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	2.052.000.000	0	0	1.921.812.396	3.973.812.396
	Jumlah Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah (I)	11.708.250.792	5.236.072.721	6.556.292.651	20.645.744.769	44.146.360.933
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah Tak Tertagih (I x II)	58.541.254	523.607.272	3.278.146.326	20.645.744.769	24.506.039.621
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	11.649.709.538	4.712.465.449	3.278.146.326	0	19.640.321.312

14) Piutang Rekomendasi HGB HPL

Piutang Rekomendasi HGB HPL merupakan piutang atas penerimaan dari pihak ketiga atas pemberian rekomendasi HGB/HPL. Rekomendasi HGB/HPL merupakan persetujuan tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk terhadap permohonan perolehan/perpanjangan dan/atau peralihan/pengoperan dan/atau penjaminan/tanggungan sesuatu hak di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan selanjutnya disingkat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan permohonan hak di atas tanah eks Desa dan tanah eks Kota Praja. Pengenaan permohonan HPL ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 217 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu Hak di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Piutang Rekomendasi HGB HPL per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp11.098.384.477,00.

Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB/HPL

Nilai Piutang Rekomendasi HGB/HPL per 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp11.037.965.852,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan piutang.

Nilai Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB/HPL per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp60.418.625,00.

15) Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah

Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya kompensasi kewajiban untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk dana/konstruksi/barang. Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp842.311.305.796,00 dan Rp952.640.141.931,00.



Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah adalah kewajiban para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) untuk membiayai dan membangun rumah susun sederhana yang dapat dikonversi dalam bentuk:

- a) Pembangunan rumah susun;
- b) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan/atau
- c) Pengadaan barang.

Pencatatan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah diukur berdasarkan nilai yang termuat dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L).

Ketentuan pemberian SP3L sebagai berikut:

- a) Sesuai Keputusan Gubernur No. 540 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan Atas Bidang Tanah Untuk Pembangunan Fisik Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyatakan bahwa pembebasan terhadap lahan dengan luas 5.000 m² atau lebih terhadap lahan yang peruntukannya sebagai hunian dan/atau terdapat hunian di lahan tersebut, maka pemohon SIPPT diwajibkan membiayai dan membangun RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersial. Ketentuan lokasi dan persyaratan penjualan RSM tersebut ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di lahan milik pemegang SIPPT maka bangunan RSM menjadi milik pemegang SIPPT.
- b) Keputusan Gubernur No. 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyatakan bahwa pemegang SIPPT yang membebaskan lahan seluas 5.000 m² atau lebih tanpa Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dikenakan sanksi berupa:
 - 1. Membiayai dan membangun sampai siap huni RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersial dengan ketentuan bahwa lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di atas lahan milik pemegang SIPPT, maka lahan dan bangunan RSM adalah milik pemegang SIPPT.
 - 2. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan yang lokasi, jenis dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.



3. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Ketentuan penyelesaian konversi kewajiban RSM mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang. Sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang pasal 9 ayat (9) maka pencatatan saldo Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah dialihkan secara bertahap ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Saldo Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah per 31 Desember 2023 sebesar Rp842.311.305.796,00 terdapat pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp79.739.410.533,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp762.571.895.263,00.

Tahun 2023 terdapat mutasi pengurangan Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah sebesar Rp110.328.836.135,00 dengan rincian pengurangan piutang pada Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp794.936.404,00 dikarenakan adanya pengalihan piutang pendapatan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas PT Lintas Cipta Development sesuai Izin Prinsip Konversi Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana No.3/C.46/31.74.10.1002.30.R-1/1/TM.12/2023 dan pengurangan piutang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp109.533.899.731,00.

Rincian Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pengembang	Persetujuan Prinsip		Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
		Tanggal	Nomor	
	Tercatat di Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup:			
1	PT Lestari Kirana Persada	16-Feb-15	174/-1.711.534	2.937.992.400
2	PT Pardhika Wisti Sarana	06-Apr-16	2149/-1.711.534	9.652.950.000



No.	Nama Pengembang	Persetujuan Prinsip		Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
		Tanggal	Nomor	
3	PT Aryakencana Semesta	13-Jan-17	32/-1.711.534	36.106.425.000
4	PT Sedayu Sejahtera Abadi	27-Jan-17	27/-1.711.534	24.059.448.933
5	PT Kode Sukses Sejahtera	21-Jul-17	1717/-1.711.534	6.982.594.200
Jumlah				79.739.410.533
Tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:				
1	PT Almaron Perkasa	30-Jan-20	42/-1.796.3	4.326.363.603
2	PT Adhi Karya (Persero) TBK	01-Sep-20	3/C.46/31.75.09.1001.02.022.R.9/1/-1.711.32/2020	4.611.946.133
3	PT Karyagraha Nusantara	02-Sep-20	4/C.46/31.74.03.1005.04.015.K.1.a.b/1/-1.711.32/2020	461.701.844
4	PT Prakarsa Semesta Alam	04-Sep-20	7/C.46/31.74.07.1010.01.015.R.7/1/-1.711.32/2020	35.875.133.400
5	PT TCP Internusa	05-Apr-21	4/C.46/31.74.09.100.06.048.R.9/1/-1.711.32/2021	7.967.607.900
6	PT Mandiri Eka Abadi	05-Apr-21	5/C.46/31.74.07.100.01.009.R.10/-1.711.32/2021	79.856.179.110
7	PT Mitra Sindo Makmur	05-Apr-21	6/C.46/31.75.06.100.09.001.R.7.b/1/-1.711.32/2021	124.841.306.880
8	PT Aruna Kirana	05-Apr-21	7/C.46/31.75.06.100.09.001.R.7.b/1/-1.711.32/2021	39.069.702.000
9	PT Global Budi Perkasa	03-Mei-21	9/C.46/31.73.01.100.01.008.R.10/1/-1.711.32/2021	22.491.838.178
10	PT Karyabangun	28-Mei-21	11/C.46/31.74.02.108.03.049.K.1.a.b/1/-1.711.32/2021	3.700.559.263
11	Greenwood Sejahtera, PT	21-Oct-21	15/C.46/31.71.07.1003.04.005.K.1.a.b/1/-1.711.32/2021	42.260.447.250
12	Pondok Indah Land, PT	21/10/2021	14/C.46/31.73.08.1006.02.004.K.1.a.b/1/-1.711.32/2021	14.533.533.600
13	Sdr/i Rahmad Abadi dan Melania Maria Theresia Merlina	31/12/2021	18/C.46/31.71.07.1003.04.005.K.1.a.b/1/-1.711.32/2021	4.383.946.263
14	PT Astra Modern Land	01/12/2022	2/C.46/31.75.06.1004.06.001.R.4.b/1/-1.711.32/2022	220.376.557.200
15	PT Trimitra Multi Sukses Selaras	01/12/2022	1/C.46/31.71.05.1001.12.003.K.1.a.b/1/-1.711.32/2022	45.600.926.760
16	PT Perkasa Internusa Mandiri	13/09/2022	4/C.46/31.72.05.1003.04.001.K.1.a.b/1/-1.711.32/2022	10.040.274.886
17	PT Menara Sinar Terang	13/10/2022	5/C.46/31.73.06.1001.05.019.C.1/1/-1.711.32/2022	7.010.250.000
18	PT Citra Mas Pentama	13/10/2022	6/C.46/31.73.06.1005.03.007.K.1/-1.711.32/2022	32.777.831.064
19	PT Citra Adyapataka	13/10/2022	7/C.46/31.73.06.1002.09.012.R.4/1/-1.711.32/2022	15.157.754.880
20	PT Teras Laras	13/10/2022	8/C.46/31.74.06.1001.04.009.R.4/1/-1.711.32/2022	3.204.182.610
21	PT Aplikanusa Lintasarta	13/10/2022	9/C.46/31.74.06.1001.01.001.K.1.b/1/-1.711.32/2022	4.849.564.590
22	PT Metropolitan Kentjana	13/10/2022	10/C.46/31.74.10.1002.01.010.R.6.b/1/-1.711.32/2022	2.213.527.500
23	PT Metropolitan Kentjana	13/10/2022	11/C.46/31.74.05.1002.01.017.R.4/1/-1.711.32/2022	1.676.307.984
24	PT. Kencana Indah Sejahtera	13/10/2022	12/C.46/31.72.06.1002.02.017.R.6/1/-1.711.32/2022	7.742.493.000
25	PT Astra Internasional	13/10/2022	13/C.46/31.75.04.1007.02.021.R.6/1/-1.711.32/2022	4.407.518.700
26	PT TCP Internusa	21/11/2023	1/C.46/31.74.09.1005.24.R-1/1/TM.12/2023	11.763.675.000
27	PT Samadista Karya	27/12/2023	4/C.46/31.74.06.1002.K-1.b/1/TM.12/2023	9.277.048.980
28	PT Ramayana Lestari Sentosa	21/11/2023	2/C.46/31.75.09.1002.35.K-3/1/TM.12/2023	1.298.780.280



No.	Nama Pengembang	Persetujuan Prinsip		Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
		Tanggal	Nomor	
29	PT Lintas Cipta Development	21/11/2023	3/C.46/31.74.10.1002.30.R-1/1/TM.12/2023	794.936.405
Jumlah				762.571.895.263
Jumlah Piutang				842.311.305.796

Penyisihan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah Tak Tertagih

Nilai Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp517.482.617.509,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp842.311.305.796,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp324.828.688.287,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama SKPD Pengampu	Nilai Piutang per 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)	Piutang Neto (NAV) (Rp)
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)		
1	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	79.739.410.533	0	0	0	79.739.410.533	79.739.410.533	0
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	762.571.895.263	111.697.521	31.384.020.868	212.798.622.961	794.936.404	245.089.277.754	517.482.617.509
Jumlah		842.311.305.796	111.697.521	31.384.020.868	212.798.622.961	80.534.346.937	324.828.688.287	517.482.617.509

Potensi SIPPT/IPPT/IPPR yang Dikenakan Kewajiban RSM/S

Selain nilai piutang di atas, terdapat potensi SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban membiayai dan membangun RSM/S. Pada 20 Maret 2024 telah dilakukan rekonsiliasi data yang dihitung berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi SIPPT/IPPT tanggal 5 Mei 2023. Rincian potensi SIPPT/IPPT/IPPR s.d 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
Jumlah potensi pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S per 31 Desember 2022 berdasarkan CaLK LKPD Tahun Anggaran 2022		480
A.Mutasi Tambah		
1	SIPPT/IPPT/IPPR yang terbit tahun 2023 dikenakan kewajiban RSM/S	0
Jumlah Mutasi Tambah		0
B.Mutasi Kurang		
1	SIPPT/IPPT/IPPR yang memperoleh pembebasan sanksi SP3L atau kewajiban RSM/S	1
2	SIPPT/IPPT/IPPR yang penerbitannya guna penyertifikatan lahan	25
3	SIPPT/IPPT/IPPR yang telah memenuhi kewajiban RSM/S melalui mekanisme pembangunan rumah susun	22
4	SIPPT/IPPT/IPPR yang telah menyelesaikan pembangunan PSU sesuai Pergub 112/2019 dan Pergub 78/2020 sebagai konversi kewajiban RSM/S namun masih tercatat sebagai potensi	7
Jumlah Mutasi Kurang		55
Total Potensi SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban membiayai dan membangun RSM/S s.d 31 Desember 2023		425



Rincian SIPPT/IPPT/IPPR yang dikenakan kewajiban RSM/S per Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang diuraikan sebagai berikut:

No	Wilayah	Kewajiban Pemegang SIPPT/IPPT/IPPR							
		Kepgub 540/1990		Kepgub 640/1992		Kepgub 540/1990 & Kepgub 640/1992		Total	
		Jumlah	Luas (m2)	Jumlah	Luas (m2)	Jumlah	Luas (m2)	Jumlah	Luas (m2)
1	Jakarta Pusat	15	72.816	17	80.857	6	37.897	38	191.570
2	Jakarta Utara	15	291.385	53	306.484	13	229.915	81	827.783
3	Jakarta Barat	26	651.106	61	547.433	12	367.252	99	1.565.791
4	Jakarta Selatan	47	243.196	72	265.165	15	110.881	134	619.242
5	Jakarta Timur	14	358.275	52	650.418	6	151.834	72	1.160.526
6	Kepulauan Seribu	-	-	1	3.231	-	-	1	3.231
	Jumlah	117	1.616.778	256	1.853.588	52	897.779	425	4.368.143

Nilai potensi tersebut masih terus dilakukan pembaruan, dengan kriteria antara lain:

- SIPPT/IPPT/IPPR yang telah menyelesaikan kewajiban melalui mekanisme pembangunan rumah susun;
- SIPPT/IPPT/IPPR yang telah menyelesaikan kewajiban melalui mekanisme konversi berupa pembangunan fasilitas publik; dan
- SIPPT/IPPT/IPPR yang memperoleh pengecualian dari kewajiban RSM/S.

16) Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN

Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN merupakan hibah aset kredit Eks BPPN pada tahun 2003 dengan nilai Rp205.509.066.573,00 sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Saldo Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 atas pokok piutang adalah sebesar Rp41.923.253.432,00 dan Rp41.939.812.481,00.

Total hasil tagihan eks BPPN yang diterima dari tahun 2005 sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp165.376.057.868,00 yang telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah. Sampai dengan tahun 2023 Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN yang telah digunakan sebagai menambah modal PT Bank DKI Jakarta adalah sebesar Rp163.201.856.750,00 dan sisanya sebesar Rp2.174.201.118,00 masih terdapat pada Kas Daerah (belum digunakan sebagai penambah modal PT Bank DKI Jakarta).

Penyisihan Piutang Hasil Tagih Tak Tertagih

Nilai Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net



Realizable Value) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp41.923.253.432,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp41.923.253.432,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN	0	0	0	41.923.253.432	41.923.253.432
	Jumlah Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN (I)	0	0	0	41.923.253.432	41.923.253.432
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN Tak Tertagih (I x II) 2023	0	0	0	41.923.253.432	41.923.253.432
	Nilai Piutang Neto 2023	0	0	0	0	0

17) Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun

Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun adalah piutang yang timbul karena belum diterimanya pembayaran sarana dan prasarana fasilitas rumah susun berupa penyediaan air dan listrik bagi para penghuni. Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 26.444.238.419,00,00 dan Rp23.146.462.311,00. Piutang ini terdiri dari:

a) Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa

Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa adalah Piutang atas penggunaan air para penghuni rumah susun sewa yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Unit Pengelola Rumah Susun.

Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp25.517.673.358,00 dan Rp22.174.845.240,00.

Penyisihan Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa

Nilai Piutang Pembayaran Air Rusun Sewa per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp3.759.587.053,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp25.517.673.358,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp21.758.086.305,00.

b) Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa

Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa adalah Piutang atas penggunaan listrik para penghuni rumah susun sewa yang sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh Unit Pengelola Rumah Susun.



Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 926.565.061,00 dan Rp971.617.071,00.

Penyisihan Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa

Nilai Piutang Pembayaran Listrik Rusun Sewa per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp19.525.252,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp926.565.061,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp907.039.809,00.

18) Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) merupakan piutang yang timbul karena belum diterimanya pendapatan Izin Penyelenggaraan Reklame Non Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan penyelenggara reklame. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp121.230.000,00 dan Rp148.518.000,00.

Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Nilai Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp51.621.000,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp121.230.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp69.609.000,00.

19) Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bentuk disinsentif yang dikenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan yang ingin meningkatkan KLB pada daerah yang mendapat Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus (kode a) sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Dokumen sumber yang menjadi dasar pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan adalah Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai KLB selanjutnya disebut PPK-KLB.



PPK-KLB merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga untuk menyerahkan bentuk kompensasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan nilai KLB yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.

Kompensasi Pelampauan KLB diakui sebagai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB sebesar jumlah yang tercantum dalam PPK-KLB.

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB dinilai berdasarkan nilai yang tercantum dalam PPK-KLB dikurangi dengan nilai pemenuhan kewajiban kompensasi KLB yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp707.655.176.471,00 dan Rp841.629.680.623,00. Saldo Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2023 sebesar Rp707.655.176.471,00 merupakan saldo piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp841.629.680.623,00 dikurangi pemenuhan kewajiban tahun 2023 sebesar Rp133.974.504.152,00.

Rincian Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.37

Daftar Nilai Piutang Kompensasi Pelampauan
Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tanggal Perjanjian	Bentuk Kompensasi	Saldo Per 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2023
					Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
1	Grand Asia, PT	13 Oktober 2021 addendum 19 Oktober 2022	Penataan Kawasan Stasiun Jakarta Kota pada lokasi Pintu Besar Utara Area sekitar Bank Mandiri, Plaza Beos dan Halte Eksisting yang berada di kawasan Low Emission Zone (LEZ) serta transit area yang berada di sisi selatan stasiun	57.145.770.000	0	57.145.770.000	0
2	Sampoerna Land, PT	7 Juni 2016	Rumah susun 3 Tower di Daan Mogot	509.835.414.698	0	21.450.234.482	488.385.180.216
3	Singa Propertindo Haryono, PT	12 Oktober 2016 addendum 12 Juli 2018, 5 Agustus 2020	Pekerjaan tata pamer dan pembangunan pintu masuk baru disisi jl pintu besar utara	744.211.924	0	0	744.211.924



No	Uraian	Tanggal Perjanjian	Bentuk Kompensasi	Saldo Per 31 Desember 2022	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2023
					Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
4	Putragaya Wahana, PT	16 November 2016 addendum 1 Juli 2019	Rumah Susun 3 Tower di Pulo Gebang	5.287.537.440	0	0	5.287.537.440
5	Kepland Investama, PT	7 Desember 2016 addendum 20 Maret 2019 dan 28 Oktober 2022	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot	30.443.684.415	0	0	30.443.684.415
6	Mitra Pertala Perkasa, PT	7 Desember 2016	Pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kawasan Terminal Terpadu Pulo Gebang	516.317.154	0	516.317.154	0
7	PT Ambal Aqar	25 September 2020	a. Revitalisasi Waduk Setiabudi Barat dengan ruang lingkup Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi (Landscape, Pengerukan Waduk, Perkuat Tebing, Pembangunan Instalasi Pengolahan IPALD Kapasitas 30 lps, Revitalisasi Pompa Setiabudi Barat, Evaluasi Sistem Kali Cideng dan Pompa Mobile) dan Pengawasan b. Revitalisasi Kanal Banjir Barat (Segmen Stasiun Karet s.d Shangrila dan Segmen Landmark s.d Jembatan Jl HOS Cokroaminoto sepanjang 500 m d dengan ruang lingkup Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi (Landscape, Jembatan Penghubung ke Waduk Setiabudi Barat) dan Pengawasan	178.787.374.200	0	0	178.787.374.200
8	PT Cempaka Wenang Jaya	6 Oktober 2017	a. Lahan Masjid Habib Cikini beserta bangunan pendukungnya b. Renovasi Bangunan Masjid, Gereja dan Gedung Kesenian Masjid Luar Batang	58.869.370.792	0	54.862.182.516	4.007.188.276
JUMLAH				841.629.680.623	0	133.974.504.152	707.655.176.471

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Luas Bangunan) Tak Tertagih

Nilai Piutang Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp89.393.687.100,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp707.655.176.471,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp618.261.489.371,00.

Selain nilai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB Per 31 Desember 2023 sebesar Rp707.655.176.471,00 masih terdapat potensi penerimaan atas denda pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung yang melampaui batasan intensitas berupa penyerahan lahan pengganti.



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan Pengganti, bahwa setiap kegiatan pembangunan dan pemanfaatan gedung harus sesuai dengan batasan intensitas yang ditetapkan dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung yang melampaui batasan intensitas yang ditetapkan harus dilakukan pengembalian pemenuhan intensitasnya dengan cara dibongkar, atau memperluas daerah perencanaan. Apabila pengembalian intensitas dengan kedua pilihan tersebut tidak dapat dilakukan, maka pengembalian pemenuhan intensitas dapat dilakukan dengan penyerahan lahan pengganti.

Pengembalian pemenuhan intensitas melalui penyerahan lahan pengganti ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan disetujui oleh Gubernur. Setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) menetapkan luas pelampauan intensitas dalam satuan angka luasan meter persegi. Angka luasan tersebut mencakup pelampauan intensitas secara keseluruhan dari unsur intensitas bangunan yang terdiri dari pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), pelampauan Koefisien Tanah Bangunan (KTB), dan kekurangan Koefisien Dasar Hijau (KDH).

Sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 24 pengembang dari 23 bangunan dikenakan sanksi pengembalian pemenuhan intensitas melalui penyerahan lahan pengganti dengan hasil kajian nilai kesetaraan sebesar Rp184.717.458.370,00 dan kesetaraan luas sebesar 139.424,805 m² yang telah dihitung oleh Dinas CKTRP, di mana terdapat 2 pengembang dalam proses melengkapi dokumen administrasi lahan pengganti. Pengenaan tersebut berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Gubernur (Rapim) Tahap I dengan pertimbangan dari Pimpinan BKPRD dan disetujui oleh Gubernur untuk pengembalian intensitas melalui penyediaan lahan pengganti dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.38

Rincian Pengembang yang Dikenakan Penyerahan
Lahan Pengganti s.d 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Pengembang	Lokasi Bangunan	Nilai Pelampauan Intensitas (Rp)	Nilai Lahan Pengganti (Rp)	Luas Pelampauan Intensitas (m2)	Luas Lahan Pengganti (m2)	Status
1	PT Nusa Kirana (Kirana Two)	Jln Boulevard Timur 88 Pegangsaan Dua, Kelapa	22.541.428.420	27.464.892.000			Telah terbit Persetujuan Prinsip Nomor 344/-1.711 tanggal 17 September 2020



No	Pengembang	Lokasi Bangunan	Nilai Pelampauan Intensitas (Rp)	Nilai Lahan Pengganti (Rp)	Luas Pelampauan Intensitas (m2)	Luas Lahan Pengganti (m2)	Status
		Gading, Jakarta Utara					
2	Ka Tjin dan Poniman Asnim (Vittoria Residence)	Jalan Daan Mogot Km. 13 Rawa Buaya	9.471.390.000	15.453.935.000			Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 656/TM.12.12 tanggal 14 Oktober 2022
3	PT Adhi Karya (Grandhika Hotel)	Jalan Iskandarsyah Raya No. 65 Melawai Kebayoran Baru	20.025.810.000	20.265.290.000			Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 260/-1.711.31 tanggal 9 Juni 2021
4	PT Sedayu Sejahtera Abadi (Golf like Residence)	Jalan Lingkar Luar Barat/Kapuk Kamal	14.530.541.490	14.540.329.000			Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 233/-TM.12.12 tanggal 20 Mei 2022
5	PT Jakarta Propertindo (Aston Pluit)	Jalan Pluit Selatan, Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	45.143.042.500	45.913.508.000			Posisi Kajian telah selesai tgl. 21 Desember 2023 dari DCKTRP, sudah dikirim ke Asisten pembangunan dan lingkungan hidup. Kewajiban SIPPT sudah terdapat BAST No.1344/1.7115 tgl. 6 Oktober 2022
6	PT Sumber Kencana Graha (Green Lake City)	Jalan Kresek Raya Duri Kosambi	7.756.326.900	8.051.085.000			Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 208/-TM.12.12 tanggal 26 April 2022
7	PT Nusa Kirana (Kirana Commercial Avenue)	Jln Boulevard Kelapa Gading, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara			4.128,125	5.513	Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 344/-1.711 tanggal 17 September 2020
8	PT Citra Abadi Mandiri (Puri Mansion)	Jalan Tanah Koja, Duri Kosambi	-	-			Terdapat keberatan dari pihak PT. Citra Abadi Mandiri atas hasil rapim 1 terkait mekanisme perhitungan kesetaraan lahan pengganti sehingga mereka menunda pengusulan lahannya
9	Dr. Mohamad Abdul Gawi Attamimi	Jalan Seulawah - Kp Melayu Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur			439,85	1401	Telah terbit kajian ke 2 (tindak lanjut rapim ke 2) lahan pengganti Surat Ka. CKTRP No. e-1674/KR.00.00 tanggal 3 Oktober 2022 dan status saat ini menunggu proses persetujuan prinsip
10	Ir. Empie Jacobus Lembong (Ra Apartemen)	Jalan Intan, Kel Cilandak Barat, Kec Cilandak	7.649.415.200	7.653.485.000			Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 188/-TM.12.12 tanggal 14 April 2022
11	PT Mandara Permai/ PT. Multi Artha	PIK Kelurahan Kamal Penjaringan, Jakarta Utara			12.315,43		Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 17/-



No	Pengembang	Lokasi Bangunan	Nilai Pelampauan Intensitas (Rp)	Nilai Lahan Pengganti (Rp)	Luas Pelampauan Intensitas (m2)	Luas Lahan Pengganti (m2)	Status
	Pratama (Mall PIK Avenue)						1.711 tanggal 11 Januari 2022
12	PT Multi Artha Pratama (PIK Gold Coast)	PIK Kelurahan Kamal Penjaringan Jakarta Utara			45.259,82	68.756	Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 23/-1.711 tanggal 12 Januari 2022
13	PT Multi Artha Pratama (PIK Office)	PIK Kelurahan Kamal Penjaringan Jakarta Utara			11.106,86		Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 24/-1.711 tanggal 12 Januari 2022
14	PT Arya Kencana Semesta (Taman Anggrek Apartemen)	Kelurahan Tanjung Duren dan Duri Kosambi, Grogol Petamburan			24.606,12	31.377	Telah terbit Persetujuan Prinsip Nomor 62/-1.711.31 tgl 11 Februari 2020
15	PT Kencana Unggul Sukses (relokasi kewajiban)	Jalan Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara	-	-			Pihak PT KUS mengajukan revisi SIPPT No. 2127/-1.711.534 tanggal 17 September 2010 namun ditolak oleh Gubernur untuk review ulang oleh Dinas DCKTRP, berkaitan hal tersebut mempengaruhi proses penyerahan lahan pengganti karena potensi perubahan luasan 1 angka pelampauan intensitas sehingga status saat ini menunggu hasil arahan terhadap kajian ulang revisi SIPPT tersebut
16	PT Kencana Unggul Sukses (Green Bay Pluit)	Jalan Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara	-	-			
17	PT Makmur Jaya Serasi (MOI)	Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara			41.568,60	41.591	Telah terbit kajian usulan lahan pengganti Surat Ka. CKTRP No. e-1620/KR.00.00 tanggal 27 September 2022 dan status saat ini menunggu proses pembahasan pada Rapim BKPRD
18	PT. Integraha Eka Makmur (The Pakubuwono Menteng)	Jalan KH Wahid Hasyim /JI KH Agus Salim, Kebon Sirih, Kec Menteng, Kota Adm Jakarta Pusat	15.722.501.850	16.646.175.000			Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 505/-1.711.53 tanggal 10 November 2021
19	PT. Sainath Realindo (Sainath Tower)	Jl. Selangit Blok B-9 No. 7, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat	5.152.648.350	5.166.330.000			Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 649/TM.12.12 tanggal 14 Oktober 2022
20	PT. Kesaton Graha Sentosa (Hotel Neo Puri)	Jl. Raya Kembangan No. 8, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan	5.740.860.500	5.742.065.000			Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 397/-1.711 tanggal 14 September 2021



No	Pengembang	Lokasi Bangunan	Nilai Pelampauan Intensitas (Rp)	Nilai Lahan Pengganti (Rp)	Luas Pelampauan Intensitas (m2)	Luas Lahan Pengganti (m2)	Status
		Kembangan, Jakarta Barat					
21	Ir Mohamad Arif (Office 88)	Jl Jatinegara Timur No.88, Kel Bali Mester, Kec Jatinegara Jak Tim	10.339.298.750	10.432.850.000			Telah terbit Persetujuan Prinsip Gubernur No. 398/-1.711 tanggal 14 September 2021
22	PT. Prodia Widyahusada, Tbk (Prodia Tower)	Jl. Kramat Raya No. 150, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen Jakarta Pusat	11.305.023.800	11.463.254.000			Telah terbit kajian usulan lahan pengganti Surat Ka. CKTRP No. e-1861/KR.00.00 tanggal 28 Oktober 2022 dan status saat ini menunggu proses pembahasan pada Rapim BKPRD
23	PT. Satwika Permai Indah (Paradise Mansion)	Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat	-	-			1. Telah dilaksanakan survei lapangan dan saat ini sedang menunggu kelengkapan dokumen (IRK, surat keterangan bebas sengketa, surat keterangan NJOP tahun berjalan) 2. Keppub NJOP 2023 belum terbit
24	PT. Prima Sarana Pribadi (GHJ Suite)	Jl. tanah abang III No. 18 RT 002 RW. 003 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat	9.339.170.610	9.344.230.000			Posisi Kajian telah selesai tgl. 18 Desember 2023 dari DCKTRP, sudah dikirim ke Asisten pembangunan dan lingkungan hidup
Total			184.717.458.370	198.137.428.000	139.424,805	148.638	

Sejak Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan Pengganti diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat Berita Acara Serah Terima (BAST) Lahan Pengganti dengan rincian sebagai berikut.

No	No. BAST	Tanggal BAST	Pengembang	Nomor Persetujuan Prinsip	Alamat	Luas	Nilai (Rp)
1	2746/-1.711.32	11 September 2019	PT. Simprug Mahkota Indah	757/-1.785.55	Jalan Kramat 1	670 m ²	15.827.410.000
2	3271/-1.711	30 Oktober 2019	Pengurus Gereja dan Dana Papa (PDGP) Dewan Paroki Gereja Santo Andreas	1362/-1.711.534	Jalan Jaya 25 RT 06 RW 10	7.080 m ²	18.691.200.000
3	3272/-1.711	30 Oktober 2019	PT. Grha Satu Enam Lima	862/-1.711	Jalan Belimbing I / Jalan Yaperjasa	917 m ²	5.284.671.000
4	3272/-1.711	30 Oktober 2019	PT. Grha Satu Enam Lima	862/-1.711	Jalan Batu Nomor 50 RT 013 RW 05	1.350 m ²	6.376.050.000
5	3272/-1.711	30 Oktober 2019	PT. Grha Satu Enam Lima	862/-1.711	Jalan Mertilang RT 07 RW 01	3.311 m ²	16.869.545.000
6	3273/-1.711	30 Oktober 2019	PT. Grha Satu Enam Lima	861/-1.711.534	Jalan M. Kahfi II	1.848 m ²	4.878.720.000



No	No. BAST	Tanggal BAST	Pengembang	Nomor Persetujuan Prinsip	Alamat	Luas	Nilai (Rp)
7	3273/-1.711	30 Oktober 2019	PT. Grha Satu Enam Lima	861/-1.711.534	Jalan Sirsak RT 08 RW 07	703 m ²	2.920.965.000
8	3574/-1.711	21 November 2019	PT. Grage Trimitra Usaha	900/-1.711.534	Jalan Moh. Kahfi II / Jalan Sirsak	9.212 m ²	52.543.000.000
9	367/-1.711	19 Februari 2020	PT. Arya Kencana Semesta	62/-1.711.31	Jalan H. Aseni Raya	31.015 m ²	67.488.640.000
10	1621/-1.711	7 Juli 2021	PT Nusa Kirana (Kirana Two)	344/-1.711	Jalan Kampung Rorotan, Kec. Cilincing, Jakarta Utara	21.558 m ²	30.526.128.000
11	1491/-1.711	14 Juni 2022	PT Adhi Karya (Grandhika Hotel)	260/-1.711.31	Jalan M. Kahfi Jagakarsa	2.978 m ²	22.200.990.000
12	1730/TM.12.12	28 Juni 2022	PT Sedayu Sejahtera Abadi (Golf like Residence)	233/TM.12.12	Komplek Perumahan Taman Palem Lestari, Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	820 m ² 303 m ²	14.540.329.000
13	1729/TM.12.12	28 Juni 2022	PT Sumber Kencana Graha (Green Lake City)	208/TM.12.12	Jalan Chrisant, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	2.323 m ²	8.927.289.000
14	469/-076.26	25 Februari 2022	PT Mandara Permai (Mall PIK Avenue)	SK Gubernur Nomor 17/-1.711	Jalan Sungai Kendal, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	12.315,43 m ²	17.438.648.880
15	469/-076.26	25 Februari 2022	PT Multi Artha Pratama (PIK Gold Coast)	SK Gubernur Nomor 23/-1.711	Jalan Sungai Kendal, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	45.334 m ²	63.573.713.040
16	469/-076.26	25 Februari 2022	PT Multi Artha Pratama (PIK Office)	SK Gubernur Nomor 23/-1.711	Jalan Sungai Kendal, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	11.107 m ²	15.727.313.760
17	367/-1.711	19-02-2020	PT Arya Kencana Semesta (Taman Anggrek Apartemen)	62/-1.711.31	Jalan H. Aseni Raya, Kelurahan Semanan dan Duri Kosambi, Kecamatan Kalideres dan Cengkareng	31.377 m ²	67.488.640.000
18	3156/-1.711	1 Desember 2021	PT. Integraha Eka Makmur (The Pakubuwono Menteng)	505/-1.711.53	Jl. Lenteng Agung Raya	1.365 m ²	16.646.175.000
19	3155/-1.711	1 Desember 2021	PT. Kesaton Graha Sentosa (Hotel Neo Puri)	397/-1.711	Jl. Tangkas IX Rt 010 Rw 002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan	1.127 m ²	5.742.065.000



No	No. BAST	Tanggal BAST	Pengembang	Nomor Persetujuan Prinsip	Alamat	Luas	Nilai (Rp)
20	3346/-1.711	15 Desember 2021	Ir Mohamad Arif (Office 88)	398/-1.711	Jl. Tangkas IX RT 010/02 Kelurahan Petukangan selatan, Kec Pesanggrahan Jaksel	2.030 m ²	10.342.850.000
Total						188.743,43 m²	464.034.342.680

5.5.1.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.295,00 dan Rp359.067.395.091,00. Piutang tersebut dicatat sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023. Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan Piutang Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.052	6.036.589.849
2	Penerimaan PPh Pasal 21	961	28.722.505.162
3	Penerimaan PPh PODN (Pasal 25 dan Pasal 29)	1.659	294.388.677.976
4	Bagi hasil dari Cukai Hasil Tembakau	504	45.257.504
5	Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	2.119	29.874.364.600
	Jumlah	8.295	359.067.395.091

5.5.1.1.2.5 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp374.339.155.304,00 dan Rp156.416.094.213,00 adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Piutang Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Uang Muka	229.757.096.738	118.214.382.454
2	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	406.051.698	384.050.319
3	Piutang Tunjangan DPRD	4.419.140.000	4.419.140.000
4	Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	130.297.979.742	23.822.460.000
5	Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	9.458.887.126	9.576.061.440
	Jumlah	374.339.155.304	156.416.094.213

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Uang Muka

Uang Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp229.757.096.738,00 dan Rp118.214.382.454,00. Uang Muka sebesar



Rp229.757.096.738,00 merupakan Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- a) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp194.419.335.320,00 merupakan uang muka kerja pada 2 Paket kegiatan sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Konstruksi Jaringan Pipa Air Limbah Jakarta *Sewerage Development Project Zone 1* Paket 5 (Area 2-1) sebesar Rp107.995.594.080,00 (Nindya – Modern, KSO); dan
 2. Pekerjaan Konstruksi Jaringan Pipa Air Limbah Jakarta *Sewerage Development Project Zone 1* Paket 6 (Area 2-2) sebesar Rp86.423.741.240,00 (Adhi – Utama, KSO).
- b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp35.337.761.418,00 merupakan uang muka atas kegiatan pembangunan Rumah Susun Jagakarsa, Jakarta Selatan (PT Abadi Prima Inti Karya).

2) Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga

Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp406.051.698,00 dan Rp384.050.319,00. Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 terdiri dari:

- a) kelebihan Pembayaran Pajak atas rehabilitasi gedung SMKN 64 Jakarta oleh Dinas Pendidikan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp373.147.291,00. Saldo Kelebihan Pembayaran Pajak Per 31 Desember 2020 sebesar Rp485.091.478,00 yang merupakan kelebihan pembayaran pajak uang muka kerja atas kontrak yang dibatalkan. Pada tahun 2021 terdapat kompensasi PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp111.944.187,00 maka tersisa sebesar Rp373.147.291,00 atas penyetoran PPN PT Bangun Abipraya Bennatin KSO Masa Pajak Juli 2019 yang belum dapat dikompensasi.
- b) kelebihan Pembayaran Pajak di RSUD Koja sebesar Rp32.415.693,00 yang terdiri atas kelebihan pembayaran PPN, PPh 22, dan PPh 21 atas nama CV Chandra Karya sebesar Rp9.021.203,00; kelebihan pembayaran PPN dan PPh atas nama PT Trasti Global Konverta sebesar Rp1.881.823,00; dan kelebihan pembayaran PPh 21 pegawai RSUD Koja sebesar Rp21.512.667,00.
- c) saldo rekening penerimaan BLUD di RSUD Sawah Besar yang didebet oleh PT Bank DKI tanpa pemberitahuan dan penjelasan sebesar Rp488.714,00. RSUD Sawah Besar telah bersurat ke PT Bank DKI, tetapi belum mendapatkan surat balasan ataupun tindak lanjut.



3) Piutang Tunjangan DPRD

Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama, yaitu sebesar Rp4.419.140.000,00. Piutang Tunjangan DPRD berasal dari Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan yang sudah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan tersebut, jumlah tunjangan yang harus dikembalikan seluruhnya sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 2010 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.644.500.000,00 dan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 tidak ada penyetoran atas piutang tersebut, sehingga saldo Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp4.419.140.000,00.

Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD Tak Tertagih

Nilai Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp4.419.140.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang DPRD Tak Tertagih sebesar Rp4.419.140.000,00.

4) Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta adalah piutang atas uang muka kerja (UMK) yang telah dibayarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta atas pengadaan bus pada tahun anggaran 2013 namun belum memiliki penyelesaian pekerjaan sampai dengan saat ini. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp130.297.979.742,00 dan Rp23.822.460.000,00. Adapun rincian saldo Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta tahun 2013.



Pada tahun 2013 Dinas Perhubungan melakukan 8 (delapan) paket kegiatan pengadaan bus Transjakarta dengan melakukan pembayaran UMK namun belum memiliki penyelesaian pekerjaan akibat proses hukum terkait tindak pidana korupsi, para penyedia belum melakukan pembatalan kontrak atas 8 (delapan) paket pengadaan dan hingga kini masih terdapat sengketa hukum antara instansi dan penyedia. Sebagian penyedia tersebut sudah dinyatakan pailit sehingga potensi UMK untuk tidak dikembalikan menjadi sangat tinggi.

Selama tahun berjalan, nilai UMK tidak ada pergerakan atau penerimaan pengembalian dari tahun sebelumnya. Adapun rincian dari UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta sebagai berikut.

No	Uraian Paket	Penyedia	Uang Muka (Rp)	Penerimaan Tahun 2021 (Rp)	Sisa (Rp)
1	Articulated Bus	PT Saptaguna Dayaprima	32.160.895.800	411.154.418	31.749.741.382
2	Bus Sedang				
3	Single Bus	PT Ifani Dewi	30.743.900.000	-	30.743.900.000
4	Bus Sedang				
5	Single Bus	PT Industri Kereta Api	13.752.000.000	-	13.752.000.000
6	Bus Sedang	PT Putera Adi Karyajaya	11.251.710.360	-	11.251.710.360
7	Bus Sedang	PT Adi Teknik Equipindo	11.242.968.000	-	11.242.968.000
8	Articulated Bus	PT Putriasi Utama Sari	7.735.200.000	-	7.735.200.000
			106.886.674.160	411.154.418	106.475.519.742

Dari 6 (enam) penyedia sebagaimana disebutkan di atas, terdapat 4 (empat) penyedia yang dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri, yaitu:

1. PT Saptaguna Dayaprima telah dinyatakan pailit pada tahun 2017 sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan hak pembagian harta pailit sebesar Rp411.154.418,00 pada 22 April 2021 atau hanya menerima pengembalian sebesar 1,28% dari total terpiutang melalui rekening 108-02615756 atas nama BPKD Provinsi DKI Jakarta dan diakui sebagai pengurang Uang Muka pada tahun berjalan;
2. PT Putera Adi Karyajaya telah dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tahun 2018. Berdasarkan Surat Permohonan No 3795/-193 tanggal 12 Agustus 2021, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa atas Temuan Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan



- DKI Jakarta No. 16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti;
3. PT Adi Teknik Equipindo juga telah dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tahun 2017; dan
 4. PT Ifani Dewi telah dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 329/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tahun 2024, namun hingga saat ini Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tidak menerima hasil lelang atas aset bersangkutan.

Terhadap 2 (dua) penyedia lainnya, yaitu PT Industri Kereta Api dan PT Putriasi Utama Sari, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah berupaya menagih pengembalian Uang Muka sebagai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK kepada bersangkutan.

Penyisihan UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta

Penyisihan atas UMK pada 8 (delapan) paket kegiatan Pengadaan Bus Transjakarta per 31 Desember 2023 sebesar Rp106.475.519.742,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lancar (<1 tahun/5%) (Rp)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%) (Rp)	Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%) (Rp)	Macet (diatas 5 tahun/100%) (Rp)	Jumlah (Rp)
1	PT Saptaguna Dayaprima	0	0	0	31.749.741.382	31.749.741.382
2	PT Ifani Dewi	0	0	0	30.743.900.000	30.743.900.000
3	PT Industri Kereta Api	0	0	0	13.752.000.000	13.752.000.000
4	PT Putera Adi Karyajaya	0	0	0	11.251.710.360	11.251.710.360
5	PT Adi Teknik Equipindo	0	0	0	11.242.968.000	11.242.968.000
6	PT Putriasi Utama Sari	0	0	0	7.735.200.000	7.735.200.000
	Jumlah	0	0	0	106.475.519.742	106.475.519.742

b) UMK pada kegiatan Pengadaan Bus *Single* Transjakarta Tahun 2013.

Bagian lancar tuntutan Pengembalian UMK pengadaan Transjakarta atas kegiatan Pengadaan Bus *Single* Transjakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama sebesar Rp23.822.460.000,00.

Pada tahun 2013 Dinas Perhubungan melakukan Pengadaan Bus *Single* Transjakarta dengan melakukan pembayaran UMK kepada PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Teknik Equipindo sebesar Rp12.188.880.000,00 dan Rp12.763.580.000,00. Atas pengadaan bus tersebut dilakukan pembatalan kontrak, yang mengakibatkan kewajiban pengembalian pembayaran UMK oleh kedua perusahaan tersebut yang pembayarannya secara angsuran selama lebih dari 3 tahun. Bagian lancar tuntutan



pengembalian UMK pengadaan Transjakarta merupakan piutang atas pembatalan kontrak Pengadaan Bus *Single* transjakarta Paket III dan Paket V.

Pada tahun 2022 belum terdapat pembayaran angsuran atas pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta, hal tersebut disebabkan PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Teknik Equipindo selaku pihak penyedia bus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. PT Adi Teknik Equipindo dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 6 Februari 2018, saat ini PT Adi Teknik Equipindo sudah menjalani proses lelang harta pailit yang kedua, namun mendapat gugatan dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga proses lelang masih menunggu hasil gugatan tersebut. Sedangkan PT Putera Adi Karyajaya dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 September 2018. Rincian dapat dijelaskan sebagai berikut.

No.	Uraian	Angsuran Pokok (Rp)	Jadwal Pembayaran	Pembayaran Angsuran (Rp)	Sisa Pokok Angsuran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7)
Pembatalan PT Adi Teknik Equipindo						
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000	-	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000	4.845.000.000	Piutang Lancar
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	-	6.600.000.000	Piutang Lancar
4	Angsuran 41 s.d. 42	753.580.000,00	28 Jan - 28 Maret 2019	-	753.580.000	Piutang Lancar
	Jumlah	12.763.580.000,00		565.000.000	12.198.580.000	
Pembatalan PT Putera Adi Karyajaya						
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000	-	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000	4.845.000.000	Piutang Lancar
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	-	6.600.000.000	Piutang Lancar
4	Angsuran 41	178.880.000,00	28 Jan - 28 Mar 2019	-	178.880.000	Piutang Lancar
	Jumlah	12.188.880.000,00		565.000.000	11.623.880.000	

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Penyisihan atas Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta sebesar Rp23.822.460.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Nama Perusahaan	Lancar (<1 tahun/5%) (Rp)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%) (Rp)	Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%) (Rp)	Macet (diatas 5 tahun/100%) (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PT Adi Teknik Equipindo	0	0	0	12.198.580.000	12.198.580.000
2.	PT Putera Adi Karyajaya	0	0	0	11.623.880.000	11.623.880.000
	Jumlah	0	0	0	23.822.460.000	23.822.460.000



5) Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah

Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah merupakan jumlah yang sudah jatuh tempo pembayaran atas nilai Tagihan Penjualan Angsuran dengan nilai per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.458.887.126,00 dan Rp9.576.061.440,00. Selama tahun 2023 nilai Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah berkurang sebesar Rp117.174.314,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah sebesar Rp3.701.145.379,00 yang merupakan reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran sebesar Rp1.179.976.076,00, kolektabilitas piutang sebesar Rp2.073.677.235,00, dan mutasi penambahan lainnya sebesar Rp447.492.068,00; dan
- b) mutasi kurang sebesar Rp3.818.319.693,00 yang merupakan pembayaran sebesar Rp542.350.431,00 dan mutasi pengurangan lainnya sebesar Rp3.275.969.262,00.

Pencatatan pada laporan keuangan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan secara wajar dengan membentuk penyisihan.

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Tak Tertagih

Penyisihan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp5.068.072.976,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Nama Rusun	Jumlah Unit	Lancar (Rp) (1 tahun/0,5%)	Kurang Lancar (Rp) (1 s.d 2 tahun/10%)	Diragukan (Rp) (2 s.d 5 tahun/50%)	Macet (Rp) (> 5 tahun/100%)	Jumlah (Rp)
1	Tambora III	98	14.304.056	21.329.090	0	1.041.851.223	1.077.484.369
2	Bendungan Hilir II	614	0	0	101.677.514	650.854.403	752.531.917
3	Jatibunder	40	0	0	0	69.660.003	69.660.003
4	Tanah Tinggi	428	0	0	33.067.948	11.091.132	44.159.080
5	Petamburan	600	89.081.590	861.187.236	464.719.212	629.055.754	2.044.043.792
6	Karet Tengsin II	308	404.747.577	1.978.750.102	2.007.047.051	500.230.772	4.890.775.502
7	Tebet Barat I	320	6.860.247	0	0	459.266.151	466.126.398
8	Tebet Barat II	120	0	0	0	114.106.065	114.106.065
Total		2.528	514.993.470	2.861.266.428	2.606.511.725	3.476.115.503	9.458.887.126
Penyisihan			2.574.967	286.126.643	1.303.255.863	3.476.115.503	5.068.072.976

5.5.1.1.2.6 Informasi Penting Mengenai Piutang

Selain nilai piutang yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki potensi penerimaan aset sebagai pemenuhan kewajiban dari pihak ketiga, yaitu potensi penerimaan aset atas pemenuhan kewajiban yang bersumber dari penerbitan Surat Izin Penunjukan dan Penggunaan Tanah (SIPPT). SIPPT diterbitkan sejak tahun 1971 yang diberikan kepada badan dan/atau perusahaan *real estate* dan/atau perusahaan properti dan/atau *developer* dan/atau yayasan dan/atau perorangan untuk membangun perumahan, perkantoran, perdagangan dan/atau kegiatan fisik lainnya dan/atau permohonan hak atas tanah dalam wilayah DKI Jakarta.



Terdapat 3 kelompok jenis SIPPT terkait dengan pemenuhan kewajibannya:

- a. SIPPT yang tidak mencantumkan secara jelas jenis dan luasan/besaran kewajiban penyerahan dan/atau penyediaan fasos fasum;
- b. SIPPT yang mencantumkan jenis dan luasan/besaran kewajiban penyerahan dan/atau penyediaan fasos fasum berbentuk lahan, di antaranya berupa sub zona Marga Jalan (Mjl), Penyempurna Hijau Umum (Phu), Penyempurna Hijau Taman (Pht), Prasarana Jalan (Pj), dan lain-lain; dan
- c. SIPPT hanya mencantumkan kewajiban untuk menyediakan Fasos Fasum.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Badan Pengelolaan Aset Daerah, jumlah seluruh dokumen SIPPT yang terbit dari tahun 1971 sampai dengan 2023 adalah sebanyak 3.618 dokumen SIPPT/IPPT/IPPR yang meliputi SIPPT/IPPT/IPPR Baru, Pembaharuan, Pemecahan, Penyempurnaan, Perpanjangan, Revisi, Pengalihan, dan SK Penetapan Kewajiban.

Rincian pemutakhiran data untuk keseluruhan dokumen SIPPT yang diterbitkan adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah SIPPT
A. Koreksi Terhadap Data SIPPT yang terhitung pada Laporan CaLK 2022		
1	Laporan Calk 2022	3.615
	Mutasi Tambah	
2	SIPPT Tahun 1971 - 2023 yang baru tercatat berdasarkan hasil rekonsiliasi SIPPT	3
	Subtotal Mutasi Tambah	3
	Mutasi Kurang	
3	<i>Cleansing</i> Data SIPPT 1971-2023	0
	Subtotal Mutasi Kurang	0
Total A. Hasil Koreksi		3.618
B. Penambahan Baru SIPPT Tahun 2023		
4	Dokumen SIPPT Tahun 2023	0
Total B. Penambahan Baru Tahun 2023		0
Total SIPPT yang diterbitkan s.d Tahun 2023		3.618

Pada proses rekonsiliasi, dari keseluruhan dokumen SIPPT/IPPT/IPPR yang telah diinventarisasi, selanjutnya dilakukan pengelompokan data dengan tahapan sebagai berikut:

1. pemutakhiran *database* SIPPT/IPPT/IPPR;
2. pengelompokan dokumen SIPPT/IPPT/IPPR berbasis lokasi fisik lahan;
3. pemilahan per lokasi fisik SIPPT/IPPT/IPPR yang memiliki kewajiban penyerahan lahan/tanah Fasos Fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
4. penetapan SIPPT/IPPT/IPPR Efektif, yaitu SIPPT/IPPT/IPPR hasil pemilahan berbasis lokasi dan memiliki kewajiban penyerahan lahan/tanah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



Hasil pengelompokan sebagaimana tahapan di atas, sebagai berikut:

1. pada tahap 1, dari proses pemutakhiran data tahun 2023, diperoleh 3.618 dokumen SIPPT/IPPT/IPPR yang menjadi basis data;
2. pada tahap 2, diperoleh bahwa dari 3.618 dokumen SIPPT/IPPT/IPPR terdapat 2.753 dokumen SIPPT/IPPT/IPPR yang berbasis lokasi fisik lahan;
3. pada tahap 3, diperoleh bahwa dari 2.753 SIPPT/IPPT/IPPR yang telah berbasis lokasi fisik lahan, memiliki kewajiban penyerahan lahan/tanah Fasos Fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
4. pada tahap 4, diperoleh bahwa sejumlah 1.312 SIPPT/IPPT/IPPR yang telah berbasis lokasi fisik lahan, memiliki kewajiban penyerahan lahan/tanah Fasos Fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (SIPPT/IPPT/IPPR Efektif).

Hasil pengelompokan di atas, dijabarkan dalam tabel Rincian dari SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dan Luas Kewajiban s/d Tahun 2023 per wilayah kota administrasi / kabupaten administrasi sebagai berikut.

No.	Wilayah	Dokumen SIPPT	Lokasi Fisik SIPPT	Pengelompokan SIPPT/IPPT/IPPR Efektif (1971-2023)	
				Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m ²)
1	Jakarta Pusat	493	375	126	355.064
2	Jakarta Utara	571	456	258	7.559.470
3	Jakarta Barat	715	545	293	8.731.952
4	Jakarta Selatan	1.161	809	379	2.613.076
5	Jakarta Timur	651	542	236	5.963.795
6	Kepulauan Seribu	27	26	20	1.050.318
	Jumlah	3.618	2.753	1.312	26.273.675

Dalam perhitungan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Fasos Fasum tahun selanjutnya akan dilakukan perhitungan terhadap SIPPT Efektif sebagai upaya peningkatan kualitas data SIPPT/IPPT/IPPR yang lebih akurat, efektif, dan efisien. Sampai dengan tahun 2023, jumlah SIPPT/IPPT/IPPR yang terhitung Efektif adalah sebanyak 1.312 lokasi, dengan total luas kewajiban lahan Fasos Fasum yaitu seluas 26.273.675 m². Dari jumlah kewajiban tersebut, yang telah diserahkan sebagian atau seluruhnya dan telah tercatat sebagai Aset Tetap-Fasos Fasum yaitu seluas 17.112.542 m², berasal dari 550 lokasi SIPPT/IPPT/IPPR Efektif.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan Aset Tetap – Fasos Fasum yang berasal dari pemenuhan kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya perbaikan penatausahaan Aset Tetap – Fasos Fasum melalui:

1. kegiatan rekonsiliasi secara periodik atas pemenuhan kewajiban Fasos Fasum, dengan membandingkan data lokasi SIPPT/IPPT/IPPR dengan jumlah kewajiban yang sudah diserahkan pada lokasi tersebut;



2. melakukan pengkajian dan penetapan kewajiban Fasos Fasum di antaranya terhadap SIPPT/IPPT/IPPR yang belum terdefinisi jelas jenis dan besaran/luasan kewajibannya;
3. melakukan penagihan kepada pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang belum menyelesaikan kewajibannya;
4. melakukan pemutakhiran basis data SIPPT/IPPT/IPPR, kewajiban Fasos Fasum, dan progres BAST penyerahan kewajiban Fasos Fasum; dan
5. melakukan pengembangan sistem informasi terintegrasi mulai dari penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR sampai dengan pencatatan penerimaan Aset Tetap – Fasos Fasum.

SIPPT/IPPT/IPPR Efektif yang dimaksud di dalam perhitungan CaLK ini adalah lokasi efektif dari seluruh penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR baru maupun SIPPT/IPPT/IPPR turunannya yang meliputi SIPPT/IPPT/IPPR Pembaharuan, Pemecahan, Penyempurnaan, Perpanjangan, Revisi dan Pengalihan, dan merupakan lokasi efektif yang dalam penerbitannya telah mencantumkan dan mendefinisikan jenis dan luasan/besaran kewajiban menyerahkan dan menyediakan Fasos Fasum berbentuk lahan, misalnya lahan sub zona Marga Jalan (Mjl), Penyempurna Hijau Umum (Phu), Penyempurna Hijau Taman (Pht), dan lain-lain.

Di samping itu, SIPPT/IPPT/IPPR Efektif juga termasuk surat Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan yang diterbitkan dalam rangka penetapan kembali jenis dan/atau luasan kewajiban fasos Fasum SIPPT/IPPT/IPPR yang menjadi acuan pihak Walikota dalam melakukan penagihan kewajiban Fasos Fasum kepada para pemegang SIPPT/IPPT/IPPR.

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2022, jumlah SIPPT/IPPT/IPPR Efektif yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2022 adalah 1.309 lokasi dengan total luas kewajiban penyerahan lahan fasos fasum yaitu seluas 26.125.879 m². Kemudian pada Tahun 2023 dilakukan pemutakhiran data melalui proses rekonsiliasi, dengan kesimpulan yaitu jumlah SIPPT/IPPT/IPPR Efektif adalah sebanyak 1.312 lokasi dengan jumlah luas kewajiban lahan Fasos Fasum seluruhnya yaitu seluas 26.273.675 m².

Ringkasan data SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dan Luas Kewajiban lahan Fasos Fasum adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah SIPPT Efektif	Luas Kewajiban (m ²)
A. Koreksi Terhadap Data SIPPT yang terhitung pada Laporan CaLK 2022			
1	Laporan Calk 2022	1.309	26.125.879
	Mutasi Tambah		
2	SIPPT Tahun 1971 - 2023 yang baru tercatat efektif berdasarkan hasil rekonsiliasi SIPPT	3	58.282
3	Pembaharuan Data Luasan Kewajiban SIPPT Tahun 1971-2023 hasil rekonsiliasi	0	90.996



No	Uraian	Jumlah SIPPT Efektif	Luas Kewajiban (m ²)
	Subtotal Mutasi Tambah	3	149.278
	Mutasi Kurang		
4	Pembaharuan Data Luasan Kewajiban SIPPT Tahun 1971-2023 hasil rekonsiliasi	0	1.482
5	Cleansing Data SIPPT 1971-2023 dari lokasi efektif	0	0
	Subtotal Mutasi Kurang	0	1.482
	Total A. Hasil Koreksi	1.312	26.273.675
	B. Penambahan Baru SIPPT Tahun 2023		
6	SIPPT Tahun 2023 yang menambah SIPPT Efektif	0	0
	Total B. Penambahan Baru Tahun 2023	0	0
	Total SIPPT Efektif dan Luas Kewajiban s/d 2023	1.312	26.273.675

Penjelasan atas koreksi data SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dan Luas Kewajiban lahan Fasos Fasum sebagai berikut:

- a. koreksi atas mutasi tambah SIPPT/IPPT/IPPR Efektif di mana terdapat 3 SIPPT/IPPT/IPPR tercatat Efektif, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 2 SIPPT/IPPT/IPPR tercatat Efektif karena telah ditetapkan jenis dan luasan kewajiban fasos fasumnya melalui surat Penetapan Kewajiban. Kedua SIPPT tersebut sebelumnya telah tercatat dalam master data SIPPT/IPPT/IPPR berbasis lokasi, namun berstatus Tidak Aktif (*cleansing* data pada kategori SIPPT yang kewajibannya tidak terdefinisi dengan jelas); dan
 - 2) 1 SIPPT/IPPT/IPPR yang semula masuk ke dalam kategori milik Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD tercatat Efektif karena telah menyerahkan sebagian lahan kewajiban fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- b. koreksi atas mutasi kurang dan mutasi tambah luasan kewajiban fasos fasum, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) terdapat 19 surat Penetapan Kewajiban yang diterbitkan oleh DCKTRP Provinsi DKI Jakarta yang telah memperbaharui/menetapkan kembali bentuk dan luasan kewajiban awal dan kewajiban akhir fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR; dan
 - 2) terdapat 3 dokumen IPPR yang diterbitkan oleh DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023. Dua di antaranya merupakan IPPR Penyempurnaan yang menjadi Efektif karena mencabut SIPPT/IPPT/IPPR terdahulunya, dan 1 IPPR berstatus Aktif Administratif karena merupakan IPPR Revisi (tidak diperhitungkan sebagai SIPPT/IPPT/IPPR Efektif).

Pembaruan Perhitungan SIPPT/IPPT/IPPR Efektif

Mempertimbangkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 4580/1999 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D-Iv-8125/Ee/21/1975 tanggal 20 Desember 1975 tentang



Penguasaan Perencanaan dan Peruntukan Penggunaan Tanah di Sepanjang Jalur-Jalur Jalan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta mempertimbangkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 209 Tahun 2016 tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang, maka telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pelaksanaan Rekonsiliasi yang diselenggarakan oleh Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada tanggal 20 Maret 2024 (surat undangan Nomor e-0097/KR.04.00 tanggal 15 Maret 2024) yang dihadiri oleh unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, unsur Walikota di lima Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, bahwa akan dilakukan pembaruan potensi SIPPT/IPPT/IPPR terhadap perhitungan lokasi efektif.

Pembaharuan perhitungan SIPPT/IPPT/IPPR Efektif yang telah berbasis lokasi dilakukan sebagaimana tahapan berikut:

1. mengecualikan data SIPPT yang luas lahannya kurang dari 5.000 m²;
2. mengecualikan data SIPPT/IPPT/IPPR yang kepemilikan lahan dan/atau penyelenggaraan kegiatannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD; dan
3. memutakhirkan data SIPPT/IPPT/IPPR yang telah ditetapkan kembali jenis dan luas kewajibannya melalui surat Penetapan Kewajiban dan mengakomodir IPPR yang diterbitkan oleh DPMPTSP pada tahun 2023.

Pengelompokan pada angka 2 (dua) di atas tidak dilakukan terhadap SIPPT/IPPT/IPPR milik Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD yang telah menyerahkan lahan kewajiban fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana telah dilaporkan dalam Laporan CaLK Tahun 2022.

Rincian SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dan Luas Kewajiban lahan Fasos Fasum sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Wilayah	SIPPT Efektif (1971-2023)	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m ²)
1	2	3	4
1	Jakarta Pusat	126	355.064
2	Jakarta Utara	258	7.559.470
3	Jakarta Barat	293	8.731.952
4	Jakarta Selatan	379	2.613.076
5	Jakarta Timur	236	5.963.795
6	Kepulauan Seribu	20	1.050.318
	Jumlah	1.312	26.273.675

Data 1.312 lokasi SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dengan total luas lahan kewajiban seluas 26.273.675 m² akan menjadi dasar perhitungan CaLK tahun selanjutnya.



Progres Penyelesaian Kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR

Sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima BAST kewajiban fasos fasum dari 550 lokasi SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dengan total perolehan luas lahan aset seluas 17.112.542 m², dengan rincian sebagai berikut.

No	Wilayah	SIPPT Yang Telah BAST Tahun 1971-2023	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan (m ²)
1	2	3	4
1	Jakarta Pusat	51	138.465
2	Jakarta Utara	122	5.300.198
3	Jakarta Barat	150	5.973.157
4	Jakarta Selatan	130	1.505.779
5	Jakarta Timur	92	3.987.690
6	Kepulauan Seribu	5	207.253
	Jumlah	550	17.112.542

Berdasarkan penjelasan hasil rekonsiliasi, dari persandingan antara data lokasi SIPPT/IPPT/IPPR Efektif dengan data BAST Fasos Fasum yang terbit hingga tahun 2023, diperoleh sisa kewajiban sebagai berikut.

No.	Wilayah	SIPPT Efektif (1971-2023)		BAST (1971-2023)		Sisa Kewajiban SIPPT Efektif	
		Jumlah Lokasi	Luas Lahan Kewajiban (m ²)	Jumlah Lokasi BAST	Luas Lahan (m ²)	Jumlah Lokasi	Luas Lahan (m ²)
1	2	3	4	5	7	8=3- 5	9=4-7
1	Jakarta Pusat	126	355.064	51	138.465	75	216.599
2	Jakarta Utara	258	7.559.470	122	5.300.198	136	2.259.272
3	Jakarta Barat	293	8.731.952	150	5.973.157	143	2.758.795
4	Jakarta Selatan	379	2.613.076	130	1.505.779	249	1.107.297
5	Jakarta Timur	236	5.963.795	92	3.987.690	144	1.976.105
6	Kepulauan Seribu	20	1.050.318	5	207.253	15	843.065
	Jumlah	1.312	26.273.675	550	17.112.542	762	9.161.133

Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban dari para pemegang SIPPT/IPPT/IPPR, sejak tahun 2009 sampai dengan 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR dengan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara pihak pemegang SIPPT/IPPT/IPPR dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam dokumen PPK dituangkan bentuk dan luasan kewajiban yang harus diserahkan dan/atau disediakan, serta batas waktu penyelesaian masing-masing kewajiban fasos fasum. Namun demikian, baik dokumen SIPPT/IPPT/IPPR maupun PPK tidak menyebutkan nilai dari kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR, sehingga Fasos Fasum yang berpotensi menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat diukur dan diestimasi secara andal dalam satuan rupiah tertentu, dan sangat mungkin nilainya berbeda dengan nilai pada saat dilakukan serah terima kewajiban.



Atas kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR yang belum diserahterimakan kepada Pemprov DKI Jakarta, maka kewajiban tersebut belum diakui dan dicatat sebagai Piutang pada neraca karena belum memenuhi kualifikasi pencatatan aset (belum ada nilai yang pasti). Nilai aset baru diketahui secara pasti pada saat ditandatanganinya dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai perhitungan nilai appraisal yang dicantumkan di BAST. Nilai tersebut kemudian digunakan sebagai nilai wajar atas potensi nilai pendapatan dari kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR. Di samping itu, tingkat ketertagihan atas pemenuhan kewajiban Fasos Fasum SIPPT/IPPT/IPPR mempunyai nilai ketidakpastian yang tinggi, antara lain disebabkan oleh:

- a. adanya penguasaan lahan SIPPT yang tidak tuntas;
- b. adanya pembaharuan SIPPT/IPPT/IPPR karena perubahan kepemilikan;
- c. adanya pembaharuan SIPPT/IPPT/IPPR karena habis masa berlaku;
- d. adanya perubahan kegiatan utama yang diselenggarakan di lokasi SIPPT/IPPT/IPPR, misalnya pada SIPPT/IPPT/IPPR awal kegiatan yang diselenggarakan adalah untuk hunian namun kemudian SIPPT diperbarui menjadi penyelenggaraan kegiatan bisnis/komersial;
- e. adanya fasos fasum yang dibangun tidak sesuai dengan penetapan kewajiban dalam SIPPT/IPPT/IPPR;
- f. rencana kota yang dinamis;
- g. SIPPT/IPPT/IPPR belum dimanfaatkan sesuai tujuan penerbitannya (belum ada pembangunan di lokasi);
- h. pengembang pailit atau sulit ditemukan keberadaannya; dan
- i. belum adanya sanksi yang jelas atas keterlambatan penyelesaian kewajiban fasos fasum SIPPT/IPPT/IPPR

5.5.1.1.3 Beban Dibayar Di Muka

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp501.750.677.798,00 dan Rp751.750.847.755,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Beban Barang Dibayar di Muka	198.718.344.133	243.190.739.166
2	Beban Jasa Dibayar di Muka	290.653.783.872	454.214.500.840
3	Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka	12.378.549.793	54.345.607.749
Jumlah		501.750.677.798	751.750.847.755

a. Beban Barang Dibayar di Muka

Beban Barang Dibayar di Muka sebesar Rp198.718.344.133,00 terdiri dari pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Sekda Nomor



46 Tahun 2023 tentang Pembayaran Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2023 dan pembayaran deposit BBM.

Pembayaran di muka atas pekerjaan konstruksi yang menggunakan jaminan pembayaran sesuai Surat Edaran Sekda Nomor 46 Tahun 2023 sebesar Rp147.859.285.813,00 terdapat pada:

- 1) Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp102.706.862.403,00;
- 2) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp35.788.771.444,00;
- 3) Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebesar Rp6.223.983.621,00;
- 4) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat sebesar Rp1.254.668.173,00;
- 5) Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat sebesar Rp811.307.187,00;
- 6) Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp702.602.537,00; dan
- 7) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp371.090.448,00.

Beban dibayar di muka atas deposit BBM sebesar Rp50.859.058.320,00 di antaranya terdapat pada:

- 1) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.430.561.015,00;
- 2) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat sebesar Rp4.266.754.115,00; dan
- 3) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara sebesar Rp2.686.584.874,00.

b. Beban Jasa Dibayar di Muka

Beban Jasa Dibayar di Muka sebesar Rp290.653.783.872,00 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp197.602.450.000,00. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku tuan rumah pelaksanaan Kegiatan Balap Mobil Formula E musim ke enam tahun 2020 kepada *Formula E Operation* (FEO) telah dibayarkan *commitment fee* dengan total sebesar £31.000.000,00 yang terdiri atas kewajiban untuk tahap 1 dan tahap 2 Tahun 2019 sebesar £20.000.000,00 serta kewajiban tahap 1 Tahun 2020 sebesar £11.000.000,00 sesuai kontrak jangka panjang dalam *City Host Agreement*.

Namun karena adanya pandemi Covid-19 dan penundaan pelaksanaan Formula E, PT Jakpro melakukan negosiasi dengan pihak FEO yang



menghasilkan kesepakatan Penyelenggaraan Formula E yang sebelumnya direncanakan diadakan selama 5 tahun pada tahun 2020-2024, menjadi dilaksanakan selama 3 tahun mulai 2022-2024 dengan total *commitment fee* sebesar £36.000.000,00 dan telah dibayarkan sebesar £31.000.000,00 sehingga sisa kewajiban *commitment fee* adalah sebesar £5.000.000,00 dan akan dilakukan pembayaran oleh PT Jakpro tanpa menggunakan dana APBD Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023.

Rincian ketentuan *commitment fee* Formula E adalah sebagai berikut:

Season 2021/2022 = £7.000.000,00

Season 2022/2023 = £14.000.000,00

Season 2023/2024 = £15.000.000,00

Atas terlaksananya kegiatan Formula E pada bulan Juni 2022 dan Juni 2023 maka dilakukan amortisasi terhadap Beban Jasa Dibayar di Muka sesuai dengan ketentuan biaya yang sudah ditetapkan. Total *commitment fee* yang telah dibayarkan adalah sebesar £31.000.000,00, dan pelaksanaan telah direalisasikan sebanyak dua kali pada bulan Juni 2022 dan Juni 2023 dengan jumlah £21.000.000,00 sehingga Beban Jasa Dibayar di Muka Dinas Pemuda dan Olahraga atas penyelenggaraan kegiatan Formula E per 31 Desember 2023 adalah sebesar £10.000.000,00 atau setara Rp197.602.450.000,00 (Kurs Tengah Bank Indonesia per 29 Desember 2023 sebesar Rp19.760,245). Penjelasan lebih lanjut atas penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E terdapat pada Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan;

- 2) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp47.760.688.608,00 merupakan *lisensi software*; dan
- 3) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.539.449.379,00 merupakan *lisensi software*.

c. Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka

Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka sebesar Rp12.378.549.793,00 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.026.213.332,00 merupakan beban pemeliharaan server;
- 2) Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp2.044.848.921,00 merupakan perpanjangan lisensi; dan
- 3) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp1.642.277.734,00 merupakan pekerjaan pemeliharaan konstruksi



yang pembayarannya menggunakan jaminan pembayaran sesuai Surat Edaran Sekda No. 46 Tahun 2023 tentang Pembayaran Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2023.

5.5.1.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.263.775.601.406,00 dan Rp1.483.957.714.569,00. Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan di gudang untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat/kepada pihak diluar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan pada SKPD/UKPD berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2023 dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO). Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.39
Persediaan
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Barang Pakai Habis	1.256.899.948.763	1.477.991.389.619
2	Barang Tak Habis Pakai	6.875.652.643	5.966.324.950
Jumlah		1.263.775.601.406	1.483.957.714.569

Penjelasan lebih lanjut nilai Persediaan Per 31 Desember 2023 antara lain sebagai berikut:

a. Barang Pakai Habis

Barang Pakai Habis sebesar Rp1.256.899.948.763,00 terdiri dari barang yang akan diserahkan ke luar Pemprov DKI Jakarta dan barang yang digunakan untuk operasional Pemprov DKI Jakarta, terdapat pada:

- 1) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp103.144.853.931,00, di antaranya merupakan persediaan perbekalan farmasi berupa vaksin dan obat-obatan dan persediaan untuk penanganan Covid-19;
- 2) Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp43.877.168.863,00 di antaranya cairan reagen (bahan kimia);
- 3) Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp41.330.375.356,00 merupakan peralatan (armatur) penerangan jalan umum dan pekerjaan pemeliharaan jalan yang akan diserahkan kepada instansi vertikal; dan
- 4) Barang yang digunakan untuk operasional di 743 PD/UPD sebesar Rp1.068.547.550.613,00.



b. Barang Tak Habis Pakai

Barang Tak Habis Pakai sebesar Rp6.875.652.643,00, terdapat pada:

- 1) Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp2.927.168.517,00, merupakan Pipa PVC;
- 2) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan sebesar Rp868.726.928,00, merupakan Pipa PVC;
- 3) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat sebesar Rp705.178.540,00, merupakan Pipa PVC; dan
- 4) Barang Tak Habis Pakai lainnya di 31 PD/UPD sebesar Rp2.374.578.658,00.

Pada Periode Januari – Desember 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima hibah barang-barang Persediaan sebesar Rp452.632.702.180,00, di antaranya terdapat pada:

- 1) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp395.631.667.069,00 yang di antaranya merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa vaksin, obat-obatan dan persediaan untuk penanggulangan pandemi Covid-19;
- 2) Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp31.915.217.173,00 yang di antaranya merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa *reagen viral load HIV*; dan
- 3) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp14.153.395.335,00 yang di antaranya berupa alat kontrasepsi dan non alat kontrasepsi.

Dari persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.263.775.601.406,00 termasuk persediaan berupa barang-barang *slow moving* sebesar Rp20.051.217.595,00 yang terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.255.606.629,00 dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.795.610.966,00.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2023 tidak termasuk persediaan yang sudah usang atau rusak sebesar Rp38.791.989.669,00 sebagaimana dirinci pada Lampiran 6, di antaranya berupa blanko KTP, suku cadang, alat-alat kontrasepsi, obat-obatan kadaluwarsa, dan cetakan yang informasinya sudah tidak relevan. Persediaan yang telah usang tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp13.719.046.806,00;



- 2) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng sebesar Rp6.614.190.385,00;
- 3) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke sebesar Rp4.999.805.656,00; dan
- 4) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebesar Rp6.475.321.999,00.

Dari jumlah persediaan yang usang atau rusak tersebut telah diusulkan pemusnahannya sebesar Rp29.014.206.112,00. Terhadap barang persediaan berupa alat kontrasepsi yang sudah kadaluwarsa, Dinas dan Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk akan mengusulkan untuk dilakukan pemusnahan di tahun 2025.

5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp84.559.599.245.749,00 dan Rp78.314.759.088.872,00.

5.5.1.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang bersumber dari APBD kelompok pembiayaan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana bergulir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari waktu ke waktu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) sejak tahun 2001 sampai dengan 2007, dan dialihkan ke UPT Dana Bergulir di bawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Dana Bina Ekonomi PPMK bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat. Namun, dalam pengelolaannya terdapat permasalahan antara lain berupa sulitnya pengembalian dana dari masyarakat penerima manfaat (menunggak), penyalahgunaan dana, dan dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh pengelola.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPPAPP dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terus berupaya melakukan penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir pada Dewan Kelurahan, Koperasi Jasa Keuangan PEMK, dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir; dan



- b) Program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dikelola oleh Unit Pengelola Dana Perumahan di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Adapun program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dana bergulir tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui Bank pelaksana.

Bentuk kerjasama dengan Bank Pelaksana adalah *Executing Agency* berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Perumahan dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Unit Pengelola Dana Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Bank DKI Nomor 761/-072 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Oleh PT Bank DKI, di mana tanggung jawab untuk menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir ada pada Bank Pelaksana. Atas hal tersebut maka Bank Pelaksana akan memperoleh bagian dari bagi hasil atas penyaluran Dana Bergulir sebesar 3,1% dari nilai total persentase bunga sebesar 5%.

Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing tercatat sebesar Rp550.000.000.000,00. Adapun nilai pokok Dana Bergulir dan akumulasi penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
I	Dana Bergulir	1.099.780.201.964	1.099.970.791.630
II	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(549.780.201.964)	(549.970.791.630)
III	Nilai Investasi Non Permanen	550.000.000.000	550.000.000.000

Nilai Pokok Dana Bergulir dan Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp190.589.666,00 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya penyetoran pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah.

Rincian pokok Dana Bergulir sebesar Rp1.099.780.201.964,00, disajikan pada tabel sebagai berikut.



Tabel 5.40
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2016)	Unit Pengelola Dana Perumahan	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	550.000.000.000	1.435.873.068.615
II	Dana yang dialihkan dari PPMK ke UPDB	(124.544.360.537)	124.544.360.537	0	0
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	0	11.314.522.622	0	11.314.522.622
IV	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	(7.014.892.937)	(340.392.496.336)	0	(347.407.389.273)
V	Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III+IV)	429.336.690.141	120.443.511.823	550.000.000.000	1.099.780.201.964
	Posisi				
VI	Saldo Kas dan Bank	0	0	295.450.001.937	295.450.001.937
VII	Dana di Pemanfaat	421.678.852.610	120.443.511.823	254.549.998.063	796.672.362.496
VIII	Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (VI+VII)	421.678.852.610	120.443.511.823	550.000.000.000	1.092.122.364.433
IX	Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (V-VIII)	7.657.837.531	0	0	7.657.837.531

a. Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh DPPAPP secara keseluruhan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp560.895.943.615,00. Dana tersebut bersumber dari APBD untuk dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Selain itu, terdapat dana pengalihan kepada UPT Dana Bergulir sebesar Rp124.544.360.537,00 dan Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp7.014.892.937,00 sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp429.336.690.141,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.39.

Mutasi Tahun 2023

Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK (DPPAPP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp429.336.690.141,00. Dari nilai investasi tersebut, tercatat sebesar Rp421.678.852.610,00 berada di pemanfaat, dan sisanya sebesar Rp7.657.837.531,00 merupakan selisih dana belum terjelaskan karena kelemahan pengadministrasian dana PPMK.

Mutasi Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK selama Tahun 2023 berkurang sebesar Rp130.331.366,00 dikarenakan terdapat pengembalian pokok pinjaman masyarakat dari rekening Dekel/ Satgas PPMK yang dipindahbukukan ke Kas Daerah, sehingga nilai Investasi Non Permanen



pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp429.336.690.141,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

No	Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir 31 Desember 2023 (Rp)
			Pengembalian dari Rek Dekel/ Satgas PPMK	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	
1.	Saldo Kas dan Bank	0	130.331.366	(130.331.366)	0
2.	Dana di Pemanfaat	421.809.183.976	(130.331.366)	0	421.678.852.610
3.	Selisih Dana belum terjelaskan	7.657.837.531	0	0	7.657.837.531
	Jumlah	429.467.021.507	0	(130.331.366)	429.336.690.141

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Keuangan Dana Bergulir Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001-2007 maka Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk sampai dengan tahun 2023 telah berupaya melakukan penyelesaian permasalahan keuangan dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 sebesar Rp429.336.690.141,00 yang terdapat di 295.400 pemanfaat/peminjam dengan melakukan proses identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 berdasarkan data laporan hasil audit KAP Tahun 2009 di seluruh kelurahan di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Satgas Kelurahan.

Dalam proses pelaksanaan identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan tersebut, para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi terus melakukan koordinasi dan memfasilitasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk terkait sosialisasi kebijakan, dan tata cara penagihan dan pengembalian serta penyelesaian secara administrasi permasalahan yang ada di pemanfaat.

Hasil identifikasi dan verifikasi data faktual terhadap 295.400 pemanfaat/peminjam dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 – 2007 adalah sebagai berikut.

No	Wilayah	Jumlah Pemanfaat	Mampu Mengembalikan	Tidak Mampu Mengembalikan	Tidak Diketahui	Telah Melunasi	Tidak Meminjam	Jumlah Teridentifikasi dan Verifikasi	Jumlah Tidak Teridentifikasi dan Verifikasi
1	Jakarta Pusat	56.463	476	22.959	22.926	5.911	4.073	56.345	118
2	Jakarta Utara	40.590	1.065	6.340	24.079	5.879	3.227	40.590	-
3	Jakarta Barat	60.474	550	17.338	30.983	6.798	3.864	59.533	941
4	Jakarta Selatan	62.113	2.275	18.867	25.933	9.934	5.104	62.113	-
5	Jakarta Timur	69.666	2.191	15.582	31.843	13.935	6.115	69.666	-
6	Kepulauan Seribu	6.094	-	5.337	615	142	-	6.094	-
	Jumlah	295.400	6.557	86.423	136.379	42.599	22.383	294.341	1.059



Atas hasil identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan terhadap 295.400 pemanfaat/peminjam dengan jumlah dana sebesar Rp429.336.690.141,00 tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun proses identifikasi dan verifikasi data faktual serta penagihan hingga saat ini masih terus dilakukan untuk percepatan penyelesaian permasalahan dana Bina Ekonomi PPMK.

b. Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh ex UPT Dana Bergulir secara keseluruhan sejak tahun 2008 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp460.836.008.159,00, terdiri dari dana awal sebesar Rp324.977.125.000,00, ditambah dana pengalihan dari Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp124.544.360.537,00, dan 30% alokasi dari pendapatan jasa pemanfaatan yang digunakan untuk pengguliran kembali sebesar Rp11.314.522.622,00. Selain itu, terdapat Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp340.392.496.336,00 yang mengurangi pencatatan nilai investasi, sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp120.443.511.823,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.39.

Mutasi Tahun 2023

Nilai investasi yang tercatat pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp120.443.511.823,00. Dari nilai investasi tersebut tercatat sebesar Rp120.443.511.823,00 berada di pemanfaat.

Mutasi Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir selama Tahun 2023 berkurang sebesar Rp60.258.300,00 dikarenakan terdapat pengembalian pokok pinjaman dari Koperasi Jasa Keuangan (KJK) ke Kas Daerah, sehingga nilai Investasi Non Permanen pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp120.443.511.823,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		
			Pengembalian dari KJK (Rp)	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Saldo Kas dan Bank	0	60.258.300	(60.258.300)	0
2.	Dana Bergulir KJK	121.269.552.558	(76.058.300)		121.193.494.258
	Penyetoran Dana Bergulir ke Kas Daerah Yang Belum Teridentifikasi	(765.782.435)	15.800.000		(765.782.435)
	Jumlah	120.503.770.123	0	(60.258.300)	120.443.511.823



c. Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan

Nilai investasi yang tercatat pada Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp550.000.000.000,00.

UDP merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pengelolaan dana menggunakan dua rekening yang ditempatkan di Bank DKI, yaitu nomor rekening 110-02-00000-1 untuk transaksi dana investasi dan 110-02-11111-3 untuk transaksi dana operasional.

Mutasi Tahun 2023

Nilai investasi yang tercatat pada Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp550.000.000.000,00. Dari nilai investasi tersebut sebesar Rp295.450.001.937,00 berada pada rekening dana bergulir, dan sebesar Rp254.549.998.063,00 berada di pemanfaat.

Nilai investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp350.000.000.000,00 dan selama Tahun 2021 terdapat penambahan investasi sebesar Rp200.000.000.000,00 serta tidak ada penambahan investasi selama tahun 2023 sehingga nilai investasi yang tercatat pada Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp550.000.000.000,00.

Mutasi Investasi Non Permanen di Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) selama tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Uraian	Saldo awal 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi 2023 (Rp)		31 Desember 2023 (Rp)
			Penyaluran ke Masyarakat	Pengembalian dari Masyarakat	
1	Saldo Kas dan Bank	312.896.743.508	(31.490.335.439)	14.043.593.868	295.450.001.937
2	Dana di Pemanfaat	237.103.256.492	31.490.335.439	(14.043.593.868)	254.549.998.063
	Jumlah	550.000.000.000			550.000.000.000

Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Sejak tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan kriteria kualitas piutang dana bergulir dengan menggunakan metode *executing agency* di mana kualitas piutang ditetapkan berdasarkan kualitas lancar dan kualitas macet.

Nilai Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp550.000.000.000,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.099.780.201.964,00 dikurangi dengan penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih sebesar Rp549.780.201.964,00.



Tabel 5.41
Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Macet	Akumulasi Penyisihan per 31 Des 2023
		100%	
I	Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir	120.443.511.823	120.443.511.823
II	Penyisihan	120.443.511.823	120.443.511.823
III	Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK	429.336.690.141	429.336.690.141
IV	Penyisihan	429.336.690.141	429.336.690.141
V	Piutang Dana Bergulir - Unit Pengelola Dana Perumahan	0	0
VI	Penyisihan	0	0
VII	Total Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih – Executing Agency (II + IV+VI)	549.780.201.964	549.780.201.964

5.5.1.2.2 Investasi Permanen

Pemerintah Daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika Pemerintah Daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat diketahui dari Peraturan Daerah, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp84.009.599.245.749,00 dan Rp77.764.759.088.872,00, dengan rincian dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.42
Investasi Permanen
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Nama	% Kepemilikan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas	100,00%	83.715.095.290.749	77.470.255.133.872
2	Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Biaya	100,00%	294.503.955.000	294.503.955.000
	Jumlah Investasi Permanen		84.009.599.245.749	77.764.759.088.872

Rincian perhitungan Investasi Permanen disajikan pada lampiran 7 Ikhtisar Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah.

a. Investasi dengan Metode Ekuitas

Penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas, didasarkan pada persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada



perusahaan daerah yang lebih dari 51%, misalnya pada Perumda Air Minum Jaya (100%), PT Food Station Tjipinang (99,98%), dan PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (72%). Penilaian penyertaan modal menggunakan metode ekuitas juga dilakukan pada kepemilikan 20% sampai 50% jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pengaruh/pengendalian yang signifikan pada perusahaan tersebut dengan variabel sebagai berikut:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Penilaian investasi dengan metode ekuitas pada perusahaan daerah dengan kepemilikan 20% sampai 50% adalah sebagai berikut:

- 1) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50,00%)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Direktur Keuangan;
- 2) PT Pembangunan Jaya (38,80%)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 1 (satu) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris Utama;
- 3) PT Delta Jakarta Tbk (26,25%)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris Independen (Komisaris Utama) dan 1 (satu) Komisaris; dan
- 4) PT Ratax Armada (28,00%)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 2 (dua) orang perwakilan yaitu 1 (satu) Komisaris dan 1 (satu) Direktur, yang saat ini telah mengundurkan diri dan perusahaan tidak beroperasi.

Pada penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi yang diumumkan oleh perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham, yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurangi nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp83.715.095.290.749,00 dan Rp77.470.255.133.872,00. Dengan rincian dalam tabel sebagai berikut.



Tabel 5.43
Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Nama	% Kepemilikan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Perumda Air Minum Jaya	100,00%	3.449.544.925.780	2.047.609.883.109
2	Perumda Dharma Jaya	100,00%	466.125.029.737	154.096.219.186
3	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	100,00%	5.554.928.504.064	5.633.090.329.007
4	Perumda Pasar Jaya	100,00%	1.530.748.892.361	1.496.500.990.790
5	Perumda PAL Jaya	100,00%	1.246.431.260.941	1.218.549.464.647
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah		12.247.778.612.883	10.549.846.886.739
6	PT Jakarta Propertindo	99,998%	23.991.197.246.177	21.990.961.378.992
7	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,998%	23.887.901.546.678	21.848.148.326.004
8	PT Bank DKI Jakarta	99,98%	10.982.535.682.062	10.192.081.387.000
9	PT Food Station Tjipinang	99,98%	617.635.223.340	653.040.548.449
10	PT Transportasi Jakarta	99,70%	4.701.221.698.896	5.309.862.763.903
11	PT Jakarta Tourisindo	99,57%	567.235.405.681	657.565.447.494
12	PT Penjamin Kredit Daerah	98,75%	413.139.843.427	393.933.853.943
13	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	72,00%	1.185.955.200.453	1.113.095.520.425
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Perseroan Daerah		66.346.821.846.714	62.158.689.226.210
14	PT Pembangunan Jaya	38,80%	4.688.253.593.788	4.337.534.937.488
15	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50,00%	187.918.474.113	162.303.174.969
16	PT Ratax Armada	28,00%	0	0
17	PT Delta Djakarta, Tbk	26,25%	244.322.763.251	261.880.908.466
	Jumlah Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan		5.120.494.831.152	4.761.719.020.923
	Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Ekuitas		83.715.095.290.749	77.470.255.133.872

Mutasi pencatatan Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

1) Perumda Air Minum Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2022 disajikan sebesar Rp2.047.609.883.109,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp1.401.935.042.671,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp135.000.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perumda Air Minum Jaya, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan Perumda Air Minum Jaya tahun anggaran 2023 Nomor 703/-UD.02 tanggal 1 November 2023;



- b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp1.291.210.878.146,00, yang terdiri dari:
 - 1. penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2022 pada Laporan Keuangan Perumda Air Minum Jaya *Audited* 2022 sebesar Rp43.851.403.620,00; dan
 - 2. pengumuman laba Perumda Air Minum Jaya tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100% sebesar Rp1.247.359.474.526,00.
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp24.275.835.475,00 yang merupakan keuntungan aktuarial atas pengukuran kembali program imbalan kerja sebagai pengurang ekuitas Perumda Air Minum Jaya tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Jaya per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp3.449.544.925.780,00.

2) Perumda Dharma Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Dharma Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp154.096.219.186,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp312.028.810.551,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp250.000.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perumda Dharma Jaya, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan Perumda Dharma Jaya tahun anggaran 2023 Nomor 742/-UD.02 tanggal 17 November 2023;
- b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp62.390.243.180,00 yang merupakan pengumuman laba Perumda Dharma Jaya tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%; dan



- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp361.432.629,00 yang merupakan penghasilan komprehensif lainnya berupa pengukuran kembali imbalan pasca kerja sebagai pengurang ekuitas Perumda Dharma Jaya berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Dharma Jaya per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp466.125.029.737,00.

3) Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp5.633.090.329.007,00. Nilai investasi tahun 2023 berkurang sebesar Rp78.161.824.943,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp34.804.379.198,00 yang merupakan penghasilan komprehensif lain sebagai penambah ekuitas Perumda Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023;
- b) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp112.966.204.141,00 terdiri dari:
 - 1. pengumuman rugi Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100% sebesar Rp98.486.101.866,00; dan
 - 2. pengurang ekuitas Perumda Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023 berupa dampak pelepasan tower A KSO NPK sebesar Rp14.480.102.275,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp5.554.928.504.064,00.

4) Perumda Pasar Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp1.496.500.990.790,00. Nilai investasi tahun 2023 berkurang sebesar Rp34.247.901.571,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp54.911.297.143,00 yang merupakan pengumuman laba Perumda Pasar Jaya tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%;
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp5.897.211.097,00 yang merupakan setoran dividen Perumda Pasar Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perumda Pasar Jaya Tahun Buku 2023 dan telah diterima Kas Daerah; dan
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp14.766.184.475,00 yang merupakan pembayaran dana cadangan tunjangan hari tua dan penghasilan komprehensif lainnya sebagai pengurang ekuitas Perumda Pasar Jaya berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Jaya per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp1.530.748.892.361,00.

5) Perumda PAL Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda PAL Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp1.218.549.464.647,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp27.881.796.294,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp42.289.617.116,00, terdiri dari:
 - 1. pengumuman laba Perumda PAL Jaya tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. sebesar Rp36.738.750.882,00; dan
 - 2. pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti dan jasa giro serta bunga deposito sebagai penambah ekuitas Perumda PAL Jaya



berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023 sebesar Rp5.550.866.234,00.

- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp14.407.820.822,00 yang merupakan penyetoran dividen Perumda PAL Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 tahun 2023 tanggal 9 Agustus 2023, dan telah diterima Kas Daerah.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada Perumda PAL Jaya per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp1.246.431.260.941,00.

6) PT Jakarta Propertindo

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp21.990.961.378.992,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp2.000.235.867.185,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp2.416.000.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Propertindo tahun anggaran 2023 Nomor 392/HK.01.11 tanggal 31 Mei 2023;
- b) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp415.764.132.815,00 terdiri dari:
 - 1. pengumuman rugi PT Jakarta Propertindo tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,998% sebesar Rp415.715.547.530,00; dan
 - 2. pengurang ekuitas PT Jakarta Propertindo berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* 2023 sebesar Rp48.585.285,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp23.991.197.246.177,00.



7) PT Mass Rapid Transit Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp21.848.148.326.004,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp2.039.753.220.674,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp2.021.526.331.526,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta, yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan *Phase II* (Bundaran HI – Kota);
- b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp20.571.988.293,00 yang terdiri dari:
 1. pengumuman laba PT Mass Rapid Transit Jakarta tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,997% sebesar Rp20.452.536.414,00; dan
 2. mengakui penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan sebesar Rp119.451.879,00.
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp2.345.099.145,00 yang merupakan penghasilan komprehensif lainnya sebagai pengurang ekuitas PT Mass Rapid Transit Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp23.887.901.546.678,00.

8) PT Bank DKI Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp10.192.081.387.000,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp790.454.295.062,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp1.074.019.430.331,00, yang terdiri dari:
1. pengumuman laba PT Bank DKI Jakarta Tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,977%. sebesar Rp1.019.883.853.108,00;
 2. penghasilan komprehensif lainnya sebagai penambah ekuitas PT Bank DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023 sebesar Rp54.134.783.950,00; dan
 3. penyesuaian persentase kepemilikan sebesar Rp793.273,00.
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp281.670.562.798,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Bank DKI Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 27 tanggal 22 Februari 2023 dan telah diterima Kas Daerah; dan
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp1.894.572.471,00 yang merupakan pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti setelah pajak tangguhan sebagai pengurang ekuitas PT Bank DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp10.982.535.682.062,00.

9) PT Food Station Tjipinang

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp653.040.548.449,00. Nilai investasi tahun 2023 berkurang sebesar Rp35.405.325.109,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp6.203.419.152,00, yang terdiri dari:
1. pengumuman laba PT Food Station Tjipinang tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98% sebesar Rp6.189.855.826,00; dan



2. penyesuaian persentase kepemilikan sebesar Rp13.563.326,00.

- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp14.426.245.892,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Food Station Tjipinang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 145 tanggal 31 Maret 2023 dan telah diterima Kas Daerah; dan
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp27.182.498.369,00 yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dan koreksi laba ditahan sebagai pengurang ekuitas PT Food Station Tjipinang berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp617.635.223.340,00.

10) PT Transportasi Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp5.309.862.763.903,00. Nilai investasi tahun 2023 berkurang sebesar Rp608.641.065.007,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp147.921.992.245,00 terdiri dari:
1. pengumuman laba PT Transportasi Jakarta tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,70% sebesar Rp145.928.219.934,00; dan
 2. penyesuaian persentase kepemilikan sebesar Rp1.993.772.311,00 yang merupakan.
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp88.529.116.811,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Transportasi Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 8 tanggal 31 Mei 2023 dan telah diterima Kas Daerah;



c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp668.033.940.441,00 terdiri dari:

1. pengurang ekuitas PT Transportasi Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023 sebesar Rp4.738.721.744,00; dan
2. dampak penyajian kembali Laporan Keuangan PT Transportasi Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023 sebesar Rp663.295.218.697,00.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp4.701.221.698.896,00.

11) PT Jakarta Tourisindo

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022 yaitu sebesar Rp657.565.447.494,00. Nilai investasi tahun 2023 berkurang sebesar Rp90.330.041.813,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp13.870.975.375,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Tourisindo, sesuai dengan Perjanjian Investasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (melalui BPBUMD) dengan PT Jakarta Tourisindo tahun anggaran 2023 Nomor 406/HK.01.11 tanggal 7 Juni 2023;
- b) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp642.476.493,00 yang merupakan penyesuaian persentase kepemilikan; dan
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp104.843.493.681,00 yang merupakan pengumuman rugi PT Jakarta Tourisindo tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,57%.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp567.235.405.681,00.



12) PT Penjamin Kredit Daerah

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp393.933.853.943,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp19.205.989.484,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp19.484.055.676,00, yang terdiri dari:
 - 1. pengumuman laba PT Penjamin Kredit Daerah tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 98,75% sebesar Rp19.216.885.827,00; dan
 - 2. penghasilan komprehensif lainnya sebagai penambah ekuitas PT Penjamin Kredit Daerah berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023 sebesar Rp267.169.849,00.
- b) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp278.066.192,00 yang merupakan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti sebagai pengurang ekuitas PT Penjamin Kredit Daerah berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023,.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp413.139.843.427,00.

13) PT Pembangunan Jaya Ancol

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp1.113.095.520.425,00. Nilai investasi tahun 2023 berkurang sebesar Rp72.859.680.028,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp169.324.560.065,00 merupakan pengumuman laba PT Pembangunan Jaya Ancol tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 72,00%;
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp33.407.999.971,00 yang merupakan penyetoran dividen



PT Pembangunan Jaya Ancol kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 54 tanggal 19 Mei 2023 dan telah diterima Kas Daerah; dan

- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp63.056.880.066,00 yang merupakan kerugian komprehensif lain sebagai pengurang ekuitas PT Pembangunan Jaya Ancol berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp1.185.955.200.453,00.

14) PT Pembangunan Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp4.337.534.937.488,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp350.718.656.300,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Operasional sebesar Rp373.302.110.748,00, yang terdiri dari:
 - 1. pengumuman laba PT Pembangunan Jaya tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 38,80% sebesar Rp339.918.345.698,00; dan
 - 2. penghasilan komprehensif lainnya sebagai penambah ekuitas PT Pembangunan Jaya tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023 sebesar Rp33.383.765.050,00.
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp20.320.000.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 126 tanggal 29 Agustus 2023 dan telah diterima Kas Daerah; dan
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp2.263.454.448,00 yang merupakan penyesuaian hak kepentingan non pengendali sebagai pengurang



ekuitas PT Pembangunan Jaya tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023,.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp4.688.253.593.788,00.

15) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp162.303.174.969,00. Nilai investasi tahun 2023 bertambah sebesar Rp25.615.299.144,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp30.398.341.241,00 yang merupakan pengumuman laba PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 50,00%; dan
- b) mutasi kurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp4.783.042.097,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 57 tanggal 27 Juni 2023 dan telah diterima Kas Daerah.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp187.918.474.113,00.

16) PT Ratax Armada

Investasi pada PT Ratax Armada disajikan sebesar nol rupiah karena PT Ratax Armada memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PT Ratax Armada *Unaudited* tahun 2014 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp2.054.694.000. Pada saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian rencana divestasi PT Ratax Armada hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang semakin besar akibat penurunan nilai saham PT Ratax Armada.



17) PT Delta Djakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2022, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2022, yaitu sebesar Rp261.880.908.466,00. Nilai investasi tahun 2023 berkurang sebesar Rp17.558.145.215,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) mutasi tambah investasi atas Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp52.269.085.968,00 yang merupakan pengumuman laba PT Delta Djakarta tahun 2023 berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b) mutasi berkurang investasi atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Laporan Realisasi APBD sebesar Rp68.315.227.500,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Delta Djakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 131 tanggal 17 Mei 2023 dan telah diterima Kas Daerah; dan
- c) mutasi kurang investasi atas Beban Lain-Lain dalam Laporan Operasional sebesar Rp1.512.003.683,00 yang merupakan rugi komprehensif lain sebagai pengurang ekuitas PT Delta Djakarta berdasarkan Laporan Keuangan *Audited* 2023,.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp244.322.763.251,00.

b. Investasi dengan Metode Biaya

Penilaian investasi dengan menggunakan metode biaya, didasarkan pada persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah yang kurang dari 51%. Pada penilaian investasi dengan menggunakan metode biaya investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut, berupa dividen, diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



Nilai investasi permanen dengan metode biaya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama, yaitu sebesar Rp294.503.955.000,00, dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.44
Investasi Permanen dengan Metode Biaya
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Nama	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	PT Cemani Toka	27,42%	27.059.360.000	27.059.360.000
2.	PT Kawasan Berikat Nusantara	26,85%	209.692.695.000	209.692.695.000
3.	PT Jakarta International Expo	13,125%	39.375.000.000	39.375.000.000
4.	PT Grahasahari Suryajaya	8,08%	3.951.000.000	3.951.000.000
5.	PT Asuransi Bangun Askrida	4,10%	13.080.000.000	13.080.000.000
6.	PT Pakuan International	1,11%	1.345.900.000	1.345.900.000
Jumlah Investasi Permanen dengan Metode Biaya			294.503.955.000	294.503.955.000

Ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah disajikan pada Lampiran 8 dan 9.

5.5.1.3 Properti Investasi

Sebagai bentuk penerapan PSAP 17 tentang Properti Investasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021, pada tahun 2022 Pemprov DKI Jakarta melakukan pencatatan atas aset Properti Investasi. Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa, meningkatkan nilai aset, atau keduanya. Aset Properti Investasi tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang/jasa, tidak untuk tujuan administratif, dan tidak dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu pada PSAP 17, Properti Investasi diukur sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp4.924.165.320.404,00, di mana selama tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima realisasi pendapatan yang dihasilkan dari Properti Investasi tersebut sebesar Rp25.170.651.419,00.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.924.165.320.404,00 dan Rp1.527.730.959.374,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Tanah	3.367.064.778.502	1.074.729.363.502
2	Gedung dan Bangunan	1.542.937.242.079	453.001.595.872



No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.163.299.823	0
Jumlah		4.924.165.320.404	1.527.730.959.374

Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp3.403.097.721.030,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp6.663.360.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	149.246.321.097
2)	Reklasifikasi dari Aset Tetap - Fasos Fasum	Rp	3.015.984.082.933
3)	Reklasifikasi dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Aset <i>Idle</i>)	Rp	168.048.417.000
4)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	69.818.900.000
Jumlah Penambahan		Rp	3.403.097.721.030,00
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi menjadi Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	Rp	6.663.360.000
Jumlah Pengurangan		Rp	6.663.360.000,00

Rincian penambahan dan pengurangan Properti Investasi dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

1) Reklasifikasi dari Aset Tetap

Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp149.246.321.097,00 merupakan reklasifikasi aset berupa tanah sebesar Rp70.345.035.000,00 dan bangunan sebesar Rp78.901.286.097,00 yang disewakan kepada pihak lain, di antaranya sebagai berikut:

- Tanah sebesar Rp4.859.800.000,00 dan bangunan sebesar Rp32.043.000.000,00 merupakan tanah dan bangunan ex. BP THR Lokasari;
- Tanah sebesar Rp54.468.400.000,00 dan bangunan sebesar Rp46.858.286.096,00 merupakan tanah dan rumah negara golongan I di Graha Pejaten; dan
- Tanah sebesar Rp1.222.000.000,00 merupakan tanah ex kantor pemerintahan pada Kelurahan Jati.

2) Reklasifikasi dari Aset Tetap - Fasos Fasum

Reklasifikasi dari Aset Tetap - Fasos Fasum sebesar Rp3.015.984.082.933,00 merupakan reklasifikasi aset berupa tanah sebesar Rp2.011.866.393.000,00, bangunan sebesar Rp989.954.390.111,00, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp14.163.299.822,00 yang disewakan kepada pihak lain, dengan rincian sebagai berikut:



- a) PT. Perkasa Internusa Mandiri sebesar Rp1.086.165.093.000,00 dengan peruntukkan Tanah Jalan di Komplek Ruko Lodan Center Jalan Lodan Raya Kelurahan Ancol
- b) PT. Federal Motor (Sekarang PT. Astra Honda Motor) sebesar Rp143.045.205.000,00 dengan peruntukkan Tanah Prasarana Jalan, Tanah Rencana Jalan KA, Tanah Rencana Penyempurna Hijau Umum, dan Tanah Marga *Drainase* yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading
- c) Dana Pensiun Aneka Tambang sebesar Rp32.502.330.000,00 dengan peruntukkan Tanah Marga Jalan, Tanah Hijau Makan, Tanah Jalur Hijau, Tanah Terbuka Biru dan Tanah Prasarana Jalan yang terletak di Jalan TB Simatupang Tanjung Barat
- d) Direktorat Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp975.732.250.111,00 berupa Gedung dan Bangunan Rumah Susun Pasar Rumput dan sebesar Rp14.163.299.823,00 berupa Instalasi AC, berlokasi di Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48 Kelurahan Pasar Manggis.
- e) PT. Citra Habitat Indonesia sebesar Rp393.120.000,00 berupa Bangunan TK Blok BI No.3 berlokasi di Komplek Citra Garden I Kalideres.
- f) Yayasan Pendidikan Cengkareng 1 sebesar Rp11.355.820.000,00 berupa Bangunan Pendidikan Permanen berlokasi di Jl. Kawasan Rumah Susun No. 2 Cengkareng Timur.
- g) PT. Cakra Bina Lestari sebesar Rp2.473.200.000,00 berupa Bangunan Sport Center, Ruang Ganti, Kolam Renang I, dan Kolam Renang II berlokasi di Jalan Lingkar Luar Kamal Raya dan Jalan Kamal Outer Ring Road Cengkareng Barat.
- h) Selain itu masih terdapat 19 peruntukkan tanah lainnya yang merupakan pengurang aset fasos fasum Tanah yang berasal dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Properti Investasi Unit Pengelola Jakarta *Asset Management Centre* sebesar Rp750.153.765.000,00.

3) Reklasifikasi dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Aset *Idle*)

Reklasifikasi dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Aset *Idle*) sebesar Rp168.048.417.000,00 merupakan reklasifikasi aset berupa tanah sebesar Rp164.939.967.000,00 dan bangunan sebesar Rp3.108.450.000,00 yang disewakan kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut:



- a) Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah/Toko seluas 500 m² dengan nilai sebesar Rp12.997.500.000,00 yang berada di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b) Tanah seluas 26.215 m² dengan nilai sebesar Rp120.720.075.000,00 yang berada di Jalan Raya Kelapa Nias Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Koja Kota Administrasi Utara;
- c) Tanah kosong yang sudah diperuntukkan seluas 987 m² dengan nilai sebesar Rp13.679.820.000,00 yang berada di Jalan Tiang Bendera III dan IV RT 07 RW 03 Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
- d) Lahan Karya Pemerintah (Kpm) dan Marga Jalan (Mjl) seluas 3.044 m² nilai sebesar Rp17.542.572.000,00 yang terletak di Jalan Raya Kembangan Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
- e) Gedung Olahraga Tertutup Permanen seluas 3.657 m² dengan nilai sebesar Rp3.108.450.000,00 yang berada di Perumahan Bintaro Jaya Sektor 1 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

4) Koreksi Kurang Catat Barang

Koreksi kurang catat barang sebesar Rp69.818.900.000,00 berupa tanah sebesar Rp50.857.380.000,00 dan bangunan sebesar Rp18.961.520.000,00. Aset yang tersebut seluruhnya merupakan aset yang dikerjasamakan dengan PT Panca Permata Istana Pasar Baru dalam bentuk sewa umum.

b. Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan Properti Investasi sebesar Rp6.663.360.000,00 seluruhnya merupakan reklasifikasi ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan berupa tanah sebesar Rp5.673.360.000,00 dan bangunan sebesar Rp990.000.000. Aset tersebut merupakan aset yang dikerjasamakan kepada Majelis Jemaat GKI Kedoya yang tidak memenuhi kriteria Properti Investasi.

Daftar mutasi Aset Properti Investasi per 31 Desember 2023 tersaji di Lampiran 10.

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi penyusutan dan nilai buku Properti Investasi per 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut.



Jenis Properti Investasi	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	3.367.064.778.502	0	3.367.064.778.502
Gedung dan Bangunan	1.542.937.242.079	(447.294.118.634)	1.095.643.123.445
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.163.299.823	(708.164.992)	13.455.134.831
Jumlah	4.924.165.320.404	(448.002.283.626)	4.476.163.036.778

5.5.1.4 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp661.657.277.836.888,00 dan Rp604.218.961.221.095,00. Selama tahun 2023 mutasi penambahan sebesar Rp69.726.225.062.866,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp12.287.908.447.073,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.45

Mutasi Aset Tetap

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2023
1	Tanah	466.211.312.146.548	56.365.329.414.696	6.694.001.198.765	515.882.640.362.479
2	Peralatan dan Mesin	30.534.777.685.455	3.139.476.944.659	902.973.867.021	32.771.280.763.093
3	Gedung dan Bangunan	46.684.316.665.100	2.505.559.100.163	2.029.632.429.305	47.160.243.335.958
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	55.993.465.847.492	6.413.291.697.427	468.999.891.771	61.937.757.653.148
5	Aset Tetap Lainnya	1.305.487.303.782	133.567.292.944	50.619.399.893	1.388.435.196.833
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.489.601.572.718	1.169.000.612.977	2.141.681.660.318	2.516.920.525.377
	Total	604.218.961.221.095	69.726.225.062.866	12.287.908.447.073	661.657.277.836.888

Daftar mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersaji di Lampiran 11.

5.5.1.4.1 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp515.882.640.362.479,00 dan Rp466.211.312.146.548,00. Selama tahun 2023 mutasi penambahan sebesar Rp56.365.329.414.696,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp6.694.001.198.765,00 dengan rincian sebagai berikut.



a. Mutasi Penambahan			
1)	Belanja Modal Tanah TA 2023 yang Menjadi Aset Tetap		Rp 411.315.943.273
	a)	Belanja Modal Tanah TA 2023	Rp 442.600.308.470
	b)	Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap atau tidak menghasilkan Aset Tetap perolehan 2023	Rp (31.284.365.197)
	1.	Pembayaran Utang atas Aset Telah Diakui tahun sebelumnya	Rp (297.920.200)
	2.	Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp (3.162.988.260)
	3.	Belanja Modal Tahun 2023 yang masih dalam proses pengerjaan	Rp (410.010.440)
	4.	Belanja Modal Tahun 2023 yang menjadi Kas Konsinyasi	Rp (27.413.446.297)
2)	Kapitalisasi dari Belanja Jasa		Rp 297.477.114
3)	Reklasifikasi antar Aset Tetap selain Tanah		Rp 3.392.364.640
	a)	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 2.868.964.500
	b)	Reklasifikasi dari KDP yang Sudah Selesai Dikerjakan	Rp 523.400.140
4)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya		Rp 53.052.656.488.699
5)	Kurang Catat		Rp 2.897.667.140.970
Jumlah Penambahan			Rp 56.365.329.414.696
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Properti Investasi		Rp 70.345.035.000
2)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah		Rp 116.958.851.717
3)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya		Rp 862.022.987.500
4)	Lebih Catat		Rp 5.644.674.324.548
Jumlah Pengurangan			Rp 6.694.001.198.765

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp411.315.943.273,00 di antaranya:
 - tanah untuk aliran sungai, tanah untuk waduk, tanah untuk danau/situ/embung dan tanah untuk bangunan air irigasi pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp256.917.484.122,00;
 - tanah untuk jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan nasional sebesar Rp120.642.713.420,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Kapitalisasi dari Belanja Jasa berupa biaya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Studi Kelayakan atau *Feasibility Study* (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) atas pengadaan tanah untuk bangunan instalasi pengolahan sampah di wilayah Jagakarsa sebesar Rp297.477.114,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.



- 3) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi antar Aset Tetap Selain Tanah sebesar Rp3.392.364.640,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.868.964.500,00 berupa tanah pada Kelurahan Pegadungan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Konstruksi dalam Pengerjaan KDP yang sudah selesai dikerjakan sebesar Rp523.400.140,00 terdiri dari:
 - reklasifikasi dari KDP berupa tanah untuk pembangunan proyek MRT dan pembangunan Dermaga sebesar Rp373.179.400,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - reklasifikasi dari KDP berupa tanah untuk jalan provinsi sebesar Rp150.220.740,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Lainnya sebesar Rp53.052.656.488.699,00,00 di antaranya:
 - a) Reklasifikasi dari Aset Fasos-Fasum sebesar Rp52.264.900.063.419,00 berupa tanah untuk jalan provinsi sebanyak 261 unit, tanah hutan taman nasional sebanyak 3 unit, tanah untuk jalan jembatan sebanyak 1 unit dan tanah dengan peruntukkan lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b) Reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan berupa tanah untuk bangunan gereja sebesar Rp34.509.195.000,00, tanah bangunan gedung permanen sebesar Rp8.000.000.000,00 yang telah dilakukan mutasi transfer ke Jakarta Asset Management Centre dengan BAST nomor 3518/PU.03.03 6 Desember 2023 dengan total sebesar Rp42.509.195.000,00 pada Jakarta Asset Management Centre Provinsi DKI Jakarta;
 - c) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi dari Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp11.748.499.280,00 berupa tanah untuk jalan kabupaten pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - d) Reklasifikasi dari Aset Koefisien Lantai dan Bangunan berupa Tanah untuk JPO Daan Mogot sebesar Rp591.907.500,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e) Reklasifikasi dari Aset Pinjam Pakai berupa tanah bangunan kantor pemerintah sebesar Rp345.504.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.



5) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Kurang Catat sebesar Rp2.897.667.140.970,00, di antaranya:

a) Penambahan Aset Tetap Tanah dari koreksi kurang catat barang sebesar Rp2.882.814.138.183,00 di antaranya:

- tanah untuk jalan provinsi sebesar Rp2.650.608.974.000,00 sebagai tindak lanjut program nasional berupa pendataan dan proses sertifikasi bidang jalan yang dilakukan bersama Kantor Pertanahan BPN Jakarta Utara pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara;
- tanah untuk bangunan eks jembatan timbang di Jalan Raya Bogor sebesar Rp56.920.675.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- tanah untuk bangunan Rumah Sakit sebesar Rp55.125.000.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo; dan
- tanah untuk bangunan dapur umum sebesar Rp29.529.255.000,00 pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara.

b) Penambahan Aset Tetap Tanah dari koreksi kurang catat nilai sebesar Rp14.853.002.787,00 terdiri dari:

- tanah untuk bangunan SDN Karet Tengsin 21 sebesar Rp11.158.966.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
- tanah untuk bangunan kantor pemerintah sebesar Rp3.694.036.787,00 pada Kota Administrasi Jakarta Timur.

b. Mutasi Pengurangan

1) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah menjadi Properti Investasi sebesar Rp70.345.035.000,00 berupa tanah bangunan rumah negara golongan I sebanyak 1 unit sebesar Rp54.468.400.000,00, tanah kosong yang sudah ditentukan peruntukannya 2 unit sebesar Rp14.654.635.000,00, tanah bangunan kantor pemerintah sebanyak 2 unit sebesar Rp1.222.000.000,00 pada Jakarta Asset Management Centre.

2) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah sebesar Rp116.958.851.717,00 di antaranya:

a) Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa pengadaan PC unit, *laptop*, *tablet PC*, *printer*, *flash disk*, rak besi, *smart TV*, *speaker*, *handy talkie*, meteran laser, plang nama pengaman aset, alat telekonferensi, meja, dan peralatan kerja lainnya sebesar



- Rp115.573.072.684,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
- b) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa pekerjaan pembuatan dan pemasangan pagar panel beton untuk pengamanan aset milik Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp1.362.379.033,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Reklasifikasi Aset Tetap Tanah menjadi Aset Lainnya sebesar Rp862.022.987.500,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi Ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp856.866.505.000,00 terdiri dari:
- Reklasifikasi Ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset berdasarkan hasil inventarisasi tanah tahun 2023 berupa tanah jalan Provinsi sebesar Rp461.460.543.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - Reklasifikasi Ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset berdasarkan hasil inventarisasi tanah tahun 2023 berupa tanah jalan Provinsi sebesar Rp294.386.628.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - Reklasifikasi Ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset berdasarkan hasil inventarisasi tanah tahun 2023 berupa tanah jalan Provinsi sebesar Rp101.019.334.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- b) Reklasifikasi ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah sebesar Rp5.072.400.000,00 berupa tanah hutan taman nasional sebanyak 1 unit sebesar Rp4.814.400.000,00 tanah bangunan kantor pemerintah sebanyak 1 unit sebesar Rp258.000.000,00, pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- c) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud berupa pengadaan *software programmer system website* sebesar Rp84.082.500,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Lebih Catat Aset Tetap Tanah sebesar Rp5.644.674.324.548,00 terdiri dari:



- a) Lebih catat nilai sebesar Rp106.266.884.148,00 terdiri dari :
- tanah untuk jalan provinsi di Jl. Kelapa Nias Raya seluas 28.000 m² sebesar Rp17.097.919.148,00 dan Tanah di Jl. Raya Kelapa Kopyor seluas 8.400 m² sebesar Rp35.782.860.000,00 dengan total sebesar Rp52.880.779.148,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - tanah bangunan kantor pemerintah Eks Jembatan Timbang seluas ±5.035 m² sebesar Rp53.386.105.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
- b) Lebih catat barang berupa tanah bangunan rumah negara golongan I untuk rumah dinas seluas 576 m² sebesar Rp2.393.280.000,00 pada Kecamatan Kelapa Gading.
- c) Pencatatan Ganda sebesar Rp5.536.014.160.400,00 di antaranya:
- penyerahan Kewajiban Tanah untuk jalan provinsi yang terletak di Perumahan Gading Pandawa dan Perumahan Gading Harmoni Kelurahan Kelapa Gading Timur Kota Administrasi Jakarta Utara dari PT. Tawima Utama Corporator kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Perumahan Wilhara Primary Realty Kelapa Gading Barat Kota Administrasi Jakarta Utara dari PT. Wilhara Primary Realty kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara dari PT. Summarecon Agung kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp934.411.282.500,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - penyerahan Kewajiban Tanah untuk jalan provinsi yang terletak di Kelurahan Pondok Pinang Kota Administrasi Jakarta Selatan dari PT. Metropolitan Kentjana kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Kelurahan Grogol Utara Kota Administrasi Jakarta Selatan dari PT. Permata Hijau kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Kawasan Mega Kuningan Kota Administrasi Jakarta Selatan dari PT. Rajawali Nusantara Indah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Kelurahan Lebak Bulus Kota Administrasi Jakarta Selatan dari PT. Bonauli RE kepada Pemerintah



Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.568.304.965.400,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- penyerahan Kewajiban Tanah untuk jalan provinsi yang terletak di Perumahan Puri Kembangan Kelurahan Kembangan Selatan Administrasi Jakarta Barat dari PT. Antilope Madju Puri Indah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Perumahan Taman Permata Buana Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat dari PT. Permata Asri Griya Lestari kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Perumahan Taman Meruya Ilir Kelurahan Meruya Utara Kota Administrasi Jakarta Barat dari PT. Labrata kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.001.263.848.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat;
- penyerahan Kewajiban Tanah untuk jalan provinsi yang terletak di Perumahan Cibubur Indah, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur dari PD. Sarana Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Perumahan Billy Moon, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur dari PT. Billy & Moon kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Perumahan Mas Naga Raya, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur dari PT. Mas Naga Raya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; penyerahan kewajiban berupa tanah untuk jalan provinsi di Perumahan Nasional (Perumnas Klender) Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp374.136.724.500,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur;
- pencatatan Tanah bangunan kantor pemerintah sebesar Rp46.991.250.000,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tercatat ganda dengan Kecamatan Cempaka Putih yang terdiri dari tanah seluas 5.954 m² sebesar Rp33.491.250.000,00, tanah seluas 2.000 m² sebesar Rp11.250.000.000,00, tanah seluas 300 m² sebesar



Rp1.687.500.000,00, dan tanah seluas 100 m² sebesar Rp562.500.000,00 yang terletak di Komplek Perkantoran Rawa Kerbau Rawasari Selatan Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- tanah bangunan pendidikan dan pelatihan untuk bangunan sekolah SMP Negeri 71 seluas 3.696 m² sebesar Rp15.774.960.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tercatat ganda dengan Kecamatan Cempaka Putih yang terletak di Jalan Rawasari Timur Komplek Perkantoran Rawa Kerbau Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- tanah bangunan pendidikan dan pelatihan diperuntukkan untuk SDN Cempaka Baru 12 seluas 3.150 m² sebesar Rp6.186.600.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tercatat ganda terletak di Jalan Remaja Raya RT 005/RW 008 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- tanah bangunan kantor pemerintah seluas 1.475 m² sebesar Rp4.281.785.000,00 pada Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (Pusbanglat PPAPP) yang tercatat ganda dengan Kecamatan Cempaka Putih yang terletak di Jl. Rawasari Selatan No. 9 Cempaka Putih Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- tanah bangunan kantor pemerintah untuk kantor laboratorium kesehatan daerah seluas 968 m² sebesar Rp3.919.500.000,00 pada Laboratorium Kesehatan Daerah yang tercatat ganda dengan Kecamatan Cempaka Putih yang terletak di Jl. Rawasari Selatan No. 2 Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
- tanah bangunan puskesmas / posyandu untuk RSUD Cempaka Putih seluas 1.350 m² sebesar Rp2.324.700.000,00 pada RSUD Cempaka Putih yang tercatat ganda dengan Kecamatan Cempaka Putih yang terletak di Jl. Rawasari Selatan No. 1 RT 016/002 Kecamatan Cempaka Putih Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Nilai Aset Tetap Tanah tersebut di atas sudah termasuk Kas Dikonsinyasikan dengan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar



Rp209.482.676.696,00 dan Rp238.779.196.507,00 yang terdapat pada tiga OPD berikut ini.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Bina Marga	132.078.926.023	5.099.720.000	29.963.971.811	107.214.674.212
2	Dinas Sumber Daya Air	102.268.002.484	0	0	102.268.002.484
3	UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang	4.432.268.000	0	4.432.268.000	0
	Jumlah	238.779.196.507	5.099.720.000	34.396.239.811	209.482.676.696

Selama Tahun 2023 terdapat penambahan Kas Konsinyasi Rp5.099.720.000,00 dan pengurangan Rp34.396.239.811,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Penambahan Kas Konsinyasi terdapat pada Dinas Bina Marga Pembebasan tanah Pembangunan Jalan Tembus dari Jalan Sudirman - Jalan K.H. Mas Mansyur (Karet - Kebembem) tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar Rp5.099.720.000,00;
- b. Pengurangan Kas Konsinyasi di antaranya:
 - kas Konsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk pembayaran tanah yang digunakan sebagai bagian dari pengembangan Terminal Terpadu Pulo Gebang telah dicairkan kepada para termohon oleh panitera pada tanggal 9 Januari 2024 setelah adanya kesepakatan perdamaian para termohon konsinyasi dan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebesar Rp4.432.268.000,00 pada UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang;
 - kas Konsinyasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk pembebasan Lahan Stasiun MRT Blok A sebesar Rp12.220.723.000,00 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pedestrian Stasiun MRT H. Nawi sebesar Rp4.453.491.223,00 selain itu terdapat 15 Penyerahan Kas Konsinyasi lainnya ke Warga dengan nilai sebesar Rp13.289.757.588,00, dengan total sebesar Rp29.963.971.811,00 yang tercatat pada Dinas Bina Marga.

Selain Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp515.882.640.362.479,00 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 45 sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 13.035.227 m², dengan rincian sebagaimana disajikan dalam lampiran 12.

HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang yang mewakili negara. Pemegang hak pengelolaan adalah instansi pemerintah, jawatan, atau badan milik Negara.

Selama Tahun 2023 terdapat penambahan 5 (lima) Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:



- a. Penambahan 4 (empat) Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah diserahkan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut.

NO	Nama HPL	Luas (m ²)	Pemegang Hak	Lokasi
1	HPL No. 52 / Pluit	10.944	Pemprov DKI Jakarta	Jl. Pantai Mutiara, Pluit
2	HPL No.55 / Kalibaru	39.288	Pemprov DKI Jakarta	Kelurahan Kalibaru
3	HPL No.53 / Cilincing	24.830	Pemprov DKI Jakarta	Kelurahan Cilincing
4	HPL No. 54/ Pluit	97.207	Pemprov DKI Jakarta	Jl. Muara Angke, Pluit

- b. Penambahan 1 (satu) Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum tercatat pada Tahun 2022 yaitu HPL 00001/Pluit dengan luas 5.000 m² atas nama Pemprov DKI Jakarta.

Lahan dengan sertifikat HPL tersebut di antaranya digunakan sebagai aset fasilitas umum, untuk pembangunan gedung pemerintah, dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset dan yang dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah.

Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam proses identifikasi dan inventarisasi bentuk pemanfaatan tanah HPL pada beberapa lokasi sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta hak yang terbit di atasnya.

5.5.1.4.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp32.771.280.763.093,00 dan Rp30.534.777.685.455,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp3.139.476.944.659,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp902.973.867.021,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan				
1)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 yang menjadi Aset Tetap terdiri dari:		Rp	2.726.242.386.015
	a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023	Rp	2.822.976.130.249
	b)	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 yang tidak menghasilkan Aset Tetap perolehan tahun 2023	Rp	(96.733.744.234)
	1.	Pembayaran Utang atas Aset Peralatan dan Mesin yang telah Diakui Tahun Sebelumnya	Rp	(19.520.774.858)
	2.	Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(17.123.899.525)
	3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 yang masih Dalam Proses Pengerjaan	Rp	(56.272.733.978)
	4.	Reklasifikasi ke Beban Dibayar di Muka	Rp	(1.439.024.963)
	5.	Hibah ke Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	(2.321.708.965)



	6.	Pengembalian Belanja Modal setelah 31 Desember 2023		(55.601.945)
2)		Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	Rp	58.431.880.289
	a)	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	29.974.886.261
	b)	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	511.863.250
	c)	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	8.632.219.311
	d)	Kapitalisasi dari Belanja Persediaan	Rp	19.312.911.467
3)		Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	15.183.995.500
4)		Pengadaan yang Belum Dibayarkan	Rp	1.335.199.602
5)		Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin	Rp	281.255.849.774
	a)	Reklasifikasi dari Aset Tetap dari Tanah / Gedung dan Bangunan / JIJ /ATL	Rp	222.505.786.476
	b)	Reklasifikasi dari KDP yang Sudah Selesai Dikerjakan	Rp	58.750.063.298
6)		Reklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap	Rp	52.524.721.843
7)		Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap	Rp	7.336.000
8)		Kurang Catat	Rp	4.495.575.636
Jumlah Penambahan			Rp	3.139.476.944.659
<u>b. Mutasi Pengurangan</u>				
1)		Penghapusan	Rp	34.040.460.027
2)		Hibah ke Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	6.321.864.930
3)		Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin	Rp	31.203.807.785
4)		Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	472.151.101.440
5)		Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria	Rp	358.327.756.633
6)		Lebih Catat	Rp	928.876.206
Jumlah Pengurangan			Rp	902.973.867.021

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp2.726.242.386.015,00 di antaranya:
 - peralatan komputer berupa *P.C unit, LCD projector/infocus laptop*, dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total Rp273.023.859.090,00;
 - mobil pemadam kebakaran, *breathing apparatus* (alat bantu pernapasan), pipa pemancar kebakaran, dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp211.293.575.445,00; dan
 - alat besar berupa *floating excavator + attachment, portable water pump, transportable water pump*, dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp152.928.216.509,00.
- 2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp58.431.880.289,00, terdiri dari:



- a) Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp29.974.886.261,00 di antaranya:
- peralatan kantor berupa lemari besi, *white board*, *sound system*, dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp15.810.020.488,00;
 - peralatan kantor berupa lemari besi, *camera control television system (CCTV)*, lemari kaca dan peralatan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp4.784.134.808,00; dan
 - gitar elektrik, *CCTV - camera control television system*, *sound system*, dan peralatan mesin lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp1.138.888.520,00.
- b) Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp511.863.250,00 di antaranya:
- peralatan kantor berupa *CCTV - camera control television system*, partisi pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp396.364.000,00;
 - peralatan kantor berupa alat pembakaran sebesar Rp60.000.000,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 - peralatan kantor berupa *camera electronic*, lensa kamera, *microphone/wireless mic*, dan *tripod camera* pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp46.536.000,00.
- c) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp8.632.219.311,00 di antaranya:
- alat bantu pemadam kebakaran dan tangki air pada Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp2.046.715.800,00;
 - elevator/lift, *AC floor standing*, *AC split*, dan peralatan mesin lainnya pada Pusat Konservasi Cagar Budaya dengan total sebesar Rp2.009.390.336,00; dan
 - peralatan kantor berupa *workstation*, sofa, lemari penyimpanan, dan peralatan mesin lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.757.149.092,00.



- d) Kapitalisasi dari Belanja Persediaan sebesar Rp19.312.911.467,00 di antaranya:
- peralatan kantor berupa mesin pengisap debu pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp17.440.727.650,00;
 - peralatan bengkel berupa mesin las listrik, *steam cleaner*, mesin pemotong rumput, dan peralatan las listrik pada Unit Penanganan Sampah Badan Air dengan total sebesar Rp749.072.400,00; dan
 - *p.c unit*, *laptop*, dan peralatan mesin lainnya pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa dengan total sebesar Rp342.950.547,00.
- 3) Hibah dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp15.183.995.500,00 merupakan perolehan Aset Tetap dari instansi diluar Pemprov DKI Jakarta di antaranya:
- *portable air conditioner* (alat pendingin), alat peraga autotronik *electrical fundamental trainer for automotive*, mesin *press* kain, dan peralatan mesin lainnya dari PT. Panji Media Utama pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp2.839.740.885,00;
 - *p.c unit*, *laptop* dan peralatan mesin lainnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Barat dengan total sebesar Rp1.999.911.812,00; dan
 - *cnc milling machine*, *CNC – Lathe*, dan peralatan mesin lainnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Timur dengan total sebesar Rp1.451.725.500,00.
- 4) Pengadaan yang belum Dibayarkan merupakan perolehan Aset Tetap yang diterima lebih dulu tanpa disertai pengeluaran kas dari APBD maupun BLUD sebesar Rp1.335.199.602,00 di antaranya:
- peralatan kedokteran berupa *ophthalmic operating set* (alat kedokteran mata), sepeda statis, dan peralatan mesin lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres dengan total sebesar Rp625.521.200,00;
 - peralatan laboratorium berupa *hematology analyzer (blood cell counter)* dan peralatan kantor berupa lemari besi/metal pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dengan total sebesar Rp296.400.000,00; dan



- peralatan jaringan komputer berupa *NComputing* sebesar Rp175.225.902,00 pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.
- 5) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp281.255.849.774,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin sebesar Rp222.505.786.476,00 di antaranya:
- reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa *uninterrupted power system, silo, tower crane*, dan peralatan mesin lainnya pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp92.009.719.775,00;
 - reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa *shredder, crawler excavator + attachment, vibrating screen (solid-solid screening equipment)*, dan peralatan mesin lainnya pada Unit Penanganan Sampah Badan Air dengan total sebesar Rp46.476.911.037,00; dan
 - reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa *air curtain, air handling unit, air cooled HE*, dan peralatan mesin lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan total sebesar Rp14.650.102.566,00.
- b) Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan berupa pekerjaan pengembangan dan peningkatan *ITS Traffic Light* berupa *NComputing* dengan total sebesar Rp58.750.063.298,00 pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas.
- 6) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp52.524.721.843,00 di antaranya:
- a) Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat dilakukan berdasarkan pendalaman PD/UPD bahwa Aset Rusak Berat tersebut masih dapat digunakan kembali sebesar Rp2.627.488.449,00 di antaranya:
- a.c. sentral dan kursi lipat pada Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya dengan total sebesar Rp1.181.265.500,00;
 - mini bus dan *pick up* pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp565.077.643,00; dan
 - mini bus (penumpang 14 orang ke bawah), *speed boat/motor tempel*, dan kamera digital dan peralatan mesin lainnya pada Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara dengan total sebesar Rp302.295.000,00.



- b) Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud dilakukan berdasarkan pendalaman PD/UPD bahwa barang tersebut termasuk kategori Peralatan dan Mesin sebesar Rp853.988.553,00, terdiri dari:
 - *server* sebesar Rp624.019.275,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - *server* sebesar Rp191.950.000,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - *p.c Unit* sebesar Rp38.019.278,00 pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- c) Reklasifikasi dari Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset berupa televisi dan *faximile* pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dengan total sebesar Rp115.296.954,00.
- d) Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum berupa DCP (alat kontrol) sensor, pompa lumpur, *escalator*, dan peralatan mesin lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp8.018.050.022,00;
- e) Reklasifikasi yang diperoleh dari Aset Koefisien Lantai Bangunan berupa kubus apung, kursi, dan peralatan mesin lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp40.697.027.865,00; dan
- f) Reklasifikasi yang diperoleh dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan berupa *A.C split*, meja kerja kayu, meja makan kayu, dan peralatan mesin lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp212.870.000,00.
- 7) Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp7.336.000,00 di antaranya berupa timbangan badan dan peralatan mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa dengan total sebesar Rp6.491.000,00.
- 8) Kurang Catat sebesar Rp4.495.575.636,00 terdiri dari:
 - a) Kurang Catat Nilai sebesar Rp6.736.508,00 di antaranya berupa peralatan pendingin *Up right chiller/frezzzer* dan lemari es pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar dengan total sebesar Rp6.606.600,00.
 - b) Kurang Catat Barang sebesar Rp4.488.839.128,00 di antaranya:
 - *hematologic analyzer, mainframe, workstation*, dan peralatan mesin lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dengan total sebesar Rp3.439.213.359,00;
 - mini bus sebesar Rp557.050.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi; dan



- *tug boat+attachment* sebesar Rp238.400.250,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Penghapusan sebesar Rp34.040.460.027,00 di antaranya:
 - penghapusan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) mobil pemadam kebakaran sebesar Rp8.247.797.699,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
 - penghapusan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) mobil pemadam kebakaran sebesar Rp6.793.122.620,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Barat; dan
 - penghapusan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) *jeep* sebesar Rp3.611.720.000,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Hibah ke Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (kepada masyarakat) berupa alat pemadam *portable*, gerobak tarik dan papan nama pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jakarta Utara dengan total sebesar Rp6.321.864.930,00.
- 3) Reklasifikasi ke Aset Tetap Selain Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp31.203.807.785,00 di antaranya:
 - reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa *solar cell* atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar Rp13.037.488.556,00 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa bangunan rumah sakit khusus sebesar Rp4.008.919.068,00 pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit; dan
 - reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa jaringan utama alat pemadam kebakaran sebesar Rp2.786.950.000,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jakarta Barat.
- 4) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp472.151.101.440,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp389.766.909.791,00 di antaranya:
 - alat berat berupa *crawler excavator*, *bulldozer*, *wheel loader*, dan peralatan mesin lainnya pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp52.295.418.664,00;



- alat berat berupa *truck*, *track loader*, *sweeper truck*, dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp32.538.102.412,00; dan
 - kapal motor, *station wagon*, perahu karet (alat angkutan apung tak bermotor khusus), dan peralatan mesin lainnya pada Unit Pengelola Angkutan Perairan dengan total sebesar Rp24.308.339.315,00.
- b) Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp78.066.633.392,00 di antaranya:
- perangkat lunak berupa *software/aplikasi* lainnya sebesar Rp43.787.353.374,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - perangkat lunak berupa *software/aplikasi* lainnya sebesar Rp14.279.188.049,00 pada Unit Pengelola Jakarta Smart City; dan
 - perangkat lunak berupa *server* sebesar Rp8.533.397.900,00 pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan.
- c) Reklasifikasi menjadi Aset Tetap yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah berupa elektrik panel kontrol, *sound system*, *elevator/lift*, dan peralatan mesin lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp4.317.558.257,00.
- 5) Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria sebesar Rp358.327.756.633,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi ke Ekstrakomtabel sebesar Rp338.024.183.498,00 di antaranya:
- perlengkapan sekolah berupa *white board*, bangku sekolah, meja, dan perlengkapan sekolah lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Timur dengan total sebesar Rp225.455.059.978,00;
 - perlengkapan sekolah berupa meja sekolah, bangku sekolah, kursi biasa, dan perlengkapan sekolah lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat dengan total sebesar Rp22.307.953.037,00; dan
 - perlengkapan sekolah berupa meja sekolah, bangku sekolah, timbangan badan (alat kesehatan umum lain), dan perlengkapan sekolah lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp16.624.808.213,00.



b) Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp20.303.573.135,00 di antaranya:

- lampu sebesar Rp17.224.226.762,00 pada Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional;
- peralatan komputer *PC workstation* berupa *RFID tagging* buku sebesar Rp1.045.147.147,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- tempat sampah sebesar Rp851.352.434,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

6) Lebih Catat sebesar Rp928.876.206,00 terdiri dari:

- a) Lebih Catat Nilai sebesar Rp7.437.606,00 di antaranya berupa A.C. *split* sebesar Rp6.606.600,00 pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.
- b) Lebih Catat Barang sebesar Rp921.438.600,00 di antaranya:
- mobil *ambulance* dan mobil operasional PJR pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa dengan total sebesar Rp508.900.000,00;
 - sedan sebesar Rp261.258.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih; dan
 - sepeda motor sebesar Rp56.500.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok.

5.5.1.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp47.160.243.335.958,00 dan Rp46.684.316.665.100,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp2.505.559.100.163,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp2.029.632.429.305,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan				
1)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2023 yang menjadi Aset Tetap terdiri dari:		Rp	826.612.897.437
	a)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023	Rp	1.653.055.663.410
	b)	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2023 yang tidak memenuhi kriteria/tidak menghasilkan Aset Tetap perolehan tahun 2023	Rp	(826.442.765.973)
		1. Pembayaran Utang atas Aset Gedung dan Bangunan yang telah Diakui Tahun Sebelumnya	Rp	(68.839.920.260)
		2. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2023 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(7.066.258.135)
		3. Pengembalian Belanja Modal setelah 31 Desember 2023	Rp	(2.640.635.181)
		4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2023 yang masih dalam proses pengerjaan	Rp	(669.580.859.687)
		5. Belanja Modal yang diakui sebagai Uang Muka	Rp	(35.337.761.418)



		6.	Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka	Rp	(42.854.271.592)
		7.	Hibah keluar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Rp	(123.059.700)
2)	Kapitalisasi selain dari Belanja Modal			Rp	50.637.121.282
	a)	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan		Rp	32.664.705.128
	b)	Kapitalisasi dari Belanja Jasa		Rp	16.222.760.565
	c)	Kapitalisasi dari Belanja Barang		Rp	1.749.655.589
3)	Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta			Rp	21.677.942.623
4)	Pengadaan yang belum dibayarkan			Rp	78.405.604.956
5)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan			Rp	1.104.152.987.809
	a)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan – APBD		Rp	553.634.567.210
	b)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan – BLUD		Rp	708.109.803
	c)	Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan		Rp	549.810.310.796
6)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga			Rp	34.868.776.270
7)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya			Rp	203.253.006.493
8)	Koreksi Kurang Catat			Rp	185.950.763.293
Jumlah Penambahan				Rp	2.505.559.100.163
b. Mutasi Pengurangan					
1)	Penghapusan			Rp	78.204.853.633
2)	Reklasifikasi ke Properti Investasi			Rp	78.901.286.096
3)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan			Rp	546.204.382.279
4)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya			Rp	1.275.073.462.355
5)	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Kerjasama dengan pihak ketiga			Rp	4.935.638.186
6)	Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria			Rp	10.001.385.693
7)	Koreksi Lebih Catat			Rp	36.311.421.063
Jumlah Pengurangan				Rp	2.029.632.429.305

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Gedung bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2023 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp826.612.897.437,00, di antaranya:
 - bangunan pelabuhan Pulau Pramuka, bangunan pelabuhan Pulau Tidung, bangunan pelabuhan Pulau Sabira, dan bangunan pelabuhan Pulau Kelapa pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dengan total sebesar Rp150.075.703.049,00;
 - gedung Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kramat Jati dan Pasar Rebo, gedung kantor UPPPD Cempaka Putih, gedung kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Jakarta Timur, dan gedung bangunan lainnya pada Badan



Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp80.799.114.506,00; dan

- bangunan gedung kantor Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta pusat sebesar Rp79.141.031.198,00, pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

2) Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp50.637.121.282,00 terdiri dari:

a) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp32.664.705.128,00, di antaranya:

- renovasi bangunan bengkel/hanggar permanen, bangunan gedung kantor, dan bangunan bengkel/hanggar semi permanen pada Unit Pengelola Metrologi dengan total sebesar Rp13.657.167.914,00;
- pemeliharaan gedung Mitra Praja, pemeliharaan gedung SKKT Pulau Harapan, dan pemeliharaan gedung SKKT Pulau Tidung pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp4.483.398.403,00; dan
- renovasi gedung BPKD di Balaikota blok G lantai 14 dan 15 Jakarta Pusat sebesar Rp3.274.792.851,00, pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

b) Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp16.222.760.565,00 di antaranya:

- biaya konsultan untuk kegiatan perencanaan gelanggang remaja Kecamatan Johar Baru, biaya konsultan untuk kegiatan perencanaan gelanggang remaja Kecamatan Kemayoran, biaya konsultan untuk kegiatan perencanaan gelanggang remaja Kecamatan Kramat Jati, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp4.293.266.880,00;
- biaya konsultan untuk kegiatan perencanaan dan perizinan pembangunan tempat pengolahan sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) di Pulau Kelapa, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp2.200.562.850,00; dan
- biaya konsultan untuk kegiatan pembangunan gedung Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Harapan Sentosa 2 Cipayung, biaya konsultan untuk kegiatan pengawasan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Taruna Jaya 1 Tebet, biaya konsultan untuk kegiatan



pengawasan Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp2.017.638.073,00.

c) Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp1.749.655.589,00, terdiri dari:

- bangunan gedung rumah tahanan negara (RUTAN), bangunan gedung Kantor Imigrasi Jakarta Utara, dan bangunan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Pondok Bambu pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp1.606.682.000,00; dan
- kerangka dasar kadastral orde 2 (Teralis), tugu / gapura sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp142.973.589,00.

3) Hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp21.677.942.623,00, merupakan perolehan Aset Tetap dari instansi di luar Pemprov DKI Jakarta di antaranya:

- bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan Selong sebesar Rp5.710.924.692,00, yang berasal dari PT Jakarta Propertindo dan telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- bangunan kios Pasar Rakyat A dan kios Pasar Rakyat B, dan bangunan Eks Kantor Jaya Konstruksi sesuai dengan surat pernyataan kesediaan untuk menghibahkan bangunan yang berdiri dan/atau dihuni diatas lahan HPL Nomor 00001/Penggilingan milik UPK PPUKMP Pulogadung dan telah diserahkan kepada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung dengan total sebesar Rp5.425.382.000,00; dan
- bangunan Masjid Al-Qalam yang terletak di Jalan Pluit Timur Raya No.1 Kecamatan Penjaringan berdasarkan yang berasal dari Alumni STM Negeri 12 Jakarta, dan bangunan pendopo yang terletak di sebelah barat lapangan SMK Negeri 56 Jakarta yang berasal dari Ketua Komunitas Pendukung Kemajuan Pendidikan pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp2.370.000.000,00.

4) Pengadaan yang belum dibayarkan di tahun 2023 sebesar Rp78.405.604.956,00, terdiri dari:

a) Penambahan aset dari pengadaan yang belum dibayarkan dari dana APBD sebesar Rp77.461.829.060,00, di antaranya:



- rehab total bangunan gedung pendidikan permanen SDN Grogol 05 Pagi Jakarta, rehab total bangunan gedung pendidikan permanen SMKN 39, rehab total bangunan gedung pendidikan permanen SDN Kramat Jati 01, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan dengan total sebesar Rp49.587.435.949,00;
 - pembangunan gedung Puskesmas Kecamatan Tebet, pembangunan gedung Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, pembangunan gedung Puskesmas Kelurahan Pasar Manggis, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp7.713.469.037,00; dan
 - pembangunan rumah susun permanen Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung Jakarta Timur, rumah susun permanen Nagrak, rumah susun permanen Rawa Bebek Jl Inspeksi Kanal Banjir Timur, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp7.181.604.320,00.
- b) Pengadaan yang belum Dibayarkan dari dana BLUD tahun 2023 berupa pembangunan pagar rumah sakit, dan renovasi kamar operasi serta kamar bersalin pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dengan total sebesar Rp943.775.896,00.
- 5) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.104.152.987.809,00, terdiri dari:
- a) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan dari belanja modal APBD sebesar Rp553.634.567.210,00, di antaranya:
- reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp225.292.933.822,00 berupa gedung tempat kerja, bangunan bengkel, pagar permanen, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Sampah Terpadu; dan
 - reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Tanah sebesar Rp112.959.680.434,00 berupa jaring kontrol navigasi, bangunan gedung kantor, dan taman semi permanen pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
- b) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan dari belanja modal BLUD sebesar Rp708.109.803,00, terdiri dari:
- reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp417.956.968,00 berupa



- bangunan rumah sakit gedung B pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
- reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Peralatan dan Mesin sebesar Rp198.454.902,00, berupa bangunan Musholla pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit; dan
 - reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Peralatan dan Mesin sebesar Rp91.697.933,00, berupa bangunan rumah sakit umum poli jantung pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja.
- c) Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai sebesar Rp549.810.310.796,00, di antaranya:
- bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres, bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan, bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Ciracas, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp389.852.915.051,00;
 - bangunan gedung kantor Kelurahan Rawa Badak Utara, bangunan gedung kantor Kecamatan Koja, dan bangunan gedung kantor Kelurahan Kebon Bawang Jakarta Utara pada Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp36.840.139.577,00; dan
 - bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kepulauan Seribu Utara pada Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp30.161.557.697,00.
- 6) Reklasifikasi dari Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp34.868.776.270,00, terdiri dari:
- a) reklasifikasi dari Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan sebesar Rp34.154.051.270,00, di antaranya berupa bangunan gedung tempat ibadah, dan bangunan gedung kantor permanen pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b) reklasifikasi dari Aset Pinjam Pakai sebesar Rp714.725.000,00, berupa bangunan gedung kantor permanen pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 7) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp203.253.006.493,00, di antaranya:



- a) reklasifikasi dari Fasos Fasum sebesar Rp144.444.843.029,00, di antaranya berupa taman permanen, bangunan gedung kantor, pagar permanen, dan gedung bangunan lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b) reklasifikasi dari Aset Koefisien Lantai dan Bangunan sebesar Rp37.257.768.807,00, di antaranya berupa bangunan kolam renang, bangunan gedung tempat kerja lainnya, dan bangunan gedung olah raga tertutup permanen pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - c) reklasifikasi dari Aset Rusak Berat sebesar Rp21.550.394.657,00 di antaranya:
 - bangunan Rumah Sakit Umum, bangunan gedung tempat kerja lainnya, bangunan gudang tertutup permanen pada Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa dengan total sebesar Rp19.325.005.631,00;
 - bangunan rumah dinas golongan I tipe D sebesar Rp819.000.000,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las; dan
 - bangunan gudang pertemuan permanen sebesar Rp489.331.026,00 pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 8) Kurang Catat sebesar Rp185.950.763.293,00 terdiri dari:
- a) Kurang Catat Nilai sebesar Rp1.229.989.761,00 terdiri dari:
 - kurang catat nilai bangunan gedung kantor Kelurahan Gelora, gedung kantor Kelurahan Kebon Kacang, gedung kantor Kelurahan Utan Panjang, dan gedung bangunan lainnya pada Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp931.626.561,00; dan
 - kurang catat nilai bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp298.363.200,00 pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
 - b) Kurang Catat Barang sebesar Rp184.720.773.532,00 di antaranya:
 - kurang catat barang bangunan masjid dan musholla, bangunan gedung pendidikan, bangunan kantin, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp54.959.138.087,00;
 - kurang catat barang bangunan gedung pendidikan, bangunan masjid, gedung perpustakaan, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi



Jakarta Utara dengan total sebesar Rp25.972.849.955,00; dan

- kurang catat barang bangunan gedung kantor Blok A, B, C, dan gedung Graha Wisata, dan rumah dinas pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp21.665.145.799,00.

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Penghapusan sebesar Rp78.204.853.633,00 di antaranya:
 - gelanggang remaja Kecamatan Cakung, gelanggang remaja Kecamatan Pasar Rebo, gelanggang remaja Kecamatan Jatinegara, gelanggang remaja Kecamatan Duren Sawit, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Timur dengan total sebesar Rp19.745.705.621,00;
 - gelanggang remaja Kecamatan Kemayoran, dan gelanggang remaja Kecamatan Johar Baru pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp10.903.646.094,00; dan
 - gelanggang remaja Kecamatan Kebayoran Baru, gelanggang remaja Kecamatan Tebet, gelanggang remaja Kecamatan Mampang Prapatan, dan gelanggang remaja Kecamatan Kebayoran Lama pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp9.338.588.960,00.
- 2) Reklasifikasi Ke Aset Properti Investasi berupa rumah negara golongan I tipe A permanen, gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen, gedung olahraga tertutup permanen, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Jakarta *Asset Management Centre* dengan total sebesar Rp78.901.286.096,00.
- 3) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp546.204.382.279,00 di antaranya:
 - reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa bangunan dermaga Pulau Pari, bangunan dermaga Pulau Tidung, bangunan pengambilan air laut (SWRO) Pulau Pramuka, reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa *vertical blind*, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dengan total sebesar Rp72.744.672.619,00;
 - reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa *sheet pile* dan urugan tanah zona C, jembatan zona C, dermaga zona C, dan gedung bangunan lainnya pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dengan total sebesar Rp62.283.531.348,00; dan



- reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa instalasi elektrik, pedestrian *amphiteather*, trotoar, dan gedung bangunan lainnya pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp49.569.870.592,00.
- 4) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp1.275.073.462.355,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp625.280.832.704,00 di antaranya:
- Rumah Susun Komarudin A-F, Rumah Susun Marunda C 1-5, pagar Rumah Susun Komarudin, pos jaga rumah susun Komarudin pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp164.694.361.270,00;
 - bangunan gedung pendidikan SDN Kalisari 02, bangunan gedung pendidikan SDN Tengah 07, bangunan gedung pendidikan SDN Lubang Buaya 11, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Jakarta Timur dengan total sebesar Rp39.829.632.888,00; dan
 - bangunan gedung pendidikan di Jalan Pintu Besi, bangunan gedung pendidikan SDN Cikini 02, bangunan gedung pendidikan di Jalan Jatibaru, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp35.954.007.914,00.
- b) Reklasifikasi Ke Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset yaitu sebesar Rp513.192.303.068,00 di antaranya:
- gedung pendidikan, gedung kantor, bangunan tempat ibadah, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp72.976.524.557,00;
 - gedung kantor, dan gedung pendidikan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp50.161.064.511,00; dan
 - gedung pendidikan, gedung kantor, gedung laboratorium, dan gedung bangunan lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp48.642.160.857,00.



- c) Reklasifikasi Ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp2.497.500.000,00 berupa pengembangan fasilitas visualisasi perkotaan studio Jakarta 1 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan.
- d) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain – Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah berupa bangunan gedung kantor permanen, bangunan olah raga terbuka permanen, dan gedung bangunan lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp134.102.826.583,00.
- 5) Reklasifikasi ke Aset Kerjasama Pemanfaatan sebesar Rp4.935.638.186,00 berupa gedung olah raga tertutup permanen pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 6) Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sebesar Rp10.001.385.693,00, terdiri dari:
 - a) Koreksi ke beban sebesar Rp307.647.153,00 di antaranya:
 - penyuntikan anti rayap pada area lantai dasar gelanggang olahraga remaja Pondok Karya Pembangunan sebesar Rp175.620.623,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 - biaya rutin pemeliharaan gedung sebesar Rp98.274.000,00 pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - perbaikan tembok gedung sebesar Rp33.752.530,00 pada Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
 - b) Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp9.693.738.540,00 berupa gedung kantor di Jalan Diponegoro No.74 yang akan dihibahkan ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
- 7) Lebih Catat sebesar Rp36.311.421.063,00 terdiri dari:
 - a) Lebih Catat Nilai yaitu sebesar Rp91.658.916,00 di antaranya:
 - lebih catat nilai pembangunan puskesmas Kecamatan Gandaria Utara I sebesar Rp54.805.000,00 pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - lebih catat nilai pembangunan kantor Kelurahan Rawa Badak Utara sebesar Rp36.853.916,00 pada Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - b) Lebih catat barang sebesar Rp36.219.762.147,00 di antaranya:
 - gedung kantor, dan gedung pertokoan yang tercatat ganda dengan Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian



Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp15.904.280.000,00;

- gedung pendidikan, dan bangunan tempat ibadah yang tercatat ganda dengan Dinas Pendidikan, dan bangunan perpustakaan yang tercatat ganda dalam KIB pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp14.768.233.347,00; dan
- halte yang tercatat ganda dengan Suku Dinas Bina Marga sebesar Rp2.938.910.000,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

5.5.1.4.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp61.937.757.653.148,00 dan Rp55.993.465.847.492,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp6.413.291.697.427,00 dan mutasi pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp468.999.891.771,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan				
1)	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2023 yang menjadi Aset Tetap		Rp	3.082.521.374.360
	a)	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2023	Rp	3.799.027.573.476
	b)	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2023 yang tidak menghasilkan Aset Tetap perolehan tahun 2023	Rp	(716.506.199.116)
		1. Pembayaran utang atas aset yang telah diakui tahun sebelumnya	Rp	(24.366.085.298)
		2. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2023 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(58.255.328.286)
		3. Pengembalian Belanja Modal setelah 31 Desember 2023	Rp	(747.300.566)
		4. Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang masih dalam proses pengerjaan	Rp	(333.957.842.470)
		5. Belanja Modal yang diakui sebagai Uang Muka	Rp	(194.419.335.320)
		6. Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka	Rp	(104.760.307.176)
2)	Kapitalisasi selain dari Belanja Modal		Rp	265.088.504.043
	a)	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	197.436.333.552
	b)	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	3.504.272.611
	c)	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	64.147.897.880
3)	Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta		Rp	266.901.000
4)	Pengadaan yang belum dibayarkan		Rp	77.054.988.548
5)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan		Rp	1.735.648.214.735
	a)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	641.505.024.055
	b)	Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan	Rp	1.094.143.190.680
6)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya		Rp	1.251.793.133.166



7)	Kurang catat	Rp	918.581.575
Jumlah Penambahan		Rp	6.413.291.697.427
<u>b. Mutasi Pengurangan</u>			
1)	Penghapusan	Rp	314.875.000
2)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	425.903.060.817
3)	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Lainnya	Rp	42.580.966.561
4)	Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria	Rp	89.065.927
5)	Koreksi Lebih Catat	Rp	111.923.465
Jumlah Pengurangan		Rp	468.999.891.771

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2023 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp3.082.521.374.360,00 di antaranya:
 - pekerjaan jalan provinsi bernilai strategis provinsi berupa beton untuk jalan tembus Kelapa Gading – Pulo Gadung, pekerjaan jalan provinsi bernilai strategis provinsi berupa beton *rapid setting* pada jalan Bekasi Raya, dan pembangunan jembatan penyeberangan orang yang berada di Jalan Soepomo pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp995.887.872.223,00;
 - pembangunan Waduk Marunda yang merupakan tahap ke-2, pembayaran hutang pihak ke-3 untuk pembangunan polder Kamal dan jaminan pembayaran pompa Waduk Rawa Malang pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan Total Sebesar Rp465.843.085.408,00; dan
 - pembangunan saluran air pada Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Kalibaru serta Kelurahan Rawa Badak yang merupakan program *Capital Investment Planning (CIP)* pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara dengan total sebesar Rp3.798.884.420.605,00.
- 2) Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp265.088.504.043,00 yang terdiri dari:
 - a) Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp197.436.333.552,00 yang terdiri dari pembangunan/rehabilitasi polder Green Garden (Dana PEN), pembangunan/peningkatan kapasitas Sungai/Kali Ciliwung Hilir Kawasan Pasar Baru, pembangunan/rehabilitasi polder Muara Angke, polder Teluk Gong & polder Mangga Dua dan pembangunan Waduk Brigif dan Waduk beserta kelengkapannya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - b) Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp3.504.272.611,00 di antaranya berupa:



- biaya pengawasan jalan lingkungan di wilayah Jakarta Barat sebesar Rp830.923.801,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - biaya perizinan lingkungan pendalaman alur laut di Pulau Harapan sebesar Rp822.482.027,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 - biaya jasa biaya perencanaan dan biaya pengawasan untuk renovasi pada Tempat Pembuangan Sampah sebesar Rp659.132.313,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat.
- c) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp64.147.897.880,00 di antaranya berupa:
- pemeliharaan tanggul banjir di wilayah Jakarta Selatan sebesar Rp27.824.340.849,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - pemeliharaan Jembatan Cinta di Pulau Tidung sebesar Rp19.786.214.747,00 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 - pemeliharaan peningkatan jalan yang berlokasi di Pangkalan V Kecamatan Bantar Gebang sebesar Rp9.444.883.500,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu.
- 3) Hibah dari luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp266.901.000,00 berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berasal dari PT. Jakarta Propertindo pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI.
- 4) Pengadaan yang belum dibayarkan sebesar Rp77.054.988.548,00 di antaranya berupa:
- peralatan saringan sampah (*Pond Screen*) sebesar Rp65.955.168.863,00 pada Unit Penanganan Sampah Badan Air;
 - pekerjaan trotoar jalan tembus Lebak Bulus I - III tahun 2022, pembangunan jembatan sejajar rel Pasar Minggu, dan pekerjaan jalan beton jalan tembus Lebak Bulus I - III Tahun 2022, pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp6.138.185.756,00; dan
 - pembangunan Waduk Kampung Rambutan, Waduk Cimanggis dan Waduk Sunter Selatan sisi timur beserta kelengkapannya dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik sistem jaringan terpisah di Jakarta Barat, Jakarta Selatan & Jakarta Utara



pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp4.961.633.929,00.

- 5) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.735.648.214.735,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp641.505.024.055,00 di antaranya berupa:
 - reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan berupa tanggul banjir (bangunan pengamanan sungai/pantai) dan jaringan listrik penerangan jalan umum pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah dengan total sebesar Rp72.491.977.789,00;
 - reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan berupa Jalan Provinsi berlokasi sejajar BKT segmen Marunda, Raya Bekasi dan Rorotan pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp211.653.946.982,00; dan
 - reklasifikasi BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Gedung dan Bangunan berupa jembatan penyeberangan kendaraan, dermaga dan embung/waduk lapangan pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dengan total sebesar Rp62.003.031.348,00.
 - b) Reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai dikerjakan sebesar Rp1.094.143.190.680,00 di antaranya berupa:
 - reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa pembangunan *Refuse Derived Fuel (RDF)* yaitu instalasi pengolahan sampah non organik daur ulang non logam dan reklasifikasi dari KDP yang sudah selesai lainnya ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dengan total sebesar Rp878.899.052.185,00;
 - reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa peralatan saringan sampah (*Pond Screen*) berlokasi di TB Simatupang pada Unit Penanganan Sampah Badan Air dengan total Rp145.165.032.278,00; dan
 - reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dermaga di Muara Angke pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp53.397.279.835,00.
- 6) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp1.251.793.133.166,00 terdiri dari:



- reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum berupa jalan provinsi arteri, jalan khusus inspeksi, dan jembatan jalan nasional berdasarkan, jalan provinsi arteri dan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan total sebesar Rp965.439.195.288,00;
 - reklasifikasi dari Aset Koefisien Lantai dan Bangunan berupa jalan khusus pejalan kaki, jembatan penyeberangan orang, dan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan total sebesar Rp286.228.308.822,00; dan
 - reklasifikasi dari Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset berupa jalan provinsi lokal dengan dasar hasil penetapan Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah Nomor 24/MPSBMD-TAP/V/2022 Tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp125.629.056,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara.
- 7) Koreksi kurang catat barang sebesar Rp918.581.575,00 terdiri dari:
- koreksi kurang catat barang yang berasal dari tukar menukar barang milik daerah dengan tanah Milik PT Nusantara Pasifik Investama pada tanggal 2 Februari 2023 berupa jalan aspal dan saluran air pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp323.300.000,00;
 - koreksi kurang catat barang berupa instalasi air buangan domestik kapasitas sedang pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp321.020.000,00; dan
 - koreksi kurang catat barang berupa peningkatan tempat pembuangan sampah (TPS) menjadi TPS 3R yang berlokasi di asrama Ciracas, MOA Penjaringan, dan Banjir Kanal Timur (BKT) Pulo Gebang pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp274.261.575,00.

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Penghapusan berupa instalasi air tanah dalam kapasitas sedang dan instalasi pengolahan sampah organik sebesar Rp314.875.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan - Kepulauan Seribu;
- 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp425.903.060.817,00 di antaranya berupa:
 - reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa bangunan rumah PLN



- Landfill Mining Treatment (LM) & Refuse Derived Fuel (RDF)*, bangunan fasilitas pengolahan *Landfill Mining Treatment (LM)*, dan bangunan fasilitas pengolahan *Fresh Faste Treatment (RDF PLANT)* dengan total sebesar Rp317.302.653.597,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu;
- reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa *primary shredder*, *secondary shredder*, dan *powerplus* dan reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa penyaringan sampah yang belum selesai pengerjaannya dengan total sebesar Rp85.649.959.341,00 pada Unit Penanganan Sampah Badan Air; dan
 - reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya berupa pohon pengganti dampak pembangunan saluran dan reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa pekerjaan saluran muka (bangunan pembawa irigasi) dengan total sebesar Rp5.905.284.791,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 3) Reklasifikasi menjadi Aset Lainnya sebesar Rp42.580.966.561,00 terdiri dari:
- a) Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp36.332.866.635,00 di antaranya berupa:
 - tanggul banjir (bangunan pengamanan sungai/pantai) sebesar Rp19.864.000.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 - sumur resapan dan instalasi air buangan domestik kapasitas besar sebesar Rp8.418.707.540,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
 - Instalasi Pengolahan Air Sekunder (IPAS) sebesar Rp5.043.087.773,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu.
 - b) Reklasifikasi ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah berupa jaringan transmisi tegangan 100 s/d 300 kva dan instalasi air buangan domestik kapasitas sedang, pada Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan total sebesar Rp6.248.099.926,00.
- 4) Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap sebesar Rp89.065.927,00 terdiri dari:
- sumur gali sebesar Rp73.665.927,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - penggantian *blower* sebesar Rp15.400.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat.



- 5) Koreksi lebih catat barang berupa jaringan transmisi tegangan bawah sebesar Rp111.923.465,00 pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah.

5.5.1.4.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.388.435.196.833,00 dan Rp1.305.487.303.782,00. Selama tahun 2023 mutasi penambahan sebesar Rp133.567.292.944,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp50.619.399.893,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Belanja Modal TA 2023 yang menjadi Aset Tetap terdiri dari:	Rp	110.971.976.227
	a) Belanja Modal TA 2023	Rp	139.600.392.693
	b) Realisasi Belanja Modal TA 2023 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap atau tidak menghasilkan Aset Tetap perolehan tahun 2023:	Rp	(28.628.416.466)
	- Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	Rp	(28.612.383.133)
	- Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar di Muka	Rp	(16.033.333)
2)	Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	24.967.700
3)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya	Rp	19.516.568.448
4)	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp	1.038.096.649
5)	Kapitalisasi selain dari Belanja Modal	Rp	2.015.683.920
	a) Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	194.461.920
	b) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	1.821.222.000
Jumlah Penambahan		Rp	133.567.292.944
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Penghapusan	Rp	152.231.082
2)	Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya	Rp	154.357.757
3)	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	34.979.296.492
4)	Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria	Rp	14.814.797.120
5)	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	518.717.442
Jumlah Pengurangan		Rp	50.619.399.893

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2023 yang menjadi Aset Tetap yaitu sebesar Rp110.971.976.227,00 di antaranya:
 - bahan perpustakaan berupa buku ilmu pengetahuan umum, buku *encyclopedia*, kamus, buku referensi, buku ilmu perpustakaan, dan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp69.064.056.721,00;
 - bahan perpustakaan berupa buku ilmu pengetahuan umum sebesar Rp3.201.050.817,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta; dan



- biaya pembangunan *awning park and ride* Terminal Kampung Rambutan sebesar Rp1.432.911.019,00 pada Unit Pengelola Perparkiran.
- 2) Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta berupa buku agama Islam, buku matematika, buku pengetahuan Bahasa Indonesia, dan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp24.967.700,00.
- 3) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp19.516.568.448,00 dari Belanja Modal APBD dan Belanja Modal BLUD terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp18.743.408.071,00 dari Belanja Modal APBD di antaranya:
 - reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa renovasi/rehab lapangan olahraga sebesar Rp12.909.435.730,00 pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) berupa tanaman pohon tabebuya kuning dan tanaman pohon tabebuya merah muda pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp1.501.200.000,00; dan
 - reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) berupa tanaman hias sebesar Rp1.102.614.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - b) Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal BLUD yaitu Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa gedung dan bangunan dalam renovasi untuk pekerjaan *waterproofing rooftop*, gedung dan bangunan dalam renovasi untuk pemasangan timbal di ruangan radiologi, gedung dan bangunan dalam renovasi untuk penambahan ruangan TPS, dan Aset Tetap Lainnya pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa dengan total sebesar Rp773.160.377,00.
- 4) Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar Rp1.038.096.649,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat dilakukan berdasarkan pendalaman PD/UPD bahwa Aset Rusak Berat tersebut masih dapat digunakan kembali sebesar Rp297.203.759,00 terdiri dari:
 - tanaman hias sebesar Rp194.403.759,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - kendaraan pemadam kebakaran yang saat ini beralih fungsi menjadi alat peraga dalam monumen sejarah pemadam kebakaran sebesar Rp102.800.000,00 pada Dinas



Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

- b) Reklasifikasi dari Aset Fesos Fasum berupa maket/miniatur/replika rumah ibadah sebesar Rp301.482.500,00 pada Badan Pengelolaan Aset Daerah; dan
 - c) Reklasifikasi dari Aset Koefisien Lantai dan Bangunan berupa tanaman bungur, tanaman flamboyan kuning, tanaman palem sedang, dan Aset Tetap Lainnya pada Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp439.410.390,00.
- 5) Kapitalisasi selain dari Belanja Modal sebesar Rp2.015.683.920,00 terdiri dari:
- a) Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp194.461.920,00 terdiri dari:
 - buku ilmu pengetahuan umum, buku pengetahuan Bahasa Indonesia, buku pengetahuan Bahasa Inggris, dan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp104.721.800,00;
 - buku pendidikan sebesar Rp83.080.120,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - alat kukus sebesar Rp6.660.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - b) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.821.222.000,00 terdiri dari:
 - tanaman pohon tabebuaya kuning, pohon *Buttercup Cochlospermum Vitifolium*, pohon pulai alstonia, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur dengan total sebesar Rp1.767.366.000,00; dan
 - tanaman hias sebesar Rp53.856.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Penghapusan berupa buku matematika, buku ilmu pengetahuan umum, buku pengetahuan Bahasa Indonesia, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp152.231.082,00.
- 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp154.357.757,00 di antaranya:
 - reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa *audio amplifier*, *digital keyboard technics*, *audio processor am* dan gitar elektrik pada Badan



Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp73.000.000,00;

- reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa *wireless transmitter video and audio* sebesar Rp25.985.100,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; dan
- reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa *microphone/wireless mic* sebesar Rp20.450.002,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- 3) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp34.979.296.492,00 terdiri dari:
- a. Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat sebesar Rp9.150.000,00 terdiri dari:
 - meja tenis meja dan gawang futsal pada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu dengan total sebesar Rp6.150.000,00; dan
 - bahan perpustakaan berupa *encyclopedia*, kamus, buku referensi sebesar Rp3.000.000,00 pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - b. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp34.970.146.492,00 di antaranya:
 - *annual technical support master data management licence - customer 360 production licence, annual technical support software master data management, confluent gold platform 5 node - 1 year streaming software 1 lisensi = 5 set/node*, dan Aset Tetap Lainnya pada Unit Pengelola Jakarta Smart City dengan total sebesar Rp18.114.246.402,00;
 - lisensi *zimbra professional, ats exadata database machine oracle csi: 23883858, ats exadata storage server software oracle csi: 23938602*, dan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp16.033.110.840,00; dan
 - *software backup & replication universal* sebesar Rp596.625.000,00 pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
- 4) Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria sebesar Rp14.814.797.120,00 berasal dari Reklasifikasi ke Ekstrakomtabel di antaranya:
- bahan perpustakaan berupa buku pendidikan, buku ilmu pengetahuan umum, buku matematika, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi



Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp5.534.227.741,00;

- bahan perpustakaan berupa *encyclopedia*, kamus, buku referensi, buku ilmu pengetahuan umum, buku ilmu perpustakaan, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total sebesar Rp3.626.917.766,00; dan
- bahan perpustakaan berupa buku ilmu pengetahuan umum, buku pendidikan, buku agama Islam, dan Aset Tetap Lainnya pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp3.544.433.520,00.

- 5) Koreksi Lebih Catat Nilai berupa orang utan, gajah, bangsa monyet dan Aset Tetap Lainnya pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dengan total sebesar Rp518.717.442,00.

5.5.1.4.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.516.920.525.377,00 dan Rp3.489.601.572.718,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp1.169.000.612.977,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp2.141.681.660.318,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Belanja Modal tahun 2023 yang masih dalam proses pengerjaan	Rp	1.058.799.717.260
2)	Reklasifikasi dari Aset Tetap selain KDP	Rp	104.294.787.205
3)	Kurang Catat	Rp	5.906.108.512
Jumlah Penambahan		Rp	1.169.000.612.977
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi Ke Aset Tetap selain KDP	Rp	2.127.836.312.256
	a) Reklasifikasi Ke Aset Tetap Tanah/ Peralatan dan Mesin/ Gedung dan Bangunan/ Jalan Irigasi dan Jaringan/ Aset Tetap Lainnya	Rp	424.609.347.342
	b) Reklasifikasi dari KDP yang Sudah Selesai Dikerjakan	Rp	1.703.226.964.914
2)	Reklasifikasi ke Beban Jasa	Rp	3.025.742.350
3)	Koreksi Lebih Catat	Rp	3.330.107.091
4)	Reklasifikasi Ke Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	Rp	7.235.828.448
5)	Pengembalian Atas Temuan Pemeriksaan	Rp	181.251.961
6)	Reklasifikasi ke Beban Dibayar di Muka	Rp	72.418.212
Jumlah Pengurangan		Rp	2.141.681.660.318

Adapun rincian penambahan dan pengurangan KDP dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2023 yang masih dalam proses



pengerjaan sebesar Rp1.058.799.717.260,00 di antaranya:

- pembangunan gorong-gorong di Provinsi DKI Jakarta, pembangunan *Breakwater* Jakarta Utara tahap 1, pembangunan pipa air limbah JSDP (*Jaya Softskills Development Program*) zona 1 paket 6, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan lainnya pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp313.941.510.529,00;
- uang muka pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kemayoran, uang muka pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Pasar Rebo, uang muka pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kemayoran, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan lainnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp225.556.753.392,00; dan
- pembangunan rehab total gedung SDN Kembangan Utara 04 Pagi, pembangunan kawasan SDN Kembangan Utara 04 Pagi, pembangunan kawasan SDN Grogol 05 Pagi, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan lainnya pada Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan total sebesar Rp156.856.257.013,00.

2) Reklasifikasi dari Aset Tetap selain KDP sebesar Rp104.294.787.205,00 di antaranya:

- reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berupa pengerjaan pembangunan saringan sampah (*Pond Screen*) sebesar Rp40.172.381.073,00 pada Unit Penanganan Sampah Badan Air Provinsi DKI Jakarta;
- reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa renovasi bangunan Laboratorium Lingkungan Hidup sebesar Rp26.461.502.930,00 pada Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa pembangunan Puskesmas Kelurahan Bali Mester, pembangunan Puskesmas Kelurahan Pulo Gebang, pembangunan Puskesmas Kelurahan Duren Tiga, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan lainnya pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.613.674.259,00.

3) Kurang Catat sebesar Rp5.906.108.512,00 berupa kurang catat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan di Pulau Pramuka pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah Provinsi DKI Jakarta.



b. Mutasi Pengurangan

- 1) Reklasifikasi ke Aset Tetap selain KDP sebesar Rp2.127.836.312.256,00 terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp424.609.347.342,00 di antaranya:
 - reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa pembangunan jalan arteri provinsi (Segmen Marunda sampai dengan Jalan Raya Bekasi), pembangunan jalan arteri dan Saluran BKT (Segmen Marunda sampai dengan Rorotan), dan Konstruksi Dalam Pengerjaan lainnya dengan total sebesar Rp211.816.287.282,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa rehab gedung blok A sebesar Rp183.620.116.596,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja Provinsi DKI Jakarta; dan
 - reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa pembangunan Puskesmas Kebon Kosong, pembangunan Puskesmas Duren Tiga, pembangunan Puskesmas Kebon Pala, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan lainnya dengan total sebesar Rp18.878.013.135,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
 - b) Reklasifikasi dari KDP yang Sudah Selesai Dikerjakan sebesar Rp1.703.226.964.914,00 di antaranya:
 - bangunan *Refuse Derived Fuel* (RDF) dan *Landfill Mining* (LM) sebesar Rp878.899.052.185,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Provinsi DKI Jakarta;
 - bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalideres, bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan, bangunan Klinik/Puskesmas Ciracas, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan lainnya dengan total sebesar Rp389.852.915.051,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - bangunan saringan sampah di TB Simatupang sebesar Rp145.165.032.278,00 pada Unit Penanganan Sampah Badan Air Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp3.025.742.350,00 di antaranya:
 - biaya jasa pembangunan *Flyover* Sunter Permai Martadinata, biaya kajian dan perencanaan *basic design* struktur jembatan tahun 2021 sebesar Rp920.620.250,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI



Jakarta;

- biaya perencanaan gedung BPSPDM sebesar Rp378.015.000,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - biaya perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa lokasi yang tidak jadi dilanjutkan pekerjaan fisiknya sebesar Rp256.842.831,00 pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- 3) Koreksi Lebih Catat sebesar Rp3.330.107.091,00 di antaranya berupa pembatalan pengakuan utang sebesar Rp3.330.104.018,00 atas pekerjaan pembangunan gedung BST (*Basic Safety Training*) Marunda yang tidak dilanjutkan karena kemiringan konstruksi berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Pembayaran dan Tidak Menuntut Sisa Pembayaran Nomor: PS.03.03/A.DIR.WG.07444/2023 tanggal 17 November 2023 oleh KSO WIKAWG-CMP pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Reklasifikasi ke Aset KDP yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah sebesar Rp7.235.828.448,00 terdiri dari:
- pembangunan Kantor Pemda (Kejari) Kepulauan Seribu yang sudah tidak dilanjutkan pembangunannya sebesar Rp3.215.932.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 - pembangunan gedung BST (*Basic Safety Training*) Marunda yang tidak dilanjutkan karena kemiringan konstruksi sehingga tidak bisa digunakan sebesar Rp2.905.376.448,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - biaya DED (*Detail Engineering Design*) pembangunan terminal Kampung Rambutan yang statusnya dihentikan sementara sebesar Rp1.114.520.000,00 pada Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan.
- 5) Pengembalian atas temuan pemeriksaan sebesar Rp181.251.961,00 berupa kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan Saringan Sampah di TB Simatupang pada Unit Penanganan Sampah Badan Air Provinsi DKI Jakarta; dan
- 6) Reklasifikasi ke Beban Dibayar di Muka sebesar Rp72.418.212,00 berupa kelebihan pengakuan bobot pada pekerjaan Revitalisasi Pelabuhan Pulau Pramuka pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah Provinsi DKI Jakarta.



5.5.1.4.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015 dengan mekanisme perhitungan penyusutan sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyusutan Aset Tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dengan masa manfaat Aset Tetap yang diatur berdasarkan Pergub Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub Nomor 67 Tahun 2022.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp82.370.545.608.448,00 dan Rp76.113.631.291.993,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2023		
	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Koreksi Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	25.456.989.093.024	2.176.950.901.662	(635.441.000.446)	26.998.498.994.240
Gedung dan Bangunan	23.208.341.191.467	1.830.307.942.892	(612.320.365.657)	24.426.328.768.702
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	27.352.039.476.218	2.938.834.751.080	552.419.510.489	30.843.293.737.787
Aset Tetap Lainnya	96.261.531.284	3.552.176.619	2.610.399.816	102.424.107.719
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	76.113.631.291.993	6.949.645.772.253	(692.731.455.798)	82.370.545.608.448

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp579.286.732.228.440,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Aset Tetap	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	515.882.640.362.479	-	515.882.640.362.479
Peralatan dan Mesin	32.771.280.763.093	(26.998.498.994.240)	5.772.781.768.853
Gedung dan Bangunan	47.160.243.335.958	(24.426.328.768.702)	22.733.914.567.256
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	61.937.757.653.148	(30.843.293.737.787)	31.094.463.915.361
Aset Tetap Lainnya	1.388.435.196.833	(102.424.107.719)	1.286.011.089.114
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.516.920.525.377	-	2.516.920.525.377
Jumlah	661.657.277.836.888	(82.370.545.608.448)	579.286.732.228.440

5.5.1.4.8 Catatan Penting atas Aset Tetap

a. Tindak Lanjut Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Inventarisasi merupakan aktivitas utama di antara aktivitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah



Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 telah menetapkan hasil inventarisasi Aset Tetap.

Atas barang yang belum teridentifikasi dan/atau tidak ditemukan dapat disajikan dengan rincian pada tabel berikut.

No	Jenis Aset	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Tanah (KIB A)	1.579	5.615.338.906.505
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	82.808	851.562.576.411
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	1.379	448.767.327.264
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	1.749	3.566.831.360.592
5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	65.204	82.836.736.335
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	39	2.041.504.137
Jumlah		152.758	10.567.378.411.244

Atas nilai barang yang belum teridentifikasi dan/atau tidak ditemukan tersebut dilakukan pendalaman oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menghasilkan dua tindak lanjut, yaitu dilakukan koreksi dan dicatat sebagai Aset Lain-lain Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA).

Selama kurun waktu 2019 sampai 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pendalaman dan penelusuran kembali keberadaan aset tersebut serta menindaklanjuti penyelesaiannya sesuai ketentuan.

Selama tahun 2023 dilakukan koreksi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset terdiri dari:

a) Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) dari Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp1.370.058.808.068 di antaranya:

- bangunan Stasiun Permanen yang terletak di Jalan Duren Tiga Kecamatan Pancoran pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp462.338.611.700,00
- tanah Untuk Jalan Provinsi yang terletak di Jalan Kelapa Kopyor Kampung pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta utara dengan total sebesar Rp294.386.628.000,00
- tanah Untuk Jalan Provinsi yang terletak di Jalan Kampung Rawa Selatan 6 Kelurahan Johar Baru pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp101.019.334.000,00



- bangunan Gedung Pendidikan Permanen yang terletak di kelurahan Pancoran, Kalibata dan Ragunan pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp72.976.524.557,00;
- bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak pada kelurahan Duren Sawit, Kebon Kelapa dan Slipi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total Rp50.161.064.511,00; dan
- bangunan Gedung Pendidikan Permanen terletak pada kelurahan tegal alur, Pinangisia, Cengkareng barat pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total Rp45.435.013.438,00.

b) Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset menjadi Aset Tetap sebesar Rp11.989.425.290,00 terdiri dari:

- Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebanyak 30 jenis barang berupa peralatan dan mesin sebesar Rp115.296.954,00 berdasarkan Berita Acara Pra Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah KIB B Nomor 3746/PU.04.00 Tanggal 19 Desember 2023 dan surat permohonan pengajuan Fasilitas Koreksi dalam Siera nomor 6927/TG.02 tanggal 21 Desember 2023;
- Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 320 register berupa tanah jalan sebesar Rp11.748.499.280,00 yang sudah dilakukan pendataan pengukuran dan proses sertifikasi oleh kantor pertanahan Kepulauan seribu dilengkapi Berita Acara Pra Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah KIB A Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 3745/PU.04.00 Tanggal 19 Desember 2023 dan surat permohonan pengajuan Fasilitas Koreksi dalam Siera nomor 5382/BM.00.03 tanggal 22 Desember 2023;
- Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Jalan Kabupaten Kolektor yang beralamat Jl. Buntu 1 Kota Administrasi Jakarta Utara, Rp125.629.056,00 berdasarkan hasil penetapan Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah Nomor 24/MPSBMD-TAP/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 dan Surat



Permohonan Pengajuan Reklasifikasi dalam SIERA nomor 9435/-kr.02 tanggal 18 Juli.

Saldo Aset Lainnya Aset dalam proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) Per 31 Desember 2023 dan akan diusulkan untuk dapat diselesaikan melalui Sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah tahun 2023 sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Tanah (KIB A)	737	2.253.216.195.700
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	40.447	494.675.024.398
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	974	573.999.236.826
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	3253	1.128.652.852.566
5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	30.711	23.455.680.646
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	30	1.776.988.137
Jumlah		76.152	4.475.775.978.273

b. Pelaksanaan Penanganan Aset Tanah dan/atau Bangunan Bermasalah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan atensi khusus berkaitan dengan penanganan tanah dan/atau bangunan bermasalah milik Provinsi DKI Jakarta yang berada dalam penguasaan SKPD/UKPD (tercatat dalam KIB A SKPD/UKPD) atau berada dalam pengelolaan Pengelola Barang (tercatat atau belum tercatat dalam KIB A Pengelola Barang) yang dikuasai/diklaim/disomasi/diadukan pihak lain/sedang berproses/telah berproses di pengadilan, termasuk tanah fasos fasum yang bermasalah.

Penanganan tanah dan/atau bangunan bermasalah bertujuan untuk:

- 1) Membangun *database* tanah dan/atau bangunan bermasalah;
- 2) Mengetahui perkembangan tanah dan/atau bangunan bermasalah; dan
- 3) Melaksanakan tindak lanjut tanah dan/atau bangunan bermasalah.

Berikut Tanah Bermasalah yang sedang berproses di Pengadilan.

No	Alamat	Wilayah	SKPD/UKPD/ Pihak Lain	Upaya/Progres	Keterangan
1	Rumah Dinas yang dihuni oleh para Pensiunan Dokter dan para medis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Jakarta Pusat	Dinas Kesehatan	1. Rumah Dinas ditempati Pensiunan Dokter dan Paramedis (Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta); 2. Penghuni menolak untuk mengosongkan; dan 3. Menggugat Gubernur ke Pengadilan	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
2	Taman Asuhan Anak Pertiwi Jl. A.M. Sangaji No.21. Petojo Utara	Jakarta Pusat	Dinas Sosial	1. Sertifikat No.92/Desa Petojo Utara a.n. Pemda DKI Jakarta digugat oleh Ny. Aminah binti Mochammad Thalib	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
3	Lapangan Bola Tondano Jl.Danau Tondano. Bendungan Hilir. Tanah Abang	Jakarta Pusat	Dinas Olahraga dan Pemuda	1. SHP No.389 a.n Pemda DKI Jakarta 2. digugat oleh ahli waris Pangean Aria Jipang dengan dasar Verponding No.6651	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara



No	Alamat	Wilayah	SKPD/UKPD/ Pihak Lain	Upaya/Progres	Keterangan
5	Aset Taman Kota Rawasari Jl. Jenderal Ahmad Yani. Kelurahan Rawasari. Kecamatan Cempaka Putih	Jakarta Pusat	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1. Diadukan oleh Djuremi ke PN 2. Fisik telah dikuasai; 3. Telah dipasang papan nama tanah; 4. Belum bersertifikat.	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
6	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 38 Jakarta Jl. Karet Pasar Baru Timur. Kelurahan Karet Tengsin. Kecamatan Tanah Abang	Jakarta Pusat	Sudin Pendidikan 2	1. Diadukan oleh ahli waris Alm Moch Muktar ke PN 2. Fisik telah dikuasai; 3. Telah dipasang papan nama tanah; 4. Keputusan PN Pemprov menang 5. Belum bersertifikat.	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
7	Tanah Kosong Jl.Yos Sudarso No.19. Sungai Bambu. Tanjung Priok. Jakarta Utara.	Jakarta Utara		1. Diadukan oleh Darianus Lungguk Sitorus ke PN 2. Belum dipasang papan nama tanah; 3. Telah bersertifikat. SHP no.538/Sungai Bambu an. Pemda DKI Jakarta	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
8	Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok (Samping Kodim 0502/JU)	Jakarta Utara	PPAD	Hasil koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta bahwa Pemprov DKI Jakarta akan upaya banding kembali. Dalam amar putusan tidak menyebutkan siapa pemilik tanah tersebut dan hanya membatalkan sertifikatnya saja. untuk selanjutnya dari Biro Hukum akan mengajukan upaya hukum lainnya	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun perkara
9	Jl. Assakinah Raya RT. 03 RW. 02 Kel. Kebagusan. Kec. Pasar Minggu	Jakarta Selatan	Sudin Pendidikan 2	Dikuasai IR. Agus Bakri Bin H. Bakri	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun perkara
10	Taman Marga Satwa Ragunan. Jalan Harsono No. 1 Ragunan. Pasar Minggu. Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	UPT TMR Ragunan	Digugat Ir. Alimin Abdullah	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun perkara
11	Kav. Cermi RT. 004 RW.03 Ke. Petukangan Utara. Kec. Pesanggrahan. Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	PPAD	1. PN Jaksel Menolak kasasi dari Panggabean-menang NO (Niet Ontvankelijke atau merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dari cacat Formal 2. Digugat oleh Wayan denada dan masih berlangsung di PN Jaksel 3. Saat ini plang aset diduga dirusak oleh Ali Said Bin Tinggal 4. Kepala BPAD agar bersurat ke Biro Hukum untuk melaporkan ke Polisi atas dugaan pengrusakan Plang Aset. 5. lokasi tersebut agar segera dibuatkan SK Penggunaan untuk SKPD	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
12	Jl. Delman Elok VI. Kp. Peninggaran RT. 007 RW.011 Kel. Kebayoran Lama Utara. Kec. Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	Dinas Kehutanan	Digugat Niharoh dkk	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun perkara
13	eks. Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jl. Rambutan RT. 02 RW. 04 Kel. Pejaten Barat. Kec. Pasar Minggu. Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jakarta Selatan	BPAD/PPAD	Digugat oleh M. Yazid	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun perkara
14	Jl. Lenteng Agung Raya. Kel. Lenteng Agung. Kec. Jagakarsa.	Jakarta Selatan	Dinas Kehutanan	digugat oleh R. Ivone Felicia	Masih Dalam Penelusuran



No	Alamat	Wilayah	SKPD/UKPD/ Pihak Lain	Upaya/Progres	Keterangan
	Kota Administrasi Jakarta Selatan				bidang terkait atas tahun berperkara
16	Jl. Cikoko Barat I RT. 001 RW.05. Kel.Cikoko. Kec. Pancoran	Jakarta Selatan	-	Digugat oleh Masyarakat. Dikuasai Fauzi untuk kandang sapi	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
17	Jl. Cipinang Muara III Rt. 09/015	Jakarta Timur	-	Digugat Hj. Eliya Kurniawati	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
18	Kel. Bidara Cina (Sudetan Kali Ciliwung)	Jakarta Timur	-	Proses PTUN dan Dikuasai masyarakat	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara
19	Jl. Bambu Kuning Rt. 012/002 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung	Jakarta Timur	Dinas KPKP	-	Masih Dalam Penelusuran bidang terkait atas tahun berperkara

c. Pelaksanaan Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan/pengerjaan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 *Audited* terdapat 72 PD/UKPD Provinsi DKI Jakarta yang memiliki penyajian dalam akun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F). Jumlah register dimaksud sebanyak 1.351 (*update* jumlah register) register dengan total senilai Rp3.589.601.572.718,00.

Akun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu disampaikan secara memadai status pengerjaan dan penyelesaiannya. Atas hal tersebut telah terbit Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2023 tentang Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Menindaklanjuti hal tersebut telah terbit Surat Edaran Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan telah dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut pada tanggal 19 Juni 2023 selanjutnya dilakukan pendalaman oleh PD/UKPD dengan hasil sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah PD/UKPD	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1	Pembangunan telah selesai dan dilakukan reklasifikasi sesuai klasifikasi Aset Tetap	4	17	1.105.532.178.120
2	Biaya penunjang pembangunan yang pembangunan fisiknya telah selesai dan dilakukan atribusi ke dalam aset induknya	10	65	23.199.918.764
3	Pembangunan sedang dalam proses penyelesaian sehingga tetap disajikan dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F)	21	187	2.028.194.804.838
4	Biaya penunjang yang pembangunan fisiknya sedang dalam proses penyelesaian sehingga tetap disajikan dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) sampai dengan selesai pengerjaannya	34	487	86.235.405.724
5	Pembangunan fisik yang diberhentikan	9	39	151.698.924.176



No	Uraian	Jumlah PD/UKPD	Jumlah Register	Nilai (Rp)
	sementara yang ditetapkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang diberhentikan sementara dan tetap disajikan dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) sampai dengan selesai pengerjaannya			
6	Biaya penunjang pembangunan yang ditetapkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang diberhentikan sementara dan tetap disajikan dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) sampai dengan selesai pengerjaannya	23	435	173.960.483.473
7	Pembangunan fisik yang diberhentikan permanen dan dilakukan pembahasan bersama Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan (TPSKDP),	4	14	11.102.370.011
8	Biaya penunjang pembangunan yang diberhentikan permanen dan dilakukan pembahasan bersama Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan (TPSKDP)	24	107	9.677.487.612

Selanjutnya telah dilaksanakan pembahasan dan konfirmasi oleh Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan (TPSKDP) atas hasil pendalaman berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan yang diusulkan permanen pada hari Rabu s.d Jumat tanggal 01 s.d 03 November 2023 sesuai Undangan Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta nomor 909/PU.04.00 tanggal 26 Oktober 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1) **Pembangunan fisik yang diusulkan dihentikan permanen**

- a) Terdapat 1 register KDP berupa fisik senilai Rp682.384.675,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota - Jaksel 1 PD/UKPD yang semula diusulkan PD/UKPD untuk diberhentikan permanen, namun dari atas hasil pembahasan dengan Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan (TPSKDP) pembangunan fisik tersebut ditetapkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang diberhentikan sementara dan selanjutnya tetap disajikan dalam akun KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) sampai dengan selesai pengerjaannya.
- b) Terdapat 1 Register KDP senilai Rp968.572.870,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jaksel yang semula diusulkan PD/UKPD untuk diberhentikan permanen, atas hasil pembahasan oleh Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan (TPSKDP) pembangunan fisik tersebut bukan termasuk ke dalam kategori Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sehingga selanjutnya dilakukan reklasifikasi ke sesuai klasifikasi Aset Tetap yang seharusnya.
- c) Terdapat 3 Register KDP senilai Rp9.451.412.466,00 dengan hasil pembahasan sebagai berikut:



1. Dinas Pendidikan sebanyak 2 register senilai Rp6.235.480.466,00 berupa rehab total gedung praktik *Basic Safety Training* (BST) SMKN 36 *Standard International Maritime Organization* pada gedung eks SDN Marunda 02 yang hasil kajian terdapat penurunan bangunan sebesar 54 cm dengan kemiringan menjadi 10 cm sehingga tidak dapat dilakukan pembangunan pada lokasi tersebut
 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 1 register senilai Rp3.215.932.000,00 berupa kegiatan pembangunan gedung kantor Pemda Kepulauan seribu (Kantor Kejari) yang berlokasi di pulau karya pada tahun 2013 dan terjadi gagal lelang sehingga tidak dapat dilanjutkan kembali pembangunannya, atas hal tersebut struktur bangunan sudah tidak dapat dipertahankan
- d) Atas kondisi tersebut diatas selanjutnya dilakukan penetapan status penghentian permanen aset KDP oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta dan akan dilakukan reklasifikasi penyajian register dari KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) ke Aset Lain Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah dan selanjutnya dilakukan usul hapus.
- 2) **Biaya Penunjang Pembangunan yang Diusulkan Diberhentikan Permanen**
- a) Terdapat 37 Register KDP berupa biaya penunjang pembangunan senilai Rp6.636.466.245,00 pada 10 PD/UKPD yang diusulkan diberhentikan permanen dengan rincian sebagai berikut.

No	SKPD/UKPD	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11	3.813.021.312
2	Dinas Sumber Daya Air	11	794.865.000
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	2	1.004.768.375
4	Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	1	97.119.000
5	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	1	162.360.000
6	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakpus	1	45.039.998
7	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota - Jakpus	1	32.980.000
8	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota - Jaksel	1	89.894.460



No	SKPD/UKPD	Jumlah Register	Nilai (Rp)
9	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Kep. Seribu	3	242.548.100
10	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	5	353.870.000
Grand Total		37	6.636.466.245

ditetapkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang diberhentikan sementara dan selanjutnya tetap disajikan dalam akun KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) sampai dengan selesai pengerjaannya.

- b) Terdapat 2 Register KDP berupa biaya penunjang senilai Rp178.007.500,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan 1 PD/UKPD yang diusulkan PD/UKPD untuk diberhentikan permanen, atas hasil pembahasan oleh Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan (TPSKDP) biaya penunjang tersebut bukan termasuk ke dalam kategori Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) selanjutnya dilakukan reklasifikasi ke akun yang semestinya.
- c) Terdapat 68 Register KDP berupa biaya penunjang pembangunan senilai Rp2.863.013.867,00 pada 16 PD/UKPD berupa biaya penunjang pembangunan dengan rincian sebagai berikut.

No	SKPD/UKPD	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1	Dinas Bina Marga	2	920.620.250
2	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	1	378.015.000
3	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	1	84.093.900
4	Dinas Pendidikan	2	151.096.000
5	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	38	209.144.409
6	Dinas Sumber Daya Air	1	50.000.000
7	Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	1	33.313.000
8	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota - Jakbar	1	14.877.700
9	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakbar	2	59.782.500
10	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakpus	1	155.935.780
11	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	2	238.340.575
12	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	1	45.650.000
13	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakbar	5	94.916.800
14	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota - Jakpus	2	106.101.105
15	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota - Jakut	7	272.121.848



No	SKPD/UKPD	Jumlah Register	Nilai (Rp)
16	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	1	49.005.000
Jumlah		68	2.863.013.867

Atas hasil pembahasan Tim Penetapan Status Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut diatas sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan, selanjutnya perlu dilakukan penetapan status penghentian permanen aset KDP oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pengelola Barang Milik Daerah. Selanjutnya terhadap register KDP yang telah dilakukan penetapan status oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dapat ditindaklanjuti dengan dilaksanakan koreksi penyajian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

d. Aset Konsesi Jasa

Berdasarkan PSAP 16 Konsesi Jasa adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penugasan pembangunan aset kepada beberapa BUMD dalam rangka penyediaan layanan kepada publik, sebagaimana daftar berikut.

No	Aset Penugasan	BUMD
1	<i>Light Rapid Transit</i> (LRT)	PT Jakarta Propertindo
2	Jakarta International Velodrome	PT Jakarta Propertindo
3	Jakarta International Equestrian Park (JIEP)	PT Jakarta Propertindo
4	Jakarta International Stadium (JIS)	PT Jakarta Propertindo
5	Taman Ismail Marzuki	PT Jakarta Propertindo
6	MRT	PT MRT Jakarta

Berdasarkan PSAP 16, maka terdapat 2 (dua) penugasan yang berpotensi memenuhi kriteria Aset Perjanjian Konsesi Jasa, yaitu LRT pada PT Jakarta Propertindo dan MRT pada PT MRT Jakarta. Menindaklanjuti hal tersebut saat ini masih dilakukan kajian atas penugasan LRT pada PT Jakpro. Atas penugasan pada PT MRT Jakarta telah dilakukan penelitian dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil audit KAP atas Laporan Keuangan PT MRT, aset penugasan tersebut tidak disajikan sebagai Aset Perjanjian Konsesi Jasa sesuai dengan ISAK 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa, melainkan disajikan sebagai Aset Tetap BUMD.



- 2) Tidak ada intensi dari Pemprov DKI Jakarta bagi PT MRT untuk menyerahkan Aset Penugasan.
- 3) Perlu ada penyesuaian berdasarkan ketentuan di antaranya perda 9 Tahun 2019, Perjanjian Penyelenggaraan tahun 2017 dan Pergub 29 tahun 2020.

e. Pengungkapan Lainnya

- 1) Aset ex. UP Transjakarta Busway

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersebut termasuk aset ex. UP Transjakarta Busway yang saat ini masih dicatat sebagai aset Dinas Perhubungan dari masih menunggu Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan Aset Tetap. Proses penilaian atas aset inbreng kepada BUMD PT Transjakarta telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 797 Tahun 2019 tentang Rincian Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Aset Tetap Pada PT Transportasi Jakarta.

Untuk masa transisi telah diterbitkan Pergub Nomor 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta dengan ketentuan Menetapkan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh PT Transjakarta, berupa lahan depo, halte dan sarana pendukung, bangunan gedung kantor, sarana penunjang dan inventaris kantor, kendaraan dinas operasional dan bus. Pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan penyerahan Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal (inbreng). PT Transjakarta dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah peruntukannya tanpa seizin tertulis Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- 2) Aset dalam Permasalahan Hukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya penyelesaian perkara hukum atas tanah aset pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Kasasi dan Peninjauan Kembali).

Monitoring atas klaim/gugatan atas tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data pada Biro Hukum



Setda Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Perkara Pada Tingkat	Menang	Kalah	Proses	Dicabut
1	Pengadilan Negeri	18	0	16	2
2	Pengadilan Tinggi	11	0	12	0
3	Mahkamah Agung (Kasasi)	5	1	7	0
4	Mahkamah Agung (PK)	7	0	8	0
	JUMLAH	41	1	43	2

Adapun atas klaim/gugatan atas tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Perkara Pada Tingkat	Menang	Kalah	Proses	Dicabut
1	Pengadilan Negeri	1	0	9	2
2	Pengadilan Tinggi	1	0	6	0
3	Mahkamah Agung (Kasasi)	1	0	0	0
4	Mahkamah Agung (PK)	0	0	0	0
	JUMLAH	3	0	15	2

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengamanan atas tanah dalam sengketa tersebut, antara lain melalui pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah. Namun demikian, terdapat 1 bidang tanah aset eks BPIP Jaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3002/Tebet Barat yang belum tercatat dalam KIB A, dan terdapat perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh RR. Sri Suharni Iskandar sebagai Penggugat melawan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat I, dengan objek perkara tanah aset eks BPIP Jaya Sertifikat Hak Milik No. 3002/Tebet Barat yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Desember 2000 terletak di Jalan Prof. DR. Supomo No. 49, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, atas perkara tersebut telah diperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 151/PDT/2021/PT. DKI tanggal 3 Agustus 2021 jo. Putusan Pengadilan Negeri Selatan No. 269/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Juli 2020 yang amar putusannya pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada di pihak yang menang.

Tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berstatus Sertifikat Hak Milik No. 01880/Rawamangun seluas 8.511m² yang terletak di RT



001/RW 002, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur yang rencana akan dibangun Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur, saat ini fisik sudah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dalam tahap pembangunan Kantor Sudin Gulkarmat Kota Administrasi Jakarta Timur. Terdapat gugatan yang diajukan oleh M. Napis Bin H. Asmuni dan H. Achmad Bin H. Kosim Bin H.M. Zen alias Tjio Boe Tjoey alias Tjiong Boe Tjoey sebagai Penggugat terhadap Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 281/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 14 Mei 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 608/PDT/2019/PT DKI tanggal 6 Januari 2020 pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dengan demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada sebagai pihak yang menang. dan sampai saat ini berdasarkan sistem informasi pengadilan, Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Permasalahan atas sengketa tanah lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Permasalahan Tanah Aset di Kelurahan Meruya Selatan

Bidang tanah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Kelurahan Meruya Selatan yang diklaim oleh PT Portanigra telah diterbitkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 132/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt tanggal 20 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2009/PTDKI tanggal 10 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 585 PK/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang amarnya antara lain menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp291.422.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dan ganti rugi imaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada PT Portanigra.

Atas Putusan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan Aanmaning/Tegoran Nomor 21/2012 Eks. jo. Nomor 132/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar agar menghadap Ketua Pengadilan



Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 untuk diberikan Tegoran/Aanmaning melaksanakan 132/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt tanggal 20 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2009/PTDKI tanggal 10 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 585 PK/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014.

Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta telah menghadiri Tegoran/Aanmaning dimaksud, yang pada intinya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat menegur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) di mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan imaterial kepada PT Portanigra sebesar Rp391.442.000.000,00.

Terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak dengan alasan di dalam Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan No. 10/2007 Eks. Jo. No. 161/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 10 Maret 2016 dan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan No. 11/2007 Eks. Jo. No. 364/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 10 Maret 2016, pada intinya menyebutkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melaksanakan eksekusi pada tanggal 10 Maret 2016 dan ditetapkan bahwa atas tanah yang di atasnya terdapat objek-objek yang dipergunakan sebagai fasos dan fasum milik Pemerintah serta fasos dan fasum lainnya yang dipergunakan sebagai tempat ibadah, tidak dilaksanakan eksekusi dan/atau dikeluarkan dari objek eksekusi. Selain itu, terkait ganti rugi materiil dan imaterial kepada PT Portanigra sebesar Rp391.442.000.000,00 tidak dapat dilakukan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap sebagai pemilik tanah aset berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 500/PDT/2009/PT.DKI tanggal 16 Desember 2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 168/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar tanggal 11 Oktober 2007, di mana putusan ini tidak pernah dibatalkan sehingga masih berlaku.

- b) Permasalahan Tanah Pengadaan Lahan Rumah Sakit Sumber Waras



Terhadap permasalahan pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) telah memberikan jawaban melalui surat Nomor 07/YKSW/IX/2017 tanggal 14 September 2017 perihal Jawaban Atas Permintaan Pemulihan Indikasi Kerugian Daerah yang menyatakan bahwa Yayasan Kesehatan Sumber Waras menolak untuk membayar kerugian daerah tersebut.

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas pada lahan yang dibeli tersebut, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengupayakan untuk berkoordinasi dan membuat kesepakatan untuk merealisasikan akses jalan bersama dari Jalan Kyai Tapa menuju lokasi tanah yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

c) Tanah Aset Gedung dan Bangunan hasil penyerahan dari Pengembang Reklamasi

Pada Tahun 2015, penerimaan aset gedung dan bangunan sebagai tambahan kontribusi reklamasi dari pengembang reklamasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berasal dari:

1. PT Muara Wisesa Samudera selaku Pengembang Pulau G, berupa bangunan Rusunawa Daan Mogot sebesar Rp89.655.700.000,00; dan
2. PT Jaladri Kartika Pakci selaku Pengembang Pulau I, berupa bangunan Rusunawa Muara Baru sebesar Rp90.539.800.000,00.

Terkait Reklamasi Pulau G, terdapat gugatan yang diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup diwakili oleh Gobang, Dkk sebagai Penggugat terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat dan PT Muara Wisesa Samudera sebagai Tergugat II Intervensi dengan objek sengketa Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah terbit Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tanggal 31 Mei 2016 jo. Putusan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/B/2016/PTTUN.JKT tanggal 17 Oktober 2016 yang amar putusannya menyatakan gugatan tidak diterima, di mana selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan upaya hukum, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada dipihak yang menang dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI



Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tetap sah dan berlaku.

Sedangkan terkait dengan Reklamasi Pulau I, PT Jaladri Kartika Pakci telah mengajukan gugatan terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nomor 1049 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi, khususnya sepanjang menyangkut pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I atas nama PT Jaladri Kartika Pakci, dan telah diputus dengan register Putusan 32 PK/TUN/2021 tanggal 4 Maret 2021 jo Nomor 98/B/2020/PTUN-JKT tanggal 28 April 2019 jo Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2019, yang amar putusannya pada pokoknya menolak gugatan seluruhnya, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada dipihak yang menang dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1049 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tetap sah dan berlaku.

f. Aset Bersejarah

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 sudah termasuk nilai bangunan-bangunan bersejarah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan di DKI Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, di antaranya adalah; Gedung Balaikota Pemprov DKI Jakarta, Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Taman Prasasti, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bahari, Museum Tekstil, Museum Djoeang 45, Museum Taman Arkeologi, Gedung Eks KODIM 0505, Gedung Eks Imigrasi, Gedung Balai Konservasi, Gedung Kesenian, Monumen Nasional, Jembatan Kota Intan, dan Museum M.H. Thamrin. Pencatatan Aset Bersejarah berupa gedung sebagai Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa untuk bangunan bersejarah yang digunakan dalam kegiatan operasional dan memberikan potensi manfaat, diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap.

Selain aset bersejarah yang sudah diputuskan dalam Surat Keputusan Gubernur diatas terdapat juga aset yang terindikasi bersejarah pada



museum-museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- 1) Unit Pengelola Museum Seni mempunyai 3 Museum bersejarah yaitu:
 - a) Museum Wayang memiliki 4.893 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya seperti wayang, pahatan kayu, barang kerajinan, lukisan, dan alat kesenian lain-lain;
 - b) Museum Tekstil memiliki 1.075 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya seperti koleksi busana nusantara dan barang kerajinan seni;
 - c) Museum Seni Rupa dan Keramik 1.860 unit aset yang dikelompokkan dalam benda sejarah lainnya berupa lukisan, keramik (guci), pahatan kayu, dan pahatan lain-lain.
- 2) Pusat Konservasi Cagar Budaya memiliki 1 unit aset berupa jangkar besi.
- 3) Unit Pengelola Taman Ismail Marzuki memiliki 6 unit aset berupa alat kesenian, dan karya seni (album foto dan partitur lagu).
- 4) Unit Pengelola Museum Kebaharian memiliki 155 unit aset berupa lukisan, benda-benda purbakala, dan benda-benda bersejarah lain-lain.
- 5) Unit Pengelola Museum Kesejarahan memiliki 256 unit aset berupa buku.
- 6) Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya memiliki 5 unit aset berupa bangunan bersejarah.
- 7) Unit Pengelola Monas memiliki 52 unit aset berupa Monumen Proklamator, Patung Diponegoro, dan karya seni (patung dan miniatur).

5.5.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp31.969.187.415.594,00 dan Rp59.120.774.131.847,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.46

Aset Lainnya

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	36.651.951.367	36.714.362.261
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga (neto)	6.130.597.356.223	6.167.037.610.035
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.524.489.356.721	6.561.259.793.794
	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(393.892.000.498)	(394.222.183.759)
3.	Aset Tidak Berwujud (neto)	96.967.954.202	202.462.783.333
	Aset Tidak Berwujud	634.599.864.666	566.900.953.743



No	Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(537.631.910.464)	(364.438.170.410)
4.	Aset Lain-lain (neto)	25.704.970.153.802	52.714.559.376.218
	Aset Lain-lain	33.076.672.679.419	59.324.093.700.875
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(7.371.702.525.617)	(6.609.534.324.657)
	Jumlah (1+2+3+4)	31.969.187.415.594	59.120.774.131.847

5.5.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang dimiliki Pemprov DKI kepada penghuni rusun yang melakukan pembelian unit rusun secara angsuran. Pembelian unit rusun di bagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- Pembelian unit rusun untuk warga terprogram diperuntukkan bagi warga yang terkena pembebasan lahan atau korban kebakaran yang mendapat ganti rugi dari Pemprov DKI Jakarta. Untuk pembelian terprogram apabila dilakukan secara angsuran maka akan dikenakan *rate* sebesar 5%.
- Pembelian unit rusun tambahan untuk warga terprogram diperuntukkan bagi warga yang tanahnya terkena pembangunan unit rumah susun tersebut dengan luas tanah 50m² s.d 100m² yang akan mendapatkan hak pembelian 2 unit rusun dengan harga jual dikalikan 2 dari pembelian warga terprogram
- Pembelian unit rusun untuk warga tidak terprogram merupakan warga yang tidak terekomendasi untuk mendapatkan unit rumah susun namun karena tidak memiliki tanah di lokasi tersebut sehingga membeli unit rusun dari orang yang melakukan pembelian terprogram. Harga jual untuk warga tidak terprogram dikalikan 3 dari pembelian warga terprogram karena sudah tidak disubsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang pada 31 Desember 2023 belum jatuh tempo. Untuk Tagihan Penjualan Angsuran yang sudah jatuh tempo akan disajikan di Neraca pada Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah dan dibentuk penyisihan atas kualitas tagihan.

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp36.651.951.367,00 dan Rp36.714.362.261,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan yang berasal dari reklasifikasi dari bagian lancar tagihan penjualan angsuran dan koreksi kurang catat nilai sebesar Rp2.543.753.678,00 serta mutasi pengurangan yang berasal dari pembayaran unit sebesar Rp1.160.075.973,00 dan koreksi pengurangan lainnya sebesar Rp1.446.088.599,00.



Tabel 5.47
Rincian Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Nama Rusun	31 Desember 2022	Koreksi Penambahan (+)	Pembayaran (-)	Koreksi Pengurangan Lainnya (-)	31 Desember 2023
1	Tambora III	670.198.069	86.294.128	50.387.420	21.420.820	684.683.957
2	Bendungan Hilir II	3.027.591.890	69.587.253	78.961.880	51.827.346	2.966.389.917
3	Jatibunder	147.715.812	-	-	-	147.715.812
4	Tanah Tinggi	2.464.335.414	10.360.022	47.079.712	10.429.000	2.417.186.724
5	Karet Tengsin I	594.953.481	53.239.062	75.186.371	134.519.540	438.486.632
6	Petamburan	15.802.675.422	40.739.798	109.699.754	58.814.622	15.674.900.844
7	Karet Tengsin II	6.550.328.871	1.057.980.930	569.810.494	1.114.811.744	5.923.687.563
8	Tebet Barat I	908.475.521	1.174.349.693	114.278.363	54.265.527	1.914.281.324
9	Tebet Barat II	806.278.560	38.355.726	58.229.726	-	786.404.560
10	Bidara Cina	5.741.809.221	12.847.066	56.442.253	-	5.698.214.034
	Jumlah	36.714.362.261	2.543.753.678	1.160.075.973	1.446.088.599	36.651.951.367

5.5.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari aset kekayaan daerah yang disewakan, aset kerjasama pemanfaatan, aset bangun guna serah, aset bangun serah guna dan aset kekayaan daerah yang dipinjam-pakai.

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.524.489.356.721,00 dan Rp6.561.259.793.794,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.48
Rincian Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan	1.029.914.960.000	1.078.782.537.270
2	Aset Kerjasama Pemanfaatan	1.901.175.286.258	1.896.239.648.072
3	Aset Bangun Guna Serah (Build. Operate and Transfer/BOT)	1.209.123.512.500	1.209.123.512.500
4	Aset Bangun Serah Guna (Build. Transfer and Operate/BTO)	1.045.325.528.858	1.040.247.148.858
5	Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakai	1.338.950.069.105	1.336.866.947.094
	Jumlah	6.524.489.356.721	6.561.259.793.794

Daftar rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 tersaji di Lampiran 13.1 dan 13.2. Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dijelaskan sesuai dengan klasifikasi aset berikut.



5.5.1.5.2.1 Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan

Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan merupakan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Saldo Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.029.914.960.000,00 dan Rp1.078.782.537.270,00. Selama tahun 2023, terdapat mutasi penambahan sebesar Rp28.008.539.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp76.876.116.270,00. Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan adalah sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Reklasifikasi dari Properti Investasi berupa Tanah dan Bangunan Gereja Kristen Indonesia Kedoya sebesar Rp5.673.360.000,00 dan sebesar Rp990.000.000,00; dan
- 2) Reklasifikasi dari Aset Fesos Fasum berupa tanah sebesar Rp21.345.179.000,00 terletak di Perumahan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara yang digunakan oleh Yayasan Elka dan Gereja KGPM Sidang Yeremia.

b. Mutasi Pengurangan

Reklasifikasi menjadi Aset Tetap berupa tanah sebesar Rp42.509.195.000,00, peralatan dan mesin sebesar Rp212.870.000,00 dan bangunan sebesar Rp34.154.051.270,00 untuk kantor UP JAMC.

5.5.1.5.2.2 Aset Kerjasama Pemanfaatan

Aset Kerjasama Pemanfaatan adalah aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

Saldo Aset Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.901.175.286.258,00 dan Rp1.896.239.648.072,00. Selama tahun 2023, terdapat mutasi penambahan sebesar Rp4.935.638.186,00 yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Kerjasama Pemanfaatan berupa lapangan basket di Kawasan olahraga Soemantri Brojonegoro.

5.5.1.5.2.3 Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate, and Transfer/BOT*)

Aset Kerjasama Bangun Guna Serah adalah aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan / atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati.



Saldo Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer / BOT*) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.209.123.512.500,00. Selama tahun 2023 tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan pada Aset Bangun Guna Serah (*Build, Operate, and Transfer/BOT*).

5.5.1.5.2.4 Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer, and Operate/BTO*)

Aset Kerjasama Bangun Serah Guna adalah aset yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga / investor mendirikan bangunan dan / atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Saldo Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate / BTO*) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.045.325.528.858,00 dan Rp1.040.247.148.858,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp5.078.380.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Serah terima aset berupa Gedung dan Bangunan dari Yayasan Pendidikan Mardi Luhur atas pemenuhan perjanjian pemanfaatan sebesar Rp2.479.300.000,00; dan
- 2) Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum berupa tanah sebesar Rp2.599.080.000,00 di Taman Meruya Ilir Kembangan Jakarta Barat yang berasal dari PT. Labrata RE dan telah dikerjasamakan kepada Yayasan Patmos.

5.5.1.5.2.5 Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjamkaikan

Aset kekayaan daerah yang dipinjamkaikan adalah aset yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

Saldo Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjamkaikan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.338.950.069.105,00 dan Rp1.336.866.947.094,00. Selama tahun 2023, terdapat mutasi penambahan sebesar Rp3.143.351.011,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.060.229.000,00. Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan adalah sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Koreksi kurang catat barang berupa Peralatan dan Mesin yang dipinjamkaikan kepada KPU sebesar Rp1.393.000.011,00, KPP



Pratama Setiabudi sebesar Rp149.500.000,00 dan KPP Pratama Pancoran sebesar Rp66.000.000,00; dan

- 2) Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum berupa tanah yang dipinjam-pakaikan kepada KPU Jakarta Selatan sebesar Rp1.534.851.000,00.

b. Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan berupa reklasifikasi ke Aset Tetap berupa tanah sebesar Rp345.504.000,00 dan gedung sebesar Rp714.725.000,00 yang akan digunakan oleh Satpol PP.

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp393.892.000.498,00 dan Rp394.222.183.759,00 dengan rincian yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2023			
	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Koreksi Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
	2022	2023	2023	2023
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	33.307.741.563	1.228.377.901	(23.482.323.064)	11.053.796.400
Aset Kerjasama Pemanfaatan	41.990.830.572	0	4.935.638.186	46.926.468.758
Aset Bangun Guna Serah (BOT)	2.250.000	450.000	0	2.700.000
Aset Bangun Serah Guna (BTO)	272.111.956.667	13.467.572.135	(2)	285.579.528.800
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan	46.809.404.957	2.530.044.905	990.056.678	50.329.506.540
Jumlah	394.222.183.759	17.226.444.941	(17.556.628.202)	393.892.000.498

Nilai buku Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.130.597.356.223,00 dengan rincian yang dapat dijelaskan sebagai berikut

Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	1.029.914.960.000	(11.053.796.400)	1.018.861.163.600
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	1.901.175.286.258	(46.926.468.758)	1.854.248.817.500
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer / BOT)	1.209.123.512.500	(2.700.000)	1.209.120.812.500
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Transfer and Operate / BTO)	1.045.325.528.858	(285.579.528.800)	759.746.000.058
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan	1.338.950.069.105	(50.329.506.540)	1.288.620.562.565
Jumlah	6.524.489.356.721	(393.892.000.498)	6.130.597.356.223



a. Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa

Saldo akumulasi penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-sewa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp11.053.796.400,00 dan Rp33.307.741.563,00. Rincian akumulasi penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-sewa per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jenis Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	1.004.644.128.000	(0)	1.004.644.128.000
Peralatan dan Mesin	264.985.000	(264.985.000)	0
Gedung dan Bangunan	14.437.937.000	(7.625.611.400)	6.812.325.600
Jalan Irigasi Jaringan	10.544.000.000	(3.163.200.000)	7.380.800.000
Aset Lainnya	23.910.000	(0)	23.910.000
Jumlah	1.029.914.960.000	(11.053.796.400)	1.018.861.163.600

b. Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan

Saldo akumulasi penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-kerjasama pemanfaatan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp46.926.468.758,00 dan Rp41.990.830.572,00. Rincian akumulasi penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga-kerjasama pemanfaatan per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jenis Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	1.854.248.817.500	(0)	1.854.248.817.500
Gedung dan Bangunan	46.926.468.758	(46.926.468.758)	0
Jumlah	1.901.175.286.258	(46.926.468.758)	1.854.248.817.500

c. Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*)

Saldo akumulasi penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.700.000,00 dan Rp2.250.000,00. akumulasi penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*) per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jenis Aset BOT	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	1.209.114.512.500	(0)	1.209.114.512.500
Gedung dan Bangunan	9.000.000	(2.700.000)	6.300.000
Jumlah	1.209.123.512.500	(2.700.000)	1.209.120.812.500



d. Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*)

Saldo akumulasi penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp285.579.528.800,00 dan Rp272.111.956.667,00. Rincian akumulasi penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*) per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jenis Aset BTO	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	736.240.449.050	(0)	736.240.449.050
Peralatan dan Mesin	1.919.950.000	(1.919.950.000)	0
Gedung dan Bangunan	307.165.129.808	(283.659.578.800)	23.505.551.008
Jumlah	1.045.325.528.858	(285.579.528.800)	759.746.000.058

e. Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan

Saldo akumulasi penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp50.329.506.540,00 dan Rp46.809.404.957,00. Rincian akumulasi penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jenis Aset Kekayaan Daerah yang dipinjampakai	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	1.261.269.811.000	(0)	1.261.269.811.000
Peralatan dan Mesin	23.699.099.125	(22.952.683.816)	746.415.309
Gedung dan Bangunan	53.981.158.980	(27.376.822.724)	26.604.336.256
Jumlah	1.338.950.069.105	(50.329.506.540)	1.288.620.562.565

5.5.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing - masing Rp634.599.864.666,00 dan Rp566.900.953.743,00. Selama tahun 2023, terdapat mutasi penambahan sebesar Rp136.239.279.468,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp68.540.368.545,00 sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	115.618.362.384
2)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	20.344.117.084
3)	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	276.800.000
Jumlah Penambahan		Rp	136.239.279.468
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	853.988.553
2)	Reklasifikasi ke Barang Pakai Habis (Persediaan)	Rp	42.267.559.000
3)	Aset Tidak Berwujud yang Tidak Memenuhi Kriteria	Rp	25.398.420.992
4)	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	20.400.000
Jumlah Pengurangan		Rp	68.540.368.545



a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp136.239.279.468,00 terdiri dari:

- 1) reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp115.618.362.384,00 di antaranya terdiri dari:
 - *server access control dan management system for container based application* sebesar Rp43.787.353.374,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - *lisensi software adobe dan lisensi master data management* sebesar Rp32.393.434.451,00 terdapat pada Unit Pengelolaan Jakarta Smart City Provinsi DKI Jakarta; dan
 - *kaspersky security for mail server add-on 3 year, cisco system CON-SNTPWSC224SL dan 294SL, dan API gateway advanced edition software support for SLA* sebesar Rp18.019.641.090,00 terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- 2) koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp20.344.117.084,00 terdiri dari:
 - *lisensi email collaboration berbasis open source, api gateway enterprise, software oracle rac (real application cluster), dan Aset Tidak Berwujud lainnya* sebesar Rp15.914.867.084,00 yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; dan
 - Sistem Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJP/KJMU), Sistem E-Kinerja Pendidik, Sistem E-Rencana Keuangan Sekolah dan Aset Tidak Berwujud lainnya sebesar Rp4.429.250.000,00 yang terdapat pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan.
- 3) Kapitalisasi dari Belanja Jasa Tahun 2023 sebesar Rp276.800.000,00 berupa Sistem Sertifikat Elektronik Dinas Pendidikan, Sistem Kelola Pengaduan Terintegrasi Masyarakat, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Aset Tidak Berwujud lainnya pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp68.540.368.545,00 terdiri dari:

- 1) reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp853.988.553,00 yang di antaranya terdiri dari:
 - *server two factor authentication* sebesar Rp624.019.275,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;



- Server sebesar Rp191.950.000,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - P.C Unit sebesar Rp38.019.278,00 pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Reklasifikasi ke Barang Habis Pakai (Persediaan) dengan total sebesar Rp42.267.559.000,00 di antaranya terdiri dari:
- *software total agility limited users, additional production robot, total agility base configuration* dan Aset Tidak Berwujud lainnya sebesar Rp31.195.315.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - lisensi *webmethods annual software support for SLA 2014, ATS basis data oracle enterprise edition, software adobe creative cloud for team* dan Aset Tidak Berwujud lainnya sebesar Rp10.750.830.840,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp2.220.000.000,00 berupa lisensi *confluent gold platform 5 node - 1 year* dan lisensi *yugabytedb platform 32 core - 1 year sistem database/big data* yang terdapat pada Unit Pengelola Jakarta Smart City.
- 4) Aset Tidak Berwujud yang tidak memenuhi kriteria sebesar Rp23.178.420.992,00 di antaranya terdiri dari:
- lisensi *software* sebesar Rp13.369.090.508,00 terdapat pada Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
 - lisensi, *ATS basis data oracle enterprise edition CSI 22285504* sebesar Rp5.632.035.250,00 terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta; dan
 - lisensi *google maps api premier* sebesar Rp2.399.820.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- 5) koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp20.400.000,00 berupa *sistem e-filling* pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan amortisasi dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.



Amortisasi yang dilakukan pada Aset Tidak Berwujud untuk aset yang memiliki masa manfaat terbatas berupa *software*, sistem/aplikasi, dan jenis aset tidak berwujud lainnya. Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2023. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Saldo akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp537.631.910.464,00. Nilai Buku untuk Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp96.967.954.202,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut.

Harga Perolehan	:	Rp	634.599.864.666,00
Akumulasi Amortisasi	:	Rp	(537.631.910.464,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2023	:	Rp	96.967.954.202,00

5.5.1.5.4 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp33.076.672.679.419,00 dan Rp59.324.093.700.875,00. Rincian Aset Lain-lain disajikan tabel berikut.

Tabel 5.49
Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1. Aset Rusak Berat/Usang	4.382.335.026.906	3.483.214.038.893
2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	489.746.555.352	354.972.901.227
3. Aset Tetap - Belum ditetapkan statusnya	973.782.683.243	973.782.683.243
4. Aset Tetap - Fasos Fasum	16.290.870.877.648	48.326.465.918.565
5. Kas dikonsinyasikan	27.413.446.297	0
6. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	573.280.906.692	861.505.080.661
7. Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	4.475.775.978.273	3.117.706.595.495
8. Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya	10.697.454.729	271.331.320.218
9. Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.852.769.750.279	1.935.115.162.573
Jumlah	33.076.672.679.419	59.324.093.700.875

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:



5.5.1.5.4.1 Aset Rusak Berat/Usang

Saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.382.335.026.906,00 dan Rp3.483.214.038.893,00. Selama tahun 2023, terdapat mutasi penambahan Rp1.051.659.711.660,00 dan mutasi pengurangan Rp152.538.723.647,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	1.051.389.759.130
2)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	269.952.530
Jumlah Penambahan		Rp	1.051.659.711.660
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Penghapusan	Rp	128.040.590.382
2)	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	24.475.086.865
3)	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	23.046.400
Jumlah Pengurangan		Rp	152.538.723.647

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.051.659.711.660,00 terdiri dari:

- 1) Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp1.051.389.759.130,00 di antaranya terdiri dari:
 - bangunan rumah susun Komarudin Blok B sebesar Rp164.694.361.270,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 - alat berat berupa *Bulldozer*, Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), IPAS (Instalasi Pengelolaan Air Sampah) dan peralatan mesin lainnya sebesar Rp57.543.506.437,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu; dan
 - bangunan pengaman Irigasi berupa tanggul banjir, *Green House* Kebun Bibit, Bangunan Kantor Kebun Bibit, dan bangunan lainnya permanen sebesar Rp43.678.723.579,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Kurang Catat Barang sebesar Rp 269.952.530,00 di antaranya terdiri dari:
 - *stationary generating set* (DEUTZ TD 226B-3D) sebesar Rp173.475.500,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - kalkulator elektronik, *printer*, monitor komputer, *scanner*, layar monitor, dan *P.C unit* sebesar Rp81.504.000,00 pada Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.



b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp152.538.723.647,00 terdiri dari:

- 1) Penghapusan sebesar Rp128.040.590.382,00 di antaranya terdiri dari:
 - *baby incubator, x-ray unit, dan ECG/EEG* sebesar Rp13.759.312.710,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
 - *baby incubator, ac unit, strether, dan Peralatan Mesin lainnya* sebesar Rp12.140.676.834,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan; dan
 - *audio video selector, komputer, dan printer* sebesar Rp7.768.367.812,00 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp24.475.086.865,00 di antaranya terdiri dari:
 - gedung Bangunan gudang tertutup, Rumah Sakit Umum, dan bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen sebesar Rp19.325.005.631,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa;
 - kursi lipat, *A.C Central* sebesar Rp1.181.265.500,00 pada Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya Provinsi DKI Jakarta; dan
 - rumah dinas sebesar Rp819.000.000,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las.
- 3) Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp23.046.400,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - sepeda motor sebesar Rp17.200.000,00 yang terdapat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta; dan
 - bangku tunggu dan buah tiang bendera sebesar Rp5.846.400,00 yang terdapat pada Kelurahan Kembangan Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/ Usang

Saldo akumulasi penyusutan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.487.075.355.149,00. Nilai Buku untuk Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp895.259.671.757,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut.

Harga Perolehan	Rp 4.382.335.026.906,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (3.487.075.355.149,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2023	Rp 895.259.671.757,00



5.5.1.5.4.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan aset yang sedang dilakukan kajian optimalisasi pemanfaatan dan aset KDP yang Dihentikan Permanen.

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing - masing sebesar Rp489.746.555.352,00 dan Rp354.972.901.227,00. Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2023 terdiri dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp374.657.091.789,00 dan KDP yang dihentikan Permanen yang berasal dari 8 OPD sebesar Rp115.089.463.563,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Klasifikasi	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1.	Tanah	14	190.739.867.680
2.	Peralatan dan Mesin	460	5.547.228.497
3.	Gedung dan Bangunan	27	169.835.630.735
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	117	8.534.364.877
Jumlah		618	374.657.091.789
5	KDP yang dihentikan permanen	9	115.089.463.563
Jumlah		627	489.746.555.352

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp374.657.091.789,00 selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan Rp296.255.061.957,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp 168.048.417.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Reklasifikasi dari Aset Tetap	Rp	149.740.884.766
2)	Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum	Rp	144.844.263.225
3)	Reklasifikasi dari Aset KLB	Rp	1.669.913.966
Jumlah		Rp	296.255.061.957
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Properti Investasi	Rp	168.048.417.000
Jumlah		Rp	168.048.417.000

a. Mutasi Penambahan

- 1) Penambahan dari Aset Tetap sebesar Rp149.740.884.766,00 di antaranya berupa:
 - tanah bangunan kantor Pemerintahan seluas 399 m² yang terletak di Kelurahan Pulogadung sebesar Rp258.000.000,00;
 - tanah hutan Taman Nasional seluas 3.400 m² yang terletak di Kelurahan Grogol Selatan sebesar Rp4.814.400.000,00; dan
 - peralatan mesin yang merupakan kelengkapan di rumah susun Daan Mogot tower 1 dan 2 sebesar Rp3.794.992.157,00.



- peralatan mesin yang terletak di Jalan Silang Monas Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp522.566.100,00; dan
 - jalan dan instalasi yang merupakan kelengkapan di rumah susun Daan Mogot tower 1 dan 2 sebesar Rp554.833.396,00
- 2) Reklasifikasi dari Aset Fasos Fasum sebesar Rp144.844.263.225,00, di antaranya berupa:
- lahan prasarana jalan sebanyak 4 unit dari PT. China Harbour Jakarta Real Estate Development sebesar Rp94.998.722.000,00;
 - tanah Hutan Taman Nasional sebanyak 1 unit yang diperoleh dari aset fasos fasum dari PT. Mitra Sindo Sukses sebesar Rp47.999.520.000,00; dan
 - plaza taman dan lampu pendukung taman sebesar Rp1.494.345.225,00 dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.
- 3) Reklasifikasi dari Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebesar Rp1.669.913.966,00 berupa:
- tempat duduk *type* 1 (beton) sebesar Rp488.645.762,00 dari PT. Sampoerna Land;
 - *videotron*, panel, rak sepeda, portal besi, dan lampu sebesar Rp967.917.058,00 dari PT. Grand Asia; dan
 - instalasi pompa air sebesar Rp213.351.146,00 dari PT. Sampoerna Land.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah ke Aset Tetap sebesar Rp168.048.417.000,00 merupakan reklasifikasi ke Properti Investasi di antaranya terdiri dari:

- bangunan kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp61.305.822.746,00;
- bangunan plaza selatan Monumen Nasional sebesar Rp43.790.313.729,00; dan
- lahan Karya Pemerintah (Kpm) dan Marga Jalan (Mjl) seluas 3.044 m² nilai sebesar Rp17.542.572.000,00 yang terletak di Jalan Raya Kembangan Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2023 atas KDP yang dihentikan Permanen sebesar Rp115.089.463.563,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a. Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah yang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Aset Fisik dan Biaya Non Fisik dengan rincian konstruksi fisik sebagai berikut:
- Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 register sebesar Rp6.118.241.600,00;
 - Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota – Jakut sebanyak 1 register sebesar Rp224.639.615,00;
 - Dinas Pemuda dan Olah Raga sebanyak 1 register sebesar Rp945.289.000,00;
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 1 register sebesar Rp16.030.275.500,00; dan
 - Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 1 register sebesar Rp84.535.189.400,00.
- b. Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah yang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Penghentian Permanen Aset konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian konstruksi fisik sebagai berikut:
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak 1 register sebesar Rp3.215.932.000,00; dan
 - Dinas Pendidikan sebanyak 1 register sebesar Rp2.905.376.448,00.
- c. Reklasifikasi dari KDP ke Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah berupa DED atas konstruksi fisik yang statusnya dihentikan sementara pada Unit Pengelola Angkutan Jalan sebanyak 1 register sebesar Rp1.114.520.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.171.087.046,00. Nilai Buku untuk Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp437.575.468.306,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut.

Harga Perolehan	:	Rp	489.746.555.352,00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp	(52.171.087.046,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2023	:	Rp	437.575.468.306,00



5.5.1.5.4.3 Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp973.782.683.243,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Perangkat Daerah	Jumlah Register	Nilai (Rp)
1	Dinas Sumber Daya Air	1	5.194.315.000
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)	6	706.476.085.211
3	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	1	261.256.190.002
4	Sudin Perhubungan Jakarta Timur	131	508.596.000
5	Dinas Bina Marga	1	15.025.750
6	Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap	4	332.471.280
Total		144	973.782.683.243

Rincian atas aset tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dinas Sumber Daya Air atas Tanah Kali Pesanggrahan yang terindikasi *double* catat dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp5.194.315.000,00;
- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp706.476.085.211,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Aset Tanah Cengkareng Barat aset yang dibeli pada tahun 2015 sebesar Rp668.557.654.500,00. Atas aset ini, terdapat gugatan tuntutan perdata dari Pihak Ketiga.
 - Aset Tetap Rusunami sebesar Rp29.474.929.576,00 yang masih dalam penelusuran dan pemutakhiran data.
 - Aset Tetap Rusunami Benhil I, Rusunami Karet Tengsin, dan Rusunami Kebon Kacang sebesar Rp8.443.501.135,00 yang masih dilakukan penelusuran lebih lanjut atas status kepemilikannya.

Tuntutan Perdata atas Aset Tanah Cengkareng Barat tersebut berasal dari TOETI NZ SOEKARNO dkk yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2016 dengan Nomor Gugatan 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.

Materi gugatan penggugat yaitu atas indikasi perbuatan melawan hukum oleh DKPKP yang mencatat Aset Tanah Penggugat seluas 46.913 m² dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) DKPKP, dengan tuntutan antara lain;

- pencatatan Tanah dalam KIB A DKPKP melanggar hukum;
- kerugian material karena adanya penahanan penundaan pembayaran senilai Rp200.000.000.000,00;
- *lost opportunity* senilai Rp500.000.000,00; dan
- kerugian imaterial Rp800.000.000,00.

Dalam Laporan Keuangan DKPKP per 31 Desember 2015 tercatat Aset Tanah senilai Rp2.955.165.380.885,00 yang terdiri dari 142 bidang tanah



seluas 2.742.827,31 m², di antaranya seluas 101.395 m² digunakan sebagai kebun pembibitan di Kecamatan Cengkareng Barat, termasuk di dalamnya lahan seluas 46.913 m² yang digugat.

Adapun tuntutan kuperdatakan tersebut di atas, tidak terlepas dari adanya mutasi penambahan Aset Tetap Tanah yang bersumber dari pembelian Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) seluas 46.913 m² yang terdiri dari 3 Sertifikat yaitu SHM Nomor 13069/Cengkareng Barat seluas 34.503 m², SHM Nomor 13293/Cengkareng Barat seluas 9.359 m² dan SHM Nomor 13430/Cengkareng Barat seluas 3.061 m².

Atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2017 dengan Amar Putusan:

a. Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.

b. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; dan
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Perkara ini telah diputus pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018 yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2017 dengan amar putusan:

- menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2017, Nomor: 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding.
- menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018, Para Penggugat tidak mengajukan kasasi sehingga perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas permasalahan pembelian lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, Cs:

Laporan di Bareskrim Mabes POLRI



- Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta melaporkan Toeti NZ Soekarno, dkk dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/673/VI/2016/Bareskrim tanggal 29 Juni 2016.
- Toeti NZ Soekarno, dkk. Melaporkan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/670/VI/2016/Bareskrim tanggal 28 Juni 2016.
- Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes POLRI melalui Laporan Polisi No. LP/656/VI/2016/Bareskrim telah melakukan penyidikan ada dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, dkk.
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor 67/-076.2 tanggal 19 Januari 2018 Hal Permohonan Informasi Terkait Perkembangan Pemeriksaan Laporan Polisi Atas Tanah Aset Kebon Bibit Cengkareng Barat, yang pada intinya meminta informasi perkembangan pemeriksaan laporan dimaksud sebagaimana huruf a dan angka 2 di atas.
- Dinas Perumahan telah beberapa kali mengundang Toeti NZ Soekarno Cs dan kuasanya dalam rangka musyawarah pembatalan Akta Jual Beli (AJB), namun musyawarah tidak berhasil karena pihak Toeti NZ Soekarno Cs tidak hadir sampai dengan rapat terakhir tanggal 27 Februari 2018.

Pada 06 Maret 2024 telah terbit Putusan Mahkamah Agung Nomor 591 K/Pdt/2023 jo No.244/PDT/2022/PT.DKI jo No.1120/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt dengan amar putusan:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, dan 2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. Dinas Perhubungan sebesar Rp261.256.190.002,00 sudah dilakukan sidang penetapan Status Barang Milik Daerah dan menunggu hasil keputusan sidang tersebut;



- d. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 131 register berupa peralatan dan mesin sebesar Rp508.596.000,00 yang sudah dilakukan usul ke Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah;
- e. Dinas Bina Marga sebanyak 1 register berupa sepeda motor yang hilang senilai Rp15.025.750,00 dan masih dalam proses kajian TIM TP TGR; dan
- f. Pejabat Pengelola Aset Daerah – Aset Tetap sebanyak 4 register barang berupa gedung pos jaga permanen sebesar Rp332.471.280,00 yang merupakan tindak lanjut dari hasil inventarisasi aset pengelola yang sudah diusulkan Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.402.394.895,00 yang merupakan akumulasi penyusutan saat dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap. Nilai Buku untuk Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp966.380.288.348,00 dengan perhitungan yang disajikan sebagai berikut..

Harga Perolehan : Rp 973.782.683.243,00

Akumulasi Penyusutan : Rp 7.402.394.895,00

Nilai Buku Aset per 31 Desember 2023 : Rp 966.380.288.348,00

5.5.1.5.4.4 Aset Tetap – Fasos Fasum

Aset Tetap Fasos Fasum merupakan aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pemegang Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (SIPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (IPPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR). dan Izin Prinsip Kewajiban Lainnya (Sanksi). Saldo Aset Tetap – Fasos Fasum per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing–masing sebesar Rp16.290.870.877.648,00 dan Rp48.326.465.918.565,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Tanah	43.878.749.009.169	25.826.742.250.940	56.363.543.162.590	13.341.948.097.519
2.	Peralatan dan Mesin	24.790.052.759	7.490.247.157	8.018.050.022	24.262.249.894
3.	Gedung dan Bangunan	2.125.889.796.481	188.440.492.487	1.134.399.233.140	1.179.931.055.828
4.	Jalan. Irigasi. dan Jaringan	2.281.535.740.098	483.989.093.643	1.037.937.545.087	1.727.587.288.654
5.	Aset Tetap Lainnya	15.501.320.058	1.942.348.195	301.482.500	17.142.185.753
	Total	48.326.465.918.565	26.508.604.432.422	58.544.199.473.339	16.290.870.877.648

Rincian mutasi Aset Tetap – Fasos Fasum adalah sebagai berikut:



5.5.1.5.4.4.1 Fasos Fasum – Tanah

Saldo Aset Fasos Fasum Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp13.341.948.097.519,00 dan Rp43.878.749.009.169,00. Selama tahun 2023 mutasi penambahan Rp25.826.742.250.940,00 dan mutasi pengurangan Rp56.363.543.162.590,00 dengan dijelaskan sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Donasi/Hibah dari Luar Pemrov DKI Jakarta	Rp	1.272.208.116.580
2)	Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga)	Rp	23.225.161.951.000
3)	Koreksi Kurang Catat – Barang	Rp	1.329.372.183.360
Jumlah Penambahan		Rp	25.826.742.250.940
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	52.997.461.382.919
2)	Reklasifikasi ke Properti Investasi	Rp	2.011.866.393.000
3)	Reklasifikasi ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	Rp	2.599.080.000
4)	Reklasifikasi ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Pinjam Pakai	Rp	1.534.851.000
5)	Reklasifikasi ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Sewa	Rp	21.345.179.000
6)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (aset idle)	Rp	142.998.242.000
7)	Koreksi lebih Catat Nilai	Rp	214.888.034.671
8)	Koreksi Pencatatan Ganda	Rp	970.850.000.000
Jumlah Pengurangan		Rp	56.363.543.162.590

a. Mutasi Penambahan

Penambahan aset fasos fasum Tanah selama tahun 2023 sebesar Rp25.826.742.250.940,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.272.208.116.580,00 berasal dari:
 - PT Perkasa Internusa Mandiri sebesar Rp1.086.165.093.000,00 berupa 18 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Jalan dan Tanah Kantor Pengelola yang berada di Komplek Ruko Lodan Center- Jalan Lodan Raya Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - Warga Perumahan Pejaten Elok sebesar Rp63.686.969.820,00 berupa peruntukkan Tanah Jalan yang berada di Perumahan Pejaten Elok - Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan;



- PT Inti Agung Mulia sebesar Rp26.356.363.950,00 berupa 2 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Jalan dan Tanah Taman yang sudah diperuntukkan yang berada di Lingkungan Perumahan Adora Town Jalan Kebembem RT 02 RW 04 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - Warga Komplek Bier sebesar Rp25.892.515.000,00 dengan peruntukkan Tanah Jalan yang berada di Lingkungan Komplek Bier RT 04 RW 01 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - Warga Komplek Siaga Baru sebesar Rp20.541.771.450,00 dengan peruntukkan Tanah Jalan yang berada di Jalan Siaga Baru dan Siaga Buntu Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - Terdapat sisa 74 bidang tanah yang terletak di Rw.11 Kelurahan Rorotan Kec. Cilincing, Jakarta Utara hasil penyerahan Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp49.565.403.360,00.
- 2) Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp23.225.161.951.000,00 berasal dari:
- PT Danayasa Arthatama sebesar Rp12.369.433.307.000,00 berupa 3 bidang tanah dengan peruntukan Tanah Rencana Jalan, Tanah PSW/ Saluran Waduk, dan Tanah PHT/ Penyempurna Hijau Taman yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 5 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Cakung Remaja Indah Jaya Housing sebesar Rp746.154.640.000,00 berupa 19 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Marga Jalan dan Tanah Marga Drainase dan Tata Air yang berada di Jalan Rorotan / Babek kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - PT. Kharisma Bhakti Sejahtera sebesar Rp680.933.250.000,00 berupa 3 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Penyempurna Hijau Taman, Tanah Marga Drainase dan Tata Air, dan Tanah Marga Jalan yang berada di Jalan Swadharma Raya Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Ciputra Sentra sebesar Rp433.907.826.000,00 dengan peruntukkan berupa Lahan Marga Jalan yang berada di Jalan Letjen S. Parman Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Utara;



- PT. Cakradigdaya Lokaraya sebesar Rp397.691.745.000,00 berupa 4 bidang tanah dengan peruntukkan Lahan Pelayanan Umum, Lahan Taman Kota, Lahan Terbuka Biru, dan Lahan Prasarana Jalan yang berada di Jalan Peta Barat Komplek Citra 8 Citra Garden City Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - Selain itu terdapat sisa 149 bidang tanah lainnya hasil penyerahan kewajiban penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp8.597.041.183.000,00.
- 3) Koreksi kurang catat barang sebesar Rp1.329.372.183.360,00 atas BAST sebelum Tahun 2023 berasal dari:
- Perum Perumnas sebesar Rp548.441.502.000,00 berupa 3 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Untuk Jalan Provinsi, Tanah Untuk Jalan Provinsi dan Tanah Untuk Jembatan yang berada di Klender 1 Unit Perum Perumnas Jakarta Klender Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - PT. Prisma Agung Realty sebesar Rp407.168.388.000,00 berupa 4 bidang tanah dengan peruntukan Lahan Marga Jalan, Lahan Penyempurna Hijau, Lahan Suka Sarana Kesehatan, dan Lahan Marga Drainase dan Tata Air yang berada di Jalan Perjuangan - Perumahan Taman Kedoya Permai Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Citra Adyapataka sebesar Rp190.244.219.550,00 berupa 8 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Jalan dan Tanah Taman yang berada di Perumahan Citra Garden dan Jalan H. Aseni Raya Nomor 9 RT 06 RW 011 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. China Harbour Jakarta Real Estate Development sebesar Rp94.998.722.000,00 berupa 4 bidang tanah dengan peruntukan Lahan Prasaran Jalan yang berada di Jalan Daan Mogot KM. 16 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - Sisanya masih terdapat sisa 7 bidang tanah lainnya yang berasal dari koreksi kurang catat barang sebesar Rp88.519.351.810,00.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan aset fasos fasum Tanah sebesar Rp56.363.543.162.590,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



- 1) Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp52.997.461.382.919,00 berasal dari:
- PT Danayasa Arthatama sebesar Rp12.369.433.307.000,00 berupa 3 bidang tanah dengan peruntukan Tanah Rencana Jalan, Tanah PSW/ Saluran Waduk, dan Tanah PHT/ Penyempurna Hijau Taman yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 5 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Indofica Housing/PT. Indofica sebesar Rp2.342.880.492.000,00 berupa 24 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Penyempurna Hijau Umum, Tanah Penyempurna Hijau Taman, Tanah Marga Jalan dan Tanah Saluran Air (PSW) yang berada di Komplek Pergudangan dan Perkantoran Jalan Indokarya dan Jalan Agung Karya I. II. III. IV, V, VI Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara dan Tanah Sarana Rekreasi Olahraga & Penunjangnya yang berada di Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. Taman Harapan Indah sebesar Rp1.958.803.382.000 berupa 9 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Penyempurna Saluran Waduk, Lahan Penyempurna Hijau Taman, dan Tanah Marga Jalan yang berada di Perumahan Taman Semanan Indah dan Pertokoan Plaza Delumina Perumahan Taman Semanan Indah Kelurahan Duri Kosambi dan Kelurahan Semanan Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Subur Brothers sebesar Rp1.335.953.529.000,00 berupa 12 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Marga Jalan dan Saluran, dan Tanah Penyempurna Hijau Umum/Taman yang berada di Perumahan Sunter Paradise II Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. Wilhara Prima Realty sebesar Rp1.256.581.146.000,00 berupa 5 bidang tanah dengan Peruntukkan Tanah Marga Drainase dan Tata Air, Tanah Penyempurna Hijau Umum, dan Tanah Marga Jalan yang berada di Bukit Gading Raya kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. Cakrawala Respati sebesar Rp1.112.064.432.000,00 berupa 4 bidang tanah dengan peruntukkan Lahan Penyempurna Hijau Taman, Lahan Marga Jalan, dan Lahan Marga Drainase dan Tata Air yang berada di Komplek Perumahan Citra 6 Citra Garden City



- Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Selain itu masih terdapat sisa 1.376 peruntukkan tanah lainnya yang merupakan pengurang aset fasos fasum Tanah yang berasal dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap sebesar Rp32.621.745.094.919,00.
- 2) Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Properti Investasi sebesar Rp2.011.866.393.000,00 berasal dari:
- PT. Perkasa Internusa Mandiri sebesar Rp1.086.165.093.000,00 dengan peruntukkan Tanah Jalan di Komplek Ruko Lodan Center Jalan Lodan Raya Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - PT. Federal Motor (Sekarang PT. Astra Honda Motor) sebesar Rp143.045.205.000,00 dengan peruntukkan Tanah Prasarana Jalan, Tanah Rencana Jalan KA, Tanah Rencana Penyempurna Hijau Umum, dan Tanah Marga Drainase yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - Dana Pensiun Aneka Tambang sebesar Rp89.305.180.000,00 dengan peruntukkan Tanah Marga Jalan, Tanah Hijau Makam, Tanah Jalur Hijau, Tanah Terbuka Biru dan Tanah Prasarana Jalan yang terletak di Jalan TB Simatupang Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - Selain itu masih terdapat sisa 18 peruntukkan tanah lainnya yang merupakan pengurang aset fasos fasum Tanah yang berasal dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Properti Investasi Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre sebesar Rp693.350.915.000,00.
- 3) Reklasifikasi ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) sebesar Rp2.599.080.000,00 yang berasal dari PT. Labrata RE dengan peruntukkan berupa Tanah SMP Blok E7 di Perumahan Taman Meruya Ilir Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 4) Reklasifikasi ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Pinjam Pakai sebesar Rp1.534.851.000,00 berasal dari Eks. Pemanfaatan Yayasan Golf dengan peruntukkan berupa Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan



Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- 5) Reklasifikasi ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Aset Sewa sebesar Rp21.345.179.000,00 terletak di Perumahan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara yang digunakan oleh Yayasan Elka dan Gereja KGPM Sidang Yeremia berasal dari:
 - PT Summarecon Agung senilai Rp7.618.128.000,00 berupa Tanah TK dan SD Tunas Karya Blok GF3;
 - PT Summarecon Agung senilai Rp12.263.600.000,00 berupa Tanah SMP dan SMA Tunas Karya Blok F1; dan
 - PT Summarecon Agung senilai Rp1.463.451.000,00 berupa Tanah Taman Blok HF-4.
- 6) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (aset idle) sebesar Rp142.998.242.000,00 berasal dari:
 - PT. China Harbour *Jakarta Real Estate Development* sebesar Rp94.998.722.000,00 berupa 4 bidang tanah dengan peruntukan Lahan Prasanan Jalan yang berada di Jalan Daan Mogot KM. 16 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - PT. Mitra Sindo Sukses sebesar Rp47.999.520.000,00 dengan peruntukkan berupa Tanah Taman Kota/Lingkungan yang berada di Jalan Kayu Tinggi Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
- 7) Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp214.888.034.671,00 yang berasal dari PT. Metropolitan Development berupa 2 bidang tanah dengan peruntukkan Tanah Jalan, Saluran dan Tanah Jalan yang berada di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 8) Koreksi Pencatatan Ganda sebesar Rp970.850.000.000,00 yang berasal dari PT Agung Podomoro berupa 2 bidang tanah dengan peruntukkan Genangan Waduk dan Hijau Pengamanan Waduk yang berada di Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara.

5.5.1.5.4.4.2 Fasos Fasum – Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Fasos Fasum Peralatan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp24.262.249.894,00 dan Rp24.790.052.759,00. Selama tahun 2023 mutasi penambahan sebesar



Rp7.490.247.157,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp8.018.050.022,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Donasi/Hibah dari Luar Pemprov DKI Jakarta	Rp	907.370.000
2)	Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga)	Rp	6.566.414.657
3)	Koreksi Kurang Catat – Barang	Rp	16.462.500
Jumlah Penambahan		Rp	7.490.247.157
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	8.018.050.022
Jumlah Pengurangan		Rp	8.018.050.022

a. Mutasi Penambahan

Penambahan aset fasos fasum Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.490.247.157,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp907.370.000,00 berasal dari:
 - PT. Kita Hokki sebesar Rp833.000.000,00 berupa 1 set Alat test Bench Meter Gas; dan
 - PT. Tomara Jaya Perkasa sebesar Rp74.370.000,00 berupa 1 unit Kendaraan Bermotor Roda Tiga Listrik.
- 2) Penyerahan kewajiban penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp6.566.414.657,00 berasal dari:
 - PT. Perkasa Internusa Mandiri sebesar Rp2.182.724.474,00 berupa 1 unit Sensor Jembatan Tebet Eco Park yang berada di Tebet Eco Kelurahan Tebet Barat dan Tebet Timur Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Inti Menara Jaya sebesar Rp1.909.539.796,00 berupa 5 unit dengan peruntukkan Bangku Pedestrian, Lift dan Escalator yang berada di Jalan Lebak Bulus Raya Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Metropolitan Land, Tbk sebesar Rp1.007.651.424,00 berupa 9 unit dengan peruntukkan Tangki Air, Pompa Booster, Tempat Duduk, Derobak, Modul Rak Hidroponik, Tiang Lampu Pedestrian, Signage Daan Mogot dan Signage MAP Kebon Kota yang berada di Kecamatan Duri Kosambi Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - Selain itu masih terdapat sisa 42 peruntukkan peralatan dan mesin lainnya yang merupakan penambahan aset fasos fasum Peralatan dan Mesin yang berasal dari Penyerahan kewajiban penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp1.466.498.963,00.



- 3) Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp16.462.500,00 berasal dari PT. Bank DKI berupa Pekerjaan Standing Logo.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan aset fasos fasum Peralatan dan Mesin Rp8.018.050.022,00 berasal dari Reklasifikasi ke Aset Tetap dengan penjelasan sebagai berikut:

- PT. Perkasa Internusa Mandiri sebesar Rp2.182.724.474,00 berupa 1 unit Sensor Jembatan Tebet Eco Park yang berada di Tebet Eco Kelurahan Tebet Barat dan Tebet Timur Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- PT Metropolitan Kencana, Tbk sebesar Rp2.050.000.000,00 berupa 1 set Mesin Pelengkap yang berada di Simpang Mall Pondok Indah Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- PT. Inti Menara Jaya sebesar Rp 1.909.539.796,00 berupa 5 unit dengan peruntukkan bangku pedestrian, lift dan escalator yang berada di Jalan Lebak Bulus Raya Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Barat;
- PT. Kita Hokki sebesar Rp833.000.000,00 berupa 1 set Alat test Bench Meter Gas; dan
- Selain itu masih terdapat sisa 37 peruntukkan Peralatan dan Mesin lainnya yang merupakan pengurang aset fasos fasum Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap sebesar Rp1.042.785.752.00.

5.5.1.5.4.4.3 Fasos Fasum – Gedung dan Bangunan

Saldo aset fasos fasum Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.179.931.055.828,00 dan Rp2.125.889.796.481,00. Selama tahun 2023 mutasi penambahan sebesar Rp188.440.492.487,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.134.399.233.140,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Donasi/Hibah dari Luar Pemprov DKI Jakarta	Rp	22.850.705.090
2)	Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga)	Rp	164.809.122.897
3)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	780.664.500
Jumlah Penambahan		Rp	188.440.492.487
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	144.444.843.029
2)	Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi	Rp	989.954.390.111
Jumlah Pengurangan		Rp	1.134.399.233.140



a. Mutasi Penambahan

Penambahan aset fasos fasum Gedung dan Bangunan sebesar Rp188.440.492.487,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Donasi/Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp22.850.705.090,00 berasal dari:
 - Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sebesar Rp22.503.200.000,00 berupa Bangunan Rumah Susun yang berada di Rusun Buddha Tzu Chi Indonesia Jalan Dermaga Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - PT. Bangun Mataram Jaya sebesar Rp347.505.090,00 berupa Bangunan Base Monumen Pesawat A 4 Skyhawk Swa Bhuna Paksa yang berada di Taman Seno Tebet - Jalan Tebet Barat XII Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 2) Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp164.809.122.897,00 berasal dari:
 - PT. Duta Pertiwi sebesar Rp62.789.351.726,00 berupa Rumah Susun Bagi Warga Eks Kampung Bukit Duri yang berada di Jalan Kav. DPR (Kampung Pulo Jahe) PIK Pulogadung Kelurahan Jatinegara kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - PT. Global Budi Perkasa sebesar Rp25.950.499.763,00 berupa Kegiatan Revitalisasi Masjid Jami Al Mansyur yang berada di Jalan KH. Moh Mansyur (Jalan Sawah Lio II) Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Karyabangun Nusantara sebesar Rp17.040.641.987,00 berupa Rumah Susun bagi Warga Eks Kampung Kunir yang berada di Jalan Kemukus Nomor 2 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Sumber Kencana Graha sebesar Rp13.750.700.000,00 berupa Konstruksi Bangunan Ruang Kelas Baru SMPN 230 yang berada di Jalan TPU Pondok Rangon Kelurahan Pondok Rangon Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - PT. Perkasa Internusa Mandiri sebesar Rp6.207.001.230,00 berupa Pagar Tebet Eco Park yang berada di Tebet Eco Park Kelurahan Tebet Barat dan Tebet Timur Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Inti Menara Jaya sebesar Rp5.845.743.561,00 berupa Bangunan Hub (Lantai Dasar, 1,2,3) yang berada di Jalan Lebak Bulus Raya



Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- PT. Danayasa Arthatama sebesar Rp3.552.310.000,00 berupa Konstruksi PHT / Penyempurna Hijau Taman yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- PT. Panorama Bangun Lestari sebesar Rp3.440.100.000,00 berupa Sarana dan Prasarana Pendidikan SMPN 230 yang berada di Jalan TPU Pondok Rangun Kelurahan Pondok Rangun Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- Selain itu terdapat 23 peruntukkan Bangunan lainnya yang merupakan penambahan aset fasos fasum Bangunan dan konstruksi yang berasal dari Penyerahan kewajiban penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp26.232.774.630,00.

- 3) Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp780.664.500,00 berasal dari PT. Citra Adyapataka berupa 2 konstruksi dengan peruntukkan Kontruksi Taman Blok C dan E yang berada di Perumahan Citra Garden Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan aset fasos fasum Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 sebesar Rp1.134.399.233.140,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp144.444.843.029,00 berasal dari:
- Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sebesar Rp22.503.200.000,00 berupa Bangunan Rumah Susun Blok E, F dan G yang berada di Rusun Buddha Tzu Chi Indonesia Jalan Dermaga Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. Bangun Tjipta Sarana sebesar Rp16.750.303.029,00 berupa Bangunan Taman Blok T2, T8, T11, T9, dan T12 yang berada di Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. Jaya Real Properti sebesar Rp34.761.495.000,00 berupa konstruksi bangunan taman di Komplek Perumahan Bintaro Jaya Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - Selain itu terdapat 58 peruntukkan bangunan lainnya yang merupakan pengurang aset fasos fasum yang berasal dari



Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap sebesar Rp70.429.845.000,00.

2) Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi sebesar Rp989.954.390.111,00 berasal dari:

- Direktorat Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp975.732.250.111,00 berupa Rumah Susun Pasar Rumput yang berada di Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48 Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- PT. Cakra Bina Lestari sebesar Rp2.473.200.000,00 berupa bangunan *sports center*, kolam renang, dan ruang ganti yang terletak di Jalan Lingkar Luar Kamal Raya dan di Jalan Kamal *Outer Ring Road*, Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
- PT. Citra Habitat Indonesia sebesar Rp393.120.000,00 berupa Bangunan TK Blok BI Nomor 3 Komplek Citra Garden I Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Bangunan Gedung Pendidikan Permanen sebesar Rp11.355.820.000,00 di Jalan Kawasan Rumah Susun Nomor 2 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

5.5.1.5.4.4.4 Fasos Fasum – Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo aset fasos fasum Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.727.587.288.654,00 dan Rp2.281.535.740.098,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp483.989.093.643,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp1.037.937.545.087,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	43.935.311.792
2)	Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga)	Rp	313.588.298.471
3)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	115.952.023.380
4)	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	10.513.460.000
Jumlah Penambahan		Rp	483.989.093.643
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle)	Rp	1.846.021.225
2)	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	965.439.195.288
3)	Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi	Rp	14.163.299.822
4)	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	13.084.900.000
5)	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	43.404.128.752
Jumlah Pengurangan		Rp	1.037.937.545.087



a. Mutasi Penambahan

Penambahan aset fasos fasum Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama tahun 2023 sebesar Rp483.989.093.643,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp43.935.311.792,00, berasal dari:
 - Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp43.902.101.792,00 berupa Jembatan Pada Jalan Provinsi Bernilai Strategis Provinsi di Kawasan Masjid Istiqlal - Jalan Taman Wijaya Kusuma Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
 - PT. Perkasa Internusa Mandiri sebesar Rp33.210.000,00 berupa 120 item dengan peruntukkan lampu PJU pijar, lampu PJU LED, lampu kanopi dan Tiang PJU pipa besi di Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- 2) Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp313.588.298.471,00 berasal dari:
 - PT. Danayasa Arthatama sebesar Rp128.895.020.000,00 berupa Konstruksi Jalan dan Konstruksi PSW / Saluran Waduk yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Cakrawala Respati sebesar Rp32.075.400.000,00 berupa Konstruksi Marga Jalan yang berada di Perumahan Citra 6 Citra Garden City Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Citra Adyapataka sebesar Rp27.541.600.000,00 berupa Konstruksi Prasarana Jalan yang berada di Jalan Kampung Semanan Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Inti Menara Jaya sebesar Rp21.941.680.946,00 berupa Jembatan Penyeberangan Orang dan kelengkapannya yang berada di Jalan Lebak Bulus Raya Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - Selain itu masih terdapat sisa 39 peruntukkan yang berasal dari Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp103.134.597.525,00.
- 3) Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp115.952.023.380,00, berasal dari:



- PT. Citra Adyapataka sebesar Rp31.616.400.989,00 berupa 5 konstruksi dan 5 Jaringan dengan peruntukkan berupa konstruksi jalan dan lampu PJU di Perumahan Citra Garden Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebesar Rp79.749.022.391 berupa konstruksi TPS3R, konstruksi KSPN, dan konstruksi IPALD.
 - PT Metropolitan Development sebesar Rp4.586.600.000,00 dengan peruntukkan berupa Bangunan Jalan dan Saluran yang berada di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat
- 4) Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp 10.513.460.000,00 berasal dari PT. Metropolitan Development dengan peruntukkan berupa Bangunan Jalan dan Saluran di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan aset fasos fasum Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama tahun 2023 sebesar Rp1.037.937.545.087,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle) sebesar Rp1.846.021.225,00 berasal dari:
- PT. Adhi Karya sebesar Rp1.494.345.225,00 berupa Plaza Taman dan Lampu yang berada di Stasiun Gondangdia Jalan Cut Mutia Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.
 - PT. Pilar Megah Pradigdo Sejahtera sebesar Rp326.476.000,00 berupa Konstruksi Penyempurna Hijau Taman yang berada di Jalan Bekasi Timur Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - PT. Lestari Kirana Persada sebesar Rp25.200.000,00 berupa Konstruksi Penyempurna Hijau Umum yang berada di Jalan Letjen TB. Simatupang Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp965.439.195.288,00 berasal dari:
- PT. Metropolitan Kentjana, Tbk / PT. Metropolitan Kencana, Tbk sebesar Rp253.324.856.000,00 berupa Konstruksi Terowongan (*underpass*), Kontruksi Marga Jalan dan Bangunan Jalan Tahap 1 dan 2 yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Danayasa Arthatama sebesar Rp140.611.020.000,00 berupa Konstruksi Psw / Saluran Waduk, Kontruksi Jalan, Saluran Drainase



- Bawah Tanah yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan dan berupa Jembatan Penyeberangan Orang yang berada di Jalan Prof.Dr. Soepomo Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- PT. Taman Harapan Indah sebesar Rp92.805.000.000,00 berupa Konstruksi Jalan dan Penyempurna Saluran Air / Waduk yang berada di Perumahan Taman Semanan Indah Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Kembangan Permai Development sebesar Rp50.105.000.000,00 berupa Konstruksi Fisik Marga Jalan (Mjl) - Jalan, Kansteen, dan Trotoar dan Marga Drainase dan Tata Air yang berada di Komplek Perumahan Taman Permata Buana Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - PT. Inti Menara Jaya sebesar Rp21.941.680.946,00 berupa Jembatan Penyeberangan Orang, *Concrete Stamp*, *Ducting* Utilitas, Lampu Penerangan Jalan Umum, Mekanikal, Elektrikal, Plumbing yang berada di Jalan Rigid di Jalan Lebak Bulus Raya Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - PT. Setia Cipta Dinamika sebesar Rp17.057.964.388,00 berupa Pekerjaan Badan Jalan, Pekerjaan Bahu Jalan dan Pekerjaan Drainase/Saluran yang berada di Perumahan Puspa Gading - Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - PT. Metrika Utama sebesar Rp12.294.756.111,00 berupa Konstruksi Marga Jalan yang berada di Perumahan Pondok Gading Utama Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - Selain itu masih terdapat sisa 145 peruntukkan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang merupakan pengurang aset fasos fasum Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap sebesar Rp377.298.917.843.00.
- 3) Reklasifikasi ke Properti Investasi sebesar Rp14.163.299.822,00 seluruhnya berasal dari Direktorat Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Instalasi AC - Peralatan dan Mesin (Pendingin Udara /AC) Rusun Pasar Rumput Tower 1, 2, 3 pada rumah susun pasar rumput di Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48



Kelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- 4) Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp13.084.900.000,00 berasal dari PT. Metropolitan Development berupa 3 Bangunan dengan peruntukkan berupa Bangunan Duiker, Bangunan Saluran Batu Kali, Bangunan Saluran Beton yang berada di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 5) Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp43.404.128.752,00 berasal dari PT. Metropolitan Development berupa 2 Bangunan dengan peruntukkan berupa Bangunan Jalan dan Bangunan Saluran yang berada di Perumahan Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat.

5.5.1.5.4.4.5 Fasos Fasum – Aset Tetap Lainnya

Saldo aset fasos fasum Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp17.142.185.753,00 dan Rp15.501.320.058,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi pertambahan sebesar Rp1.942.348.195,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp301.482.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Mutasi Penambahan			
1)	Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga)	Rp	1.640.865.695
2)	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	301.482.500
Jumlah Penambahan		Rp	1.942.348.195
b. Mutasi Pengurangan			
1)	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp	301.482.500
Jumlah Pengurangan		Rp	301.482.500

a. Mutasi Penambahan

Penambahan aset fasos fasum Aset Tetap Lainnya selama tahun 2023 sebesar Rp1.942.348.195,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyerahan Kewajiban Penerbitan SIPPT/IPPT/IPPR (Kewajiban Pihak Ketiga) sebesar Rp1.640.865.695,00, berasal dari:
 - PT. Ciputra Adibuana sebesar Rp963.846.856,00 berupa Integrated Set - Labirin Paly 03A, *Single Spring Rider* dan *2-Seater Fun Sesaw* yang berada di Komplek Rusun Daan Mogot Kecamatan Duri Kosambi Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - PT. Metropolitan Land, Tbk sebesar Rp677.018.839,00 berupa *Children Playground*, *Integrated Set*, dan *Jungkat Jungkit* yang berada di Kecamatan Duri Kosambi Kota Administrasi Jakarta Barat.
- 2) Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp301.482.500,00, berasal dari PT. Bank DKI berupa pekerjaan pembuatan rumah panggung betawi, pekerjaan rumah ibadah Islam, pekerjaan rumah ibadah Katolik,



pekerjaan rumah ibadah Protestan, pekerjaan rumah ibadah Hindu, pekerjaan rumah ibadah Budha, dan pekerjaan rumah ibadah Kong Hu Cu yang berada di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat - Jalan Kembangan Raya Nomor 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan aset fasos fasum Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp301.482.500,00 seluruhnya merupakan reklasifikasi ke Aset Tetap, yaitu berupa pekerjaan pembuatan Rumah Panggung Betawi, Pekerjaan Rumah Ibadah yang berada di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat - Jalan Kembangan Raya Nomor 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015 dengan mekanisme perhitungan penyusutan sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyusutan Aset Tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dengan masa manfaat Aset Tetap yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.

Saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap Fasos Fasum per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.193.154.079.554,00 dan Rp2.562.307.880.756,00 dengan rincian sebagai berikut.

Jenis Aset Tetap Fasos Fasum	31 Desember 2022	31 Desember 2023		
	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
Tanah	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin	(21.532.959.223)	(1.466.268.048)	(1.940.694.106)	(21.058.533.165)
Gedung dan Bangunan	(904.573.059.317)	(34.060.640.023)	(124.851.621.307)	(813.782.078.033)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.620.738.801.159)	(73.046.608.884)	(350.935.002.744)	(1.342.850.407.299)
Aset Tetap Lainnya	(15.463.061.057)	(60.296.500)	(60.296.500)	(15.463.061.057)
Jumlah	(2.562.307.880.756)	(108.633.813.455)	(477.787.614.657)	(2.193.154.079.554)

Nilai buku Aset Tetap Fasos Fasum per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.097.716.798.094,00 dengan rincian sebagai berikut.



Jenis Aset Tetap Fasos Fasum	31 Desember 2023		
	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	13.341.948.097.519	0	13.341.948.097.519
Peralatan dan Mesin	24.262.249.894	(21.058.533.165)	3.203.716.729
Gedung dan Bangunan	1.179.931.055.828	(813.782.078.033)	366.148.977.795
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.727.587.288.654	(1.342.850.407.299)	384.736.881.355
Aset Tetap Lainnya	17.142.185.753	(15.463.061.057)	1.679.124.696
Jumlah	16.290.870.877.648	(2.193.154.079.554)	14.097.716.798.094

5.5.1.5.4.5 Kas yang Dikonsinyasikan

Kas yang Dikonsinyasikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.413.446.297,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta merupakan ganti rugi atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gajah Mada. Penitipan uang ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Berita Acara Penyerahan/Penitipan Uang Konsinyasi dengan nomor 05/2023.Con tertanggal 15 November 2023.

5.5.1.5.4.6 Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) merupakan nilai aset yang diterima atas pelampauan KLB/KDB yang belum diterbitkan SK Penggunaannya.

Saldo Aset KLB/KDB per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp573.280.906.692,00 dan Rp861.505.080.661,00.

Aset KLB/KDB 31 Desember 2023 sebesar Rp573.280.906.692,00 terdiri dari aset yang diterima atas kompensasi pelampauan KLB sebesar Rp526.910.281.692,00 dan aset yang diterima atas kompensasi pelampauan KDB sebesar Rp46.370.625.000,00.

a. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)

Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp526.910.281.692,00 dan Rp815.134.455.661,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	591.907.500	0	591.907.500	0
2	Peralatan dan Mesin	40.810.363.409	2.138.642.318	41.926.698.105	1.022.307.622
3	Gedung dan Bangunan	356.288.153.135	8.795.751.557	37.257.768.807	327.826.135.885
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	417.349.581.617	67.286.359.116	286.668.552.548	197.967.388.185
5	Aset Tetap Lainnya	94.450.000	439.410.390	439.410.390	94.450.000
Total		815.134.455.661	78.660.163.381	366.884.337.350	526.910.281.692

Penjelasan atas rincian mutasi aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB adalah sebagai berikut:



1) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Tanah

Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp591.907.500,00 dan Rp0,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi pengurangan Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap sebesar Rp591.907.500,00, yang berasal dari PT Permadani Khatulistiwa berupa tanah JPO Daan Mogot.

2) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.022.307.622,00 dan Rp40.810.363.409,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp2.138.642.318,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp41.926.698.105,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Mutasi Penambahan

Penyelesaian Kewajiban KLB sebesar Rp2.138.642.318,00 berasal dari PT. Grand Asia antara lain berupa rak sepeda, videotron, tempat sampah, bangku, rambu lalu lintas, panel, portal besi dan dari PT. Mitra Pertala Perkasa berupa sajadah di Masjid Jami'Darul Musafirin - Kawasan Terminal Terpadu Pulogebang.

b) Mutasi Pengurangan

- reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Lain-lain - Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset Idle) sebesar Rp1.229.670.240,00 di antaranya berasal dari PT. Sampoerna Land sebesar Rp488.645.703,00 berupa tempat duduk type 1; dan
- reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap sebesar Rp40.697.027.865,00 di antaranya berasal dari PT. Sampoerna Land sebesar Rp15.513.184.812,00 berupa *Floating Pontoon* – mengapung di atas sungai.

3) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp327.826.135.885,00 dan Rp356.288.153.135,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp8.795.751.557,00 dan mutasi pengurangan selama tahun 2023 sebesar Rp37.257.768.807,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Mutasi Penambahan

Penyelesaian Kewajiban KLB sebesar Rp8.795.751.557,00 dari PT. Grand Asia antara lain berupa konstruksi taman permanen dan prasasti; dan



- b) Mutasi Pengurangan
- Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap sebesar Rp37.257.768.807,00 di antaranya berasal dari PT Surya Graha Pertiwi sebesar Rp13.520.637.771,00 berupa Kolam Renang Utama (renovasi).
- 4) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp197.967.388.185,00 dan Rp417.349.581.617,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp67.286.359.116,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp286.668.552.548,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Mutasi Penambahan
- Penyelesaian Kewajiban KLB sebesar Rp67.286.359.116,00, di antaranya berasal dari:
- PT. Grand Asia sebesar Rp45.836.124.632,00 berupa Drainase, Pedestrian, Konstruksi Jalan dan Jaringan Listrik Penerangan Jalan Umum; dan
 - PT Sampoerna Land sebesar Rp21.450.234.482,00 berupa Pekerjaan Jalur Sepeda dan Jalur Pejalan Kaki Beserta Kelengkapannya.
- b) Mutasi Pengurangan
- reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Lain-lain – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah sebesar Rp440.243.726,00, di antaranya berasal dari PT Grand Asia sebesar Rp226.892.588,00 berupa jaringan Listrik penerangan jalan umum;
 - reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap sebesar Rp286.228.308.822,00 di antaranya berasal dari PT Kepland Investama sebesar Rp158.433.995.075,00 berupa Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jalur Pejalan Kaki beserta kelengkapannya pada Koridor Jalan Sudirman Thamrin.
- 5) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Aset Tetap Lainnya
- Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp94.450.000,00. Selama tahun 2023 terdapat mutasi penambahan dan mutasi pengurangan sebesar Rp439.410.390,00 berasal dari penyelesaian kewajiban KLB dari PT. Grand Asia berupa tanaman. Dari jumlah tersebut juga dilakukan mutasi pengurangan reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Lain-lain - Aset Tetap yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah (Aset *Idle*).



Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)

Saldo akumulasi penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2023 sebesar Rp84.618.783.387,00.

Nilai Buku untuk Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	:	Rp 526.910.281.692,00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp (84.618.783.387,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2023	:	Rp 442.291.498.305,00

b. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 31 Desember 2022 sebesar Rp46.370.625.000,00. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KDB yaitu berupa tanah hutan taman nasional yang berlokasi di Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tidak dilakukan penyusutan selama tahun 2023 sehingga saldo Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KDB 31 Desember 2023 tetap sebesar Rp46.370.625.000,00

5.5.1.5.4.7 Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Saldo aset dalam proses penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.475.775.978.273,00 dan Rp3.117.706.595.495,00. Selama tahun 2023 mutasi pertambahan sebesar Rp1.370.058.808.068,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp11.989.425.290,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) dari Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp1.370.058.808.068,00 di antaranya:

- bangunan stasiun permanen yang terletak di jalan Duren Tiga Kecamatan Pancoran pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp462.338.611.700,00
- tanah untuk jalan provinsi yang terletak di Jalan Kelapa Kopyor Kampung pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta utara dengan total sebesar Rp294.386.628.000,00



- tanah untuk jalan provinsi yang terletak di Jalan Kampung Rawa Selatan 6 Kelurahan Johar Baru pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan total sebesar Rp101.019.334.000,00
- bangunan gedung pendidikan permanen yang terletak di Kelurahan Pancoran, Kalibata dan Ragunan pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan total sebesar Rp72.976.524.557,00; dan
- bangunan gedung kantor permanen yang terletak pada Kelurahan Duren Sawit, Kebon Kelapa dan Slipi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan total Rp50.161.064.511,00
- Bangunan Gedung Pendidikan Permanen terletak pada Kelurahan Tegal Alur, Pinangasia, Cengkareng Barat pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat dengan total Rp45.435.013.438,00.

b. Mutasi Pengurangan

Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset menjadi Aset Tetap sebesar Rp11.989.425.290,00 terdiri dari:

- Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebanyak 30 jenis barang berupa peralatan dan mesin sebesar Rp115.296.954,00;
- Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 320 register berupa tanah jalan sebesar Rp11.748.499.280,00;
- Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Jalan Kabupaten Kolektor yang beralamat Jl. Buntu 1 Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp125.629.056,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Status Aset (MPSA)

Saldo akumulasi penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.547.280.825.586,00 merupakan akumulasi penyusutan saat dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap.

Nilai Buku untuk Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	:	Rp 3.618.909.473.273,00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp (1.547.280.825.586,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2023	:	Rp 2.071.628.647.687,00



5.5.1.5.4.8 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyajikan akun Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya untuk pengakuan atas Kerugian Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah, terdapat 3 kategori Akuntansi Kerugian Negara/Daerah sebagai berikut:

- Kerugian Negara/Daerah yang Disebabkan oleh Bendahara,
- Kerugian Negara/Daerah yang Disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara,
- Kerugian Negara/Daerah Berdasarkan Putusan Pengadilan.

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.697.454.729,00 dan Rp271.331.320.218,00. Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

No	Kategori		Nilai (Rp)
a.	Kasus Kerugian Daerah dalam Proses	Rp	6.973.458.546
b.	Informasi Kerugian Daerah - LHP BPK	Rp	3.605.265.130
c.	Kasus Kas Operasional BLUD Belum Dipertanggungjawabkan pada Puskesmas Tanah Abang	Rp	108.531.053
d.	Kasus Kehilangan KDO pada Sudin Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Utara	Rp	10.200.000
	Jumlah	Rp	10.697.454.729

Saldo Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2023 belum termasuk kerugian terkait Aset Tetap dan kerugian pada pihak ketiga dengan nilai Rp545.403.187.479,00. Kerugian tersebut sedang dalam proses rekonsiliasi dengan data Aset Tetap. Rincian atas kerugian terkait Aset Tetap dan kerugian pada pihak ketiga sebagai berikut.

No	Kategori	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Kasus Kerugian Daerah dalam Proses	Aset Tetap	87.825.000
b.	Informasi Kerugian Daerah - LHP BPK	Pihak Ketiga	491.621.387.252
		Aset Tetap	103.651.679
d.	Informasi Kerugian Daerah - LHP APIP	Pihak Ketiga	53.590.323.548
	Jumlah		545.403.187.479

5.5.1.5.4.9 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.852.769.750.279,00 dan Rp1.935.115.162.573,00. Rincian kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.852.769.750.279,00 terdiri dari:



- a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp5.635.560.561.436,00 berupa penyaluran Dana Bagi Hasil secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.08/2022 dan penerimaan kas pada rekening *escrow* yang belum teridentifikasi kepemilikannya. Saldo awal Kas Yang Dibatasi Penggunaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp1.742.378.693.672,00 telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2023 sesuai KMK 138 Tahun 2023 dan KMK 362 Tahun 2023. Rincian saldo kas yang dibatasi penggunaannya selama tahun 2023 sebagai berikut:
- 1) Pada tahun 2023 terdapat penambahan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan PMK 159 Tahun 2023 tentang perubahan rincian DBH TA 2023 yang penyalurannya dilakukan dalam bentuk non tunai sebesar Rp2.815.094.979.000,00;
 - 2) Terdapat penyaluran kurang bayar sebesar Rp2.906.376.386.000,00 dan penyelesaian lebih bayar sebesar Rp85.999.505.000,00 sesuai PMK 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada Tahun 2023, yang disalurkan melalui TDF berdasarkan KMK 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH pada Tahun 2023;
 - 3) Terdapat penerimaan kas berupa penerimaan pajak dan denda atas pajak pada rekening *escrow* penerimaan yang belum teridentifikasi kepemilikannya sebesar Rp88.701.436,00.
- b. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan sebesar Rp202.249.035.998,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sisa dana Bantuan Sosial Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahun 2023 sebesar Rp62.775.000.000,00;
 - 2) Sisa dana Bantuan Sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahun 2023 sebesar Rp121.862.691.998,00;
 - 3) Sisa dana Bantuan Sosial Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) tahun 2023 sebesar Rp17.611.344.000,00.
- c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.443.789.698,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sebesar Rp7.599.208.973,00 berupa Uang Titipan Sewa Rumah ber-SIP yang di mana rumah tersebut merupakan rumah milik warga negara asing yang meninggalkan Indonesia pada saat kemerdekaan dan tidak berpenghuni saat itu. Sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 tentang Urusan Perumahan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemakaian suatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih



dahulu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Sosial". Selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta penyelesaian atas rumah Ber-SIP dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- 2) Sebesar Rp784.754.860,00 berupa Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa yang merupakan uang yang dititipkan oleh pemilik sah rumah kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diperuntukkan sebagai kompensasi atas pengosongan rumah kepada penyewa;
 - 3) Sebesar Rp59.825.865,00 berupa kelebihan penerimaan denda retribusi yang tidak dapat disetorkan dikarenakan terbitnya Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan atau Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga terlambat bayar kepada wajib retribusi yang terdampak bencana wabah Covid-19 yang terbit pada bulan Oktober 2021.
- d. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.958.583.004,00 berupa uang jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk penyelenggaraan pajak hiburan insidental;
- e. Dinas Kebudayaan sebesar Rp2.244.490.530,00 berupa pembayaran belanja makan minum dan honorarium pekerja seni yang belum berhasil diterima oleh rekening pihak ketiga di tahun 2023 karena transaksi melalui SKN Non Bank DKI pada tanggal 31 Desember 2023;
- f. Dinas Sosial sebesar Rp1.212.420.000,00 merupakan sisa dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 yang akan disalurkan kembali pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan dasar melalui Kartu Anak Jakarta sebesar Rp18.000.000,00.
 - 2) Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan dasar melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebesar Rp1.136.820.000,00.
 - 3) Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan dasar melalui Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) sebesar Rp57.600.000,00.
- g. Dinas Pendidikan sebesar Rp100.869.613,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sisa dana Bantuan Sosial Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahun 2022 sebesar Rp99.000.000,00;
 - 2) Pada Rekening Sekolah Dasar Negeri merupakan penerimaan lain-lain pada SDN Rawa Badak Selatan 07 sebesar Rp50.000,00 dan kelebihan



pengembalian saldo rekanan pada SDN Pademangan Barat 09 Pagi Jakarta sebesar Rp600,00;

- 3) Pada Rekening PKBM Negeri sebesar Rp1.500.000,00 merupakan saldo peng-nonaktifan rekening sekolah (rekening *dormant*) agar rekening tersebut tidak mati yang terdapat di tiga belas jenjang PKBM Negeri dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenjang	Nilai (Rp)
1	PKBM Negeri 23	100.000
2	PKBM Negeri 08	50.000
3	PKBM Negeri 11	150.000
4	PKBM Negeri 10	100.000
5	PKBM Negeri 25	100.000
6	PKBM Negeri 35	50.000
7	PKBM Negeri 33	50.000
8	PKBM Negeri 13	100.000
9	PKBM Negeri 22	250.000
10	PKBM Negeri 38	150.000
11	PKBM Negeri 30	150.000
12	PKBM Negeri 06	150.000
13	PKBM Negeri 37	100.000
Jumlah		1.500.000

- 4) Pada Rekening TPA Negeri Bina Tunas Jaya X sebesar Rp4.610,00 merupakan penerimaan lain-lain yang terdapat di satu jenjang TPA Negeri; dan
- 5) Pada Rekening TK Negeri sebesar Rp314.403,00 merupakan pembelian cek yang menggunakan dana sendiri yang disetor ke rekening TK yang terdapat di tiga TK Negeri dengan rincian di bawah ini.

No	Jenjang	Nilai (Rp)
1	TK Negeri Pulau Kelapa 01	214.403
2	TK Negeri Pulau Kelapa 01	50.000
3	TK Negeri Cilincing 01	50.000
Jumlah		314.403

5.5.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp17.426.015.191.033,00 dan Rp19.426.434.755.048,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.50
Kewajiban
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Kewajiban Jangka Pendek	4.263.242.971.187	4.569.900.471.972
2.	Kewajiban Jangka Panjang	13.162.772.219.846	14.856.534.283.076
JUMLAH		17.426.015.191.033	19.426.434.755.048



5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.263.242.971.187,00 dan Rp4.569.900.471.972,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.51
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	652.047.503	1.303.569.666
2.	Utang Bunga Pinjaman	14.739.619.252	15.030.568.624
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.861.669.834.064	1.684.301.177.092
4.	Pendapatan Diterima Di muka	216.488.454.965	505.256.654.326
5.	Utang Belanja	2.147.127.573.272	2.344.638.184.948
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	16.377.359.980	13.126.032.102
7.	Utang Jaminan	6.188.082.151	6.244.285.214
	Jumlah	4.263.242.971.187	4.569.900.471.972

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp652.047.503,00 dan Rp1.303.569.666,00. Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak seperti PPN, Pajak Penghasilan, atau pungutan lainnya. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.52
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		PPKD	SKPD	PPKD	SKPD
A.	Utang PFK Pajak				
1.	Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD	242.071.200	10.127.516	242.071.200	158.782.716
2.	Utang PPh 21 Dana BLUD	0	4.236.597	0	1.655.623
3.	Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD	0	0	0	1.387.551
4.	Utang PPh 22 Dana BLUD	0	9.407.912	0	10.277.596
5.	Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD	0	3.731.557	0	91.267.568
6.	Utang PPh 23 Dana BLUD	0	17.412.406	0	7.246.390
7.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD	0	0	0	9.538.592



No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		PPKD	SKPD	PPKD	SKPD
8.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD	0	0	0	0
9.	Utang PPN di SKPD dan PPKD	0	136.394.402	0	484.355.735
10.	Utang PPN Dana BLUD	0	92.612.382	0	98.130.911
B. Utang Asuransi					
11.	Utang Kesehatan BPJS	0	111.955.006	0	94.799.605
12.	Utang Ketenagakerjaan BPJS	0	22.947.025	0	101.748.679
C. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lain-Lain					
13.	Utang PFK Lainnya	0	1.151.500	0	2.307.500
	Jumlah	242.071.200	409.976.303	242.071.200	1.061.498.466
	Jumlah Utang PFK	652.047.503		1.303.569.666	

Secara lebih rinci Utang PFK dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di BPKD, SKPD, dan BLUD

Utang PFK tahun 2023 merupakan keseluruhan potongan atau pungutan yang dilakukan oleh BUD, bendahara SKPD dan Bendahara BLUD yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan kepada pihak yang berhak. Utang PFK tersebut terdiri dari:

1) Utang PFK Pajak di BPKD

Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang PFK Pajak di BPKD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp242.071.200,00. Utang PFK Pajak di BPKD tersebut merupakan utang PPH Pusat. Hal tersebut merupakan kasus tuntutan perbendaharaan bendahara pengeluaran di Walikota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2009. Surat pembebanan Sementara untuk kasus kerugian ini telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1212 Tahun 2014 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara atas Nama Febuardianto, S.E. NIP 197102261998031009 Staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat. Berdasarkan hasil Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) kasus tersebut tidak dapat ditindak lanjuti.

2) Utang PFK Pajak di SKPD

Utang PFK Pajak di SKPD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Negara. Utang PFK di SKPD terdapat di Dinas Pendidikan pada 83 sekolah (sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah).



Utang PFK Pajak di SKPD per 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp150.253.475,00 dan Rp745.332.162,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.53

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	10.127.516	158.782.716
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	0	1.387.551
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	3.731.557	91.267.568
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	0	9.538.592
5.	Utang Pemotongan PPN	136.394.402	484.355.735
	Jumlah	150.253.475	745.332.162

3) Utang PFK Pajak di BLUD

Utang PFK Pajak di BLUD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di BLUD atas dana BLUD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Negara. Utang PFK Pajak di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing sebesar Rp123.669.297,00 dan Rp117.310.520,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.54

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Jenis Utang PFK di BLUD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	4.236.597	1.655.623
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	9.407.912	10.277.596
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	17.412.406	7.246.390
4.	Utang Pemotongan PPN	92.612.382	98.130.911
	Jumlah	123.669.297	117.310.520

Utang PFK di BLUD dengan jumlah tiga terbesar terdapat pada RSUD Kepulauan Seribu sebesar Rp99.125.922,00, RSUD Budhi Asih sebesar Rp22.985.598,00 dan Puskesmas Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sebesar Rp1.418.007,00 dan dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 5.55

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Jenis Pajak	RSUD Kepulauan Seribu	RSUD Budhi Asih	Puskesmas Kemayoran Jakpus
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	435.890	2.895.000	905.707
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	9.002.022	271.622	0
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	7.419.630	9.480.476	512.300
4.	Utang Pemotongan PPN	82.268.380	10.338.500	0
	Jumlah	99.125.922	22.985.598	1.418.007

b. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Utang PFK BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetor ke BPJS.

Utang PFK BPJS Kesehatan per 31 Desember 2023 di SKPD/BLUD dan PPKD masing-masing Rp111.955.006,00 dan Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp94.799.605,00 dan Rp0,00.

Utang PFK BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2023 di SKPD/BLUD dan PPKD masing-masing Rp22.947.025,00 dan Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2022 di SKPD/BLUD dan PPKD masing-masing Rp101.748.679,00 dan Rp0,00.

Pada tahun 2023 Utang BPJS Kesehatan tercatat pada:

- 1) RSUD Koja Jakarta Utara sebesar Rp 79.226.836,00;
- 2) Puskesmas Kec. Pasar Rebo – Jaktim sebesar Rp24.133.257,00; dan
- 3) Puskesmas Kec.Ciracas – Jaktim sebesar Rp8.594.913,00.

Utang BPJS Ketenagakerjaan tercatat pada Puskesmas Kec.Ciracas – Jaktim sebesar Rp22.947.025,00.

c. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Lainnya

Utang PFK Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.151.500,00 dan Rp2.307.500,00.

5.5.2.1.2 Utang Bunga Pinjaman

Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp14.739.619.252,00 dan Rp15.030.568.624,00. Utang bunga kepada Pemerintah Pusat merupakan perhitungan akrual atas:

- a. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang berupa pinjaman dari Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek JEDI nomor SLA–



1247/DSMI/2012 penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang rupiah. Utang bunga pinjaman proyek JEDI per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.061.092.016,00. Perhitungan Utang Bunga pinjaman proyek JEDI per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.56
Perhitungan Utang Bunga (Akrual) JEDI

(dalam rupiah)

No	Jenis Pinjaman	Periode Bunga	Utang	Bunga Berjalan	Utang Bunga Akrual per 31 Des 2023
1	2	3	4	5	6=4/3*5
1	SLA-1247/DSMI/2012	6 bulan	4 bulan	16.591.638.023	11.061.092.016

- b. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang berupa pinjaman dari Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek MRT *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) nomor SLA 1263/DSMI/2016 dan *phase II* nomor SLA 1295/DSMI/2023 (Jakarta Kota – Bundaran HI) penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang yen yang dikonversi ke dalam rupiah. Nilai bunga sebesar Rp938.393.943,00 dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per 29 Desember 2023 sebesar Rp109,55 per 1 yen. Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.57
Perhitungan Utang Bunga (Akrual) MRT

No	Jenis Pinjaman	Utang Pokok (Yen)	Suku Bunga (%)	Jumlah Hari Akrual s.d. 31 Des	Jumlah Periode 1 tahun	Kurs Tengah BI Akhir Tahun 2023 (Rp)	Utang Bunga per 31 Des 23 (Yen)	Utang Bunga per 31 Des 23 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=((4*3*5)/6)	9=7*8
I	MRT Phase I							
1	Konstruksi	53.111.965.130	0,44%	11	365	109,55	7.042.792	771.517.087
2	Konsultan	3.849.036.997	0,35%	11	365	109,55	405.994	44.475.445
	Total Phase I						7.448.786	815.992.532
II	MRT Phase II							
1	Konstruksi	34.293.608	0,44%	13	365	109,55	5.374	588.706
2	Konstruksi	380.787.413	0,44%	19	365	109,55	87.216	9.554.256
3	Konstruksi	623.373.116	0,44%	40	365	109,55	300.585	32.928.200
4	Konstruksi	814.345.138	0,44%	40	365	109,55	392.671	43.015.950
5	Konstruksi	492.717.178	0,44%	40	365	109,55	237.584	26.026.626
6	Konstruksi	25.007.309	0,44%	23	365	109,55	6.934	759.599
7	Konstruksi	379.744.034	0,44%	19	365	109,55	86.977	9.528.074
	Total Phase II						1.117.341	122.401.411
TOTAL Phase I & II							8.566.127	938.393.943

- c. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang berupa Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional dari Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-239B/SMI/1221 Tanggal 30 Desember 2021 yang telah dinyatakan kembali



dengan Akta No. 85 Tanggal 23 September 2021. Nilai bunga sebesar Rp2.740.133.293,00 dihitung dengan menggunakan Rupiah. Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.58
Perhitungan Utang Bunga Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pinjaman	Nilai yang ditarik pemerintah	Periode Bunga	Periode Utang	Pembayaran Bunga Per 25 Jan 2024	Utang Bunga AkruaI per 31 Des 2023
1	2	3	4	5	6	7 = 5 / 4 * 6
1	PEN_PT SMI	4.074.967.079.587	31 hari	7 hari	12.134.876.012	2.740.133.293
TOTAL						2.740.133.293

5.5.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 1.861.669.834.064,00 dan Rp 1.684.301.177.092,00. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 merupakan nilai yang akan dibayarkan pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)

Bagian Lancar Utang – IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI) merupakan bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat atas Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Proyek JEDI Nomor SLA–1247/DSMI/2012 sebesar Rp33.629.623.430,00 yang penilaiannya menggunakan mata uang Rupiah. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

b. Bagian Lancar Utang – PEN

Bagian Lancar Utang – PEN merupakan bagian lancar utang yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN yang didasarkan atas Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-181/SMI/1220 tanggal 21 Desember 2020 atas Perubahan I Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020, Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor 8 tanggal 12 April 2021, dan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor 85 tanggal 23 September 2021. Saldo Bagian Lancar Utang – PEN Per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.828.040.210.634,00.



5.5.2.1.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pembayaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum diberikannya pelayanan. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp216.488.454.965,00 dan Rp505.256.654.326,00. Perbandingan tersebut digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.59
Pendapatan Diterima di Muka
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah	3.506.186.150	168.989.781.534
2	Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah	24.944.175.550	25.787.212.504
3	Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	112.033.643.034	138.394.810.082
4	Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	39.266.042.398	42.936.900.358
5	Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	910.687.396	765.169.321
6	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	2.988.648.669	3.185.354.028
7	Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama pihak lain BLUD	19.909.645.124	10.649.066.238
8	Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD yang sah	12.929.419.406	29.086.263.275
9	Pendapatan Diterima di Muka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	7.238	85.462.096.986
	Total	216.488.454.965	505.256.654.326

a. Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah

Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah disajikan sebesar Rp3.506.186.150,00 yang merupakan perolehan pajak yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah yang berasal dari kelebihan pembayaran pokok pajak daerah di antaranya Pajak Reklame sebesar Rp1.848.435.889,00 dan Pajak PBB P2 sebesar Rp1.633.783.052,00.

b. Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah

Pendapatan Diterima Di muka Retribusi Daerah sebesar Rp24.944.175.550,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO	SKPD	Uraian	Pendapatan diterima di muka s.d Desember 2023 (Rp)	Pendapatan diterima di muka s.d Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian	Retribusi Pemakaian Fasilitas Sarana Prasarana Perikanan.	601.772.280	713.567.531
2	Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	21.905.384	23.766.032



NO	SKPD	Uraian	Pendapatan diterima di muka s.d Desember 2023 (Rp)	Pendapatan diterima di muka s.d Desember 2022 (Rp)
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun	135.544.445	92.597.777
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sewa Tanah Makam Tumpangan 25%	468.655.972	471.990.417
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perpanjangan Sewa Tanah Makam	20.974.861.389	21.749.080.667
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Kios	1.549.366.000	1.545.532.000
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Pemakaian Ruangan	97.110.000	97.110.000
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Retribusi Penyediaan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan	1.094.960.080	1.093.568.080
		Jumlah	24.944.175.550	25.787.212.504

c. Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa sebesar Rp 112.033.643.034,00 seperti tersaji pada lampiran 14.

d. Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah sebesar Rp39.266.042.398,00 seperti tersaji pada lampiran 15.

e. Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna

Pendapatan Diterima Di muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna sebesar Rp910.687.396,00 seperti tersaji pada lampiran 15.

f. Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD

Pendapatan Diterima Di muka Jasa Layanan Umum BLUD disajikan sebesar Rp2.988.648.669,00 merupakan:

- 1) Uang Muka Pasien dan Uang Titipan BLUD Kesehatan sebesar Rp2.865.517.066,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	BLUD RSUD Matraman	2.398.597.850
2	BLUD RSUD Tarakan	259.097.149
3	BLUD RSUD Koja	107.081.391
4	BLUD RSUD Cengkareng	79.002.779
5	BLUD RSUD Pasar Minggu	12.537.897
6	BLUD RSUD Pasar Rebo	9.200.000
Total BLUD Kesehatan		2.865.517.066



- 2) Uang Muka Jasa BLUD Non Kesehatan sebesar Rp123.131.603,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	SMKN 27 Jakarta	41.925.000
2	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	41.156.603
3	SMKN 57 Jakarta	37.000.000
4	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	3.050.000
Total BLUD Non Kesehatan		123.131.603

g. Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD

Pendapatan Diterima Di muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD sebesar Rp19.909.645.124,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	BLUD RSUD Kalideres	3.119.375.000
2	BLUD RSUD Tarakan	2.792.690.894
3	BLUD RSUD Koja	1.432.068.067
4	BLUD RSUD Pasar Minggu	724.471.519
5	BLUD RSKD Duren Sawit	699.411.375
6	BLUD RSUD Cengkareng	109.388.751
7	BLUD RSUD Budhi Asih	41.576.667
8	BLUD RSUD Kebayoran Lama	31.862.400
9	BLUD RSUD Pasar Rebo	4.260.000
10	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	5.586.499.032
11	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung	1.214.283.000
12	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	4.153.758.419
Total		19.909.645.124

h. Pendapatan Diterima Di muka Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah disajikan sebesar Rp12.929.419.406,00 yang merupakan Penerimaan atas kelebihan pembayaran sanksi pajak atas beberapa jenis pajak sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan Sanksi Pajak	Jumlah (Rp)
1	Pajak Air Tanah	304.413.032
2	Pajak Air Hotel	156.600.570
3	Pajak Restoran	1.251.651.553
4	Pajak Hiburan	495.070.868
5	Pajak Reklame	3.758.748.678
6	Pajak Parkir	137.430.485
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.276.056.267
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	549.447.953
Total		12.929.419.406

Kelebihan pembayaran sanksi pajak tersebut diatas di antaranya disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian keringanan pokok pajak maupun penghapusan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021. Atas kelebihan pembayaran sanksi pajak tersebut dicatat sebagai



Pendapatan Diterima di Muka yang dapat diajukan permohonan Kompensasi maupun Restitusi.

- 2) Wajib Pajak melakukan pembayaran secara utuh sebelum Surat Keputusan Pengurangan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah ditetapkan. Atas kelebihan pembayaran tersebut, dicatat sebagai Pendapatan Diterima di Muka yang dapat diajukan permohonan Kompensasi maupun Restitusi.

i. Pendapatan Diterima Di muka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Diterima Di muka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.238,00 dan Rp85.462.096.986,00 merupakan saldo lebih bayar atas Dana Bagi Hasil sesuai dengan PMK Nomor 90/PMK.07/2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada Tahun 2023. Penyelesaian lebih bayar berdasarkan KMK Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH pada Tahun 2023.

Rincian Pendapatan Diterima Di muka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Lebih Bayar 2021 DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp1.832,00;
- 2) Lebih Bayar 2022 DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp2.527,00;
- 3) Lebih Bayar 2021 Penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp268,00;
- 4) Lebih Bayar 2021 Penerimaan PPh PODN (Pasal 25 dan Pasal 29) sebesar Rp4,00;
- 5) Lebih Bayar 2022 Bagi hasil dari Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp459,00;
- 6) Lebih Bayar 2021 Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp311,00;
- 7) Lebih Bayar 2021 Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp1.412,00;
- 8) Lebih Bayar 2021 Bagi hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp159,00; dan
- 9) Lebih Bayar 2022 Bagi hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp266,00.

5.5.2.1.5 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing Rp2.147.127.573.272,00 dan Rp2.344.638.184.948,00. Dari nilai saldo utang



belanja per 31 Desember 2023 tersebut dijelaskan secara rinci pada Lampiran 16.1, Lampiran 16.2 dan Lampiran 16.3. Adapun rincian saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.60
Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Rekening	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Utang Belanja Pegawai	897.763.135.326	886.733.206.383
2	Utang Belanja Barang	12.002.332.272	2.143.947.736
3	Utang Belanja Jasa Non TALI	119.392.881.363	4.272.085.742
4	Utang Belanja TALI	56.801.584.954	53.612.444.308
5	Utang Belanja Pemeliharaan	27.093.304.167	28.855.143.784
6	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.133.137.500	0
7	Utang Belanja Modal Tanah	0	356.250.700
8	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.425.902	1.917.400.000
9	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.447.682.079	47.063.723.415
10	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	72.808.520.333	20.864.047.292
11	Utang Belanja Pegawai BLUD	14.696.755.850	24.783.167.032
12	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	176.808.371.586	234.214.471.547
13	Utang Belanja Modal BLUD	2.118.428.162	43.429.052.724
14	Utang Belanja Subsidi	688.827.013.778	993.924.457.622
15	Utang Belanja Hibah	0	2.468.786.663
	Jumlah	2.147.127.573.272	2.344.638.184.948

Penjelasan lebih rinci atas akun Utang Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

a. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp897.763.135.326,00 dan Rp886.733.206.383,00. Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Utang belanja TPP Bulan Desember 2022 sebesar Rp876.828.885.563,00 tercatat pada seluruh SKPD Penggabung;
- 2) Utang iuran jaminan kesehatan PNS sebesar Rp15.093.763.484,00 tercatat pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah;
- 3) Utang kekurangan pembayaran Tunjangan PPh pegawai sebesar Rp3.628.044.675,00 di antaranya tercatat pada Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp1.784.924.781,00;
- 4) Utang iuran jaminan kesehatan PPPK sebesar Rp1.915.787.444,00 tercatat pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah;



- 5) Utang kekurangan pembayaran tunjangan fungsional sebesar Rp185.767.051,00 di antaranya tercatat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp134.550.000,00;
- 6) Utang kekurangan pembayaran gaji pegawai sebesar Rp107.000.789,00 di antaranya tercatat pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp54.293.300,00;
- 7) Utang kekurangan pembayaran gaji 13 sebesar Rp3.886.320,00 tercatat pada Dinas Pendidikan.

Rincian Utang Belanja Pegawai disajikan dalam Lampiran 16.1.

b. Utang Belanja Barang

Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp12.002.332.272,00 dan Rp2.143.947.736,00. Utang Belanja Barang merupakan pembelian barang operasional SKPD. Utang belanja Barang per 31 Desember 2023 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp10.340.703.456,00 merupakan utang ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp1.294.388.774,00, ganti uang pendaftaran BANI sebesar Rp228.030.000,00 dan Pemakaian BBM Pertamina (Unit ALKAL) sebesar Rp8.818.284.682,00;
- 2) UP Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp689.106.175,00 yang merupakan utang atas bahan bakar minyak;
- 3) UP Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp421.730.876,00 yang di antaranya merupakan utang atas pengadaan alat lab, *integrated library equipment*, bangku, papan tulis dan mikroskop *digital* observasi;
- 4) Kelurahan Jembatan Lima Jakbar sebesar Rp416.210.210,00 yang merupakan utang atas penyediaan perlengkapan kebersihan, pakaian seragam PKK, bahan kerja PPSU; dan
- 5) Dinas Pendidikan sebesar Rp114.309.593,00 merupakan utang atas pengadaan tempat sampah, kursi dan *filing cabinet*.

Rincian Utang Belanja Barang disajikan dalam Lampiran 16.2.

c. Utang Belanja Jasa Non TALI

Saldo Utang Jasa Non TALI per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp119.392.881.363,00 dan Rp4.272.085.742,00. Utang belanja Jasa Non TALI per 31 Desember 2023 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:



- 1) UP Jaminan Kesehatan Jakarta sebesar Rp115.735.475.300,00 merupakan utang belanja bantuan iuran jaminan Kesehatan nasional bagi peserta PBPU dan BP Kelas III dan kelas III Mandiri;
- 2) UP Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp879.946.537,00 di antaranya merupakan utang Pekerjaan Manajemen Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta 2018, sewa sarana mobilitas darat dan Pembuatan Basic Design Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah;
- 3) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara Kota Jaktim sebesar Rp745.724.472,00 merupakan utang belanja tunjangan Pegawai Non ASN Desember 2023 yang dibayar di Januari 2024 (Anggaran APBD);
- 4) Dinas Perhubungan sebesar Rp705.008.625,00 di antaranya merupakan utang pengadaan armada Bus *Busway* Koridor XI, pemeliharaan terminal, pemeliharaan Gedung kantor, pembangunan JPO Sentra Primer Timur;
- 5) RSUD Tanjung Priok sebesar Rp595.782.961,00 merupakan utang belanja jasa non tali RSUD.

Rincian Utang Belanja Jasa Non Tali disajikan dalam Lampiran 16.2.

d. Utang Belanja Jasa TALI

Saldo Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp56.801.584.954,00 dan Rp53.612.444.308,00. Utang Belanja TALI per 31 Desember 2023 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) Dinas Bina Marga sebesar Rp20.580.500.451,00;
- 2) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp9.668.833.170,00;
- 3) Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sebesar Rp1.945.101.912,00;
- 4) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.864.782.554,00; dan
- 5) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebesar Rp1.457.486.709,00.

Rincian Utang Belanja TALI disajikan dalam Lampiran 16.2.

e. Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp27.093.304.167,00 dan Rp28.855.143.784,00. Utang belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2023 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:



- 1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp18.464.285.228,00 yang merupakan utang Pengerjaan Pengerukan situ Kodamar, situ Rawa Dongkal, situ Mangga Bolong;
- 2) Suku Dinas Bina Marga Kota Jakarta Pusat sebesar Rp6.488.905.438,00 yang merupakan utang pemeliharaan jalan (layer hotmix);
- 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp815.682.912,00 yang merupakan utang pemeliharaan berkala Rusun Pulogebang, Rusun Pinus Elok dan Rusun Muara Baru;
- 4) Dinas Bina Marga sebesar Rp740.304.795,00 yang merupakan utang pemeliharaan trotoar Jalan Yos Sudarso dan trotoar Bus Transjakarta; dan
- 5) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jaktim sebesar Rp445.940.400,00 yang merupakan utang pemeliharaan rumah susun Bekasi KM 2.2019.

Rincian Utang Belanja Pemeliharaan disajikan dalam Lampiran 16.2.

f. Utang Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Saldo Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.133.137.500,00 dan Rp0,00. Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2023 terdapat pada Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari utang pajak untuk Kontingen Sea Games Kamboja Tahun 2023 sebesar Rp1.037.137.500,00 dan utang pemberian penghargaan pelatih disabilitas berprestasi tingkat ASEAN sebesar Rp96.000.000,00.

g. Utang Belanja Modal Tanah

Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp356.250.700,00.

Rincian Utang Belanja Modal Tanah disajikan dalam Lampiran 16.2.

h. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp234.425.902,00 dan Rp1.917.400.000,00. Utang belanja modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 di antaranya terdapat pada UP Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas yang merupakan utang pengadaan peralatan mesin sebesar Rp175.225.902,00.



Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam Lampiran 16.2.

i. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp77.447.682.079,00 dan Rp47.063.723.415,00. Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) UP Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan sebesar Rp50.631.600.464,00 di antaranya merupakan utang atas pekerjaan rehab total dan rehab berat Gedung beberapa SDN;
- 2) Sudin Kesehatan Kota Jaksel sebesar Rp7.713.469.037,00 di antaranya merupakan utang atas Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Gandaria, Gedung Puskesmas Kelurahan Tebet, Gedung Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu;
- 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7.262.451.240,00 di antaranya merupakan utang atas penyusunan DED Rumah Susun, Pembangunan sarana dan prasarana rusun;
- 4) Dinas Sosial sebesar Rp5.103.895.017,00 merupakan utang atas pelaksanaan rehab total Panti Sosial Bina Daksa Budhi Bakti; dan
- 5) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah sebesar Rp3.952.079.595,00 merupakan utang atas rehabilitasi Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah.

Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan di SKPD disajikan dalam Lampiran 16.2.

j. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp72.808.520.333,00 dan Rp20.864.047.292,00. Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- 1) UP Penanganan Sampah Badan Air sebesar Rp65.955.168.863,00 merupakan utang atas Pembangunan Saringan Sampah di Perbatasan dengan bobot 72,84%;
- 2) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp6.012.543.169,00 merupakan utang pembangunan prasarana kali/sungai sistem aliran timur dan pembangunan tanggul keamanan pantai sistem aliran barat,



pembangunan dan peningkatan SPALD, pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Sebir;

- 3) Sudiin Sumber Daya Air Kota Jakarta Barat sebesar Rp156.540.962,00 merupakan utang pembangunan *sheetpile*, rumah pompa, pembangunan kolam kolakan; dan
- 4) Sumber Daya Air Kota Jaktim sebesar Rp684.267.340,00 merupakan utang Pembangunan Rumah Pompa PHB Cipa dan Kelengkapannya.

Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan di SKPD disajikan dalam Lampiran 16.2.

k. Utang Belanja Pegawai BLUD

Utang Belanja Pegawai BLUD merupakan utang kepada pegawai yang antara lain terdiri atas gaji dokter, honorarium *shift* paramedis, honor lembur dan honor petugas gadar. Sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp14.696.755.850,00 dan Rp24.783.167.032,00. Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2023 di antaranya terdapat pada SKPD:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp2.751.757.825,00;
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp2.732.596.949,00;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp2.503.789.051,00;
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebesar Rp2.283.748.950,00; dan
- 5) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebesar Rp1.847.428.094,00.

Rincian Utang Belanja Pegawai BLUD disajikan dalam Lampiran 16.3.

l. Utang Belanja Barang Jasa BLUD

Utang Belanja Barang Jasa BLUD merupakan utang yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp176.808.371.586,00 dan Rp234.214.471.547,00.

Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut.



Tabel 5.61
Utang Belanja Barang Jasa BLUD
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD	170.360.424.126	225.176.321.895
2.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Dinkes	5.571.207.402	7.509.219.480
3.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan	876.740.058	1.528.930.172
	Jumlah	176.808.371.586	234.214.471.547

Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD sebesar Rp170.360.424.126,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.62
Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	RSUD Pasar Rebo	5.968.719.892	5.135.419.568
2.	RSUD Koja	55.869.065.905	65.147.553.621
3.	RSUD Cengkareng	19.936.963.912	24.056.425.837
4.	RSUD Tarakan	16.203.100.837	25.335.495.243
5.	BLUD RS Budhi Asih	8.995.639.775	21.728.776.912
6.	RSUD Pasar Minggu	15.138.289.766	27.947.802.144
7.	RSUD Tugu Koja	804.712.017	2.585.518.342
8.	RSUD Kalideres	438.137.568	3.242.305.206
9.	RSUD Tanjung Priok	394.831.077	3.658.856.741
10.	RSUD Kebayoran Lama	69.467.021	282.058.654
11.	RSUD Jagakarsa	95.768.963	49.661.623
12.	RSUD Kemayoran	2.110.121.951	1.370.852.920
13.	RSKD Duren Sawit	5.440.944.660	4.266.146.063
14.	RSUD Tebet	5.404.686.458	6.528.673.682
15.	RSUD Pademangan	2.087.843.698	3.686.314.318
16.	RSUD Adhyaksa	7.892.189.410	39.531.590
17.	RSUD Kramat Jati	1.732.023.149	2.114.101.670
18.	RSUD Sawah Besar	16.573.022	137.050.940
19.	RSUD Cempaka Putih	277.546.923	476.336.504
20.	RSUD Mampang Prapatan	5.764.987.380	4.954.340.486
21.	RSUD Tanah Abang	114.237.781	119.368.022
22.	RSUD Ciracas	2.449.943.263	1.495.806.667
23.	RSUD Cilincing	6.449.244.390	9.628.035.841
24.	RSUD Pesanggrahan	1.076.666.850	1.519.555.616
25.	RSUD Matraman	4.157.873.589	1.058.514.131
26.	RSUD Kembangan	23.646.665	2.031.146.935
27.	RSUD Cipayung	18.701.194	367.531.657
28.	RSUD Jati Padang	51.430.000	1.280.749.505



No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
29.	RSUD Kepulauan Seribu	10.435.868	148.135.494
30.	RSUD Johar Baru	28.750.000	118.790.099
31.	RSUD Tamansari	901.961.281	3.243.445.116
32.	RSUD Kebayoran Baru	435.919.861	1.422.020.748
	Jumlah	170.360.424.126	225.176.321.895

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat sebesar Rp5.571.207.402,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.63

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus	4.943.656	0
2.	Puskesmas Kecamatan Gambir - Jakpus	2.282.160	2.556.965
3.	Puskesmas Kecamatan Johar Baru - Jakpus	3.570.870	3.573.770
4.	Puskesmas Kecamatan Kemayoran - Jakpus	223.794.812	60.542.190
5.	Puskesmas Kecamatan Menteng - Jakpus	3.166.830	0
6.	Puskesmas Kecamatan Sawah Besar - Jakpus	190.000	3.428.000
7.	Puskesmas Kecamatan Senen - Jakpus		10.318.825
8.	Puskesmas Kecamatan Tanah Abang - Jakpus	7.131.514	10.177.187
9.	Puskesmas Kecamatan Cilincing - Jakut		1.006.498.786
10.	Puskesmas Kecamatan Pademangan - Jakut	1.039.695	1.462.446
11.	Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok - Jakut	383.846.791	1.141.611.069
12.	Puskesmas Kecamatan Koja - Jakut	4.852.780	0
13.	Puskesmas Kecamatan Cipayang - Jaktim	782.945.079	1.781.550
14.	Puskesmas Kecamatan Ciracas - Jaktim	5.413.480	0
15.	Puskesmas Kecamatan Duren Sawit - Jaktim	76.171.251	60.640.106
16.	Puskesmas Kecamatan Jatinegara - Jaktim	2.739.753	154.243.643
17.	Puskesmas Kecamatan Kramat Jati - Jaktim	6.783.409	412.111.720
18.	Puskesmas Kecamatan Makasar - Jaktim	5.621.050	843.664.621
19.	Puskesmas Kecamatan Matraman - Jaktim	61.694.899	85.765.088
20.	Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim	27.960.000	1.892.550
21.	Puskesmas Kecamatan Pulogadung - Jaktim	12.327.660	1.445.600
22.	Puskesmas Kecamatan Cakung - Jaktim	1.548.893.666	1.207.684.980
23.	Puskesmas Kecamatan Jagakarsa - Jaksel	482.932.562	0



No	SKPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
24.	Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel	74.615.160	4.735.258
25.	Puskesmas Kecamatan Pancoran - Jaksel		3.568.650
26.	Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel	8.996.590	15.559.425
27.	Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel	0	4.608.277
28.	Puskesmas Kecamatan Setiabudi - Jaksel	3.681.224	13.484.210
29.	Puskesmas Kecamatan Tebet - Jaksel	14.604.000	0
30.	Puskesmas Kecamatan Cilandak - Jaksel		4.163.606
31.	Puskesmas Kecamatan Cengkareng - Jakbar	56.063.501	51.204.443
32.	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan – Jakbar	2.128.980	73.306.789
33.	Puskesmas Kecamatan Kalideres - Jakbar	82.162.110	74.402.107
34.	Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar	57.043.240	56.510.652
35.	Puskesmas Kecamatan Kembangan - Jakbar	48.714.133	48.872.228
36.	Puskesmas Kecamatan Palmerah - Jakbar	58.519.627	49.231.677
37.	Puskesmas Kecamatan Taman Sari - Jakbar	5.505.610	6.715.180
38.	Puskesmas Kecamatan Tambora - Jakbar	11.115.550	251.255.008
39.	Puskesmas Kecamatan Kep.Seribu Utara	36.168.328	3.400.000
40.	Puskesmas Kecamatan Kep.Seribu Selatan	168.305.199	62.249.600
41.	Pusat Layanan Kesehatan Pegawai	85.597.872	101.573
42.	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.209.684.361	1.776.451.701
	Jumlah	5.571.207.402	7.509.219.480

Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan sebesar Rp876.740.058,00 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.64
Utang Belanja Barang Jasa BLUD Non Kesehatan
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Pemukiman Pulogadung	599.561.495	601.657.355
2.	Unit Pengelola Perparkiran	41.473.625	663.033.658
3.	UP Taman Margasatwa Ragunan	0	3.590.850
4.	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	235.704.938	260.648.309
	Jumlah	876.740.058	1.528.930.172

Rincian Utang Belanja Barang Jasa BLUD disajikan dalam Lampiran 16.3.



m. Utang Belanja Modal BLUD

Utang Belanja Modal BLUD merupakan utang-utang pembelian Aset Tetap pada BLUD yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.118.428.162,00 dan Rp43.429.052.724,00.

Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2023 terdiri dari:

- 1) Saldo belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp999.975.201,00 di antaranya terdapat pada BLUD berikut:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres sebesar Rp625.521.200,00;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp296.400.000,00; dan
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing sebesar Rp78.000.000,00.
- 2) Saldo utang belanja modal Gedung dan Bangunan BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp943.775.896,00 terdapat pada RSUD Cengkareng; dan
- 3) Saldo utang belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp174.677.065,00 terdapat pada RSUD Pasar Minggu.

Rincian Utang Belanja Modal BLUD disajikan dalam Lampiran 16.3.

n. Utang Belanja Subsidi

Utang belanja subsidi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp688.827.013.778,00 dan Rp993.924.457.622,00. Utang belanja subsidi per 31 Desember 2023 tercatat pada Dinas Perhubungan merupakan utang belanja subsidi transportasi pada PT Transjakarta, PT MRT Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (LRT Jakarta) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Utang subsidi kepada PT Transjakarta

Atas utang belanja subsidi tahun 2022 sebesar Rp723.107.089.453,00 telah dilakukan penyesuaian atas kelebihan pembayaran subsidi PSO tahun 2020, 2021 dan 2022 sebesar Rp249.643.496.222,00 berdasarkan Berita Acara Tindak Lanjut Perhitungan Kelebihan Pembayaran Subsidi PSO Tahun 2020 (BA nomor 2761/PA.02.00 tanggal 28 Desember 2023), Tahun 2021 (BA nomor 2762/PA.02.00 tanggal 28 Desember 2023) dan Tahun 2022 (BA nomor 2763/PA.02.00 tanggal 28 Desember 2023).

Untuk kelebihan pembayaran PSO subsidi layanan Transjakarta tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp195.849.289.114,00 dan Rp220.073.517.349,00 masih dalam proses evaluasi oleh BPKP.

- 2) Utang subsidi kepada PT MRT Jakarta

Atas utang belanja subsidi tahun 2022 telah dilakukan pembayaran utang subsidi pada tahun 2023 sebesar Rp223.312.376.747,00.



Untuk utang subsidi tahun 2023 berdasarkan Berita Acara Verifikasi Selisih Kurang/Lebih Subsidi Prasarana dan Sarana MRT Jakarta Periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 Nomor 403/PH.10.00 tanggal 31 Januari 2024 sebesar Rp109.479.054.097,00.

3) Utang subsidi kepada PT Jakarta Propertindo (LRT Jakarta)

Atas utang belanja subsidi tahun 2022 telah dilakukan pembayaran utang subsidi pada tahun 2023 sebesar Rp47.504.991.422,00.

Untuk utang subsidi tahun 2023 berdasarkan Berita Acara Verifikasi Selisih Kurang/Lebih Subsidi Prasarana dan Sarana LRT Jakarta Periode Januari sampai dengan Desember 2023 Nomor 402/PH.10.00 tanggal 31 Januari 2024 sebesar Rp105.884.366.450,00.

Sedangkan untuk kelebihan pembayaran PSO subsidi LRT kepada PT Jakarta Propertindo tahun 2022 sebesar Rp1.063.701.316,00 belum diperhitungkan sebagai pengurang utang belanja subsidi tahun 2023.

Rincian Utang Belanja Subsidi di SKPD disajikan dalam Lampiran 16.2.

o. Utang Belanja Hibah

Utang belanja hibah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.468.786.663,00.

Rincian Utang Belanja Subsidi di SKPD disajikan dalam Lampiran 16.2.

5.5.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.377.359.980,00 dan Rp13.126.032.102,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Kompensasi Pajak

Utang Kompensasi Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.247.474.531,00 dan Rp3.682.084.268,00 merupakan pemanfaatan kelebihan pembayaran pajak daerah yang dapat dilakukan untuk pembayaran kurang bayar pajak daerah atau utang pajak. Kompensasi dapat dimanfaatkan pada masa pajak selanjutnya setelah melakukan lebih bayar. Berikut rincian perhitungan Utang Kompensasi Pajak.

No	Jenis Pajak	Utang Awal (Rp)	Koreksi (Rp)	Kompensasi (Rp)	Sisa Utang Awal (Rp)	Utang Berjalan (Rp)	Kompensasi (Rp)	Sisa Utang Berjalan (Rp)	Total Utang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)	7	8	9 (7-8)	10 (6+9)
1	PKB	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BBN-KB	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PBB-KB	0	0	0	0	0	0	0	0
4	P A T	307.432	0	0	307.432	0	0	0	307.432



No	Jenis Pajak	Utang Awal (Rp)	Koreksi (Rp)	Kompensasi (Rp)	Sisa Utang Awal (Rp)	Utang Berjalan (Rp)	Kompensasi (Rp)	Sisa Utang Berjalan (Rp)	Total Utang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)	7	8	9 (7-8)	10 (6+9)
5	Hotel	57.312.717	0	0	57.312.717	0	0	0	57.312.717
6	Restoran	1.138.698.333	0	0	1.138.698.333	0	0	0	1.138.698.333
7	Hiburan	331.369.021	0	0	331.369.021	0	0	0	331.369.021
8	Reklame	242.274.131	0	0	242.274.131	0	0	0	242.274.131
9	PPJ	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Parkir	724.127	0	0	724.127	0	0	0	724.127
11	Rokok	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BPHTB	140.466.449	0	0	140.466.449	928.431.120	(347.688.733)	580.742.387	721.208.836
13	PBB-P2	1.770.932.058	(27.390.219)	(18.019.887)	1.725.521.952	101.255.168	(71.197.186)	30.057.982	1.755.579.934
TOTAL		3.682.084.268	(27.390.219)	(18.019.887)	3.636.674.162	1.029.686.288	(418.885.919)	610.800.369	4.247.474.531

b. Utang Restitusi Pajak

Utang restitusi pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.178.722.745,00 dan Rp963.302.495,00 merupakan kewajiban pengembalian pembayaran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah atas kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dibayarkan kepada Wajib Pajak.

c. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp169.040.000,00 dan Rp0,00. Terdapat pada PPKD yang merupakan Pengembalian Dana BOS yang harus dikembalikan ke RKUN berdasarkan Hasil verifikasi Inspektorat atas pengembalian Dana BOS SD Islam Al-Azhar Syuhada

d. Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah

Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp60.600.192,00 dan Rp0,00. Terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp59.825.865,00 merupakan Kelebihan pembayaran denda retribusi sewa unit hunian dan unit usaha pada rusunawa, serta terdapat sisa hibah SMK Program Keunggulan dari Kemendikbudristek yang dikembalikan di awal tahun 2024 pada SMKN 63 dan SMKN 51 sebesar Rp669.277,00 dan Rp105.050,00.

e. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp10.628.454.363,00 dan Rp8.440.296.226,00 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.383.963.833,00



yang merupakan uang titipan sewa rumah ber-SIP dan Santunan pengosongan rumah bersengketa. dan pada Dinas Kebudayaan sebesar Rp2.244.490.530,00 yang merupakan Belanja makan minum dan honorarium pekerja seni atas kegiatan akhir tahun yang belum berhasil diterima oleh rekening pihak ketiga di tahun 2023 karena cut off transaksi SKN Non Bank DKI dan retur pembayaran pada tanggal 31 Desember 2023.

f. Kewajiban – Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan

Kewajiban - Penerimaan Kas Yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp93.068.149,00 dan Rp40.349.113,00. Terdapat di PPKD sebesar Rp88.701.436,00 yang merupakan penerimaan kas di rekening penampungan penerimaan kas daerah yang belum teridentifikasi kepemilikannya dan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.497.100,00 yang merupakan dana yang terdapat di Kas di Bank atas PKS parkir dengan Mangkuluhur City yang belum selesai perhitungan pembagian bagi hasilnya dan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.869.613,00 yang merupakan rekening dormant BOP Sekolah.

5.5.2.1.7 Utang Jaminan

Utang Jaminan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.188.082.151,00 dan Rp6.244.285.214,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Jaminan Pajak Daerah

Utang Jaminan Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.958.583.004,00 dan Rp4.251.303.714,00 merupakan jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk penyelenggaraan pajak hiburan insidental pada Badan Pendapatan Daerah.

b. Utang Jaminan BLUD

Utang Jaminan BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.229.499.147,00 dan Rp1.992.981.500,00. merupakan uang jaminan yang diberikan oleh pihak penyelenggara parkir yang bekerjasama dalam pengelolaan kawasan perparkiran dengan Unit Pengelola Perparkiran.

Per 31 Desember 2023 terdapat 69 (enam puluh sembilan) PKS yang aktif pada Unit Pengelola Perparkiran, masing-masing dari pihak penyelenggara tersebut memberikan uang jaminan atas PKS yang dibuat dengan Unit Pengelola Perparkiran sesuai dengan nilai yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut.

No	Bentuk Jaminan	Nilai (Rp)
1	Rekening Penampungan Uang Jaminan PKS Parkir	2.655.136.647,00
2	Bank Garansi	574.362.500,00



No	Bentuk Jaminan	Nilai (Rp)
3	Deposito	0,00
	Jumlah	3.229.499.147,00

5.5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.162.772.219.846,00 dan Rp14.856.534.283.076,00. Rincian Kewajiban (Utang) Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Utang Dalam Negeri – IBRD (Proyek JUFMP/JEDI)

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor IBRD SLA 1247 yang penilaiannya menggunakan mata uang rupiah untuk pembiayaan proyek JEDI kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Saldo utang proyek JEDI per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp252.727.124.999,00 dan Rp286.356.748.429,00.

b. Utang Dalam Negeri – JICA (Proyek MRT)

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1263/DSMI/2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta *Phase I* (Lebak Bulus – Bundaran HI) dengan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1295/DSMI/2013 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta *Phase II* (Jakarta Kota – Bundaran HI). Saldo utang proyek MRT per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.576.369.926.244,00 dan Rp7.290.092.296.108,00.

c. Utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Utang Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.333.675.168.603,00 dan Rp7.280.085.238.539,00, yang terdiri atas.

No	Nilai Penarikan Pinjaman	Plafon (Rp)	Pembayaran (Rp)	Bagian lancar (Rp)	Utang PEN Per 31 Des 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 – 4 – 5
1	PEN Tahun 2020	2.664.083.583.739	712.154.134.313	390.385.927.362	1.561.543.522.064
2	PEN Tahun 2021	3.192.635.570.093	472.622.445.581	532.105.970.916	2.187.907.153.596
3	Dukungan PEN Tahun 2021	4.074.967.079.587	1.585.194.274.288	905.548.312.356	1.584.224.492.943
	TOTAL	9.931.686.233.419	2.769.970.854.182	1.828.040.210.634	5.333.675.168.603



1) Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2020

Merupakan dana pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Pemerintah Pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) atas Pinjaman PEN Daerah pada tahun 2020 sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 yang ditandatangani oleh Pemprov DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 24 September 2020 dan telah diubah melalui Perubahan I Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 Nomor PERJ-181/SMI/1220 tanggal 21 Desember 2020 dengan jumlah pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp2.664.083.583.739,00. Penarikan dana pinjaman seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp2.664.083.583.739,00.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, pinjaman Program PEN digunakan untuk mendanai pelaksanaan dan penyelesaian program kegiatan pembangunan dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 telah digunakan dalam bentuk:

- Penyertaan Modal Daerah (PMD) Kepada PT Jakarta Propertindo (Persero) sebesar Rp1.382.000.000.000,00.
- Belanja Daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan sebesar Rp1.282.083.583.739,00.

Berikut rincian realisasi per kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah.

No	Jenis Pinjaman SKPD/BUMD	Plafon PEN (Akta No. 24 Tanggal 24-09-2020 serta Perubahan I Tanggal 21-12-2020) (Rp)	Penarikan Dana Pinjaman (Rp)	%	Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp)	%	Saldo (Sisa) (Rp)
1	2	3	4	5 = 4:3	6	7 = 6:3	8 = 4-6
	Pinjaman PEN (Bunga 0%)						
1	Infrastruktur Pengendali Banjir (Dinas Sumber Daya Air)	711.421.299.715	711.421.299.715	100,00	421.127.354.911	59,20	290.293.944.804
2	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Layanan Air Minum (Dinas Sumber Daya Air)	12.320.572.237	12.320.572.237	100,00	11.938.335.091	96,90	382.237.146



No	Jenis Pinjaman SKPD/BUMD	Plafon PEN (Akta No. 24 Tanggal 24-09- 2020 serta Perubahan I Tanggal 21-12- 2020) (Rp)	Penarikan Dana Pinjaman (Rp)	%	Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp)	%	Saldo (Sisa) (Rp)
1	2	3	4	5 = 4:3	6	7 = 6:3	8 = 4-6
3	Peningkatan Infrastruktur Transportasi (Dinas Bina Marga)	473.340.301.771	473.340.301.771	100,00	442.248.276.770	93,43	31.092.025.001
4	Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta (Dinas Lingkungan Hidup)	85.001.410.016	85.001.410.016	100,00	85.001.410.016	100,00	0
5	Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	200.000.000.000	200.000.000.000	100,00	200.000.000.000	100,00	0
6	Peningkatan Infrastruktur Olahraga (Pembangunan Jakarta International Stadium) (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	1.182.000.000.000	1.182.000.000.000	100,00	1.182.000.000.000	100,00	0
	Jumlah Total	2.664.083.583.739	2.664.083.583.739	100,00	2.342.315.376.788	87,92	321.768.206.951

Bahwa atas saldo (sisa) dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 sebesar Rp321.768.206.951,00 telah dilakukan pengembalian kepada PT SMI (Persero) tanggal 20 Desember 2022 dengan Nomor SP2D 1 040233/SP2D/XII/2022 yang diperlakukan sebagai pembayaran pokok pinjaman dipercepat sesuai Pasal 11 Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 beserta perubahannya.

2) Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor PERJ-196/SMI/2020 yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2020 dan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 8 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 12 April 2021 serta Perjanjian Perubahan Pertama Terhadap Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-239B/SMI/1221 Tanggal 30 Desember 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dana pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp3.192.635.570.093,00 dengan masa penarikan/pencairan pinjaman (*Availability Period*) sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Penarikan pinjaman dilakukan secara bertahap dengan mekanisme berikut:

- Penarikan pertama setinggi-tingginya sebesar 25% dari limit pinjaman.
- Penarikan kedua sebesar 45% dari limit pinjaman setelah dana yang ditarik pada penarikan pertama terserap/direalisasikan minimal 75% pada kegiatan.



c) Penarikan ketiga dilakukan sebesar nilai sisa kebutuhan penyelesaian pekerjaan setelah dana yang ditarik sebelumnya terserap/direalisasikan minimal 90% pada kegiatan.

Bahwa penarikan dana Pinjaman PEN Daerah seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 dan tahun 2022 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp3.192.635.570.093,00. Penarikan tahap terakhir Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp957.790.671.029,00 pada tanggal 1 April 2022.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 merupakan kegiatan lanjutan Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020, yang disalurkan dalam bentuk belanja daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan. Berikut rincian realisasi per kegiatan atas Pinjaman PEN Daerah sampai dengan 31 Desember 2022.

No	Uraian Kegiatan SKPD/BUMD	Plafon PEN (Akta No. 24 Tanggal 24-09-2020 serta Perubahan I Tanggal 21-12- 2020) (Rp)	Nilai Penarikan Pinjaman PEN (Rp)	Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp)	%	Estimasi Saldo (Sisa) (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 5:4	7 = 4 - 5
PINJAMAN PEN DAERAH TAHUN 2021						
a	Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir (Dinas Sumber Daya Air)	2.754.137.508.989	2.754.137.508.989	2.655.826.449.928	96,43	98.311.059.061
b	Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir - Pengendalian Banjir Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Diskominfo & Dinas Sumber Daya Air)	86.295.605.056	86.295.605.056	85.652.860.380	99,26	642.744.676
Total Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir		2.840.433.114.045	2.840.433.114.045	2.741.479.310.308	96,52	98.953.803.737
c	Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Layanan Air Minum (Dinas Sumber Daya Air)	56.784.547.380	56.784.547.380	37.854.104.382	66,66	18.930.442.998
d	Peningkatan Infrastruktur Transportasi (Dinas Bina Marga)	62.985.831.748	62.985.831.748	62.984.946.846	100,00	884.902
e	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (Transformasi Digital) (Diskominfo)	232.432.076.920	232.432.076.920	232.432.076.920	100,00	-
Jumlah		3.192.635.570.093	3.192.635.570.093	3.074.750.438.456	96,31	117.885.131.637

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa per 31 Desember 2022 masih terdapat estimasi saldo (sisa) dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 pada RKUD Dana Pinjaman PEN sebesar Rp117.885.131.637,00. Bahwa atas saldo (sisa) dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 sebesar Rp117.885.131.637,00 telah dilakukan pengembalian kepada PT SMI (Persero) tanggal 29 Desember 2023 dengan Nomor SP2D 1



042081/SP2D/XII/2023 yang diperlakukan sebagai pembayaran pokok pinjaman dipercepat sesuai Pasal 11 Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 beserta perubahannya.

3) Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) Nomor 85 yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT SMI (Persero) di hadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn pada tanggal 23 September 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima dana pinjaman setinggi-tingginya sebesar Rp4.075.000.000.000,00 dengan masa pencairan pinjaman (*Availability Period*) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2022. Jangka waktu pinjaman selama 60 bulan termasuk masa tenggang/*grace period* pembayaran pokok pinjaman selama 6 bulan dengan bunga pinjaman sebesar 5,66% per tahun. Penarikan pinjaman dilakukan secara bertahap dengan mekanisme berikut:

- a) Penarikan pertama setinggi-tingginya sebesar 55% dari limit pinjaman.
- b) Penarikan kedua dilakukan sebesar nilai sisa kebutuhan penyelesaian pekerjaan setelah dana yang ditarik pada penarikan sebelumnya terserap/direalisasikan minimal 90% pada kegiatan.

Penarikan dana pinjaman seluruhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 melalui pemindahbukuan dari rekening PT SMI (Persero) ke RKUD Dana Pinjaman PEN pada Bank DKI sebesar Rp4.074.967.079.587,00.

Dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 telah digunakan dalam bentuk:

- a) Penyertaan Modal Daerah (PMD) Kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar Rp3.703.121.000.000,00.
- b) Belanja Daerah pada SKPD Pelaksana Kegiatan sebesar Rp371.846.079.587,00.

Berikut rincian realisasi per kegiatan atas Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2022:



No	Uraian Kegiatan SKPD/BUMD	Pagu Pinjaman PEN (Rp)	Nilai Penarikan Pinjaman PEN (Rp)	Realisasi s.d. 31-12-2020 (Rp)	%	Estimasi Saldo (Sisa) (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6=5:4	7 = 4 - 5	8
Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021							
a	Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah (Dinas Lingkungan Hidup)	371.879.000.000	371.846.079.587	371.361.351.922	99,87	484.727.665	
b	Peningkatan Infrastruktur Olahraga Proyek Pembangunan Jakarta International Stadium (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	2.460.000.000.000	2.460.000.000.000	2.460.000.000.000	100,00	0	Berupa Penyertaan Modal Daerah
c	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan (Revitalisasi Taman Ismail Marzuki/TIM) (PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	1.243.121.000.000	1.243.121.000.000	1.243.121.000.000	100,00	0	Berupa Penyertaan Modal Daerah
	Jumlah	4.075.000.000.000	4.074.967.079.587	4.074.482.351.922	99,99	484.727.665	

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa per 31 Desember 2022 masih terdapat saldo (sisa) dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 pada RKUD Dana Pinjaman PEN sebesar Rp484.727.665,00.

Bahwa atas saldo (sisa) dana Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN Tahun 2021 sebesar Rp484.727.665,00 telah dilakukan pengembalian kepada PT SMI (Persero) tanggal 19 Desember 2023 dengan Nomor SP2D 1 038823/SP2D/XII/2023 yang diperlakukan sebagai pembayaran pokok pinjaman dipercepat sesuai Pasal 11 Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 24 Tanggal 24 September 2020 beserta perubahannya.

5.5.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp698.072.284.621.375,00 dan Rp665.549.886.851.294,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.4.

5.6 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2023.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan



sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2023, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp67.759.383.857.593,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp57.127.148.778.536,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.632.235.079.057,00.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Dana Bagi Hasil, Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Dana Insentif Fiskal, dan Penerimaan Hibah. (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, Pembayaran Bunga, Pembayaran Subsidi, Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Bantuan Keuangan, dan Pembayaran Tak Terduga. Secara rinci nilai Arus Kas Dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.65
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
1	ARUS KAS MASUK:		
A.	Penerimaan Pajak Daerah	43.516.481.672.833	40.275.148.196.210
B.	Penerimaan Retribusi Daerah	454.697.560.911	376.977.989.704
C.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	545.869.249.987	402.424.109.447
D.	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	4.583.119.605.650	4.524.662.808.134
E.	Penerimaan Dana Bagi Hasil	16.304.845.339.366	16.062.089.109.337
F.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0	34.127.101.188
G.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2.266.110.564.782	1.978.740.030.341
H.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	22.179.718.000	0
I.	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0	29.684.233.000
J.	Penerimaan Dana Insentif Fiskal	35.175.027.000	0
K.	Penerimaan Hibah	30.905.119.064	168.308.655.464
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	67.759.383.857.593	63.852.162.232.825
2	ARUS KAS KELUAR:		
A.	Pembayaran Pegawai	17.977.776.327.870	17.705.440.378.717
B.	Pembayaran Barang	25.824.444.605.296	23.611.834.997.691
C.	Pembayaran Bunga	229.704.491.741	270.632.758.937
D.	Pembayaran Subsidi	5.539.653.281.534	6.278.332.984.915
E.	Pembayaran Hibah	2.835.482.114.927	1.883.108.905.652
F.	Pembayaran Bantuan Sosial	4.363.641.476.668	5.009.775.852.095
G.	Pembayaran Bantuan Keuangan	356.446.480.500	484.762.660.210
H.	Pembayaran Tak Terduga	0	29.976.747.630
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	57.127.148.778.536	55.273.865.285.847
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (I-II)	10.632.235.079.057	8.578.296.946.978



5.6.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

5.6.1.1.a Penerimaan Pajak Daerah

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp43.516.481.672.833,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.241.333.476.623,00 atau 8,05% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp40.275.148.196.210,00. Rincian penerimaan Pajak Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.1.

5.6.1.1.b Penerimaan Retribusi Daerah

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp454.697.560.911,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp77.719.571.207,00 atau 20,62% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp376.977.989.704,00. Rincian penerimaan Retribusi Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.2.

5.6.1.1.c Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp545.869.249.987,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp143.445.140.540,00 atau 35,65% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp402.424.109.447,00. Rincian penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.3.

5.6.1.1.d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp4.583.119.605.650,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp58.456.797.516,00 atau 1,29% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp4.524.662.808.134,00.

5.6.1.1.e Penerimaan Dana Bagi Hasil

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp16.304.845.339.366,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp242.756.230.029,00 atau 1,51% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp16.062.089.109.337,00.

5.6.1.1.f Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus Fisik tercatat sebesar Rp3.076.020.400,00. Arus kas masuk tersebut



mengalami penurunan sebesar Rp31.051.080.788,00 atau 90,99% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Alokasi Khusus Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp34.127.101.188,00.

5.6.1.1.g Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.263.034.544.382,00, nilai tersebut tidak termasuk DAK Non Fisik berupa Dana BOS sebesar Rp1.087.774.191.925,00 yang tidak melalui kas daerah. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp284.294.514.041,00 atau 14,37% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp1.978.740.030.341,00.

5.6.1.1.h Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp22.179.718.000,00. Arus kas masuk tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp22.179.718.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp0,00.

5.6.1.1.i Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tidak tercatat Arus kas masuk dari Dana Insentif Daerah. Arus kas masuk tersebut penurunan sebesar Rp29.684.233.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Insentif Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp29.684.233.000,00.

5.6.1.1.j Penerimaan Dana Insentif Fiskal

Arus kas masuk dari Dana Insentif Fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp35.175.027.000,00. Arus kas masuk tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp35.175.027.000,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan Arus kas masuk Dana Insentif Fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp0,00.

5.6.1.1.k Penerimaan Hibah

Arus kas masuk dari Penerimaan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp30.905.119.064,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp137.403.536.400,00 atau 81,64% jika dibandingkan dengan Penerimaan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp168.308.655.464,00.



5.6.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

5.6.1.2.a Pembayaran Pegawai

Pembayaran Pegawai menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2023.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp17.977.776.327.870,00. Arus kas keluar tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp272.335.949.153,00 atau 1,54% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp17.705.440.378.717,00.

5.6.1.2.b Pembayaran Barang

Pembayaran Barang adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Barang pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp25.824.444.605.296,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.212.609.607.605,00 atau 9,37% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Barang pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp23.611.834.997.691,00.

5.6.1.2.c Pembayaran Bunga

Pembayaran Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang pinjaman. Arus kas keluar untuk Pembayaran Bunga pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp229.704.491.741,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.c. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp40.928.267.196,00 atau 15,12% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Bunga pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp270.632.758.937,00.

5.6.1.2.d Pembayaran Subsidi

Pembayaran Subsidi merupakan pembayaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Arus kas keluar untuk Pembayaran Subsidi pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp5.539.653.281.534,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.d. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp738.679.703.381,00 atau 11,77% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Subsidi pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp6.278.332.984.915,00.



5.6.1.2.e Pembayaran Hibah

Pembayaran Hibah merupakan jumlah yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Arus kas keluar untuk Pembayaran Hibah pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.835.482.114.927,00. Arus kas keluar tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp952.373.209.275,00 atau 50,57% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Hibah pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.883.108.905.652,00.

5.6.1.2.f Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2023. Arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan Sosial pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp4.363.641.476.668,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp646.134.375.427,00 atau 12,90% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan Sosial pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp5.009.775.852.095,00.

5.6.1.2.g Pembayaran Bantuan Keuangan

Pembayaran Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan keuangan atau sejenisnya. Arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan Keuangan pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp356.446.480.500,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.4. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp128.316.179.710,00 atau 26,47% jika dibandingkan dengan arus kas keluar untuk Pembayaran Bantuan keuangan pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp484.762.660.210,00.

5.6.1.2.h Pembayaran Tak Terduga

Pembayaran Tak Terduga pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 atau tidak terdapat realisasi atas pembayaran belanja tak terduga. Pembayaran Tak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp29.976.747.630,00 atau 100% jika dibandingkan dengan Pembayaran Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp29.976.747.630,00.

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.



Arus Kas Dari Aktivitas Investasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang, Penjualan Aset Tetap, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (2) Arus Kas Keluar: Perolehan Aset Tetap dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.66
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk:		
A.	Pelepasan Hak Atas Tanah <i>Brandgang</i>	3.145.400.000	12.033.389.424
B.	Penjualan Aset Tetap:	3.722.940.118	17.172.952.663
	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	1.435.586.998	6.637.610.808
	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	2.287.353.120	10.535.341.855
C.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	190.589.666	393.892.140
	Jumlah Arus Kas Masuk (I)	7.058.929.784	29.600.234.227
2	Arus Kas Keluar:		
A.	Perolehan Aset Tetap:	8.857.260.068.298	8.804.537.104.938
	Perolehan Tanah	442.600.308.470	880.953.900.338
	Perolehan Peralatan dan Mesin	2.822.976.130.249	1.796.060.808.255
	Perolehan Gedung dan Bangunan	1.653.055.663.410	1.733.311.157.080
	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.799.027.573.476	4.264.727.292.528
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	139.600.392.693	129.483.946.737
B.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.814.870.975.375	822.570.000.000
	Jumlah Arus Kas Keluar (II)	11.672.131.043.673	9.627.107.104.938
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi (I-II)	(11.665.072.113.889)	(9.597.506.870.711)

5.6.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga dan adanya Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen, serta Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

5.6.2.1.a Pelepasan Hak atas Tanah *Brandgang*

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 terdapat arus kas masuk dari pelepasan hak atas tanah *brandgang* sebesar Rp3.145.400.000,00 pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Arus kas masuk ini mengalami penurunan sebesar Rp8.887.989.424,00 atau 73,86% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari pelepasan hak atas tanah *brandgang* untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp12.033.389.424,00.



5.6.2.1.b Penjualan Aset Tetap

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas masuk dari penjualan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp3.722.940.118,00. Arus kas masuk ini mengalami penurunan sebesar Rp13.450.012.545,00 atau 78,32% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari penjualan Aset Tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp17.172.952.663,00.

5.6.2.1.c Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Kembali Penerimaan Investasi Non Permanen sebesar Rp190.589.666,00. Arus kas masuk ini mengalami penurunan sebesar Rp203.302.474,00 atau 51,61% dibandingkan dengan arus kas masuk dari penerimaan kembali Investasi Non Permanen untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp393.892.140,00.

5.6.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar berasal dari Perolehan Aset Tetap dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

5.6.2.2.a Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat menambah Aset Tetap dan akan menambah Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh Aset Tetap yang mengakibatkan adanya arus kas keluar sebesar Rp8.857.260.068.298,00. Arus kas atas perolehan Aset Tetap pemerintah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp52.722.963.360,00 atau 0,60% dibandingkan dengan perolehan Aset Tetap pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp8.804.537.104.938,00.

5.6.2.2.b Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemda pada BUMD. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Jaya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, dan Perumda PAL Jaya sebesar Rp822.570.000.000,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.814.870.975.375,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai	
1)	Perumda Air Minum Jaya	Rp	135.000.000.000
2)	Perumda Dharma Jaya	Rp	250.000.000.000



No	Uraian	Nilai	
3)	PT Jakarta Propertindo	Rp	2.416.000.000.000
4)	PT Jakarta Tourisindo	Rp	13.870.975.375
	Jumlah	Rp	2.814.870.975.375

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang. Rincian Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.67

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk:		
	Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0	957.790.671.029
	Jumlah Arus Kas Masuk (I)	0	957.790.671.029
2	Arus Kas Keluar:		
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	1.057.547.795.088	1.034.559.064.648
	Jumlah Arus Kas Keluar (II)	1.057.547.795.088	1.034.559.064.648
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan (I-II)	(1.057.547.795.088)	(76.768.393.619)

5.6.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat. Sementara itu arus kas masuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp957.790.671.029,00 yang merupakan penerimaan pinjaman dari Pemerintah Pusat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

5.6.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tercatat Arus kas keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sebesar Rp1.057.547.795.088,00. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat. Sementara itu Pembayaran Utang Pokok Pinjaman untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.034.559.064.648,00.



5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening umum Negara/daerah.

Tabel 5.68
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	2	3	4
1	Arus Kas Masuk:		
a.	Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga	0	10.000.000
b.	Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	1	72.063.772
c.	Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama	1.684.920.147	252.244.000
d.	Penerimaan Deposit Pasien – BLUD	6.759.297.420	9.700.878.680
e.	Penerimaan Deposit Jasa BLUD	1.487.097.500	15.100.000
f.	Penerimaan Uang Titipan	1.701.917.859	1.062.940.346
g.	Penerimaan Kas Lainnya	13.543.921.396	7.065.436.000
h.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.778.990.123.701	3.750.728.015.790
	Jumlah Arus Kas Masuk (I)	3.804.167.278.024	3.768.906.678.588
2	Arus Kas Keluar:		
a.	Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama	448.402.500	197.500.000
b.	Pengembalian Uang Titipan BLUD	1.743.395.823	3.573.974.766
c.	Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	22.001.380	2
d.	Pengeluaran Deposit Pasien - BLUD	6.978.631.689	9.559.168.149
e.	Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD	1.412.672.500	13.700.000
f.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.779.641.645.864	3.753.333.948.054
	Jumlah Arus Kas Keluar (II)	3.790.246.749.756	3.766.678.290.971
	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (I-II)	13.920.528.268	2.228.387.617

5.6.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

5.6.4.1.a Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 tidak terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga, sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris atas Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga sebesar Rp10.000.000,00.



- 5.6.4.1.b Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Pembayaran Pihak Ketiga**
Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat penerimaan kas atas Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Pembayaran Pihak Ketiga sebesar Rp1,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat penerimaan kas atas aktivitas arus kas masuk tersebut sebesar Rp72.063.772,00.
- 5.6.4.1.c Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama**
Selama tahun 2023 terdapat arus kas masuk dari aktivitas transitoris sebesar Rp1.684.920.147,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat arus kas masuk dari reklasifikasi ke uang jaminan kerjasama sebesar Rp252.244.000,00.
- 5.6.4.1.d Penerimaan Deposit Pasien – BLUD**
Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Pasien – BLUD sebesar Rp6.759.297.420,00 yang merupakan penerimaan uang muka pasien selama tahun 2022, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 arus kas masuk Penerimaan Deposit Pasien – BLUD adalah sebesar Rp9.700.878.680,00.
- 5.6.4.1.e Penerimaan Deposit Jasa – BLUD**
Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Jasa BLUD sebesar Rp1.487.097.500,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Jasa BLUD adalah sebesar Rp15.100.000,00.
- 5.6.4.1.f Penerimaan Uang Titipan**
Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Titipan sebesar Rp1.701.917.859,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 arus kas masuk dari Penerimaan Uang Titipan adalah sebesar Rp1.062.940.346,00.
- 5.6.4.1.g Penerimaan Kas Lainnya**
Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat Arus Kas Masuk atas Penerimaan Kas Lainnya sebesar Rp13.543.921.396,00 yaitu merupakan kas yang akan dikembalikan ke Kas Daerah. Sementara itu, pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat arus kas masuk dari Penerimaan Kas Lainnya sebesar Rp7.065.436.000,00.
- 5.6.4.1.h Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp3.778.990.123.701,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan potongan pajak dan potongan-potongan lain. Sementara itu,



Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp3.750.728.015.790,00.

Tabel 5.69

Penerimaan Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Kas Di Kas Daerah - Potongan PFK	Kas Di Bendahara Penerimaan – Asuransi yang Belum Disetor	Kas Di Bendahara Pengeluaran - Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan yang Belum Disetor	Kas BLUD - Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7
	Penerimaan PFK						
1	PPh Pasal 21	1.441.014.569.125	0	14.209.517.853	953.491.630	82.192.252.578	1.538.369.831.186
2	PPh Pasal 22	55.229.945.422	0	6.254.250.690	0	21.753.277.061	83.237.473.173
3	PPh Pasal 23	34.254.689.947	0	8.749.675.534	397.841.357	7.399.661.885	50.801.868.723
4	PPh Pasal 4 (2)	125.233.038.491	0	201.978.016	1.654.600	2.360.193.875	127.796.864.982
5	PPN	1.133.221.698.618	0	16.076.134.784	13.099.439.829	204.243.649.946	1.366.640.923.177
6	PPh Pasal 15	0	0	2.232.643	0	0	2.232.643
7	BPJS Kesehatan	387.242.942.280	0	0	0	7.028.457.632	394.271.399.912,00
8	BPJS Ketenagakerjaan	557.028	0	0	0	5.976.679.176	5.977.236.204,00
9	Dana Pensiun	117.596.835.396	0	0	0	0	117.596.835.396,00
10	Tabungan Hari Tua	93.656.223.369	0	0	0	0	93.656.223.369,00
11	Taperum	188.310.948	0	0	0	0	188.310.948,00
12	Pot Non Pajak Lainnya	0	0	0	0	450.923.988	450.923.988,00
	Jumlah	3.387.638.810.624	0	45.493.789.520	14.452.427.416	331.405.096.141	3.778.990.123.701

5.6.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

5.6.4.2.a Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas keluar untuk Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama sebesar Rp448.402.500,00. Sementara itu pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat arus kas keluar untuk Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama sebesar Rp197.500.000,00.

5.6.4.2.b Pengembalian Uang Titipan BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas keluar untuk Pengembalian Uang Titipan BLUD sebesar Rp1.743.395.823,00 sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat arus kas keluar untuk aktivitas tersebut sebesar Rp3.573.974.766,00.

5.6.4.2.c Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 arus kas keluar atas Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga sebesar



Rp22.001.380,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat arus kas keluar atas Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga adalah sebesar Rp2,00.

5.6.4.2.d Pengeluaran Deposit Pasien – BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas keluar atas Pengeluaran Deposit Pasien BLUD sebesar Rp6.978.631.689,00 yang merupakan pengembalian uang muka pasien yang telah diterima selama tahun 2023, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat Pengembalian Deposit Pasien – BLUD sebesar Rp9.559.168.149,00.

5.6.4.2.e Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdapat arus kas keluar dari Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp1.412.672.500,00. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 terdapat arus kas keluar dari Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD sebesar Rp13.700.000,00.

5.6.4.2.f Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp3.779.641.645.864,00. Nilai tersebut merupakan pengeluaran atas potongan pajak dan potongan-potongan lain. Sedangkan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp3.753.333.948.054,00. Rincian Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5.70

Pengeluaran Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Kas Di Kas Daerah - Potongan PFK	Kas Di Bendahara Pengeluaran - Potongan PFK Di SKPD Yang Belum Disetor	Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan Yang Belum Disetor	Kas BLUD - Potongan PFK Di BLUD Yang Belum Disetor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
	Penyetoran PFK					
1	PPh Pasal 21	1.441.014.569.125	14.360.912.197	950.752.486	82.189.671.604	1.538.515.905.412
2	PPh Pasal 22	55.229.945.422	6.255.638.241	0	21.754.146.745	83.239.730.408
3	PPh Pasal 23	34.254.689.947	8.831.753.542	403.299.360	7.389.495.869	50.879.238.718
4	PPh Pasal 4 (2)	125.233.038.491	202.949.210	10.221.998	2.360.193.875	127.806.403.574
5	PPN	1.133.221.698.618	16.231.980.737	13.291.555.209	204.249.168.475	1.366.994.403.039
6	PPh Pasal 15	0	2.232.643	0	0	2.232.643
7	BPJS Kesehatan	387.242.942.280	0	0	7.011.302.231	394.254.244.511
8	BPJS Ketenagakerjaan	557.028	0	0	6.055.480.830	6.056.037.858
9	Dana Pensiun	117.596.835.396	0	0	0	117.596.835.396



No.	Uraian	Kas Di Kas Daerah - Potongan PFK	Kas Di Bendahara Pengeluaran - Potongan PFK Di SKPD Yang Belum Disetor	Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD - Potongan PFK Dana BOS dan BOP Kesetaraan Yang Belum Disetor	Kas BLUD - Potongan PFK Di BLUD Yang Belum Disetor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
10	Tabungan Hari Tua	93.656.223.369	0	0	0	93.656.223.369
11	Taperum	188.310.948	0	0	0	188.310.948
12	Pot Non Pajak Lainnya	0	0	0	450.923.988	450.923.988
	Jumlah	3.387.638.810.624	45.885.466.570	14.655.829.053	331.460.383.617	3.779.640.489.864

5.6.5 Kenaikan (Penurunan) Kas

Berdasarkan perhitungan arus kas bersih pada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris, selisih kurs dan koreksi, maka terdapat penurunan kas bersih sebesar Rp2.076.464.301.652,00 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023. Saldo awal kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD tahun 2023 adalah sebesar Rp8.638.651.267.637,00 dan saldo akhir kas di akhir kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD, dan Kas Lainnya sebesar Rp6.562.186.965.985,00.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN



BAB VI

CATATAN PENTING LAINNYA

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas yaitu dengan Laut Jawa di sebelah utara, dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten di sebelah barat, dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan, serta dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat di sebelah timur. Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administratif yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah otonomi yang diletakkan pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah sebesar 7.660 km², dengan luas daratan termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu sebesar 662 km² serta luas lautan sebesar 6.998 km². DKI Jakarta terletak pada posisi 50 19' 12" Lintang Selatan - 60 23' 54" Lintang Selatan dan 1060 22' 42" Bujur Timur - 1060 58' 18" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata $\pm$ 7 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki kewenangan khusus di bidang keuangan daerah, di antaranya terkait dengan kewenangan atas sumber dan tarif pendapatan tertentu, penerusan pinjaman dari lembaga asing, dan pengaturan kekhususan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan susunan organisasi perangkat daerah. Selain itu pada aspek pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan pengaturan kekhususan yang mendukung pencapaian Kota Global, di antaranya terkait dengan pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan investasi dan pengusulan



pemanfaatan barang milik negara yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, yang telah diundangkan pada tanggal 10 Juni 2022 dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51013, yang bertujuan sebagai berikut:

- a. menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan periode tahun 2023-2026 lingkup Perangkat Daerah;
- b. menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di mana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
- c. mewujudkan implementasi kebijakan daerah dan nasional terkait penanganan dan pemulihan akibat pandemi COVID-19 di berbagai bidang pembangunan.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yaitu:

a. Visi

Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 adalah “Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”.

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
- 2) Jakarta yang aman bermakna terciptanya kehidupan yang tertib, tenteram, damai dan mampu mengatasi ancaman bencana alam, cuaca ekstrem dan perubahan iklim.



- 3) Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya ruang kehidupan yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia.
- 4) Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik di mana masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, damai dan memiliki keseimbangan lahir dan batin.
- 5) Jakarta yang produktif bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan memberikan hasil dan manfaat serta nilai tambah yang secara ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota.
- 6) Jakarta yang berkelanjutan bermakna terwujudnya proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keutuhan, kelestarian, keasrian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan kehidupan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- 7) Jakarta yang berdaya saing global bermakna terbangunnya kemampuan dan kapasitas daerah yang mampu bersaing dalam peningkatan standar kehidupan warganya, pengembangan aktivitas ekonomi dan penyediaan pelayanan yang luas dan berkualitas.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
- 2) Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang andal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera.
- 4) Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.
- 5) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



- 6) Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.
- c. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
- Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagia dengan dilandasi semangat gotong-royong. Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu:
- 1) keadilan dan keberpihakan;
 - 2) orientasi pada warga dan ruang interaksi;
 - 3) birokrasi efektif dan penguatan tata kelola.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 digambarkan dengan tahapan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dituangkan melalui kebijakan yaitu:

a. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Program Pembangunan Daerah. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan 23 Janji Kerja, Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta, Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam lima bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari dan Simpul Kemajuan.

b. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kriteria umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu menjadi perhatian antara lain:

- 1) pemahaman standar pelayanan publik minimal di daerah;
- 2) peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah;
- 3) keseimbangan anggaran, terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;



- 4) netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
- 5) peningkatan akuntabilitas dan transparansi masyarakat.

Dari kriteria umum tersebut, ditetapkan mengenai kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelompokan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah
- b) Dana Perimbangan, terdiri dari:
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi:

- a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
- b) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;
- c) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi:

- a) Belanja Daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari; Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah Dan Bantuan Sosial), Belanja Modal, Belanja Tak Terduga Dan Belanja Transfer;
- b) klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari; urusan wajib dan urusan pilihan;
- c) klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Arah kebijakan belanja daerah antara lain:

- a) menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah;
- b) menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi;



- c) melakukan efisiensi belanja;
- d) belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*),
- e) memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD;
- f) meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan dan UPT;
- g) meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

2) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

6.3 Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk mempercepat penanganan pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 pasal 15, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah untuk melaksanakan Program PEN dalam bentuk Pemberian Pinjaman kepada BUMN, Pemberian Pinjaman kepada Lembaga, dan/atau Pinjaman PEN Daerah.

Realisasi Pinjaman PEN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 – 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.1
Realisasi Pinjaman PEN Tahun 2020 – 2022

(dalam rupiah)

Uraian	SKPD/UKPD Pengguna	Nilai Pinjaman	Penggunaan Dana PEN				Pengembalian
			TA 2020	TA 2021	TA 2022	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6	8 = 3 - 7
PINJAMAN PEN DAERAH							
Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir	Dinas Sumber Daya Air	3.465.558.808.704	421.127.354.911	1.572.528.175.155	1.083.298.274.773	3.076.953.804.839	388.605.003.865
Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Pelayanan Air Minum	Dinas Sumber Daya Air	69.105.119.617	11.938.335.091	37.854.104.382	0	49.792.439.473	19.312.680.144
Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah	Unit Pengelola Sampah Terpadu	85.001.410.016	85.001.410.016	0	0	85.001.410.016	0
Peningkatan Infrastruktur Transportasi	Dinas Bina Marga	536.326.133.519	442.248.276.770	47.881.945.368	15.103.001.478	505.233.223.616	31.092.909.903
Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir- Pengendalian	UP Jakarta Smart City (Dinas Komunikasi,	86.295.605.056	0	85.652.860.380	0	85.652.860.380	642.744.676



Uraian	SKPD/UKPD Pengguna	Nilai Pinjaman	Penggunaan Dana PEN				Pengembalian
			TA 2020	TA 2021	TA 2022	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6	8 = 3 - 7
Banjir Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Informatika dan Statistik)						
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas (Transformasi Digital)	UP Jakarta Smart City (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)	232.432.076.920	0	232.432.076.920	0	232.432.076.920	0
Jumlah Pinjaman PEN Daerah (I)		4.474.719.153.832	960.315.376.788	1.976.349.162.205	1.098.401.276.251	4.035.065.815.244	439.653.338.588
PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PEN							
Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	371.846.079.587	0	105.084.302.456	266.277.049.466	371.361.351.922	484.727.665
Peningkatan Infrastruktur Pariwisata, Kebudayaan (Revitalisasi Taman Ismail Marzuki/TIM)	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PMD kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	1.443.121.000.000	200.000.000.000	1.243.121.000.000	0	1.443.121.000.000	0
Peningkatan Infrastruktur Olahraga Proyek Jakarta International Stadium	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PMD kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda))	3.642.000.000.000	1.182.000.000.000	2.460.000.000.000	0	3.642.000.000.000	0
Jumlah Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN (II)		5.456.967.079.587	1.382.000.000.000	3.808.205.302.456	266.277.049.466	5.456.482.351.922	484.727.665
Jumlah Pendanaan PEN (I + II)		9.931.686.233.419	2.342.315.376.788	5.784.554.464.661	1.364.678.325.717	9.491.548.167.166	440.138.066.253

Sisa pinjaman PEN per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.161.715.379.237,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nilai Penarikan Pinjaman	Nilai Pinjaman (Rp)	Pembayaran (Rp)	Sisa Pinjaman (Rp)
1	2	3	4	5
1	PEN Tahun 2020	2.664.083.583.739	712.154.134.313	1.951.929.449.426
2	PEN Tahun 2021	3.192.635.570.093	472.622.445.581	2.720.013.124.512
3	Dukungan PEN Tahun 2021	4.074.967.079.587	1.585.194.274.288	2.489.772.805.299
	Total	9.931.686.233.419	2.769.970.854.182	7.161.715.379.237



6.4 Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 103 BLUD yang berasal dari 11 SKPD Penggabung, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.2

Daftar Badan Layanan Umum Daerah dan SKPD Penggabungannya Tahun 2023

No.	Nama SKPD Penggabung	Nama OPD	
1	2	3	
1	Dinas Pendidikan	1	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 13 Jakarta
		2	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 20 Jakarta
		3	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 24 Jakarta
		4	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 26 Jakarta
		5	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta
		6	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 32 Jakarta
		7	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 33 Jakarta
		8	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36 Jakarta
		9	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 37 Jakarta
		10	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 51 Jakarta
		11	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta
		12	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 63 Jakarta
2	Dinas Kesehatan	13	Laboratorium Kesehatan Daerah
		14	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung - Jaktim
		15	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus
		16	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cengkareng - Jakbar
		17	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilandak - Jaksel
		18	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing - Jakut
		19	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung - Jaktim
		20	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas - Jaktim
		21	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
		22	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Gambir - Jakpus
		23	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar
		24	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa - Jaksel
		25	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara - Jaktim
		26	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru - Jakpus
		27	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres - Jakbar
		28	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel
		29	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama - Jaksel
		30	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar
		31	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kelapa Gading - Jakut
		32	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemayoran - Jakpus
		33	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kembangan - Jakbar
		34	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu
		35	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Utara - Kep. Seribu



No.	Nama SKPD Penggabung	Nama OPD	
1	2	3	
		36	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Koja - Jakut
		37	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati - Jaktim
		38	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makasar - Jaktim
		39	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel
		40	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman - Jaktim
		41	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menteng - Jakpus
		42	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pademangan - Jakut
		43	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pal Merah - Jakbar
		44	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran - Jaksel
		45	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel
		46	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim
		47	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Penjaringan - Jakut
		48	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel
		49	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pulo Gadung - Jaktim
		50	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sawah Besar - Jakpus
		51	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Senen - Jakpus
		52	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Setiabudi - Jaksel
		53	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari - Jakbar
		54	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora - Jakbar
		55	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanah Abang - Jakpus
		56	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok - Jakut
		57	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet - Jaksel
		58	Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah
		59	Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah
		60	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai
		61	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit
		62	Rumah Sakit Umum Adhyaksa
		63	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih
		64	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih
		65	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng
		66	Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing
		67	Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung
		68	Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas
		69	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa
		70	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang
		71	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru
		72	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres
		73	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru
		74	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama
		75	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran
		76	Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan
		77	Rumah Sakit Umum Daerah Koja
		78	Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati
		79	Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan



No.	Nama SKPD Penggabung	Nama OPD	
1	2	3	
		80	Rumah Sakit Umum Daerah Matraman
		81	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan
		82	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu
		83	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo
		84	Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan
		85	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar
		86	Rumah Sakit Umum Daerah Tamansari
		87	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang
		88	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok
		89	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan
		90	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet
		91	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koj
		92	Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	93	Unit Pengelola Dana Perumahan
4	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	94	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan
5	Dinas Lingkungan Hidup	95	Unit Pengelola Sampah Terpadu
6	Dinas Perhubungan	96	Unit Pengelola Perparkiran
		97	Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik
		98	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	99	Unit Pengelola Jakarta Smart City
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung
9	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	101	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
10	Badan Pengelolaan Aset Daerah	102	Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	103	Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Pada komponen Laporan Operasional BLUD Tahun 2023, total pendapatan BLUD Tahun 2023 sebesar Rp6.278.615.635.226,00 yang terdiri dari Pendapatan Dana BLUD sebesar Rp3.364.057.531.112,00 dan Pendapatan Alokasi APBD sebesar Rp2.914.558.104.114,00. Beban BLUD Tahun 2023 sebesar Rp7.296.160.884.595,00, sehingga total keseluruhan BLUD terdapat defisit sebesar Rp1.017.545.249.369,00. Pada komponen Neraca BLUD Tahun 2023, total Aset BLUD Tahun 2023 sebesar Rp15.161.180.156.170,00, total Kewajiban BLUD sebesar Rp228.666.683.705,00, dan total Ekuitas sebesar Rp14.932.513.472.465,00. Rincian kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah tahun 2023 disajikan pada lampiran 18 dan lampiran 19.

6.5 Pengalihan Rumah Sakit Umum Adhyaksa ke Kejaksaan Agung RI

Pada tahun 2014, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Perjanjian Pinjam Pakai dengan Kejaksaan Republik Indonesia untuk pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan,



dan prasarana Lainnya pada Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor B-252/C/Chk/09/2014 dan Nomor 51 Tahun 2014. Perjanjian tersebut kemudian diadendum dengan:

- a. Perjanjian Pinjam Pakai Nomor B-88/C/03/2017 dan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pinjam Pakai Untuk Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, Bangunan, dan Prasarana Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa;
- b. Perjanjian Pinjam Pakai Nomor B-330/C/09/2019 dan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pinjam Pakai Barang Milik Negara berupa Tanah, Bangunan dan Prasarana Lainnya pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa; dan
- c. Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 85/C/Chk.2/01/2023 dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pinjam Pakai Pinjam Pakai Barang Milik Negara berupa Tanah, Bangunan dan Prasarana Lainnya pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa.

Berdasarkan perjanjian pinjam pakai tersebut, Kejaksaan RI menyerahkan penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan, sarana dan prasarana pada RSU Sakit Umum Adhyaksa kepada Pemprov DKI untuk dikelola selama masa perjanjian.

Selain perjanjian pinjam pakai Barang Milik Negara, Pemprov DKI dan Kejaksaan RI juga melakukan kesepakatan bersama menyatakan bahwa pada saat perjanjian telah berakhir, Pemprov DKI akan menyerahkan kembali pengelolaan RSU Adhyaksa kepada Kejaksaan RI, termasuk keuangan, hutang, dan piutang. Selain itu, seluruh aset yang didanai oleh Pemprov DKI selama masa pengelolaan RSU Adhyaksa akan dihibahkan kepada Kejaksaan RI.

Kesepakatan Bersama tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor B-89/C/03/2017 dan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyerahan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa, yang kemudian diadendum dengan:

- a. Kesepakatan Bersama Nomor B-331/C/09/2019 dan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penyerahan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa; dan
- b. Kesepakatan Bersama Nomor 86/C/Chk.02/01/2023 dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyerahan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Adhyaksa.

Oleh sebab itu, maka pada tanggal 2 Januari 2024, di mana masa perjanjian antara Pemprov DKI dan Kejaksaan RI telah berakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan serah terima kepada Kejaksaan RI berupa:

- a. Barang Milik Negara berupa tanah, bangunan dan prasarana Lainnya pada RSU Adhyaksa yang diperoleh melalui perjanjian pinjam pakai; dan
- b. seluruh aset dan kewajiban berupa kas, piutang, persediaan, Aset Tetap, dan utang yang diperoleh selama masa pengelolaan RSU Adhyaksa.

Serah terima aset dan kewajiban RSU Adhyaksa dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan Operasional Barang Milik Daerah dan Penyerahan Aset serta Kewajiban pada Neraca Rumah Sakit Umum Adhyaksa dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kejaksaan



Republik Indonesia Nomor 3/TG.02 dan Nomor B-02/C.3/Cum.4/01/2024 pada tanggal 2 Januari 2024.

6.6 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sedangkan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tahun 2023 dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

a. Dasar Hukum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dasar hukum pelaksanaan Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.



b. Tugas Pembantuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 21 ayat (2) bahwa penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada APBN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk Tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta menerima tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pagu awal anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp2.621.854.000,00 kemudian terdapat revisi anggaran menjadi sebesar Rp2.701.004.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.631.880.121,00 atau 87,44%. Adapun instansi penerima TP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.3
Daftar Tugas Pembantuan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	DKPKP	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	85.000.000	84.196.947	99,06%
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	501.550.000	497.975.508	99,29%
			Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	428.556.000	421.742.724	98,41%
			Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	452.500.000	446.077.820	98,58%
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	163.398.000	157.314.054	96,28%
Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan				1.631.004.000	1.607.307.053	98,55%
Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia				1.631.004.000	1.607.307.053	98,55%
2	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disparekraf	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	80.000.000	79.371.850	99,21%
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80.000.000	76.364.396	95,46%
			Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	300.000.000	291.749.700	97,25%
			Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	500.000.000	469.916.286	93,98%



No.	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	110.000.000	107.170.836	97,43%
Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1.070.000.000	1.024.573.068	95,75%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1.070.000.000	1.024.573.068	95,75%
TOTAL DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI DKI JAKARTA				2.701.004.000	2.631.880.121	97,44%

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

c. Dekonsentrasi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dibebankan pada APBN melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk Tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta menerima dana dekonsentrasi dengan pagu anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp23.411.334.000,00 kemudian terdapat revisi anggaran menjadi sebesar Rp21.856.011.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp20.280.336.877,00 atau 92,79 %. Adapun instansi penerima dana dekonsentrasi secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.4
Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta
Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kementerian Dalam Negeri RI	Biro Pemerintahan	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	229.146.000	228.869.002	99,88%
	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan					
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan				229.146.000	228.869.002	99,88%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri				229.146.000	228.869.002	99,88%
2	Kementerian Kesehatan RI	Dinas Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat di Provinsi	3.433.735.000	2.699.162.000	78,61%
	Sekretariat Jenderal		Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi	1.449.688.000	1.322.546.595	91,23%



No.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Peningkatan Kualitas Kesehatan SDM di Provinsi	487.968.000	447.883.500	91,79%
			Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi	1.148.603.000	1.047.605.800	91,21%
			Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	1.632.682.000	1.517.478.500	92,94%
			Pengelolaan Krisis Kesehatan	105.410.000	103.810.000	98,48%
			Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	258.580.000	228.112.810	88,22%
			Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	281.850.000	268.928.000	95,42%
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	260.504.000	257.554.600	98,87%
Anggaran Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan				9.059.020.000	7.893.081.805	87,13%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia				9.059.020.000	7.893.081.805	87,13%
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Sekretariat Jenderal	DKPKP	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	158.988.000	145.559.000	91,55%
			Pengelolaan Data dan Informasi	22.711.000	15.895.000	69,99%
Anggaran Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan				181.699.000	161.454.000	88,86%
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	DKPKP	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	30.354.000	29.420.000	96,92%
	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	0	0	0,00%
	SP DIPA - 032.03.3.019020/2023		Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	18.121.000	13.349.000	73,67%
			Pengelolaan Sumber Daya Ikan	6.177.000	0	0,00%
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	125.411.000	122.614.540	97,77%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap				180.063.000	165.383.540	91,85%
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	DKPKP	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	36.050.000	36.050.000	100,00%
	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya		Pengelolaan Produksi dan Usaha	58.000.000	57.656.000	99,41%



No.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pembudidayaan Ikan			
	SP DIPA - 032.04.3.019022/2023		Dukungan Manajemen Internal Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya	143.455.000	141.373.655	98,55%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya				237.505.000	235.079.655	98,98%
6	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	DKPKP	Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	Rp61.850.000	61.689.250	99,74%
	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan PSDKP	Rp56.252.000	52.406.728	93,16%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Dayaa Kelautan dan Perikanan				Rp118.102.000	114.095.978	96,61%
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	DKPKP	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	0	0	0,00%
	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan		Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	0	0	0,00%
			Logistik Perikanan Hasil Kelautan	0	0	0,00%
			Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	0	0	0,00%
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP	177.920.000	177.233.219	99,61%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				177.920.000	177.233.219	99,61%
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	DKPKP	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	0	0	0,00%
	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut		Perencanaan Ruang Laut	172.500.000	170.688.000	98,95%
			Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	45.000,000	44.214.242	98,25%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Ruang Laut				217.500.000	214.902.242	98,81%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia				1.112.789.000	1.068.148.634	95,99%
	Kementerian Pertanian RI	DKPKP	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	78.168.000	78.168.000	100,00%



No.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Direktorat Jenderal Hortikultura		Perlindungan Hortikultura	110.000.000	109.390.060	99,45%
			Perbenihan Hortikultura	360.750.000	356.982.599	98,96%
			Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	386.000.000	384.348.664	99,57%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Hortikultura				934.918.000	928.889.323	99,36%
10	Kementerian Pertanian RI	DKPKP	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	84.000.000	83.452.006	99,35%
	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan		Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	29.400.000	29.400.000	100,00%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan				113.400.000	112.852.066	99,52%
11	Kementerian Pertanian RI	DKPKP	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	570.352.000	562.579.797	98,64%
	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					
Anggaran Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian				570.352.000	562.579.797	98,64%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia				1.618.670.000	1.604.321.186	99,11%
12	Badan Pangan Nasional RI	DKPKP	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	934.634.000	894.331.340	95,69%
			Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	466.695.000	371.927.792	79,69%
			Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1.194.172.000	1.135.508.481	95,09%
			Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	50.000.000	49.560.846	99,12%
Anggaran Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional Republik Indonesia				2.645.501.000	2.451.328.459	92,66%
Total Anggaran Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional Republik Indonesia				2.645.501.000	2.451.328.459	92,66%
13	Kementerian Perindustrian RI	DPPKUKM	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	1.036.910.000	1.029.489.752	99,28%
	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka		Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan	69.840.000	69.840.000	100,00%



No.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka			
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka				1.106.750.000	1.099.329.752	99,33%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia				1.106.750.000	1.099.329.752	99,33%
14	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI	DPPKUKM	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	330.166.000	307.477.498	93,13%
Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia				330.166.000	307.477.498	93,13%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia				330.166.000	307.477.498	93,13%
15	Kementerian Perdagangan RI Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	DPPKUKM	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	317.242.000	317.114.000	99,96%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri				317.242.000	317.114.000	99,96%
16	Kementerian Perdagangan RI	DPPKUKM	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	86.684.000	82.805.630	95,53%
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri		73.720.000	73.533.484	99,75%	
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri				160.404.000	156.339.114	97,47%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia				477.646.000	473.453.114	99,12%
17	Kementerian Ketenagakerjaan RI	Disnakertransgi	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	565.775.000	561.948.700	99,32%
	Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan		189.630.000	185.190.000	97,66%	
	Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	95.520.000	95.461.000	99,94%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja				850.925.000	842.599.700	99,02%
18	Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Disnakertransgi	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas	195.400.000	195.100.000	99,85%



No.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	1.196.865.000	1.171.059.000	97,84%
			Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas	121.805.000	121.805.000	100,00%
			Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	188.790.000	164.071.801	86,91%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas				1.702.860.000	1.652.035.801	97,02%
19	Kementerian Ketenagakerjaan RI	Disnakertransgi	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	70.715.000	70.700.000	99,98%
	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja		Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja	144.000.000	129.681.500	90,06%
			Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	151.105.000	148.629.322	98,36%
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan						



No.	KEMENTERIAN / LEMBAGA	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Kegiatan	Revisi Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia				1.346.950.000	1.342.378.348	99,66%
22	Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia	DPMPTSP	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	369.667.000	339.478.000	91,83%
Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia				369.667.000	339.478.000	91,83%
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia				369.667.000	339.478.000	91,83%
23	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Dispusip	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	221.902.000	218.297.313	98,38%
Anggaran Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia						



No	BUMD	Dasar Aturan	Penugasan	Bentuk Dukungan Pendanaan dari Pemprov DKI
1	2	3	4	6
3	PD AM Jaya	Pergub 62 tahun 2019	Penugasan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan system penyediaan air minum dengan teknologi <i>Sea Water Reverse Osmosis</i> di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.	- Pengurangan biaya sewa pemanfaatan aset IPA SWRO - Pemberian subsidi air minum IPA SWRO
4	PT Transportasi Jakarta	Pergub 160 tahun 2016	Pelayanan Transjakarta gratis dan bus gratis bagi masyarakat.	Subsidi
		Pergub 62 tahun 2016	Kewajiban pelayanan publik dan pemberian subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta.	Subsidi
		Pergub 52 tahun 2022 (Perubahan Atas Pergub 20 tahun 2019)	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta untuk melaksanakan Pembangunan, revitalisasi, pengoperasian dan pemeliharaan halte dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka integrasi transportasi umum	Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk 4 Halte Revitalisasi: 1. Pulogadung 2. Kalideres 3. Kampung Melayu 4. Ragunan
		Kepgub 1326 tahun 2021	Penetapan Penambahan Halte terkait Penugasan	



No	BUMD	Dasar Aturan	Penugasan	Bentuk Dukungan Pendanaan dari Pemprov DKI
1	2	3	4	6
8	PT Jakarta Propertindo (Persero)	Pergub 14 tahun 2019	Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam pengembangan kawasan olahraga terpadu.	PMD
		Pergub 118 tahun 2019	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan infrastruktur.	Tidak ada
		Pergub 63 tahun 2019	Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) untuk revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.	PMD
		Pergub 33 tahun 2018	Penugasan lanjutan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan fasilitas pengolahan sampah di dalam kota/ <i>intermediate treatment facility</i> .	Direncanakan PMD
		Pergub 65 tahun 2019	Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam penyelenggaraan fasilitas pengolahan sampah antara di dalam kota.	Tidak ada
		Pergub 94 tahun 2019	Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah	



- b. Tujuan ketiga “Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian Kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia”;
- c. Sasaran Pertama “Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional”; dan
- d. Strategi pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan *E-Tourism*.

Dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, secara resmi pada Tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan kota-kota lainnya di dunia, untuk menjadi bagian dari kota penyelenggara Kegiatan balap mobil Formula E pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kejuaraan balap mobil Formula E adalah kejuaraan balap mobil internasional



- b. Indonesia, khususnya Jakarta, melalui keju



tersebut, PT Jakpro telah melakukan perjanjian kerjasama yang mengikat (*Binding Agreement*) dengan pihak FEO Ltd.

Proses penganggaran penyelenggaraan Formula E telah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:



- 2) pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperhatikan ketentuan Peraturan



Uraian	City Host Agreement (CHA) Sebelum Pandemi	City Host Agreement (CHA) Addendum No.3 (Renegosiasi) tanggal 27 September 2021																					
	2023: £26,6 juta 2024: £29,3 juta	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Tahun</th><th>Keterangan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2020</td><td>Batal (Pandemi COVID)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2021</td><td>Batal (Pandemi COVID)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2022</td><td>Telah dibayar di muka £ 7 juta</td></tr> <tr> <td>4</td><td>2023</td><td>Telah dibayar di muka £ 14 juta</td></tr> <tr> <td>5</td><td>2024</td><td>Telah dibayar di muka £ 10 juta</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td><td>Telah dibayar di muka £ 31 juta</td></tr> </tbody> </table> Kekurangan £5 juta (ditambah 10% <i>revenue</i> 2023) akan dibayarkan oleh Jakpro pada tahun ke-3 dengan dana non-APBD	No	Tahun	Keterangan	1	2020	Batal (Pandemi COVID)	2	2021	Batal (Pandemi COVID)	3	2022	Telah dibayar di muka £ 7 juta	4	2023	Telah dibayar di muka £ 14 juta	5	2024	Telah dibayar di muka £ 10 juta	Jumlah		Telah dibayar di muka £ 31 juta
No	Tahun	Keterangan																					
1	2020	Batal (Pandemi COVID)																					
2	2021	Batal (Pandemi COVID)																					
3	2022	Telah dibayar di muka £ 7 juta																					
4	2023	Telah dibayar di muka £ 14 juta																					
5	2024	Telah dibayar di muka £ 10 juta																					
Jumlah		Telah dibayar di muka £ 31 juta																					

Gelaran Formula E tahun pertama di Indonesia berhasil diselenggarakan pada bulan Juni 2022. Atas penyelenggaraan tersebut dilakukan analisis oleh tim independen dari INDEF untuk mengetahui dampak ekonomi secara makro dari penyelenggaraan Formula E baik di level Provinsi dan Nasional. Analisis juga dilakukan untuk mengetahui dampak sosial-ekonomi serta manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat DKI Jakarta secara langsung ataupun tidak langsung dari penyelenggaraan Formula E tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh tim INDEF, penyelenggaraan Jakarta *E-Prix* 2022 memberikan dampak yang cukup luas terhadap banyak aspek. Mulai dari aspek mikro yang meliputi keuntungan finansial dalam jangka panjang, keuntungan industri yang terkait termasuk UMKM, hingga aspek makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan banyak efek lainnya.

Sebagai komitmen penyelenggaraan Formula E yang tertuang dalam CHA antara Jakpro dan FEO, pada tahun 2023 Jakpro kembali menyelenggarakan kegiatan Formula E yang berlangsung pada 3 dan 4 Juni 2023 yang diselenggarakan di AGI Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta. Kegiatan ini disebut dengan 2023 Jakarta E-Prix.

Atas penyelenggaraan 2023 Jakarta E-Prix, dilakukan Analisa Dampak Ekonomi dan Analisa Dampak Sosial bagi Jakarta dan Indonesia, oleh konsultan dari Inggris, The Sports Consultancy (TSC). Menurut TSC penyelenggaraan 2023 Jakarta E-Prix memberikan dampak sebagai berikut:

a. Dampak Ekonomi

Menggunakan *Augmented Impact Methodology* dalam menghitung dampak ekonomi, total *Gross Event Impact* bagi Jakarta sebagai *Host* dari 2023 Jakarta E-Prix adalah sekitar USD100.5 million (Rp 1,5 triliun). Dengan perincian sebagai berikut.

Keterangan	
Dampak ekonomi langsung	\$ 50.900.000.
Dampak ekonomi tidak langsung	\$ 35.000.000.
<i>Total dampak ekonomi</i>	\$ 85.900.000
Valuasi dampak social	\$ 900.000
Valuasi dampak media	\$ 8.400.000
Penerimaan Pajak	\$ 5.300.000
Gross Total Dampak Event	\$ 100.500.000



b. Dampak Sosial

Sebagai rangkaian dalam penyelenggaraan 2023 Jakarta E-Prix, FEO bersama-sama dengan Jakpro melaksanakan beberapa program tambahan dalam rangka mensosialisasikan *Sustainability* pada masyarakat Indonesia dengan beberapa program yang dilakukan di antaranya adalah *Beach Clean Up* dan *Volunteer*.

Selain dari *intangible value* yang didapatkan dari rangkaian acara penyelenggaraan Formula E, dampak sosial yang bisa dirasakan salah satunya adalah menumbuhkan inspirasi dalam mengubah kebiasaan untuk melestarikan lingkungan. Menurut TSC, *Total Gross Social Value* bagi Jakarta sebagai *Host* dari 2023 Jakarta E-Prix adalah sekitar USD743,700 (Rp11,5 milyar).

Dan selanjutnya untuk penyelenggaraan Formula E tahun 2024 yang dijadwalkan pada bulan Juni 2024, ditunda ke tahun 2025 sesuai dengan kesepakatan Jakpro dan FEO yang tertuang dalam Adendum CHA Nomor 4 tertanggal 30 November 2023. Hal ini mempertimbangkan kondisi politik atas penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2024. Terkait dengan kesepakatan tersebut, maka kewajiban pembayaran *commitment fee* £5 juta juga dilakukan penjadwalan ulang di Tahun 2025.



BAB VII

PENUTUP



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 911 Tahun 2023 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 752 UKPD/SKPD yang memiliki fungsi sebagai entitas akuntansi dan 42 SKPD sebagai entitas akuntansi penggabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan menyusun Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang disusun oleh setiap entitas akuntansi digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi 42 Laporan Keuangan SKPD Penggabung. Laporan Keuangan dari 42 SKPD Penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp71.065.534.207.722,00 atau 100,57% dari anggaran sebesar Rp70.662.936.135.345,00, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp66.770.609.628.414,00 atau 92,55% dari anggaran sebesar Rp72.144.886.612.586,00. Dengan demikian terdapat Surplus antara Pendapatan dengan Belanja sebesar Rp4.294.924.579.308,00. Selain itu, realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp2.247.496.540.761,00, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp6.542.421.120.069,00;
2. Saldo Anggaran Lebih pada awal tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp8.600.096.664.254,00. Nilai tersebut merupakan SiLPA tahun anggaran 2022 yang diakui sebagai penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2023. Pada akhir tahun anggaran 2023 terdapat SiLPA sebesar Rp6.542.421.120.069,00;
3. Berdasarkan Laporan Operasional tahun 2023 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp103.869.130.346.608,00, Beban sebesar Rp68.605.049.742.327,00, Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp3.722.940.118,00, dan Beban Luar Biasa sebesar Rp3.025.742.350,00 sehingga Surplus-LO sebesar Rp35.264.777.802.049,00;



4. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan Ekuitas Awal sebesar Rp665.549.886.851.294,00, koreksi Ekuitas sebesar (Rp2.742.380.031.968,00) dan Surplus-LO sebesar Rp35.264.777.802.049,00, sehingga Ekuitas Akhir sebesar Rp698.072.284.621.375,00;
5. Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 menyajikan jumlah Aset sebesar Rp715.498.299.812.408,00, Kewajiban sebesar Rp17.426.015.191.033,00, dan Ekuitas sebesar Rp698.072.284.621.375,00; dan
6. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp10.632.235.079.057,00, Aktivitas Investasi sebesar (Rp11.665.072.113.889,00), Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp1.057.547.795.088,00), dan Aktivitas Transitoris sebesar Rp13.920.528.268,00, sehingga terjadi penurunan bersih kas selama periode tahun 2023 sebesar Rp2.076.464.301.652,00. Total saldo awal Kas sebesar Rp8.638.651.267.637,00, sehingga saldo akhir Kas adalah sebesar Rp6.562.186.965.985,00.

Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2023 (*Audited*) yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



**Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,**

Heru Budi Hartono



LAMPIRAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2023 *AUDITED***

DAFTAR RINCIAN REALISASI BELANJA OPERASI
PER 31 DESEMBER 2023

NO	KODE SKPD	SKPD PENGGABUNG	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA BUNGA	BELANJA SUBSIDI	BELANJA HIBAH	BELANJA BANTUAN SOSIAL	TOTAL
1	10101000	DINAS PENDIDIKAN	7.217.803.527.262	3.301.159.544.383			1.545.526.565.550	3.481.609.263.893	15.546.098.901.088
2	10201000	DINAS KESEHATAN	2.176.563.008.551	7.450.887.770.739			18.884.401.441		9.646.335.180.731
3	10301000	DINAS BINA MARGA	152.116.994.110	673.138.793.685			1.863.056.658		827.118.844.453
4	10302000	DINAS SUMBER DAYA AIR	146.432.862.704	1.172.534.266.387		-			1.318.967.129.091
5	10303000	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	172.712.352.203	86.354.421.632			46.695.213.405		305.761.987.240
6	10402000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	112.186.491.387	601.192.148.831					713.378.640.218
7	10501000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	760.337.000.454	276.798.295.417			23.199.400.000		1.060.334.695.871
8	10502000	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	691.255.379.848	339.397.005.930					1.030.652.385.778
9	10503000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	24.840.568.010	42.269.748.991					67.110.317.001
10	10601000	DINAS SOSIAL	230.879.139.895	424.820.818.964			2.892.000.000	882.032.212.775	1.540.624.171.634
11	20101000	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	180.609.955.761	177.806.211.000					358.416.166.761
12	20201000	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	146.535.047.287	518.614.171.126			1.921.588.277		667.070.806.690
13	20301000	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	127.751.052.462	168.172.095.931		1.046.105.737.427			1.342.028.885.820
14	20502000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	190.615.569.420	2.006.284.345.875					2.196.899.915.295
15	20601000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	152.597.311.142	127.656.348.922					280.253.660.064
16	20901000	DINAS PERHUBUNGAN	432.761.921.977	789.397.951.501		4.493.547.544.107	75.472.594.318		5.791.180.011.903
17	21001000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	94.592.123.755	382.494.335.443			4.412.959.808		481.499.419.006
18	21101000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	117.068.907.855	237.527.232.158			2.549.736.855		357.145.876.868
19	21201000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	476.120.375.889	216.828.698.054					692.949.073.943
20	21301000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	86.496.804.948	396.905.475.960			241.866.275.445		725.268.556.353
21	21601000	DINAS KEBUDAYAAN	97.713.527.674	324.683.561.529		-	8.341.460.560		430.738.549.763
22	21701000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	81.191.845.999	100.902.771.665					182.094.617.664
23	30204000	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	82.791.973.280	285.769.206.437			-		368.561.179.717
24	30401000	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	173.675.615.014	947.063.453.922					1.120.739.068.936
25	40101000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	89.523.745.892	30.260.924.848					119.784.670.740
26	40201000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	97.803.618.818	53.068.528.703	229.704.491.741				380.576.639.262
27	40202000	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	92.907.002.417	125.811.484.828			56.650.500.070		275.368.987.315
28	40203000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	846.348.189.130	204.958.034.052					1.051.306.223.182
29	40301000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	121.024.811.986	17.073.171.895			3.416.591.225		141.514.575.106
30	40302000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	47.811.390.808	58.374.283.059					106.185.673.867
31	40501000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	48.032.712.311	28.481.703.500			1.166.979.627.720		1.243.494.043.531
32	40601907	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH	656.481.456.941	221.787.192.137			421.010.925.175		1.299.279.574.253
33	40603000	SEKRETARIAT DPRD	195.677.818.886	540.770.895.493					736.448.714.379
34	40604000	INSPEKTORAT	107.983.695.831	35.930.347.872					143.914.043.703
35	40605000	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	65.832.592.954	9.082.614.405					74.915.207.359
36	40606000	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	19.598.425.107	3.437.600.155					23.036.025.262
37	50110000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	226.305.422.967	488.341.381.512					714.646.804.479
38	50120000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	180.640.906.557	570.519.152.349					751.160.058.906
39	50130000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	269.504.399.196	684.125.308.789					953.629.707.985
40	50140000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	347.570.086.616	735.776.213.094					1.083.346.299.710
41	50150000	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	364.686.684.290	850.161.800.762					1.214.848.485.052
42	50160000	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU	74.394.010.276	117.825.293.361					192.219.303.637
	Grand Total		17.977.776.327.870	25.824.444.605.296	229.704.491.741	5.539.653.281.534	3.621.682.896.507	4.363.641.476.668	57.556.903.079.616

DAFTAR SALDO KAS DAN SETARA KAS BLUD
PER 31 DESEMBER 2023

No	Nama SKPD/UKPD	Kas Tunai	Kas di Bank	Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Uang Muka Pasien RSUD/RSKD	Uang Jaminan Kerjasama	Uang Titipan	Uang Muka Jasa BLUD	Kas dan Setara Kas BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10
1	UNIT PENGELOLA DANA PERUMAHAN	-	17.448.397.226,00	-	-	-	-	-	-	17.448.397.226,00
2	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	-	7.063.346.760,00	-	-	-	-	41.156.603,00	-	7.104.503.363,00
3	Unit Pengelola Perparkiran	62.869.725,00	8.370.852.639,00	-	-	-	3.229.499.147,00	2.497.100,00	-	11.665.718.611,00
4	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	24.627.825,00	657.215.056,00	-	-	-	-	-	-	681.842.881,00
5	Laboratorium Kesehatan Daerah	19.520.500,00	4.163.845.120,00	-	-	-	-	-	-	4.183.365.620,00
6	Pusat Layanan Kesehatan Penawai	-	339.215.415,00	-	-	-	-	-	-	339.215.415,00
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU	5.851.000,00	645.727.452,00	99.125.922,00	-	-	-	-	-	750.704.374,00
8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU	19.808.619,00	134.749.177.854,00	-	-	10.625.000,00	-	1.912.897,00	-	134.781.524.370,00
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMAYORAN	44.192.261,00	2.564.631.146,00	-	-	-	-	-	-	2.608.823.407,00
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAH BESAR	24.916.180,00	8.921.401.321,00	-	-	-	-	-	-	8.946.317.501,00
11	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CEMPAKA PUTIH	10.913.000,00	9.948.961.376,00	-	-	-	-	-	-	9.959.874.376,00
12	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU	2.708.541,00	665.854.247,00	-	-	-	-	-	-	668.562.788,00
13	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA	15.777.900,00	19.510.872.525,00	-	-	-	-	-	-	19.526.650.425,00
14	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCING	27.651.017,00	12.550.011.881,00	-	-	-	-	-	-	12.577.662.898,00
15	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADEMANGAN	26.629.000,00	5.870.326.627,00	-	-	-	-	-	-	5.896.955.627,00
16	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMBANGAN	60.968.377,00	1.137.857.493,00	-	-	-	-	-	-	1.198.825.870,00
17	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KALIDERES	25.280.050,00	4.915.094.945,00	-	-	-	-	-	-	4.940.374.995,00
18	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAGAKARSA	30.878.587,00	7.206.197.506,00	-	-	-	-	-	-	7.237.076.093,00
19	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET	29.164.500,00	6.540.642.592,00	-	-	-	-	-	-	6.569.807.092,00
20	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN	19.630.000,00	1.899.244.627,00	-	-	-	-	-	-	1.918.874.627,00
21	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN	28.632.497,00	2.356.245.452,00	-	-	-	-	-	-	2.384.877.949,00
22	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI	7.052.900,00	15.195.716.053,00	-	-	-	-	-	-	15.202.768.953,00
23	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIRACAS	6.992.000,00	4.366.905.154,00	-	-	-	-	-	-	4.373.897.154,00
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MATRAMAN	8.426.795,00	1.991.762.424,00	-	-	-	-	2.398.597.850,00	-	4.398.787.069,00
25	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN SARI	9.844.000,00	3.639.073.099,00	-	-	-	-	-	-	3.648.917.099,00
26	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK	43.604.200,00	8.027.092.518,00	-	-	-	-	-	-	8.070.696.718,00
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG	24.443.000,00	28.801.332.173,00	-	-	-	-	-	-	28.825.775.173,00
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU	11.534.554,00	11.303.702.197,00	-	-	-	-	-	-	11.315.236.751,00
29	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG	14.025.899,00	3.645.629.749,00	-	-	-	-	-	-	3.659.655.648,00
30	RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA	284.421,00	22.373.880,00	-	-	-	-	-	-	22.658.301,00
31	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG	9.624.608,00	6.507.521.789,00	-	-	-	-	-	-	6.517.146.397,00
32	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN LAMA	8.810.500,00	3.598.938.687,00	-	-	-	-	-	-	3.607.749.187,00
33	PUSAT KRISISDAN KEGAWATDARURATAN KESEHATAN DAERAH	-	8.957.253.570,00	-	-	-	-	-	-	8.957.253.570,00
34	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANAH ABANG - JAKPUS	1.815.000,00	3.392.792.899,00	-	-	-	-	-	-	3.394.607.899,00
35	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MENTENG - JAKPUS	895.000,00	471.816.432,00	-	-	-	-	-	-	472.711.432,00
36	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SENEN - JAKPUS	610.000,00	1.373.700.631,00	-	-	-	-	-	-	1.374.310.631,00
37	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CEMPAKA PUTIH - JAKPUS	1.520.000,00	409.538.316,00	-	-	-	-	-	-	411.058.316,00
38	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JOHAR BARU - JAKPUS	-	2.923.300.235,00	-	-	-	-	-	-	2.923.300.235,00
39	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMAYORAN - JAKPUS	1.330.000,00	1.770.544.742,00	1.418.007,00	-	-	-	-	-	1.773.292.749,00
40	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS	17.915.000,00	1.661.424.240,00	-	-	-	-	-	-	1.679.339.240,00
41	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS	840.000,00	1.020.789.254,00	-	-	-	-	-	-	1.021.629.254,00
42	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PENJARINGAN - JAKUT	-	817.110.126,00	-	-	-	-	-	-	817.110.126,00
43	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PADEMANGAN - JAKUT	775.000,00	1.684.150.839,00	-	-	-	-	-	-	1.684.925.839,00
44	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG PRIOK - JAKUT	1.300.000,00	35.082.761,00	-	-	-	-	-	-	36.382.761,00
45	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KOJA - JAKUT	3.100.000,00	2.542.729.674,00	-	-	-	-	-	-	2.545.829.674,00
46	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KELAPA GADING - JAKUT	2.820.000,00	744.352.469,00	-	-	-	-	-	-	747.172.469,00
47	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILINCING - JAKUT	1.205.000,00	2.827.349.065,00	-	-	-	-	-	-	2.828.554.065,00
48	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR	2.595.000,00	768.695.799,00	-	-	-	-	-	-	771.290.799,00
49	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR	3.800.000,00	2.880.363.012,00	-	-	-	-	-	-	2.884.163.012,00
50	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CENGKARENG - JAKBAR	12.210.000,00	1.944.162.180,00	-	-	-	-	-	-	1.956.372.180,00
51	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KALIDERES - JAKBAR	1.145.000,00	189.125.560,00	-	-	-	-	-	-	190.270.560,00
52	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR	4.025.000,00	2.328.288.238,00	-	-	-	-	-	-	2.332.313.238,00
53	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PAL MERAH - JAKBAR	2.575.000,00	1.236.613.296,00	-	-	-	-	-	-	1.239.188.296,00
54	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR	2.240.000,00	662.637.962,00	-	-	-	-	-	-	664.877.962,00
55	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMAN SARI - JAKBAR	2.330.000,00	2.232.755.771,00	-	-	-	-	-	-	2.235.085.771,00
56	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN LAMA - JAKSEL	9.370.000,00	2.329.242.757,00	-	-	-	-	-	-	2.338.612.757,00
57	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PESANGGRAHAN - JAKSEL	1.025.000,00	1.422.739.779,00	-	-	-	-	-	-	1.423.764.779,00
58	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR MINGGU - JAKSEL	5.170.000,00	381.158.330,00	-	-	-	-	-	-	386.328.330,00
59	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JAGAKARSA - JAKSEL	1.330.000,00	851.555.739,00	-	-	-	-	-	-	852.885.739,00
60	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL	645.000,00	956.132.843,00	-	-	-	-	-	-	956.777.843,00
61	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PANCORAN - JAKSEL	1.425.000,00	2.002.314.916,00	-	-	-	-	-	-	2.003.739.916,00
62	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU - JAKSEL	1.890.000,00	2.385.968.596,00	-	-	-	-	-	-	2.387.858.596,00
63	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SETIABUDI - JAKSEL	9.613.000,00	1.221.486.054,00	-	-	-	-	-	-	1.231.099.054,00
64	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET - JAKSEL	2.665.000,00	2.056.192.283,00	-	-	-	-	-	-	2.058.857.283,00
65	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILANDAK - JAKSEL	840.000,00	1.824.581.510,00	-	-	-	-	-	-	1.825.421.510,00
66	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR REBO - JAKTIM	2.820.000,00	2.901.267.914,00	-	24.133.257,00	-	-	-	-	2.928.221.171,00
67	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIRACAS - JAKTIM	950.000,00	3.162.781.366,00	-	31.541.938,00	-	-	-	-	3.195.273.304,00
68	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIPAYUNG - JAKTIM	1.840.000,00	1.733.417.276,00	-	-	-	-	-	-	1.735.257.276,00

No	Nama SKPD/UKPD	Kas Tunai	Kas di Bank	Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Uang Muka Pasien RSUD/RSKD	Uang Jaminan Kerjasama	Uang Titipan	Uang Muka Jasa BLUD	Kas dan Setara Kas BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8+9+10
69	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KRAMAT JATI - JAKTIM	3.690.000,00	3.342.521.304,00	-	-	-	-	-	-	3.346.211.304,00
70	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAKASAR - JAKTIM	1.220.000,00	2.212.103.706,00	-	-	-	-	-	-	2.213.323.706,00
71	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JATINEGARA - JAKTIM	1.220.000,00	3.955.432.204,00	-	-	-	-	-	-	3.956.652.204,00
72	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM	2.245.000,00	8.476.964.855,00	-	-	-	-	-	-	8.479.209.855,00
73	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM	850.000,00	1.238.217.492,00	-	-	-	-	-	-	1.239.067.492,00
74	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PULO GADUNG - JAKTIM	1.400.000,00	2.581.629.210,00	-	-	-	-	-	-	2.583.029.210,00
75	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CAKUNG - JAKTIM	1.335.000,00	3.506.893.585,00	-	-	-	-	-	-	3.508.228.585,00
76	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU UTARA - KEP.	12.130.000,00	259.734.360,00	-	-	-	-	-	-	271.864.360,00
77	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU SELATAN - KEP.	-	216.488.805,00	-	-	-	-	-	-	216.488.805,00
78	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA	43.152.115,00	23.588.278.633,00	139.770,00	79.226.836,00	17.226.433,00	60.000.000,00	29.854.958,00	-	23.817.878.745,00
79	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN	28.678.193,00	56.660.569.380,00	-	-	259.097.149,00	-	-	-	56.948.344.722,00
80	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENGKARENG	133.138.000,00	151.016.753.021,00	-	-	79.002.779,00	-	-	-	151.228.893.800,00
81	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO	153.164.071,00	21.936.675.388,00	-	-	9.200.000,00	-	-	-	22.099.039.459,00
82	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH	10.198.279,00	32.366.536.330,00	22.985.598,00	-	-	-	-	-	32.399.720.207,00
83	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT	57.965.620,00	119.664.624.992,00	-	-	-	-	-	-	119.722.590.612,00
84	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	-	220.668.709,00	-	-	-	-	-	41.925.000,00	262.593.709,00
85	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	-	445.385,00	-	-	-	-	-	-	445.385,00
86	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	-	604.465.780,00	-	-	-	-	-	37.000.000,00	641.465.780,00
87	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	-	24.674.502,00	-	-	-	-	405.000,00	-	25.079.502,00
88	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	-	13.437.830,00	-	-	-	-	-	-	13.437.830,00
89	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	-	46.721.071,00	-	-	-	-	-	-	46.721.071,00
90	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	-	40.123.788,00	-	-	-	-	-	-	40.123.788,00
91	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	18.114.913,00	31.952.316,00	-	-	-	-	-	-	50.067.229,00
92	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	-	17.269.660,00	-	-	-	-	-	-	17.269.660,00
93	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	-	46.183.092,00	-	-	-	-	-	-	46.183.092,00
94	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	-	14.153.498,00	-	-	-	-	-	-	14.153.498,00
95	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	-	24.321.500,00	-	-	-	-	-	-	24.321.500,00
96	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	-	1.029.808.571,00	-	-	-	-	-	-	1.029.808.571,00
97	UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN	-	8.396.044.390,00	-	-	-	-	-	-	8.396.044.390,00
98	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	-	4.281.907.067,00	-	-	-	-	-	-	4.281.907.067,00
99	UNIT PENGELOLA JAKARTA ASSET MANAGEMENT CENTER	-	143.278.215.776,00	-	-	-	-	-	-	143.278.215.776,00
100	Unit Pengelola Sampah Terpadu	-	420.513.813,00	-	-	-	-	-	-	420.513.813,00
101	UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY	-	597.367.248,00	-	-	-	-	-	-	597.367.248,00
Jumlah		1.197.791.647,00	1.000.840.280.678,00	123.669.297,00	134.902.031,00	375.151.361,00	3.289.499.147,00	2.474.424.408,00	78.925.000,00	1.008.514.643.569,00

DAFTAR SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN SEKOLAH
PER 31 DESEMBER 2023

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)	
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)		
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12	
1	20100143	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 JAKARTA	SMK	10154127615	158.871.885	0	0	0	158.871.885	0	158.871.885	158.871.885	
2	20100156	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 54 JAKARTA	SMK	11154127515	299.836.580	0	0	0	299.836.580	0	299.836.580	299.836.580	
3	20100157	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 44 JAKARTA	SMK	12254127405	295.562.265	0	0	0	295.562.265	0	295.562.265	295.562.265	
4	20100158	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 14 JAKARTA	SMK	12254127375	45.965.798	0	0	0	45.965.798	0	45.965.798	45.965.798	
5	20100159	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 16 JAKARTA	SMK	50054127540	86.646.562	0	0	0	86.646.562	0	86.646.562	86.646.562	
6	20100160	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 19 JAKARTA	SMK	11354127716	147.252.104	0	0	0	147.252.104	0	147.252.104	147.252.104	
7	20100161	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 JAKARTA	SMK	10154127313	127.238.605	0	0	0	127.238.605	0	127.238.605	127.238.605	
8	20100162	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 21 JAKARTA	SMK	10154127496	204.928.665	0	0	0	204.928.665	0	204.928.665	204.928.665	
9	20100163	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	SMK	10154127623	47.243.640	2.797.100	0	672.000	43.774.540	0	43.774.540	44.446.540	
10	20100164	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 JAKARTA	SMK	10454127423	65.158.784	0	0	0	65.158.784	0	65.158.784	65.158.784	
11	20100165	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 31 JAKARTA	SMK	50054127388	210.160.978	0	0	0	210.160.978	0	210.160.978	210.160.978	
12	20100166	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 34 JAKARTA	SMK	50054127647	37.674.804	0	0	0	37.674.804	0	37.674.804	37.674.804	
13	20100167	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 38 JAKARTA	SMK	10854127736	101.199.684	0	0	0	101.199.684	0	101.199.684	101.199.684	
14	20100168	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 39 JAKARTA	SMK	12254127286	139.831.907	0	0	0	139.831.907	0	139.831.907	139.831.907	
15	20100199	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 68 JAKARTA	SMA	50054123455	319.996.269	0	0	0	319.996.269	0	319.996.269	319.996.269	
16	20100200	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 JAKARTA	SMA	11354123567	69.299.002	0	0	0	69.299.002	0	69.299.002	69.299.002	
17	20100201	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 77 JAKARTA	SMA	12254123141	129.178.842	0	0	0	129.178.842	0	129.178.842	129.178.842	
18	20100210	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 JAKARTA	SMA	50054123293	192.053.075	0	0	0	192.053.075	0	192.053.075	192.053.075	
19	20100211	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 JAKARTA	SMA	10854123170	21.956.806	0	0	0	21.956.806	0	21.956.806	21.956.806	
20	20100212	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 35 JAKARTA	SMA	11354123559	196.477.102	0	0	0	196.477.102	0	196.477.102	196.477.102	
21	20100216	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 JAKARTA	SMA	10154123415	92.154.399	0	0	0	92.154.399	0	92.154.399	92.154.399	
22	20100217	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 JAKARTA	SMA	10254123391	49.792.675	0	0	0	49.792.675	0	49.792.675	49.792.675	
23	20100218	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 20 JAKARTA	SMA	10454123428	22.902.828	0	0	0	22.902.828	0	22.902.828	22.902.828	
24	20100219	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 24 JAKARTA	SMA	11354123532	24.241.175	0	0	0	24.241.175	0	24.241.175	24.241.175	
25	20100221	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 25 JAKARTA	SMA	11154123188	61.571.868	0	0	134.300	61.437.568	0	61.437.568	61.571.868	
26	20100223	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 27 JAKARTA	SMA	50054123234	333.992.633	0	0	0	333.992.633	0	333.992.633	333.992.633	
27	20100224	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 30 JAKARTA	SMA	50054123137	377.010.488	0	0	0	377.010.488	0	377.010.488	377.010.488	
28	20100228	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 137 JAKARTA	SMP	12254134207	1.793.404	0	0	0	1.793.404	0	1.793.404	1.793.404	
29	20100230	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 156 JAKARTA	SMP	12254134410	87.839.986	0	0	0	87.839.986	0	87.839.986	87.839.986	
30	20100231	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 JAKARTA	SMP	10454134837	88.208.397	0	0	32.450	88.175.947	0	88.175.947	88.208.397	
31	20100232	SEK											

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SiLPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)	
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SiLPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SiLPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)		
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12	
59	20100278	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 59 JAKARTA	SMP	10854134635	351.789.021		0	0	351.789.021	0	351.789.021	351.789.021	
60	20100279	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 60 JAKARTA	SMP	11154134295	87.111.090	0	0	12.000	87.099.090	0	87.099.090	87.111.090	
61	20100280	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 64 JAKARTA	SMP	10454134845	83.002.760	0	0	0	83.002.760	0	83.002.760	83.002.760	
62	20100370	SEKOLAH DASAR NEGERI BUNGUR 01 JAKARTA	SD	10954107563	26.998.416	0	0	0	26.998.416	0	26.998.416	26.998.416	
63	20100372	SEKOLAH DASAR NEGERI BUNGUR 03 JAKARTA	SD	12254107579	24.223.807	11.586.610	0	0	12.637.197	0	12.637.197	12.637.197	
64	20100374	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH BARAT 01 PAGI JAKARTA	SD	12254105614	1.938.760	0	0	0	1.938.760	0	1.938.760	1.938.760	
65	20100375	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH BARAT 03 PAGI JAKARTA	SD	12254105576	1.360.428	0	0	0	1.360.428	0	1.360.428	1.360.428	
66	20100377	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH BARAT 05 PAGI JAKARTA	SD	12254105631	9.823.455	0	0	0	9.823.455	0	9.823.455	9.823.455	
67	20100378	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH BARAT 07 PAGI JAKARTA	SD	12254105584	1.798.788	0	0	0	1.798.788	0	1.798.788	1.798.788	
68	20100379	SEKOLAH DASAR NEGERI BENDUNGAN HILIR 09 PAGI JAKARTA	SD	11354107936	38.367.709	0	0	0	38.367.709	0	38.367.709	38.367.709	
69	20100390	SEKOLAH DASAR NEGERI BENDUNGAN HILIR 01 PAGI JAKARTA	SD	11354107910	94.036.009	0	0	0	94.036.009	0	94.036.009	94.036.009	
70	20100392	SEKOLAH DASAR NEGERI BENDUNGAN HILIR 05 PAGI JAKARTA	SD	11354107928	26.372.597	0	0	0	26.372.597	0	26.372.597	26.372.597	
71	20100459	SEKOLAH DASAR NEGERI PASEBAN 03 PAGI JAKARTA	SD	50054107808	3.459.198	0	0	0	3.459.198	0	3.459.198	3.459.198	
72	20100460	SEKOLAH DASAR NEGERI PASEBAN 05 PAGI JAKARTA	SD	50054107816	2.901.598	0	0	0	2.901.598	0	2.901.598	2.901.598	
73	20100464	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR BARU 05 JAKARTA	SD	10454107520	141.357.068	0	0	0	141.357.068	0	141.357.068	141.357.068	
74	20100467	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMAT 06 PAGI JAKARTA	SD	10954107687	12.168.914	0	0	0	12.168.914	0	12.168.914	12.168.914	
75	20100469	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMAT 08 PAGI JAKARTA	SD	10954107709	1.078.979	0	0	0	1.078.979	0	1.078.979	1.078.979	
76	20100476	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR BARU 03 JAKARTA	SD	10454107511	153.477.579	0	0	0	153.477.579	0	153.477.579	153.477.579	
77	20100477	SEKOLAH DASAR NEGERI PASEBAN 09 PAGI JAKARTA	SD	50054107832	389.748	0	0	0	389.748	0	389.748	389.748	
78	20100480	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWASARI 03 PAGI JAKARTA	SD	12254105754	1.672.571	0	0	0	1.672.571	0	1.672.571	1.672.571	
79	20100496	SEKOLAH DASAR NEGERI PASEBAN 18 PAGI JAKARTA	SD	50054107867	438.861	0	0	0	438.861	0	438.861	438.861	
80	20100501	SEKOLAH DASAR NEGERI PETAMBURAN 03 JAKARTA	SD	11854108101	7.842.498	0	0	0	7.842.498	0	7.842.498	7.842.498	
81	20100513	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANG ANYAR 02 PETANG JAKARTA	SD	10454107392	15.752.834	0	0	0	15.752.834	0	15.752.834	15.752.834	
82	20100514	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANG ANYAR 03 PAGI JAKARTA	SD	10454107350	27.621.162	0	0	0	27.621.162	0	27.621.162	27.621.162	
83	20100515	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANG ANYAR 04 PETANG JAKARTA	SD	10454107368	2.810.966	0	0	0	2.810.966	0	2.810.966	2.810.966	
84	20100516	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANG ANYAR 06 PETANG JAKARTA	SD	10454107384	14.796.901	0	0	0	14.796.901	0	14.796.901	14.796.901	
85	20100517	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANG ANYAR 07 PAGI JAKARTA	SD	10454107406	26.558.014	0	0	0	26.558.014	0	26.558.014	26.558.014	
86	20100521	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH BARAT 15 PAGI JAKARTA	SD	12254105592	4.222.032	0	0	0	4.222.032	0	4.222.032	4.222.032	
87	20100522	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH BARAT 17 PAGI JAKARTA	SD	12254105622	847.034	0	0	0	847.034	0	847.034	847.034	
88	20100523	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH BARAT 19 PAGI JAKARTA	SD	12254105606	11.653.289	0	0	0	11.653.289	0	11.653.289	11.653.289	
89	20100528	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMPAKA PUTIH TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	12254105									

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SiLPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)	
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)		
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12	
122	20100653	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN TIMUR 05 PAGI JAKARTA	SD	20154120366	21.546.655	0	0	0	21.546.655	0	21.546.655	21.546.655	
123	20100654	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN TIMUR 06 PAGI JAKARTA	SD	20154120374	990.374	0	0	0	990.374	0	990.374	990.374	
124	20100659	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJAGALAN 03 JAKARTA	SD	30254120476	355.138	0	0	0	355.138	0	355.138	355.138	
125	20100664	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJAGALAN 09 JAKARTA	SD	30254120492	4.747.000	0	0	0	4.747.000	0	4.747.000	4.747.000	
126	20100669	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK SELATAN 07 JAKARTA	SD	20154119848	6.024.946	0	0	0	6.024.946	0	6.024.946	6.024.946	
127	20100671	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 19 PAGI JAKARTA	SD	20154119953	42.441.497	0	0	0	42.441.497	0	42.441.497	42.441.497	
128	20100673	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 21 JAKARTA	SD	20154119961	2.250.250	0	0	0	2.250.250	0	2.250.250	2.250.250	
129	20100677	SEKOLAH DASAR NEGERI ROROTAN 01 PAGI JAKARTA	SD	20054118894	12.528.846	0	0	0	12.528.846	0	12.528.846	12.528.846	
130	20100679	SEKOLAH DASAR NEGERI ROROTAN 02 PAGI JAKARTA	SD	20054118908	3.012.307	0	0	1.400.118	1.612.189	0	1.612.189	3.012.307	
131	20100682	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 01 PAGI JAKARTA	SD	20154118973	9.414.289	0	0	0	9.414.289	0	9.414.289	9.414.289	
132	20100684	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 03 PAGI JAKARTA	SD	20154118990	20.221	0	0	0	20.221	0	20.221	20.221	
133	20100686	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 05 JAKARTA	SD	20054119009	28.290.445	0	0	0	28.290.445	0	28.290.445	28.290.445	
134	20100689	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 15 PAGI JAKARTA	SD	20054119947	1.317.856	0	0	0	1.317.856	1.507.500	2.825.356	2.825.356	
135	20100690	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK SELATAN 09 PAGI JAKARTA	SD	20154119813	5.220.963	0	0	0	5.220.963	0	5.220.963	5.220.963	
136	20100691	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK SELATAN 11 JAKARTA	SD	20054119823	109.512.543	0	0	0	109.512.543	0	109.512.543	109.512.543	
137	20100693	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 01 PAGI JAKARTA	SD	20054120007	1.590.076	0	0	0	1.590.076	0	1.590.076	1.590.076	
138	20100695	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 03 PETANG JAKARTA	SD	20054119904	49.730.580	0	0	0	49.730.580	0	49.730.580	49.730.580	
139	20100697	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 05 PAGI JAKARTA	SD	20054119912	4.973.524	0	0	0	4.973.524	0	4.973.524	4.973.524	
140	20100699	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 07 PAGI JAKARTA	SD	20054119882	10.015.266	0	0	0	10.015.266	0	10.015.266	10.015.266	
141	20100702	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 11 PAGI JAKARTA	SD	20054119891	7.694.995	0	0	0	7.694.995	0	7.694.995	7.694.995	
142	20100717	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 112 JAKARTA	SMP	30254140353	73.541.198	0	0	0	73.541.198	0	73.541.198	73.541.198	
143	20100718	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 113 JAKARTA	SMP	10454140161	20.690.438	0	0	0	20.690.438	0	20.690.438	20.690.438	
144	20100719	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 114 JAKARTA	SMP	20054140091	82.771.287	0	0	0	82.771.287	0	82.771.287	82.771.287	
145	20100720	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 116 JAKARTA	SMP	20154140740	54.699.493	0	0	0	54.699.493	0	54.699.493	54.699.493	
146	20100721	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 120 JAKARTA	SMP	30454140261	30.029.810	0	0	0	30.029.810	0	30.029.810	30.029.810	
147	20100740	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 121 JAKARTA	SMP	20054140067	41.457.540	0	0	0	41.457.540	0	41.457.540	41.457.540	
148	20100741	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 122 JAKARTA	SMP	30254140299	10.484.671	0	0	0	10.484.671	0	10.484.671	10.484.671	
149	20100742	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 270 JAKARTA	SMP	20054139859	105.218.436	0	0	0	105.218.436	0	105.218.436	105.218.436	
150	20100743	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 277 JAKARTA	SMP	20054140024	23.567.306	0	0	0	23.567.306	0	23.567.306	23.567.306	
151	20100744	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 279 JAKARTA	SMP	20054139921	30.674.949	0	0	0	30.674.949	0	30.674.949	30.674.949	
152	20100745	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 282 JAKARTA	SMP	201541									

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SiLPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)	
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SiLPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SiLPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)		
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12	
185	20100797	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 52 JAKARTA	SMA	20054125505	203.025.695	0	0	0	203.025.695	0	203.025.695	203.025.695	
186	20100802	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 110 JAKARTA	SMA	20154125732	180.918.328	0	0	0	180.918.328	0	180.918.328	180.918.328	
187	20100803	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 111 JAKARTA	SMA	30254125869	9.200.516	0	0	0	9.200.516	0	9.200.516	9.200.516	
188	20100804	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 114 JAKARTA	SMA	20054125483	233.409.452	0	0	0	233.409.452	0	233.409.452	233.409.452	
189	20100805	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 115 JAKARTA	SMA	20054125491	105.047.775	0	0	0	105.047.775	0	105.047.775	105.047.775	
190	20100806	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 13 JAKARTA	SMA	20054125726	211.235.048	0	0	0	211.235.048	0	211.235.048	211.235.048	
191	20100807	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 15 JAKARTA	SMA	30254125991	54.545.204	0	0	0	54.545.204	0	54.545.204	54.545.204	
192	20100809	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 18 JAKARTA	SMA	20154126071	280.146.532	0	0	0	280.146.532	0	280.146.532	280.146.532	
193	20100810	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 40 JAKARTA	SMA	14054125761	347.974.203	0	0	0	347.974.203	0	347.974.203	347.974.203	
194	20100811	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 41 JAKARTA	SMA	10454126001	296.614.970	0	0	0	296.614.970	6.702.706	303.317.676	303.317.676	
195	20100812	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 45 JAKARTA	SMA	20054125629	437.393.577	0	0	0	437.393.577	0	437.393.577	437.393.577	
196	20100997	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBARU 03 JAKARTA	SD	20054118711	61	0	0	0	61	0	61	61	
197	20101001	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBARU 05 PAGI JAKARTA	SD	20154118728	21.558.099	0	0	0	21.558.099	0	21.558.099	21.558.099	
198	20101003	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBARU 07 PAGI JAKARTA	SD	20054118690	45.989	0	0	0	45.989	0	45.989	45.989	
199	20101005	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBARU 09 JAKARTA	SD	20054118738	5.013.936	0	0	0	5.013.936	0	5.013.936	5.013.936	
200	20101009	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK MUARA 01 JAKARTA	SD	30254120425	6.238.472	0	0	0	6.238.472	0	6.238.472	6.238.472	
201	20101010	SEKOLAH DASAR NEGERI CILINCING 09 JAKARTA	SD	20054118606	4.249	0	0	0	4.249	0	4.249	4.249	
202	20101026	SEKOLAH DASAR NEGERI CILINCING 03 PAGI JAKARTA	SD	20054118576	475.202	0	0	0	475.202	0	475.202	475.202	
203	20101028	SEKOLAH DASAR NEGERI CILINCING 05 PAGI JAKARTA	SD	20154118621	10.106.021	0	0	0	10.106.021	0	10.106.021	10.106.021	
204	20101031	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN BARAT 01 JAKARTA	SD	20154120242	19.836.487	0	0	0	19.836.487	0	19.836.487	19.836.487	
205	20101033	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN BARAT 03 PAGI JAKARTA	SD	20154120251	119.276.630	0	0	0	119.276.630	0	119.276.630	119.276.630	
206	20101035	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN BARAT 05 PAGI JAKARTA	SD	20154120269	8.081.757	0	0	0	8.081.757	0	8.081.757	8.081.757	
207	20101036	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN BARAT 07 JAKARTA	SD	20154120277	13.259.267	0	0	0	13.259.267	0	13.259.267	13.259.267	
208	20101044	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	20154120340	12.877.690	0	0	0	12.877.690	0	12.877.690	12.877.690	
209	20101054	SEKOLAH DASAR NEGERI LAGOA 02 PAGI JAKARTA	SD	20154119686	5.730.541	0	0	0	5.730.541	0	5.730.541	5.730.541	
210	20101057	SEKOLAH DASAR NEGERI LAGOA 05 PAGI JAKARTA	SD	20154119694	10.542.015	0	0	0	10.542.015	0	10.542.015	10.542.015	
211	20101059	SEKOLAH DASAR NEGERI LAGOA 07 PAGI JAKARTA	SD	20054119700	693.605	0	0	0	693.605	0	693.605	693.605	
212	20101061	SEKOLAH DASAR NEGERI LAGOA 09 PAGI JAKARTA	SD	20054119661	8.255.426	0	0	0	8.255.426	0	8.255.426	8.255.426	
213	20101062	SEKOLAH DASAR NEGERI LAGOA 11 JAKARTA	SD	20054119718	95.056	0	0	0	95.056	0	95.056	95.056	
214	20101064	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN TIMUR 03 PAGI JAKARTA	SD	20154120358	41.403.202	0	0	0	41.403.202	0	41.403.202	41.403.202	
215	20101170	SEKOLAH DASAR NEGERI TOMANG 08 PAGI JAKARTA	SD	30054101718	3.072.895	0	0	0	3.072.895	0	3.072.895	3.072.895	
216	20101172	SEKOLAH DASAR NEGERI TOMANG 03 PAGI JAKARTA	SD	30054101700	669.275	0	0	128.317	540.958	0	540.958	669.275	
217	20101188	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKABUMI UTARA 03 PAGI JAKARTA	SD	41154103356	1.975.326	0	0	0	1.975.326	0	1.975.326	1.975.326	
218	20101199	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKABUMI UTARA 04 PAGI JAKARTA	SD	41154103364	615.470	0	0	0	615.470	0	615.470	615.470	
219	20101359	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGA BESAR 03 PAGI JAKARTA	SD	30054104652	5.706.608	0	0	0	5.706.608	0	5.706.608	5.706.608	
220	20101361	SEKOLAH DASAR NEGERI KRUKUT 03 PAGI JAKARTA	SD	10254104621	2.945.049	0	0	0	2.945.049	0	2.945.049	2.945.049	
221	20101362	SEKOLAH DASAR NEGERI KRUKUT 01 PAGI JAKARTA	SD	30054104610	753.522	0	0	0	753.522	0	753.522	753.522	
222	20101370	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGA BESAR 07 PAGI JAKARTA	SD	30054104661	208.782	0	0	0	208.782	0	208.782	208.782	
223	20101373	SEKOLAH DASAR NEGERI MERUYA UTARA 05 PAGI JAKARTA	SD	30354103804	999.651	0	0	0	999.651	0	999.651	999.651	
224	20101393	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 12 JAKARTA	SD	11354104155	5.388.211	0	0	0	5.388.211	0	5.388.211	5.388.211	
225	20101394	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 10 PAGI JAKARTA	SD	11354104147	24.398.939	0	0	0	24.398.939	0	24.398.939	24.398.939	
226	20101395	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 08 PAGI JAKARTA	SD	11354104139	150.125	0	0	0	150.125	0	150.125	150.125	
227	20101406	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN UTARA 06 PAGI JAKARTA	SD	30354103626	16.676.473	0	0	0	16.676.473	0	16.676.473	16.676.473	
228	20101410	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 06 PAGI JAKARTA	SD	11354104121	22.080.856	0	0	0	22.080.856	0	22.080.856	22.080.856	
229	20101413	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUAYA 02 PAGI JAKARTA	SD	30454101222	27.854.121	0	0	0	27.854.121	0	27.854.121	27.854.121	
230	20101414	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUAYA 01 PAGI JAKARTA	SD	30354101305	101.449	0	0	0	101.449	0	101.449	101.449	
231	20101415	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANGSIA 06 PAGI JAKARTA	SD	30054104741	329.545	0	0	0	329.545	0	329.545	329.545	
232	20101417	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANGSIA 03 PAGI JAKARTA	SD	30054104733	334.866	0	0	0	334.866	0	334.866	334.866	
233	20101419	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANGSIA 01 PAGI JAKARTA	SD	30054104725	2.236.330	0	0	0	2.236.330	0	2.236.330	2.236.330	
234	20101424	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUAYA 07 PAGI JAKARTA	SD	30354101267	280.000	0	0	0	280.000	0	280.000	280.000	
235	20101428	SEKOLAH DASAR NEGERI SLIPI 15 JAKARTA	SD	11854104482	3.964.448	0	0	0	3.964.448	0	3.964.448	3.964.448	
236	20101436	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUAYA 09 PAGI JAKARTA	SD	30054101289	483.949	0	0	0	483.949	0	483.949	483.949	
237	20101447	SEKOLAH DASAR NEGERI MERUYA UTARA 13 PAGI JAKARTA	SD	41154103879	2.569.896	0	0	0	2.569.896	0	2.569.896	2.569.896	
238	20101452	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 13 JAKARTA	SD	11354104317	14.916.879	0	0	0	14.916.879	0	14.916.879	14.916.879	
239	20101460	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 23 JAKARTA	SD	11354104384	244.588	0	0	0	244.588	0	244.588	244.588	
240	20101461	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 22 JAKARTA	SD	11354104376	27.308.683	0	0	748.327	26.560.356	0	26.560.356	27.308.683	
241	20101462	SEKOLAH DASAR NEGERI PAL											

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SiLPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)	
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)		
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12	
248	20101501	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 35 JAKARTA	SMK	30054127067	236.915.670		0	0	236.915.670	0	236.915.670	236.915.670	
249	20101502	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 17 JAKARTA	SMK	11354127015	24.916.010	0	0	0	24.916.010	0	24.916.010	24.916.010	
250	20101503	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	SMK	41154126992	38.939.598	0	0	0	38.939.598	0	38.939.598	38.939.598	
251	20101504	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 11 JAKARTA	SMK	30054127105	103.449.227	0	0	0	103.449.227	0	103.449.227	103.449.227	
252	20101522	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 89 JAKARTA	SMP	11354132566	29.097.518	0	0	0	29.097.518	0	29.097.518	29.097.518	
253	20101523	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 249 JAKARTA	SMP	30454131881	31.486.774	0	0	0	31.486.774	0	31.486.774	31.486.774	
254	20101524	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 248 JAKARTA	SMP	30054132036	104.944.432	0	0	0	104.944.432	0	104.944.432	104.944.432	
255	20101526	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 225 JAKARTA	SMP	30054132681	88.912.223	0	0	0	88.912.223	0	88.912.223	88.912.223	
256	20101527	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 224 JAKARTA	SMP	30054132796	14.698.082	0	0	0	14.698.082	2.900	14.700.982	14.700.982	
257	20101528	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 220 JAKARTA	SMP	41154133166	17.744.660	0	0	0	17.744.660	0	17.744.660	17.744.660	
258	20101529	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 22 JAKARTA	SMP	10454133873	95.591.766	0	0	0	95.591.766	0	95.591.766	95.591.766	
259	20101530	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 219 JAKARTA	SMP	41154133433	27.627.020	0	0	0	27.627.020	0	27.627.020	27.627.020	
260	20101531	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 215 JAKARTA	SMP	41154133638	105.090.808	0	0	0	105.090.808	0	105.090.808	105.090.808	
261	20101532	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 207 JAKARTA	SMP	41154133689	11.368.867	0	0	0	11.368.867	0	11.368.867	11.368.867	
262	20101533	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 206 JAKARTA	SMP	41154133565	85.910.615	0	0	0	85.910.615	0	85.910.615	85.910.615	
263	20101534	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 264 JAKARTA	SMP	30454132292	107.977.265	0	0	0	107.977.265	0	107.977.265	107.977.265	
264	20101535	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 271 JAKARTA	SMP	41154133379	11.912.880	0	0	0	11.912.880	0	11.912.880	11.912.880	
265	20101536	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 274 JAKARTA	SMP	30054132443	40.608.848	0	0	0	40.608.848	0	40.608.848	40.608.848	
266	20101537	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 88 JAKARTA	SMP	11354133724	17.274.437	0	0	0	17.274.437	0	17.274.437	17.274.437	
267	20101538	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 83 JAKARTA	SMP	30054132451	80.568.715	0	0	0	80.568.715	0	80.568.715	80.568.715	
268	20101539	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 82 JAKARTA	SMP	30054132613	34.423.128	0	0	0	34.423.128	0	34.423.128	34.423.128	
269	20101540	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 75 JAKARTA	SMP	41154133221	79.586.955	0	0	0	79.586.955	0	79.586.955	79.586.955	
270	20101541	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 69 JAKARTA	SMP	11354132507	21.799.705	0	0	0	21.799.705	0	21.799.705	21.799.705	
271	20101542	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 63 JAKARTA	SMP	30054134144	33.888.554	0	0	0	33.888.554	0	33.888.554	33.888.554	
272	20101543	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 61 JAKARTA	SMP	11354133805	37.298.543	0	0	0	37.298.543	0	37.298.543	37.298.543	
273	20101544	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 54 JAKARTA	SMP	30054133822	49.342.221	0	0	0	49.342.221	0	49.342.221	49.342.221	
274	20101545	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 45 JAKARTA	SMP	30454131890	72.762.123	0	0	0	72.762.123	0	72.762.123	72.762.123	
275	20101546	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 32 JAKARTA	SMP	30054134110	119.031.299	0	0	0	119.031.299	0	119.031.299	119.031.299	
276	20101547	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 278 JAKARTA	SMP	30054132800	35.986.695	0	0	0	35.986.695	0	35.986.695	35.986.695	
277	20101548	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 205 JAKARTA	SMP	30054132982	127.393.777	0	0	0	127.393.777	0	127.393.777	127.393.777	
278	20101549	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 204 JAKARTA	SMP	30054132893	4.295.237	0	0	0	4.295.237	0	4.295.237	4.295.237	
279	20101550	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 130 JAKARTA	SMP	11854133750	39.205.925	0	0	0	39.205.925	0	39.205.925	39.205.925	
280	20101551	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 127 JAKARTA	SMP	41154133204	65.086.484	0	0	0	65.086.484	0	65.086.484	65.086.484	
281	20101552	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 125 JAKARTA	SMP	30454132870	28.822.867	0	0	0	28.822.867	0	28.822.867	28.822.867	
282	20101553	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 111 JAKARTA	SMP	11354133716	68.234.210	0	0	0	68.234.210	0	68.234.210	68.234.210	
283	20101554	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 108 JAKARTA	SMP	30454131873	14.570.076	0	0	0	14.570.076	0	14.570.076	14.570.076	
284	20101556	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 105 JAKARTA	SMP	41154133514	153.465.162	0	0	0	153.465.162	0	153.465.162	153.465.162	
285	20101557	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 101 JAKARTA	SMP	11354133783	47.156.069	0	0	0	47.156.069	0	47.156.069	47.156.069	
286	20101558	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 100 JAKARTA	SMP	30454132217	55.882.422	0	0	0	55.882.422	0	55.882.422	55.882.422	
287	20101562	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 132 JAKARTA	SMP	30454132250	6.720.965	0	0	0	6.720.965	0	6.720.965	6.720.965	
288	20101563	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 134 JAKARTA	SMP	41154133620	179.802.325	0	0	0	179.802.325	0	179.802.325	179.802.325	
289	20101564	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 142 JAKARTA	SMP	41154133425	62.161.930	0	0	0	62.161.930	0	62.161.930	62.161.930	
290	20101565	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 201 JAKARTA	SMP	30454132021	70.195.351	0	0	0	70.195.351	0	70.195.351	70.195.351	
291	20101566	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 197 JAKARTA	SMP	41154133301	25.070.866	0	0	0	25.070.866	0	25.070.866	25.070.866	
292	20101568	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 191 JAKARTA	SMP	41154133158	87.737.677	0	0	0	87.737.677	0	87.737.677	87.737.677	
293	20101569	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 190 JAKARTA	SMP	30454132781	45.014.328	0	0	0	45.014.328	0	45.014.328	45.014.328	
294	20101570	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 189 JAKARTA	SMP	41154133344	2.244.587	0	0	0	2.244.587	0	2.244.587	2.244.587	
295	20101571	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 187 JAKARTA	SMP	30454132977	34.834.341	0	0	0	34.834.341	0	34.834.341	34.834.341	
296	20101572	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 186 JAKARTA	SMP	30454132675	29.561.662	0	0	0	29.561.662	0	29.561.662	29.561.662	
297	20101573	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 176 JAKARTA	SMP	30354132090	218.704.353	0	0	0	218.704.353	0	218.704.353	218.704.353	
298	20101574	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 169 JAKARTA	SMP	30054132885	58.646.356	0	0	0	58.646.356	0	58.646.356	58.646.356	
299	20101576	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 159 JAKARTA	SMP	30054134012	87.103.483	0	0	0	87.103.483	0	87.103.483	87.103.483	
300	20101583	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 96 JAKARTA	SMA	30354122396	395.532.848	0	0	0	395.532.848	0	395.532.848	395.532.848	
301	20101584	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 95 JAKARTA	SMA	30354122680	1.920.222.691	0	0	0	1.920.222.691	0	1.920.222.691	1.920.222.691	
302	20101585	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 94 JAKARTA	SMA	30354122710	46.972.728	0	0	0	46.972.728	0	46.972.72		

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SiLPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)	
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)		
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12	
311	20101622	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 JAKARTA	SMA	30054123002	135.983.504	0	0	0	135.983.504	0	135.983.504	135.983.504	
312	20101623	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 19 JAKARTA	SMA	30054123096	133.985.026	0	0	0	133.985.026	0	133.985.026	133.985.026	
313	20101624	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 17 JAKARTA	SMA	30054123037	115.574.504	0	0	0	115.574.504	0	115.574.504	115.574.504	
314	20101625	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 16 JAKARTA	SMA	11354122960	187.422.160	0	0	0	187.422.160	0	187.422.160	187.422.160	
315	20101626	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 112 JAKARTA	SMA	30354122906	107.440.878	0	0	0	107.440.878	0	107.440.878	107.440.878	
316	20101627	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 101 JAKARTA	SMA	41154122849	310.879.661	0	0	0	310.879.661	0	310.879.661	310.879.661	
317	20101912	SEKOLAH DASAR NEGERI JOGLO 08 PAGI JAKARTA	SD	30354103511	822.868	0	0	0	822.868	0	822.868	822.868	
318	20101913	SEKOLAH DASAR NEGERI JOGLO 06 PAGI JAKARTA	SD	30354103499	1.734.129	0	0	0	1.734.129	0	1.734.129	1.734.129	
319	20101916	SEKOLAH DASAR NEGERI JOGLO 03 PAGI JAKARTA	SD	30354103464	34.296.540	0	0	0	34.296.540	0	34.296.540	34.296.540	
320	20101921	SEKOLAH DASAR NEGERI JEMBATAN BESI 04 PETANG JAKARTA	SD	30054105187	14.296.626	0	0	0	14.296.626	0	14.296.626	14.296.626	
321	20101924	SEKOLAH DASAR NEGERI KALI ANYAR 02 PETANG JAKARTA	SD	30054105322	14.884.511	0	0	0	14.884.511	0	14.884.511	14.884.511	
322	20101925	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 13 PETANG JAKARTA	SD	30054100908	4.656.200	0	0	0	4.656.200	0	4.656.200	4.656.200	
323	20101926	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 12 PETANG JAKARTA	SD	30054100941	936.497	0	0	0	936.497	0	936.497	936.497	
324	20101929	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 08 PETANG JAKARTA	SD	30054100860	100.637	0	0	0	100.637	0	100.637	100.637	
325	20101930	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 07 PETANG JAKARTA	SD	30454100854	9.365.359	0	0	0	9.365.359	0	9.365.359	9.365.359	
326	20101932	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 05 PAGI JAKARTA	SD	30054100835	16.185.428	0	0	0	16.185.428	0	16.185.428	16.185.428	
327	20101933	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 04 PETANG JAKARTA	SD	30454100820	17.703.752	0	0	0	17.703.752	0	17.703.752	17.703.752	
328	20101935	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 02 PETANG JAKARTA	SD	30054101955	573.641	0	0	0	573.641	0	573.641	573.641	
329	20101939	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR 03 PAGI JAKARTA	SD	30054101467	46.984	0	0	0	46.984	0	46.984	46.984	
330	20101940	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR 01 PAGI JAKARTA	SD	30354101453	235.916	0	0	0	235.916	0	235.916	235.916	
331	20101942	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPULO 08 PAGI JAKARTA	SD	30054104083	2.716.775	0	0	0	2.716.775	0	2.716.775	2.716.775	
332	20101943	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPULO 07 JAKARTA	SD	11354104074	314.905	0	0	0	314.905	0	314.905	314.905	
333	20101947	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPULO 03 PAGI JAKARTA	SD	30054104032	698.907	0	0	0	698.907	0	698.907	698.907	
334	20101949	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR 06 PAGI JAKARTA	SD	30054101475	4.551.270	0	0	0	4.551.270	0	4.551.270	4.551.270	
335	20101955	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR BARU 07 JAKARTA	SD	30054101556	14.154.964	0	0	0	14.154.964	0	14.154.964	14.154.964	
336	20101957	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR BARU 05 PAGI JAKARTA	SD	10154101543	659.121	0	0	0	659.121	0	659.121	659.121	
337	20101961	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR BARU 01 PAGI JAKARTA	SD	10154101527	1.116.070	0	0	0	1.116.070	0	1.116.070	1.116.070	
338	20101965	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDOYA UTARA 01 JAKARTA	SD	41154103127	362.845	0	0	0	362.845	0	362.845	362.845	
339	20101971	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 14 JAKARTA	SD	30054101173	13.704.532	0	0	0	13.704.532	0	13.704.532	13.704.532	
340	20101972	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 13 PAGI JAKARTA	SD	30454101168	1.146.759	0	0	0	1.146.759	0	1.146.759	1.146.759	
341	20101973	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 12 PAGI JAKARTA	SD	30454101150	1.304.745	0	0	0	1.304.745	0	1.304.745	1.304.745	
342	20101980	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 01 PAGI JAKARTA	SD	11354104091	1.044.628	0	0	0	1.044.628	0	1.044.628	1.044.628	
343	20101981	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA DUA 06 PAGI JAKARTA	SD	41154103216	4.038.259	0	0	0	4.038.259	0	4.038.259	4.038.259	
344	20101982	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA DUA 05 PAGI JAKARTA	SD	41154103208	709.955	0	0	0	709.955	0	709.955	709.955	
345	20101984	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA DUA 03 PAGI JAKARTA	SD	41154103194	5.638.715	0	0	0	5.638.715	0	5.638.715	5.638.715	
346	20101990	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 08 PAGI JAKARTA	SD	30454101117	2.252.658	0	0	0	2.252.658	0	2.252.658	2.252.658	
347	20101994	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 06 PAGI JAKARTA	SD	41154102996	2.113.092	0	0	0	2.113.092	0	2.113.092	2.113.092	
348	20101996	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 04 PAGI JAKARTA	SD	41154102988	568.092	0	0	0	568.092	0	568.092	568.092	
349	20102002	SEKOLAH DASAR NEGERI KEAGUNGAN 03 PAGI JAKARTA	SD	30054104563	8.652.693	0	0	0	8.652.693	0	8.652.693	8.652.693	
350	20102004	SEKOLAH DASAR NEGERI KEAGUNGAN 01 PAGI JAKARTA	SD	30054104547	14.990.699	0	0	0	14.990.699	0	14.990.699	14.990.699	
351	20102006	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 10 JAKARTA	SD	41154103011	4.129.327	0	0	0	4.129.327	0	4.129.327	4.129.327	
352	20102009	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 05 PAGI JAKARTA	SD	30454101087	3.611.154	0	0	0	3.611.154	0	3.611.154	3.611.154	
353	20102011	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 03 PAGI JAKARTA	SD	30454101079	1.920.755	0	0	0	1.920.755	0	1.920.755	1.920.755	
354	20102017	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 15 PAGI JAKARTA	SD	41154103038	3.604.805	0	0	0	3.604.805	0	3.604.805	3.604.805	
355	20102020	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 15 PAGI JAKARTA	SD	30054100924	3.046.836	0	0	0	3.046.836	0	3.046.836	3.046.836	
356	20102022	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 04 PETANG JAKARTA	SD	30054100231	471.318	0	0	0	471.318	0	471.318	471.318	
357	20102023	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 03 PAGI JAKARTA	SD	30054100223	3.488.425	0	0	0	3.488.425	0	3.488.425	3.488.425	
358	20102025	SEKOLAH DASAR NEGERI ANGKE 06 PAGI JAKARTA	SD	30054104920	11.302.832	0	0	0	11.302.832	0	11.302.832	11.302.832	
359	20102028	SEKOLAH DASAR NEGERI ANGKE 03 PAGI JAKARTA	SD	30054104946	14.187.961	0	0	0	14.187.961	0	14.187.961	14.187.961	
360	20102044	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 11 JAKARTA	SD	30054100304	385.130	0	0	0	385.130	0	385.130	385.130	
361	20102077	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 07 PAGI JAKARTA	SD	30054100690	2.214.399	0	0	0	2.214.399	0	2.214.399	2.214.399	
362	20102080	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 04 PAGI JAKARTA	SD	30354100660	20.042	0	0	0	20.042	0	20.042	20.042	
363	20102082	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 02 PAGI JAKARTA	SD	30354100651	2.462.176	0	0	0	2.462.176	0	2.462.176	2.462.176	
364	20102083	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 01 PAGI JAKARTA	SD	30454100641	2.755.364	0	0	0	2.755.364	0	2.755.364	2.755.364	
365	20102085	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KEPA 16 PAGI JAKARTA	SD	41154102902	7.324.041	0	0	0	7.324.041	0	7.324.041	7.324.041	
366	20102087	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 09 PAGI JAKARTA	SD	30354100708	5.448.980	0	0	0	5.448.980	0	5.448.980	5.448.980	
367	20102096	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI UTARA 02 PETANG JAKARTA	SD	30054105098	12.087.396	0	0	0	12.087.396	0	12.087.396	12.087.396	
368	20102100	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI UTARA 06 PETANG JAKARTA	SD	30054105101	280.994	0	0	0	280.994	0	280.994	280.994	
369	20102104	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 16 PETANG JAKARTA	SD	30454100421	3.617.639	0	0	0	3.617.639	0	3.617.639	3.617.639	
370	20102107	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 11 PETANG JAKARTA	SD	30054100495	365.827	0	0	0	365.827	0	365.827	365.827	
371	20102116	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 19 PETANG JAKARTA	SD	30454100561	57.422.912	0	0	0	57.422.912	0	57.422.912	57.422.912	
372	20102119	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KEPA 11 PAGI JAKARTA	SD	41154102881	9.440.941	0	0	0	9.440.941	0	9.440.941	9.440.941	
373	20102130	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 22 PETANG JAKARTA	SD	30454100595	285.163	0	0	0	285.163	0	285.163	285.163	

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SiLPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SiLPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SiLPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
374	20102134	SEKOLAH DASAR NEGERI RAGUNAN 01 JAKARTA	SD	40054111299	521.574	0	0	0	521.574	0	521.574	521.574
375	20102140	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK PINANG 10 JAKARTA	SD	41154110107	14.343.630	0	0	0	14.343.630	0	14.343.630	14.343.630
376	20102144	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK PINANG 08 JAKARTA	SD	41154110093	412.275	0	0	0	412.275	0	412.275	412.275
377	20102145	SEKOLAH DASAR NEGERI RAGUNAN 07 PAGI JAKARTA	SD	40054111302	17.961.999	0	0	0	17.961.999	0	17.961.999	17.961.999
378	20102146	SEKOLAH DASAR NEGERI RAGUNAN 08 PAGI JAKARTA	SD	40054111353	5.731.428	0	0	0	5.731.428	0	5.731.428	5.731.428
379	20102148	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAJATI 06 PAGI JAKARTA	SD	40054110756	2.870.378	0	0	0	2.870.378	0	2.870.378	2.870.378
380	20102149	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAJATI 05 PAGI JAKARTA	SD	40054110748	75.828.579	0	0	0	75.828.579	0	75.828.579	75.828.579
381	20102150	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAJATI 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110730	87.412.802	0	0	0	87.412.802	0	87.412.802	87.412.802
382	20102152	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAJATI 01 PAGI JAKARTA	SD	40054110721	3.173.766	0	0	0	3.173.766	0	3.173.766	3.173.766
383	20102156	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BARAT 05 JAKARTA	SD	40054109570	3.097	0	0	0	3.097	0	3.097	3.097
384	20102160	SEKOLAH DASAR NEGERI RAGUNAN 10 PAGI JAKARTA	SD	40054111311	13.578.896	0	0	0	13.578.896	0	13.578.896	13.578.896
385	20102161	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAJATI 07 PAGI JAKARTA	SD	40054110764	11.674.596	0	0	0	11.674.596	0	11.674.596	11.674.596
386	20102173	SEKOLAH DASAR NEGERI PENGADEGAN 07 PAGI JAKARTA	SD	40054110683	14.747.666	0	0	0	14.747.666	0	14.747.666	14.747.666
387	20102180	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK PINANG 05 JAKARTA	SD	41154110085	4.380.526	0	0	0	4.380.526	0	4.380.526	4.380.526
388	20102184	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN UTARA 10 JAKARTA	SD	41154111758	6.810.952	0	0	0	6.810.952	0	6.810.952	6.810.952
389	20102190	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN UTARA 02 JAKARTA	SD	41154111766	8.219.467	0	0	0	8.219.467	0	8.219.467	8.219.467
390	20102192	SEKOLAH DASAR NEGERI PENGADEGAN 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110675	38.161.348	0	0	0	38.161.348	0	38.161.348	38.161.348
391	20102193	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 47 JAKARTA	SMA	40454124008	772.239.233	0	0	0	772.239.233	0	772.239.233	772.239.233
392	20102195	SEKOLAH DASAR NEGERI ULUJAMI 02 JAKARTA	SD	41154111821	33.775.050	0	0	0	33.775.050	0	33.775.050	33.775.050
393	20102196	SEKOLAH DASAR NEGERI ULUJAMI 01 JAKARTA	SD	41154111812	16.006.707	0	0	0	16.006.707	0	16.006.707	16.006.707
394	20102200	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL PARANG 06 PAGI JAKARTA	SD	40054110454	5.869.847	0	0	0	5.869.847	0	5.869.847	5.869.847
395	20102201	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL PARANG 05 JAKARTA	SD	40054110446	20.349.625	0	0	0	20.349.625	0	20.349.625	20.349.625
396	20102202	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL PARANG 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110420	738.800	0	0	0	738.800	0	738.800	738.800
397	20102203	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL PARANG 01 PAGI JAKARTA	SD	40054110438	1.412.726	0	0	0	1.412.726	0	1.412.726	1.412.726
398	20102207	SEKOLAH DASAR NEGERI ULUJAMI 04 JAKARTA	SD	41154111839	15.149.506	0	0	0	15.149.506	0	15.149.506	15.149.506
399	20102208	SEKOLAH DASAR NEGERI ULUJAMI 06 JAKARTA	SD	41154111847	6.223.048	0	0	0	6.223.048	0	6.223.048	6.223.048
400	20102210	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 46 JAKARTA	SMA	40054123807	1.962.080.683	0	0	0	1.962.080.683	0	1.962.080.683	1.962.080.683
401	20102211	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 43 JAKARTA	SMA	50054124257	128.789.120	0	0	0	128.789.120	0	128.789.120	128.789.120
402	20102212	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 38 JAKARTA	SMA	40454123745	188.775.207	0	0	0	188.775.207	0	188.775.207	188.775.207
403	20102213	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 37 JAKARTA	SMA	40254124303	304.383.528	0	0	0	304.383.528	0	304.383.528	304.383.528
404	20102214	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 34 JAKARTA	SMA	40154123651	178.991.536	0	0	0	178.991.536	0	178.991.536	178.991.536
405	20102215	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 32 JAKARTA	SMA	40454123966	64.037.658	0	599.400	1.232.000	62.206.258	0	62.206.258	63.438.258
406	20102216	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 JAKARTA	SMA	11354124270	205.633.836	0	0	0	205.633.836	0	205.633.836	205.633.836
407	20102217	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 29 JAKARTA	SMA	40454123991	60.622.160	0	0	0	60.622.160	0	60.622.160	60.622.160
408	20102218	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 26 JAKARTA	SMA	40454124342	167.510.445	0	0	0	167.510.445	0	167.510.445	167.510.445
409	20102219	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 109 JAKARTA	SMA	50254123761	41.884.398	0	0	0	41.884.398	0	41.884.398	41.884.398
410	20102230	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 108 JAKARTA	SMA	40454124202	12.054.586	0	0	0	12.054.586	0	12.054.586	12.054.586
411	20102233	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET TIMUR 17 PAGI JAKARTA	SD	40254112488	6.753.002	0	0	0	6.753.002	0	6.753.002	6.753.002
412	20102237	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG BARAT 07 JAKARTA	SD	40054109201	6.339.404	0	0	0	6.339.404	0	6.339.404	6.339.404
413	20102238	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG BARAT 04 PAGI JAKARTA	SD	40054109227	14.815.940	0	0	0	14.815.940	0	14.815.940	14.815.940
414	20102239	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG BARAT 03 JAKARTA	SD	40054109189	4.861.593	0	0	0	4.861.593	0	4.861.593	4.861.593
415	20102246	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG SAWAH 04 PAGI JAKARTA	SD	40054109090	3.699.138	0	0	0	3.699.138	0	3.699.138	3.699.138
416	20102247	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG SAWAH 01 PAGI JAKARTA	SD	40054109057	9.914.163	0	0	0	9.914.163	0	9.914.163	9.914.163
417	20102248	SEKOLAH DASAR NEGERI SELONG 04 JAKARTA	SD	40054109618	37.161.432	0	0	0	37.161.432	0	37.161.432	37.161.432
418	20102249	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG BARAT 09 PAGI JAKARTA	SD	40054109219	860.542	0	0	0	860.542	0	860.542	860.542
419	20102251	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET BARAT 01 JAKARTA	SD	40254112411	5.174.407	0	0	3.005.345	2.169.062	0	2.169.062	5.174.407
420	20102253	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET TIMUR 11 PAGI JAKARTA	SD	40254112461	727.665	0	0	0	727.665	0	727.665	727.665
421	20102255	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET TIMUR 07 JAKARTA	SD	40254112500	46.236.234	0	0	0	46.236.234	0	46.236.234	46.236.234
422	20102259	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	40254112496	378.980	0	0	0	378.980	0	378.980	378.980
423	20102260	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET BARAT 08 PAGI JAKARTA	SD	40254112429	5.889.485	0	0	0	5.889.485	0	5.889.485	5.889.485
424	20102263	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET BARAT 05 JAKARTA	SD	40254112445	6.682.520	0	0	0	6.682.520	0	6.682.520	6.682.520
425	20102264	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET BARAT 03 PAGI JAKARTA	SD	40254112437	363.015	0	0	0	363.015	0	363.015	363.015
426	20102268	SEKOLAH DASAR NEGERI MAMPANG PRAPATAN 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110250	24.164.566	0	0	0	24.164.566	0	24.164.566	24.164.566
427	20102269	SEKOLAH DASAR NEGERI MAMPANG PRAPATAN 02 PAGI JAKARTA	SD	40054110241	5.540.296	0	0	0	5.540.296	0	5.540.296	5.540.296
428	20102271	SEKOLAH DASAR NEGERI LENTENG AGUNG 11 JAKARTA	SD	40054108913	11.918.493	0	0	0	11.918.493	0	11.918.493	11.918.493
429	20102275	SEKOLAH DASAR NEGERI LENTENG AGUNG 07 PAGI JAKARTA	SD	40054108972	9.543.640	0	0	0	9.543.640	0	9.543.640	9.543.640
430	20102276	SEKOLAH DASAR NEGERI LENTENG AGUNG 05 PAGI JAKARTA	SD	40054109006	13.082.581	0	0	693.960	12.388.621	616.110	13.004.731	13.698.691
431	20102278	SEKOLAH DASAR NEGERI LENTENG AGUNG 03 JAKARTA	SD	40054108956	23.657.813	0	0	0	23.657.813	0	23.657.813	23.657.813
432	20102283	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGARAI 01 PAGI JAKARTA	SD	40254112267	914.052	0	0	0	914.052	0	914.052	914.052
433	20102289	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGARAI 09 PAGI JAKARTA	SD	40254112291	161.782	0	0	0	161.782	0	161.782	161.782
434	20102295	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGARAI 03 PAGI JAKARTA	SD	40254112275	3.592.877	0	0	0				

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
437	20102300	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BARU 03 PAGI JAKARTA	SD	40254112216	57.022.459	0	0	0	57.022.459	0	57.022.459	57.022.459
438	20102313	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BARU 07 PAGI JAKARTA	SD	40254112224	16.405.032	0	0	0	16.405.032	0	16.405.032	16.405.032
439	20102314	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BARU 09 PAGI JAKARTA	SD	40254112232	6.992.975	0	0	0	6.992.975	0	6.992.975	6.992.975
440	20102321	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMAT PELA 09 JAKARTA	SD	40054109413	3.354.680	0	0	0	3.354.680	0	3.354.680	3.354.680
441	20102322	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMAT PELA 07 JAKARTA	SD	40054109430	1.081.373	0	0	0	1.081.373	0	1.081.373	1.081.373
442	20102326	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BARU 11 JAKARTA	SD	40254112259	46.346.616	0	0	0	46.346.616	0	46.346.616	46.346.616
443	20102334	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 05 PAGI JAKARTA	SD	40054111205	16.455.612	0	0	0	16.455.612	0	16.455.612	16.455.612
444	20102362	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 09 JAKARTA	SD	40054110349	7.652.138	0	0	0	7.652.138	0	7.652.138	7.652.138
445	20102372	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG DALAM 01 PAGI JAKARTA	SD	40254112356	10.948.225	0	0	0	10.948.225	0	10.948.225	10.948.225
446	20102376	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG ATAS 14 PAGI JAKARTA	SD	40254112054	225.912.861	0	0	0	225.912.861	0	225.912.861	225.912.861
447	20102387	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG DALAM 07 PAGI JAKARTA	SD	40254112372	64.083.300	0	0	0	64.083.300	0	64.083.300	64.083.300
448	20102392	SEKOLAH DASAR NEGERI PANCORAN 10 PAGI JAKARTA	SD	40054110624	7.084.986	0	0	0	7.084.986	0	7.084.986	7.084.986
449	20102394	SEKOLAH DASAR NEGERI PANCORAN 08 PAGI JAKARTA	SD	40054110641	2.397.911	0	0	0	2.397.911	0	2.397.911	2.397.911
450	20102395	SEKOLAH DASAR NEGERI PANCORAN 07 PAGI JAKARTA	SD	40054110632	9.178.516	0	0	0	9.178.516	0	9.178.516	9.178.516
451	20102396	SEKOLAH DASAR NEGERI PANCORAN 05 PAGI JAKARTA	SD	40054110667	230.736	0	0	0	230.736	0	230.736	230.736
452	20102402	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 JAKARTA	SMP	40054135741	171.130.316	0	0	0	171.130.316	0	171.130.316	171.130.316
453	20102419	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 107 JAKARTA	SMP	40054136453	44.482.389	0	0	0	44.482.389	0	44.482.389	44.482.389
454	20102420	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 104 JAKARTA	SMP	40054136216	45.734.908	0	0	0	45.734.908	0	45.734.908	45.734.908
455	20102466	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI RAGUNAN JAKARTA	SMP	40054136526	24.120.332	0	0	0	24.120.332	0	24.120.332	24.120.332
456	20102467	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 37 JAKARTA	SMP	40154135170	109.335.849	0	0	0	109.335.849	0	109.335.849	109.335.849
457	20102468	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 33 JAKARTA	SMP	40254136867	116.221.867	0	0	0	116.221.867	0	116.221.867	116.221.867
458	20102469	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 31 JAKARTA	SMP	41154136033	66.546.255	0	0	627.000	65.919.255	0	65.919.255	66.546.255
459	20102470	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 JAKARTA	SMP	50054136875	127.684.433	0	0	0	127.684.433	0	127.684.433	127.684.433
460	20102471	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 29 JAKARTA	SMP	40054135767	106.099.884	0	0	0	106.099.884	0	106.099.884	106.099.884
461	20102472	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 276 JAKARTA	SMP	40054135627	33.207.870	0	0	0	33.207.870	0	33.207.870	33.207.870
462	20102473	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 267 JAKARTA	SMP	41154136688	106.015.160	0	0	0	106.015.160	0	106.015.160	106.015.160
463	20102474	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 265 JAKARTA	SMP	40254136859	59.848.962	0	0	0	59.848.962	0	59.848.962	59.848.962
464	20102475	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 254 JAKARTA	SMP	40054135481	164.495.711	0	0	0	164.495.711	0	164.495.711	164.495.711
465	20102476	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 253 JAKARTA	SMP	40054135431	7.490.379	0	0	0	7.490.379	0	7.490.379	7.490.379
466	20102477	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 250 JAKARTA	SMP	40054135708	74.125.795	0	0	0	74.125.795	0	74.125.795	74.125.795
467	20102478	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 247 JAKARTA	SMP	40054136224	31.361.039	0	0	0	31.361.039	2.849.925	34.210.964	34.210.964
468	20102479	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 245 JAKARTA	SMP	41154136653	304.725.093	0	0	0	304.725.093	0	304.725.093	304.725.093
469	20102480	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 41 JAKARTA	SMP	40054136518	28.966.129	0	0	0	28.966.129	0	28.966.129	28.966.129
470	20102481	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 43 JAKARTA	SMP	40054136135	41.699.261	0	0	0	41.699.261	0	41.699.261	41.699.261
471	20102482	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 46 JAKARTA	SMP	40054136488	77.387.147	0	0	0	77.387.147	0	77.387.147	77.387.147
472	20102483	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 98 JAKARTA	SMP	40054135554	41.274.972	0	0	0	41.274.972	0	41.274.972	41.274.972
473	20102484	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 96 JAKARTA	SMP	40154135358	12.281.409	0	0	0	12.281.409	0	12.281.409	12.281.409
474	20102485	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 87 JAKARTA	SMP	41154136084	36.815.815	0	0	0	36.815.815	0	36.815.815	36.815.815
475	20102486	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 86 JAKARTA	SMP	40054135180	59.519.558	0	0	0	59.519.558	0	59.519.558	59.519.558
476	20102487	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 85 JAKARTA	SMP	40154135340	36.401.364	0	0	0	36.401.364	0	36.401.364	36.401.364
477	20102488	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 73 JAKARTA	SMP	40254136964	71.932.591	0	0	0	71.932.591	0	71.932.591	71.932.591
478	20102489	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 68 JAKARTA	SMP	40054135236	55.203.583	0	0	0	55.203.583	0	55.203.583	55.203.583
479	20102490	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 67 JAKARTA	SMP	50054136786	23.914.460	0	0	0	23.914.460	0	23.914.460	23.914.460
480	20102491	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 66 JAKARTA	SMP	41154135916	17.905.055	0	0	374.000	17.531.055	0	17.531.055	17.905.055
481	20102492	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 58 JAKARTA	SMP	40254136824	115.395.263	0	0	0	115.395.263	0	115.395.263	115.395.263
482	20102493	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 57 JAKARTA	SMP	40254136701	134.029.480	0	0	0	134.029.480	0	134.029.480	134.029.480
483	20102494	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 56 JAKARTA	SMP	40054136321	13.509.176	0	0	0	13.509.176	0	13.509.176	13.509.176
484	20102495	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 48 JAKARTA	SMP	41154135886	82.062.981	0	0	0	82.062.981	0	82.062.981	82.062.981
485	20102496	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 242 JAKARTA	SMP	40054135546	56.847.390	0	0	0	56.847.390	0	56.847.390	56.847.390
486	20102497	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 240 JAKARTA	SMP	40054135716	45.418.987	0	0	0	45.418.987	0	45.418.987	45.418.987
487	20102498	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 163 JAKARTA	SMP	40054136470	48.567.722	2.342.100	0	0	46.225.622	0	46.225.622	46.225.622
488	20102499	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 161 JAKARTA	SMP	41154136025	219.195.498	0	0	0	219.195.498	0	219.195.498	219.195.498
489	20102500	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 155 JAKARTA	SMP	40254136239	58.954.526	0	0	0	58.954.526	0	58.954.526	58.954.526
490	20102501	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 154 JAKARTA	SMP	40054136283	19.221.881	0	0	0	19.221.881	0	19.221.881	19.221.881
491	20102502	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 153 JAKARTA	SMP	41154135908	25.474.429	0	0	0	25.474.429	0	25.474.429	25.474.429
492	20102503	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 15 JAKARTA	SMP	40254136913	136.579.716	0	0	0	136.579.716	0	136.579.716	136.579.716
493	20102504	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 145 JAKARTA	SMP	40254136778	6.857.025	0	0	0	6.857.025	0	6.857.025	6.857.025
494	20102505	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 141 JAKARTA	SMP	40054136186	40.469.832	0	0	0	40.469.832	0	40.469.832	40.469.832
495	20102506	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 131 JAKARTA	SMP	40054135422	28.239.585	0	0	0	28.239.585	0	28.239.585	28.

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
500	20102511	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 164 JAKARTA	SMP	41154135967	63.938.589	0	0	0	63.938.589	0	63.938.589	63.938.589
501	20102512	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 166 JAKARTA	SMP	40054135473	54.111.050	0	0	0	54.111.050	0	54.111.050	54.111.050
502	20102513	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 175 JAKARTA	SMP	40054135465	55.217.029	0	0	0	55.217.029	0	55.217.029	55.217.029
503	20102514	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 239 JAKARTA	SMP	40054135686	23.107.421	0	0	0	23.107.421	0	23.107.421	23.107.421
504	20102515	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 238 JAKARTA	SMP	40054136259	45.649.376	0	0	0	45.649.376	0	45.649.376	45.649.376
505	20102516	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 235 JAKARTA	SMP	41154136572	42.420.100	0	0	0	42.420.100	280.000	42.700.100	42.700.100
506	20102517	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 227 JAKARTA	SMP	40054136461	12.443.955	0	0	0	12.443.955	0	12.443.955	12.443.955
507	20102518	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 226 JAKARTA	SMP	40154135331	91.394.244	0	0	0	91.394.244	0	91.394.244	91.394.244
508	20102519	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 218 JAKARTA	SMP	40054136356	63.658.634	0	0	0	63.658.634	0	63.658.634	63.658.634
509	20102520	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 212 JAKARTA	SMP	40054136313	40.534.809	0	0	0	40.534.809	0	40.534.809	40.534.809
510	20102521	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 211 JAKARTA	SMP	40054135619	6.737.764	0	0	169.895	6.567.869	0	6.567.869	6.737.764
511	20102522	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 19 JAKARTA	SMP	40054135759	136.915.640	0	0	0	136.915.640	0	136.915.640	136.915.640
512	20102523	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 185 JAKARTA	SMP	11354135930	46.666.452	0	0	0	46.666.452	0	46.666.452	46.666.452
513	20102524	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 182 JAKARTA	SMP	40054136267	95.856.127	0	0	0	95.856.127	0	95.856.127	95.856.127
514	20102525	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 178 JAKARTA	SMP	41154136530	590.497.107	0	0	0	590.497.107	0	590.497.107	590.497.107
515	20102526	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 177 JAKARTA	SMP	41154136564	134.909.681	0	0	0	134.909.681	0	134.909.681	134.909.681
516	20102527	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 110 JAKARTA	SMP	41154136602	80.879.308	0	0	0	80.879.308	0	80.879.308	80.879.308
517	20102562	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 97 JAKARTA	SMA	40454123681	186.440.794	0	0	0	186.440.794	0	186.440.794	186.440.794
518	20102563	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 90 JAKARTA	SMA	40454124229	178.105.402	0	0	0	178.105.402	0	178.105.402	178.105.402
519	20102564	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 87 JAKARTA	SMA	40454124199	132.180.670	0	0	0	132.180.670	0	132.180.670	132.180.670
520	20102565	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 86 JAKARTA	SMA	40454124181	127.539.118	0	0	0	127.539.118	0	127.539.118	127.539.118
521	20102566	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 82 JAKARTA	SMA	40454123931	116.466.855	0	0	0	116.466.855	0	116.466.855	116.466.855
522	20102568	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 JAKARTA	SMA	40454124288	183.445.543	0	0	0	183.445.543	0	183.445.543	183.445.543
523	20102569	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 74 JAKARTA	SMA	40454123982	131.094.732	0	0	0	131.094.732	0	131.094.732	131.094.732
524	20102570	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 70 JAKARTA	SMA	40054123858	209.170.118	0	0	0	209.170.118	0	209.170.118	209.170.118
525	20102571	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 66 JAKARTA	SMA	40454123664	211.429.700	0	0	0	211.429.700	0	211.429.700	211.429.700
526	20102572	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 63 JAKARTA	SMA	32254124239	61.464.137	0	0	0	61.464.137	0	61.464.137	61.464.137
527	20102573	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 60 JAKARTA	SMA	40454124041	295.491.127	0	0	0	295.491.127	0	295.491.127	295.491.127
528	20102574	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 JAKARTA	SMA	40054123840	354.649.264	0	0	0	354.649.264	0	354.649.264	354.649.264
529	20102575	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 55 JAKARTA	SMA	40454124083	206.817.676	0	0	0	206.817.676	0	206.817.676	206.817.676
530	20102576	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI RAGUNAN JAKARTA	SMA	40454124130	178.836.383	0	0	0	178.836.383	0	178.836.383	178.836.383
531	20102578	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 15 JAKARTA	SMK	40454128330	137.895.691	0	0	0	137.895.691	0	137.895.691	137.895.691
532	20102579	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 JAKARTA	SMK	40454128267	34.453.747	0	0	0	34.453.747	0	34.453.747	34.453.747
533	20102580	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 41 JAKARTA	SMK	40454127881	2.223.303	0	0	0	2.223.303	0	2.223.303	2.223.303
534	20102581	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	SMK	40454129026	73.392.743	0	0	0	73.392.743	0	73.392.743	73.392.743
535	20102582	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 30 JAKARTA	SMK	40454128241	304.526.407	0	0	0	304.526.407	0	304.526.407	304.526.407
536	20102585	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 28 JAKARTA	SMK	40454127805	655.563.523	0	0	0	655.563.523	0	655.563.523	655.563.523
537	20102586	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 25 JAKARTA	SMK	40454128674	40.490.344	0	0	0	40.490.344	0	40.490.344	40.490.344
538	20102587	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	SMK	40454127791	20.579.640	0	0	0	20.579.640	0	20.579.640	20.579.640
539	20102589	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 18 JAKARTA	SMK	40454128496	212.933.040	0	0	0	212.933.040	0	212.933.040	212.933.040
540	20102592	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 49 JAKARTA	SMA	40454123702	207.625.842	0	0	0	207.625.842	0	207.625.842	207.625.842
541	20102597	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 JAKARTA	SMK	40454128755	112.651.226	0	0	0	112.651.226	0	112.651.226	112.651.226
542	20102598	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	SMK	40454128682	74.127.332	0	0	0	74.127.332	0	74.127.332	74.127.332
543	20102599	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 47 JAKARTA	SMK	40454128747	14.281.476	0	0	0	14.281.476	0	14.281.476	14.281.476
544	20102600	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 43 JAKARTA	SMK	40454128348	18.780.385	0	0	0	18.780.385	0	18.780.385	18.780.385
545	20102601	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	SMK	40454128704	144.214.700	0	0	0	144.214.700	0	144.214.700	144.214.700
546	20102602	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 29 JAKARTA	SMK	40454128305	495.858.794	0	0	35.000	495.823.794	0	495.823.794	495.858.794
547	20102742	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL SELATAN 08 JAKARTA	SD	41154109729	28.746.320	0	0	0	28.746.320	0	28.746.320	28.746.320
548	20102921	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL SELATAN 09 PAGI JAKARTA	SD	41154109737	23.703.627	0	0	0	23.703.627	0	23.703.627	23.703.627
549	20102943	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN TIGA 05 PAGI JAKARTA	SD	40054110489	34.633.822	0	0	0	34.633.822	0	34.633.822	34.633.822
550	20102944	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN TIGA 01 PAGI JAKARTA	SD	40054110527	15.019.861	0	0	0	15.019.861	0	15.019.861	15.019.861
551	20102956	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN TIGA 07 JAKARTA	SD	40054110535	38.802.819	0	0	0	38.802.819	0	38.802.819	38.802.819
552	20102958	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN TIGA 09 JAKARTA	SD	40054110497	35.991.756	0	0	0	35.991.756	0	35.991.756	35.991.756
553	20102975	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAGUSAN 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110977	34.507.886	0	0	0	34.507.886	0	34.507.886	34.507.886
554	20102976	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAGUSAN 02 PAGI JAKARTA	SD	40054110969	57.939	0	0	0	57.939	0	57.939	57.939
555	20102983	SEKOLAH DASAR NEGERI KARET 04 JAKARTA	SD	40254111911	21.250.547	0	0	0	21.250.547	0	21.250.547	21.250.547
556	20103022	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 10 JAKARTA	SD	40054108778	2.772.438	0	0	0	2.772.438	0	2.772.438	2.772.438
557	20103089	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 2 JAKARTA	SLB	40054121782	247.456.482	0	0	0	247.456.482	0	247.456.	

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SiLPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SiLPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SiLPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
563	20103118	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK TIMUR 05 PAGI JAKARTA	SD	40054110837	12.684.135	0	0	0	12.684.135	0	12.684.135	12.684.135
564	20103126	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPETE UTARA 01 PAGI JAKARTA	SD	40054109243	1.287.510	0	0	0	1.287.510	0	1.287.510	1.287.510
565	20103133	SEKOLAH DASAR NEGERI CIGANJUR 02 PAGI JAKARTA	SD	40054108638	571.300	0	0	0	571.300	0	571.300	571.300
566	20103134	SEKOLAH DASAR NEGERI BANGKA 01 PAGI JAKARTA	SD	40054110136	8.058.088	0	0	0	8.058.088	0	8.058.088	8.058.088
567	20103136	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 09 JAKARTA	SD	41154111472	12.099.467	0	0	0	12.099.467	0	12.099.467	12.099.467
568	20103137	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 08 JAKARTA	SD	41154111421	37.245.078	0	0	0	37.245.078	0	37.245.078	37.245.078
569	20103139	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 05 JAKARTA	SD	41154111464	711.502	0	0	0	711.502	0	711.502	711.502
570	20103140	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 04 JAKARTA	SD	41154111413	140.986.769	0	0	0	140.986.769	0	140.986.769	140.986.769
571	20103142	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 02 JAKARTA	SD	41154111448	32.303.562	0	0	0	32.303.562	0	32.303.562	32.303.562
572	20103143	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 01 JAKARTA	SD	41154111405	2.380.427	0	0	0	2.380.427	0	2.380.427	2.380.427
573	20103144	SEKOLAH DASAR NEGERI BANGKA 07 PAGI JAKARTA	SD	40054110179	39	0	0	0	39	0	39	39
574	20103146	SEKOLAH DASAR NEGERI BANGKA 05 PAGI JAKARTA	SD	40054110152	12.703.237	0	0	0	12.703.237	0	12.703.237	12.703.237
575	20103149	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 12 JAKARTA	SD	41154111481	21.966.951	0	0	0	21.966.951	0	21.966.951	21.966.951
576	20103151	SEKOLAH DASAR NEGERI CIGANJUR 01 PAGI JAKARTA	SD	40054108620	112.009.107	0	0	0	112.009.107	0	112.009.107	112.009.107
577	20103159	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 14 JAKARTA	SD	41154111499	53.859.246	0	0	0	53.859.246	0	53.859.246	53.859.246
578	20103161	SEKOLAH DASAR NEGERI BUKIT DURI 01 PAGI JAKARTA	SD	40254112160	385.045	0	0	0	385.045	0	385.045	385.045
579	20103163	SEKOLAH DASAR NEGERI BUKIT DURI 03 PAGI JAKARTA	SD	40254112178	29.692.340	0	0	0	29.692.340	0	29.692.340	29.692.340
580	20103256	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 99 JAKARTA	SMA	51154124601	200.744.159	0	0	0	200.744.159	0	200.744.159	200.744.159
581	20103257	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 98 JAKARTA	SMA	51154125348	109.633.666	0	0	0	109.633.666	0	109.633.666	109.633.666
582	20103258	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 93 JAKARTA	SMA	51154125089	369.826.172	0	0	0	369.826.172	0	369.826.172	369.826.172
583	20103278	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 91 JAKARTA	SMA	51254124862	100.130.772	0	0	0	100.130.772	0	100.130.772	100.130.772
584	20103279	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 JAKARTA	SMA	52354125171	82.019.731	0	0	0	82.019.731	0	82.019.731	82.019.731
585	20103280	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 36 JAKARTA	SMA	50054125377	116.646.165	0	0	0	116.646.165	0	116.646.165	116.646.165
586	20103281	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 31 JAKARTA	SMA	50054125245	569.898.454	0	0	0	569.898.454	0	569.898.454	569.898.454
587	20103282	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 22 JAKARTA	SMA	50054125237	86.678.238	0	0	0	86.678.238	0	86.678.238	86.678.238
588	20103283	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 21 JAKARTA	SMA	50054125407	57.233.594	0	0	0	57.233.594	0	57.233.594	57.233.594
589	20103284	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 14 JAKARTA	SMA	50054125059	2.141.577	0	0	0	2.141.577	0	2.141.577	2.141.577
590	20103285	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 12 JAKARTA	SMA	50054124745	79.201.221	0	0	0	79.201.221	0	79.201.221	79.201.221
591	20103286	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 113 JAKARTA	SMA	51154124571	268.714.732	0	0	0	268.714.732	0	268.714.732	268.714.732
592	20103287	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 JAKARTA	SMA	12354124471	132.574.590	0	0	0	132.574.590	0	132.574.590	132.574.590
593	20103288	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 107 JAKARTA	SMA	12354124447	516.905.438	0	0	4.023.521	512.881.917	0	512.881.917	516.905.438
594	20103289	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 106 JAKARTA	SMA	51154125356	103.535.534	0	0	0	103.535.534	0	103.535.534	103.535.534
595	20103290	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 105 JAKARTA	SMA	51154124635	398.889.313	0	0	0	398.889.313	0	398.889.313	398.889.313
596	20103291	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 104 JAKARTA	SMA	51154125321	310.958.820	0	0	0	310.958.820	0	310.958.820	310.958.820
597	20103292	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 103 JAKARTA	SMA	50354124774	432.660.645	0	0	0	432.660.645	0	432.660.645	432.660.645
598	20103293	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 102 JAKARTA	SMA	12354124412	323.490.265	0	0	0	323.490.265	0	323.490.265	323.490.265
599	20103294	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 100 JAKARTA	SMA	50054124958	246.312.435	0	0	0	246.312.435	0	246.312.435	246.312.435
600	20103296	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 39 JAKARTA	SMA	50254125268	198.773.493	0	0	148.500	198.624.993	0	198.624.993	198.773.493
601	20103297	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 42 JAKARTA	SMA	50054125130	178.691.629	0	0	0	178.691.629	0	178.691.629	178.691.629
602	20103298	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 44 JAKARTA	SMA	50354124782	166.371.333	0	0	0	166.371.333	0	166.371.333	166.371.333
603	20103299	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 89 JAKARTA	SMA	12354124421	101.639.625	0	0	0	101.639.625	0	101.639.625	101.639.625
604	20103300	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 88 JAKARTA	SMA	51154125275	63.681.961	0	0	0	63.681.961	0	63.681.961	63.681.961
605	20103301	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 81 JAKARTA	SMA	51254125117	330.114.862	0	0	0	330.114.862	0	330.114.862	330.114.862
606	20103302	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 76 JAKARTA	SMA	50354124383	108.672.619	0	0	0	108.672.619	0	108.672.619	108.672.619
607	20103303	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 71 JAKARTA	SMA	51254124722	205.976.729	0	0	0	205.976.729	0	205.976.729	205.976.729
608	20103304	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 67 JAKARTA	SMA	51354125140	235.352.069	0	0	0	235.352.069	0	235.352.069	235.352.069
609	20103305	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 64 JAKARTA	SMA	51154124546	190.842.533	0	0	0	190.842.533	0	190.842.533	190.842.533
610	20103306	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 62 JAKARTA	SMA	51154125097	104.253.006	0	0	0	104.253.006	0	104.253.006	104.253.006
611	20103307	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 61 JAKARTA	SMA	51254124803	110.455.261	0	0	0	110.455.261	0	110.455.261	110.455.261
612	20103308	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 59 JAKARTA	SMA	50154124751	69.384.717	0	0	0	69.384.717	0	69.384.717	69.384.717
613	20103309	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 58 JAKARTA	SMA	50254124610	176.390.611	0	0	0	176.390.611	0	176.390.611	176.390.611
614	20103310	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 54 JAKARTA	SMA	50054125008	324.273.546	0	0	0	324.273.546	0	324.273.546	324.273.546
615	20103311	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 53 JAKARTA	SMA	50154124964	131.062.996	0	0	0	131.062.996	0	131.062.996	131.062.996
616	20103312	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 51 JAKARTA	SMA	51354125034	364.236.065	0	0	0	364.236.065	0	364.236.065	364.236.065
617	20103313	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 50 JAKARTA	SMA	50054124991	354.062.273	0	0	0	354.062.273	0	354.062.273	354.062.273
618	20103314	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 48 JAKARTA	SMA	51154125186	393.288.648	0	0	0	393.288.648	0	393.288.648	393.288.648
619	20103320	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 20 JAKARTA	SD	50354113144	6.807.719	0	0	0	6.807.719	0	6.807.719	6.807.719
620	20103326	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 13 JAKARTA	SD	50354113039	43.067.915	0	0	0	43.067.915	0	43.067.915	43.067.915
621	20103328	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 11 JAKARTA	SD	503541								

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
626	20103346	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 24 PAGI JAKARTA	SD	50354113055	3.025.889	0	0	0	3.025.889	0	3.025.889	3.025.889
627	20103348	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAMANGUN 09 JAKARTA	SD	50154118433	14.846.293	0	0	0	14.846.293	0	14.846.293	14.846.293
628	20103351	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAMANGUN 05 JAKARTA	SD	50154118468	16.369.811	0	0	1.717.855	14.651.956	0	14.651.956	16.369.811
629	20103354	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAMANGUN 02 JAKARTA	SD	50154118450	16.575.077	0	0	0	16.575.077	0	16.575.077	16.575.077
630	20103356	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAMANGUN 01 JAKARTA	SD	50154118441	3.408.891	0	0	1.621.521	1.787.370	0	1.787.370	3.408.891
631	20103358	SEKOLAH DASAR NEGERI RAMBUTAN 06 JAKARTA	SD	51154114087	1.512	0	0	0	1.512	0	1.512	1.512
632	20103359	SEKOLAH DASAR NEGERI RAMBUTAN 05 JAKARTA	SD	51154114079	1.621.358	0	0	0	1.621.358	0	1.621.358	1.621.358
633	20103360	SEKOLAH DASAR NEGERI RAMBUTAN 03 JAKARTA	SD	51154114061	106	0	0	0	106	0	106	106
634	20103361	SEKOLAH DASAR NEGERI RAMBUTAN 02 JAKARTA	SD	51154114052	6.071.515	0	0	0	6.071.515	0	6.071.515	6.071.515
635	20103362	SEKOLAH DASAR NEGERI RAMBUTAN 01 JAKARTA	SD	51154114044	50.809.513	0	0	0	50.809.513	0	50.809.513	50.809.513
636	20103364	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 05 JAKARTA	SD	50354113080	3.810.363	0	0	48.951	3.761.412	0	3.761.412	3.810.363
637	20103365	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 04 JAKARTA	SD	50354113021	32.537.386	0	0	0	32.537.386	0	32.537.386	32.537.386
638	20103371	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN TIMUR 18 JAKARTA	SD	50154118336	20.864.368	0	0	0	20.864.368	0	20.864.368	20.864.368
639	20103374	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN TIMUR 13 JAKARTA	SD	50154118328	50.630.676	0	0	0	50.630.676	0	50.630.676	50.630.676
640	20103376	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN TIMUR 11 JAKARTA	SD	50154118310	14.325.830	0	0	0	14.325.830	0	14.325.830	14.325.830
641	20103377	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN TIMUR 10 PAGI JAKARTA	SD	50154118301	5.563.493	0	0	0	5.563.493	0	5.563.493	5.563.493
642	20103380	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN TIMUR 05 PAGI JAKARTA	SD	50154118298	619.368	0	0	0	619.368	0	619.368	619.368
643	20103382	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK RANGGON 02 JAKARTA	SD	51154113676	31.954.712	0	0	0	31.954.712	0	31.954.712	31.954.712
644	20103383	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK RANGGON 03 PAGI JAKARTA	SD	51154113684	185.837.271	0	0	0	185.837.271	0	185.837.271	185.837.271
645	20103384	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK RANGGON 04 JAKARTA	SD	51154113692	55.100.900	0	0	0	55.100.900	0	55.100.900	55.100.900
646	20103385	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 03 PAGI JAKARTA	SD	50354113071	6.332.661	0	0	162.000	6.170.661	0	6.170.661	6.332.661
647	20103386	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 02 JAKARTA	SD	50354113063	46.798.083	0	0	0	46.798.083	0	46.798.083	46.798.083
648	20103387	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGEBANG 01 JAKARTA	SD	50354113012	6.183.906	0	0	0	6.183.906	0	6.183.906	6.183.906
649	20103391	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGADUNG 07 JAKARTA	SD	50154118395	30.724.116	0	0	0	30.724.116	0	30.724.116	30.724.116
650	20103392	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGADUNG 05 JAKARTA	SD	50154118387	781.832	0	0	0	781.832	0	781.832	781.832
651	20103394	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGADUNG 03 JAKARTA	SD	50154118361	27.456.074	0	0	0	27.456.074	0	27.456.074	27.456.074
652	20103396	SEKOLAH DASAR NEGERI PULOGADUNG 01 JAKARTA	SD	50154118379	134.037.328	0	0	0	134.037.328	0	134.037.328	134.037.328
653	20103397	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK RANGGON 01 PAGI JAKARTA	SD	51154113668	11.115.526	0	0	0	11.115.526	0	11.115.526	11.115.526
654	20103418	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU SELATAN 20 PAGI JAKARTA	SD	50054117404	26.721.023	0	0	0	26.721.023	0	26.721.023	26.721.023
655	20103419	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU SELATAN 18 PAGI JAKARTA	SD	50054117293	35.287.135	0	0	0	35.287.135	0	35.287.135	35.287.135
656	20103439	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU SELATAN 17 PAGI JAKARTA	SD	50054117382	278.708	0	0	0	278.708	0	278.708	278.708
657	20103441	SEKOLAH DASAR NEGERI TENGAH 01 PAGI JAKARTA	SD	51154116292	3.404.634	0	0	0	3.404.634	0	3.404.634	3.404.634
658	20103445	SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 08 PAGI JAKARTA	SD	51154114176	4.524.460	0	0	0	4.524.460	0	4.524.460	4.524.460
659	20103446	SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 07 PAGI JAKARTA	SD	51154114168	5.344.494	0	0	0	5.344.494	0	5.344.494	5.344.494
660	20103447	SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 06 PAGI JAKARTA	SD	51154114150	15.011.871	0	0	0	15.011.871	0	15.011.871	15.011.871
661	20103448	SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 05 PAGI JAKARTA	SD	51154114141	9.608.631	0	0	0	9.608.631	0	9.608.631	9.608.631
662	20103449	SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 04 PAGI JAKARTA	SD	51154114133	7.141.118	0	0	0	7.141.118	0	7.141.118	7.141.118
663	20103460	SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 03 PAGI JAKARTA	SD	51154114125	14.855.207	0	0	0	14.855.207	0	14.855.207	14.855.207
664	20103461	SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 02 PAGI JAKARTA	SD	51154114117	12.331.032	0	0	0	12.331.032	0	12.331.032	12.331.032
665	20103464	SEKOLAH DASAR NEGERI SETU 02 JAKARTA	SD	51154113714	110.114.885	0	0	0	110.114.885	0	110.114.885	110.114.885
666	20103465	SEKOLAH DASAR NEGERI SETU 01 JAKARTA	SD	51154113706	152.100.245	0	0	0	152.100.245	0	152.100.245	152.100.245
667	20103469	SEKOLAH DASAR NEGERI TENGAH 03 PAGI JAKARTA	SD	51154116306	15.649.116	0	0	0	15.649.116	0	15.649.116	15.649.116
668	20103475	SEKOLAH DASAR NEGERI UJUNG MENTENG 07 PAGI JAKARTA	SD	50354113250	3.480.938	0	0	0	3.480.938	0	3.480.938	3.480.938
669	20103478	SEKOLAH DASAR NEGERI UJUNG MENTENG 03 JAKARTA	SD	50354113241	22.617.237	0	0	0	22.617.237	0	22.617.237	22.617.237
670	20103479	SEKOLAH DASAR NEGERI UJUNG MENTENG 02 JAKARTA	SD	50354113268	31.781.439	0	0	0	31.781.439	0	31.781.439	31.781.439
671	20103483	SEKOLAH DASAR NEGERI TENGAH 08 PAGI JAKARTA	SD	51154116349	5.410.532	0	0	0	5.410.532	0	5.410.532	5.410.532
672	20103484	SEKOLAH DASAR NEGERI TENGAH 07 PAGI JAKARTA	SD	51154116331	47.243.015	0	0	0	47.243.015	0	47.243.015	47.243.015
673	20103485	SEKOLAH DASAR NEGERI TENGAH 06 PAGI JAKARTA	SD	51154116322	3.406.216	0	0	0	3.406.216	0	3.406.216	3.406.216
674	20103486	SEKOLAH DASAR NEGERI TENGAH 05 PAGI JAKARTA	SD	51154116314	44.132.398	0	0	0	44.132.398	0	44.132.398	44.132.398
675	20103489	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 158 JAKARTA	SMP	50054139181	18.060.307	0	0	0	18.060.307	0	18.060.307	18.060.307
676	20103507	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 102 JAKARTA	SMP	51154139012	8.182.374	0	0	0	8.182.374	0	8.182.374	8.182.374
677	20103508	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 103 JAKARTA	SMP	50254138971	10.509.439	0	0	0	10.509.439	0	10.509.439	10.509.439
678	20103509	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 157 JAKARTA	SMP	51154137494	135.164.576	0	0	0	135.164.576	0	135.164.576	135.164.576
679	20103510	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 150 JAKARTA	SMP	51354138578	93.484.958	0	0	0	93.484.958	0	93.484.958	93.484.958
680	20103511	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 149 JAKARTA	SMP	50054138223	7.769.176	0	0	0	7.769.176	0	7.769.176	7.769.176
681	20103512	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 148 JAKARTA	SMP	50154138329	87.423.125	0	0	0	87.423.125	0	87.423.125	87.423.125
682	20103513	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 147 JAKARTA	SMP	51154137630	21.688.889	0	0	0	21.688.889	0	21.688.889	21.688.889
683	20103514	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 146 JAKARTA	SMP	12254137338	38.355.056	0	0	0	38.355.056	0	38.355.056	38.355.056
684	20103515	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 144 JAKARTA	SMP	12254136994	29.650.699	0	0	0	29.650.699	0	29.650.699	29.650.699
685	20103516	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 JAKARTA	SMP	50054138185	62.025.888	0	0	0	62.025.888	0	62.025.888	62.025.888
686	20103517	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 139 JAKARTA	SMP									

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SiLPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SiLPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SiLPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
689	20103520	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 128 JAKARTA	SMP	51254138685	3.700.105	0	0	0	3.700.105	0	3.700.105	3.700.105
690	20103521	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 126 JAKARTA	SMP	51154138458	322.145.765	0	0	0	322.145.765	0	322.145.765	322.145.765
691	20103522	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 117 JAKARTA	SMP	51254137972	60.105.123	0	0	0	60.105.123	0	60.105.123	60.105.123
692	20103523	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 109 JAKARTA	SMP	51254138651	76.073.179	0	0	0	76.073.179	0	76.073.179	76.073.179
693	20103524	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 106 JAKARTA	SMP	51154137672	65.940.773	0	0	0	65.940.773	0	65.940.773	65.940.773
694	20103564	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 160 JAKARTA	SMP	51154137419	26.924.630	0	0	0	26.924.630	0	26.924.630	26.924.630
695	20103565	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 99 JAKARTA	SMP	50054139211	128.031.564	0	0	0	128.031.564	750.000	128.781.564	128.781.564
696	20103568	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 281 JAKARTA	SMP	51154138598	151.926.481	0	0	0	151.926.481	0	151.926.481	151.926.481
697	20103569	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 275 JAKARTA	SMP	51154138733	53.576.199	0	0	0	53.576.199	0	53.576.199	53.576.199
698	20103570	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 272 JAKARTA	SMP	51354137521	129.421.339	0	0	0	129.421.339	0	129.421.339	129.421.339
699	20103571	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 27 JAKARTA	SMP	50154137870	13.213.816	0	0	0	13.213.816	0	13.213.816	13.213.816
700	20103572	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 268 JAKARTA	SMP	51154138725	129.720.937	0	0	0	129.720.937	0	129.720.937	129.720.937
701	20103573	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 263 JAKARTA	SMP	51154138521	2.714.868	0	0	0	2.714.868	0	2.714.868	2.714.868
702	20103574	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 262 JAKARTA	SMP	12254137079	93.051.011	0	0	0	93.051.011	0	93.051.011	93.051.011
703	20103575	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 26 JAKARTA	SMP	50054138371	142.389.146	0	0	0	142.389.146	0	142.389.146	142.389.146
704	20103576	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 259 JAKARTA	SMP	51154137389	78.738.704	0	0	2.222.663	76.516.041	1.010.995	77.527.036	79.749.699
705	20103577	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 258 JAKARTA	SMP	51154137656	290.724.301	0	0	0	290.724.301	0	290.724.301	290.724.301
706	20103578	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 257 JAKARTA	SMP	51154137796	1.741.293	0	0	0	1.741.293	0	1.741.293	1.741.293
707	20103579	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 256 JAKARTA	SMP	50354137060	115.563.432	0	0	0	115.563.432	0	115.563.432	115.563.432
708	20103580	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 255 JAKARTA	SMP	50354137868	163.246.159	0	0	0	163.246.159	0	163.246.159	163.246.159
709	20103581	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 252 JAKARTA	SMP	51254138073	167.366.725	0	0	0	167.366.725	0	167.366.725	167.366.725
710	20103582	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 251 JAKARTA	SMP	51154138989	591.984	0	0	0	591.984	0	591.984	591.984
711	20103584	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 36 JAKARTA	SMP	50054138304	8.797.105	0	0	0	8.797.105	0	8.797.105	8.797.105
712	20103586	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 97 JAKARTA	SMP	50054138878	165.042.741	0	0	0	165.042.741	0	165.042.741	165.042.741
713	20103587	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 92 JAKARTA	SMP	50054139149	192.904.513	0	0	0	192.904.513	0	192.904.513	192.904.513
714	20103588	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 91 JAKARTA	SMP	51154139098	62.598.272	0	0	0	62.598.272	0	62.598.272	62.598.272
715	20103589	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 90 JAKARTA	SMP	50154137101	182.135.133	0	0	0	182.135.133	0	182.135.133	182.135.133
716	20103590	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 JAKARTA	SMP	51154137745	21.072.678	0	0	0	21.072.678	0	21.072.678	21.072.678
717	20103591	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 81 JAKARTA	SMP	51154137532	61.282.392	0	0	0	61.282.392	0	61.282.392	61.282.392
718	20103592	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 80 JAKARTA	SMP	51154138709	87.034.383	0	0	0	87.034.383	0	87.034.383	87.034.383
719	20103593	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 74 JAKARTA	SMP	50054139343	23.318.935	0	0	0	23.318.935	0	23.318.935	23.318.935
720	20103594	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 JAKARTA	SMP	50054138894	54.793.905	0	0	0	54.793.905	0	54.793.905	54.793.905
721	20103595	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 62 JAKARTA	SMP	50054138398	128.153.047	0	0	350.020	127.803.027	0	127.803.027	128.153.047
722	20103596	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 JAKARTA	SMP	50154137918	95.040.488	0	0	0	95.040.488	0	95.040.488	95.040.488
723	20103597	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 52 JAKARTA	SMP	50054138347	40.462.063	0	0	0	40.462.063	0	40.462.063	40.462.063
724	20103598	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 51 JAKARTA	SMP	51254138006	129.375.754	0	0	0	129.375.754	0	129.375.754	129.375.754
725	20103599	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 50 JAKARTA	SMP	51154138610	3.486.138	0	0	0	3.486.138	0	3.486.138	3.486.138
726	20103601	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 44 JAKARTA	SMP	50054139262	77.318.794	0	0	0	77.318.794	0	77.318.794	77.318.794
727	20103602	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 25 JAKARTA	SMP	50054138339	64.931.034	0	0	0	64.931.034	0	64.931.034	64.931.034
728	20103603	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 246 JAKARTA	SMP	51154137516	35.480.779	0	0	0	35.480.779	0	35.480.779	35.480.779
729	20103604	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 199 JAKARTA	SMP	50354138147	161.402.274	0	0	0	161.402.274	0	161.402.274	161.402.274
730	20103605	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 198 JAKARTA	SMP	50154137900	58.167.488	0	0	0	58.167.488	0	58.167.488	58.167.488
731	20103606	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 196 JAKARTA	SMP	51154137605	11.841.863	0	0	0	11.841.863	0	11.841.863	11.841.863
732	20103607	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 195 JAKARTA	SMP	50354137850	109.236.350	0	0	0	109.236.350	0	109.236.350	109.236.350
733	20103608	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 194 JAKARTA	SMP	51254137841	85.464.575	0	0	0	85.464.575	0	85.464.575	85.464.575
734	20103609	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 193 JAKARTA	SMP	12354137344	39.775.801	0	0	0	39.775.801	0	39.775.801	39.775.801
735	20103610	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 192 JAKARTA	SMP	51254137506	5.600.661	0	0	0	5.600.661	0	5.600.661	5.600.661
736	20103611	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 188 JAKARTA	SMP	51154137788	104.644.641	0	0	0	104.644.641	0	104.644.641	104.644.641
737	20103612	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 184 JAKARTA	SMP	51154139080	106.487.827	0	0	0	106.487.827	0	106.487.827	106.487.827
738	20103614	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 179 JAKARTA	SMP	51154139047	68.694.419	0	0	0	68.694.419	0	68.694.419	68.694.419
739	20103615	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 174 JAKARTA	SMP	51154137818	13.136.343	0	0	0	13.136.343	0	13.136.343	13.136.343
740	20103616	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 172 JAKARTA	SMP	50354137256	139.626.499	0	0	0	139.626.499	0	139.626.499	139.626.499
741	20103617	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 171 JAKARTA	SMP	51154137770	236.285.768	0	0	1.366.244	234.919.524	12.828.000	247.747.524	249.113.768
742	20103618	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 168 JAKARTA	SMP	50354137001	73.290.062	0	0	0	73.290.062	0	73.290.062	73.290.062
743	20103619	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 167 JAKARTA	SMP	50154137837	91.932.123	0	0	0	91.932.123	0	91.932.123	91.932.123
744	20103620	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 20 JAKARTA	SMP	51154138580	24.234.823	0	0	0	24.234.823	0	24.234.823	24.234.823
745	20103621	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 202 JAKARTA	SMP	51254137964	150.670.404	0	0	0	150.670.404	0	150.670.404	150.670.404
746	20103622	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 203 JAKARTA	SMP	51154139055	15.844.766	0	0	0	15.844.766	0	15.844.766	15.844.766
747	20103623	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 243 JAKARTA</										

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SiLPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SiLPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SiLPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
752	20103628	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 233 JAKARTA	SMP	51154137648	25.763.291	0	0	0	25.763.291	0	25.763.291	25.763.291
753	20103629	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 232 JAKARTA	SMP	50054139254	56.377.022	0	0	0	56.377.022	0	56.377.022	56.377.022
754	20103630	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 230 JAKARTA	SMP	51154137613	13.831.494	0	0	0	13.831.494	0	13.831.494	13.831.494
755	20103631	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 223 JAKARTA	SMP	51154139021	67.833.448	0	0	0	67.833.448	0	67.833.448	67.833.448
756	20103632	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 222 JAKARTA	SMP	51154137427	37.330.963	0	0	0	37.330.963	0	37.330.963	37.330.963
757	20103633	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 217 JAKARTA	SMP	51154138920	157.266.035	0	0	0	157.266.035	0	157.266.035	157.266.035
758	20103634	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 214 JAKARTA	SMP	51354138691	120.796.278	0	0	0	120.796.278	0	120.796.278	120.796.278
759	20103635	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 213 JAKARTA	SMP	50354137957	280.388.718	0	0	0	280.388.718	0	280.388.718	280.388.718
760	20103636	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 210 JAKARTA	SMP	51154137699	3.123.196	0	0	0	3.123.196	0	3.123.196	3.123.196
761	20103637	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 209 JAKARTA	SMP	51154138547	165.535.993	0	0	0	165.535.993	0	165.535.993	165.535.993
762	20103638	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 208 JAKARTA	SMP	51154137681	17.625.958	0	0	0	17.625.958	0	17.625.958	17.625.958
763	20103639	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 165 JAKARTA	SMP	50154137993	153.455.416	0	0	0	153.455.416	1.500.000	154.955.416	154.955.416
764	20103778	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 JAKARTA	SMK	50054130834	824.788.779	0	0	0	824.788.779	0	824.788.779	824.788.779
765	20103779	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 58 JAKARTA	SMK	51154129416	463.922.512	0	0	10.393.295	453.529.217	9.940.755	463.469.972	473.863.267
766	20103780	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 52 JAKARTA	SMK	51154129602	45.511.184	0	0	0	45.511.184	0	45.511.184	45.511.184
767	20103781	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	SMK	51154129408	47.530.766	0	0	9.186.051	38.344.715	2.900	38.347.615	47.533.666
768	20103782	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 50 JAKARTA	SMK	50054130192	82.851.931	0	0	0	82.851.931	0	82.851.931	82.851.931
769	20103783	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 JAKARTA	SMK	50054130575	212.911.253	0	0	0	212.911.253	0	212.911.253	212.911.253
770	20103784	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 48 JAKARTA	SMK	50354129831	116.739.017	0	0	0	116.739.017	0	116.739.017	116.739.017
771	20103785	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 46 JAKARTA	SMK	50054130141	693.265.237	0	0	0	693.265.237	0	693.265.237	693.265.237
772	20103786	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 40 JAKARTA	SMK	50054130605	284.209.013	0	0	0	284.209.013	0	284.209.013	284.209.013
773	20103787	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	SMK	50154130930	263.080.163	0	0	0	263.080.163	0	263.080.163	263.080.163
774	20103788	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	SMK	50054129399	109.460.539	0	0	0	109.460.539	0	109.460.539	109.460.539
775	20103790	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 22 JAKARTA	SMK	51154130724	19.784.245	0	0	0	19.784.245	0	19.784.245	19.784.245
776	20103791	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 10 JAKARTA	SMK	50054130281	170.151.472	0	0	0	170.151.472	0	170.151.472	170.151.472
777	20103794	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	50154118280	16.828.898	0	0	0	16.828.898	0	16.828.898	16.828.898
778	20104104	SEKOLAH DASAR NEGERI KAYU PUTIH 03 JAKARTA	SD	50154118221	30.039.789	0	0	540.000	29.499.789	0	29.499.789	30.039.789
779	20104105	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA KAUM 15 PAGI JAKARTA	SD	50154118191	2.848.186	0	0	2.847.972	214	0	214	2.848.186
780	20104106	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA KAUM 14 PAGI JAKARTA	SD	50154118182	17.871.562	0	0	0	17.871.562	0	17.871.562	17.871.562
781	20104108	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA KAUM 11 PAGI JAKARTA	SD	50154118131	13.766.130	0	0	0	13.766.130	0	13.766.130	13.766.130
782	20104112	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA KAUM 07 JAKARTA	SD	50154118123	10.455.604	0	0	0	10.455.604	0	10.455.604	10.455.604
783	20104113	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA KAUM 06 JAKARTA	SD	50154118174	16.779.484	0	0	0	16.779.484	0	16.779.484	16.779.484
784	20104114	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA KAUM 05 JAKARTA	SD	50154118166	10.422.381	0	0	0	10.422.381	0	10.422.381	10.422.381
785	20104116	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA KAUM 03 PAGI JAKARTA	SD	50154118158	4.634.167	0	0	0	4.634.167	0	4.634.167	4.634.167
786	20104118	SEKOLAH DASAR NEGERI KAYU PUTIH 08 PAGI JAKARTA	SD	50154118239	2.001.615	0	0	0	2.001.615	0	2.001.615	2.001.615
787	20104119	SEKOLAH DASAR NEGERI KAYU PUTIH 09 PAGI JAKARTA	SD	50154118247	1.705.313	0	0	0	1.705.313	0	1.705.313	1.705.313
788	20104122	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 14 PAGI JAKARTA	SD	51154116802	1.237.247	0	0	0	1.237.247	0	1.237.247	1.237.247
789	20104124	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 13 PAGI JAKARTA	SD	51154116799	43.492.091	0	0	0	43.492.091	0	43.492.091	43.492.091
790	20104125	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 12 PAGI JAKARTA	SD	51154116781	6.113.594	0	0	0	6.113.594	0	6.113.594	6.113.594
791	20104126	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 11 PAGI JAKARTA	SD	51154116772	30.636.622	0	0	1.193.328	29.443.294	0	29.443.294	30.636.622
792	20104128	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 09 PAGI JAKARTA	SD	51154116764	14.972.915	0	0	0	14.972.915	0	14.972.915	14.972.915
793	20104130	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 07 PAGI JAKARTA	SD	51154116756	921.962	0	0	0	921.962	0	921.962	921.962
794	20104132	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 05 PAGI JAKARTA	SD	51354116744	2.204.450	0	0	0	2.204.450	0	2.204.450	2.204.450
795	20104133	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 04 PAGI JAKARTA	SD	51354116736	29.277.180	0	0	0	29.277.180	0	29.277.180	29.277.180
796	20104134	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 03 PAGI JAKARTA	SD	51354116728	1.032.630	0	0	0	1.032.630	0	1.032.630	1.032.630
797	20104135	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON PALA 02 PAGI JAKARTA	SD	51154116713	6.973.734	0	0	0	6.973.734	0	6.973.734	6.973.734
798	20104138	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA KAUM 01 JAKARTA	SD	50154118140	11.403.332	0	0	19.200	11.384.132	0	11.384.132	11.403.332
799	20104139	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA 15 PAGI JAKARTA	SD	50354112849	35.374.961	0	0	0	35.374.961	0	35.374.961	35.374.961
800	20104143	SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUH 09 PAGI JAKARTA	SD	51354116272	2.575.593	0	0	0	2.575.593	0	2.575.593	2.575.593
801	20104144	SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUH 08 PAGI JAKARTA	SD	51154116268	693.905	0	0	0	693.905	0	693.905	693.905
802	20104147	SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUH 05 PAGI JAKARTA	SD	51154116250	337.652	0	0	0	337.652	0	337.652	337.652
803	20104148	SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUH 04 JAKARTA	SD	51354116248	458.016	0	0	0	458.016	0	458.016	458.016
804	2010415											

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SiLPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SiLPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SiLPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
815	20104174	SEKOLAH DASAR NEGERI JATI 05 PAGI JAKARTA	SD	50154118069	2.204.582	0	0	0	2.204.582	0	2.204.582	2.204.582
816	20104175	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 14 PAGI JAKARTA	SD	51154113935	18.986.891	0	0	0	18.986.891	0	18.986.891	18.986.891
817	20104176	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA DUA WETAN 01 PAGI JAKARTA	SD	51154113986	11.751.312	0	0	0	11.751.312	0	11.751.312	11.751.312
818	20104178	SEKOLAH DASAR NEGERI MUNJUL 01 PAGI JAKARTA	SD	51154113633	141.556.900	0	0	0	141.556.900	0	141.556.900	141.556.900
819	20104181	SEKOLAH DASAR NEGERI MAKASAR 08 PAGI JAKARTA	SD	51154116888	20.442.096	0	0	0	20.442.096	0	20.442.096	20.442.096
820	20104182	SEKOLAH DASAR NEGERI MAKASAR 07 PAGI JAKARTA	SD	51154116870	19.153.566	0	0	0	19.153.566	0	19.153.566	19.153.566
821	20104183	SEKOLAH DASAR NEGERI MAKASAR 06 PAGI JAKARTA	SD	51154116861	6.939	0	0	0	6.939	0	6.939	6.939
822	20104184	SEKOLAH DASAR NEGERI MAKASAR 05 PAGI JAKARTA	SD	51154116853	69.499	0	0	0	69.499	0	69.499	69.499
823	20104186	SEKOLAH DASAR NEGERI MAKASAR 03 PAGI JAKARTA	SD	51154116845	5.882.540	0	0	0	5.882.540	0	5.882.540	5.882.540
824	20104187	SEKOLAH DASAR NEGERI MAKASAR 02 PAGI JAKARTA	SD	51154116837	11.667.489	0	0	0	11.667.489	0	11.667.489	11.667.489
825	20104192	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 13 JAKARTA	SD	51154113617	21.568.694	0	0	0	21.568.694	0	21.568.694	21.568.694
826	20104193	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 12 PAGI JAKARTA	SD	51154113609	3.555.667	0	0	0	3.555.667	0	3.555.667	3.555.667
827	20104195	SEKOLAH DASAR NEGERI UJUNG MENTENG 04 PAGI JAKARTA	SD	50354113276	572	0	0	0	572	0	572	572
828	20104197	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANG RANTI 09 PAGI JAKARTA	SD	51154116985	103.376.581	0	0	0	103.376.581	0	103.376.581	103.376.581
829	20104199	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANG RANTI 07 PAGI JAKARTA	SD	51354116965	644.298	0	0	0	644.298	0	644.298	644.298
830	20104201	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANG RANTI 05 PAGI JAKARTA	SD	51154116951	1.125.129	0	0	0	1.125.129	0	1.125.129	1.125.129
831	20104202	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANG RANTI 04 PAGI JAKARTA	SD	51154116942	5.823	0	0	0	5.823	0	5.823	5.823
832	20104204	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANG RANTI 02 JAKARTA	SD	51154116934	13.751.998	0	0	0	13.751.998	0	13.751.998	13.751.998
833	20104205	SEKOLAH DASAR NEGERI PENGKILINGAN 03 PAGI JAKARTA	SD	50354112920	235.683	0	0	0	235.683	0	235.683	235.683
834	20104206	SEKOLAH DASAR NEGERI PENGKILINGAN 09 PAGI JAKARTA	SD	50354112962	18.109.855	0	0	0	18.109.855	0	18.109.855	18.109.855
835	20104209	SEKOLAH DASAR NEGERI PENGKILINGAN 06 PETANG JAKARTA	SD	50354112954	3.030.041	0	0	0	3.030.041	0	3.030.041	3.030.041
836	20104212	SEKOLAH DASAR NEGERI PENGKILINGAN 01 JAKARTA	SD	50354112911	11.821.324	0	0	557.913	11.263.411	0	11.263.411	11.821.324
837	20104213	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 11 PAGI JAKARTA	SD	51154113595	11.082.959	0	0	0	11.082.959	0	11.082.959	11.082.959
838	20104218	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 11 JAKARTA	SD	51354116400	12.762.327	0	0	0	12.762.327	0	12.762.327	12.762.327
839	20104221	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 07 JAKARTA	SD	51354116396	42.670.829	0	0	0	42.670.829	0	42.670.829	42.670.829
840	20104226	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 03 JAKARTA	SD	51354116388	7.187.113	0	0	0	7.187.113	0	7.187.113	7.187.113
841	20104227	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 02 PAGI JAKARTA	SD	51154116373	4.501.830	0	0	0	4.501.830	0	4.501.830	4.501.830
842	20104228	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 01 PAGI JAKARTA	SD	51354116361	24.800.594	0	0	0	24.800.594	0	24.800.594	24.800.594
843	20104229	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA DUA WETAN 06 PAGI JAKARTA	SD	51154114028	5.586.571	0	0	0	5.586.571	0	5.586.571	5.586.571
844	20104232	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 16 PAGI JAKARTA	SD	51154116411	14.306.484	0	0	0	14.306.484	0	14.306.484	14.306.484
845	20104233	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 18 PAGI JAKARTA	SD	51154116420	4.883.366	0	0	0	4.883.366	0	4.883.366	4.883.366
846	20104235	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 19 PAGI JAKARTA	SD	51154116438	5.770.303	0	0	0	5.770.303	0	5.770.303	5.770.303
847	20104237	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 08 PAGI JAKARTA	SD	51154113579	3.023.568	0	0	0	3.023.568	0	3.023.568	3.023.568
848	20104239	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 06 PAGI JAKARTA	SD	51154113561	771.543	0	0	0	771.543	0	771.543	771.543
849	20104240	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 05 PAGI JAKARTA	SD	51154113552	2.071.735	0	0	0	2.071.735	0	2.071.735	2.071.735
850	20104241	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 04 PAGI JAKARTA	SD	51154113544	57.199.652	0	0	0	57.199.652	0	57.199.652	57.199.652
851	20104242	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 03 JAKARTA	SD	51154113536	9.166.615	0	0	219.780	8.946.835	0	8.946.835	9.166.615
852	20104244	SEKOLAH DASAR NEGERI LUBANG BUAYA 01 JAKARTA	SD	51154113528	15.099.471	0	0	0	15.099.471	0	15.099.471	15.099.471
853	20104247	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 25 PAGI JAKARTA	SD	51154116454	18.588.528	0	0	0	18.588.528	0	18.588.528	18.588.528
854	20104248	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMATJATI 24 JAKARTA	SD	51154116446	27.618.274	0	0	0	27.618.274	0	27.618.274	27.618.274
855	20104252	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA DUA WETAN 02 PAGI JAKARTA	SD	51154113994	13.861.071	0	0	0	13.861.071	0	13.861.071	13.861.071
856	20104253	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 13 PAGI JAKARTA	SD	51154113927	6.641.845	0	0	0	6.641.845	0	6.641.845	6.641.845
857	20104254	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG TIMUR 06 JAKARTA	SD	50354112695	1.574.184	0	0	0	1.574.184	0	1.574.184	1.574.184
858	20104255	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG BARAT 05 JAKARTA	SD	50354112571	38.500	0	0	0	38.500	0	38.500	38.500
859	20104256	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG BARAT 04 PAGI JAKARTA	SD	50354112601	36.161.190	0	0	0	36.161.190	0	36.161.190	36.161.190
860	20104257	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG BARAT 03 PAGI JAKARTA	SD	50354112563	21.680	0	0	0	21.680	0	21.680	21.680
861	20104258	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG BARAT 02 PAGI JAKARTA	SD	50354112555	49.505.664	0	0	0	49.505.664	0	49.505.664	49.505.664
862	20104259	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG BARAT 01 JAKARTA	SD	50354112547	22.546.818	0	0	0	22.546.818	0	22.546.818	22.546.818
863	20104260	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 13 PAGI JAKARTA	SD	51154116063	2.922.061	0	0	0	2.922.061	0	2.922.061	2.922.061
864	20104261	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 12 PAGI JAKARTA	SD	51154116055	1.437.575	0	0	0	1.437.575	0	1.437.575	1.437.575
865	20104262	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 11 PAGI JAKARTA	SD	51154116047	23.987.120	0	0	0	23.987.120	0	23.987.120	23.987.120
866	20104263	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 08 PAGI JAKARTA	SD	51154116012	985.876	0	0	0	985.876	0	985.876	985.876
867	20104264	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 07 PAGI JAKARTA	SD	51154116004	824.635	0	0	0	824.635	0	824.635	824.635
868	20104265	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 06 JAKARTA	SD	51154115997	35.239.839	0	0	0	35.239.839	0	35.239.839	35.239.839
869	20104266	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 05 PAGI JAKARTA	SD	51154115989	14.076.105	0	0	0	14.076.105	0	14.076.105	14.076.105
870	20104269	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 02 JAKARTA	SD	51154115971	143.587.159	0	0	0	143.587.159	0	143.587.159	143.587.159
871	20104270	SEKOLAH DASAR NEGERI BATU AMPAR 01 PAGI JAKARTA	SD	51154115962	35.488.235	0	0	0	35.488.235	0	35.488.235	35.488.235
872	20104271	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG BARAT 06 PAGI JAKARTA	SD	50354112610								

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
878	20104277	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG TIMUR 02 PAGI JAKARTA	SD	50354112679	21.903.881	0	0	0	21.903.881	0	21.903.881	21.903.881
879	20104278	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG TIMUR 01 JAKARTA	SD	50354112661	71.033.865	0	0	0	71.033.865	0	71.033.865	71.033.865
880	20104283	SEKOLAH DASAR NEGERI CAKUNG BARAT 15 PAGI JAKARTA	SD	50354112636	8.837.885	0	0	0	8.837.885	0	8.837.885	8.837.885
881	20104311	SEKOLAH DASAR NEGERI BAMBU APUS 04 PAGI JAKARTA	SD	51154113315	28.485.311	0	0	0	28.485.311	0	28.485.311	28.485.311
882	20104312	SEKOLAH DASAR NEGERI BAMBU APUS 03 PAGI JAKARTA	SD	51154113307	90.694.929	0	0	0	90.694.929	0	90.694.929	90.694.929
883	20104314	SEKOLAH DASAR NEGERI BAMBU APUS 01 PAGI JAKARTA	SD	51154113293	31.383.828	0	0	0	31.383.828	0	31.383.828	31.383.828
884	20104315	SEKOLAH DASAR NEGERI BALEKAMBANG 03 PAGI JAKARTA	SD	51354115918	15.257.322	0	0	0	15.257.322	0	15.257.322	15.257.322
885	20104316	SEKOLAH DASAR NEGERI BALEKAMBANG 01 PAGI JAKARTA	SD	51154115920	517.847	0	0	0	517.847	0	517.847	517.847
886	20104330	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MELAYU 04 PAGI JAKARTA	SD	51254116509	240.563.842	0	0	0	240.563.842	0	240.563.842	240.563.842
887	20104331	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MELAYU 03 PAGI JAKARTA	SD	51254116495	2.031.179	0	0	0	2.031.179	0	2.031.179	2.031.179
888	20104334	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MELAYU 01 PAGI JAKARTA	SD	51254116487	70.718	0	0	0	70.718	0	70.718	70.718
889	20104335	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG 05 PAGI JAKARTA	SD	50154117992	32.403.154	0	0	125.000	32.278.154	0	32.278.154	32.403.154
890	20104337	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG 03 PAGI JAKARTA	SD	50154117984	56.095.802	0	0	0	56.095.802	0	56.095.802	56.095.802
891	20104344	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPAYUNG 05 JAKARTA	SD	51154113480	18.768.817	0	0	0	18.768.817	0	18.768.817	18.768.817
892	20104346	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPAYUNG 04 PAGI JAKARTA	SD	51154113471	54.950.937	0	0	0	54.950.937	0	54.950.937	54.950.937
893	20104348	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MELAYU 05 PAGI JAKARTA	SD	51254116517	22.799.531	0	0	0	22.799.531	0	22.799.531	22.799.531
894	20104351	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 11 PAGI JAKARTA	SD	51154113919	24.411.501	0	0	0	24.411.501	0	24.411.501	24.411.501
895	20104352	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 10 JAKARTA	SD	51154113901	6.643.561	0	0	0	6.643.561	0	6.643.561	6.643.561
896	20104353	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 09 PAGI JAKARTA	SD	51154113897	8.913.058	0	0	0	8.913.058	0	8.913.058	8.913.058
897	20104355	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 07 JAKARTA	SD	51154113889	544.579	0	0	0	544.579	0	544.579	544.579
898	20104356	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 06 PAGI JAKARTA	SD	51154113871	1.073.349	0	0	0	1.073.349	0	1.073.349	1.073.349
899	20104357	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 05 JAKARTA	SD	51154113862	8.591.311	0	0	0	8.591.311	0	8.591.311	8.591.311
900	20104364	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MELAYU 10 PAGI JAKARTA	SD	51254116550	1.233.473	0	0	0	1.233.473	0	1.233.473	1.233.473
901	20104365	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MELAYU 09 PAGI JAKARTA	SD	51254116541	1.705.429	0	0	0	1.705.429	0	1.705.429	1.705.429
902	20104367	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPAYUNG 02 JAKARTA	SD	51154113455	4.451.519	0	0	0	4.451.519	0	4.451.519	4.451.519
903	20104368	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPAYUNG 01 JAKARTA	SD	51154113447	36.055.796	0	0	0	36.055.796	0	36.055.796	36.055.796
904	20104369	SEKOLAH DASAR NEGERI CEGER 01 JAKARTA	SD	51154113331	94.727.960	0	0	0	94.727.960	0	94.727.960	94.727.960
905	20104372	SEKOLAH DASAR NEGERI CAWANG 12 PAGI JAKARTA	SD	51154116136	13.456.613	0	0	0	13.456.613	0	13.456.613	13.456.613
906	20104375	SEKOLAH DASAR NEGERI CAWANG 09 JAKARTA	SD	51154116128	1.471.938	0	0	0	1.471.938	0	1.471.938	1.471.938
907	20104377	SEKOLAH DASAR NEGERI CAWANG 07 PAGI JAKARTA	SD	51154116110	85.993.476	0	0	0	85.993.476	0	85.993.476	85.993.476
908	20104380	SEKOLAH DASAR NEGERI CAWANG 04 JAKARTA	SD	51154116101	74.390.465	0	0	0	74.390.465	0	74.390.465	74.390.465
909	20104383	SEKOLAH DASAR NEGERI CAWANG 01 PAGI JAKARTA	SD	51354116094	245.830	0	0	0	245.830	0	245.830	245.830
910	20104385	SEKOLAH DASAR NEGERI CEGER 02 JAKARTA	SD	51154113340	24.121.162	0	0	0	24.121.162	0	24.121.162	24.121.162
911	20104389	SEKOLAH DASAR NEGERI CILILITAN 03 PAGI JAKARTA	SD	51154116209	22.382.253	0	0	0	22.382.253	0	22.382.253	22.382.253
912	20104390	SEKOLAH DASAR NEGERI CILILITAN 02 JAKARTA	SD	51354116191	1.010.423	0	0	0	1.010.423	0	1.010.423	1.010.423
913	20104391	SEKOLAH DASAR NEGERI CILILITAN 01 PAGI JAKARTA	SD	51354116183	49.480.629	0	0	0	49.480.629	0	49.480.629	49.480.629
914	20104394	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANGKAP 03 PAGI JAKARTA	SD	51154113391	52.307.335	0	0	0	52.307.335	19.117.540	71.424.875	71.424.875
915	20104396	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANGKAP 01 PAGI JAKARTA	SD	51154113382	30.908.031	0	0	0	30.908.031	0	30.908.031	30.908.031
916	20104400	SEKOLAH DASAR NEGERI CIBUBUR 04 PAGI JAKARTA	SD	51154113773	470.912	0	0	0	470.912	0	470.912	470.912
917	20104401	SEKOLAH DASAR NEGERI CIBUBUR 03 PAGI JAKARTA	SD	51154113765	18.433.275	0	0	0	18.433.275	0	18.433.275	18.433.275
918	20104403	SEKOLAH DASAR NEGERI CIBUBUR 01 JAKARTA	SD	51154113757	21.260.086	0	0	0	21.260.086	0	21.260.086	21.260.086
919	20104464	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU HARAPAN 01 PAGI JAKARTA	SD	20054100081	4.632.113	0	0	0	4.632.113	0	4.632.113	4.632.113
920	20104465	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU HARAPAN 02 PAGI JAKARTA	SD	20154100098	1.187.768	0	0	0	1.187.768	0	1.187.768	1.187.768
921	20104466	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU KELAPA 01 PAGI JAKARTA	SD	20154100101	491.601	0	0	0	491.601	0	491.601	491.601
922	20104467	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU KELAPA 02 PAGI JAKARTA	SD	20154100110	14.187.652	0	0	0	14.187.652	0	14.187.652	14.187.652
923	20104468	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU PANGGANG 01 PAGI JAKARTA	SD	20054100120	193.928	0	0	0	193.928	0	193.928	193.928
924	20104469	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU PANGGANG 02 PAGI JAKARTA	SD	20054100138	17.999.529	0	0	0	17.999.529	0	17.999.529	17.999.529
925	20104470	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU PANGGANG 03 PAGI JAKARTA	SD	20054100146	283.140	0	0	0	283.140	0	283.140	283.140
926	20104471	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU PARI 01 PAGI JAKARTA	SD	20154100012	35.343.500	0	0	0	35.343.500	0	35.343.500	35.343.500
927	20104472	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU PARI 02 PAGI JAKARTA	SD	20054100022	4.579.019	0	0	0	4.579.019	0	4.579.019	4.579.019
928	20104473	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU TIDUNG 01 PAGI JAKARTA	SD	20154100039	8.046.897	0	0	0	8.046.897	0	8.046.897	8.046.897
929	20104474	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU TIDUNG 02 PAGI JAKARTA	SD	20154100047	299.144	0	0	0	299.144	0	299.144	299.144
930	20104475	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU TIDUNG 03 PAGI JAKARTA	SD	20054100057	1.595.548	0	0	0	1.595.548	0	1.595.548	1.595.548
931	20104476	SEKOLAH DASAR NEGERI PULAU TIDUNG 04 PAGI JAKARTA	SD	20154100063	1.763.670	0	0	0	1.763.670	0	1.763.670</	

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
941	20104498	SEKOLAH DASAR NEGERI CIDENG 02 JAKARTA	SD	11054105785	15.738.419	0	0	0	15.738.419	0	15.738.419	15.738.419
942	20104499	SEKOLAH DASAR NEGERI CIDENG 04 JAKARTA	SD	11054105793	27.907.144	0	0	0	27.907.144	0	27.907.144	27.907.144
943	20104501	SEKOLAH DASAR NEGERI CIDENG 07 JAKARTA	SD	10154105808	110.236.584	0	0	0	110.236.584	0	110.236.584	110.236.584
944	20104503	SEKOLAH DASAR NEGERI CIDENG 09 JAKARTA	SD	11054105815	45.515.431	0	0	0	45.515.431	0	45.515.431	45.515.431
945	20104504	SEKOLAH DASAR NEGERI CIDENG 10 JAKARTA	SD	11054105823	13.499.557	0	0	0	13.499.557	0	13.499.557	13.499.557
946	20104506	SEKOLAH DASAR NEGERI CIDENG 13 JAKARTA	SD	11054105831	587.408	0	0	0	587.408	0	587.408	587.408
947	20104508	SEKOLAH DASAR NEGERI CIKINI 01 JAKARTA	SD	50054107085	6.673.913	0	0	0	6.673.913	0	6.673.913	6.673.913
948	20104509	SEKOLAH DASAR NEGERI CIKINI 02 JAKARTA	SD	50054107093	47.359.324	0	0	0	47.359.324	0	47.359.324	47.359.324
949	20104515	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI PULO 01 PAGI JAKARTA	SD	10154105841	5.526.835	0	0	0	5.526.835	0	5.526.835	5.526.835
950	20104516	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI PULO 02 PAGI JAKARTA	SD	11054105904	36.355.300	0	0	0	36.355.300	0	36.355.300	36.355.300
951	20104517	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI PULO 03 PAGI JAKARTA	SD	10154105859	72.215.710	0	0	0	72.215.710	0	72.215.710	72.215.710
952	20104518	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI PULO 04 PAGI JAKARTA	SD	10154105867	8.347.514	0	0	0	8.347.514	0	8.347.514	8.347.514
953	20104519	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI PULO 05 PAGI JAKARTA	SD	10154105875	20.232.365	0	0	116.046	20.116.319	0	20.116.319	20.232.365
954	20104521	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI PULO 07 JAKARTA	SD	11154105911	99.936.607	0	0	0	99.936.607	0	99.936.607	99.936.607
955	20104522	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI PULO 08 JAKARTA	SD	10154105883	22.698.815	0	0	0	22.698.815	0	22.698.815	22.698.815
956	20104524	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI PULO 10 JAKARTA	SD	10154105891	32.718.919	0	0	0	32.718.919	0	32.718.919	32.718.919
957	20104525	SEKOLAH DASAR NEGERI GALUR 01 JAKARTA	SD	12254106092	4.468.363	0	0	0	4.468.363	0	4.468.363	4.468.363
958	20104527	SEKOLAH DASAR NEGERI GALUR 03 JAKARTA	SD	12254106084	37.414.957	0	0	0	37.414.957	0	37.414.957	37.414.957
959	20104529	SEKOLAH DASAR NEGERI GONDANGDIA 01 JAKARTA	SD	10854107140	27.955.780	0	0	0	27.955.780	0	27.955.780	27.955.780
960	20104530	SEKOLAH DASAR NEGERI GONDANGDIA 03 JAKARTA	SD	11154107123	39.104.933	0	0	0	39.104.933	3.774.000	42.878.933	42.878.933
961	20104532	SEKOLAH DASAR NEGERI GONDANGDIA 05 JAKARTA	SD	10854107131	461.314	0	0	0	461.314	0	461.314	461.314
962	20104533	SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG SAHARI SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	10154106545	44.342	0	0	0	44.342	0	44.342	44.342
963	20104535	SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG SAHARI UTARA 01 PAGI JAKARTA	SD	10454107295	11.219.944	0	0	0	11.219.944	0	11.219.944	11.219.944
964	20104536	SEKOLAH DASAR NEGERI HARAPAN MULIA 01 PAGI JAKARTA	SD	12254106611	9.784.747	0	0	0	9.784.747	0	9.784.747	9.784.747
965	20104538	SEKOLAH DASAR NEGERI HARAPAN MULIA 03 PAGI JAKARTA	SD	12254106645	19.823.652	0	0	0	19.823.652	0	19.823.652	19.823.652
966	20104540	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 01 PAGI JAKARTA	SD	12254106114	95.157	0	0	0	95.157	0	95.157	95.157
967	20104541	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 03 PAGI JAKARTA	SD	12254106122	10.646.158	0	0	0	10.646.158	0	10.646.158	10.646.158
968	20104542	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 04 PETANG JAKARTA	SD	12254106131	5.866.127	0	0	0	5.866.127	0	5.866.127	5.866.127
969	20104544	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 07 PAGI JAKARTA	SD	12254106157	2.124.949	0	0	0	2.124.949	0	2.124.949	2.124.949
970	20104545	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 09 PAGI JAKARTA	SD	12254106165	1.533.545	0	0	0	1.533.545	0	1.533.545	1.533.545
971	20104546	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 10 PAGI JAKARTA	SD	12254106173	8.200.317	0	0	0	8.200.317	0	8.200.317	8.200.317
972	20104548	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 13 PAGI JAKARTA	SD	12254106181	3.994.978	0	0	0	3.994.978	0	3.994.978	3.994.978
973	20104550	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 15 PAGI JAKARTA	SD	12254106203	161.992	0	0	0	161.992	0	161.992	161.992
974	20104552	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 17 PAGI JAKARTA	SD	12254106220	14.181.794	0	0	0	14.181.794	0	14.181.794	14.181.794
975	20104554	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 19 PAGI JAKARTA	SD	12254106246	1.937.767	0	0	0	1.937.767	0	1.937.767	1.937.767
976	20104559	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHAR BARU 29 PAGI JAKARTA	SD	12254106289	695.030	0	0	0	695.030	0	695.030	695.030
977	20104571	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMPUNG BALI 01 PAGI JAKARTA	SD	11154107964	39.305.121	0	0	0	39.305.121	0	39.305.121	39.305.121
978	20104573	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMPUNG BALI 03 PAGI JAKARTA	SD	11354107979	29.968.133	0	0	0	29.968.133	0	29.968.133	29.968.133
979	20104574	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMPUNG BALI 07 PAGI JAKARTA	SD	11854107988	8.382.545	0	0	0	8.382.545	0	8.382.545	8.382.545
980	20104576	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMPUNG RAWA 02 PETANG JAKARTA	SD	12254106327	3.664.704	0	0	0	3.664.704	0	3.664.704	3.664.704
981	20104577	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANG ANYAR 01 PAGI JAKARTA	SD	10454107341	32.221.708	0	0	0	32.221.708	0	32.221.708	32.221.708
982	20104579	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANG ANYAR 05 PAGI JAKARTA	SD	10454107376	64.106.977	0	0	0	64.106.977	0	64.106.977	64.106.977
983	20104582	SEKOLAH DASAR NEGERI KARET TENGSIN 13 JAKARTA	SD	11354108011	10.332.899	0	0	7.473.892	2.859.007	0	2.859.007	10.332.899
984	20104584	SEKOLAH DASAR NEGERI KARTINI 01 PAGI JAKARTA	SD	10454107431	2.842.006	0	0	0	2.842.006	0	2.842.006	2.842.006
985	20104586	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KACANG 01 JAKARTA	SD	11854108046	37.335.989	0	0	0	37.335.989	0	37.335.989	37.335.989
986	20104588	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KACANG 05 JAKARTA	SD	11354108053	23.615.377	0	0	232.093	23.383.284	0	23.383.284	23.615.377
987	20104590	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KELAPA 02 PAGI JAKARTA	SD	11054105947	61.389.213	0	0	0	61.389.213	0	61.389.213	61.389.213
988	20104591	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KOSONG 01 PAGI JAKARTA	SD	10154106669	24.654.042	0	0	0	24.654.042	0	24.654.042	24.654.042
989	20104592	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KOSONG 02 PAGI JAKARTA	SD	10154106677	5.760.680	0	0	0	5.760.680	0	5.760.680	5.760.680
990	20104593	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON KOSONG 03 PAGI JAKARTA	SD	10154106685	13.798.869	0	0	0	13.798.869	0	13.798.869	13.

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
1004	20104624	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMAYORAN 13 PAGI JAKARTA	SD	12254106793	1.419.957	0	0	0	1.419.957	0	1.419.957	1.419.957
1005	20104626	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMAYORAN 15 PAGI JAKARTA	SD	10154106812	27.512.770	0	0	0	27.512.770	0	27.512.770	27.512.770
1006	20104629	SEKOLAH DASAR NEGERI KENARI 01 PAGI JAKARTA	SD	10954107598	102.918.099	0	0	0	102.918.099	0	102.918.099	102.918.099
1007	20104631	SEKOLAH DASAR NEGERI KENARI 08 PAGI JAKARTA	SD	50054107611	7.959.303	0	0	0	7.959.303	0	7.959.303	7.959.303
1008	20104632	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMAT 03 PAGI JAKARTA	SD	50054107662	48.799.753	0	27.867.600	0	20.932.153	0	20.932.153	20.932.153
1009	20104636	SEKOLAH DASAR NEGERI KWITANG 01 PAGI JAKARTA	SD	10954107768	2.233.534	0	0	0	2.233.534	0	2.233.534	2.233.534
1010	20104638	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGA DUA SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	10454107473	28.215.731	0	0	0	28.215.731	0	28.215.731	28.215.731
1011	20104639	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGA DUA SELATAN 05 PAGI JAKARTA	SD	10454107465	4.050.818	0	0	0	4.050.818	0	4.050.818	4.050.818
1012	20104640	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG 01 JAKARTA	SD	50054107174	251.559.901	0	0	0	251.559.901	0	251.559.901	251.559.901
1013	20104641	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG 02 JAKARTA	SD	50054107182	6.839.845	0	0	0	6.839.845	0	6.839.845	6.839.845
1014	20104642	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG 03 JAKARTA	SD	50054107166	39.230.267	0	1.133.720	375.000	37.721.547	0	37.721.547	38.096.547
1015	20104643	SEKOLAH DASAR NEGERI MERDEKA TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	10854105937	13.175.781	0	0	0	13.175.781	0	13.175.781	13.175.781
1016	20104644	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR BARU 01 JAKARTA	SD	10454107503	11.848.792	0	0	0	11.848.792	0	11.848.792	11.848.792
1017	20104645	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR BARU 07 JAKARTA	SD	10454107538	112.258.133	0	0	17.550	112.240.583	0	112.240.583	112.258.133
1018	20104646	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR BARU 11 JAKARTA	SD	10454107546	18.795.167	0	0	0	18.795.167	0	18.795.167	18.795.167
1019	20104648	SEKOLAH DASAR NEGERI PASEBAN 01 PAGI JAKARTA	SD	50054107794	2.750.171	0	0	0	2.750.171	0	2.750.171	2.750.171
1020	20104649	SEKOLAH DASAR NEGERI PASEBAN 07 PAGI JAKARTA	SD	50054107824	10.784.822	0	0	0	10.784.822	0	10.784.822	10.784.822
1021	20104651	SEKOLAH DASAR NEGERI PASEBAN 11 PAGI JAKARTA	SD	50054107841	12.808	0	0	0	12.808	0	12.808	12.808
1022	20104652	SEKOLAH DASAR NEGERI PASEBAN 15 PAGI JAKARTA	SD	50054107859	869.663	0	0	0	869.663	0	869.663	869.663
1023	20104653	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGANGSAAN 01 PAGI JAKARTA	SD	11154107221	74.923.021	0	0	0	74.923.021	0	74.923.021	74.923.021
1024	20104655	SEKOLAH DASAR NEGERI PETAMBURAN 01 JAKARTA	SD	11854108097	47.993.813	0	0	0	47.993.813	0	47.993.813	47.993.813
1025	20104657	SEKOLAH DASAR NEGERI PETAMBURAN 05 JAKARTA	SD	11854108119	138.316.385	0	0	0	138.316.385	0	138.316.385	138.316.385
1026	20104658	SEKOLAH DASAR NEGERI PETAMBURAN 07 JAKARTA	SD	11354108126	31.982.185	0	0	0	31.982.185	0	31.982.185	31.982.185
1027	20104659	SEKOLAH DASAR NEGERI PETOJO SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	11054105963	16.443.192	0	0	0	16.443.192	0	16.443.192	16.443.192
1028	20104662	SEKOLAH DASAR NEGERI PETOJO SELATAN 06 JAKARTA	SD	11054105980	66.000.014	0	0	0	66.000.014	0	66.000.014	66.000.014
1029	20104663	SEKOLAH DASAR NEGERI PETOJO UTARA 01 JAKARTA	SD	11154105996	60.511.610	0	0	0	60.511.610	0	60.511.610	60.511.610
1030	20104664	SEKOLAH DASAR NEGERI PETOJO UTARA 03 JAKARTA	SD	11054106013	38.912.418	0	0	0	38.912.418	0	38.912.418	38.912.418
1031	20104667	SEKOLAH DASAR NEGERI PETOJO UTARA 05 JAKARTA	SD	11054106021	57.529.821	0	0	0	57.529.821	0	57.529.821	57.529.821
1032	20104668	SEKOLAH DASAR NEGERI PETOJO UTARA 09 JAKARTA	SD	11054106005	32.572.308	0	0	0	32.572.308	0	32.572.308	32.572.308
1033	20104669	SEKOLAH DASAR NEGERI PETOJO UTARA 13 JAKARTA	SD	11154106038	26.065.778	0	0	0	26.065.778	0	26.065.778	26.065.778
1034	20104670	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWASARI 01 PAGI JAKARTA	SD	12254105738	405.048	0	0	0	405.048	0	405.048	405.048
1035	20104671	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWASARI 02 PAGI JAKARTA	SD	12254105746	17.105.244	0	0	0	17.105.244	0	17.105.244	17.105.244
1036	20104672	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWASARI 05 PAGI JAKARTA	SD	12254105762	27.141.270	0	601.040	0	26.540.230	0	26.540.230	26.540.230
1037	20104674	SEKOLAH DASAR NEGERI SENEN 03 PAGI JAKARTA	SD	10954107890	8.486.884	0	0	0	8.486.884	0	8.486.884	8.486.884
1038	20104675	SEKOLAH DASAR NEGERI SERDANG 01 PAGI JAKARTA	SD	10154106863	5.512.485	0	0	0	5.512.485	0	5.512.485	5.512.485
1039	20104676	SEKOLAH DASAR NEGERI SERDANG 03 JAKARTA	SD	10154106871	5.091.400	0	0	0	5.091.400	0	5.091.400	5.091.400
1040	20104679	SEKOLAH DASAR NEGERI SERDANG 05 PAGI JAKARTA	SD	10154106880	31.111.959	0	0	0	31.111.959	0	31.111.959	31.111.959
1041	20104681	SEKOLAH DASAR NEGERI SERDANG 07 PAGI JAKARTA	SD	10154106898	30.255.000	0	0	0	30.255.000	0	30.255.000	30.255.000
1042	20104683	SEKOLAH DASAR NEGERI SERDANG 11 JAKARTA	SD	10154106901	1.947.253	0	0	0	1.947.253	0	1.947.253	1.947.253
1043	20104685	SEKOLAH DASAR NEGERI SERDANG 13 PAGI JAKARTA	SD	10154106910	65.848.010	0	0	0	65.848.010	0	65.848.010	65.848.010
1044	20104687	SEKOLAH DASAR NEGERI SUMUR BATU 01 PAGI JAKARTA	SD	10154106936	2.641.106	0	0	0	2.641.106	0	2.641.106	2.641.106
1045	20104688	SEKOLAH DASAR NEGERI SUMUR BATU 03 PAGI JAKARTA	SD	10154106944	56.830.550	0	0	0	56.830.550	0	56.830.550	56.830.550
1046	20104690	SEKOLAH DASAR NEGERI SUMUR BATU 06 PAGI JAKARTA	SD	10154106961	18.382.292	0	0	0	18.382.292	0	18.382.292	18.382.292
1047	20104692	SEKOLAH DASAR NEGERI SUMUR BATU 08 PAGI JAKARTA	SD	10154106979	402.602	0	0	0	402.602	0	402.602	402.602
1048	20104694	SEKOLAH DASAR NEGERI SUMUR BATU 12 PAGI JAKARTA	SD	10154106987	6.309.179	0	0	0	6.309.179	0	6.309.179	6.309.179
1049	20104695	SEKOLAH DASAR NEGERI SUMUR BATU 14 PAGI JAKARTA	SD	10154106995	35.855.173	0	0	0	35.855.173	0	35.855.173	35.855.173
1050	20104697	SEKOLAH DASAR NEGERI TANAH TINGGI 01 PAGI JAKARTA	SD	12254106424	3.220.345	0	0	0	3.220.345	0	3.220.345	3.220.345
1051	20104699											

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
1067	20104856	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BAWANG 05 JAKARTA	SD	20154120803	9.244.186	0	0	0	9.244.186	0	9.244.186	9.244.186
1068	20104858	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BAWANG 07 PAGI JAKARTA	SD	20154120781	2.467.374	0	0	0	2.467.374	0	2.467.374	2.467.374
1069	20104860	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BAWANG 09 JAKARTA	SD	20154120820	15.725.107	0	0	0	15.725.107	0	15.725.107	15.725.107
1070	20104861	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA GADING BARAT 01 PAGI JAKARTA	SD	20054119386	34.600.260	0	0	0	34.600.260	0	34.600.260	34.600.260
1071	20104863	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA GADING TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	20054119424	35.233.862	0	0	0	35.233.862	0	35.233.862	35.233.862
1072	20104865	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA GADING TIMUR 03 PAGI JAKARTA	SD	20054119432	32.096.093	0	0	0	32.096.093	0	32.096.093	32.096.093
1073	20104869	SEKOLAH DASAR NEGERI LAGOA 01 PAGI JAKARTA	SD	20054119670	1.672.083	0	0	0	1.672.083	0	1.672.083	1.672.083
1074	20104871	SEKOLAH DASAR NEGERI MARUNDA 01 PAGI JAKARTA	SD	20054118819	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000
1075	20104872	SEKOLAH DASAR NEGERI MARUNDA 02 PAGI JAKARTA	SD	20054118827	5.824.139	0	0	0	5.824.139	0	5.824.139	5.824.139
1076	20104873	SEKOLAH DASAR NEGERI MARUNDA 03 PAGI JAKARTA	SD	20054118801	12.507.473	0	0	0	12.507.473	0	12.507.473	12.507.473
1077	20104874	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN BARAT 09 PAGI JAKARTA	SD	20154120285	5.793.979	0	0	0	5.793.979	0	5.793.979	5.793.979
1078	20104875	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN BARAT 11 JAKARTA	SD	20154120293	10.852.649	0	0	0	10.852.649	0	10.852.649	10.852.649
1079	20104877	SEKOLAH DASAR NEGERI PAPANGGO 01 JAKARTA	SD	20154120897	18.614.146	0	0	0	18.614.146	0	18.614.146	18.614.146
1080	20104879	SEKOLAH DASAR NEGERI PAPANGGO 03 PAGI JAKARTA	SD	20154120757	5.128.931	0	0	0	5.128.931	0	5.128.931	5.128.931
1081	20104880	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGANGSAAN DUA 01 PAGI JAKARTA	SD	20054119505	447.212	0	0	0	447.212	0	447.212	447.212
1082	20104882	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGANGSAAN DUA 03 JAKARTA	SD	20054119513	19.342.783	0	0	0	19.342.783	0	19.342.783	19.342.783
1083	20104884	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGANGSAAN DUA 05 PAGI JAKARTA	SD	20054119521	9.606.431	0	0	0	9.606.431	0	9.606.431	9.606.431
1084	20104885	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGANGSAAN DUA 06 PAGI JAKARTA	SD	20054119530	62.662.020	0	0	0	62.662.020	0	62.662.020	62.662.020
1085	20104886	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGANGSAAN DUA 07 PAGI JAKARTA	SD	20054119491	3.819.485	0	0	0	3.819.485	0	3.819.485	3.819.485
1086	20104891	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJAGALAN 01 JAKARTA	SD	30254120468	1.894.598	0	0	0	1.894.598	0	1.894.598	1.894.598
1087	20104892	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJAGALAN 05 JAKARTA	SD	30254120484	8.451.075	0	0	0	8.451.075	0	8.451.075	8.451.075
1088	20104895	SEKOLAH DASAR NEGERI PLUIT 01 JAKARTA	SD	30254120719	26.008.718	0	0	0	26.008.718	0	26.008.718	26.008.718
1089	20104896	SEKOLAH DASAR NEGERI PLUIT 03 JAKARTA	SD	30154120729	72.303.274	0	0	0	72.303.274	0	72.303.274	72.303.274
1090	20104906	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 23 PAGI JAKARTA	SD	20154119970	10.273.812	0	0	0	10.273.812	0	10.273.812	10.273.812
1091	20104907	SEKOLAH DASAR NEGERI ROROTAN 03 PAGI JAKARTA	SD	20054118916	91.846	0	0	0	91.846	0	91.846	91.846
1092	20104911	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 15 PAGI JAKARTA	SD	20154119058	120.426	0	0	0	120.426	0	120.426	120.426
1093	20104912	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	20054119211	4.152.933	0	0	0	4.152.933	0	4.152.933	4.152.933
1094	20104914	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER TIMUR 03 JAKARTA	SD	20154119180	30.124.830	0	0	0	30.124.830	0	30.124.830	30.124.830
1095	20104915	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER TIMUR 07 JAKARTA	SD	20054119203	4.673	0	0	0	4.673	0	4.673	4.673
1096	20104916	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAPURA 02 JAKARTA	SD	20154119325	5.077.566	0	0	0	5.077.566	0	5.077.566	5.077.566
1097	20104917	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAPURA 05 PAGI JAKARTA	SD	20054119335	20.409.604	0	0	0	20.409.604	0	20.409.604	20.409.604
1098	20104919	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNGAI BAMBU 01 JAKARTA	SD	20154120951	8.773.211	0	0	0	8.773.211	0	8.773.211	8.773.211
1099	20104921	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNGAI BAMBU 03 PAGI JAKARTA	SD	20154120960	14.337.552	0	0	0	14.337.552	0	14.337.552	14.337.552
1100	20104923	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNGAI BAMBU 05 JAKARTA	SD	20154120978	5.792.797	0	0	0	5.792.797	0	5.792.797	5.792.797
1101	20104925	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 01 JAKARTA	SD	20154121079	8.183.475	0	0	0	8.183.475	0	8.183.475	8.183.475
1102	20104927	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 03 JAKARTA	SD	20154121052	1.416.795	0	0	0	1.416.795	0	1.416.795	1.416.795
1103	20104929	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 05 PAGI JAKARTA	SD	20154121087	1.181.486	0	0	0	1.181.486	0	1.181.486	1.181.486
1104	20104930	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 07 JAKARTA	SD	20154121095	18.126.899	0	0	0	18.126.899	0	18.126.899	18.126.899
1105	20104932	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 09 JAKARTA	SD	20154121061	272.120	0	0	0	272.120	0	272.120	272.120
1106	20104934	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 11 JAKARTA	SD	20154121109	8.527.563	0	0	0	8.527.563	0	8.527.563	8.527.563
1107	20104935	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 12 PAGI JAKARTA	SD	20154121117	2.606.144	0	0	0	2.606.144	0	2.606.144	2.606.144
1108	20104936	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER AGUNG 13 PAGI JAKARTA	SD	20154121125	5.084.744	0	0	0	5.084.744	0	5.084.744	5.084.744
1109	20104937	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER JAYA 01 PAGI JAKARTA	SD	20154121231	10.136.936	0	0	0	10.136.936	0	10.136.936	10.136.936
1110	20104940	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER JAYA 05 JAKARTA	SD	20154121214	2.126.872	0	0	0	2.126.872	0	2.126.872	2.126.872
1111	20104942	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER JAYA 07 JAKARTA	SD	20154121249	3.206.825	0	0	0	3.206.825	0	3.206.825	3.206.825
1112	20104944	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER JAYA 09 JAKARTA	SD	20154121222	793.899	0	0	0	793.899	0	793.899	793.899
1113	20104946	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG PRIOK 01 JAKARTA	SD	20054121321	1.971.505	0	0	0	1.971.505	0	1.971.505	1.971.505
1114	20104947	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG PRIOK 02 JAKARTA	SD	20154121338	11.529.787	0	0	0	11.529.787	0	11.529.787	11.529.787
1115	20104949	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG PRIOK 04 JAKARTA	SD	20154121								

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
1130	20105153	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 09 PAGI JAKARTA	SD	30054100282	14.976.034	0	0	0	14.976.034	0	14.976.034	14.976.034
1131	20105154	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 10 PAGI JAKARTA	SD	30054100291	229.506	0	0	0	229.506	0	229.506	229.506
1132	20105157	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 13 PAGI JAKARTA	SD	30054100321	17.985.349	0	0	0	17.985.349	0	17.985.349	17.985.349
1133	20105158	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 14 PAGI JAKARTA	SD	30454100331	27.690.061	0	0	0	27.690.061	0	27.690.061	27.690.061
1134	20105159	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 15 PAGI JAKARTA	SD	30054100347	15.122.744	0	0	0	15.122.744	0	15.122.744	15.122.744
1135	20105160	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 16 PAGI JAKARTA	SD	30054100355	18.924.083	0	0	0	18.924.083	0	18.924.083	18.924.083
1136	20105163	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 19 PAGI JAKARTA	SD	30454100374	62.119	0	0	0	62.119	0	62.119	62.119
1137	20105165	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	30354100431	220.259	0	0	0	220.259	0	220.259	220.259
1138	20105167	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 03 PAGI JAKARTA	SD	30054100444	3.164.592	0	0	0	3.164.592	0	3.164.592	3.164.592
1139	20105168	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 04 PAGI JAKARTA	SD	30054100452	3.499.647	0	0	0	3.499.647	0	3.499.647	3.499.647
1140	20105169	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 05 PAGI JAKARTA	SD	30054100461	38.301.914	0	0	0	38.301.914	0	38.301.914	38.301.914
1141	20105171	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 07 PAGI JAKARTA	SD	30054100410	8.965.457	0	0	0	8.965.457	0	8.965.457	8.965.457
1142	20105172	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 09 PAGI JAKARTA	SD	30054100479	183.499	0	0	0	183.499	0	183.499	183.499
1143	20105173	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 10 PAGI JAKARTA	SD	30054100487	835.167	0	0	0	835.167	0	835.167	835.167
1144	20105175	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 12 PAGI JAKARTA	SD	30054100509	997.700	0	0	0	997.700	0	997.700	997.700
1145	20105176	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 13 PETANG JAKARTA	SD	30054100517	2.187.800	0	0	0	2.187.800	0	2.187.800	2.187.800
1146	20105177	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 14 PAGI JAKARTA	SD	30454100528	27.484.252	0	0	0	27.484.252	0	27.484.252	27.484.252
1147	20105178	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 15 PAGI JAKARTA	SD	30054100533	5.894.591	0	0	0	5.894.591	0	5.894.591	5.894.591
1148	20105180	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 17 PAGI JAKARTA	SD	30054100541	3.144.079	0	0	0	3.144.079	0	3.144.079	3.144.079
1149	20105181	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 18 PAGI JAKARTA	SD	30054100550	10.711.735	0	0	0	10.711.735	0	10.711.735	10.711.735
1150	20105186	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KEPA 01 PAGI JAKARTA	SD	41154102848	5.007.394	0	0	0	5.007.394	0	5.007.394	5.007.394
1151	20105187	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KEPA 03 JAKARTA	SD	41154102856	3.560.982	0	0	0	3.560.982	0	3.560.982	3.560.982
1152	20105188	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KEPA 05 PAGI JAKARTA	SD	41154102864	2.696.718	0	0	0	2.696.718	0	2.696.718	2.696.718
1153	20105189	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KEPA 07 PAGI JAKARTA	SD	41154102872	214.359	0	0	0	214.359	0	214.359	214.359
1154	20105192	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KEPA 13 JAKARTA	SD	41154102899	131.336	0	0	0	131.336	0	131.336	131.336
1155	20105194	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KEPA 17 PAGI JAKARTA	SD	41154102911	373.663	0	0	0	373.663	0	373.663	373.663
1156	20105199	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 05 PETANG JAKARTA	SD	30054100673	5.857.754	0	0	0	5.857.754	0	5.857.754	5.857.754
1157	20105200	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 06 PAGI JAKARTA	SD	30054100681	24.948.489	0	0	0	24.948.489	0	24.948.489	24.948.489
1158	20105205	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 11 PETANG JAKARTA	SD	30354100724	949.439	0	0	0	949.439	0	949.439	949.439
1159	20105206	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI UTARA 01 PAGI JAKARTA	SD	30054105063	3.810.554	0	0	0	3.810.554	0	3.810.554	3.810.554
1160	20105208	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI UTARA 03 PAGI JAKARTA	SD	30054105071	16.373.185	0	0	0	16.373.185	0	16.373.185	16.373.185
1161	20105209	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI UTARA 04 PETANG JAKARTA	SD	30054105110	12.119.784	0	0	0	12.119.784	0	12.119.784	12.119.784
1162	20105210	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI UTARA 05 PAGI JAKARTA	SD	30054105080	752.600	0	0	0	752.600	0	752.600	752.600
1163	20105212	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL 01 PAGI JAKARTA	SD	30054101386	4.292.118	0	0	0	4.292.118	0	4.292.118	4.292.118
1164	20105213	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL 05 PAGI JAKARTA	SD	10154101390	583.635	0	0	0	583.635	0	583.635	583.635
1165	20105215	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL 11 PAGI JAKARTA	SD	30354101411	222.483	0	0	0	222.483	0	222.483	222.483
1166	20105216	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPULO 01 PAGI JAKARTA	SD	11354104023	13.772.134	0	0	0	13.772.134	0	13.772.134	13.772.134
1167	20105219	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPULO 05 PAGI JAKARTA	SD	30054104059	3.069.143	0	0	0	3.069.143	0	3.069.143	3.069.143
1168	20105220	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPULO 06 PAGI JAKARTA	SD	30054104067	1.301.140	0	0	0	1.301.140	0	1.301.140	1.301.140
1169	20105230	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR 08 PAGI JAKARTA	SD	30054101483	11.114	0	0	0	11.114	0	11.114	11.114
1170	20105241	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR BARU 09 PAGI JAKARTA	SD	10154101560	894.938	0	0	0	894.938	0	894.938	894.938
1171	20105242	SEKOLAH DASAR NEGERI JEMBATAN BESI 01 PAGI JAKARTA	SD	30054105152	3.059.252	0	0	0	3.059.252	0	3.059.252	3.059.252
1172	20105243	SEKOLAH DASAR NEGERI JEMBATAN BESI 02 PETANG JAKARTA	SD	30054105161	55.477.466	0	0	0	55.477.466	0	55.477.466	55.477.466
1173	20105244	SEKOLAH DASAR NEGERI JEMBATAN BESI 03 PAGI JAKARTA	SD	30054105179	7.746.208	0	0	0	7.746.208	0	7.746.208	7.746.208
1174	20105246	SEKOLAH DASAR NEGERI JEMBATAN LIMA 01 PAGI JAKARTA	SD	30054105225	7.151.682	0	0	0	7.151.682	0	7.151.682	7.151.682
1175	20105248	SEKOLAH DASAR NEGERI JEMBATAN LIMA 03 PAGI JAKARTA	SD	30054105241	2.296.944	0	0	0	2.296.944	0	2.296.944	2.296.944
1176	20105254	SEKOLAH DASAR NEGERI JOGLO 05 PAGI JAKARTA	SD	30354103481	4.804.652	0	0	0	4.804.652	0	4.804.652	4.804.652
1177	20105259	SEKOLAH DASAR NEGERI JOGLO 10 PAGI JAKARTA	SD	30354103537	197.410	0	0	0	197.410	0	197.410	197.410
1178	20105261	SEKOLAH DASAR NEGERI KALI ANYAR 01 PAGI JAKARTA	SD	30054105314	1.175.950	0	0	0	1.175.950	0	1.175.950	1.175.950
1179	20105263	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 01 PAGI JAKARTA	SD	30054101947	9.548.115	0	0	0	9.548.115	0	9.548.115	9.548.115
1180	20105265	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 03 PAGI JAKARTA	SD	30054101963	81.890	0	0	0	81.890	0	81.890	81.890
1181	20105266	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 04 PETANG JAKARTA	SD	30054101971	170.235	0	0	0	170.235	0	170.235	170.235
1182	20105267	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 05 PAGI JAKARTA	SD	30054101904	36.954	0	0	0	36.954	0	36.954	36.954
1183	20105268	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 06 PAGI JAKARTA	SD	30054101980	1.813.316	0	0	0	1.813.316	0	1.813.316	1.813.316
1184	20105269	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 07 PAGI JAKARTA	SD	30054101998	78.236.754	0	0	0	78.236.754	0	78.236.754	78.236.754
1185	20105271	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 09 PAGI JAKARTA	SD	30054102005	23.211.241	0	0	0	23.211.241	0	23.211.241	23.211.241
1186	20105272	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIDERES 10 PAGI JAKARTA										

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
1193	20105280	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL 05 PAGI JAKARTA	SD	30054102129	427.934	0	0	0	427.934	0	427.934	427.934
1194	20105281	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL 06 PAGI JAKARTA	SD	30054102081	1.901.460	0	0	0	1.901.460	0	1.901.460	1.901.460
1195	20105282	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL 07 PAGI JAKARTA	SD	30054102137	463	0	0	0	463	0	463	463
1196	20105283	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL 08 PETANG JAKARTA	SD	30054102099	4.153.723	0	0	0	4.153.723	0	4.153.723	4.153.723
1197	20105284	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMAL 09 JAKARTA	SD	30054102102	9.604.707	0	0	0	9.604.707	0	9.604.707	9.604.707
1198	20105286	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 01 PAGI JAKARTA	SD	30454100790	2.829.777	0	0	0	2.829.777	0	2.829.777	2.829.777
1199	20105287	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 02 PAGI JAKARTA	SD	30054100801	4.612.359	0	0	0	4.612.359	0	4.612.359	4.612.359
1200	20105288	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 03 PAGI JAKARTA	SD	30054100819	606.344	0	0	0	606.344	0	606.344	606.344
1201	20105291	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 06 PAGI JAKARTA	SD	30454100846	1.779.209	0	0	0	1.779.209	0	1.779.209	1.779.209
1202	20105294	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 09 PAGI JAKARTA	SD	30054100878	3.959.204	0	0	0	3.959.204	0	3.959.204	3.959.204
1203	20105295	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 10 PETANG JAKARTA	SD	30454100889	1.473.355	0	0	0	1.473.355	0	1.473.355	1.473.355
1204	20105296	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 11 PAGI JAKARTA	SD	30454100897	25.764	0	0	0	25.764	0	25.764	25.764
1205	20105299	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 14 PAGI JAKARTA	SD	30454100919	11.063.405	0	0	0	11.063.405	0	11.063.405	11.063.405
1206	20105301	SEKOLAH DASAR NEGERI KAPUK 16 PAGI JAKARTA	SD	30054100932	1.049.550	0	0	0	1.049.550	0	1.049.550	1.049.550
1207	20105306	SEKOLAH DASAR NEGERI KEAGUNGAN 05 PAGI JAKARTA	SD	30054104580	1.311.696	0	0	0	1.311.696	0	1.311.696	1.311.696
1208	20105308	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 01 JAKARTA	SD	41154102961	35.531	0	0	0	35.531	0	35.531	35.531
1209	20105309	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 02 PAGI JAKARTA	SD	41154102970	8.129.162	0	0	0	8.129.162	0	8.129.162	8.129.162
1210	20105314	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 08 PAGI JAKARTA	SD	41154103003	36.798	0	0	0	36.798	0	36.798	36.798
1211	20105316	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 11 PAGI JAKARTA	SD	41154103020	530.616	0	0	0	530.616	0	530.616	530.616
1212	20105321	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON JERUK 17 PAGI JAKARTA	SD	41154103046	15.153.936	0	0	0	15.153.936	0	15.153.936	15.153.936
1213	20105322	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 01 PAGI JAKARTA	SD	30454101061	2.733.730	0	0	0	2.733.730	0	2.733.730	2.733.730
1214	20105326	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 06 JAKARTA	SD	30454101095	5.252.284	0	0	0	5.252.284	0	5.252.284	5.252.284
1215	20105327	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 07 PETANG JAKARTA	SD	30454101109	2.635.684	0	0	0	2.635.684	0	2.635.684	2.635.684
1216	20105329	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 09 PETANG JAKARTA	SD	30454101125	9.920.162	0	0	0	9.920.162	0	9.920.162	9.920.162
1217	20105330	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 10 JAKARTA	SD	30454101133	15.310.620	0	0	0	15.310.620	0	15.310.620	15.310.620
1218	20105331	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG KALI ANGKE 11 PAGI JAKARTA	SD	30454101141	3.449.325	0	0	0	3.449.325	0	3.449.325	3.449.325
1219	20105338	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDOYA SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	41154103089	74.058.850	0	0	0	74.058.850	0	74.058.850	74.058.850
1220	20105340	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDOYA SELATAN 04 PAGI JAKARTA	SD	41154103097	55.478.031	0	0	0	55.478.031	0	55.478.031	55.478.031
1221	20105344	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDOYA UTARA 03 PAGI JAKARTA	SD	41154103135	468.669	0	0	0	468.669	0	468.669	468.669
1222	20105346	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDOYA UTARA 04 JAKARTA	SD	41154103143	1.100.448	0	0	0	1.100.448	0	1.100.448	1.100.448
1223	20105348	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDOYA UTARA 09 PAGI JAKARTA	SD	41154103151	160.490.783	0	0	0	160.490.783	0	160.490.783	160.490.783
1224	20105349	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA DUA 01 PAGI JAKARTA	SD	41154103186	494.562	0	0	0	494.562	0	494.562	494.562
1225	20105353	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 03 PAGI JAKARTA	SD	11354104104	5.937.406	0	0	0	5.937.406	0	5.937.406	5.937.406
1226	20105354	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 05 PAGI JAKARTA	SD	11354104112	4.484.988	0	0	0	4.484.988	0	4.484.988	4.484.988
1227	20105361	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 14 JAKARTA	SD	11354104171	2.196.166	0	0	0	2.196.166	0	2.196.166	2.196.166
1228	20105363	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANGGISAN 17 PAGI JAKARTA	SD	11354104163	4.893.833	0	0	0	4.893.833	0	4.893.833	4.893.833
1229	20105366	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	30354103561	7.302.883	0	0	0	7.302.883	0	7.302.883	7.302.883
1230	20105368	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN SELATAN 03 PAGI JAKARTA	SD	30354103570	2.067.892	0	0	0	2.067.892	0	2.067.892	2.067.892
1231	20105370	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN UTARA 01 PAGI JAKARTA	SD	30354103596	12.406.707	0	0	0	12.406.707	0	12.406.707	12.406.707
1232	20105373	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN UTARA 04 PAGI JAKARTA	SD	32254103606	26.439.172	0	0	0	26.439.172	0	26.439.172	26.439.172
1233	20105376	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN UTARA 07 PETANG JAKARTA	SD	30354103634	7.356.048	0	0	0	7.356.048	0	7.356.048	7.356.048
1234	20105377	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN UTARA 08 PETANG JAKARTA	SD	30354103642	7.228.127	0	0	0	7.228.127	0	7.228.127	7.228.127
1235	20105378	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN UTARA 09 PAGI JAKARTA	SD	30354103651	12.054.292	0	0	0	12.054.292	0	12.054.292	12.054.292
1236	20105379	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN UTARA 10 PAGI JAKARTA	SD	30354103669	19.458.725	0	0	0	19.458.725	0	19.458.725	19.458.725
1237	20105382	SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA BAMBU 01 PAGI JAKARTA	SD	11854104229	22.627.299	0	0	0	22.627.299	0	22.627.299	22.627.299
1238	20105383	SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA BAMBU 02 PETANG JAKARTA	SD	30054104237	17.938.650	0	0	0	17.938.650	0	17.938.650	17.938.650
1239	20105384	SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA BAMBU 03 JAKARTA	SD	11854104199	4.409.695	0	0	0	4.409.695	0	4.409.695	4.409.695
1240	20105385	SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA BAMBU 04 JAKARTA	SD	11854104202	1.729.160	0	0	0	1.729.160	0	1.729.160	1.729.160
1241	20105388	SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA BAMBU 07 PAGI JAKARTA	SD	11854104211	4.621.246	0	0	0	4.621.246	0	4.621.246	4.621.246
1242	20105393	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGA BESAR 01 PAGI JAKARTA	SD	30054104644	74.989	0	0	0	74.989	0	74.989	74.989
1243	20105396	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGA BESAR 05 PAGI JAKARTA	SD	30054104695	479.765	0	0	0	479.765	0	479.765	479.765
1244	20105399	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGA BESAR 11 PAGI JAKARTA	SD	30054104679	578.324	0	0	0	578.324	0	578.324	578.324
1245	20105400	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGA BESAR 15 PAGI JAKARTA	SD	30054104687	212.251	0	0	0				

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
1256	20105419	SEKOLAH DASAR NEGERI MERUYA UTARA 10 PAGI JAKARTA	SD	41154103844	1.636.950	0	0	0	1.636.950	0	1.636.950	1.636.950
1257	20105421	SEKOLAH DASAR NEGERI MERUYA UTARA 12 PAGI JAKARTA	SD	30354103863	25.127.124	0	0	0	25.127.124	0	25.127.124	25.127.124
1258	20105424	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 01 JAKARTA	SD	11354104406	2.431.348	0	0	0	2.431.348	0	2.431.348	2.431.348
1259	20105425	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 03 JAKARTA	SD	11354104279	28.845	0	0	0	28.845	0	28.845	28.845
1260	20105427	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 05 JAKARTA	SD	11354104287	1.006.856	0	0	0	1.006.856	0	1.006.856	1.006.856
1261	20105428	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 07 JAKARTA	SD	11354104295	1.862.259	0	0	0	1.862.259	0	1.862.259	1.862.259
1262	20105434	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 15 JAKARTA	SD	11354104325	1.730.192	0	0	0	1.730.192	0	1.730.192	1.730.192
1263	20105435	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 17 JAKARTA	SD	11354104333	131.436	0	0	0	131.436	0	131.436	131.436
1264	20105436	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 19 JAKARTA	SD	11354104341	5.773.029	0	0	0	5.773.029	0	5.773.029	5.773.029
1265	20105442	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERAH 25 JAKARTA	SD	11354104392	33.130.729	0	0	0	33.130.729	0	33.130.729	33.130.729
1266	20105445	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 01 PAGI JAKARTA	SD	30054102218	155.596	0	0	0	155.596	0	155.596	155.596
1267	20105446	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 02 PAGI JAKARTA	SD	30054102293	76.981	0	0	0	76.981	0	76.981	76.981
1268	20105447	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 03 PAGI JAKARTA	SD	30054102226	247.751	0	0	0	247.751	0	247.751	247.751
1269	20105449	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 05 PAGI JAKARTA	SD	30054102234	23.507.877	0	0	0	23.507.877	0	23.507.877	23.507.877
1270	20105450	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 06 PAGI JAKARTA	SD	30054102315	3.042.306	0	0	0	3.042.306	0	3.042.306	3.042.306
1271	20105452	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 08 PETANG JAKARTA	SD	30054102323	353	0	0	0	353	0	353	353
1272	20105455	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 11 PAGI JAKARTA	SD	30054102331	1.252.251	0	0	0	1.252.251	0	1.252.251	1.252.251
1273	20105457	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 12 PAGI JAKARTA	SD	30054102269	9.042.728	0	0	0	9.042.728	0	9.042.728	9.042.728
1274	20105458	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 13 PAGI JAKARTA	SD	30054102277	1.387.389	0	0	0	1.387.389	0	1.387.389	1.387.389
1275	20105461	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKOJAN 01 PAGI JAKARTA	SD	30054105373	51.560.958	0	0	0	51.560.958	0	51.560.958	51.560.958
1276	20105463	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKOJAN 03 PAGI JAKARTA	SD	30054105390	3.974.744	0	0	0	3.974.744	0	3.974.744	3.974.744
1277	20105465	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKOJAN 05 PAGI JAKARTA	SD	30054105411	12.492.268	0	0	0	12.492.268	0	12.492.268	12.492.268
1278	20105474	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUAYA 03 PAGI JAKARTA	SD	30354101232	50.762	0	0	0	50.762	0	50.762	50.762
1279	20105476	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUAYA 05 PETANG JAKARTA	SD	30354101259	1.356.173	0	0	0	1.356.173	0	1.356.173	1.356.173
1280	20105481	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 01 PAGI JAKARTA	SD	30054102391	416.326	0	0	0	416.326	0	416.326	416.326
1281	20105482	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 02 PETANG JAKARTA	SD	30054102404	971.997	0	0	0	971.997	0	971.997	971.997
1282	20105483	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 03 PAGI JAKARTA	SD	30054102412	6.426.159	0	0	0	6.426.159	0	6.426.159	6.426.159
1283	20105484	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 04 PAGI JAKARTA	SD	30054102421	705.034	0	0	0	705.034	0	705.034	705.034
1284	20105485	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 05 PAGI JAKARTA	SD	30054102510	1.207.623	0	0	0	1.207.623	0	1.207.623	1.207.623
1285	20105486	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 06 PAGI JAKARTA	SD	30054102439	27.028	0	0	0	27.028	0	27.028	27.028
1286	20105487	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 07 PETANG JAKARTA	SD	30054102447	4.950.092	0	0	0	4.950.092	0	4.950.092	4.950.092
1287	20105488	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 08 PAGI JAKARTA	SD	30054102455	965.835	0	0	0	965.835	0	965.835	965.835
1288	20105489	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 09 PAGI JAKARTA	SD	30054102528	13.188.095	0	0	0	13.188.095	0	13.188.095	13.188.095
1289	20105490	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 10 PETANG JAKARTA	SD	30054102463	39.220	0	0	0	39.220	0	39.220	39.220
1290	20105492	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 12 PAGI JAKARTA	SD	30054102480	11.698.236	0	0	0	11.698.236	0	11.698.236	11.698.236
1291	20105493	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 13 PETANG JAKARTA	SD	30054102498	5.278.282	0	0	0	5.278.282	0	5.278.282	5.278.282
1292	20105494	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMANAN 14 PETANG JAKARTA	SD	30054102501	118.069	0	0	0	118.069	0	118.069	118.069
1293	20105495	SEKOLAH DASAR NEGERI SLIPI 01 JAKARTA	SD	11854104458	5.736.807	0	0	0	5.736.807	0	5.736.807	5.736.807
1294	20105499	SEKOLAH DASAR NEGERI SLIPI 07 JAKARTA	SD	11354104465	5.254.127	0	0	0	5.254.127	0	5.254.127	5.254.127
1295	20105501	SEKOLAH DASAR NEGERI SLIPI 11 JAKARTA	SD	11354104473	340.527	0	0	0	340.527	0	340.527	340.527
1296	20105506	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG 01 PAGI JAKARTA	SD	41154103941	22.607.840	0	0	0	22.607.840	0	22.607.840	22.607.840
1297	20105508	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG 03 PAGI JAKARTA	SD	30354103952	30.645.046	0	0	0	30.645.046	0	30.645.046	30.645.046
1298	20105509	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG 04 PAGI JAKARTA	SD	41154103968	2.109.954	0	0	0	2.109.954	0	2.109.954	2.109.954
1299	20105510	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG 05 PAGI JAKARTA	SD	41154103976	102.734	0	0	0	102.734	0	102.734	102.734
1300	20105511	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG 06 PAGI JAKARTA	SD	41154103984	10.298.969	0	0	0	10.298.969	0	10.298.969	10.298.969
1301	20105514	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKABUMI SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	41154103275	1.024.099	0	0	0	1.024.099	0	1.024.099	1.024.099
1302	20105516	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKABUMI SELATAN 05 PAGI JAKARTA	SD	41154103291	646.460	0	0	0	646.460	0	646.460	646.460
1303	20105517	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKABUMI SELATAN 06 PAGI JAKARTA	SD	41154103305	537.874	0	0	0	537.874	0	537.874	537.874
1304	20105518	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKABUMI SEL										

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
1319	20105536	SEKOLAH DASAR NEGERI TANAH SEREAL 02 PETANG JAKARTA	SD	30054105535	8.974.549	0	0	0	8.974.549	0	8.974.549	8.974.549
1320	20105537	SEKOLAH DASAR NEGERI TANAH SEREAL 03 PAGI JAKARTA	SD	30054105519	13.442.834	0	0	0	13.442.834	0	13.442.834	13.442.834
1321	20105539	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG DUREN SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	30054101602	3.250.076	0	0	0	3.250.076	0	3.250.076	3.250.076
1322	20105542	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG DUREN SELATAN 05 PAGI JAKARTA	SD	30054101351	783.994	0	0	0	783.994	0	783.994	783.994
1323	20105544	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG DUREN UTARA 01 PAGI JAKARTA	SD	30054101629	12.456.277	0	0	0	12.456.277	0	12.456.277	12.456.277
1324	20105545	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG DUREN UTARA 02 PAGI JAKARTA	SD	30054101637	6.258.906	0	0	965.580	5.293.326	0	5.293.326	6.258.906
1325	20105547	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG DUREN UTARA 06 PAGI JAKARTA	SD	30354101640	23.333.955	0	0	0	23.333.955	0	23.333.955	23.333.955
1326	20105549	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 01 PAGI JAKARTA	SD	30054102579	211.241	0	0	0	211.241	0	211.241	211.241
1327	20105560	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 02 PAGI JAKARTA	SD	30054102692	231.110	0	0	0	231.110	0	231.110	231.110
1328	20105561	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 03 PAGI JAKARTA	SD	30054102587	274.290	0	0	0	274.290	0	274.290	274.290
1329	20105562	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 04 PAGI JAKARTA	SD	30054102595	2.236.969	0	0	0	2.236.969	0	2.236.969	2.236.969
1330	20105564	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 06 PAGI JAKARTA	SD	30054102706	3.613.642	0	0	0	3.613.642	0	3.613.642	3.613.642
1331	20105565	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 07 PAGI JAKARTA	SD	30054102609	137.071	0	0	0	137.071	0	137.071	137.071
1332	20105566	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 08 PAGI JAKARTA	SD	30054102617	1.108.736	0	0	0	1.108.736	0	1.108.736	1.108.736
1333	20105568	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 09 PAGI JAKARTA	SD	30054102714	264.736	0	0	0	264.736	0	264.736	264.736
1334	20105569	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 10 PAGI JAKARTA	SD	30054102625	2.115.284	0	0	0	2.115.284	0	2.115.284	2.115.284
1335	20105570	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 11 PAGI JAKARTA	SD	30054102633	2.968.714	0	0	0	2.968.714	0	2.968.714	2.968.714
1336	20105571	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 12 PETANG JAKARTA	SD	30054102641	258.343	0	0	0	258.343	0	258.343	258.343
1337	20105572	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 13 PETANG JAKARTA	SD	30054102722	26.383.511	0	0	0	26.383.511	0	26.383.511	26.383.511
1338	20105574	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 15 PAGI JAKARTA	SD	30054102650	1.413.433	0	0	0	1.413.433	0	1.413.433	1.413.433
1339	20105575	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 16 PETANG JAKARTA	SD	30054102668	116.707	0	0	0	116.707	0	116.707	116.707
1340	20105576	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 17 JAKARTA	SD	30054102749	9.661.556	0	0	0	9.661.556	0	9.661.556	9.661.556
1341	20105578	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 19 PETANG JAKARTA	SD	30054102757	62.254	0	0	0	62.254	0	62.254	62.254
1342	20105579	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGAL ALUR 20 PETANG JAKARTA	SD	30054102676	1.011.470	0	0	0	1.011.470	0	1.011.470	1.011.470
1343	20105581	SEKOLAH DASAR NEGERI TOMANG 01 PAGI JAKARTA	SD	10154101691	805.250	0	0	0	805.250	0	805.250	805.250
1344	20105587	SEKOLAH DASAR NEGERI TOMANG 11 PAGI JAKARTA	SD	10154101721	18.515.723	0	0	0	18.515.723	0	18.515.723	18.515.723
1345	20105590	SEKOLAH DASAR NEGERI WIJAYA KUSUMA 01 PAGI JAKARTA	SD	30054101751	26.700.394	0	0	0	26.700.394	0	26.700.394	26.700.394
1346	20105591	SEKOLAH DASAR NEGERI WIJAYA KUSUMA 02 PAGI JAKARTA	SD	30054101769	407.391	0	0	0	407.391	0	407.391	407.391
1347	20105594	SEKOLAH DASAR NEGERI WIJAYA KUSUMA 05 PAGI JAKARTA	SD	30054101785	1.428.335	0	0	0	1.428.335	0	1.428.335	1.428.335
1348	20105596	SEKOLAH DASAR NEGERI WIJAYA KUSUMA 07 PAGI JAKARTA	SD	30054101793	14.851.406	0	0	0	14.851.406	0	14.851.406	14.851.406
1349	20105813	SEKOLAH DASAR NEGERI BANGKA 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110144	35.471.920	0	0	0	35.471.920	0	35.471.920	35.471.920
1350	20105814	SEKOLAH DASAR NEGERI BINTARO 03 JAKARTA	SD	41154111456	480.510	0	0	0	480.510	0	480.510	480.510
1351	20105821	SEKOLAH DASAR NEGERI BUKIT DURI 05 PAGI JAKARTA	SD	40254112186	71.389.086	0	0	0	71.389.086	0	71.389.086	71.389.086
1352	20105828	SEKOLAH DASAR NEGERI CIGANJUR 04 PAGI JAKARTA	SD	40054108646	165.548	0	0	0	165.548	0	165.548	165.548
1353	20105830	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK BARAT 01 PAGI JAKARTA	SD	40054108204	595.491	0	0	0	595.491	0	595.491	595.491
1354	20105831	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK BARAT 03 JAKARTA	SD	40054108174	3.507.024	0	0	0	3.507.024	270	3.507.294	3.507.294
1355	20105833	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK BARAT 07 PAGI JAKARTA	SD	40054108191	2.344.000	0	0	0	2.344.000	0	2.344.000	2.344.000
1356	20105834	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK BARAT 08 JAKARTA	SD	40054108221	24.284.462	0	0	1.575.933	22.708.529	0	22.708.529	24.284.462
1357	20105837	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK BARAT 12 PAGI JAKARTA	SD	40054108239	11.832.776	0	0	0	11.832.776	0	11.832.776	11.832.776
1358	20105840	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK BARAT 15 JAKARTA	SD	40054108255	2.365.600	0	0	0	2.365.600	0	2.365.600	2.365.600
1359	20105841	SEKOLAH DASAR NEGERI CILANDAK BARAT 17 PAGI JAKARTA	SD	40054108263	1.502.870	0	0	0	1.502.870	0	1.502.870	1.502.870
1360	20105846	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPEDAK 01 PAGI JAKARTA	SD	40054108689	126.760.647	0	0	8.675.646	118.085.001	0	118.085.001	126.760.647
1361	20105848	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPEDAK 03 PAGI JAKARTA	SD	40054108697	115.464.047	0	0	0	115.464.047	0	115.464.047	115.464.047
1362	20105849	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPEDAK 05 PAGI JAKARTA	SD	40054108701	15.576.543	0	0	0	15.576.543	0	15.576.543	15.576.543
1363	20105851	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPETE SELATAN 01 JAKARTA	SD	40054108301	7.076.672	0	0	0	7.076.672	0	7.076.672	7.076.672
1364	20105853	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPETE SELATAN 03 JAKARTA	SD	40054108298	964.966	0	0	0	964.966	0	964.966	964.966
1365	20105855	SE										

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SiLPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SiLPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SiLPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
1382	20105896	SEKOLAH DASAR NEGERI GANDARIA UTARA 11 PAGI JAKARTA	SD	40054109367	2.384.848	0	0	0	2.384.848	0	2.384.848	2.384.848
1383	20105898	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL SELATAN 01 PAGI JAKARTA	SD	41154109702	1.845.691	0	0	0	1.845.691	0	1.845.691	1.845.691
1384	20105900	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL SELATAN 05 JAKARTA	SD	41154109711	10.969.601	0	0	0	10.969.601	0	10.969.601	10.969.601
1385	20105904	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL SELATAN 13 PAGI JAKARTA	SD	41154109745	19.128.237	0	0	0	19.128.237	0	19.128.237	19.128.237
1386	20105906	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL SELATAN 17 PAGI JAKARTA	SD	41154109753	5.186.920	0	0	0	5.186.920	0	5.186.920	5.186.920
1387	20105907	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL UTARA 01 JAKARTA	SD	41154109796	3.314.478	0	0	0	3.314.478	0	3.314.478	3.314.478
1388	20105909	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL UTARA 03 PAGI JAKARTA	SD	41154109800	214.496.308	0	0	0	214.496.308	2.900	214.499.208	214.499.208
1389	20105913	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL UTARA 09 JAKARTA	SD	41154109788	61.209.303	0	0	0	61.209.303	0	61.209.303	61.209.303
1390	20105919	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL UTARA 16 JAKARTA	SD	41154109842	24.745.300	0	0	3.495.200	21.250.100	2.474.000	23.724.100	27.219.300
1391	20105921	SEKOLAH DASAR NEGERI GUNTUR 01 PAGI JAKARTA	SD	40254111872	11.775	0	0	0	11.775	0	11.775	11.775
1392	20105922	SEKOLAH DASAR NEGERI GUNTUR 03 PAGI JAKARTA	SD	40254111881	574	0	0	0	574	0	574	574
1393	20105923	SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG 01 JAKARTA	SD	40054109405	2.452.291	0	0	0	2.452.291	0	2.452.291	2.452.291
1394	20105927	SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNG 05 JAKARTA	SD	40054109391	1.557.919	0	0	0	1.557.919	0	1.557.919	1.557.919
1395	20105929	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 01 JAKARTA	SD	40054108794	11.722.781	0	0	508.959	11.213.822	0	11.213.822	11.722.781
1396	20105930	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 02 JAKARTA	SD	40054108808	2.125.401	0	0	0	2.125.401	0	2.125.401	2.125.401
1397	20105931	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 03 JAKARTA	SD	40054108816	8.042.091	0	0	0	8.042.091	0	8.042.091	8.042.091
1398	20105932	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 04 JAKARTA	SD	40054108824	15.995.705	0	0	0	15.995.705	0	15.995.705	15.995.705
1399	20105933	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 05 JAKARTA	SD	40054108832	9.528.707	0	0	0	9.528.707	0	9.528.707	9.528.707
1400	20105934	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 06 JAKARTA	SD	40054108841	4.592.327	0	0	0	4.592.327	0	4.592.327	4.592.327
1401	20105935	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 07 JAKARTA	SD	40054108859	35.874.653	0	0	0	35.874.653	0	35.874.653	35.874.653
1402	20105937	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 09 JAKARTA	SD	40054108875	466.483	0	0	0	466.483	0	466.483	466.483
1403	20105938	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 11 JAKARTA	SD	40054108883	1.607.411	0	0	0	1.607.411	0	1.607.411	1.607.411
1404	20105939	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 12 JAKARTA	SD	40054108891	520.935	0	0	0	520.935	0	520.935	520.935
1405	20105940	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 13 JAKARTA	SD	40054108905	3.756.256	0	0	0	3.756.256	0	3.756.256	3.756.256
1406	20105941	SEKOLAH DASAR NEGERI JAGAKARSA 14 JAKARTA	SD	40054108786	15.534.751	0	0	0	15.534.751	0	15.534.751	15.534.751
1407	20105942	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPADANG 01 PAGI JAKARTA	SD	40054110870	48.131	0	0	0	48.131	0	48.131	48.131
1408	20105944	SEKOLAH DASAR NEGERI JATIPADANG 05 PAGI JAKARTA	SD	40054110888	83.164.049	0	0	0	83.164.049	0	83.164.049	83.164.049
1409	20105945	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBATA 01 JAKARTA	SD	40054110560	7.778.209	0	0	0	7.778.209	0	7.778.209	7.778.209
1410	20105946	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBATA 03 JAKARTA	SD	40054110578	6.592.030	0	0	0	6.592.030	0	6.592.030	6.592.030
1411	20105947	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBATA 04 JAKARTA	SD	40054110586	8.203.295	0	0	0	8.203.295	0	8.203.295	8.203.295
1412	20105949	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBATA 07 JAKARTA	SD	40054110594	6.134.477	0	0	0	6.134.477	0	6.134.477	6.134.477
1413	20105951	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBATA 11 JAKARTA	SD	40054110608	4.197.558	0	0	0	4.197.558	0	4.197.558	4.197.558
1414	20105952	SEKOLAH DASAR NEGERI KARET 01 JAKARTA	SD	40254111902	39.857.771	0	0	0	39.857.771	7.463.545	47.321.316	47.321.316
1415	20105957	SEKOLAH DASAR NEGERI KARET KUNINGAN 03 PAGI JAKARTA	SD	40254111937	38.095	0	0	0	38.095	0	38.095	38.095
1416	20105961	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 03 JAKARTA	SD	41154109915	3.634.649	0	0	0	3.634.649	0	3.634.649	3.634.649
1417	20105962	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 05 PAGI JAKARTA	SD	41154109923	272.204	0	0	0	272.204	0	272.204	272.204
1418	20105964	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 09 PAGI JAKARTA	SD	41154109931	26.266.940	0	0	4.445.329	21.821.611	0	21.821.611	26.266.940
1419	20105966	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 11 PAGI JAKARTA	SD	41154109877	27.477.293	0	0	5.879.632	21.597.661	0	21.597.661	27.477.293
1420	20105967	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 12 PAGI JAKARTA	SD	41154109885	65.905	0	0	0	65.905	0	65.905	65.905
1421	20105969	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 14 PAGI JAKARTA	SD	41154109940	51.874	0	0	0	51.874	0	51.874	51.874
1422	20105970	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 16 PAGI JAKARTA	SD	41154109893	210.333	0	0	0	210.333	0	210.333	210.333
1423	20105972	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA SELATAN 19 JAKARTA	SD	41154109958	419.980	0	0	0	419.980	0	419.980	419.980
1424	20105975	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA UTARA 01 JAKARTA	SD	41154110018	5.823.901	0	0	0	5.823.901	0	5.823.901	5.823.901
1425	20105977	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA UTARA 03 JAKARTA	SD	41154110034	2.337.151	0	0	0	2.337.151	0	2.337.151	2.337.151
1426	20105980	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBAYORAN LAMA UTARA 07 PAGI JAKARTA	SD	41154109982	2.862.475	0	0	0	2.862.475	0	2.862.475	2.862.475
1427	20105982	SEKOLAH DASAR NEGER										

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SiLPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SiLPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SiLPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
1445	20106050	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGARAI SELATAN 01 JAKARTA	SD	40254112313	7.051.538	0	0	0	7.051.538	0	7.051.538	7.051.538
1446	20106052	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGARAI SELATAN 03 JAKARTA	SD	40254112321	1.285.409	0	0	0	1.285.409	0	1.285.409	1.285.409
1447	20106054	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG ATAS 01 PAGI JAKARTA	SD	40254112038	23.310.163	0	0	0	23.310.163	0	23.310.163	23.310.163
1448	20106055	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG ATAS 02 JAKARTA	SD	40254111996	310.201	0	0	0	310.201	0	310.201	310.201
1449	20106056	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG ATAS 05 PAGI JAKARTA	SD	40254112011	290.703	0	0	0	290.703	0	290.703	290.703
1450	20106057	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG ATAS 11 JAKARTA	SD	40254112046	581.512	0	0	0	581.512	0	581.512	581.512
1451	20106060	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG AATAS 21 PAGI JAKARTA	SD	40254111988	2.308.148	0	0	0	2.308.148	0	2.308.148	2.308.148
1452	20106063	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG DALAM 05 PAGI JAKARTA	SD	40254112364	346.995	0	0	0	346.995	0	346.995	346.995
1453	20106066	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTENG DALAM 11 PAGI JAKARTA	SD	40254112381	3.763.766	0	0	0	3.763.766	0	3.763.766	3.763.766
1454	20106067	SEKOLAH DASAR NEGERI PANCORAN 01 PAGI JAKARTA	SD	40054110616	3.910.796	0	0	0	3.910.796	0	3.910.796	3.910.796
1455	20106069	SEKOLAH DASAR NEGERI PANCORAN 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110659	244.834	0	0	0	244.834	0	244.834	244.834
1456	20106072	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR MANGGIS 01 PAGI JAKARTA	SD	40254112089	410.656	0	0	0	410.656	0	410.656	410.656
1457	20106074	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR MANGGIS 03 JAKARTA	SD	40254112071	75.365.428	0	0	0	75.365.428	0	75.365.428	75.365.428
1458	20106076	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR MINGGU 01 PAGI JAKARTA	SD	40054111051	1.532.861	0	0	0	1.532.861	0	1.532.861	1.532.861
1459	20106077	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR MINGGU 02 PAGI JAKARTA	SD	40054111019	3.788.001	0	0	0	3.788.001	0	3.788.001	3.788.001
1460	20106078	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR MINGGU 03 PAGI JAKARTA	SD	40054111027	4.387.035	0	0	0	4.387.035	0	4.387.035	4.387.035
1461	20106079	SEKOLAH DASAR NEGERI PASAR MINGGU 04 PAGI JAKARTA	SD	40054111035	4.537.545	0	0	0	4.537.545	0	4.537.545	4.537.545
1462	20106081	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN BARAT 01 PAGI JAKARTA	SD	40054111108	423.248	0	0	0	423.248	0	423.248	423.248
1463	20106084	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN BARAT 05 PAGI JAKARTA	SD	40054111167	3.791.127	0	0	0	3.791.127	0	3.791.127	3.791.127
1464	20106085	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN BARAT 06 PAGI JAKARTA	SD	40054111116	293.131	0	0	0	293.131	0	293.131	293.131
1465	20106087	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN BARAT 08 PAGI JAKARTA	SD	40054111124	18.298.313	0	0	0	18.298.313	0	18.298.313	18.298.313
1466	20106088	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN BARAT 09 PAGI JAKARTA	SD	40054111132	1.155.860	0	0	0	1.155.860	0	1.155.860	1.155.860
1467	20106090	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN BARAT 11 PAGI JAKARTA	SD	40054111159	1.285.266	0	0	0	1.285.266	0	1.285.266	1.285.266
1468	20106092	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 01 PAGI JAKARTA	SD	40054111191	27.713.007	0	0	0	27.713.007	0	27.713.007	27.713.007
1469	20106097	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 07 JAKARTA	SD	40054111264	1.018.236	0	0	0	1.018.236	0	1.018.236	1.018.236
1470	20106099	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 11 PAGI JAKARTA	SD	40054111213	3.911.962	0	0	0	3.911.962	0	3.911.962	3.911.962
1471	20106102	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 15 PAGI JAKARTA	SD	40054111221	351.360	0	0	0	351.360	0	351.360	351.360
1472	20106103	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 17 PAGI JAKARTA	SD	40054111230	15.440.884	0	0	0	15.440.884	0	15.440.884	15.440.884
1473	20106105	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 20 JAKARTA	SD	40054111272	9.844.810	0	0	0	9.844.810	0	9.844.810	9.844.810
1474	20106107	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 22 PAGI JAKARTA	SD	40054111256	1.436.955	0	0	0	1.436.955	0	1.436.955	1.436.955
1475	20106108	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 01 JAKARTA	SD	40054110306	9.808.300	0	0	0	9.808.300	0	9.808.300	9.808.300
1476	20106110	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110314	3.971.766	0	0	0	3.971.766	0	3.971.766	3.971.766
1477	20106113	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 05 PAGI JAKARTA	SD	40054110322	23.535.354	0	0	0	23.535.354	0	23.535.354	23.535.354
1478	20106114	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 07 JAKARTA	SD	40054110292	3.403.899	0	0	0	3.403.899	0	3.403.899	3.403.899
1479	20106115	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 08 JAKARTA	SD	40054110331	2.398.854	0	0	0	2.398.854	0	2.398.854	2.398.854
1480	20106117	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 11 PAGI JAKARTA	SD	40054110357	4.997.710	0	0	0	4.997.710	0	4.997.710	4.997.710
1481	20106118	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 12 PAGI JAKARTA	SD	40054110365	636.052	618.800	0	0	17.252	0	17.252	17.252
1482	20106119	SEKOLAH DASAR NEGERI PELA MAMPANG 14 PAGI JAKARTA	SD	40054110381	28.006.010	0	0	0	28.006.010	0	28.006.010	28.006.010
1483	20106120	SEKOLAH DASAR NEGERI PESANGGRAHAN 01 JAKARTA	SD	41154111511	12.700.375	0	0	7.527.410	5.172.965	0	5.172.965	12.700.375
1484	20106121	SEKOLAH DASAR NEGERI PESANGGRAHAN 02 JAKARTA	SD	41154111529	20.032.795	0	0	0	20.032.795	0	20.032.795	20.032.795
1485	20106122	SEKOLAH DASAR NEGERI PESANGGRAHAN 03 JAKARTA	SD	41154111537	48.812.670	0	0	0	48.812.670	0	48.812.670	48.812.670
1486	20106124	SEKOLAH DASAR NEGERI PESANGGRAHAN 04 JAKARTA	SD	41154111553	2.565.880	0	0	0	2.565.880	0	2.565.880	2.565.880
1487	20106125	SEKOLAH DASAR NEGERI PESANGGRAHAN 05 JAKARTA	SD	41154111561	185.599	0	0	0	185.599	0	185.599	185.599
1488	20106129	SEKOLAH DASAR NEGERI PESANGGRAHAN 09 JAKARTA	SD	41154111545	8.761.494	0	0	0	8.761.494	0	8.761.494	8.761.494
1489	20106130	SEKOLAH DASAR NEGERI PESANGGRAHAN 10 JAKARTA	SD	41154111570	315.354	0	0	0	315.354	0	315.354	315.354
1490	20106131	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN SELATAN 01 JAKARTA	SD	41154111642	16.667.736	0	0	0	16.667.736	0	16.667.736	16.667.736
1491	20106132	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN SELATAN 02 JAKARTA	SD	41154111651	29.963.533	0	0	0	29.963.533	0	29.963.533	29.963.533
1492	20106133	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN SELATAN 03 JAKARTA	SD	41154111669	7.148.865	0	0	0	7.148.865	0	7.148.865	7.148.865
1493	20106135	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN SELATAN 05 JAKARTA	SD	41154111677	19.289.546	0	0	0	19.289.546	0	19.289.546	19.289.546
1494	20106139	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN UTARA 01 JAKARTA	SD	41154111723	2.700.528	0	0	0	2.700.528	0	2.700.528	2.700.528
1495	20106140	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUKANGAN UTARA 05 JAKARTA	SD	41154111774	19.502.366	0	0	0	19.502.366	0	19.502.366	19.502.366
1496	20106141	SEKOLAH DASAR NEGERI PETUK										

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SiLPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SiLPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SiLPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
1508	20106159	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK LABU 16 JAKARTA	SD	40054108514	10.227.292	0	0	0	10.227.292	0	10.227.292	10.227.292
1509	20106164	SEKOLAH DASAR NEGERI PULO 01 PAGI JAKARTA	SD	40054109511	4.945.500	0	0	0	4.945.500	0	4.945.500	4.945.500
1510	20106172	SEKOLAH DASAR NEGERI RAGUNAN 05 PAGI JAKARTA	SD	40054111345	242.511	0	0	0	242.511	0	242.511	242.511
1511	20106174	SEKOLAH DASAR NEGERI RAGUNAN 12 JAKARTA	SD	40054111370	5.651.513	0	0	0	5.651.513	0	5.651.513	5.651.513
1512	20106176	SEKOLAH DASAR NEGERI RAGUNAN 14 PAGI JAKARTA	SD	40054111337	1.121.876	0	0	0	1.121.876	0	1.121.876	1.121.876
1513	20106183	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWAJATI 08 PAGI JAKARTA	SD	40054110713	18.865.572	0	0	0	18.865.572	0	18.865.572	18.865.572
1514	20106184	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BARAT 09 JAKARTA	SD	40054109588	9.202.130	0	0	0	9.202.130	0	9.202.130	9.202.130
1515	20106186	SEKOLAH DASAR NEGERI SETIABUDI 01 JAKARTA	SD	40254112127	4.591.367	0	0	0	4.591.367	0	4.591.367	4.591.367
1516	20106193	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG SAWAH 07 JAKARTA	SD	40054109103	16.575.437	0	0	0	16.575.437	0	16.575.437	16.575.437
1517	20106195	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG SAWAH 11 PAGI JAKARTA	SD	40054109111	5.787.604	0	0	255.668	5.531.936	0	5.531.936	5.787.604
1518	20106199	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG SAWAH 15 PAGI JAKARTA	SD	40054109120	547.737	0	0	0	547.737	0	547.737	547.737
1519	20106201	SEKOLAH DASAR NEGERI SRENGSENG SAWAH 17 PAGI JAKARTA	SD	40054109081	13.297.360	0	0	42.768	13.254.592	0	13.254.592	13.297.360
1520	20106202	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG BARAT 01 PAGI JAKARTA	SD	40054109171	3.023.210	0	0	0	3.023.210	0	3.023.210	3.023.210
1521	20106203	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG BARAT 05 PAGI JAKARTA	SD	40054109197	346.125	0	0	0	346.125	0	346.125	346.125
1522	20106214	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET TIMUR 15 PAGI JAKARTA	SD	40254112470	8.238.530	0	0	0	8.238.530	0	8.238.530	8.238.530
1523	20106270	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL UTARA 05 JAKARTA	SD	41154109818	35.797	0	0	0	35.797	0	35.797	35.797
1524	20106342	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 133 JAKARTA	SMP	30154131801	1.765.136	0	0	0	1.765.136	0	1.765.136	1.765.136
1525	20106343	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 241 JAKARTA	SMP	20054131769	1.202.550	0	0	0	1.202.550	0	1.202.550	1.202.550
1526	20106344	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 288 JAKARTA	SMP	20054131742	1.477.117	0	0	0	1.477.117	0	1.477.117	1.477.117
1527	20106346	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 260 JAKARTA	SMP	20154131783	17.922.323	0	0	0	17.922.323	0	17.922.323	17.922.323
1528	20106347	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 285 JAKARTA	SMP	20054131777	1.500.095	0	0	0	1.500.095	0	1.500.095	1.500.095
1529	20106401	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 39 JAKARTA	SMP	11154134341	212.884.101	0	0	0	212.884.101	0	212.884.101	212.884.101
1530	20106410	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 71 JAKARTA	SMP	12254134223	15.156.642	0	0	0	15.156.642	0	15.156.642	15.156.642
1531	20106716	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 136 JAKARTA	SMP	20154140073	8.961.265	0	0	0	8.961.265	0	8.961.265	8.961.265
1532	20107034	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 16 JAKARTA	SMP	11354135921	8.909.464	0	0	0	8.909.464	0	8.909.464	8.909.464
1533	20107179	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 283 JAKARTA	SMP	51154137397	21.336.471	0	0	0	21.336.471	0	21.336.471	21.336.471
1534	20107180	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 284 JAKARTA	SMP	50354137264	59.269.100	0	0	0	59.269.100	0	59.269.100	59.269.100
1535	20107181	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 287 JAKARTA	SMP	51354138764	32.510.711	0	0	0	32.510.711	0	32.510.711	32.510.711
1536	20107182	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 35 JAKARTA	SMP	51154138431	138.945.286	0	0	0	138.945.286	0	138.945.286	138.945.286
1537	20107183	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 01 PULAU PARI JAKARTA	SMP	20154131759	18.916.891	0	0	0	18.916.891	0	18.916.891	18.916.891
1538	20107185	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 69 JAKARTA	SMA	30154122292	516.291.135	0	0	0	516.291.135	43.500	516.334.635	516.334.635
1539	20107319	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 28 JAKARTA	SMA	40454124121	169.378.150	0	0	0	169.378.150	0	169.378.150	169.378.150
1540	20107320	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 79 JAKARTA	SMA	40454124261	396.565.853	0	0	0	396.565.853	0	396.565.853	396.565.853
1541	20107358	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 59 JAKARTA	SMK	40454128470	17.957.659	0	0	0	17.957.659	0	17.957.659	17.957.659
1542	20107433	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 23 JAKARTA	SMK	10454131412	696.337.717	0	0	0	696.337.717	0	696.337.717	696.337.717
1543	20107434	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	SMK	20054131211	202.648.707	0	0	0	202.648.707	0	202.648.707	202.648.707
1544	20107435	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	SMK	20954131002	172.982.637	0	0	0	172.982.637	0	172.982.637	172.982.637
1545	20107436	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 JAKARTA	SMK	20154131091	277.242.161	0	0	0	277.242.161	0	277.242.161	277.242.161
1546	20107437	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 49 JAKARTA	SMK	20954131037	436.922.387	0	0	0	436.922.387	0	436.922.387	436.922.387
1547	20107438	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 55 JAKARTA	SMK	10454131421	108.422.530	0	0	0	108.422.530	0	108.422.530	108.422.530
1548	20107439	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 56 JAKARTA	SMK	30254131508	805.273.547	0	0	0	805.273.547	0	805.273.547	805.273.547
1549	20107711	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 02 PULAU SABIRA JAKARTA	SMP	20054131793	1.105.000	0	0	0	1.105.000	0	1.105.000	1.105.000
1550	20108288	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON MANGGIS 01 PAGI JAKARTA	SD	50054117072	2.262.781	0	0	0	2.262.781	0	2.262.781	2.262.781
1551	20108298	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON MANGGIS 11 PAGI JAKARTA	SD	50054117064	4.609.144	0	0	0	4.609.144	0	4.609.144	4.609.144
1552	20108302	SEKOLAH DASAR NEGERI PALMERIAM 01 PAGI JAKARTA	SD	50054117111	4.199.919	0	0	3.345.135	854.			

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
1571	20108422	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU SELATAN 21 JAKARTA	SD	50054117412	8.401.851	0	0	0	8.401.851	0	8.401.851	8.401.851
1572	20108425	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 10 JAKARTA	SD	51254114824	1.951.330	0	0	0	1.951.330	0	1.951.330	1.951.330
1573	20108440	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 08 JAKARTA	SD	51154115300	18.767.228	0	0	0	18.767.228	0	18.767.228	18.767.228
1574	20108442	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 13 PAGI JAKARTA	SD	51154115326	267.263	0	0	0	267.263	0	267.263	267.263
1575	20108445	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 15 PAGI JAKARTA	SD	51154115385	2.970.530	0	0	0	2.970.530	0	2.970.530	2.970.530
1576	20108446	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 16 JAKARTA	SD	51154115393	11.617.827	0	0	0	11.617.827	0	11.617.827	11.617.827
1577	20108447	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 17 JAKARTA	SD	51154115407	36.039	0	0	0	36.039	0	36.039	36.039
1578	20108449	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 19 PAGI JAKARTA	SD	51154115334	1.113	0	0	0	1.113	0	1.113	1.113
1579	20108450	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 20 JAKARTA	SD	51154115423	4.766.550	0	0	0	4.766.550	0	4.766.550	4.766.550
1580	20108451	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 01 PAGI JAKARTA	SD	51154115440	118.921.401	0	0	0	118.921.401	39.466.000	158.387.401	158.387.401
1581	20108453	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 03 JAKARTA	SD	51154115466	42.594.532	0	0	0	42.594.532	0	42.594.532	42.594.532
1582	20108455	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 05 PAGI JAKARTA	SD	51154115491	1.784.708	0	1.750.000	0	34.708	0	34.708	34.708
1583	20108459	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 08 JAKARTA	SD	51154115512	25.051.794	0	0	2.088.834	22.962.960	0	22.962.960	25.051.794
1584	20108460	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 09 PETANG JAKARTA	SD	51154115521	2.758.703	0	0	0	2.758.703	0	2.758.703	2.758.703
1585	20108462	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR UTARA 11 PAGI JAKARTA	SD	51154115547	300.518	0	0	299.970	548	0	548	300.518
1586	20108463	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 01 PAGI JAKARTA	SD	51154115601	1.819.660	0	0	0	1.819.660	0	1.819.660	1.819.660
1587	20108521	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 02 PAGI JAKARTA	SD	51154115610	141.191	0	0	0	141.191	0	141.191	141.191
1588	20108523	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 04 JAKARTA	SD	51154115628	10.946.523	0	0	0	10.946.523	0	10.946.523	10.946.523
1589	20108524	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 05 PAGI JAKARTA	SD	51154115636	45.388.422	0	0	0	45.388.422	0	45.388.422	45.388.422
1590	20108526	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 07 JAKARTA	SD	51154115652	9.082.850	0	0	0	9.082.850	0	9.082.850	9.082.850
1591	20108528	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG CEMPEDAK 09 PAGI JAKARTA	SD	51154115661	56.400.150	0	0	740.049	55.660.101	0	55.660.101	56.400.150
1592	20108529	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 01 JAKARTA	SD	51154115679	13.174.020	0	0	0	13.174.020	0	13.174.020	13.174.020
1593	20108530	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 02 PAGI JAKARTA	SD	50054115681	2.701.503	0	0	368.520	2.332.983	0	2.332.983	2.701.503
1594	20108532	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 04 JAKARTA	SD	51154115741	42	0	0	0	42	0	42	42
1595	20108534	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 06 JAKARTA	SD	51154115709	7.771.514	0	0	0	7.771.514	0	7.771.514	7.771.514
1596	20108535	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 07 JAKARTA	SD	51154115750	150.111.526	0	0	0	150.111.526	0	150.111.526	150.111.526
1597	20108538	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 12 JAKARTA	SD	51154115717	40.727.859	0	0	0	40.727.859	0	40.727.859	40.727.859
1598	20108541	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 15 PAGI JAKARTA	SD	51154115776	3.754.623	0	0	0	3.754.623	0	3.754.623	3.754.623
1599	20108545	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG 01 PAGI JAKARTA	SD	50154117976	6.357.549	0	0	0	6.357.549	0	6.357.549	6.357.549
1600	20108547	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 16 PAGI JAKARTA	SD	51154115784	1.996.217	0	0	0	1.996.217	0	1.996.217	1.996.217
1601	20108548	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 17 PAGI JAKARTA	SD	51154115792	4.479	0	0	0	4.479	0	4.479	4.479
1602	20108550	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 19 PAGI JAKARTA	SD	51154115806	21.642	0	0	0	21.642	0	21.642	21.642
1603	20108551	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 20 PAGI JAKARTA	SD	51154115814	52.850	0	0	0	52.850	0	52.850	52.850
1604	20108557	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 01 JAKARTA	SD	51254114298	11.229.608	0	0	0	11.229.608	0	11.229.608	11.229.608
1605	20108558	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 02 JAKARTA	SD	51254114301	3.732.481	0	0	0	3.732.481	0	3.732.481	3.732.481
1606	20108560	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 05 JAKARTA	SD	51254114310	49.951.715	0	0	5.114.223	44.837.492	0	44.837.492	49.951.715
1607	20108561	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 06 JAKARTA	SD	51254114328	2.804.298	0	0	0	2.804.298	0	2.804.298	2.804.298
1608	20108562	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 07 PAGI JAKARTA	SD	51254114255	95.231.910	0	0	0	95.231.910	0	95.231.910	95.231.910
1609	20108565	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 10 JAKARTA	SD	51254114271	16.032.059	0	0	407.924	15.624.135	0	15.624.135	16.032.059
1610	20108568	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 13 PAGI JAKARTA	SD	51254114336	9.077.752	0	0	0	9.077.752	0	9.077.752	9.077.752
1611	20108569	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 14 JAKARTA	SD	51254114280	11.085.046	0	0	0	11.085.046	0	11.085.046	11.085.046
1612	20108571	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 16 JAKARTA	SD	51254114352	25.688.143	0	0	0	25.688.143	0	25.688.143	25.688.143
1613	20108573	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN SAWIT 18 JAKARTA	SD	51254114361	21.644.043	0	0	0	21.644.043	0	21.644.043	21.644.043
1614	20108574	SEKOLAH DASAR NEGERI KAMPUNG MELAYU 01 PAGI JAKARTA	SD	51154115831	28.077.677	0	0	210.000	27.867.677	0	27.867.677	28.077.677
1615	20108576	SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 01 JAKARTA	SD	51254114441	45.404.401	0	0	0	45.404.401	0	45.404.401	45.404.401
1616	20108578	SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 03 PAGI JAKARTA	SD	51254114450	52.703.186	0	0	4.092.693	48.610.493	0	48.610.493	52.703.186
1617	20108579	SEKOLAH DASAR NEGERI KLENDER 04 PAG										

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SiLPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SiLPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SiLPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
1634	20108606	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA JAYA 11 JAKARTA	SD	51254114620	52.222.889	0	0	0	52.222.889	0	52.222.889	52.222.889
1635	20108607	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA JAYA 12 PAGI JAKARTA	SD	51254114638	6.732.482	0	0	554.514	6.177.968	0	6.177.968	6.732.482
1636	20108612	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA SARI 01 PAGI JAKARTA	SD	51254114654	19.004.700	0	0	0	19.004.700	0	19.004.700	19.004.700
1637	20108613	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA SARI 02 PAGI JAKARTA	SD	51254114662	5.488.166	0	0	0	5.488.166	0	5.488.166	5.488.166
1638	20108614	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA SARI 03 PAGI JAKARTA	SD	51254114689	17.829.930	0	0	0	17.829.930	0	17.829.930	17.829.930
1639	20108615	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA SARI 04 PAGI JAKARTA	SD	51254114671	7.277.220	0	0	0	7.277.220	0	7.277.220	7.277.220
1640	20108616	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA SARI 05 PAGI JAKARTA	SD	51254114697	11.636.168	0	0	0	11.636.168	0	11.636.168	11.636.168
1641	20108620	SEKOLAH DASAR NEGERI MALAKA SARI 13 JAKARTA	SD	51254114701	9.092.023	0	0	0	9.092.023	0	9.092.023	9.092.023
1642	20108623	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 01 JAKARTA	SD	51254114743	13.057.800	0	0	2.501.887	10.555.913	0	10.555.913	13.057.800
1643	20108624	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 02 PAGI JAKARTA	SD	51254114751	67.665.613	0	0	0	67.665.613	0	67.665.613	67.665.613
1644	20108626	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 04 JAKARTA	SD	51254114794	25.791.318	0	0	0	25.791.318	0	25.791.318	25.791.318
1645	20108628	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 06 JAKARTA	SD	51254114808	36.887.229	0	0	0	36.887.229	0	36.887.229	36.887.229
1646	20108629	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 07 PAGI JAKARTA	SD	51254114816	32.629.254	0	0	0	32.629.254	0	32.629.254	32.629.254
1647	20108632	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 11 PAGI JAKARTA	SD	51254114832	17.436.445	0	0	0	17.436.445	0	17.436.445	17.436.445
1648	20108634	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 13 PAGI JAKARTA	SD	51254114760	2.363.741	0	0	0	2.363.741	0	2.363.741	2.363.741
1649	20108635	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK BAMBU 15 PAGI JAKARTA	SD	51254114786	2.059.174	0	0	0	2.059.174	0	2.059.174	2.059.174
1650	20108638	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KELAPA 01 PAGI JAKARTA	SD	51254114921	101.797.450	0	0	0	101.797.450	0	101.797.450	101.797.450
1651	20108640	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KELAPA 03 JAKARTA	SD	51254114930	12.301.143	0	0	0	12.301.143	0	12.301.143	12.301.143
1652	20108641	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KELAPA 04 JAKARTA	SD	51254114981	12.411.695	0	0	0	12.411.695	0	12.411.695	12.411.695
1653	20108642	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KELAPA 05 PAGI JAKARTA	SD	51254114948	8.990.905	0	0	0	8.990.905	0	8.990.905	8.990.905
1654	20108643	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KELAPA 06 JAKARTA	SD	51254114956	2.337.893	0	0	0	2.337.893	0	2.337.893	2.337.893
1655	20108644	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KELAPA 07 PAGI JAKARTA	SD	51254114964	8.893.783	0	0	0	8.893.783	0	8.893.783	8.893.783
1656	20108646	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KELAPA 09 PAGI JAKARTA	SD	51254114999	67.509.919	0	0	0	67.509.919	0	67.509.919	67.509.919
1657	20108647	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KELAPA 10 PAGI JAKARTA	SD	51254114972	35.710.362	0	0	0	35.710.362	0	35.710.362	35.710.362
1658	20108650	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KOPI 01 JAKARTA	SD	51254115065	12.184.607	0	0	258.500	11.926.107	0	11.926.107	12.184.607
1659	20108651	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KOPI 02 PAGI JAKARTA	SD	51254115073	10.499.444	0	0	0	10.499.444	0	10.499.444	10.499.444
1660	20108652	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KOPI 03 PAGI JAKARTA	SD	51254115111	490.340	0	0	0	490.340	0	490.340	490.340
1661	20108653	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KOPI 04 PAGI JAKARTA	SD	51254115081	5.868.479	0	0	0	5.868.479	0	5.868.479	5.868.479
1662	20108655	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KOPI 07 JAKARTA	SD	51254115090	27.201.134	0	0	0	27.201.134	0	27.201.134	27.201.134
1663	20108656	SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOK KOPI 08 JAKARTA	SD	51254115103	7.574.352	0	0	0	7.574.352	0	7.574.352	7.574.352
1664	20108657	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUNGA 01 JAKARTA	SD	51154115881	10.072.809	0	0	0	10.072.809	0	10.072.809	10.072.809
1665	20108659	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUNGA 11 PAGI JAKARTA	SD	51154115890	2.998.034	0	0	0	2.998.034	0	2.998.034	2.998.034
1666	20108660	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BUNGA 12 JAKARTA	SD	51154115903	3.743.639	0	0	0	3.743.639	0	3.743.639	3.743.639
1667	20108665	SEKOLAH DASAR NEGERI BALIMESTER 01 JAKARTA	SD	51154115172	53.179.404	0	0	0	53.179.404	0	53.179.404	53.179.404
1668	20108668	SEKOLAH DASAR NEGERI BALIMESTER 03 PETANG JAKARTA	SD	51154115164	1.767.680	0	0	0	1.767.680	0	1.767.680	1.767.680
1669	20108670	SEKOLAH DASAR NEGERI BARU 07 PAGI JAKARTA	SD	51154117574	476.086	0	0	0	476.086	0	476.086	476.086
1670	20108671	SEKOLAH DASAR NEGERI CIBUBUR 09 JAKARTA	SD	51154113790	8.179.841	0	0	0	8.179.841	0	8.179.841	8.179.841
1671	20108672	SEKOLAH DASAR NEGERI CIBUBUR 11 PAGI JAKARTA	SD	51154113811	14.750.283	0	0	0	14.750.283	0	14.750.283	14.750.283
1672	20108690	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MUARA 18 PAGI JAKARTA	SD	51154115725	1.136.558	0	0	0	1.136.558	0	1.136.558	1.136.558
1673	20108696	SEKOLAH DASAR NEGERI CIRACAS 01 JAKARTA	SD	51154113846	24.648.495	0	0	0	24.648.495	0	24.648.495	24.648.495
1674	20108706	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA 03 JAKARTA	SD	50354112776	19.383.756	0	0	0	19.383.756	0	19.383.756	19.383.756
1675	20108708	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA 06 JAKARTA	SD	50354112822	17.693.078	0	0	0	17.693.078	0	17.693.078	17.693.078
1676	20108710	SEKOLAH DASAR NEGERI KALISARI 02 PAGI JAKARTA	SD	51154117817	1.670.453	0	0	0	1.670.453	0	1.670.453	1.670.453
1677	20108711	SEKOLAH DASAR NEGERI KALISARI 05 JAKARTA	SD	51154117833	119.984.302	0	0	0				

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
1697	20108831	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 16 PAGI JAKARTA	SD	51154117957	116.831	0	0	0	116.831	0	116.831	116.831
1698	20108833	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 18 PAGI JAKARTA	SD	51154117965	6.342.529	0	2.030.000	0	4.312.529	0	4.312.529	4.312.529
1699	20108834	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 01 JAKARTA	SD	51154117868	1.372.916	0	0	1.256.969	115.947	0	115.947	1.372.916
1700	20108836	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 03 PAGI JAKARTA	SD	51154117876	37.612.798	0	0	0	37.612.798	0	37.612.798	37.612.798
1701	20108838	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 05 JAKARTA	SD	51154117884	20.310.734	0	0	0	20.310.734	0	20.310.734	20.310.734
1702	20108839	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 07 PAGI JAKARTA	SD	51154117892	4.788.574	0	0	0	4.788.574	0	4.788.574	4.788.574
1703	20108841	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 10 PAGI JAKARTA	SD	51154117914	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000
1704	20108842	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 11 PAGI JAKARTA	SD	51154117922	979.683	0	0	0	979.683	0	979.683	979.683
1705	20108844	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU UTARA 01 JAKARTA	SD	50054117455	28.905.999	0	0	0	28.905.999	0	28.905.999	28.905.999
1706	20108849	SEKOLAH DASAR NEGERI UTAN KAYU UTARA 11 PAGI JAKARTA	SD	50054117447	11.834.102	0	0	7.585.093	4.249.009	0	4.249.009	11.834.102
1707	20108854	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 286 JAKARTA	SMP	30054132583	33.423.515	0	0	0	33.423.515	0	33.423.515	33.423.515
1708	20108940	SEKOLAH DASAR NEGERI JOGLO 09 PAGI JAKARTA	SD	30354103529	14.584.450	0	0	0	14.584.450	0	14.584.450	14.584.450
1709	20108945	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 14 PAGI JAKARTA	SD	30054102285	20.429.319	0	0	0	20.429.319	0	20.429.319	20.429.319
1710	20108950	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG BARAT 20 PETANG JAKARTA	SD	30054100193	5.986.743	0	0	0	5.986.743	0	5.986.743	5.986.743
1711	20108967	SEKOLAH DASAR NEGERI KALISARI 01 PAGI JAKARTA	SD	51154117809	13.010.801	0	0	0	13.010.801	0	13.010.801	13.010.801
1712	20108968	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA DUA WETAN 04 PAGI JAKARTA	SD	51154114010	6.676.299	0	0	0	6.676.299	0	6.676.299	6.676.299
1713	20108976	SEKOLAH DASAR NEGERI BALIMESTER 06 PAGI JAKARTA	SD	51154115181	6.716.710	0	0	0	6.716.710	0	6.716.710	6.716.710
1714	20108981	SEKOLAH DASAR NEGERI PEKAYON 09 PAGI JAKARTA	SD	51154117906	3.112.343	0	0	0	3.112.343	0	3.112.343	3.112.343
1715	20108990	SEKOLAH DASAR NEGERI BARU 03 PAGI JAKARTA	SD	51154117540	33.651.199	0	0	0	33.651.199	0	33.651.199	33.651.199
1716	20108994	SEKOLAH DASAR NEGERI GEDONG 12 PAGI JAKARTA	SD	51154117761	358.825	0	0	0	358.825	0	358.825	358.825
1717	20108996	SEKOLAH DASAR NEGERI GEDONG 11 PAGI JAKARTA	SD	51154117752	4.446.838	0	0	0	4.446.838	0	4.446.838	4.446.838
1718	20108997	SEKOLAH DASAR NEGERI BARU 02 PAGI JAKARTA	SD	51154117531	14.568.746	0	0	0	14.568.746	0	14.568.746	14.568.746
1719	20109002	SEKOLAH DASAR NEGERI HALIM 01 JAKARTA	SD	51154116616	110.587.536	0	0	0	110.587.536	0	110.587.536	110.587.536
1720	20109019	SEKOLAH DASAR NEGERI BIDARACINA 01 JAKARTA	SD	51154115237	1.169.438	0	0	0	1.169.438	0	1.169.438	1.169.438
1721	20109021	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG BESAR SELATAN 12 PAGI JAKARTA	SD	51154115318	23.259.679	0	0	0	23.259.679	0	23.259.679	23.259.679
1722	20109024	SEKOLAH DASAR NEGERI GEDONG 08 PAGI JAKARTA	SD	51154117736	953.400	0	0	0	953.400	0	953.400	953.400
1723	20109029	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN BARU 01 JAKARTA	SD	50054117170	50.724.103	0	0	0	50.724.103	0	50.724.103	50.724.103
1724	20109031	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN BARU 13 PAGI JAKARTA	SD	50054117234	7.739.342	0	0	0	7.739.342	0	7.739.342	7.739.342
1725	20109047	SEKOLAH DASAR NEGERI ROROTAN 07 PAGI JAKARTA	SD	20054118932	4.402.318	0	0	0	4.402.318	0	4.402.318	4.402.318
1726	20109049	SEKOLAH DASAR NEGERI CENGKARENG TIMUR 21 PAGI JAKARTA	SD	30454100587	114.533	0	0	0	114.533	0	114.533	114.533
1727	20109050	SEKOLAH DASAR NEGERI DURI KOSAMBI 10 PAGI JAKARTA	SD	30454100714	478.482	0	0	0	478.482	0	478.482	478.482
1728	20109067	SEKOLAH DASAR NEGERI JOGLO 01 PAGI JAKARTA	SD	30354103448	9.627.079	0	0	0	9.627.079	0	9.627.079	9.627.079
1729	20109084	SEKOLAH DASAR NEGERI MAKASAR 01 PAGI JAKARTA	SD	51154116829	2.411.863	0	0	0	2.411.863	0	2.411.863	2.411.863
1730	20109093	SEKOLAH DASAR NEGERI BARU 08PAGI JAKARTA	SD	51154117582	26.373.255	0	0	0	26.373.255	0	26.373.255	26.373.255
1731	20109104	SEKOLAH DASAR NEGERI PINANG RANTI 01 JAKARTA	SD	51354116922	48.611.098	0	0	0	48.611.098	0	48.611.098	48.611.098
1732	20109105	SEKOLAH DASAR NEGERI JELAMBAR BARU 03 PAGI JAKARTA	SD	30054101530	747.674	0	0	0	747.674	0	747.674	747.674
1733	20109110	SEKOLAH DASAR NEGERI GEDONG 03 JAKARTA	SD	51154117710	8.542.852	0	0	0	8.542.852	0	8.542.852	8.542.852
1734	20109115	SEKOLAH DASAR NEGERI CIBUBUR 05 JAKARTA	SD	51154113781	14.199.411	0	0	0	14.199.411	6.216.000	20.415.411	20.415.411
1735	20109126	SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 09 PAGI JAKARTA	SD	51154114184	13.656.013	0	0	0	13.656.013	0	13.656.013	13.656.013
1736	20109142	SEKOLAH DASAR NEGERI PEGADUNGAN 07 PAGI JAKARTA	SD	30054102242	3.948	0	0	0	3.948	0	3.948	3.948
1737	20109151	SEKOLAH DASAR NEGERI CIBUBUR 10 PAGI JAKARTA	SD	51154113803	32.899.792	0	0	0	32.899.792	0	32.899.792	32.899.792
1738	20109161	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPINANG MELAYU 07 PAGI JAKARTA	SD	51254116525	12.296.391	0	0	0	12.296.391	0	12.296.391	12.296.391
1739	20109164	SEKOLAH DASAR NEGERI PISANGAN BARU 05 PAGI JAKARTA	SD	50054117188	11.397.850	0	0	0	11.397.850	0	11.397.850	11.397.850
1740	20109165	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6										

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SiLPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SiLPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SiLPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SiLPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
1760	20109301	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGAN UTARA 05 PAGI JAKARTA	SD	30354103618	10.937.351	0	0	0	10.937.351	0	10.937.351	10.937.351
1761	20109302	SEKOLAH DASAR NEGERI CIKOKO 03 PAGI JAKARTA	SD	40054110471	2.299.862	0	0	0	2.299.862	0	2.299.862	2.299.862
1762	20109425	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 JAKARTA	SLB	40054121758	15.199.003	0	0	0	15.199.003	0	15.199.003	15.199.003
1763	20109529	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 6 JAKARTA	SLB	30354121624	122.347.484	0	0	0	122.347.484	0	122.347.484	122.347.484
1764	20109732	TK Negeri Pulogadung 01	TK	54054500886	77.137	0	0	0	77.137	0	77.137	77.137
1765	20109795	TAMAN KANAK KANAK NEGERI PENGKILINGAN JAKARTA	TK	50354501314	98.052	0	0	0	98.052	0	98.052	98.052
1766	20109933	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MH. THAMRIN JAKARTA	SMA	10354124515	200.420.877	0	0	0	200.420.877	0	200.420.877	200.420.877
1767	20109948	TK Negeri Pasar Rebo 04	TK	51354502041	78.700	0	0	0	78.700	0	78.700	78.700
1768	20109970	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 3 JAKARTA	SLB	12254121717	116.692.521	0	0	0	116.692.521	0	116.692.521	116.692.521
1769	20110174	TK Negeri Kramat Jati 02	TK	51354502920	48.517	0	0	0	48.517	0	48.517	48.517
1770	20110450	TAMAN KANAK KANAK NEGERI KEBON KACANG JAKARTA	TK	11854504201	58.968	0	0	0	58.968	0	58.968	58.968
1771	20110491	TAMAN KANAK KANAK NEGERI BESUKI JAKARTA	TK	50054504319	345.835	0	0	0	345.835	0	345.835	345.835
1772	20110492	TAMAN KANAK KANAK NEGERI CILACAP JAKARTA	TK	11154504327	1.630.376	0	0	0	1.630.376	0	1.630.376	1.630.376
1773	20110494	TAMAN KANAK KANAK NEGERI TEGAL JAKARTA	TK	10854504335	476.591	0	0	0	476.591	0	476.591	476.591
1774	20110688	TAMAN KANAK KANAK NEGERI SUNTER AGUNG JAKARTA	TK	20154504652	987.590	0	0	0	987.590	0	987.590	987.590
1775	20110716	TAMAN KANAK KANAK NEGERI PAPANGGO JAKARTA	TK	20154504687	364.843	0	0	0	364.843	0	364.843	364.843
1776	20110821	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 4 JAKARTA	SLB	20154122237	9.825.025	0	0	0	9.825.025	0	9.825.025	9.825.025
1777	20111015	TAMAN KANAK KANAK NEGERI MERUYA UTARA 01 JAKARTA	TK	30354506038	330.355	0	0	0	330.355	0	330.355	330.355
1778	20111016	TAMAN KANAK KANAK NEGERI MERUYA UTARA 02 JAKARTA	TK	30354506046	153.754	0	0	0	153.754	0	153.754	153.754
1779	20111017	TAMAN KANAK KANAK NEGERI MERUYA SELATAN JAKARTA	TK	30354506054	635.570	0	0	0	635.570	0	635.570	635.570
1780	20111591	TAMAN KANAK KANAK NEGERI CIPETE JAKARTA	TK	40054507443	34	0	0	0	34	0	34	34
1781	20112079	TAMAN KANAK KANAK NEGERI PEMBINA DKI JAKARTA	TK	50154508355	112.867	0	0	0	112.867	0	112.867	112.867
1782	20112403	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 5 JAKARTA	SLB	11854121646	17.779.773	0	0	0	17.779.773	0	17.779.773	17.779.773
1783	20112443	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	SMK	40454127970	190.619.703	0	0	0	190.619.703	0	190.619.703	190.619.703
1784	20112469	TK Negeri Pasar Rebo 03	TK	51354508944	46.920	0	0	0	46.920	0	46.920	46.920
1785	20112492	TK Negeri Pulau Kelapa 01	TK	20154508984	41.260	0	0	0	41.260	0	41.260	41.260
1786	20177833	TK Negeri Pasar Rebo 02	TK	51354509126	37.138	0	0	0	37.138	0	37.138	37.138
1787	21104166	SEKOLAH DASAR NEGERI JATINEGARA 05 JAKARTA	SD	50354112784	42.678.863	0	0	0	42.678.863	0	42.678.863	42.678.863
1788	69768531	TK Negeri Pulau Tidung 01	TK	20154509336	85.972	0	0	0	85.972	0	85.972	85.972
1789	69768532	TK Negeri Pulau Tidung 02	TK	20154509344	8.862	0	0	0	8.862	0	8.862	8.862
1790	69768533	TK Negeri Pulau Tidung 03	TK	20154509352	3.301	0	0	0	3.301	0	3.301	3.301
1791	69768535	TK Negeri Pulau Pari 01	TK	20154509379	152.136	0	0	0	152.136	0	152.136	152.136
1792	69768536	TK Negeri Pulau Untung Jawa 01	TK	20154509387	771.536	0	0	0	771.536	0	771.536	771.536
1793	69768537	TK Negeri Pulau Panggang 01	TK	20154509395	352.362	0	0	0	352.362	0	352.362	352.362
1794	69768538	TK Negeri Pulau Harapan 01	TK	20154509409	35.945	0	0	0	35.945	0	35.945	35.945
1795	69768540	SPS NEGERI BALE BERMAIN BUNGA MAWAR	SPS	43254509428	21.275	0	0	0	21.275	0	21.275	21.275
1796	69768543	SPS NEGERI BALE BERMAIN TUNAS BAHARI	SPS	43254509452	10.509	0	0	0	10.509	0	10.509	10.509
1797	69768544	SPS NEGERI BALE BERMAIN PERMATA BUNDA	SPS	43254509461	168.873	0	0	0	168.873	0	168.873	168.873
1798	69768546	SPS NEGERI BALE BERMAIN NUSA INDAH	SPS	43254509487	13.992	0	0	0	13.992	0	13.992	13.992
1799	69768550	SPS NEGERI BALE BERMAIN TUNAS HARAPAN	SPS	43254509525	19.298	0	0	0	19.298	0	19.298	19.298
1800	69768551	SPS NEGERI BALE BERMAIN PULAU SABIRA	SPS	43254509533	245.163	0	0	0	245.163	0	245.163	245.163
1801	69785991	TK Negeri Kebayoran Baru 01	TK	40054511564	300.206	0	0	0	300.206	0	300.206	300.206
1802	69790218	TK Negeri Kebayoran Lama 01	TK	41254511835	20.204	0	0	0	20.204	0	20.204	20.204
1803	69800097	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 289 JAKARTA	SMP	20054139735	19.157.824	0	0	0	19.157.824	0	19.157.824	19.157.824
1804	69820326	TK Negeri Kemayoran 01	TK	12254513577	704.412	0	0	0	704.412	0	704.412	704.412
1805	69820409	TK Negeri Kemayoran 02	TK	12254514212	317.801	0	0	0	317.801	0	317.801	317.801
1806	69820655	TK Negeri Jagakarsa 01	TK	40154514243	5.607	0	0	0	5.607	0	5.607	5.607
1807	69820775	TK Negeri Duren Sawit 01	TK	51254514563	24.409	0	0	0	24.409	0	24.409	24.409
1808												

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
1823	69917439	TK Negeri Pasar Rebo 01	TK	51354530648	89.752	0	0	0	89.752	0	89.752	89.752
1824	69917839	TK Negeri Kramat Jati 01	TK	51354530699	415.624	0	0	0	415.624	0	415.624	415.624
1825	69917840	TK Negeri Cipayung 02	TK	51354530702	14.402	0	0	0	14.402	0	14.402	14.402
1826	69920820	TK Negeri Menteng 01	TK	11154530999	289.725	0	0	0	289.725	0	289.725	289.725
1827	69922070	TK Negeri Cilincing 01	TK	43254531024	119.971	0	0	0	119.971	0	119.971	119.971
1828	69932668	KB Negeri 07 Cengkareng	KB	30454631698	150.491	0	0	0	150.491	0	150.491	150.491
1829	69939827	KB Negeri 06 Meruya Utara	KB	42854632205	23.258	0	0	0	23.258	0	23.258	23.258
1830	69945300	TK Negeri Cilandak 01	TK	40154532543	434.600	0	0	0	434.600	0	434.600	434.600
1831	69946822	TK Negeri Sawah Besar 01	TK	11154532673	23.201	0	0	0	23.201	0	23.201	23.201
1832	69948988	KB Negeri 05 Jelambar	KB	43254532870	471.550	0	0	0	471.550	0	471.550	471.550
1833	69949368	TAMAN KANAK KANAK NEGERI BENDUNGAN HILIR JAKARTA	TK	11354532912	125	0	0	0	125	0	125	125
1834	69963091	TK Negeri Kebon Jeruk 01	TK	42854534173	809.885	0	0	0	809.885	0	809.885	809.885
1835	69964711	KB Negeri 33 Malaka Sari	KB	12354534271	41.139	0	0	0	41.139	0	41.139	41.139
1836	69978626	TK Negeri Mampang Prapatan 01	TK	40454536799	118.313	0	0	0	118.313	0	118.313	118.313
1837	69979428	TPA Negeri Bale Bermain Balai Kota	TPA	10854536881	27	0	0	0	27	0	27	27
1838	69980385	TK Negeri Koja 02	TK	20154536988	65	0	0	0	65	0	65	65
1839	69980873	SDN Marunda 05	SD	20054118835	1.914.484	0	0	0	1.914.484	0	1.914.484	1.914.484
1840	69980874	SMPN 290	SMP	20054139492	35.415.828	0	0	0	35.415.828	0	35.415.828	35.415.828
1841	69980881	SLBN 8	SLB	20054122212	191.777.757	0	0	0	191.777.757	0	191.777.757	191.777.757
1842	69981533	KB Negeri 24 Tomang	KB	43254637124	782.809	0	0	0	782.809	0	782.809	782.809
1843	69981918	TK Negeri Cilincing 02	TK	20154537208	138	0	0	0	138	0	138	138
1844	69986230	TK Negeri Pademangan 01	TK	14054537547	105.104	0	0	0	105.104	0	105.104	105.104
1845	69987433	TPA Negeri Bale Bermain Yos Sudarso	TPA	20154537763	12.849	0	0	0	12.849	0	12.849	12.849
1846	69987715	TK Negeri Kelapa Gading 01	TK	23054537791	109	0	0	0	109	0	109	109
1847	69987999	TK Negeri Makasar 01	TK	52354537810	83.584	0	0	0	83.584	0	83.584	83.584
1848	69988000	TK Negeri Kramat Jati 03	TK	52354537828	2.345.793	0	0	0	2.345.793	0	2.345.793	2.345.793
1849	69988059	TK Negeri Ciracas 01	TK	52354537836	1.857.030	0	0	0	1.857.030	0	1.857.030	1.857.030
1850	69988193	TK Negeri Cipayung 03	TK	52054537866	162.376	0	0	0	162.376	0	162.376	162.376
1851	69988210	SLBN 9 Jakarta	SLB	43254122281	76.658.957	0	0	0	76.658.957	0	76.658.957	76.658.957
1852	69988258	TK Negeri Kalideres 01	TK	62254537877	144.925	0	0	0	144.925	0	144.925	144.925
1853	69988293	TK Negeri Cengkareng 01	TK	30454537918	344	0	0	0	344	0	344	344
1854	69988408	SLBN 12 Jakarta	SLB	43254121802	48.326.098	0	0	0	48.326.098	0	48.326.098	48.326.098
1855	69988460	SLBN 11 Jakarta	SLB	43254121951	145.019.342	0	0	0	145.019.342	0	145.019.342	145.019.342
1856	69988475	SLBN 10 Jakarta	SLB	43254121527	24.145.838	0	0	0	24.145.838	0	24.145.838	24.145.838
1857	69988567	TK Negeri Tambora 01	TK	30554537967	320.112	0	0	0	320.112	0	320.112	320.112
1858	69988621	TK Negeri Penjaringan 01	TK	30154537981	31.717	0	0	0	31.717	0	31.717	31.717
1859	69988862	TK Negeri Tebet 01	TK	40254537993	594	0	0	0	594	0	594	594
1860	69988919	TK Negeri Matraman 01	TK	50054538019	94	0	0	0	94	0	94	94
1861	69988920	TK Negeri Pulogadung 02	TK	50154538025	303.983	0	0	0	303.983	0	303.983	303.983
1862	69988921	TK Negeri Jatinegara 01	TK	50054538035	214.139	0	0	0	214.139	0	214.139	214.139
1863	69989178	TK Negeri Pasar Minggu 01	TK	43354538051	293.545	0	0	0	293.545	0	293.545	293.545
1864	69989245	TPA Negeri Bina Tunas Jaya IV	TPA	15454538063	497.564	0	0	0	497.564	0	497.564	497.564
1865	69989277	TK Negeri Pancoran 01	TK	51354538070	412.646	0	0	0	412.646	0	412.646	412.646
1866	69989306	TPA Negeri Bina Tunas Jaya II	TPA	43954538093	67.544	0	0	0	67.544	0	67.544	67.544
1867	69989585	TPA Negeri Bina Tunas Jaya V	TPA	50254538112	22.394	0	0	0	22.394	0	22.394	22.394
1868	69990038	SPS Negeri Bale Bermain Ciracas Cerdas	SPS	52854538141	29.939	0	0	0	29.939	0	29.939	29.939
1869	69990088	SPS Negeri Bale Bermain Sahabat Anak	SPS	31454538156	244	0	0	0	244	0	244	244
1870	69990089	SPS Negeri Bale Bermain Demang Ceria	SPS	21054538165	552	0	0	0	552	0	552	552
1871	69990099	SPS Negeri Bale Bermain Palembang Merah	SPS	14954538172	10.042	0	0	0	10.042	0	10.042	10.042
1872	69990116	SPS Negeri Bale Bermain Harapan Jaya	SPS	30654538180	49.551	0	0	0	49.551	0	49.551	49.551
1873	69990117	SPS Negeri Bale Bermain Melati	SPS	31754538193	178.186	0	0	0	178.186	0	178.186	178.186
1874	69990118	TPA Negeri Bale Bermain Pelangi	TPA	30354538207	322	0	0	0	322	0	322	322
1875	69990120	SPS Negeri Bale Bermain Mawar Cipayung	SPS	52654538217	15.340	0	0	0	15.340	0	15.340	15.340
1876	69990121	SPS Negeri Bale Bermain Makasar Meriah (Meraih Ridho Allah)	SPS	52754538223	9.199	0	0	0	9.199	0	9.199	9.199
1877	69990204	SPS Negeri Bale Bermain Johar Baru	SPS	13554538237	1.595	0	0	0	1.595	0	1.595	1.595
1878	69990205	SPS Negeri Bale Bermain Cempaka Putih Ceria	SPS	12454538240	649.460	0	0	0	649.460	0	649.460	649.460
1879	69990294	TPA Negeri Bale Bermain Maju Bersama	TPA	11154538256	1.045	0	0	0	1.045	0	1.045	1.045
1880	69990299	SPS Negeri Bale Bermain Bunda Menteng	SPS									

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
1886	69990946	TPA Negeri Bina Tunas Jaya III	TPA	16054538360	9.830	0	0	0	9.830	0	9.830	9.830
1887	69991012	SPS Negeri Bale Bermain Unggul dan Terdepan	SPS	40954538377	24	0	0	0	24	0	24	24
1888	69991016	SPS Negeri Bale Bermain Manggala Praja	SPS	40654538381	587	0	0	0	587	0	587	587
1889	69991042	TPA Negeri Bale Bermain Serasi	TPA	40454538392	578	0	0	0	578	0	578	578
1890	69991277	SPS Negeri Bale Bermain Cerdas Ceria	SPS	53554538402	503.637	0	0	0	503.637	0	503.637	503.637
1891	69991331	TPA Negeri Bina Tunas Jaya IX	TPA	55854538428	122.950	0	0	0	122.950	0	122.950	122.950
1892	69991431	TPA Negeri Bina Tunas Jaya XIII	TPA	55354538443	248	0	0	0	248	0	248	248
1893	69991740	TPA Negeri Bina Tunas Jaya X	TPA	41654538507	319	0	0	0	319	0	319	319
1894	69991741	SPS Negeri Bale Bermain Alpukat	SPS	41354538511	204	0	0	0	204	0	204	204
1895	69991742	SPS Negeri Bale Bermain Ceria	SPS	41654538523	62	0	0	0	62	0	62	62
1896	69992314	SMK Negeri 70 Jakarta	SMK	43254129935	113.273.949	0	0	0	113.273.949	0	113.273.949	113.273.949
1897	69992315	SMK Negeri 64 Jakarta	SMK	43254130259	105.318	0	0	0	105.318	0	105.318	105.318
1898	69992316	SMK Negeri 65 Jakarta	SMK	43254130101	141.284.214	0	0	0	141.284.214	0	141.284.214	141.284.214
1899	69992317	SMK Negeri 66 Jakarta	SMK	43254129510	41.167.721	0	0	0	41.167.721	0	41.167.721	41.167.721
1900	69992318	SMK Negeri 67 Jakarta	SMK	43254130771	199.008.099	0	0	0	199.008.099	0	199.008.099	199.008.099
1901	69992319	SMK Negeri 68 Jakarta	SMK	43254129714	6.643.972	0	0	0	6.643.972	0	6.643.972	6.643.972
1902	69992321	SMK Negeri 69 Jakarta	SMK	43254129137	26.476.892	0	0	0	26.476.892	0	26.476.892	26.476.892
1903	69992322	SMK Negeri 71 Jakarta	SMK	43254129145	207.513.647	0	0	0	207.513.647	0	207.513.647	207.513.647
1904	69992323	SMK Negeri 73 Jakarta	SMK	43254126162	40.732.649	0	0	0	40.732.649	0	40.732.649	40.732.649
1905	69992346	SMK Negeri 72 Jakarta	SMK	43254126090	20.881.874	0	0	0	20.881.874	0	20.881.874	20.881.874
1906	70000265	TPA NEGERI BINA TUNAS JAYA XVI	TPA	43254538975	132.310	0	0	0	132.310	0	132.310	132.310
1907	70000830	SPS NEGERI BALE BERMAIN PAYUNG CERIA	SPS	43254539041	700	0	0	0	700	0	700	700
1908	70001759	TPA NEGERI BINA TUNAS JAYA XV	TPA	43254539106	20.085	0	0	0	20.085	0	20.085	20.085
1909	70002268	TPA NEGERI BINA TUNAS JAYA XX	TPA	43254539190	164.494	0	0	0	164.494	0	164.494	164.494
1910	70002269	SPS NEGERI BALE BERMAIN KH HASYIM ASYARI	SPS	43254539203	343.127	0	0	0	343.127	0	343.127	343.127
1911	70002274	SPS NEGERI BALE BERMAIN PESTA CERIA	SPS	11154539210	147	0	0	0	147	0	147	147
1912	70002276	SPS NEGERI BALE BERMAIN GEMA CERIA	SPS	12154539225	912.435	0	0	0	912.435	0	912.435	912.435
1913	70002388	SPS NEGERI BALE BERMAIN SUKAPURA CERDAS	SPS	43254539254	34.066	0	0	0	34.066	0	34.066	34.066
1914	70002389	SPS NEGERI BALE BERMAIN SAKINAH	SPS	43254539262	514.210	0	0	0	514.210	0	514.210	514.210
1915	70002414	TPA Negeri Bale Bermain Raden Ajeng Kartini	TPA	43254539271	2.715	0	0	0	2.715	0	2.715	2.715
1916	70002448	SPS NEGERI BALE BERMAIN TUNAS BANGSA	SPS	51254539281	10.920	0	0	0	10.920	0	10.920	10.920
1917	70002449	SPS NEGERI BALE BERMAIN RUBAH	SPS	51654539291	28.720	0	0	0	28.720	0	28.720	28.720
1918	70002605	SPS NEGERI BALE BERMAIN TUNAS BAHARI	SPS	20054539326	15.134	0	0	0	15.134	0	15.134	15.134
1919	70002818	TPA NEGERI BINA TUNAS JAYA VI	TPA	43254539343	43.350	0	0	0	43.350	0	43.350	43.350
1920	70003287	SPS NEGERI BALE BERMAIN RAWASARI CERIA	SPS	15554539432	7	0	0	0	7	0	7	7
1921	70003443	SPS NEGERI BALE BERMAIN CENDIKIA KEMAYORAN	SPS	14754539440	658	0	0	0	658	0	658	658
1922	70004168	TK Negeri Satu Atap Kemanggisan 10	TK	43254539491	18.341	0	0	0	18.341	0	18.341	18.341
1923	70004659	TPA NEGERI BINA TUNAS JAYA XIX	TPA	33054539537	18.602	0	0	0	18.602	0	18.602	18.602
1924	70005248	TK NEGERI PULAU PANGGANG 02	TK	20454539591	881.151	0	0	0	881.151	0	881.151	881.151
1925	70005687	TPA NEGERI BINA TUNAS JAYA XXII	TPA	15454539671	64	0	0	0	64	0	64	64
1926	70005694	TPA NEGERI BINA TUNAS JAYA XIV	TPA	50054539686	192	0	0	0	192	0	192	192
1927	70005754	SPS NEGERI BALE BERMAIN KAMURA	SPS	31854539694	4.048	0	0	0	4.048	0	4.048	4.048
1928	70006861	SPS NEGERI BALE BERMAIN CERDAS CERIA MUTIARA HATI	SPS	50354539842	573.277	0	0	0	573.277	0	573.277	573.277
1929	70006966	SPS NEGERI BALE BERMAIN PINANG INDAH	SPS	43754539867	716	0	0	0	716	0	716	716
1930	70007268	TPA Negeri Bina Tunas Jaya VIII	TPA	43254539891	17.255	0	0	0	17.255	0	17.255	17.255
1931	70010521	KB Negeri 12 Tengah	KB	43254540228	5.100	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100
1932	70010522	KB Negeri 22 Makasar	KB	43254540236	4.617	0	0	0	4.617	0	4.617	4.617
1933	70010529	KB Negeri 32 Duren Sawit	KB	43254540244	255.442	0	0	0	255.442	0	255.442	255.442
1934	70010577	KB Negeri 23 Kebon Melati	KB	43254540252	34	0	0	0	34	0	34	34
1935	70010587	KB Negeri 28 Kebon Pala	KB	43254540261	291.627	0	0	0	291.627	0	291.627	291.627
1936	70010618	KB Negeri 27 Petukangan Selatan	KB	43254540279	191	0	0	0	191	0	191	191
1937	70010622	KB Negeri 15 Cideng	KB	43254540287	39.545	0	0	0	39.545	0	39.545	39.545
1938	70010637	KB Negeri 03 Cilincing	KB	43254540309	5.733	0	0	0	5.733	0	5.733	5.733
1939	70010762	KB Negeri 35 Jagakarsa	KB	43254540325	701	0	0	0	701	0	701	701
1940	70010801	KB Negeri 31 Bangka	KB	43254540341	142.915	0	0	0	142.915	0	142.915	142.915
1941	70010808	KB Negeri 25 Pasar Minggu	KB	43254540350	229.345	0	0	0	229.345	0	229.345	229.345
1942	70010822	KB Negeri 10 Guntur	KB	43254540368	7.180	0	0	0	7.180	0	7.180	7.180
1943	70010935	KB Negeri 29 Cempaka Baru	KB	43254540376	287.090	0	0	0	287.090	0	287.090	287.090
1944	70010976	TK Negeri Taman Sari 01	TK	43254540384	9.977	0	0	0	9.977	0	9.977	9.977
1945	70010985	KB Negeri 01 Kebon Kosong	KB	43254540392	616	0	0	0	616	0	616	616
1946	70011362	TK Negeri Senen 01	TK	43254540465	309.524	0	0	0	309.524	0	309.524	309.524
1947	70011371	TK Negeri Cempaka Putih 01	TK	43254540481	13.171	0	0	0	13.171	0	13.171	13.171
1948	70011414	TK Negeri Johar Baru 01	TK	43254540490	173.505	0	0	0	173.505	0	173.505	173.505

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
1949	70012409	TK Negeri Satu Atap Cilincing 08	TK	43254540601	43	0	0	0	43	0	43	43
1950	70012601	TK Negeri Satu Atap Susukan 09	TK	43254540643	17.002	0	0	0	17.002	0	17.002	17.002
1951	70012679	TK Negeri Satu Atap Manggarai 01	TK	43254540651	4.984	0	0	0	4.984	0	4.984	4.984
1952	70012680	TK Negeri Satu Atap Kalibata 07	TK	43254540660	229.710	0	0	0	229.710	0	229.710	229.710
1953	70028934	TK Negeri Gambir 01	TK	14554541197	1	0	0	0	1	0	1	1
1954	70030266	TK Negeri Jagakarsa 02	TK	40854541205	43	0	0	0	43	0	43	43
1955	P2965963	PKBM Negeri 15	PKBM	11054301797	1.996.715	0	0	0	1.996.715	0	1.996.715	1.996.715
1956	P2965967	PKBM Negeri 16	PKBM	15554301801	165.740	0	0	0	165.740	0	165.740	165.740
1957	P2965971	PKBM Negeri 02	PKBM	11354301694	386.083	0	0	0	386.083	0	386.083	386.083
1958	P2965972	PKBM Negeri 23	PKBM	11854301865	1.685.893	0	0	0	1.685.893	0	1.685.893	1.685.893
1959	P2965974	PKBM Negeri 01	PKBM	10954301688	849.383	0	0	0	849.383	0	849.383	849.383
1960	P2965982	PKBM Negeri 29	PKBM	10954301912	787.060	0	0	0	787.060	0	787.060	787.060
1961	P2966171	PKBM Negeri 03	PKBM	20054301702	1.722	0	0	0	1.722	0	1.722	1.722
1962	P2966295	PKBM Negeri 04	PKBM	21354301712	6.059.062	0	0	0	6.059.062	0	6.059.062	6.059.062
1963	P2966315	PKBM Negeri 17	PKBM	20154301816	28.794.251	0	0	0	28.794.251	0	28.794.251	28.794.251
1964	P2966606	PKBM Negeri 08	PKBM	43554301759	652	0	0	0	652	0	652	652
1965	P2966608	PKBM Negeri 11	PKBM	50054300039	464.207	0	0	178.200	286.007	0	286.007	464.207
1966	P2966612	PKBM Negeri 21	PKBM	40254300047	214.338	0	0	0	214.338	0	214.338	214.338
1967	P2966615	PKBM Negeri 10	PKBM	12754300027	13.154.554	0	0	0	13.154.554	0	13.154.554	13.154.554
1968	P2966616	PKBM Negeri 25	PKBM	43354301876	1.442	0	0	0	1.442	0	1.442	1.442
1969	P2966639	PKBM Negeri 09	PKBM	43654300017	1.275.988	0	0	0	1.275.988	0	1.275.988	1.275.988
1970	P2966648	PKBM Negeri 27	PKBM	41254301890	1.605	0	0	0	1.605	0	1.605	1.605
1971	P2966649	PKBM Negeri 26	PKBM	43154301888	399	0	0	0	399	0	399	399
1972	P2966652	PKBM Negeri 31	PKBM	43454300053	1.640.274	0	0	0	1.640.274	0	1.640.274	1.640.274
1973	P2966660	PKBM Negeri 35	PKBM	43554301961	697.364	0	0	0	697.364	0	697.364	697.364
1974	P2966872	PKBM Negeri 12	PKBM	52354301760	9.781.314	0	0	0	9.781.314	0	9.781.314	9.781.314
1975	P2967175	PKBM Negeri 34	PKBM	52354301956	160.435	0	0	0	160.435	0	160.435	160.435
1976	P2967199	PKBM Negeri 32	PKBM	50354301935	337.684	0	0	0	337.684	0	337.684	337.684
1977	P2967200	PKBM Negeri 14	PKBM	50154301785	472.841	0	0	0	472.841	0	472.841	472.841
1978	P2967201	PKBM Negeri 33	PKBM	50354301943	177.837	0	0	0	177.837	0	177.837	177.837
1979	P2967206	PKBM Negeri 13	PKBM	15354301774	9.092	0	0	0	9.092	0	9.092	9.092
1980	P2967208	PKBM Negeri 22	PKBM	51354301851	4.082.270	0	0	0	4.082.270	0	4.082.270	4.082.270
1981	P2967209	PKBM Negeri 28	PKBM	51354301908	1.842.285	0	0	0	1.842.285	0	1.842.285	1.842.285
1982	P2967314	PKBM Negeri 38	PKBM	42854301993	9.042.544	0	0	0	9.042.544	0	9.042.544	9.042.544
1983	P2967365	PKBM Negeri 19	PKBM	62254301831	1.373.280	0	0	0	1.373.280	0	1.373.280	1.373.280
1984	P2967896	PKBM Negeri 30	PKBM	42854301926	11.187.311	0	0	0	11.187.311	0	11.187.311	11.187.311
1985	P2967957	PKBM Negeri 36	PKBM	30054301971	408.535	0	0	0	408.535	0	408.535	408.535
1986	P2969301	PKBM Negeri 06	PKBM	42854301730	137.118	0	0	0	137.118	0	137.118	137.118
1987	P2969409	PKBM Negeri 24	PKBM	32054302017	3.716.592	0	0	0	3.716.592	0	3.716.592	3.716.592
1988	P9908823	PKBM Negeri 37	PKBM	30054301989	613.123	0	0	0	613.123	0	613.123	613.123
1989	P9908916	PKBM Negeri 07	PKBM	30454301744	1.964.000	0	0	0	1.964.000	0	1.964.000	1.964.000
1990	P9926222	PKBM Negeri 05	PKBM	32054301720	1.045.238	0	0	0	1.045.238	0	1.045.238	1.045.238
1991	P9926496	PKBM Negeri 18	PKBM	30454301825	1.279.740	0	0	0	1.279.740	0	1.279.740	1.279.740
1992	P9934360	PKBM Negeri 20	PKBM	30454301841	453.063	0	0	0	453.063	0	453.063	453.063
1993	P9984389	PKBM Negeri 39 Cakung	PKBM	50354302001	286.425	0	0	0	286.425	0	286.425	286.425
1994	20100466	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAMAT 05 PAGI JAKARTA	SD	12254107676	24.121.714	0	0	0	24.121.714	0	24.121.714	24.121.714
1995	20100585	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 12 PETANG JAKARTA	SD	20112125548	21.874.433	0	0	0	21.874.433	0	21.874.433	21.874.433
1996	20100655	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN TIMUR 07 PETANG JAKARTA	SD	20112125521	50.681.138	0	0	0	50.681.138	0	50.681.138	50.681.138
1997	20100656	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN TIMUR 08 PETANG JAKARTA	SD	20112125157	20.473.086	0	0	0	20.473.086	0	20.473.086	20.473.086
1998	20100685	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 04 PETANG JAKARTA	SD	20112125491	492.992	0	0	0	492.992	0	492.992	492.992
1999	20100687	SEKOLAH DASAR NEGERI RAWA BADAK UTARA 17 PAGI JAKARTA	SD	20012056254	36.320.017	0	0	0	36.320.017	0	36.320.017	36.320.017
2000	20101004	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBARU 08 PETANG JAKARTA	SD	20012056033	12.569.800	0	0	0	12.569.800	0	12.569.800	12.569.800
2001	2010103											

No	NPSN	Nama Sekolah	Jenjang	No. Rekening	Saldo SILPA BOS Per 31 Desember 2023							Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Per 31 Desember 2023 (Rp)
					Saldo Rekening Bank (Rp)	Hak Pihak Lain atas Saldo di Rekening Bank			SILPA BOS di Rekening Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)	SILPA BOS di Luar Rekening Bank (Pengembalian Belanja yang masih akan diterima dari Penyedia/ Pihak Ketiga) (Rp)	SILPA BOS Per 31 Desember 2023 (Rp)	
						Retur Belanja yang akan ditransfer ulang ke penyedia/ Pihak Ketiga (Rp)	Kelebihan Pengembalian Belanja dari Pihak Ketiga yang akan dikembalikan (Rp)	Utang Pajak Dana BOS (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-7-8-9	11	12 = 10 + 11	13 = 9 + 12
2012	20102981	SEKOLAH DASAR NEGERI KARET 06 JAKARTA	SD	40212018351	350.001	0	0	0	350.001	0	350.001	350.001
2013	20102982	SEKOLAH DASAR NEGERI KARET 05 JAKARTA	SD	40212018360	3.326.412	0	0	0	3.326.412	0	3.326.412	3.326.412
2014	20103154	SEKOLAH DASAR NEGERI BUKIT DURI 10 PETANG JAKARTA	SD	40212017771	114.030.000	0	0	0	114.030.000	0	114.030.000	114.030.000
2015	20103155	SEKOLAH DASAR NEGERI BUKIT DURI 09 PAGI JAKARTA	SD	40212017843	169.691.101	0	0	0	169.691.101	0	169.691.101	169.691.101
2016	20103476	SEKOLAH DASAR NEGERI UJUNG MENTENG 06 PETANG JAKARTA	SD	50312021837	44.847.416	0	0	0	44.847.416	0	44.847.416	44.847.416
2017	20104580	SEKOLAH DASAR NEGERI KARET TENGSIN 01 JAKARTA	SD	11312109175	3.355.750	0	0	0	3.355.750	0	3.355.750	3.355.750
2018	20104610	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON SIRIH 01 JAKARTA	SD	10812169082	10.072.786	0	0	0	10.072.786	0	10.072.786	10.072.786
2019	20104689	SEKOLAH DASAR NEGERI SUMUR BATU 04 PAGI JAKARTA	SD	10154106952	3.042.786	0	0	0	3.042.786	0	3.042.786	3.042.786
2020	20104855	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBON BAWANG 04 JAKARTA	SD	20112125106	4.298.277	0	0	0	4.298.277	0	4.298.277	4.298.277
2021	20104867	SEKOLAH DASAR NEGERI KELAPA GADING TIMUR 05 PETANG JAKARTA	SD	20012055631	1.280.000	0	0	0	1.280.000	0	1.280.000	1.280.000
2022	20104876	SEKOLAH DASAR NEGERI PADEMANGAN TIMUR 09 JAKARTA	SD	20112125505	28.425	0	0	0	28.425	0	28.425	28.425
2023	20104909	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMPER BARAT 10 PETANG JAKARTA	SD	20012055754	99.618.311	0	0	0	99.618.311	0	99.618.311	99.618.311
2024	20104939	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNTER JAYA 04 JAKARTA	SD	20112125181	3.344.321	0	0	0	3.344.321	0	3.344.321	3.344.321
2025	20104948	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG PRIOK 03 JAKARTA	SD	20112125351	5.815.342	0	0	0	5.815.342	0	5.815.342	5.815.342
2026	20104950	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNG PRIOK 05 JAKARTA	SD	20112125238	1.584.586	0	0	0	1.584.586	0	1.584.586	1.584.586
2027	20104953	SEKOLAH DASAR NEGERI TUGU UTARA 02 PETANG JAKARTA	SD	20012055878	43.716.875	0	0	0	43.716.875	0	43.716.875	43.716.875
2028	20104966	SEKOLAH DASAR NEGERI WARAKAS 02 JAKARTA	SD	20112124991	128.279	0	0	0	128.279	0	128.279	128.279
2029	20104970	SEKOLAH DASAR NEGERI WARAKAS 06 JAKARTA	SD	20112125971	7.525	0	0	0	7.525	0	7.525	7.525
2030	20105861	SEKOLAH DASAR NEGERI CIPETE UTARA 07 PAGI JAKARTA	SD	40012200323	30.728.700	0	0	0	30.728.700	0	30.728.700	30.728.700
2031	20105894	SEKOLAH DASAR NEGERI GANDARIA UTARA 07 PAGI JAKARTA	SD	40012200447	85.732.000	0	0	0	85.732.000	0	85.732.000	85.732.000
2032	20105910	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL UTARA 04 PETANG JAKARTA	SD	41112025136	4.865	0	0	0	4.865	0	4.865	4.865
2033	20105918	SEKOLAH DASAR NEGERI GROGOL UTARA 15 PETANG JAKARTA	SD	41112025187	145.789	0	0	0	145.789	0	145.789	145.789
2034	20105958	SEKOLAH DASAR NEGERI KARET KUNINGAN 04 JAKARTA	SD	40212018459	6.813.892	0	0	0	6.813.892	0	6.813.892	6.813.892
2035	20106045	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGARAI 11 PAGI JAKARTA	SD	40212017991	52.179	0	0	0	52.179	0	52.179	52.179
2036	20106047	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGARAI 15 PAGI JAKARTA	SD	40212017983	348.245	0	0	0	348.245	0	348.245	348.245
2037	20106048	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGARAI 17 PAGI JAKARTA	SD	40212018106	8.534.953	0	0	0	8.534.953	0	8.534.953	8.534.953
2038	20106049	SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGARAI 19 PAGI JAKARTA	SD	40212018076	507.218	0	0	0	507.218	0	507.218	507.218
2039	20106093	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 03 PAGI JAKARTA	SD	40012203594	55.056.571	0	0	0	55.056.571	0	55.056.571	55.056.571
2040	20106094	SEKOLAH DASAR NEGERI PEJATEN TIMUR 04 PETANG JAKARTA	SD	40012201354	952.658	0	0	0	952.658	0	952.658	952.658
2041	20106216	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET TIMUR 18 PAGI JAKARTA	SD	40212018050	46.521.366	0	0	0	46.521.366	0	46.521.366	46.521.366
2042	20102258	SEKOLAH DASAR NEGERI TEBET TIMUR 03 PAGI JAKARTA	SD	40212018131	14.573.750	0	0	0	14.573.750	0	14.573.750	14.573.750
Total Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Saldo BOS					84.995.698.050	29.779.758	37.346.603	150.253.475	84.778.318.214	128.175.106	84.906.493.320	85.056.746.795

REKAPITULASI PIUTANG PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

NO	JENIS PAJAK	MUTASI PIUTANG TAHUN DIBAWAH 2023									MUTASI PIUTANG TAHUN BERJALAN 2023							
		SALDO AWAL PIUTANG PAJAK (AUDITED 31 DES 2022)	KOREKSI (PEMBATALAN/PEM BULATAN)	PEMBAYARAN ATAS PIUTANG PAJAK TAHUN LALU	KOMPENSASI DAN PEMINDAHBUKUAN ATAS PIUTANG PAJAK TAHUN LALU	KEPUTUSAN KEBERATAN/ PENGURANGAN/ KERINGANAN ATAS PIUTANG TAHUN LALU	PEMBEBASAN/PENG ENAAN/PEMBETULA N/PEMBATALAN/PE NGHAPUSAN ATAS PIUTANG TAHUN LALU	PDM TAHUN LALU	HAPUS BUKU	SISA PIUTANG PAJAK TAHUN LALU PER 31 DES 2023	PIUTANG PAJAK TAHUN BERJALAN	PEMBAYARAN ATAS PIUTANG PAJAK TAHUN BERJALAN	KOMPENSASI DAN PEMINDAHBUKUAN ATAS PIUTANG PAJAK TAHUN BERJALAN	KEPUTUSAN KEBERATAN/ PENGURANGAN/ KERINGANAN ATAS PIUTANG TAHUN BERJALAN	PEMBEBASAN/PENG ENAAN/PEMBETULAN /PEMBATALAN/PENG HAPUSAN ATAS PIUTANG TAHUN BERJALAN	PDM TAHUN BERJALAN	SISA PIUTANG TAHUN BERJALAN PER 31 DES 2023	SALDO AKHIR PIUTANG PAJAK DAERAH PER 31 DES 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+4-(5-9)-6-7-8-10	12	13	14	15	16	17	18=12-(13-17)-14-15-16	19=11+18
1	PKB	127.849.640.260	-	1.303.936.100,00	-	-	10.447.390.710	-		116.098.313.450	995.676.041.515	984.336.454.215	-	-	-	-	11.339.587.300	127.437.900.750
2	BBN-KB	-								-							-	-
3	PBB-KB	-	-	-	-	-	-	-		-	74.966.134	74.966.134	-	-	-	-	-	-
4	P A T	576.008.114.970	4	7.291.097.147,00	-	-	-	16.916		568.717.034.743	98.876.897.235	76.427.658.554	-	-	-	-	22.449.238.681	591.166.273.424
5	HOTEL	34.179.090.012	-	5.292.910.021,00	-	-	-	1		28.886.179.992	7.320.670.492	4.983.137.416	-	-	-	-	2.337.533.076	31.223.713.068
6	RESTORAN	145.189.427.505	-	13.123.878.437,00	-	-	-	10		132.065.549.078	49.497.734.964	40.236.099.112	-	-	-	3	9.261.635.855	141.327.184.933
7	HIBURAN	83.960.193.416	-	12.926.931.780,00	-	-	-	133.500		71.033.395.136	41.702.338.461	35.391.189.293	-	-	-	78.652	6.311.227.820	77.344.622.956
8	REKLAME	575.358.665.199	2	107.908.925.755,00	289.524.469		274.845.832	1.374.795.173		468.260.164.314	955.151.140.497	867.899.916.459	1.999.275	381.820.013	-	473.640.716	87.341.045.466	555.601.209.780
9	PPJ	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PARKIR	13.533.755.103	4	1.843.406.457,00	-	-	-	11.763.127		11.702.111.777	2.761.227.416	2.382.159.477	-	-	-	-	379.067.939	12.081.179.716
11	BPHTB	208.494.489.218	-	3.521.968.634,00	11.975.000		-	11.975.000		204.972.520.584	40.243.128.049	27.728.364.309	-	-	-	-	12.514.763.740	217.487.284.324
12	PBB-P2	9.231.328.177.637	-	802.962.330.180,00	886.127.074	92.719.256.082	296.086.732.738	522.994.384		8.039.196.725.947	13.493.080.456.917	8.245.736.779.121	1.277.740.650	798.390.806.386	2.561.865.773.189	1.110.788.668	1.886.920.146.239	9.926.116.872.186
Grand Total		10.995.901.553.320	6	956.175.384.511,00	1.187.626.543	92.719.256.082	306.808.969.280	1.921.678.111	-	9.640.931.995.021	15.684.384.601.680	10.285.196.724.090	1.279.739.925	798.772.626.399	2.561.865.773.189	1.584.508.039	2.038.854.246.116	11.679.786.241.137

DAFTAR PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM BENTUK SEWA PER 31 DESEMBER 2023

NO.	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		POKOK PIUTANG SEWA ASET						DENDA PIUTANG SEWA ASET					
					Saldo Audited 31-12-2022	Mutasi Tahun 2023				Saldo 31 Desember 2023	Saldo Audited 31-12-2022	Mutasi Tahun 2023				Saldo 31 Desember 2023
						Penambahan		Pengurangan				Penambahan		Pengurangan		
			Mulai	Berakhir		TAHUN BERJALAN	Koreksi	PELUNASAN	Koreksi			PKS	Koreksi	Pelunasan	Koreksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+8-9-10	12	13	14	15	16	17=12+13+14-15-16
1	PT. Panca Permata Istana Pasar Baru	4.496.856.804	16-Jul-12	15-Jul-17	-	2.124.526.220				2.124.526.220	317.564.715,00					317.564.715
2	Yayasan Pendidikan Elka	2.000.000.000	23-Mar-18	23-Mar-23	-	310.136.986				310.136.986	-					-
3	Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara	625.000.000	19-Oct-13	18-Oct-18	250.000.000					250.000.000	-					-
4	Prima Alto Sejahtera	2.367.579.043	2-Mar-10	1-Mar-15	1.502.379.043					1.502.379.043	75.118.952,00					75.118.952
5	PT. Pembangunan Jaya Ancol	1.643.957.703	5-Apr-15	4-Apr-20	736.357.814			736.357.814		-	-					-
6	Yayasan Ancol Barat	160.784.300	12-Apr-12	11-Apr-17	26.250.000					26.250.000	-					-
7	PT. Wiradharma Sportindo	563.709.296	8-Nov-12	7-Nov-17	463.709.296					463.709.296	23.185.465,00					23.185.465
8	Koperasi Puteri Salju	450.000.000	22-Nov-17	21-Nov-22	7.500.000	90.000.000				97.500.000	93.423,00					93.423
9	PT. Nata Sempurna Abadi	75.000.000	4-Apr-05	3-Apr-10	60.000.000					60.000.000	245.820.000,00					245.820.000
10	Yayasan Mahatma Gading	1.266.767.531	28-Oct-13	27-Oct-18	567.407.646					567.407.646	-					-
11	Yayasan Masjid Raya Al-Musyawaharah	545.000.000	14-Oct-14	13-Oct-19	200.000.000					200.000.000	-				-	-
12	Koperasi Perikanan Mina Jaya	97.282.208	14-Oct-14	13-Oct-19	32.824.000					32.824.000	-					-
13	Yayasan Al-Hikmah Sunter Jaya	30.000.000	31-Oct-14	30-Oct-19	10.000.000					10.000.000	-					-
14	PT. Flora Hijau Permai	120.000.000	14-Jul-03	13-Jul-08	120.000.000					120.000.000	-					-
15	Yayasan Pusat Pelatihan E&P	845.563.944	19-Sep-18	18-Sep-23	-	78.654.773				78.654.773	-					-
16	Yayasan Pusat Pelatihan E&P	828.844.687	24-Aug-18	23-Aug-23	-	195.016.277				195.016.277	-					-
17	PT. Petross Gas	3.718.465.786	31-Mar-15	30-Mar-20	-	1.665.566.778				1.665.566.778	-					-
18	Yayasan Pendidikan Islam Al Huda	45.000.000	29-Apr-08	28-Apr-11	-					-	49.215.000,00					49.215.000
19	PT. Petroleum Sukses	882.950.000	27-Apr-06	26-Apr-11	706.360.000					706.360.000	2.489.742.910,00					2.489.742.910
20	Pentrago Fertila Utama	500.000.000	23-Oct-07	23-Oct-12	500.000.000					500.000.000	1.674.500.000,00					1.674.500.000
21	Ikrar Anugerah Perkasa	385.000.000	12-Sep-12	11-Sep-17	232.500.000					232.500.000	19.250.000,00					19.250.000
22	Koperasi Pegawai Dinas Koperasi & UKM	30.000.000	14-Jul-08	13-Jul-13	12.000.000					12.000.000	39.192.000,00	-				39.192.000
23	CV. Kandang Mas	180.386.975	29-Dec-10	28-Dec-15	40.399.263					40.399.263	2.019.963,00					2.019.963
24	PT. Safari Persada	986.491.268	7-Jul-11	6-Jul-16	811.491.268					811.491.268	40.574.563,00					40.574.563
25	PT. Griya Berlian	3.190.000.000	29-Nov-12	28-Nov-17	1.325.000.000					1.325.000.000	66.250.000,00					66.250.000
26	CV. Satu Nafas	500.000.000	3-Jul-08	2-Jul-13	350.000.000					350.000.000	964.500.000,00					964.500.000
27	CV. Virgini	986.491.268	4-Apr-12	3-Apr-17	320.126.000				320.126.000	-	-					-
28	Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga	37.500.000	13-Oct-06	12-Oct-11	-					-	735.000,00					735.000
29	Yayasan Nawami Bhakti	475.000.000	15-Oct-17	15-Oct-22	23.750.000			23.750.000		-	-					-
30	PT. Aksara Andalan Prima Lokasi Kp. Rambutan	4.246.908.500	21-Apr-08	21-Apr-13	-					-	5.169.532.586					5.169.532.586
31	PT. T. Energy (PKS Lama)	2.700.000.000	1-Dec-08	30-Nov-13	316.342.950					316.342.950	346.711.873					346.711.873
32	PT. MAJUAN MASITTAH LATIEF	3.005.000.000	26-Nov-02	26-Aug-27	117.000.000					117.000.000	5.850.000,00					5.850.000
33	Kadin Jakarta Timur	39.717.500	13-Sep-16	12-Sep-21	10.591.333					10.591.333	-					-
34	Yayasan Baitul Muhajirin	30.000.000	1-Jan-13	31-Dec-18	-					-	80.000,00					80.000
35	PT. Paljaya Bumi Utama	1.250.000.000	18-Jan-06	18-Jan-11	1.000.000.000					1.000.000.000	4.005.750.000					4.005.750.000
36	PT. Hyunwoo Trading Indonesia	1.111.600.000	5-May-08	4-May-13	1.111.600.000					1.111.600.000	3.504.430.160					3.504.430.160

NO.	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		POKOK PIUTANG SEWA ASET						DENDA PIUTANG SEWA ASET					
					Saldo Audited 31-12-2022	Mutasi Tahun 2023				Saldo 31 Desember 2023	Saldo Audited 31-12-2022	Mutasi Tahun 2023				Saldo 31 Desember 2023
						Penambahan		Pengurangan				Penambahan		Pengurangan		
			Mulai	Berakhir		TAHUN BERJALAN	Koreksi	PELUNASAN	Koreksi			PKS	Koreksi	Pelunasan	Koreksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+8-9-10	12	13	14	15	16	17=12+13+14-15-16
37	PT. Satria Cipta Perkasa	2.252.972.568	13-May-14	12-May-19	1.662.278.578					1.662.278.578	99.947.953					99.947.953
38	PT. Tunas Dipta Persada	4.350.000.000			1.585.000.000					1.585.000.000	79.250.000					79.250.000
39	PT. Setia Utama Island	5.590.000.000	18-Dec-14	17-Dec-19	2.236.000.000					2.236.000.000	111.800.000					111.800.000
40	PT. PLN Persero	145.139.715	4-Feb-15	3-Feb-20	-	58.055.886				58.055.886	-					-
41	Yayasan Abdi Karya (Yadika)	2.222.665.229	26-Feb-15	25-Feb-20	497.785.589					497.785.589	-					-
42	Yayasan Bait-el Indonesia	500.000.000	30-Aug-16	29-Aug-21	133.333.333					133.333.333	-					-
43	Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara	25.000.000	5-May-15	4-May-20	10.000.000			10.000.000		-	-					-
44	Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta	400.000.000	31-Jan-13	30-Jan-18	160.000.000					160.000.000	-					-
45	Yayasan Rasa Sayang Mandiri	310.040.112	26-Oct-15	25-Oct-20	-	138.872.464				138.872.464	-					-
46	Yayasan Al-Ikhwan Meruya	56.370.930	29-Oct-15	28-Oct-20	-	25.249.540				25.249.540	-					-
47	Yayasan Haleluya Jakarta	1.691.127.888	18-Nov-15	17-Nov-20	1.191.127.888					1.191.127.888	69.556.394					69.556.394
48	PT. Jaya Sejati Dua	555.000.000	11-Feb-16	10-Feb-21	138.750.000					138.750.000	-					-
49	Yayasan Pondok Karya Pembangunan	693.945.000	8-Apr-15	7-Apr-20	277.578.000					277.578.000	-					-
50	PT. Unggul Dian Perkasa	1.944.374.289	7-Mar-16	6-Mar-21	623.992.320					623.992.320	37.658.912					37.658.912
51	Yayasan Pendidikan Citra Adhi Pratama	197.298.253	25-Apr-16	24-Apr-21	-	88.373.386				88.373.386	-					-
52	Yayasan Anak Bangsa Basmol	250.000.000	22-Feb-16	21-Feb-21	91.666.667	8.333.333				100.000.000	-					-
53	PT. Gagas Energi Indonesia (JB)	622.624.753	14-Nov-15	13-Nov-20	-	278.884.670				278.884.670	-					-
54	Yayasan AL-Huda	125.000.000	16-May-17	25-May-22	14.583.333					14.583.333	-					-
55	PT. TIFFANY MITRA SUKSES	194.000.000	1-Nov-15	1-Nov-17	194.000.000					194.000.000	-					-
56	PT. FAN MARINA SHIPYARD & CO	717.700.000	20-Feb-17	20-Feb-22	119.616.667	147.407.059				267.023.726	-					-
57	CV. MUARA KERTA JAYA	587.300.000	11-Oct-17	10-Oct-22	29.365.000	114.483.274				143.848.274	-					-
58	PT GLD PROPERTY	564.592.639	2-Nov-20	1-Nov-22	47.049.387			47.049.387		-						-
59	Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Kosambi Baru	101.671.500	8-Aug-2018	8-Aug-2023	-	8.078.010				8.078.010						-
60	PT Global Samudra Makmur	632.400.000	27-Nov-2018	26-Nov-2023	-	12.128.219				12.128.219						-
61	PT Solusindo Kreasi Pratama	739.429.000	14-Oct-18	13-Oct-23	-	41.495.995				41.495.995						-
62	PT Adicipta Boga Intiprima	2.098.000.000	23-Dec-18	22-Dec-23	-	10.346.301				10.346.301						-
63	PT DUTA PERTIWI	2.400.000.000	16-Mar-18	15-Mar-23	-	382.684.932				382.684.932						-
64	PT INDOSAT, TBK (PT Epid Menara Assetco)	882.300.000	17-Dec-17	16-Dec-22	-	183.711.781				183.711.781						-
65	Alfa Indah Sportindo	366.411.042	7-Nov-12	31-May-17	-	164.122.004				164.122.004						-
66	Yayasan Citra Berkat	595.000.000	18-Apr-12	19-Apr-17	-	440.000.000				440.000.000						-
67	PT Angke Marina Djaya	717.700.000	20-Feb-17	20-Feb-22	-	267.023.726				267.023.726						-
68	PT Mitra Inti Prima	45.000.000.000	7-Nov-23	6-Nov-28	-	6.000.000.000				6.000.000.000	-	60.000.000				60.000.000
69	PT Jakarta Propertindo (ITF)	194.625.207.400	12-Oct-22	11-Oct-50	-	1.459.689.056				1.459.689.056	-	106.557.301				106.557.301
70	PT Gemini Sinar Perkasa		2007	2027	-	736.177.400				736.177.400						-
71	PT Gemini Sinar Pratama		2005	2029	-	1.704.000.000				1.704.000.000						-
72	PT Mandiri Cipta Gemilang	9.199.600.000	20-Nov-20	20-Nov-25		1.839.920.000				1.839.920.000		183.992.000				183.992.000
TOTAL PIUTANG					19.865.715.375	18.572.938.068	-	817.157.201	320.126.000	37.301.370.242	19.438.329.869	350.549.301	-	-	-	19.788.879.170

**DAFTAR PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM BENTUK BOT/BTO PER 31 DESEMBER 2023**

No.	Pihak Ketiga	Thn	Jangka Waktu	Nilai Kontribusi PKS	Piutang Pokok Per 31 Des 2022	Mutasi Tahun 2023				Piutang Pokok Per 31 Des 2023	Piutang Denda Per 31 Des 2022	Mutasi Tahun 2023				Piutang Denda Per 31 Des 2023
		PKS	PKS	BOT/BTO		Penambahan		Pengurangan				Penambahan		Pengurangan		
						PKS	Koreksi	Pendapatan	Koreksi			PKS	Koreksi	Pendapatan	Koreksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+8-9-10	12	13	14	15	16	17=12+13+14-15-16
1	PT. Kempas Indah Indonesia	1997	1999 s/d 2024	910.000.000	-					-	-					-
2	PT. Duta Pertiwi Tbk	1997	1997 s/d 2017	460.000.000	-					-	-					-
3	PT. Duta Pertiwi Tbk	1999	1999 s/d 2029	1.450.000.000	-					-	-					-
4	PT. Rointa Eka Jaya	2001	2001 s/d 2031	1.250.000.000	-					-	-					-
5	PT. Duta Masa Nusa	2003	2006 s/d 2031	2.000.000.000	-					-	4.860.000.000					4.860.000.000
6	PT. Duta Pertiwi Tbk	2003	2004 s/d 2029	1.500.000.000	-					-	-					-
7	PT. Gading Raya Propertindo	2004	2004 s/d 2029	3.500.000.000	-					-	-					-
8	PT. Hotel Cikini Raya	2006	2008 s/d 2032	6.150.000.000	-					-	-					-
9	PT. Grand Indonesia	2009	2008 s/d 2035	53.074.000.000	-					-	-					-
10	PT. Jaya Real Property	2011	2012 s/d 2037	6.957.000.000	1.000.000					1.000.000	-					-
11	PT. Fajar Setia Mandiri(UTARA)	2002	2003 s/d 2023	2.218.000.000	-					-	-					-
12	PT. AGB Tuna (Coldstorage)	2004	2004 s/d 2024	600.000.000	-					-	-					-
13	Yayasan Al-Muhajirin	2005	2005 s/d -	-	-					-	-					-
14	PT. Gamma Investa Lestari	2006	2005 s/d 2030	1.500.000.000	-					-	-					-
15	Gereja Protestan Minahasa	2006	2006 s/d -	-	-					-	-					-
16	PT. AGB Tuna (Pabrik Es)	2006	2006 s/d 2026	450.000.000	-					-	-					-
17	PT. Duta Pertiwi Tbk	2008	2006 s/d 2031	7.453.280.000	-					-	-					-
18	PT. Gerak Maju Abadi	1997	1997 s/d 2017	5.315.000.000	-					-	-					-
19	PT. Bina Citra Tataswati	2000	2002 s/d 2040	200.000.000	-					-	-					-
20	Yayasan Tunas Muda	2000	2000 s/d 2025	911.281.328	-					-	-					-
21	Yayasan Pendidikan Tiara Kasih	2001	2001 s/d 2026	562.500.000	-					-	-					-
22	Yayasan Katolik Mardi Luhur	2001	2001 s/d 2026	911.281.326	-					-	391.394.641			391.394.641		-
23	PT. Pesona Marga Mandiri	2003	2004 s/d 2029	7.494.152.500	-					-	-					-
24	Yayasan Patmos	2003	2006 s/d 2031	2.629.958.657	-					-	-					-
25	Yay. Pusat Pelatihan E&P	2003	2006 s/d 2031	2.446.290.730	-					-	-					-
26	Gereja Bethel Jemaat Ecclesia	2005	2005 s/d -	-	-					-	-					-
27	Yayasan Pendidikan Bukit Sion	2006	2008 s/d 2033	6.929.568.694	-					-	-					-
28	PT. Langgeng Ayom Lestari	1990	1991 s/d 2021	2.605.000.000	-					-	-					-
29	Yay. Sapta Nawami Bhakti	1992	1992 s/d 2012	351.779.690	-					-	-					-
30	PT. Dharma Alumas Sakti	1992	1997 s/d 2044	22.271.759.150	-					-	10.990.861					10.990.861
31	PT. Bakrie Swastika Utama	1992	2021 s/d 2050	769.418.000.000	-	2.052.000.000				2.052.000.000	-	102.600.000				102.600.000
32	PT. Pasific Bangun Mas	2001	2001 s/d 2026	700.000.000	-					-	116.600.000					116.600.000
33	PT. Perwita Margasakti	2003	2003 s/d 2028	2.500.000.000	-					-	19.500.000					19.500.000
34	PT. Metropolitan Kentjana	2008	2006 s/d 2031	24.912.000.000	-					-	-					-
35	PT. Perwita Margasakti	2010	2010 s/d 2035	5.220.000.000	-					-	2.700.000					2.700.000
36	Yayasan Tugasku	1998	2004 s/d 2024	1.250.950.000	-					-	-					-
37	Yay. Pend. Pemb. Bangsa	2003	2003 s/d 2028	-	-					-	-					-
38	PT. Fajar Setia Mandiri	2003	2003 s/d 2023	1.600.000.000	-					-	539.743.000			358.000		539.385.000
39	PT. Pasific Prima Buana Mas	2004	2004 s/d 2029	250.000.000	-					-	1.170.311.605					1.170.311.605
40	PT. Wahana Cipta Sejahtera	2004	2004 s/d 2029	2.350.000.000	-					-	-					-
41	PT. Wahana Cipta Sejahtera	2006	2006 s/d 2031	3.000.000.000	-					-	-					-
42	PT. AAP				4.302.396					4.302.396	-					-
43	Eks. Unit Komp. Aloca PT. TDP (PT Tunas Dipta Persada)	JP	30 Tahun		540.000.000					540.000.000	-					-
44	Eks. PDUK		30 Tahun		400.000.000					400.000.000	-					-
45	T. Kav No.I.C.2	JT	25 Tahun		525.000.000					525.000.000	-					-
46	Tanah Kavling Blok III A (PT. MML) (PT Majuan Masitah Latief)	JT	30 Tahun		1.510.000					1.510.000	-					-
47	Tanah Kav Blok II/J.14 (Eks. PD.P)	JT	30 Tahun		450.000.000					450.000.000	-					-
48	PT. WAHANA NUSANTARA			45.560.339.000	-					-	-					-
49	PT BAHANA TIRTA AGUNG SEMESTA		30 Tahun	81.170.512.000						-	-	132.618.252				132.618.252
	JUMLAH			1.080.032.653.075	1.921.812.396	2.052.000.000	-	-	-	3.973.812.396	7.111.240.107	235.218.252	-	391.752.641	-	6.954.705.718

**REKAPITULASI PENDAPATAN DAN PIUTANG SEWA PEMANFAATAN TITIK REKLAME
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Nama Perusahaan	Jenis Sarana	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d 31 Desember 2023	Keterangan
1	PT. Nindhotama Kharisma	JPO	Jl. MH. Thamrin dpn Gedung BII, Kebon Kacang, Jakarta Pusat	341.500.000	0			0	Lunas 14 Mei 2014
2	PT. Caesar	Bahu Jalan	Jl. Tol Pluit Tomang / Jl. Latumenten, Jakarta Barat	170.000.000	170.000.000			170.000.000	Titik B-6A; SK Nomor 46/SK/BPKD/PPTR/X/09 tanggal 6-10-2009
3	PT. Billy Sinar Pratama	JPO	Jl. Daan Mogot dpn Suzuki Motor Ex. Kymco Motor, Jakarta Barat	39.500.000	39.500.000			39.500.000	SK Nomor 145/SK/BPKD-PPTR/III/2010 tanggal 11-03-2010
4	PT. Ditadini Neo Swara	Halte Busway Bagian Dalam	Koridor 1 (19 unit)	25.000.000	25.000.000			25.000.000	SPS Nomor 177/SPS/BPKD-PPTR/IV/2010 tanggal 23-04-2010
5	PT. Starindo Pola Abadi	Halte Bus Reguler	Jl. Mayjen Sutoyo dpn UKI, Jakarta Timur	25.741.000	25.741.000			25.741.000	
6	PT. Garis Mediatama	JPO	Jl. HR. Rasuna Said dpn Depkes, Jakarta Selatan	157.500.000	157.500.000			157.500.000	SPS Nomor 158/SPS/BPKD-PPTR/III/2010 tanggal 19-03-2010
7	PT. Dinamika Mitra Internusa	JPO	Jl. Mampang Prapatan dpn Imigrasi, Kec.Mampang Prapatan, Jaksel	372.000.670	186.000.335			186.000.335	Tahap I Lunas 6 Sept 2011
8	PT. Dinamika Mitra Internusa	Pos Polisi	Jl. Matraman Raya-Slamet Riyadi, Kec.Matraman Jak Timur	68.000.670	34.000.335			34.000.335	Tahap I Lunas 18 Nov 2011
9	PT. Dinamika Mitra Internusa	Pos Polisi	Jl. Bekasi Barat samping Fly Over, Kec.Jatinegara Jak Timur	27.000.670	13.500.335			13.500.335	Tahap I Lunas 18 Nov 2011
10	PT. Dinamika Mitra Internusa	Titik S-9B	Jl. Panglima Polim_Jl.Sambas, Kec.Keb Baru, Jak Sel	400.000.670	200.000.335			200.000.335	Tahap I Lunas 6 Sept 2011
11	PT. Dinamika Mitra Internusa	JPO	Jl. Warung Jati Barat depan Hotel Jati Padang, Kec.Ps Minggu Jak Sel	226.000.670	113.000.335			113.000.335	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
12	PT. Puri Anugerah Utama	Pos Polisi	Jl. S.Parman-Jl.Palmerah, Kec.Palmerah Jak Barat	105.000.670	52.500.335			52.500.335	Tahap I Lunas 18 Nov 2011
13	PT. Simpati Advertising	JPO	Samping Pasar raya Blok M, Jl. Sultan Iskandrsyah Melawai, Jakarta Selatan	6.690.450	6.690.450			6.690.450	Belum dibayar Denda Pembatalan Sewa Tirek
14	PT. Puri Anugerah Utama	JPO	Jl. Kramat Raya depan Rivoli/Xerox, Senen, Jakarta Pusat	254.589.000	127.294.500			127.294.500	Tahap I Lunas 27 Feb 2012
15	PT. Semarak Tata Pariwara	JPO	Jl. Salemba Raya depan UI, Senen,	22.100.000	22.100.000			22.100.000	Belum dibayar Denda
16	PT. Puri Anugerah Utama	JPO	Jl. Kramat Raya depan Gd YAI/CTC,	289.900.000	289.900.000			289.900.000	Belum dibayar
17	PT. Semarak Tata Pariwara	JPO	Jl. Salemba Raya dpn Carolus, Senen,	22.100.000	22.100.000			22.100.000	Belum dibayar Denda
18	PT. Puri Anugerah Utama	JPO	Jl. HayamWuruk depan Hti Jayakarta,	285.500.000	142.750.000			142.750.000	Tahap I Lunas 27 Feb 2012
19	PT. Caesar	Titik B1B	Jl Letjen S.Parman Palmerah, Jakarta	472.600.000	236.300.000			236.300.000	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
20	PT. Caesar	Titik B1A	Jl Letjen S.Parman Palmerah, Jakarta	472.600.000	236.300.000			236.300.000	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
21	PT. Caesar	Titik P7B	Jl, HR Rasuna/Latuharhari, Menteng	945.000.000	472.500.000			472.500.000	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
22	PT. Mida Jaya	Titik B10A	Jl. Arjuna/Jl Tol Jakarta-Merak, Kec.	122.000.000	122.000.000			122.000.000	Belum dibayar Denda

No	Nama Perusahaan	Jenis Sarana	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d 31 Desember 2023	Keterangan
23	PT. Puri Anugerah Utama	JPO	Jl. Warung buncit raya dpn Grha Inti Fauji, Kec Ps Minggu, Jak Sel	353.000.670	176.500.335			176.500.335	Tahap I Lunas 25 Januari 2012 dikeluarkan 2x SPS
24	PT. Puri Anugrah Utama	JPO	Jl. Matraman Raya dpn BCA, Kec.	280.067.000	0			0	Lunas 20 Mei 2014
25	PT. Dinamika Mitra Internusa	JPO	Jl. Casablanca depan Halte SD/Pemakaman, Kec.Tebet Jak-Sel	200.900.000	0			0	Lunas 25 Agustus 2014
26	PT. Magna Astro Prontonusa	JPO	Jl. HR. Rasuna Said depan Four Season	1.551.000.000	0			0	SPS No. 5247/-078.615
27	PT. Magna Astro Prontonusa	JPO	Jl. HR. Rasuna Said depan Kedubes	1.610.000.000	0			0	SPS No. 5246/-078.615
28	PT. Magna Astro Prontonusa	JPO	Jl. HR. Rasuna Said depan Depkes	1.850.900.000	0			0	SPS No. 5248/-078.615
29	PT. Magna Astro Prontonusa	JPO	Jl. HR. Rasuna Said depan Indorama	1.967.000.000	0			0	SPS No. 5243/-078.615
30	PT. Unggul Dian Perkasa	JPO	Jl. Jend. Sudirman depan Ratu Plaza	3.500.000.000	0			0	SPS No. 5244/-078.615
31	PT. Insite Media	JPO	Jl. Jend. Sudirman depan Polda Metro	5.849.800.000	0			0	SPS No. 5249/-078.615
32	PT. Prisma Harapan	JPO	Jl. HR. Rasuna Said dpn Pasar Festival,	2.101.000.000	0			0	Lunas 30 Desember 2014
				24.113.992.140	2.871.178.295	0	0	2.871.178.295	

**REKAPITULASI PERSEDIAAN USANG/RUSAK
PER 31 DESEMBER 2023**

No.	JENIS PERSEDIAAN/SKPD	Persediaan Usang/Rusak Sudah Dikeluarkan dari Neraca		Total Nilai Persediaan	Keterangan
		Belum diusulkan untuk	Diusulkan untuk		
1	1	2	3	5=2+3+4	6
	1.1.12.01 - Barang Pakai Habis	9.777.783.557,00	29.014.206.112,00	38.791.989.669,00	
1	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	279.217.000	-	279.217.000,00	Obat Kadaluarsa
2	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	-	250.995.392	250.995.392,00	Obat Program Kadaluarsa
3	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	-	211.422.400	211.422.400,00	Obat ED Seksi SDK
4	DINAS BINA MARGA	7.857.850	-	7.857.850,00	Lampu
5	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	222.577.850	-	222.577.850,00	Lampu
6	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	11.578.368	-	11.578.368,00	Tinta printer, pita mesin tik elektrik, cetakan khusus
7	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	-	154.282.788	154.282.788,00	Cetakan khusus, obat-obatan kesehatan hewan dan pengendalian penyakit
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	13.719.046.806	13.719.046.806,00	Cetakan khusus/umum Tidak digunakan lagi sesuai Permendagri No. 109 Tahun 2019 usulan tahun 2020
9	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	121.671.000	-	121.671.000,00	Cetakan khusus/umum Tidak digunakan lagi sesuai Permendagri No. 109 Tahun 2019 usulan tahun 2020
10	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	-	232.253.430	232.253.430,00	Cetakan khusus/umum Tidak digunakan lagi sesuai Permendagri No. 109 Tahun 2019 usulan tahun 2020
11	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	15.400.000	397.237.500	412.637.500,00	Cetakan khusus/umum Tidak digunakan lagi sesuai Permendagri No. 109 Tahun 2019 usulan tahun 2020
12	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	226.509.965	-	226.509.965,00	Cetakan khusus/umum Tidak digunakan lagi sesuai Permendagri No. 109 Tahun 2019 usulan tahun 2020
13	SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	-	147.267.230	147.267.230,00	Cetakan khusus/umum Tidak digunakan lagi sesuai Permendagri No. 109 Tahun 2019 usulan tahun 2020
14	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	6.475.321.999	-	6.475.321.999,00	Alat kontrasepsi
14	DINAS PERHUBUNGAN	-	300.474.234	300.474.234,00	Kartu izin usaha kendaraan yg sudah lewat tahun, Lampu Pijar TL, Penetapan status Kendaraan bermotor umum
15	UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN	86.664.660	-	86.664.660,00	Persediaan usang berupa tinta printer dan Karcis Retribusi
16	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KEDAUNG ANGKE	-	4.999.805.656	4.999.805.656,00	Usulan Penghapusan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor
17	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PULO GADUNG	-	432.853.080	432.853.080,00	Usulan Penghapusan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor
18	UNIT PENGELOLA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UJUNG MENTENG	-	6.614.190.385	6.614.190.385,00	Usulan Penghapusan Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 6.330.731.550,00 dan Barang cetakan sebesar Rp283.458.835,00.
19	UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI	8.808.000	-	8.808.000,00	Buku Karcis Rusak
20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.772.467	-	8.772.467,00	Amplop Dinas (Alamat Lama), Buku BKU, Lemba Disposisi Kuning (Nomenklatur Lama), Surat Setoran Pajak yang sudah digunakan
21	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KELAPA GADING - JAKUT	89.242.504	-	89.242.504,00	Kadaluarsa obat, alkes covid,non covid dan obat program
22	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR	27.871.758	-	27.871.758,00	Obat Kadaluarsa
23	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JAGAKARSA - JAKSEL	-	446.067.545	446.067.545,00	Obat Kadaluarsa
24	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KRAMAT JATI - JAKTIM	103.213.926	-	103.213.926,00	Obat Kadaluarsa
25	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENGKARENG	262.951.549	-	262.951.549,00	Obat Kadaluarsa
26	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO	1.091.802.818	-	1.091.802.818,00	Obat Kadaluarsa
27	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU	-	51.093.143	51.093.143,00	Obat dan bahan medis habis pakai -kedaluwarsa-
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMBANGAN	-	8.243.909	8.243.909,00	Obat-obatan dan BMHP
29	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KALIDERES	94.581.075	-	94.581.075,00	Obat Kadaluarsa
30	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI	539.016.599	-	539.016.599,00	Obat Kadaluarsa
31	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK	-	90.687.044	90.687.044,00	Obat Kadaluarsa
32	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG	92.870.019	-	92.870.019,00	Obat Kadaluarsa
33	UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN	-	958.285.570	958.285.570,00	Karcis yang tidak terpakai
34	UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG	11.854.150	-	11.854.150,00	Kwitansi Tahun 2019, Kwitansi Tahun 2020, Kwitansi Tahun 2022, Kalender Tahun 2020 dan Buku BKU Bendahara
	JUMLAH	9.777.783.557	29.014.206.112	38.791.989.669	

IKHTISAR PERHITUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH (PMP)
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Perusahaan Daerah	Lapkeu Tahun	Tahun Penyertaan	Dasar Hukum	Bentuk Penyertaan	% Kepemilikan	Saldo per 31 Desember 2022 (Audited)	Mutasi Tambah Tahun 2023				Mutasi Kurang Tahun 2023			Nilai PMP per 31 Desember 2023
								Tambahan Modal Disetor	Pengumuman Laba	Lain-lain	Koreksi Ekuitas	Pembagian Dividen	Pengumuman Rugi	lain-lain	
1	Perumda Air Minum Jaya	Audited 2023	1992	Perda No. 13/1992	Lainnya	100%	2.047.609.883.109,00	135.000.000.000,00	1.247.359.474.526,00	-	43.851.403.620,00	-		24.275.835.475,00	3.449.544.925.780,00
2	Perumda Dharma Jaya	Audited 2023	1985	Perda No.20/2010	Lainnya	100%	154.096.219.186,00	250.000.000.000,00	62.390.243.180,00	-	-	-	-	361.432.629,00	466.125.029.737,00
3	Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	Audited 2023	1982	Perda No. 6/1990	Lainnya	100%	5.633.090.329.007,00	-	-	34.804.379.198,00	-	-	98.486.101.866,00	14.480.102.275,00	5.554.928.504.064,00
4	Perumda Pasar Jaya	Audited 2023	1982	Perda No. 2/2009	Lainnya	100%	1.496.500.990.790,00	-	54.911.297.143,00	-	-	5.897.211.097,00	-	14.766.184.475,00	1.530.748.892.361,00
5	Perumda PAL Jaya	Audited 2023	1991	Perda No. 14/1997	Lainnya	100%	1.218.549.464.647,00	-	36.738.750.882,00	5.550.866.234,00	-	14.407.820.822,00	-	-	1.246.431.260.941,00
Jumlah Penyertaan Modal Pada BUMD							10.549.846.886.739,00	385.000.000.000,00	1.401.399.765.731,00	40.355.245.432,00	43.851.403.620,00	20.305.031.919,00	98.486.101.866,00	53.883.554.854,00	12.247.778.612.883,00
6	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2023	1961	Akta No.256-265/2005	Saham	38,80%	4.337.534.937.488,00	-	339.918.345.698,00	33.383.765.050,00	-	20.320.000.000,00	-	2.263.454.448,00	4.688.253.593.788,00
7	PT Food Station Tjipinang	Audited 2023	1972	RUPS 26-08-1991	Saham	99,98%	653.040.548.449,00	-	6.189.855.826,00	13.563.326,00	-	14.426.245.892,00	-	27.182.498.369,00	617.635.223.340,00
8	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2023	1973	Akta No.77/19-02-2009	Saham	50,00%	162.303.174.969,00	-	30.398.341.241,00	-	-	4.783.042.097,00	-	-	187.918.474.113,00
9	PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi)	Audited 2023	1970	Laporan Keuangan th. 2005	Saham	26,25%	261.880.908.466,00	-	52.269.085.968,00	-	-	68.315.227.500,00	-	1.512.003.683,00	244.322.763.251,00
10	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	Audited 2023	1991	Akta No. 13/1-04-2004	Saham	72,00%	1.113.095.520.425,00	-	169.324.560.065,00	-	-	33.407.999.971,00	-	63.056.880.066,00	1.185.955.200.453,00
11	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2023	2002	Akta No. 13/05-06-03	Saham	26,85%	209.692.695.000,00	-	-	-	-	-	-	-	209.692.695.000,00
12	PT Cemani Toka	Audited 2023	1971	Akta No. 5/7-07-99	Saham	27,42%	27.059.360.000,00	-	-	-	-	-	-	-	27.059.360.000,00
13	PT Pakuan International	Audited 2022	1971	-	Saham	1,11%	1.345.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.345.900.000,00
14	PT Grahasahari Suryajaya	Audited 2022	1992	Akta No. 172/20-07-1992	Saham	8,08%	3.951.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.951.000.000,00
15	PT Asuransi Bangun Askrida	Audited 2023	1989	Akta No. 1192/25-7-05	Saham	4,10%	13.080.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	13.080.000.000,00
16	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	Unaudited 2023	1997	Akta No. 293/30-06-05	Saham	99,998%	21.990.961.378.992,00	2.416.000.000.000,00	-	-	-	-	415.715.547.530,00	48.585.285,00	23.991.197.246.177,00
17	PT Bank DKI Jakarta	Audited 2023	1999	Akta No. 12/14-01-10	Saham	99,98%	10.192.081.387.000,00	-	1.019.883.853.108,00	54.135.577.223,00	-	281.670.562.798,00	-	1.894.572.471,00	10.982.535.682.062,00
18	PT Jakarta International Expo	Audited 2022	2004	Akta Hitbah No. 67/22-07-2004	Saham	13,125%	39.375.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	39.375.000.000,00
19	PT Jakarta Tourisindo	Audited 2023	2004	Akta No. 6/17-09-04	Saham	99,57%	657.565.447.494,00	13.870.975.375,00	-	642.476.493,00	-	-	104.843.493.681,00	-	567.235.405.681,00
20	PT Mass Rapid Transit Jakarta	Audited 2023	2008	Perda No. 4 Tahun 2008	Saham	99,998%	21.848.148.326.004,00	2.021.526.331.526,00	20.452.536.414,00	119.451.879,00	-	-	-	2.345.099.145,00	23.887.901.546.678,00
21	PT Transportasi Jakarta	Audited 2023	2014	Perda No. 4 Tahun 2014	Saham	99,70%	5.309.862.763.903,00	-	145.928.219.934,00	1.993.772.311,00	-	88.529.116.811,00	-	668.033.940.441,00	4.701.221.698.896,00
22	PT Penjamin Kredit Daerah	Audited 2023	2013	Perda No.13 Tahun 2013	Saham	98,75%	393.933.853.943,00	-	19.216.885.827,00	267.169.849,00	-	-	-	278.066.192,00	413.139.843.427,00
23	PT Ratax Armada	Unaudited 2014	1971	Akta No. 23/11-05-99	Saham	28,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penyertaan Modal Pada PT Patungan							67.214.912.202.133,00	4.451.397.306.901,00	1.803.581.684.081,00	90.555.776.131,00	-	511.452.195.069,00	520.559.041.211,00	766.615.100.100,00	71.761.820.632.866,00
JUMLAH							77.764.759.088.872,00	4.836.397.306.901,00	3.204.981.449.812,00	130.911.021.563,00	43.851.403.620,00	531.757.226.988,00	619.045.143.077,00	820.498.654.954,00	84.009.599.245.749,00

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Ribuan Rupiah)																			
No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Hak Minoritas	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah		
																	Cost Method	Equity Method	Jumlah
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (16 X 17)	20 (18 + 19)
1	Bidang Perbankan																		
1	PT Bank DKI	Audited 2014	11.437.265.000	24.615.030.000	383.329.000	36.435.624.000	31.357.771.000	721.248.000	32.079.019.000	-	2.931.159.000	1.000	(28.739.000)	1.454.184.000	4.356.605.000	99,97%		4.355.118.692	4.355.118.692
	Sub Total 1		11.437.265.000	24.615.030.000	383.329.000	36.435.624.000	31.357.771.000	721.248.000	32.079.019.000	-	2.931.159.000	1.000	(28.739.000)	1.454.184.000	4.356.605.000		-	4.355.118.692	4.355.118.692
2	Bidang Asuransi																		
1	PT Asuransi Bangun Askrida	Audited 2014	1.742.540.317	184.597.953	5.355.908	1.932.494.178	1.324.085.530	100.336.488	1.424.422.019	-	197.390.000	780.000	134.614.360	153.219.616	486.003.976	4,45%	8.680.000	-	8.680.000
	Sub Total 2		1.742.540.317	184.597.953	5.355.908	1.932.494.178	1.324.085.530	100.336.488	1.424.422.019	-	197.390.000	780.000	134.614.360	153.219.616	486.003.976		8.680.000	-	8.680.000
3	Bidang Konstruksi																		
1	PT Jakarta Properindo (Konsolidasi)	Audited 2014	2.188.785.352	1.865.928.080	-	4.054.713.432	545.255.321	366.143.419	911.398.740	306.531.875	1.329.995.757	916.734.474	-	590.052.586	2.836.782.817	99,97%		2.836.036.293	2.836.036.293
2	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2014	5.263.434.912	6.929.802.920	-	12.193.237.832	5.379.227.238	807.766.024	6.186.993.262	1.831.780.459	3.117.000	117.594.956	309.766.780	3.743.985.375	4.174.464.111	38,80%		1.619.697.432	1.619.697.432
3	PD Pembangunan Sarana Jaya	Unaudited 2014	557.119.874	646.484.760	-	1.203.604.634	48.608.725	158.682.068	207.290.793	-	939.002.798	-	-	57.311.043	996.313.841	100,00%		996.313.841	996.313.841
	Sub Total 3		8.009.340.138	9.442.215.760	-	17.451.555.898	5.973.091.284	1.332.591.511	7.305.682.795	2.138.312.334	2.272.115.555	1.034.329.430	309.766.780	4.391.349.004	8.007.560.769		-	5.452.047.566	5.452.047.566
4	Bidang Jasa Lainnya																		
1	PT Jakarta International Expo	Audited 2007	19.597.963	1.317.961.793	-	1.337.559.756	43.977.931	1.003.234.399	1.047.212.329	-	300.000.000	-	-	(9.652.573)	290.347.427	13,14%	39.375.000	-	39.375.000
2	PDAM Jaya	Audited 2014	700.849.663	124.501.513	-	825.351.176	1.126.493.816	999.398.724	2.125.892.540	-	323.364.100	-	-	(1.623.905.464)	(1.300.541.364)	100,00%		-	-
3	PD PAL Jaya	Audited 2014	339.208.610	113.514.100	-	452.722.719	8.622.066	8.143.514	16.765.580	-	377.752.402	-	-	58.204.737	435.957.139	100,00%		435.957.139	435.957.139
4	PD Pasar Jaya	Audited 2014	892.450.883	3.519.602.713	-	4.412.053.596	326.400.125	3.539.508.144	3.865.908.269	-	497.175.929	6.383.572	-	42.585.825	546.145.327	100,00%		546.145.327	546.145.327
5	PT Jamkrida Jakarta	Unaudited 2014	57.665.645	-	-	57.665.645	133.788	-	133.788	-	57.500.000	-	31.858	57.531.858	95,00%		54.655.265	54.655.265	54.655.265
	Sub Total 4		2.009.772.764	5.075.580.129	-	7.085.352.893	1.505.627.725	5.550.284.782	7.055.912.507	-	1.555.792.431	6.383.572	31.858	(1.532.767.475)	29.440.386		39.375.000	1.036.757.730	1.076.132.730
5	Bidang Perdagangan																		
1	PT Food Station Tipinrang	Audited 2014	64.875.054	38.425.770	1.029.131	104.329.956	14.393.039	20.583.311	34.976.351	-	300.000	47.500.000	-	21.553.605	69.353.605	74,67%		51.784.025	51.784.025
2	PD Dharma Jaya	Audited 2013	15.380.273	44.854.849	6.897.685	67.132.806	23.171.081	12.671.349	35.842.430	-	33.918.097	-	18.373.233	(21.000.954)	31.290.377	100,00%		31.290.377	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI)
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Perusahan Daerah	Sumber Lapkeu	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-lain / Hak Minoritas	Taksiran Pajak Penghasilan	Laba (Rugi) Setelah pajak
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7
1	Bidang Perbankan								
1.	PT Bank DKI	Audited 2014	1.948.917.000	(1.135.103.000)	813.814.000	211.463.000	(324.835.000)	(234.757.000)	465.685.000
	Sub Total 1		1.948.917.000	(1.135.103.000)	813.814.000	211.463.000	(324.835.000)	(234.757.000)	465.685.000
2	Bidang Asuransi								
1.	PT Asuransi Bangun Askrida	Audited 2014	1.470.451.601	(1.284.131.827)	186.319.775	(995.541)	-	(32.860.121)	152.464.113
	Sub Total 2		1.470.451.601	(1.284.131.827)	186.319.775	(995.541)	-	(32.860.121)	152.464.113
3	Bidang Konstruksi								
1.	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	Audited 2014	399.740.219	(221.935.549)	177.804.670	176.835.905	(170.051.166)	(48.692.379)	135.897.030
2.	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2014	6.920.480.014	(5.732.225.313)	1.188.254.701	177.920.987	(92.762.625)	(230.812.115)	1.042.600.948
3.	PD Pembangunan Sarana Jaya	Audited 2014	67.489.364	(21.547.321)	45.942.043	8.809.087	(7.940.309)	(3.232.350)	43.578.471
	Sub Total 3		7.387.709.598	(5.975.708.183)	1.412.001.414	363.565.979	(270.754.100)	(282.736.843)	1.222.076.450
4	Bidang Jasa Lainnya								
1.	PT Jakarta International Expo	Audited 2007	136.690.927	(127.448.089)	9.242.838	259.482	(8.501.489)		1.000.832
2.	PD AM Jaya	Audited 2014	2.502.074.981	(2.431.890.794)	70.184.187	55.119.324	(30.841.599)	(31.244.498)	63.217.414
3.	PD PAL Jaya	Unaudited 2015	55.990.120	(36.262.575)	19.727.546	20.344.555	(119.082)	(9.988.255)	29.964.764
4.	PD Pasar Jaya	Audited 2014	505.381.806	(454.221.889)	51.159.916	56.418.396	(6.416.598)	(24.716.151)	76.445.563
4.	PT Penjamin Kredit Daerah	Unaudited 2015	4.037.497	(3.230.844)	806.653	3.058	(2.094)	-	807.617
	Sub Total 4		3.204.175.331	(3.053.054.191)	151.121.140	132.144.816	(45.880.861)	(65.948.904)	171.436.191
5	Bidang Perdagangan								
1.	PT Food Station Tjipinang	Unaudited 2015	537.421.113	(526.675.852)	10.745.261	2.311.266	(1.801.044)	(2.057.807)	9.197.675
2.	PD Dharma Jaya	Audited 2013	6.800.289	(8.547.526)	(1.747.237)	236.622	(672.036)	800.459	(1.382.191)
	Sub Total 5		544.221.402	(535.223.378)	8.998.024	2.547.888	(2.473.080)	(1.257.348)	7.815.485
6	Bidang Pariwisata								
1.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Unaudited 2015	480.196.120	(278.840.647)	201.355.473	6.500.905	(25.117.185)	(61.907.973)	120.831.219
2.	PT Jakarta Tourisindo	Audited 2014	137.171.173	(132.499.480)	4.671.693	4.941.948	(694.613)	(3.896.043)	5.022.985
3.	PT Grahasahari Suryajaya	Audited 2012	29.471.298	(29.153.103)	318.195	-	(20.590.891)	(2.741.229)	(23.013.924)
4.	PT Pakuan	Audited 2010	3.674.178	(5.243.660)	(1.569.482)	97.737	(57.106)	-	(1.528.851)
	Sub Total 6		650.512.769	(445.736.890)	204.775.879	11.540.590	(46.459.795)	(68.545.245)	101.311.429
7	Bidang Kawasan Industri								
1.	PT Jakarta Industrial Estate PuloGadung	Unaudited 2014	55.908.298	(27.767.251)	28.141.048	22.144.543	(4.258.985)	(9.225.865)	36.800.740
2.	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2014	654.330.837	(417.956.023)	236.374.815	105.498.204	(12.265.396)	(66.149.717)	263.457.905
	Sub Total 7		710.239.135	(445.723.273)	264.515.862	127.642.747	(16.524.381)	(75.375.583)	300.258.645
	Jumlah dipindahkan		15.916.226.836	(12.874.680.742)	3.041.546.095	847.909.479	(706.927.217)	(761.481.044)	2.421.047.312
	Jumlah pindahan		15.916.226.836	(12.874.680.742)	3.041.546.095	847.909.479	(706.927.217)	(761.481.044)	2.421.047.312

No.	Perusahaan Daerah	Sumber Lapkeu	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-lain / Hak Minoritas	Taksiran Pajak Penghasilan	Laba (Rugi) Setelah pajak
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7
8	Bidang Angkutan Darat								
1.	PT Ratax Armada	Audited 2013	1.615.083	(2.300.896)	(685.813)	-	(520.528)	-	(1.206.341)
2.	PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta	Unaudited 2015	-	(59.885.236)	(59.885.236)	18.759.840	(20.737.347)	-	(61.862.743)
3.	PT Transportasi Jakarta	Unaudited 2014	-	(12.836.999)	(12.836.999)	80.919	(10.770)	-	(12.766.849)
	Sub Total 8		1.615.083	(75.023.131)	(73.408.048)	18.840.759	(21.268.645)	-	(75.835.933)
9	Bidang Aneka Industri								
1.	PT Delta Djakarta, Tbk	Audited 2014	903.212.749	(522.167.226)	381.045.523	-	(1.526.711)	(91.445.380)	288.073.432
2.	PT Cemani Toka	Audited 2014	552.120.724	(520.755.834)	31.364.890	24.152.040	(10.128.123)	(11.628.386)	33.760.422
	Sub Total 9		1.455.333.473	(1.042.923.060)	412.410.413	24.152.040	(11.654.834)	(103.073.766)	321.833.854
10	Bidang Rumah Sakit								
1.	PT RS Haji Jakarta	Unaudited 2015	174.555.294	(187.964.351)	(13.409.057)	2.610.861	(319.147)	-	(11.117.343)
	Sub Total 10		174.555.294	(187.964.351)	(13.409.057)	2.610.861	(319.147)	-	(11.117.343)
	Total Seluruh Bidang Industri		17.547.730.687	(14.180.591.283)	3.367.139.403	893.513.139	(740.169.843)	(864.554.810)	2.655.927.889

DAFTAR ASET PROPERTI INVESTASI
 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
 PER 31 DESEMBER 2023

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 31 Desember 2023						KETERANGAN	
			Tanah	Gedung & Bangunan	Peralatan dan Mesin			Aset Tetap Lainnya	Total	
					Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga			
1	RT 10 RW 02 Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayang Jakarta Timur	KSU Ceger Raya (24 April 2018)	664.734.000	184.464.000					849.198.000	
2	Jl. Suryopranoto No.8	PT. Bank DKI	24.096.000.000	90.610.320.132					114.706.320.132	
3	Jalan Kalibaru Timur VI Nomor 106A Kota Administrasi Jakarta Pusat	DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat	1.860.000.000	507.000.000					2.367.000.000	
4	Jalan Kesatrian Pasar Pagi Nomor 3 Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara	DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara	849.600.000	507.000.000					1.356.600.000	
5	Jalan Raya Joglo RT 03 RW 06 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat	DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta	1.982.400.000	540.800.000					2.523.200.000	
6	Jalan Semanan Pintu Air RT 10 RW 08 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat	DPC PDI Perjuangan Jakarta Barat	1.968.624.000	507.000.000					2.475.624.000	
7	Jalan Pasir Nomor 3 Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan	1.945.300.000	507.000.000					2.452.300.000	
8	Tanah dan Gedung di Jalan H. Naman Nomor 3 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur	DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur	746.697.000	507.000.000					1.253.697.000	
9	spbu Pompa Bensin DB-539 Tebet	Pompa Bensin DB-539 Tebet	872.200.000						872.200.000	
10	Kawasan Taman Impian Jaya Ancol Jalan Lodan Timur Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara	PT Pembangunan Jaya Ancol	24.780.000.000	4.309.094.400					29.089.094.400	
11	Jalan Baladewa No.34 Rt 05/Rw 05, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat	Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI)	2.154.375.000	397.171.000					2.551.546.000	
12	Jalan Otto Iskandardinata Raya No. 64 D, Kota Administrasi Jakarta Timur	Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Kota Jakarta Timur	6.725.550.000	144.143.000					6.869.693.000	
13	Blok F5 Perumahan Citra Garden 1 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Tanimbar Lestari(8 Mei 2017)	1.087.020.000	92.630.000					1.179.650.000	
14	Jalan Sunter Garden Blok B 3 Nomor 10 B Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara	Yayasan Bait-El Indonesia(29 Agustus 2016)	5.842.200.000	106.890.315					5.949.090.315	
15	Perumahan Bisma Setjen Dewan Hankamnas Blok B8, C6, dan Perumahan Sunter Garden Blok B7 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok	Yayasan Harapan Bangsa (4 Juni 2017)	23.962.500.000	1.250.340.000					25.212.840.000	
16	Perumahan Citra Garden Ext. 1 Blok AE 4 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat	Yayasan Haleluya Jakarta (17 November 2020)	1.346.796.000	2.499.130.379					3.845.926.379	
17	Kompleks Perumahan Citra 5 Blok A-6 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan El Shaddai Jakarta Barat (21 November 2019)	835.040.000	198.906.861					1.033.946.861	
18	Blok EE4 Perumahan Taman Ratu Indah Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat	Yayasan Abdi Karya (Yadika) (25 Februari 2020)	2.172.360.000						2.172.360.000	
19	Jalan Prang Tritis IX Blok B4/B Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara	Yayasan Ancol Barat (11 April 2017)	585.480.000						585.480.000	
20	Jalan Gading Putih IV Kelapa Gading Permai, Jalan Gading Putih II Kelapa Gading Permai, Jalan Kelapa Hybrida VII Kelapa Gading Permai, Jalan Permai	Yayasan Pendidikan Elka (23 Maret 2018)	70.795.025.000	760.000.000					71.555.025.000	
21	Blok B.6 dan A3 Perum Citra II Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Kemurnian	512.193.228						512.193.228	
22	Blok B.6 dan A3 Perum Citra II Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Kemurnian	873.500.000						873.500.000	
23	Perumahan Vila Gading Indah Blok D Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara	Yayasan Mahatma Gading(27 Oktober 2018)	3.311.250.000	6.352.289.364					9.663.539.364	
24	Jalan Karya Selatan RT: 01/13 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok	Yayasan Al - Amanah Sunter Agung (8 Januari 2019)	452.748.274	28.149.979					480.898.253	
25	Jalan Lampiri Raya Nomor 28 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur	Yayasan Perguruan Rakyat (1 Februari 2019)	4.155.864.000	3.402.000.000					7.557.864.000	
26	Kompleks Perumahan Citra 5 Blok D-6 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat	Yayasan El-Shaddai Jakarta Barat(22 Juli 2019)	8.075.520.000	2.034.480.000					10.110.000.000	
27	BLOK A.6, PERUMAHAN CITRA 3 EKSTENSION, KELURAHAN PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADM. JAKARTA BARAT	Yayasan Harapan Bangsa	1.042.734.000	212.940.000					1.255.674.000	
28	Perumahan Taman Ratu Blok F-7 Dan Blok F 13 Nomor 2 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Kota Adm. Jakarta Barat	Yayasan Pendidikan Rasa Sayang Mandiri(25 Oktober 2020)	4.074.336.000	2.424.240.000					6.498.576.000	
29	Jalan Tanggul Cengkareng Drain Nomor 1 Basmol, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	Yayasan Anak Bangsa Basmol	2.256.512.000	1.837.800.000					4.094.312.000	
30	Jalan Harsono RM Nomor 28 Belakang Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan	Yayasan Sapta Nawami Bhakti (15 Oktober 2017)	23.164.125.000	2.469.840.000					25.633.965.000	
31	JALAN KRAMAT RAYA NO 47 KEL. KRAMAT KEC. SENEN JAKARTA PUSAT	PALANG MERAH INDONESIA	97.760.740.000						97.760.740.000	
32	Tanah Klinik Medical Karya Blok CF1 dan Lap Tennis Mandiri- Kelapa Gading	Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara(BAST)	14.011.250.000	8.205.000.000					22.216.250.000	
33	Kompleks Perumahan Taman Duta Mas Kelurahan Wijaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat	PT Bumi Bintang Bersatu(2 Juli 2019)	40.932.850.000	5.246.947.886					46.179.797.886	
34	Komplek Perumahan Taman Alfa Indah Blok A10, Kel. Joglo, Kec. Kembangan	PT. Alfa Indah Sportindo (14 Maret 2017)	2.285.200.000	1.025.000.000					3.310.200.000	
35	Jalan Raya Boulevard Kelapa Gading Blok B2, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading	Mesjid Al Musyawara (13 Oktober 2019)	175.341.600.000						175.341.600.000	
36	Komplek Perumahan Citra 1 Ext.									

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 31 Desember 2023						KETERANGAN	
			Tanah	Gedung & Bangunan	Peralatan dan Mesin			Aset Tetap Lainnya		Total
					Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga			
84	Komplek ITC Fatmawati/Duta Mas Jl. RS Fatmawati	-	10.302.090.000						10.302.090.000	PI - JAMC
85	Jalan Teuku Umar Nomor 1 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat	PT Lingkar Seni Indonesia	42.643.125.000						42.643.125.000	PI - JAMC
86	Perumahan Kali Deres Permai	-	1.602.084.000						1.602.084.000	PI - JAMC
87	Jalan Raya Kebayoran Nomor 12 Kebayoran Lama Jakarta Selatan	PT Catur Manunggal Jati Motor	15.660.000.000						15.660.000.000	PI - JAMC
88	Jalan KH. Mas Mansur Kelurahan Kebon Melati Kecamatan tanah Abang Jakarta Pusat	PT Swadaya Niaga Jaya	52.617.390.000						52.617.390.000	PI - JAMC
89	Papanggo	Papanggo	1.964.655.000						1.964.655.000	PI - JAMC
90	Papanggo	Papanggo	7.853.760.000						7.853.760.000	PI - JAMC
91	Papanggo	Papanggo	6.112.665.000						6.112.665.000	PI - JAMC
92	Jl insinyur h.juanda no 19,kel.kebon kelapa, kec.gambir, jakarta pusat	PT. Adicipta Boga Intiprima	12.997.500.000						12.997.500.000	PI - JAMC
93	Jl. Pulau Matahari III Blok B2 No.1 RT.007 RW.003	Yayasan E & P	1.801.762.000						1.801.762.000	PI - JAMC
94	Jalan Kawasan Rumah Susun Nomor 2 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Cengkareng Timur Cengkareng Jakarta Barat	Yayasan Cengkareng 1	40.175.520.000						40.175.520.000	PI - JAMC
95	Jalan Taman Pejaten Mas Raya Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan	-	54.468.400.000						54.468.400.000	PI - JAMC
96	Pertokoan Glodok Blustru Jl. Blustru No.29 RT.1/RW.6, Mangga Besar Kec. Taman Sari Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11180	PT Gerakmaju Abadi	18.243.975.000						18.243.975.000	PI - JAMC
97	Perumahan Citra 2 Blok G 6 Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Diananda (TK)	441.500.000						441.500.000	PI - JAMC
98	Perumahan Taman Surya Blok -MM Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Suhargo	7.814.016.000						7.814.016.000	PI - JAMC
99	Jalan Puri Indah - Pasar Puri Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	PT Antilope Madju Puri Indah	20.775.000.000						20.775.000.000	PI - JAMC
100	Blok N3 Perumahan Citra 2 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Diananda (SD)	1.519.000.000						1.519.000.000	PI - JAMC
101	Jl. Pulau Sebaru Blok L1 No.21 Perumahan Permata Buana RT.010 RW.009	Yayasan Pelatihan E & P	14.750.250.000						14.750.250.000	PI - JAMC
102	Jl. Tamaran Indah Blok II J2A Pantai Indah Kapuk, Kapuk Muara Penjaringan Jak-Barat	Bapak Erwanto (RW 11)Kp.Muara	9.794.835.000						9.794.835.000	PI - JAMC
103	Kompleks Perumahan Taman Surya 5 Kelurahan Pegadungan Kacamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Suhargo	21.015.383.000						21.015.383.000	PI - JAMC
104	Jalan TB. Simatupang Nomor 1 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan	PT. Antam	56.802.850.000						56.802.850.000	PI - JAMC
105	Jalan Perbanas / Jalan Genteng Hijau RT.004 RW.017	Koperasi JKMB/	52.703.910.000						52.703.910.000	PI - JAMC
106	Jalan Perbanas / Jalan Genteng Hijau RT.004 RW.017	Koperasi JKMB keterangan di KIB belum dimanfaatkan	92.001.420.000						92.001.420.000	PI - JAMC
107	Jalan Tiang Bendera III dan IV RT 07 RW 03 Roa Malaka Tambora Jakarta Barat	PT Bank Jasa Jakarta	13.679.820.000						13.679.820.000	PI - JAMC
108	Jalan Raya Kembangan	PT Graha Royal Property	17.542.572.000						17.542.572.000	PI - JAMC
109	Jalan Kampung Semanan Semanan Kalideres Jakarta Barat	PT. Citra Adyapataka	47.943.105.000						47.943.105.000	PI - JAMC
110	Jalan TB Simatupang Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan	PT Antam	520.695.000						520.695.000	PI - JAMC
111	Jalan TB Simatupang Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan	PT Antam	28.610.820.000						28.610.820.000	PI - JAMC
112	Jalan TB Simatupang Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan	PT Antam	1.452.465.000						1.452.465.000	PI - JAMC
113	Jalan TB Simatupang Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan	PT Antam	1.918.350.000						1.918.350.000	PI - JAMC
114	Jalan Bantar Jati (Lingkar Luar Selatan) Setu Cipayung Jakarta Timur	PT. Liverpool Indonesia	67.863.885.000						67.863.885.000	PI - JAMC
115	Jalan Bantar Jati (Lingkar Luar Selatan) Setu Cipayung Jakarta Timur	PT. Liverpool Indonesia	21.887.565.000						21.887.565.000	PI - JAMC
116	Jalan Bantar Jati (Lingkar Luar Selatan) Setu Cipayung Jakarta Timur	PT. Liverpool Indonesia	612.465.000						612.465.000	PI - JAMC
117	Jalan Lingkar Luar Selatan Kav. 5 - 6 Susukan Ciracas Jakarta Timur	PT. Liverpool Indonesia	123.287.778.000						123.287.778.000	PI - JAMC
118	Jalan Raya Bogor KM. 26 Ciracas Ciracas Jakarta Timur	Frisian Flag	114.342.701.000						114.342.701.000	PI - JAMC
119	Jalan Raya Bogor KM. 26 Ciracas Ciracas Jakarta Timur	Frisian Flag	56.068.122.000						56.068.122.000	PI - JAMC
120	-6.159344, 106.921199 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	4.161.705.000						4.161.705.000	PI - JAMC
121	-6.158976, 106.916673 - Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	16.236.861.000						16.236.861.000	PI - JAMC
122	-6.160964, 106.918614 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	15.802.056.000						15.802.056.000	PI - JAMC
123	-6.161074, 106.920512 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	28.473.516.000						28.473.516.000	PI - JAMC
124	-6.159381, 106.921099 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	14.982.138.000						14.982.138.000	PI - JAMC
125	-6.160546, 106.921237 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	4.715.100.000						4.715.100.000	PI - JAMC
126	-6.160989, 106.920752 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	2.969.097.000						2.969.097.000	PI - JAMC
127	-6.161025, 106.920427 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	658.419.000						658.419.000	PI - JAMC
128	-6.161074, 106.920181 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	1.602.567.000						1.602.567.000	PI - JAMC
129	-6.161435, 106.920059 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	3.192.711.000						3.192.711.000	PI - JAMC
130	-6.161187, 106.920767 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	12.112.425.000				-	-	12.112.425.000	PI - JAMC
131	-6.161077, 106.918395 Jalan Pegangsaan Dua RT 001/003 Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara	PT. Astra Honda Motor	38.138.610.000						38.138.610.000	PI - JAMC
132	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	82.727.382.000						82.727.382.000	PI - JAMC
133	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	7.963.197.000						7.963.197.000	PI - JAMC
134	Komplek Ruko Lodan Center - Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan Jakarta Utara	Paguyuban Komplek Lodan Center	17.174.544.000						17.174.54	

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 31 Desember 2023						KETERANGAN	
			Tanah	Gedung & Bangunan	Peralatan dan Mesin			Aset Tetap Lainnya		Total
					Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga			
170	Blok A 6 Perumahan Citra 3 Ekstension Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Harapan Bangsa		1.394.873.232					1.394.873.232	PI - JAMC
171	Perumahan Citra 2 Blok G 6 Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Diananda (TK)		218.450.000					218.450.000	PI - JAMC
172	Perumahan Taman Surya Blok -MM Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Suhargo		6.139.188.493					6.139.188.493	PI - JAMC
173	Perumahan Bintaro Jaya Sektor 1 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan	PT Metro Djakarta Muda Angkasa		3.108.450.000					3.108.450.000	PI - JAMC
174	Jalan Puri Indah - Pasar Puri Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	PT Antilope Madju Puri Indah		1.830.000.000					1.830.000.000	PI - JAMC
175	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		3.281.671.140					3.281.671.140	PI - JAMC
176	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		3.281.671.140					3.281.671.140	PI - JAMC
177	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		3.281.671.140					3.281.671.140	PI - JAMC
178	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		3.281.671.140					3.281.671.140	PI - JAMC
179	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		3.281.671.140					3.281.671.140	PI - JAMC
180	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		3.281.671.140					3.281.671.140	PI - JAMC
181	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		3.281.671.140					3.281.671.140	PI - JAMC
182	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		3.281.671.140					3.281.671.140	PI - JAMC
183	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		5.151.229.244			-	-	5.151.229.244	PI - JAMC
184	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		5.151.229.244					5.151.229.244	PI - JAMC
185	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		5.151.229.244					5.151.229.244	PI - JAMC
186	Graha Pejaten - Jalan Pejaten Raya Pasar Minggu	Graha Pejaten		5.151.229.244					5.151.229.244	PI - JAMC
187	Jl. Kelapa Nias Blok HT 60 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading	Gereja Tiberias Indonesia							-	PI - JAMC
	Jalan Kawasan Rumah Susun Nomor 2 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Cengkareng Timur									PI - JAMC
188	Cengkareng Jakarta Barat	Yayasan Cengkareng 1		11.355.820.000					11.355.820.000	
189	Jl. Pulau Selayar I-1 Blok B1 Perumahan Permata Buana,Kemban	Yayasan Pelatihan E & P		17.216.524.646					17.216.524.646	PI - JAMC
190	Kompleks Perumahan Taman Surya 5 Kelurahan Pegadungan Kacamatan Kalideres Jakarta Barat	Yayasan Suhargo Gondokusumo		27.916.000.000					27.916.000.000	PI - JAMC
191	jl kartika utama/jl terusan kartika utama kelurahan pondok pinang.	PT Metropolitan Kentjana TBK		24.535.642.069					24.535.642.069	PI - JAMC
192	jl kartika utama/jl terusan kartika utama kelurahan pondok pinang.	PT Metropolitan Kentjana TBK		18.116.873.208					18.116.873.208	PI - JAMC
193	Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48 Pasar Manggis Setiabudi Jakarta Selatan	Perumda Pasar Jaya		975.732.250.111					975.732.250.111	PI - JAMC
194	Jalan Lingkar Luar Kamal Raya dan Jalan Kamal Outer Ring Road Cengkareng Barat Cengkareng Jakarta Barat	-		1.411.200.000					1.411.200.000	PI - JAMC
195	Jalan Lingkar Luar Kamal Raya dan Jalan Kamal Outer Ring Road Cengkareng Barat Cengkareng Jakarta Barat	-		227.600.000					227.600.000	PI - JAMC
196	Jalan Lingkar Luar Kamal Raya dan Jalan Kamal Outer Ring Road Cengkareng Barat Cengkareng Jakarta Barat	-		803.900.000					803.900.000	PI - JAMC
197	Jalan Lingkar Luar Kamal Raya dan Jalan Kamal Outer Ring Road Cengkareng Barat Cengkareng Jakarta Barat	-		30.500.000					30.500.000	PI - JAMC
198	Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48 Pasar Manggis Setiabudi Jakarta Selatan	PD PASAR JAYA						5.423.088.154	5.423.088.154	PI - JAMC
199	Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48 Pasar Manggis Setiabudi Jakarta Selatan	PD PASAR JAYA						4.585.186.294	4.585.186.294	PI - JAMC
200	Jalan Raya Sultan Agung Nomor 48 Pasar Manggis Setiabudi Jakarta Selatan	PD PASAR JAYA						4.155.025.375	4.155.025.375	PI - JAMC
			3.367.064.778.502	1.542.937.242.079			0,00	14.163.299.823	4.924.165.320.404	

DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah Aset Tetap
Saldo per 31 Desember 2022	466.211.312.146.548,00	30.534.777.685.455,00	46.684.316.665.100,00	55.993.465.847.492,00	1.305.487.303.782,00	3.489.601.572.718,00	604.218.961.221.095,00
Mutasi Penambahan							
Belanja Modal TA 2023							
Belanja Modal TA 2023	442.600.308.470,00	2.822.976.130.249,00	1.653.055.663.410,00	3.799.027.573.476,00	139.600.392.693,00	-	8.857.260.068.298,00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 yang tidak memenuhi kriteria/tidak menghasilkan Aset Tetap:	3.460.908.460,00	36.644.674.383,00	75.906.178.395,00	82.621.413.584,00	28.612.383.133,00	-	227.245.557.955,00
Pembayaran Utang atas Aset Telah Diakui tahun sebelumnya	297.920.200,00	19.520.774.858,00	68.839.920.260,00	24.366.085.298,00	-	-	113.024.700.616,00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 yang menjadi Beban :	3.162.988.260,00	17.123.899.525,00	7.066.258.135,00	58.255.328.286,00	28.612.383.133,00	-	114.220.857.339,00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 yang menjadi Ekstrakomtabel							-
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 yang menjadi Persediaan	768.248.055,00	13.113.635.610,00	1.803.460.645,00	4.507.544.878,00	28.511.996.466,00	-	48.704.885.654,00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 yang merupakan pembayaran Jasa	2.376.164.205,00	2.673.081.398,00	922.017.647,00	-	100.386.667,00	-	6.071.649.917,00
Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 yang merupakan pembayaran pemeliharaan	18.576.000,00	1.337.182.517,00	4.340.779.843,00	53.747.783.408,00	-	-	59.444.321.768,00
							-
Pengurang	27.823.456.737,00	60.089.069.851,00	750.536.587.578,00	633.884.785.532,00	16.033.333,00	-	1.444.936.486.734,00
Pengembalian karena kekurangan volume	-	55.601.945,00	2.640.635.181,00	747.300.566,00	-	-	3.443.537.692,00
Belanja Modal Tahun 2023 yang masih Dalam Proses Pengerjaan	410.010.440,00	56.272.733.978,00	669.580.859.687,00	333.957.842.470,00	-	-	1.060.221.446.575,00
Belanja Modal yang di akui sebagai Uang Muka	-	-	35.337.761.418,00	194.419.335.320,00	-	-	229.757.096.738,00
Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka	-	1.439.024.963,00	42.854.271.592,00	104.760.307.176,00	16.033.333,00	-	149.069.637.064,00
Belanja Modal yang diakui sebagai Kas Dikonsinyasikan	27.413.446.297,00						
Hibah Keluar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-	2.321.708.965,00	123.059.700,00	-	-	-	2.444.768.665,00
							-
Belanja Modal TA 2023 yang Menjadi Aset Tetap	411.315.943.273,00	2.726.242.386.015,00	826.612.897.437,00	3.082.521.374.360,00	110.971.976.227,00	-	7.157.664.577.312,00
Kapitalisasi selain dari belanja modal	297.477.114,00	58.431.880.289,00	50.637.121.282,00	265.088.504.043,00	2.015.683.920,00	-	376.470.666.648,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang :							-
Kapitalisasi dari Belanja Barang - APBD	-	29.261.076.449,00	1.749.655.589,00	197.436.333.552,00	194.461.920,00	-	228.641.527.510,00
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa - BLUD	-	713.809.812,00	-	-	-	-	713.809.812,00
Kapitalisasi dari Belanja Jasa	297.477.114,00	511.863.250,00	16.222.760.565,00	3.504.272.611,00	-	-	20.536.373.540,00
Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	-	8.632.219.311,00	32.664.705.128,00	64.147.897.880,00	1.821.222.000,00	-	107.266.044.319,00
Kapitalisasi dari Belanja Persediaan	-	19.312.911.467,00	-	-	-	-	19.312.911.467,00
							-
							-
Penambah	-	15.183.995.500,00	21.677.942.623,00	266.901.000,00	24.967.700,00	-	37.153.806.823,00
Beban Dibayar Di Muka tahun sebelumnya							-
Uang Muka tahun sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-
Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-	15.183.995.500,00	21.677.942.623,00	266.901.000,00	24.967.700,00	-	37.153.806.823,00
							-
Penyelesaian Aset KLB	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan yang belum Dibayarkan :	-	1.335.199.602,00	78.405.604.956,00	77.054.988.548,00	-	-	156.795.793.106,00
Pengadaan yang belum Dibayarkan - APBD	-	234.425.902,00	77.461.829.060,00	77.054.988.548,00	-	-	154.751.243.510,00
Pengadaan yang belum Dibayarkan - BLUD	-	1.100.773.700,00	943.775.896,00	-	-	-	2.044.549.596,00
							-
Reklasifikasi dari Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap:	3.392.364.640,00	281.255.849.774,00	1.104.152.987.809,00	1.735.648.214.735,00	19.516.568.448,00	1.163.094.504.465,00	4.307.060.489.871,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JJJ/ATL	2.868.964.500,00	222.505.786.476,00	554.342.677.013,00	641.505.024.055,00	19.516.568.448,00	104.294.787.205,00	1.545.033.807.697,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JJJ/ATL APBD	2.868.964.500,00	222.414.088.543,00	553.634.567.210,00	641.283.824.284,00	18.743.408.071,00	104.294.787.205,00	1.543.239.639.813,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JJJ/ATL (Dari Belanja Modal BLUD)	-	91.697.933,00	708.109.803,00	221.199.771,00	773.160.377,00	-	1.794.167.884,00
Reklasifikasi Dari KDP yang sudah selesai	523.400.140,00	58.750.063.298,00	549.810.310.796,00	1.094.143.190.680,00	-	-	1.703.226.964.914,00
Reklasifikasi ke KDP masih dalam proses pengerjaan	-	-	-	-	-	1.058.799.717.260,00	1.058.799.717.260,00
							-
Reklasifikasi dari Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga	42.854.699.000,00	212.870.000,00	34.868.776.270,00	-	-	-	77.936.345.270,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	42.509.195.000,00	212.870.000,00	34.154.051.270,00	-	-	-	76.876.116.270,00
Kerja Sama Pemanfaatan							-
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	345.504.000,00		714.725.000,00			-	1.060.229.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya :	53.009.801.789.699,00	52.311.851.843,00	203.253.006.493,00	1.251.793.133.166,00	1.038.096.649,00	-	54.152.983.454.466,00
Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	-	2.627.488.449,00	21.550.394.657,00	-	297.203.759,00	-	24.475.086.865,00
Reklasifikasi dari Fasos Fasum	52.997.461.382.919,00	8.018.050.022,00	144.444.843.029,00	965.439.195.288,00	301.482.500,00	-	54.115.664.953.758,00
Reklasifikasi dari Aset Sewa			-	-	-	-	-
Reklasifikasi dari Aset Pinjam Pakai			-	-	-	-	-

**DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023**

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah Aset Tetap
Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud	-	853.988.553,00	-	-	-	-	853.988.553,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi dari Aset Koefisien Lantai Bangunan	591.907.500,00	40.697.027.865,00	37.257.768.807,00	286.228.308.822,00	439.410.390,00	-	-
Reklasifikasi dari Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	11.748.499.280,00	115.296.954,00	-	125.629.056,00	-	-	11.989.425.290,00
	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel	-	7.336.000,00	-	-	-	-	7.336.000,00
	-	-	-	-	-	-	-
Kurang Catat:	2.897.667.140.970,00	4.495.575.637,00	185.950.763.293,00	918.581.575,00	-	5.906.108.512,00	3.094.938.169.987,00
Kurang Catat Nilai	14.853.002.787,00	6.736.508,00	1.229.989.761,00	-	-	5.906.108.512,00	21.995.837.568,00
Kurang Catat Barang	2.882.814.138.183,00	4.488.839.129,00	184.720.773.532,00	918.581.575,00	-	-	3.072.942.332.419,00
	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penambahan	56.365.329.414.696,00	3.139.476.944.660,00	2.505.559.100.163,00	6.413.291.697.427,00	133.567.292.944,00	1.169.000.612.977,00	69.361.010.639.483,00
	-	-	-	-	-	-	-
Pengurangan	-	34.040.460.027,00	78.204.853.633,00	314.875.000,00	152.231.082,00	-	112.712.419.742,00
Penghapusan	-	33.959.904.617,00	65.652.772.635,00	314.875.000,00	152.231.082,00	-	100.079.783.334,00
Penghapusan	-	33.959.904.617,00	65.652.772.635,00	314.875.000,00	152.231.082,00	-	100.079.783.334,00
Penghapusan sebelum Tahun 2023	-	80.555.410,00	12.552.080.998,00	-	-	-	12.632.636.408,00
	-	-	-	-	-	-	-
Hibah Keluar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain TA 2023	-	6.321.864.930,00	-	-	-	-	6.321.864.930,00
	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi ke Aset PI	70.345.035.000,00	-	78.901.286.096,00	1,00	-	-	149.246.321.097,00
	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap:	116.958.851.717,00	31.203.807.785,00	546.204.382.279,00	425.903.060.817,00	154.357.757,00	2.127.836.312.256,00	3.248.260.772.611,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JIJ/ATL	116.958.851.717,00	31.203.807.785,00	546.204.382.279,00	425.903.060.817,00	154.357.757,00	424.609.347.342,00	1.545.033.807.697,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JIJ/ATL APBD	116.958.851.717,00	30.495.697.982,00	545.118.324.198,00	425.903.060.817,00	154.357.757,00	424.609.347.342,00	1.543.239.639.813,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JIJ/ATL (Dari Belanja Modal BLUD)	-	708.109.803,00	1.086.058.081,00	-	-	-	1.794.167.884,00
Reklasifikasi KDP yang sudah selesai	-	-	-	-	-	1.703.226.964.914,00	1.703.226.964.914,00
	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya:	862.022.987.500,00	472.151.101.440,00	1.275.073.462.355,00	42.580.966.561,00	34.979.296.492,00	7.235.828.448,00	2.694.043.642.796,00
Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat	-	389.766.909.791,00	625.280.832.704,00	36.332.866.635,00	9.150.000,00	-	1.051.389.759.130,00
Reklasifikasi ke Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi dari Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	856.866.505.000,00	-	513.192.303.068,00	-	-	-	1.370.058.808.068,00
Reklasifikasi ke Fasos Fasum	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	84.082.500,00	78.066.633.392,00	2.497.500.000,00	-	34.970.146.492,00	-	115.618.362.384,00
	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi ke Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah	5.072.400.000,00	4.317.558.257,00	134.102.826.583,00	6.248.099.926,00	-	-	149.740.884.766,00
Reklasifikasi ke Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	7.235.828.448,00	7.235.828.448,00
	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Kerjasama dengan Pihak Ketiga:	-	-	4.935.638.186,00	-	-	-	4.935.638.186,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Operasi (KSO)	-	-	4.935.638.186,00	-	-	-	4.935.638.186,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap yang tidak memenuhi Kriteria:	-	358.327.756.633,00	10.001.385.693,00	89.065.927,00	14.814.797.120,00	3.098.160.562,00	386.331.165.935,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2023) ke Ekstrakomtabel	-	338.024.183.498,00	307.647.153,00	89.065.927,00	14.814.797.120,00	3.025.742.350,00	356.261.436.048,00
	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2023) ke Persediaan	-	20.303.573.135,00	9.693.738.540,00	-	-	-	29.997.311.675,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2023) ke Beban DIBayar dimuka	-	-	-	-	-	72.418.212,00	72.418.212,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2023) ke Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Pengembalian atas temuan pemeriksaan	-	-	-	-	-	181.251.961,00	181.251.961,00
	-	-	-	-	-	-	-
Lebih Catat	5.644.674.324.548,00	928.876.206,00	36.311.421.063,00	111.923.465,00	518.717.442,00	3.330.107.091,00	5.685.875.369.815,00
Koreksi Lebih Catat Nilai	106.266.884.148,00	7.437.606,00	91.658.916,00	-	518.717.442,00	3.073,00	106.884.701.185,00
Koreksi Lebih Catat Barang	2.393.280.000,00	921.438.600,00	36.219.762.147,00	111.923.465,00	-	3.330.104.018,00	42.976.508.230,00
Koreksi Pencatatan Ganda	5.536.014.160.400,00	-	-	-	-	-	5.536.014.160.400,00
	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Mutasi Pengurangan	6.694.001.198.765,00	902.973.867.021,00	2.029.632.429.305,00	468.999.891.771,00	50.619.399.893,00	2.141.681.660.318,00	12.287.908.447.073,00
	515.882.640.362.479,00	32.771.280.763.093,00	47.160.243.335.958,00	61.937.757.653.148,00	1.388.435.196.833,00	2.516.920.525.377,00	661.657.277.836.888,00

**DAFTAR SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN LAHAN
ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023**

NO	HPL	LUAS (m ²)	Wilayah	Alamat	Pemegang Hak
1	HPL No. 1/Cideng	13.395	Jakarta Pusat	Jln. Biak B. Stadion V.I.J	Pemprov DKI Jakarta
2	HPL No. 1/Mangga Dua Selatan	134.442	Jakarta Pusat	Mangga Dua Selatan	Pemprov DKI Jakarta
3	HPL No. 2/Mangga Dua Selatan	14.790	Jakarta Pusat	Jln Mangga Dua Abdad/Jln Pangeran Jayakarta	Pemprov DKI Jakarta
4	HPL No. 3/Kebon Kacang	1.262	Jakarta Pusat	Jl. Jati Bunder Rt.0016/09	Pemprov DKI Jakarta
5	HPL No. 1/Karet Tengsin	4.014	Jakarta Pusat	Jalan Karet Pasar Baru Barat I Rt 014/07	Pemprov DKI Jakarta
6	HPL No. 1/Papanggo	144.240	Jakarta Utara	Jl. Bisma Barat	Pemprov DKI Jakarta
7	HPL No. 1/Sunter Jaya	139.145	Jakarta Utara	Jl. Tepi Danau Permai	Pemprov DKI Jakarta
8	HPL No. 1/Semper Barat	4.770	Jakarta Utara	Kampung Semper Barat	Pemprov DKI Jakarta
9	HPL No. 45/Kamal Muara	3.120.000	Jakarta Utara	Pulau 2A (Pulau D)	Pemprov DKI Jakarta
10	HPL No. 46/Kamal Muara	1.093.580	Jakarta Utara	Pulau 2B (Pulau C)	Pemprov DKI Jakarta
11	HPL No. 6/Ancol	124.289	Jakarta Utara	Jl. Arteri Mangga Dua	Pemprov DKI Jakarta
12	HPL No. 1 / Ancol	4.779.120	Jakarta Utara	Jl. RE Martadinata	Pemprov DKI Jakarta
13	HPL No. 12 / Ancol	536.823	Jakarta Utara	Jl. Komplek Perumahan Puri Marina Ancol	Pemprov DKI Jakarta
14	HPL No. 1 / Pluit	208.665	Jakarta Utara	Jl. Pluit Indah / Pluit Permai	Pemprov DKI Jakarta
15	HPL No. 2 / Pluit	752.000	Jakarta Utara	Jl. Pantai Mutiara	Pemprov DKI Jakarta
16	HPL No. 3 / Pluit	24.880	Jakarta Utara	Jl. Pluit Timur	Pemprov DKI Jakarta
17	HPL No. 9 / Pluit	2.230	Jakarta Utara	Jl. Taman Pluit Kencana	Pemprov DKI Jakarta
18	HPL No. 1 / Kamal Muara	178.020	Jakarta Utara	Jl. Kamal Muara Raya	Pemprov DKI Jakarta
19	HPL No. 3 / Penjaringan	13.590	Jakarta Utara	Jl. Muara Baru	Pemprov DKI Jakarta
20	HPL No. 48/Ancol	200.000	Jakarta Utara	Kawasan Rekreasi Ancol Timur	Pemprov DKI Jakarta
21	HPL No.00001/Pluit	5.000	Jakarta Utara	Jl. Pantai Mutiara	Pemprov DKI Jakarta
22	HPL No. 52 / Pluit	10.944	Jakarta Utara	Jl. Pantai Mutiara	Pemprov DKI Jakarta
23	HPL No.00049/Penjaringan	10.575	Jakarta Utara	Kampung Aquarium RT 012 RW 004	Pemprov DKI Jakarta
24	HPL No.55 / Kalibaru	39.288	Jakarta Utara	Kalibaru	Pemprov DKI Jakarta
25	HPL No.53 / Cilincing	24.830	Jakarta Utara	Cilincing	Pemprov DKI Jakarta
26	HPL No. 54/ Pluit	97.207	Jakarta Utara	Jl. Muara Angke	Pemprov DKI Jakarta
27	HPL No. 1/Glodok	10.480	Jakarta Barat	Jl. Gajah mada No. 211 dan 212	Pemprov DKI Jakarta
28	HPL No. 1/Taman Sari	1.230	Jakarta Barat	Jl. Mangga Besar IV/I,	Pemprov DKI Jakarta
29	HPL No. 2/Taman Sari	2.198	Jakarta Barat	Jl. Mangga Besar VIII,	Pemprov DKI Jakarta
30	HPL No. 1/Tangki	54.395	Jakarta Barat	Jl. Mangga Besar IX	Pemprov DKI Jakarta
31	HPL No. 1/Karet Kuningan	160.920	Jakarta Selatan	Jl. Rasuna Said	Pemprov DKI Jakarta
32	HPL No. 1/Tebet Barat	13.890	Jakarta Selatan	Jalan Tebet Barat Raya	Pemprov DKI Jakarta
33	HPL No. 1/Penggilingan	60.319	Jakarta Timur	Penggilingan	Pemprov DKI Jakarta
34	HPL No. 2/Penggilingan	272.569	Jakarta Timur	Penggilingan	Pemprov DKI Jakarta
35	HPL No. 4/Jatinegara	29.070	Jakarta Timur	Kav DPR (Kampung Pulo Jahe)	Pemprov DKI Jakarta
36	HPL No. 10/Jatinegara	151.797	Jakarta Timur	Jatinegara	Pemprov DKI Jakarta
37	HPL No. 11/Jatinegara	40.605	Jakarta Timur	Jatinegara	Pemprov DKI Jakarta
38	HPL No. 00001/Penggilingan	371.480	Jakarta Timur	Jl. Raya Penggilingan	Pemprov DKI Jakarta

NO	HPL	LUAS (m ²)	Wilayah	Alamat	Pemegang Hak
39	HPL No. 1/Kayu Putih	88.200	Jakarta Timur	Jl. Pacuan Kuda	Pemprov DKI Jakarta
40	HPL No. 1/Cikini	2.221	Jakarta Pusat	Cikini	Pemprov DKI Jakarta
41	HPL No. 3/Mangga Dua Selatan	907	Jakarta Pusat	Mangga Dua Selatan	Pemprov DKI Jakarta
42	HPL No. 4/Mangga Dua Selatan	333	Jakarta Pusat	Mangga Dua Selatan	Pemprov DKI Jakarta
43	HPL No. 1/Wijaya Kusuma	86.074	Jakarta Barat	Wijaya Kusuma	Pemprov DKI Jakarta
44	HPL No. 16/Kapuk Muara	5.628	Jakarta Utara	Kapuk Muara	Pemprov DKI Jakarta
45	HPL No. 2/Tebet Barat	5.812	Jakarta Selatan	Tebet Barat	Pemprov DKI Jakarta
46	HPL No. 2/Pulo Gebang	575.155	Jakarta Timur	Pulo Gebang	Pemprov DKI Jakarta
	Total	13.610.382			

**DAFTAR ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA BOT, BTO, DAN KSP
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Nama Pihak Ketiga	Lokasi	Jenis Aset	Nilai Aset Kerjasama BOT		Nilai Aset Kerjasama BTO			Nilai Aset Kerjasama Pemanfaatan		Keterangan
				Tanah	Gedung dan Bangunan	Tanah	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	Tanah	Gedung dan Bangunan	
ASET BANGUN GUNA SERAH (BUILD, OPERATE AND TRANSFER / BOT)											
1	PT Wahana Nusantara	Jl. H R Rasuna Said Kav C-22A, Kota Adm. Jakarta Selatan	Tanah	-	-						
2	PT. Metropolitan Kencana	JPO & JPO Multiguna PIM I dan PIM 2	Jembatan	297.031.875.000	-						
3	PT. Gerak Maju Abadi	Pengelolaan Gd. Pertokoan Jl. Blustro	Gedung	-	-						
4	PT. Duta Pertiwi	JPU Gd JICT dengan Gd. Dusti Mangga dua JP	Jembatan	-	9.000.000						
5	PT. Duta Pertiwi	JPU Harco Madu & Gedung Mangga dua Jl. Aquarium Jakarta Pusat	Jembatan	-	-						
6	PT. Duta Pertiwi	Jembatan/Bangunan Multiguna Mangdu	Jembatan	-	-						
7	PT. Kempas Indah Indonesia		Jembatan	-	-						
8	PT. Rointa Eka Jaya	JPO Grosir Tanah Abang & Pertokoan	Jembatan	-	-						
9	PT. Pacific Bangun Mas*	JPO Pasar Cipulir Jaksel	Jembatan	-	-						
10	PT. Dharma Alumas Sakti	Pengelolaan GOR Sumantri Kuningan	Gedung	577.563.000.000	-						
11	PT. Bina Citra Tataswati*	JPO Pertokoan Glodok	Jembatan	-	-						
12	PT. Bumi Grafika jaya	Pengembangan BUMD DKI Jaya, Tanah dan Bangunan Jl. MT. Haryono Luas 12.127 M	Tanah	48.508.000.000	-						
13	PT. Pacific Prima Buana Mas	Jl. Bekasi Barat Raya,Rawa Bunga Jaktim Nomor Aset 01.11.04.01 Luas 5300M2	Tanah Bangunan Toko dan SRO	24.406.500.000	-						
14	PT. AGB Tuna (pabrik es)	Pelelengan Ikan Muare Angke Pluit Jakarta Utara Luas 2800 M2	Tanah	-	-						
15	PT. AGB Tuna (cold storage)	Jl. Dermaga Kav.I Pluit Penjaringan Jakarta Utara 3234 m2	Tanah	-	-						
16	PT. Gading Raya Propertindo*	Pengelolaan JPO beserta fasilitasnya/ Pasar Ragional Tanah Abang Blok A Seluas 5858M	Jembatan	71.438.310.000	-						
17	PT. Duta Masa Nusa*	JPO Jl. Karel ST. Tubun & PS Kebon Jati Tnh Abang Blok D luas tanah 8310,52M	Jembatan	-	-						
18	PT. Perwita Margasakti*	JPO Mal Ambassador Kuningan, Jembatan 1.338M dan 1.662M	Jembatan	-	-						
19	PT. Hotel Cikini Realty*	Pembangunan Hotel Cikini Raya luas 5.115 M2 dengan Nomor Aset 01.11.04.08.00001	Tanah	49.334.175.000	-						
20	PT. Grand Indonesia*	Jembatan Multiguna di Jl. Teluk Betung Kel. Kebon Melati Kec.Tanah Abang Jak-Pus.	Jembatan Multiguna								
21	PT Bakrie (Gedung Nyi Ageng Serang)	Jl. H R Rasuna Said Kav C-22, Kota Adm. Jakarta Selatan	Tanah Kantor	123.282.652.500							
22	PT. Wahana Sejahtera	Tanah Terminal Transit Cililitan	Tanah	17.550.000.000	-						
JUMLAH ASET BANGUN GUNA SERAH (BUILD, OPERATE AND TRANSFER / BOT)				1.209.114.512.500	9.000.000						
ASET BANGUN SERAH GUNA (BUILD, TRANSFER AND OPERATE / BTO)											
1	Yayasan Pendidikan Tiara Kasih	Perumahan Taman Semanan Kalideres Jakbar	Tanah Sekolah		-	6.223.392.000	6.254.605.100				
2	Yayasan Pendidikan Tunas Muda*	Tanah seluas 2.149m2 Kedoya Selatan	Tanah Sekolah			9.896.145.000	4.403.361.276				
3	Pengelolaan Lingkungan Terminal Blok M	PT LANGGENG AYOM LESTARI	Tanah Terminal			390.687.955.050	47.701.292.300				
4	PT. Fajar Setia Mandiri (Jaktim)*	Tanah Seluas 2.000 m2 Jl. DI Perjaitan Jatinegara Jakarta Timur	Tanah SPBU			7.128.225.000	4.883.444.400				
5	PT. Fajar Setia Mandiri (Jakut)	Tanah Seluas 3.088 m2 Jl. Danau Sunter Selatan Sunter Jaya Tg.Priok Jakut	Tanah SPBU			11.564.560.000	4.313.800.000				
6	Yayasan Patmos	Tanah di Taman Meruya ilir Blok E7 Kembangan Jakarta Barat	Tanah Sekolah			5.880.000.000	4.090.967.000				
7	Yayasan Patmos	Tanah di Taman Meruya ilir Blok E7 Kembangan Jakarta Barat	Tanah Keseluruhan			2.599.080.000					
8	Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia	Tanah di Perumahan Permata Buana Blok L4 Kembangan Jakarta Barat	Tanah Sekolah			10.387.500.000	6.600.000.000				
9	PT. Pesona Marga Mandiri	Pembangunan Pengelolaan Kios Petak Psr Pagi luas 3300m.Jl. Petak Baru Pasar pagi	Tanah			16.813.500.000	10.482.000.000				
10	Yayasan Pendidikan Katolik Mardi Luhur*	Komplek Perumahan Taman Alfa Indah Blok A9 Joglo Kembangan Jakarta Barat	Tanah Sekolah			5.309.436.000	4.170.342.000				
11	Yayasan Pendidikan Katolik Mardi Luhur*	Komplek Perumahan Taman Alfa Indah Blok A9 Joglo Kembangan Jakarta Barat	Bangunan lantai 3				2.479.300.000				
12	Yayasan Bukit Sion*	Tanah Seluas 5.180 m2 di Komplek Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok.G.VII.Srengseng Kembangan Jakbar	Tanah Sekolah			21.522.900.000	10.689.612.352	1.919.950.000			
13	PT. Gama Investa Lestari	Komplek Bola Basket Internasional Kelapa Gading Jakarta Utara	Tanah			195.432.825.000	170.647.000.000				
14	Yayasan Tugasku	Jl. Pulo Mas Jaya Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jaktim seluas 4000 M2	Tanah			12.400.000.000	12.000.000.000				
15	Gereja Protestan Minahasa Sidang Yeremia Jakarta	Sarana Ibadah di Blok HF 4 Kel. Kelapa gading Barat Jakarta Utara.	Gereja			19.329.075.000	1.465.000.000				
16	Yayasan Al-Muhajirin Kelapa Gading*	Sarana Ibadah di Jl. Pendet RW 07 Kel. Kelapa gadling Timur, Jakarta Utara.	Masjid			13.326.720.000	11.105.600.000				

No	Nama Pihak Ketiga	Lokasi	Jenis Aset	Nilai Aset Kerjasama BOT		Nilai Aset Kerjasama BTO			Nilai Aset Kerjasama Pemanfaatan		Keterangan
				Tanah	Gedung dan Bangunan	Tanah	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	Tanah	Gedung dan Bangunan	
17	Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ecclesia*	Sarana Ibadah di Kompleks Taman Semanan Indah Blok NA No.1 Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat.	Gereja			6.039.936.000	3.080.986.780				
18	Yayasan Darul Ma'arif*	Sarana Ibadah di Jl. Lembah Aren Blok K3 Kavling DKI Kel.Pondok Kelapa Jakarta Timur.	Masjid			1.699.200.000	2.797.818.600				
JUMLAH ASET BANGUN SERAH GUNA (BUILD, TRANSFER AND OPERATE / BTO)						736.240.449.050	307.165.129.808	1.919.950.000			
ASET KERJASAMA PEMANFAATAN											
1	PT BAKRIE SWASAKTI UTAMA	KAWASAN GELANGGANG REMAJA SOEMANTRI BROJONEGORO, JL. HR RASUNA	Tanah						1.735.201.597.500	41.990.830.572	
2	PT BAKRIE SWASAKTI UTAMA	KAWASAN GELANGGANG REMAJA SOEMANTRI BROJONEGORO, JL. HR RASUNA	BIAYA REHAB HALL A SUMANTRI							4.935.638.186	
3	PT CAKRA SARANA PERSADA	Pengembangan dan Pembangunan Proyek Lingkungan Permukiman dalam Areal Kerja BP LIP	Tanah						119.047.220.000		
JUMLAH ASET KERJASAMA PEMANFAATAN									1.854.248.817.500	46.926.468.758	
JUMLAH ASET BOT, BTO dan KSP				1.209.114.512.500	9.000.000	736.240.449.050	307.165.129.808	1.919.950.000	1.854.248.817.500	46.926.468.758	
				1.209.123.512.500		1.045.325.528.858			1.901.175.286.258		

**DAFTAR ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA ASET KEKAYAAN DAERAH YANG DISEWAKAN DAN ASET KEKAYAAN DAERAH YANG DIPINJAMPAKAIKAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Saldo Akhir 31 Desember 2023							Keterangan	
			Tanah	Gedung & Bangunan	Peralatan dan Mesin		Jalan, irigasi, Jaringan	Aset tetap lainnya	Total		
					Unit	Harga Satuan					Jumlah Harga
ASET KEKAYAAN DAERAH YANG DISEWAKAN											
1	jl. kali besar timur no 31 jakarta barat	Eks. PD. Tastra Jaya	22.583.847.000							22.583.847.000	
2	jl. raya bekasi km 17 klender, jakarta timur	Eks. PD. Undagi Jaya Klender	1.832.550.000							1.832.550.000	
3	jl. pulo gadung kavling no 1 C.2	Tanah kavling No.1.C2	6.547.875.000							6.547.875.000	
4	jl. pulo kambing no 5 kapling no II/J 14	Tanah kavling blok II/J.44/Eks.PD.Parwita Jaya	5.293.200.000							5.293.200.000	
5	Tanah yang terletak di Jalan Pulau Pantara IV, Blok N.2, Perumahan Taman Permata Buana Kota Administrasi Jakarta Barat	Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Puri Indah	1.868.660.000							1.868.660.000	
6	Jalan Agung Timur 8 Blok O 2 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara	Yayasan Al- Sunter Jaya(30 Oktober 2019)	20.266.875.000							20.266.875.000	
7	Komplek Perumahan Taman Aries Blok F1 No.1 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	Yayasan Al- Taman Aries	5.756.400.000	627.000.000						6.383.400.000	
8	Kompleks Perumahan Qaryah Thayyibah Blok B Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)	1.225.588.000	1.913.589.000						3.139.177.000	
9	Jalan Belimbing Raya Blok B.5, Kompleks Perumahan Bojong Indah, Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng	Yayasan Muslim Bojong Indah(20 April 2022)	163.800.000	1.471.250.000						1.635.050.000	
10	Perumahan Taman Kedoya Baru Jalan Angsana Raya Blok D8 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat	Majelis Jemaat GKI Kedoya(15 November 2022)	5.673.360.000	990.000.000						6.663.360.000	
11	Kavling Marinir Blok Ae Pondok Kelapa, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur	Yayasan Baiturrahim	1.989.792.000							1.989.792.000	
12	Jl. Angsoka Utama Blok D-4, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	Gereja Kristen Kalam Kudus Jemaat Kosambi Baru	2.560.536.000	9.378.300.000						11.938.836.000	
13	Taman Villa Meruya Kelurahan Meruya Selatan Kec. Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat	Panitia Pembangunan Masjid At Tabayyun	1.236.466.000							1.236.466.000	
14	Jl Lodan Timur no.7 Kel Ancol, Kec.Pademangan, Kota Adm.Jakarta Timur	Yayasan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam	906.300.000.000							906.300.000.000	
15	Toyota new Avanza Veloz 1,5 AT	Dekranasda		1	189.960.000	189.960.000				189.960.000	
16	Stationary Water Pump	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	2.750.000	2.750.000				2.750.000	
17	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	200.000	200.000				200.000	
18	Lemari Besi/Metal	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	350.000	350.000				350.000	
19	Lemari Besi/Metal	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	650.000	650.000				650.000	
20	Lemari Besi/Metal	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	2.500.000	2.500.000				2.500.000	
21	Papan Visual/Papan Nama	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	570.000	570.000				570.000	
22	Papan Visual/Papan Nama	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	675.000	675.000				675.000	
23	White Board	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	450.000	450.000				450.000	
24	Alat Penghancur Kertas	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	1.050.000	1.050.000				1.050.000	
25	Mesin Absensi	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	1.200.000	1.200.000				1.200.000	
26	Alat Pemotong Kertas	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	250.000	250.000				250.000	
27	Headmachine Besar	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	70.000	70.000				70.000	
28	Overhead Projector	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	2.100.000	2.100.000				2.100.000	
29	Papan Pengumuman	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	385.000	385.000				385.000	
30	Meja Kerja Kayu	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	750.000	750.000				750.000	
31	Jam Mekanis	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	3.250.000	3.250.000				3.250.000	
32	Jam Mekanis	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	150.000	150.000				150.000	
33	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	1.350.000	1.350.000				1.350.000	
34	A.C. Split	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	2.450.000	2.450.000				2.450.000	
35	Kipas Angin	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	350.000	350.000				350.000	
36	Kipas Angin	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	4.800.000	4.800.000				4.800.000	
37	Kipas Angin	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	300.000	300.000				300.000	
38	Kipas Angin	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	3.150.000	3.150.000				3.150.000	
39	Loudspeaker	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	1.750.000	1.750.000				1.750.000	
40	Sound System	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	29.500.000	29.500.000				29.500.000	
41	Sound System	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	1.050.000	1.050.000				1.050.000	
42	Dispenser	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	450.000	450.000				450.000	
43	Mimbar/Podium	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	2.500.000	2.500.000				2.500.000	
44	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	1.200.000	1.200.000				1.200.000	
45	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	300.000	300.000				300.000	
46	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	175.000	175.000				175.000	
47	Microphone/Wireless MIC	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	250.000	250.000				250.000	
48	Microphone/Wireless MIC	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	900.000	900.000				900.000	
49	Pesawat Telephone	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	450.000	450.000				450.000	
50	Mesin Power Station White Emergency Diesel Generating	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	3.500.000	3.500.000				3.500.000	
51	P.C Unit	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)		1	3.250.000	3.250.000				3.250.000	
52	Jl.Mangga Dua Raya Kel.Ancol,Kec.Pademangan Jakut dan Kel.Mangga Dua Selatan Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat	PT Duta Pertiwi,Tbk						518.000.000		518.000.000	JPO/ KIB D
53	Jl.Mangga Dua Raya Kel.Ancol,Kec.Pademangan Jakut dan Kel.Mangga Dua Selatan Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat	PT Duta Pertiwi,Tbk						10.026.000.000		10.026.000.000	JPO/ KIB D
54	Kotak amal kecil/kayu	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							200.000	200.000	
55	Kotak amal besar/besi	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							600.000	600.000	
56	Keranda Jenazah	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							3.750.000	3.750.000	
57	Karpet Sholat	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							4.425.000	4.425.000	
58	Kantong amal Sholat led	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							200.000	200.000	

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Tanah	Gedung & Bangunan	Saldo Akhir 31 Desember 2023			Jalan, irigasi, Jaringan	Aset tetap lainnya	Total	Keterangan
					Peralatan dan Mesin						
					Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga				
59	Kain Panggung	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							750.000	750.000	
60	Tengki/Tandem air 1000 L	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							3.060.000	3.060.000	
61	Tirai pemisah jamaah pria dan wanita	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							7.500.000	7.500.000	
62	Rambu Lalu Lintas	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							300.000	300.000	
63	Tiang Mic pendek	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							275.000	275.000	
64	Tutup keranda jenazah	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							650.000	650.000	
65	Sepeda	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							200.000	200.000	
66	Tempat pemandian jenazah	Yayasan Safa Marwah(29 Mei 2021)							2.000.000	2.000.000	
67		Bank DKI		57.798.000						57.798.000	
68	Perumahan Kelapa Gading, Kel. Kelapa Gading Barat, kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara	Yayasan Elka	7.618.128.000							7.618.128.000	
69	Perumahan Kelapa Gading, Kel. Kelapa Gading Barat, kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara	Yayasan Elka	12.263.600.000							12.263.600.000	
70	Jl. Janur Elok Raya Blok HF 4, Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara	Gereja KGPM Sidang Yeremia	1.463.451.000							1.463.451.000	
TOTAL ASET SEWA (I)			1.004.644.128.000	14.437.937.000		264.985.000	10.544.000.000	23.910.000	1.029.914.960.000		
ASET KEKAYAAN DAERAH YANG DIPINJAMPAKAIKAN											
1	Jl. Raya Kebon Jeruk No. 64 RT.04/RW.03, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11530	BAWASLU JAKARTA BARAT	1.082.494.000	390.000.000						1.472.494.000	KANTOR
2	Jl. Prof. Satrio Kota Adm. Jakarta selatan	BADAN NARKOTIKA REPUBLIK INDONESIA	14.700.000.000	574.600.000						15.274.600.000	RUMAH DINAS
3	Jl Kumala No. F1. Permata Hijau, Jakarta Selatan	KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN	494.884.000	289.674.000						784.558.000	
4	Jl. Raya Kembangan Rt.001/02 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat 11610	Komando Garnisun Tetap I/Jakarta	2.886.000.000	1.110.362.000						3.996.362.000	
5	Jl. Tanah Abang II No. 102	Kantor BNN Prov. DKI Jakarta	7.216.470.000	12.898.867.460						20.115.337.460	
6	Jalan Salemba Raya No.15, Jakarta Pusat, ex Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat II Kota Adm.Jakarta Pusat	DIGUNAKAN KPUD/KPU 5 Wilayah	12.869.100.000	21.479.076.750						34.348.176.750	
7	Jl. Anggrek Roslana Blok E No.30RT.5/RW.2, Kemanggisan Kec. Palmerah Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480	Dewan Harian Cabang (DHC) Angkatan 45 Jak.Barat	164.034.000							164.034.000	
8	jl. TB Simatupang no 2, Jakarta Timur	Kodam Jaya	24.800.000.000							24.800.000.000	
9	JL. LAP. TEMBAK NO.75, RT.12/RW.2, CIBUBUR, KEC. CIRACAS, KOTA JAKARTA TIMUR, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 13720	Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI	22.586.616.000							22.586.616.000	
10	Jalan Kopelatif Blok A.I Nomor 26 Kelurahan Sunter Kecamatan tanjung Priok Jakarta Utara	Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta	1.595.790.000	520.672.000						2.116.462.000	
11	JL. RADEN INTEN II NO.3, RT.5/RW.14, DUREN SAWIT, KEC. DUREN SAWIT, KOTA JAKARTA TIMUR, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 13440	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Timur	6.745.780.000	4.095.086.630						10.840.866.630	
12	Jalan Panjang C Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat	Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta	2.151.772.000	936.067.000						3.087.839.000	
13	JALAN PULO MAS BARART VI KAV.14-16, KAYU PUTIH, PULO GADUNG, RT.3/RW.10, KAYU PUTIH, KEC. PULO GADUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 13210	Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta	2.658.800.000	2.023.489.000						4.682.289.000	
14	JALAN YOS SUDARSO KELURAHAN SUNGAI BAMBU KECAMATAN TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA	Kemenkumham Nomor BAST 3910/-076.25 Tgl. 01-10-2015	17.507.875.000							17.507.875.000	
15	Jalan Sungai Landak No. 7, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara	Kanwil Dep Kehakiman dan Ham DKI Jakarta (RUPBASAN)	1.911.000.000	819.280.000						2.730.280.000	
16	Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kota Administrasi Jakarta Timur	Kantor Regional V BKN	14.929.740.000							14.929.740.000	
17	Jalan Pantai Kuta V/1AncolPademangan Jakarta Utara	TNI Angkatan Laut	248.146.780.000							248.146.780.000	
18	Jl. Pahlawan Revolusi No. 38 Pondok Bamb Duren Sawit JakTim	Kanwil DKI Jakarta Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	104.062.035.000	985.150.000						105.047.185.000	
19	Jl. Sunter Permai Raya Papanggo Tanjung Priok Jakarta Utara	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof Dr.Sulianti Saroso	689.583.936.000							689.583.936.000	
20	Jalan Pejambon 7 Pasar Baru Sawah BesarJakarta Pusat	KPU 5 Wilayah	77.884.560.000	2.388.994.000						80.273.554.000	
21	Jl. Bungur Kel. Rambutan (Lahan Pengganti Lantamal)	Pangkalan Utama TNI AL III	5.757.294.000							5.757.294.000	
22	Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan	KPU JAKARTA SELATAN	1.534.851.000							1.534.851.000	
23	Jl. Warung Buncit Raya no 11 jakarta selatan	Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta JAKARTA SELATAN		1.000.600.000						1.000.600.000	
24	Gedung Perkantoran Krapu P. Karya Kel. Pulau Panggang, Kec. Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Kepulauan Seribu	BAWASLU PULAU SERIBU		532.671.000						532.671.000	
25	Jl. Danau Agung III No. 5, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	BADAN NARKOTIKA NATIONAL JAKARTA UTARA		1.337.819.300						1.337.819.300	
26	Gedung Graha Mental Spiritual Lantai 1 - Jalan Awaludin Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat	Bawaslu Jakarta Pusat		113.508.000						113.508.000	
27	Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		107.184.000						107.184.000	
28	Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
29	Jalan Hasyim Ashari Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
30	Jalan Raya Pasar Jumat Jakarta Selatan	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
31	Jalan Sisingamaharaja - Trunojoyo Jakarta Selatan	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
32	Jalan Pangeran Antasari - Panglima Polim / Melawai Blok M Jakarta Selatan	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
33	Jalan Jend. S Parman Simpang Grogol Jakarta Barat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
34	Jalan Pluit Selatan, Simpang Pluit Jakarta Utara	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
35	Jalan A Yani, Simpang Pramuka Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
36	Jalan Kalimalang Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
37	Jalan Raya Taman Mini Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
38	Jalan Lapangan Banteng Utara Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
39	Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
40	Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
41	Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		73.252.240						73.252.240	
42	Jalan Diponegoro Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya									

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Tanah	Gedung & Bangunan	Saldo Akhir 31 Desember 2023			Jalan, irigasi, Jaringan	Aset tetap lainnya	Total	Keterangan
					Peralatan dan Mesin						
					Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga				
45	Jalan Menteng Raya Prapatan Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		107.184.000						107.184.000	
46	Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		61.820.000						61.820.000	
47	Jalan Salemba Raya Depan RS Carolus Jakarta Pusat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
48	Jalan MT Haryono Jakarta Selatan simpang pancoran	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
49	Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
50	Jalan Jend. S Parman Simpang Tomang Jakarta Barat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
51	Jalan Jend. S Parman Simpang Slipi Jakarta Barat	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
52	Jalan Mayjen Sutoyo UKI Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
53	Jalan Pusdikla Cibubur Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
54	Jalan Raya Kalibata Jakarta Selatan	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
55	Jalan Suprpto / Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
56	Jalan Yos Sudarso Jakarta Utara	Kepolisian Daerah Metro Jaya		92.983.400						92.983.400	
57	Transportable Generating Set				7	14.168.000	99.176.000			99.176.000	Highlander
58	Transportable Generating Set				1	33.000.000	33.000.000			33.000.000	
59	Transportable Generating Set				4	14.168.000	56.672.000			56.672.000	
60	Transportable Generating Set				1	25.300.000	25.300.000			25.300.000	
61	Transportable Generating Set				1	20.588.700	20.588.700			20.588.700	
62	Baggage Trolly				30	635.690	19.070.700			19.070.700	
63	Elektrik Panel Cintrol				1	6.388.250	6.388.250			6.388.250	
64	Elektrik Panel Cintrol				1	4.490.750	4.490.750			4.490.750	
65	Tool Kit Set				3	7.431.930	22.295.790			22.295.790	
66	Tool Kit Set				21	10.120.000	212.520.000			212.520.000	
67	Tool Kit Set				3	7.431.930	22.295.790			22.295.790	
68	Tool Kit Set				4	10.120.000	40.480.000			40.480.000	
69	Tool Kit Set				12	7.431.930	89.183.160			89.183.160	
70	Lemari Besi/Metal				42	2.415.600	101.455.200			101.455.200	
71	Lemari Besi/Metal				1	3.486.230	3.486.230			3.486.230	
72	Lemari Besi/Metal				9	3.820.300	34.382.700			34.382.700	
73	Lemari Besi/Metal				1	3.486.230	3.486.230			3.486.230	
74	Lemari Besi/Metal				1	3.820.300	3.820.300			3.820.300	
75	Lemari Besi/Metal				4	3.486.230	13.944.920			13.944.920	
76	Rak Besi				1	3.415.500	3.415.500			3.415.500	
77	Rak Besi				2	3.795.000	7.590.000			7.590.000	
78	Rak Besi				8	3.415.500	27.324.000			27.324.000	
79	Brandkas				2	6.650.820	13.301.640			13.301.640	
80	Brandkas				2	6.650.160	13.300.320			13.300.320	
81	Brandkas				3	6.650.820	19.952.460			19.952.460	
82	CCTV - Camera Control Television System				7	9.992.290	69.946.030			69.946.030	
83	CCTV - Camera Control Television System				6	12.016.290	72.097.740			72.097.740	
84	CCTV - Camera Control Television System				1	7.906.250	7.906.250			7.906.250	
85	CCTV - Camera Control Television System				2	3.795.000	7.590.000			7.590.000	
86	CCTV - Camera Control Television System				1	1.391.500	1.391.500			1.391.500	
87	Alat Penghancur Kertas				1	14.610.750	14.610.750			14.610.750	
88	Overhead Projector				1	6.578.000	6.578.000			6.578.000	
89	Overhead Projector				2	4.048.000	8.096.000			8.096.000	
90	Overhead Projector				3	6.578.000	19.734.000			19.734.000	
91	Overhead Projector				1	1.391.500	1.391.500			1.391.500	
92	Overhead Projector				1	6.578.000	6.578.000			6.578.000	
93	Overhead Projector				2	4.427.500	8.855.000			8.855.000	
94	Overhead Projector				2	6.578.000	13.156.000			13.156.000	
95	Overhead Projector				1	1.391.500	1.391.500			1.391.500	
96	Overhead Projector				1	6.578.000	6.578.000			6.578.000	
97	Overhead Projector				1	1.391.500	1.391.500			1.391.500	
98	Overhead Projector				1	6.578.000	6.578.000			6.578.000	
99	Overhead Projector				1	1.391.500	1.391.500			1.391.500	
100	Overhead Projector				6	6.578.000	39.468.000			39.468.000	
101	Display				3	1.707.750	5.123.250			5.123.250	
102	Display				2	2.150.500	4.301.000			4.301.000	
103	Display				1	3.415.500	3.415.500			3.415.500	
104	Display				1	2.150.500	2.150.500			2.150.500	
105	Papan Tulis				1	1.368.070	1.368.070			1.368.070	
106	Papan Tulis				7	963.930	6.747.510			6.747.510	
107	Papan Tulis				1	1.368.070	1.368.070			1.368.070	
108	Papan Tulis				1	963.930	963.930			963.930	
109	Papan Tulis				4	1.368.070	5.472.280			5.472.280	
110	Meja Kerja Besi/Metal				48	635.690	30.513.120			30.513.120	
111	Meja Kerja Kayu				31	1.823.800	56.537.800			56.537.800	
112	Meja Kerja Kayu				12	1.912.717	22.952.604			22.952.604	
113	Kursi Besi/Metal				200	535.150	107.030.000			107.030.000	
114	Kursi Besi/Metal				100	347.270	34.727.000			34.727.000	
115	Kursi Besi/Metal				100	535.150	53.515.000			53.515.000	
116	Kursi Besi/Metal				45	466.840	21.007.800			21.007.800	
117	Kursi Besi/Metal										

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Tanah	Gedung & Bangunan	Saldo Akhir 31 Desember 2023			Jalan, irigasi, Jaringan	Aset tetap lainnya	Total	Keterangan
					Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga				
119	Kursi Besi/Metal				40	896.830	35.873.200			35.873.200	
120	Kursi Besi/Metal				255	535.150	136.463.250			136.463.250	Chairman
121	Kursi Besi/Metal				12	1.808.950	21.707.400			21.707.400	Chairman
122	Meja Rapat				36	1.914.550	68.923.800			68.923.800	Orbitrend
123	Kursi Rapat				8	1.640.540	13.124.320			13.124.320	Savelo Kingdom
124	Kursi Rapat				20	1.168.860	23.377.200			23.377.200	Savelo Kingdom
125	Kursi Rapat				5	918.390	4.591.950			4.591.950	Chairman
126	Kursi Rapat				15	635.690	9.535.350			9.535.350	VIP
127	Kursi Rapat				20	918.390	18.367.800			18.367.800	Chairman
128	Kursi Rapat				8	1.640.540	13.124.320			13.124.320	Savello
129	Kursi Rapat				5	918.390	4.591.950			4.591.950	Chairman
130	Kursi Rapat				32	1.640.540	52.497.280			52.497.280	Savelo Kingdom
131	Kursi Rapat				4	6.932.200	27.728.800			27.728.800	Ichiko Felcio
132	Kursi Rapat				9	5.199.150	46.792.350			46.792.350	Ichiko Felcio
133	Kursi Rapat				18	2.239.050	40.302.900			40.302.900	Chairman
134	Kursi Rapat				16	6.932.200	110.915.200			110.915.200	Ichiko
135	Kursi Tamu				1	11.021.340	11.021.340			11.021.340	Asean
136	Kursi Tamu				9	7.242.180	65.179.620			65.179.620	Scorpion
137	Kursi Tamu				19	4.427.500	84.122.500			84.122.500	Asean
138	Kursi Tamu				1	11.021.340	11.021.340			11.021.340	Asean
139	Kursi Tamu				3	4.427.500	13.282.500			13.282.500	Resist Minimalis
140	Kursi Tamu				4	11.021.340	44.085.360			44.085.360	Asean 321
141	A.C. Split				1	6.050.000	6.050.000			6.050.000	Sharp Plasmacuster
142	A.C. Split				3	5.692.500	17.077.500			17.077.500	Sharp Plasmacuster
143	A.C. Split				2	5.313.000	10.626.000			10.626.000	Sharp Plasmacuster
144	A.C. Split				1	17.710.000	17.710.000			17.710.000	Panasonic
145	A.C. Split				14	5.692.500	79.695.000			79.695.000	Sharp Plasmacuster
146	A.C. Split				2	6.050.000	12.100.000			12.100.000	Sharp Plasmacuster
147	A.C. Split				42	6.894.250	289.558.500			289.558.500	Daikin
148	A.C. Split				6	5.692.500	34.155.000			34.155.000	Sharp Plasmacuster
149	Teko Listrik				6	3.273.160	19.638.960			19.638.960	Sharp
150	Kitchen Set				1	1.100.000	1.100.000			1.100.000	Expo
151	Loudspeaker				1	85.387.500	85.387.500			85.387.500	Yamaha
152	Sound System				1	7.235.800	7.235.800			7.235.800	TOA
153	Sound System				1	5.566.000	5.566.000			5.566.000	
154	Sound System				1	7.235.800	7.235.800			7.235.800	TOA
155	Sound System				1	5.566.000	5.566.000			5.566.000	Krezt
156	Sound System				4	7.235.800	28.943.200			28.943.200	TOA
157	Microphone				3	49.183.200	147.549.600			147.549.600	Auderpro
158	Microphone				1	15.534.200	15.534.200			15.534.200	Auderpro
159	Microphone				3	49.183.200	147.549.600			147.549.600	Auderpro
160	Microphone Table Stand				1	49.335.000	49.335.000			49.335.000	Auderpro
161	Dispenser				5	3.273.160	16.365.800			16.365.800	Sharp
162	Vertikal Blind				45	1.082.840	48.727.800			48.727.800	
163	Alat Pemadam/Portable				2	3.159.970	6.319.940			6.319.940	Gunnebo
164	Alat Pemadam/Portable				15	6.261.750	93.926.250			93.926.250	Gunnebo
165	Meja Kerja Pejabat Eselon II				30	5.275.050	158.251.500			158.251.500	Ichiko
166	Kursi Kerja Pejabat Eselon II				4	6.932.200	27.728.800			27.728.800	Ichiko
167	Layar Film/Projector				2	759.000	1.518.000			1.518.000	Screen G-lite
168	Layar Film/Projector				1	1.391.500	1.391.500			1.391.500	Letsec
169	Layar Film/Projector				4	759.000	3.036.000			3.036.000	Screen G-lite
170	Facsimile				3	12.207.250	36.621.750			36.621.750	
171	Facsimile				2	5.629.250	11.258.500			11.258.500	Printer Laser Jet M402D
172	Facsimile				3	3.542.000	10.626.000			10.626.000	Epson L365
173	Facsimile				1	5.629.250	5.629.250			5.629.250	Printer Laser Jet M402D
174	Facsimile				9	3.542.000	31.878.000			31.878.000	Epson L365
175	Facsimile				1	5.629.250	5.629.250			5.629.250	
176	Facsimile				3	3.542.000	10.626.000			10.626.000	Epson L365
177	Facsimile				1	2.150.500	2.150.500			2.150.500	Panasonic KX-FT983
178	Facsimile				1	1.707.750	1.707.750			1.707.750	
179	Facsimile				2	2.150.500	4.301.000			4.301.000	
180	P.C Unit				3	12.016.290	36.048.870			36.048.870	Asua X450J
181	P.C Unit				12	11.891.000	142.692.000			142.692.000	Asua X450J
182	P.C Unit				5	9.992.290	49.961.450			49.961.450	Lenovo IP500s
183	P.C Unit				9	12.016.290	108.146.610			108.146.610	Asua X450J
184	Scanner (Peralatan Mini Komputer)				4	12.650.000	50.600.000			50.600.000	Fujitsu Scansnap
185	Modem				12	866.580	10.398.960			10.398.960	Bolt
186	Air Conditioning (AC)				8	4.300.000	34.400.000			34.400.000	Daikin
187	Kursi Besi/Metal				50	347.270	17.36				

No	Nama Aset	Nama Pihak Ketiga	Tanah	Gedung & Bangunan	Saldo Akhir 31 Desember 2023			Jalan, irigasi, Jaringan	Aset tetap lainnya	Total	Keterangan
					Peralatan dan Mesin						
					Unit	Harga Satuan	Jumlah Harga				
193	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	166.701.108	166.701.108			166.701.108	Toyota Avanza
194	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	331.320.000	331.320.000			331.320.000	Ford escape
195	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	455.024.416	455.024.416			455.024.416	Nissan X Trail
196	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
197	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
198	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
199	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
200	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
201	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
202	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
203	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
204	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
205	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
206	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
207	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
208	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
209	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
210	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
211	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
212	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
213	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
214	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
215	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
216	Sedan				1	376.500.000	376.500.000			376.500.000	Toyota Altis
217	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	235.628.571	235.628.571			235.628.571	Isuzu Panther
218	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	235.628.571	235.628.571			235.628.571	Isuzu Panther
219	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	235.628.571	235.628.571			235.628.571	Isuzu Panther
220	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	235.628.571	235.628.571			235.628.571	Isuzu Panther
221	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	235.628.571	235.628.571			235.628.571	Isuzu Panther
222	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	317.521.250	317.521.250			317.521.250	Ford Ranger
223	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	238.176.000	238.176.000			238.176.000	Isuzu Panther
224	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	242.521.250	242.521.250			242.521.250	Ford Ranger
225	Sedan				1	345.200.000	345.200.000			345.200.000	Toyota Altis
226	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	274.600.011	274.600.011			274.600.011	Isuzu Panther
227	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	274.600.011	274.600.011			274.600.011	Isuzu Panther
228	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	274.600.011	274.600.011			274.600.011	Isuzu Panther
229	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	274.600.011	274.600.011			274.600.011	Isuzu Panther
230	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	274.600.011	274.600.011			274.600.011	Isuzu Panther
231	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	429.660.000	429.660.000			429.660.000	Toyota Fortuner 2.5
232	Sepeda Motor				1	15.000.000	15.000.000			15.000.000	Yamaha Jupiter Z CW
233	Sepeda Motor				1	15.000.000	15.000.000			15.000.000	Yamaha Jupiter Z CW
234	Sepeda Motor				1	16.500.000	16.500.000			16.500.000	Yamaha All New Soul
235	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	235.950.000	235.950.000			235.950.000	Mitsubishi Xpander
236	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	235.950.000	235.950.000			235.950.000	Mitsubishi Xpander
237	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	235.950.000	235.950.000			235.950.000	Mitsubishi Xpander
238	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)				1	235.950.000	235.950.000			235.950.000	Mitsubishi Xpander
239	Sedan (B 1082 PQB)	BPN Jakarta Utara			1	406.830.000	406.830.000			406.830.000	
240	Sedan (B 1057 PQB)	Polda Metro Jaya			1	406.830.000	406.830.000			406.830.000	
241	Sedan (B 1073 PQB)	BPN Jakarta Timur			1	406.830.000	406.830.000			406.830.000	
242	Pick Up (B 9784 PSD)	Kodamjaya			1	451.000.000	451.000.000			451.000.000	
243	Pick Up (B 9812 PSD)	BPN Jakarta Utara			1	451.000.000	451.000.000			451.000.000	
244	MINIBUS TOYOTA KIJANG KF80 (B 2720 PQ)	KPU			1	145.000.000	145.000.000			145.000.000	
245	MINIBUS TOYOTA KIJANG KF80 (B 2719 PQ)	KPU			1	145.000.000	145.000.000			145.000.000	
246	MINIBUS TOYOTA KIJANG KF80 (B 2718 PQ)	KPU			1	145.000.000	145.000.000			145.000.000	
247	MINIBUS TOYOTA KIJANG KF80 (B 2717 PQ)	KPU			1	145.000.000	145.000.000			145.000.000	
248	MINIBUS TOYOTA KIJANG KF80 (B 2716 PQ)	KPU			1	145.000.000	145.000.000			145.000.000	
249	MINIBUS TOYOTA KIJANG KF80 (B 2715 PQ)	KPU			1	145.000.000	145.000.000			145.000.000	
250	MINIBUS TOYOTA KIJANG KF80 (B 2710 PQ)	KPU			1	145.000.000	145.000.000			145.000.000	
251	MINIBUS ISUZU PANTER TBR 54										

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA ATAS PEMANFAATAN ASET DALAM BENTUK SEWA
PER 31 DESEMBER 2023

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LOKASI ASET	DASAR PENGUNAAN			NILAI PKS	JANGKA WAKTU	MASA SEWA		SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
						No / Tanggal MoU	TANGGAL/NO. SK GUBERNUR	TANGGAL / NO. PERJANJIAN			AWAL	AKHIR			
1	PT. GERAK MAJU ABADI	4.1.4.03.02	TANAH DAN BANGUNAN	GEDUNG PERTOKOAN DAN LAHAN PARKIR	JALAN BLUSTRU GLODOK RT. 001 RW. 006 KEL. MANGGA BESAR, KECAMATAN TAMANSARI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	4229/PU.00.04 Tanggal 22 Desember 2019	11/10/2017 / NOMOR 1872 TAHUN 2017	25/10/2017 / NOMOR 2626/076.1	6.650.000.000	5 TAHUN	28/10/2022	27/10/2027	46	110.833.333	5.098.333.333
2	YAYASAN SUHARGO GONDOKUSUMO	4.1.4.03.01	TANAH DAN BANGUNAN	SARANA PENDIDIKAN	Jalan Paradise Boulevard Utara, Blok Paradise 16, Komplek Perumahan Taman Surya 5, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat	2562/PP.00.04 Tanggal 2 September 2022			3.201.600.000	5 TAHUN	01/04/2021	31/03/2026	28	53.360.000	1.494.080.000
3	PT. AMAN SAMUDERA INDONESIA	4.1.4.03.01	TANAH	PENYIMPANAN, PEMBEKUAN DAN PENGOLAHAN IKAN [COLDSTORAGE]	KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, JL. PENDARATAN IKAN, KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN, KOTA ADM. JAKARTA UTARA	1608/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022	31/10/2016 / NOMOR 31 TAHUN 2016	26/01/2017 / NOMOR 443/- 1.711	1.633.500.000	5 TAHUN	26/01/2022	25/01/2027	37	27.225.000	1.007.325.000
4	PT. Usaha Laut Panipahan (PT. Marcelindo Citra Lestari)	4.1.4.03.01	TANAH	PENYIMPANAN, PEMBEKUAN DAN PENGOLAHAN IKAN [COLDSTORAGE]	KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, JL. PENDARATAN IKAN, KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN, KOTA ADM. JAKARTA UTARA	1601/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022	29/11/2016 / NOMOR 37 TAHUN 2016	27/01/2017 / NOMOR 450/- 1.711	1.004.400.000	5 TAHUN	27/01/2022	26/01/2027	37	16.740.000	619.380.000
5	PT. BALATS DWI TUNGGAL	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	RESTORAN	JALAN GERBANG PEMUDA NOMOR 1, KELURAHAN GELORA, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	1597/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022	22/08/2017 / NOMOR 53 TAHUN 2017	18/09/2017 / NOMOR 338/- 072	925.000.000	5 TAHUN	26/05/2022	25/05/2027	41	15.416.667	632.083.333
6	PT ALAM SEGARJAYA	4.1.4.03.01	TANAH	COLD STORAGE	AREAL PASAR IKAN MUARA ANGKE	1607/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022	14/09/2017 / NOMOR 57 TAHUN 2017	09/10/2017 / NOMOR 6977/ 077	1.815.000.000	5 TAHUN	27/02/2022	26/02/2027	38	30.250.000	1.149.500.000
7	PT. JAKARTA PROPERTINDO	4.1.4.03.01	TANAH	PEMBANGUNAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DALAM KOTA (INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY)	JL. SUNTER PERMAI RAYA/JL. DANAU SUNTER BARAT, KEL. SUNTER AGUNG, KEC. TANJUNG PRIOK, KOTA ADM. JAKARTA UTARA		14/12/2018 NOMOR 1919 TAHUN 2018	20/12/2018 / NOMOR 4603/ 076.33	20.535.463.000	5 TAHUN	20/12/2018	19/12/2023	0	342.257.717	0
8	PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	PENGELOLAAN PASAR / PERKULAKAN (JAKGROSIR)	PULAU TIDUNG KECIL, KECAMATAN KEPULAUAN ASERIBU SELATAN, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU		04/12/2018 / NOMOR 62 TAHUN 2018	18/12/2018 / NOMOR 2665/ 074.22	305.000.000	5 TAHUN	18/12/2018	17/12/2023	0	5.083.333	0
9	PT. GLOBAL SAMUDRA MAKMUR	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	PENYIMPANAN, PEMBEKUAN DAN PENGOLAHAN IKAN [COLDSTORAGE]	KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, JL. DERMAGA MUARA ANGKE/JL. PENDARATAN IKAN KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN, KOTA ADM. JAKARTA UTARA		29/10/2018 / NOMOR 49 TAHUN 2018	27/11/2018 / NOMOR 8779/ 1.771.31	632.400.000	5 TAHUN	27/11/2018	26/11/2023	0	10.540.000	0
10	CV. ANUGRAH ANDALAN NELAYAN	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	PENYIMPANAN, PEMBEKUAN DAN PENGOLAHAN IKAN [COLDSTORAGE]	KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, JL. DERMAGA MUARA ANGKE/JL. PENDARATAN IKAN KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN, KOTA ADM. JAKARTA UTARA		29/10/2018 / NOMOR 48 TAHUN 2018	27/11/2018 / NOMOR 8778/ 1.711.31	400.000.000	5 TAHUN	27/11/2018	26/11/2023	0	6.666.667	0
11	PD. SUMBER MINA REJEKI	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	PENYIMPANAN, PEMBEKUAN DAN PENGOLAHAN IKAN [COLDSTORAGE]	KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, JL. DERMAGA MUARA ANGKE/JL. PENDARATAN IKAN KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN, KOTA ADM. JAKARTA UTARA		31/10/2018 / NOMOR 52 TAHUN 2018	27/11/2018 / NOMOR 8776/ 1.711.31	400.000.000	5 TAHUN	03/01/2019	02/01/2024	0	6.666.667	0
12	CV. SAMUDRA PASIFIK FISHINDO	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	PENYIMPANAN, PEMBEKUAN DAN PENGOLAHAN IKAN [COLDSTORAGE]	KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, JL. DERMAGA MUARA ANGKE/JL. PENDARATAN IKAN KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN, KOTA ADM. JAKARTA UTARA		31/10/2018 / NOMOR 51 TAHUN 2018	27/11/2018 / NOMOR 8780/ 1.711.31	250.000.000	5 TAHUN	03/12/2018	02/12/2023	0	4.166.667	0
13	PT. MAC SARANA DIJAYA (WALIKOTA JU)	4.1.4.03.02	SEBAGIAN BANGUNAN	PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI (ANTENA INDOOR)	KANTOR WALIKOTA JAKARTA UTARA, JL. YOS SUDARSO NO. 27- 29, KELURAHAN KEBON BAWANG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		13/11/2018 / NOMOR 56 TAHUN 2018	20/12/2018 / NOMOR 3742/ 076.3	642.000.000	5 TAHUN	24/12/2018	23/12/2023	0	10.700.000	0
14	PT. MAC SARANA DIJAYA (TERMINAL PULOGEBANG)	4.1.4.03.02	SEBAGIAN BANGUNAN	PERANGKAT TELEKOMUNIKASI (ANTENA INDOOR)	TERMINAL TERPADU PULOGEBANG, JL. SEJAJAR PINTU TOL TIMUR CAKUNG-CIUNGING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR		13/11/2018 NOMOR 55 TAHUN 2018	21/12/2018 NOMOR 9424/ 076.33	633.000.000	5 TAHUN	24/12/2018	23/12/2023	0	10.550.000	0
15	PT. SAMUDERA SEJAHTERA SENTOSA	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	PENYIMPANAN, PEMBEKUAN DAN PENGOLAHAN IKAN [COLDSTORAGE]	KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, JL. DERMAGA MUARA ANGKE/JL. PENDARATAN IKAN KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN, KOTA ADM. JAKARTA UTARA		17/12/2018 / NOMOR 68 TAHUN 2018	23/01/2019 / NOMOR 670/- 1.771.31	315.000.000	5 TAHUN	01/03/2018	28/02/2023	0	5.250.000	0
16	PT. MAC SARANA DIJAYA (GEDUNG DPRD)	4.1.4.03.02	SEBAGIAN BANGUNAN	PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI (ANTENA INDOOR)	GEDUNG DPRD PROV. DKI JAKARTA (BLOK H) JL. KEBON SIRIH NOMOR 18, KEL. GAMBIR, KEC. GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT		14/01/2019 NOMOR 2 TAHUN 2019	06/03/2019 / NOMOR 2140/ 076	689.000.000	5 TAHUN	24/12/2018	23/12/2023	0	11.483.333	0
17	PT. INDOWOOD MANDIRI PERMAI	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	AKSES KELUAR MASUK APARTEMEN SEDERHANA	JL. BINA MARGA, KELURAHAN CIPAYUNG, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR		23/11/2018 NOMOR 58 TAHUN 2018	08/02/2019 / NOMOR 434/- 076.33	700.000.000	5 TAHUN	08/02/2019	07/02/2024	1	11.666.667	11.666.667
18	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG JAKARTA KOTA	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	ATM	DERMAGA PELABUHAN KALIADEM, MUARA ANGKE, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DERMAGA PULAU TIDUNG, KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU DAN DERMAGA PULAU PRAMUKA, KELURAHAN PULAU PANGGANG, KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU		23/01/2019 NOMOR 6 TAHUN 2019	14/05/2019 NOMOR 1553/ 076.25	400.000.000	5 TAHUN	14/05/2019	13/05/2024	4	6.666.667	26.666.667
19	PT. KAMILA SAMUDERA MAKMUR	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, JALAN DERMAGA MUARA ANGKE,KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		12/07/2019 NOMOR 52 TAHUN 2019	30/08/2019 NOMOR 7396/- 076.2	480.000.000	5 TAHUN	01/04/2019	31/03/2024	4	8.000.000	32.000.000
20	PT. MULTINDO PASIFIK MANDIRI	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, JALAN DERMAGA MUARA ANGKE/JALAN PENDARATAN IKAN, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		20/06/2019 NOMOR 48 TAHUN 2019	30/08/2019 NOMOR 7397/- 076.2	1.030.200.000	5 TAHUN	01/03/2019	28/02/2024	2	17.170.000	34.340.000
21	PT. BANK DKI (2019)	4.1.4.03.02	SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN	ATM	JAKARTA PUSAT, JAKARTA UTARA, JAKARTA BARAT, JAKARTA SELATAN, JAKARTA TIMUR		27/09/2019 / NOMOR 72 TAHUN 2019	23/12/2019 / NOMOR 3728/ 076.11	5.623.829.160	5 TAHUN	23/12/2019	22/12/2024	12	93.730.486	1.124.765.832

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LOKASI ASET	DASAR PENGGUNAAN			NILAI PKS	JANGKA WAKTU	MASA SEWA		SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
						No / Tanggal MoU	TANGGAL/NO. SK GUBERNUR	TANGGAL / NO. PERJANJIAN			AWAL	AKHIR			
22	PT. LAUTAN MUTIARA JAYA	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	JALAN DERMAGA MUARA ANGEK/JALAN Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara	2536/PU.00.04 Tanggal 1 September 2022	20/06/2019 NOMOR 49 TAHUN 2019	08/08/2019 / NOMOR 6639/1-.711	2.524.100.000	5 TAHUN	23/04/2019	22/04/2024	4	42.068.333	168.273.333
23	PT. PANDAWA PERMATA HIJAU	4.1.4.03.01	TANAH	AKSES JALAN	Jl. Masjid An-Nur RT 01/10 Kel. Grogol Utara, Kec, Kebayoran Lama Jakarta Selatan		1037/2020	43902	250.000.000	5 TAHUN	12/03/2020	11/03/2025	14	4.166.667	58.333.333
24	PT MITRANIAN ANUGRAHA SAMUDRAINDO	4.1.4.03.01	TANAH	COLD STORAGE	Jl. DERMAGA MUARA ANGEK/JALAN Pendaratan Ikan, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara		26/12/2020 NOMOR 46 TAHUN 2020	14/01/2021 NOMOR 228/-076.2	485.000.000	5 TAHUN	01/12/2019	30/11/2024	11	8.083.333	88.916.667
25	PT. MANDIRI Cipta Gemilang	4.1.04.03.01.0001	TANAH	JEMBATAN PENGHUBUNG	KOMPLEK PERUMAHAN PURI INDAH KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat		23/07/2021/936 TAHUN 2021	18/08/2021/NOMOR 1961/-076.25	5.519.760.000	5 TAHUN	20/11/2021	20/11/2025	23	91.996.000	2.115.908.000
26	PD. WINDI JAYA ABADI	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	Jl. DERMAGA MUARA ANGEK/JALAN Pendaratan Ikan, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara		28/12/2020 NOMOR 956/-082.74	19/07/2021 NOMOR 4595/-076.2	1.167.000.000	5 TAHUN	19/07/2021	18/07/2026	31	19.450.000	602.950.000
27	PT BINA IKAN NUSANTARA	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	Jl. DERMAGA MUARA ANGEK/JALAN Pendaratan Ikan, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara		28/12/2020 NOMOR 956/-082.74	28/06/2021 NOMOR 3385/-076.2	1.060.000.000	5 TAHUN	28/06/2021	27/06/2026	30	17.666.667	530.000.000
28	PT AMANAH BAHARI KENCANA	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	Jl. DERMAGA MUARA ANGEK/JALAN Pendaratan Ikan, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara		19/08/2021 NOMOR 1016 TH 2021	01/10/2021 NOMOR 5781/-076	809.000.000	5 TAHUN	01/10/2021	30/09/2026	33	13.483.333	444.950.000
29	PT. PLN UIP JAWA BAGIAN BARAT	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	TAPAK TOWER	JALAN DERMAGA, NO 1 RT 11/22 KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA		SURAT PERINTAH TUGAS 12/07/2021 NOMOR 676/-082.74	30/07/2021 NOMOR 4783/-076	406.400.000	5 TAHUN	18/06/2021	18/06/2026	30	6.773.333	203.200.000
30	PT. JAMKRIDA JAKARTA	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN BANGUNAN	RUANGAN KANTOR	JALAN ABDUL MUIS NO. 66 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	2982/PU.00.04 Tanggal 3 Oktober 2022	NOMOR 48 TAHUN 2021	29/09/2021 NOMOR 2530/-077	6.534.822.000	4 TAHUN	10/03/2022	09/03/2026	26	136.142.125	272.284.250
31	YAYASAN EL SHADDAI JAKARTA BARAT	4.1.04.03.01.0001	TANAH & BANGUNAN	SARANA PENDIDIKAN	PERUM. CITRA 5 BLOK D6 KEL. KAMAL, KEC. KALIDERES JAKARTA BARAT		28/10/2021 NOMOR 1290 TH 2021	26/11/2021 NOMOR 3091/-076.11	605.000.000	5 TAHUN	23/07/2019	22/07/2024	7	10.083.333	70.583.333
32	PT INDOSAT	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	TERMINAL KALIDERES JL. DAAN MOGOT RT 04/01 KEL. KALIDERES, KEC. KALIDERES, JAKARTA BARAT		10/05/2021 NOMOR 34 TH 2021	10/08/2021 NOMOR 79/-076.83	136.600.000	5 TAHUN	10/08/2021	10/08/2026	31	2.276.667	70.576.667
33	KOPERASI PEKAWAI DINAS PERIKANAN DKI JAKARTA	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	SPBU DAN SPBE	KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGEK, JALAN DERMAGA MUARA ANGEK, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1610/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			1.600.000.000	5 TAHUN	14/12/2021	13/12/2026	35	26.666.667	933.333.333
34	PT. Pesisir Samudera Andalan	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGEK, JALAN DERMAGA MUARA ANGEK, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1584/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			700.000.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	11.666.667	560.000.000
35	CV Laras Ayu Lestari	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGEK, JALAN DERMAGA MUARA ANGEK, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1587/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			316.000.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	5.266.667	252.800.000
36	UD. Bintang Sejahtera	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGEK, JALAN DERMAGA MUARA ANGEK, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1590/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			324.000.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	5.400.000	259.200.000
37	PT. Panca Mina Mitra Maritim	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGEK, JALAN DERMAGA MUARA ANGEK, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1586/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			566.250.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	9.437.500	453.000.000
38	PT. Nelayan Mitra Mandiri	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGEK, JALAN DERMAGA MUARA ANGEK, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1588/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			379.750.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	6.329.167	303.800.000
39	PT Lautan Jaya Pasifik	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGEK, JALAN DERMAGA MUARA ANGEK, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	1585/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			1.125.000.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	18.750.000	900.000.000
40	PT. Citra Tumbuh Bahagia	4.1.04.03.01.0001	TANAH	Unit Distribusi Pengolahan Air Bersih (Water Treatment Plant)	Perumahan Citra Garden 1 Extension, Jalan Taman Indah I, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	3341/PU.00.04 Tanggal 26 Oktober 2022			680.400.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	11.340.000	544.320.000
41	PT Ciputra Development	4.1.04.03.01.0001	TANAH	Unit Distribusi Pengolahan Air Bersih (Water Treatment Plant)	Perumahan Citra Garden 1, Jalan Alam Tengah, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	3340/PU.00.04 Tanggal 26 Oktober 2022			740.250.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	12.337.500	592.200.000
42	H Muchammad Alludin	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	Kios-kios pedagang	Jalan petukangan RT011/01 Kel. Roa Malaka, Kec. Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat	1508/-1.711 Tanggal 15 Juni 2022			600.000.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	10.000.000	480.000.000
43	PT. Candrasa Pranaguna	4.1.04.03.01.0001	TANAH	Unit Distribusi Pengolahan Air Bersih (Water Treatment Plant)	Perumahan Citra Garden 2 Extension, Cluster Pos 5, Jalan Citra Dua Extension Blok BG, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	3343/PU.00.04 Tanggal 26 Oktober 2022			4.501.350.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	75.022.500	3.601.080.000
44	PT Ciputra Development	4.1.04.03.01.0001	TANAH	Unit Distribusi Pengolahan Air Bersih (Water Treatment Plant)	Perumahan Citra Garden 2, Jalan Kesayangan Utara, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	3342/PU.00.04 Tanggal 26 Oktober 2022			1.349.775.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	22.496.250	1.079.820.000
45	PT. Penta Oktoeantama	4.1.04.03.01.0001	TANAH	Unit Distribusi Pengolahan Air Bersih (Water Treatment Plant)	Perumahan Citra Garden 3, Jalan Palem Kipas 2, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	3344/PU.00.04 Tanggal 26 Oktober 2022			1.360.800.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	22.680.000	1.088.640.000
46	PT. Jasa Jakarta Investindo	4.1.04.03.01.0001	TANAH	Unit Distribusi Pengolahan Air Bersih (Water Treatment Plant)	Perumahan Citra Garden 5, Jalan Kelapa Sawit 1, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	3345/PU.00.04 Tanggal 26 Oktober 2022			1.902.600.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	31.710.000	1.522.080.000
47	CV. Hasil Lautan Jaya	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	Jl. DERMAGA No.1, RT.22/RW.11, Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450	1589/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			400.000.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	6.666.667	320.000.000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LOKASI ASET	DASAR PENGUNAAN			NILAI PKS	JANGKA WAKTU	MASA SEWA		SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
						No / Tanggal MoU	TANGGAL/NO. SK GUBERNUR	TANGGAL / NO. PERJANJIAN			AWAL	AKHIR			
48	PT MRTJ (Taman Marta)	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	Taman Literasi Christina Martha Tiahahu	Jalan Palatehan No 5/Jl. Sisingamaraja RT000 RW00 Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan	1907.1/PP.03.13 Tanggal 8 Juli 2022			806.400.000	10 TAHUN	18/09/2022	18/09/2032	105	6.720.000	705.600.000
49	PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	Menara Telekomunikasi	22 Rusun				1.700.000.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	28.333.333	1.360.000.000
50	PT TJ (15 Halte)	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	Halte	15 Halte	2436/PU.00.04 Tanggal 25 Agustus 2022			4.920.650.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	82.010.833	3.936.520.000
51	PT MRTJ (JPM Dukuh Atas)	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	Jembatan Penyeberangan Multiguna	Jalan Galunggung, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1902.1/PP.03.13 Tanggal 8 Juli 2022			3.575.000.000	10 TAHUN	17/11/2022	17/11/2032	107	29.791.667	3.187.708.333
52	PT Bira Jaya Mandiri Perkasa	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	Fasilitas Internet Fiber Optic	6 Rusun	3671/PU.00.04 Tanggal 21 November 2022			1.000.000.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	16.666.667	800.000.000
53	Yayasan Agung Sedayu	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	Proyek Taman Anggrek Residence	Jalan Letjen S. Parman/Jalan Aranda/Jalan Tanjung Duren Timur, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat	3474/PU.00.04 Tanggal 2 November 2022			700.000.000	5 TAHUN	02/11/2022	01/11/2027	46	11.666.667	536.666.667
54	PT TJ (27 Halte)	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	Halte	27 Halte	4139.1/PU.00.04 Tanggal 19 Desember 2022			12.100.000.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	201.666.667	9.680.000.000
55	PT Arjuna Mitra Persada	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN	Rumah Makan	Kantin Balaikota (Blok D) - Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Kompleks Balaikota Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	4158/PU.00.04 Tanggal 20 Desember 2022			275.000.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	4.583.333	220.000.000
56	PT Gametraco Tunggal	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	Tower penguat sinyal	Rusun Nagrak	4272/PU.00.04 Tanggal 26 Desember 2022			275.000.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	4.583.333	220.000.000
57	PT. PLN UIP JBB	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	Tapak Tower	32 titik	2326/PU/00.04 Tanggal 12 Agustus 2022			6.838.778.100	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	113.979.635	5.471.022.480
58	PT Metro Djakarta Muda Angkasa	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN	Sarana Olahraga	Perumahan Bintaro Jaya Sektor 1, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan	1609/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			3.935.250.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	65.587.500	3.148.200.000
59	PT Prima Sumber Bahari	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN BANGUNAN	RESTORAN	Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara				1.000.000.000	5 TAHUN	02/01/2023	01/01/2028	48	16.666.667	800.000.000
60	UD. Mina Sari (a.n. Surat)	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	Jl. Dermaga No.1, RT.22/RW.11, Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450	1605/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			439.387.500	5 TAHUN	29/12/2021	28/12/2026	36	7.323.125	263.632.500
61	PT. Tunas Maju Sejahtera	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/ Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrtasi Jakarta Utara	1606/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			680.400.000	5 TAHUN	26/04/2019	25/04/2024	4	11.340.000	45.360.000
62	PT Karya Syukur Maju Bersama	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	DOCKING KAPAL	Jalan Mandala Bahari Nomor 3, Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke,Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara	1602/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			1.218.992.000	5 TAHUN	30/12/2021	29/12/2026	36	20.316.533	731.395.200
63	PT Gabungan Samudera Internasional	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	Jalan Dermaga No.1, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara	1603/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			1.613.700.000	5 TAHUN	23/12/2021	22/12/2026	36	26.895.000	968.220.000
64	PT ADICIPTA BOGA INTIPRIMA	4.1.04.03.01.0001	TANAH DAN BANGUNAN	RESTORAN	Jalan Ir. Juanda No.19, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir Jakarta Pusat	2509/PU.00.04 Tanggal 31 Agustus 2022			1.048.000.000	5 TAHUN	23/12/2018	22/12/2023	0	17.466.667	0
65	PT Solu Sindo Kreasi Pratama	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	Menara Telekomunikasi	Jalan Prof. Joko Sutono, Sh Nomor 1, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan (Smk 29)	1583/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			1.122.873.000	5 TAHUN	14/10/2018	13/10/2023	0	18.714.550	0
66	Astra Daihatsu Motor	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	Jembatan Penyeberangan Multiguna	Jalan Gaya Motor Barat, Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	2448/PU.00.04 Tanggal 26 Agustus 2022			1.110.528.456	5 TAHUN	02/01/2021	01/01/2026	24	18.508.808	444.211.382
67	Yayasan El Shaddai	4.1.04.03.01.0001	TANAH DAN BANGUNAN	SEKOLAH	Perumahan Citra 5, Blok A-6, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	3497/PU.00.04 Tanggal 4 November 2022			193.534.497	5 TAHUN	22/11/2019	21/11/2024	11	3.225.575	35.481.324
68	Yayasan Pelita Bangsa	4.1.04.03.01.0001	TANAH DAN BANGUNAN	SEKOLAH	Perumahan Citra Garden 5, Blok E-7 Nomor 1-2 Citra Garden City, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	3129/PU.00.04 Tanggal 13 Oktober 2022			1.000.000.000	5 TAHUN	23/12/2020	22/12/2025	24	16.666.667	400.000.000
69	Yayasan Diannanda (SD)	4.1.04.03.01.0001	TANAH DAN BANGUNAN	SEKOLAH	Perumahan Citra Garden II Blok N3 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	3283/PU.00.04 Tanggal 24 Oktober 2022			1.516.838.243	5 TAHUN	26/12/2018	25/12/2023	0	25.280.637	0
70	PT Prima Indo Bahari	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	Jalan Dermaga, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara	2535/PU.00.04 Tanggal 1 September 2022			2.062.500.000	5 TAHUN	15/01/2019	14/01/2024	0	34.375.000	0
71	PT Sanjaya Internasional Fishery	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/ Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara	1604/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			1.578.420.000	5 TAHUN	27/12/2021	26/12/2026	36	26.307.000	947.052.000
72	PT Antilope Madju Puri	4.1.04.03.01.0001	TANAH DAN BANGUNAN	PASAR	Jalan Raya Puri Indah Kompleks Perumahan Puri Indah, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat	1598/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			7.694.853.254	5 TAHUN	30/11/2018	29/11/2023	0	128.247.554	0
73	Yayasan Pendidikan Pelita Harapan	4.1.04.03.01.0001	TANAH DAN BANGUNAN	SEKOLAH	Perumahan Daan Mogot Baru Blok Na-1, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat				5.500.000.000	5 TAHUN	01/07/2020	30/06/2025	18	91.666.667	1.558.333.333
74	PT Swadaya Niaga Jaya (Smesco)	4.1.04.03.01.0001	TANAH DAN BANGUNAN	PERKANTORAN	Jalan K.H Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	1599/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			19.284.417.825	5 TAHUN	10/04/2021	10/04/2026	27	321.406.964	4.002.317.746
75	PT Solusi Bangun Beton	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	Pengelolaan semen beton siap pakai (batching plan)	Jalan Ketel I, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara				8.862.000.000	5 TAHUN	08/04/2022	07/04/2027	39	147.700.000	5.760.300.000
76	PD. Sumber Alam	4.1.04.03.01.0001	TANAH	gudang perbekalan	Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke Jalan Dermaga Muara Angke, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	1601/PP.03.13 Tanggal 22 Juni 2022			548.320.000	5 TAHUN	16/02/2021	15/02/2026	25	9.138.667	228.466.667
77	PT. Yoma Mina a.n Yohanes	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	COLD STORAGE	Jl. Dermaga No.1, RT.22/RW.11, Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450				1.083.915.000	5 TAHUN	07/01/2022	08/01/2025	12	18.065.250	216.783.000
78	PT BANK DKI	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN	ATM dan Kantor	DKI 5 Wilayah				78.000.000.000	5 TAHUN	01/03/2022	28/02/2027	38	1.300.000.000	0
79	PT Swadaya Panduarta	4.1.04.03.01.0001	TANAH	Sarana Olahraga	Jalan Kumala Artha Gading Blok D-11, Kawasan Sentra Bisnis dan Hunian Artha Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara	3282/PU.00.04 Tanggal 24 Oktober 2022			658.800.000	5 TAHUN	31/10/2019	30/10/2024	10	10.980.000	109.800.000

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LOKASI ASET	DASAR PENGUNAAN			NILAI PKS	JANGKA WAKTU	MASA SEWA		SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
						No / Tanggal MoU	TANGGAL/NO. SK GUBERNUR	TANGGAL / NO. PERJANJIAN			AWAL	AKHIR			
80	PT Bumi Bintang Bersatu	4.1.04.03.01.0001	TANAH	Sarana Olahraga	Komplek Perumahan Taman Duta Mas, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat				1.264.000.000	5 TAHUN	02/07/2019	02/07/2024	6	21.066.667	126.400.000
81	PT CIPTA KARYA BUMI INDAH	4.1.04.03.01.0001	TANAH	AKSES JALAN	Kompleks gedung World Trade Center (WTC) Mangga Dua, Jalan Mangga Dua Raya nomor 8, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara				1.400.000.000	5 TAHUN	30/11/2018	29/11/2023	0	23.333.333	0
82	PT Pertamina Gas	4.1.04.03.01.0001	TANAH	Penempatan pipa transmisi gas ruang	Jalan Tongkol Kerapu 10, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara				330.000.000	5 TAHUN	02/05/2021	01/05/2026	28	5.500.000	154.000.000
83	PT Indocater	4.1.04.03.01.0001	Jaringan	Jaringan Distribusi Kabel bawah laut untuk distribusi listrik	Pulau Kallage Besar, Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu				3.585.000.000	5 TAHUN	12/02/2021	11/02/2026	25	59.750.000	1.493.750.000
84	Yayasan Tanimbar Lestari	4.1.04.03.01.0001	TANAH DAN BANGUNAN	SEKOLAH	Blok F/S Perumahan Citra Garden 1 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat				150.566.060	5 TAHUN	09/05/2019	08/05/2024	4	2.509.434	10.037.737
85	PT. JAKARTA PROPERTINDO	4.1.4.03.01	TANAH	PEMBANGUNAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DALAM KOTA (INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY)	JL. SUNTER PERMAI RAYA/JL. DANAU SUNTER BARAT, KEL. SUNTER AGUNG, KEC. TANJUNG PRIOK, KOTA ADM. JAKARTA UTARA	14/12/2018 NOMOR 1919 TAHUN 2018		20/12/2018 / NOMOR 4603/076.33	20.535.463.000	5 TAHUN	20/12/2018	19/12/2023	0	342.257.717	0
86	PT. SINERGI BANGUN GLOBAL	4.1.4.03.01	TANAH	LOKASI PERPAKIRAN	JL. ABDUL RAHMAN SALEH 1, KELURAHAN SENEN, KECAMATAN SENEN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT			07/12/2018 / NOMOR 4340/076.33	300.000.000	5 TAHUN	07/12/2018	06/12/2023	0	5.000.000	0
87	LPPOM MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA	4.1.4.03.02	SEBAGIAN TANAH DAN GEDUNG	KANTOR SEKRETARIAT	GEDUNG GRAHA MENTAL SPIRITUAL (GMS) LANTAI 1 YANG TERLETAK DI JL. KH. MAS MANSYUR / JL. H. AWWALUDIN KEL. KEBON MELATI, KEC. TANAH ABANG, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	03/09/2018 / NOMOR 4651/-076.36		15/10/2018 / NOMOR 4651/076.36	25.000.000	5 TAHUN	26/09/2018	25/09/2023	0	416.667	0
88	KOPERASI MINA USAHA SEJAHTERA	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR (SPBB) SOLAR NON SUBSIDI	KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, JL. DERMAGA MUARA ANGKE/JL. Pendaratan Ikan Kel. Pluit, KEC. PENJARINGAN, KOTA ADM. JAKARTA UTARA	24/10/2018 NOMOR 39 TAHUN 2018		07/12/2018 / NOMOR 9210/1.711.31	413.100.000	5 TAHUN	02/05/2019	01/05/2024	4	6.885.000	27.540.000
89	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	4.1.4.03.02	TANAH DAN BANGUNAN	PEMASANGAN JARINGAN SELULER	RUSUN DAAN MOGOT, RUSUN KAPUK MUARA DAN RUSUN MUARA BARU	12/09/2018 NOMOR 33 TAHUN 2018		28/12/2018 NOMOR 5734/-1.817	1.323.600.000	5 TAHUN	12/12/2018	12/12/2023	0	22.060.000	0
90	YAYASAN ATMA JAYA	4.1.4.03.02	SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN	SARANA KESEHATAN	AREAL RUMAH SUSUN SEWA (RUSUNAWA) PENJARINGAN, JL. TANJUNG WANGI RW 06, KELURAHAN PENJARINGAN, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	26/09/2018 NOMOR 46 TAHUN 2018		15/03/2019 / NOMOR 1455/1.711	135.000.000	5 TAHUN	29/08/2018	28/08/2023	0	2.250.000	0
91	MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA PURI INDAH	4.1.4.03.01	TANAH	SARANA IBADAH	JL. PULAU PANTARA IV BLOK N.2 PERUMAHAN TAMAN PERMATA BUANA, KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	09/04/2019 NOMOR 585 TAHUN 2019		28/05/2019 NOMOR 1764/-1.711	250.000.000	5 TAHUN	11/09/2019	10/09/2024	8	4.166.667	33.333.333
92	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	ATM	TERMINAL KAMPUNG RAMBUTAN, KELURAHAN KAMPUNG RAMBUTAN, KECAMATAN CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (KANTOR CABANG JAKARTA KRAMAT JATI)	23/05/2019 NOMOR 42 TAHUN 2019		01/07/2019 NOMOR 2800/076.33	87.000.000	5 TAHUN	09/06/2018	08/06/2023	0	1.450.000	0
93	GEREJA KRISTEN KALAM KUDUS JEMAAT KOSAMBI BARU	4.1.4.03.02	TANAH DAN BANGUNAN	SARANA IBADAH	JL. ANGSOKA UTAMA BLOK D-4, KELURAHAN DURI KOSAMBI, KECAMATAN CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	09/04/2019 NOMOR 588 TAHUN 2019		02/07/2019 NOMOR 2073/-076.33	101.671.500	5 TAHUN	08/08/2018	08/08/2023	0	1.694.525	0
94	PT. Duta Pertiwi Tbk	4.1.4.03.02	BANGUNAN	JEMBATAN PENYEBERANGAN DENGAN PERTOKOAN DAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO)	KAWASAN ITC MANGGA DUA, JALAN MANGGA DUA RAYA, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADM. JAKARTA UTARA DAN KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN, KECAMATAN SAWAH BESAR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	11/03/2019 NOMOR 488 TAHUN 2019		13/05/2019 NOMOR 1527/-076.25	2.400.000.000	5 TAHUN	16/03/2018	15/03/2023	0	40.000.000	0
95	YAYASAN MASJID ASSAHARA KOTA JAKARTA BARAT	4.1.4.03.02	SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN	SARANA IBADAH	KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, JALAN RAYA KEMBANGAN NO. 2, KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	20/06/2019 NOMOR 45 TAHUN 2019		08/07/2019 NOMOR 1979/-076.53	80.000.000	5 TAHUN	15/07/2019	16/07/2024	7	1.333.333	9.333.333
96	YAYASAN AL-AMANAH SUNTER AGUNG	4.1.4.03.01	TANAH DAN BANGUNAN	SARANA PENDIDIKAN	JALAN SUNTER KARYA SELATAN IV BLOK H RT 01 RW 013, KOMPLEK DKI SUNTER AGUNG, KELURAHAN SUNTER AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADM. JAKARTA UTARA	19/07/2019 NOMOR 1173 TAHUN 2019		06/08/2019 NOMOR 2416/-076.11	275.000.000	5 TAHUN	09/01/2019	08/01/2024	0	4.583.333	0
97	YAYASAN KEMUNING PLUS	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN	SARANA IBADAH	KOMPLEK PERUMAHAN GRIYA INTI SENTOSA JALAN GRIYA UTAMA/JALAN GRIYA MANIS, KELURAHAN SUNTER AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADM. JAKARTA UTARA	23/04/2019 NOMOR 682 TAHUN 2019		13/08/2019 NOMOR 2482/-076.36	105.000.000	5 TAHUN	12/07/2019	11/07/2024	6	1.750.000	10.500.000
98	YAYASAN REPEAL JAKARTA BERSATU	4.1.4.03.02	SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN	KANTOR SEKRETARIAT	RUMAH SUSUN Sederhana Karet Tengsin, Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	26/07/2019 NOMOR 55 TAHUN 2019		19/09/2019 NOMOR 5198/-1.796.55	4.657.500	5 TAHUN	26/10/2018	26/10/2023	0	77.625	0
99	PT. TEGAR PRIMAJAYA	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	RUMAH POMPA DAN JALUR INSTALASI PIPA	AREA PINTU AIR BANJIR KANAL TIMUR WEIR-3 MARUNDA, JALAN MARUNDA KECAMATAN CLUNGING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	26/12/2018 NOMOR 69 TAHUN 2018		03/10/2019 NOMOR 4186/-076.1	130.063.000	5 TAHUN	31/01/2019	30/01/2024	0	2.167.717	0
100	YAYASAN BAITURRAHIM	4.1.4.03.01	TANAH	SARANA IBADAH MASHID DAN TPA	KAVLING MARINIR BLOK AE PONDOK KELAPA, KELURAHAN PONDOK KELAPA, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	14/10/2019 NOMOR 1492 TAHUN 2019		31/10/2019 NOMOR 3304/-076.25	20.700.000	5 TAHUN	31/10/2019	30/10/2024	10	345.000	3.450.000
101	PERKUMPULAN PEMBERANTASAN TUBERKULOSIS INDONESIA (PPTI)	4.1.4.03.02	TANAH DAN BANGUNAN	KANTOR SEKRETARIAT	JALAN BALADEWA NO.34 RT 05/RW 05, KELURAHAN TANAH TINGGI, KECAMATAN JOHAR BARU, JAKARTA PUSAT	16/10/2019 NOMOR 1501 TAHUN 2019		23/10/2019 NOMOR 3234/-076.11	18.950.000	5 TAHUN	23/10/2019	23/10/2024	10	315.833	3.158.333
102	YAYASAN PENDIDIKAN PANTARA	4.1.4.03.02	SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN	SARANA PENDIDIKAN	JALAN RADIN INTEN II, DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR	17/01/2019 NOMOR 4 TAHUN 2019		14/03/2019 NOMOR 327 TAHUN 2019	250.000.000	5 TAHUN	14/03/2019	14/03/2024	9	4.166.667	37.500.000
103	YAYASAN AL-HIKMAH TAMAN ARIES	4.1.4.03.02	TANAH DAN BANGUNAN	SARANA IBADAH MASJID	KOMPLEK PERUMAHAN TAMAN ARIES BLOK F1 NO.1 KELURAHAN MERUYA UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	26/09/2019 NOMOR 1410 TAHUN 2019		29/10/2019 NOMOR 3263.1/-076.1	50.000.000	5 TAHUN	01/10/2019	01/10/2024	9	833.333	7.500.000
104	YAYASAN AL MUHSININ ALFA INDAH	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	SARANA PENDIDIKAN	TAMAN ALFA INDAH BLOK I 4, KELURAHAN PETUKANGAN UTARA, KECAMATAN PESANGGRAHAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	10/02/2020 / NOMOR 128 TAHUN 2020		22/04/2020	703.351.600	5 TAHUN	22/04/2020	21/04/2025	16	11.722.527	187.560.427

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LOKASI ASET	DASAR PENGUNAAN			NILAI PKS	JANGKA WAKTU	MASA SEWA		SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
						No / Tanggal MoU	TANGGAL/NO. SK GUBERNUR	TANGGAL / NO. PERJANJIAN			AWAL	AKHIR			
105	YAYASAN PERMATA INDONESIA PERMAI	4.1.4.03.02	SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN	SARANA PENDIDIKAN	PERUMAHAN TUGU PERMAI JALAN H. MURTADHO BLOK B 10 RT 007 RW 002, KELURAHAN TUGU UTARA, KECAMATAN KOJA, KOTA ADM. JAKARTA UTARA		23/12/2019 / NOMOR 1728 TAHUN 2019	06/03/2020 / NOMOR 533/- 076.11	125.000.000	5 TAHUN	19/12/2019	18/12/2024	12	2.083.333	25.000.000
106	YAYASAN MASJID NURUL ISLAM - PONDOK KOPI	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	SARANA IBADAH DAN SARANA PENDIDIKAN	JALAN RAYA PONDOK KOPI BLOK Y11, KELURAHAN PONDOK KOPI, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR			43954	192.522.800	5 TAHUN	05/03/2020	03/04/2025	15	3.208.713	48.130.700
107	YAYASAN PERGURUAN RAKYAT JAKARTA	4.1.4.03.01	TANAH DAN BANGUNAN	SARANA PENDIDIKAN	JL. LAMPIRI RAYA NO. 28 KEL. DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR		14/01/2020 / NOMOR 47 TAHUN 2020	41730	800.000.000	5 TAHUN	02/02/2019	01/02/2024	1	13.333.333	13.333.333
108	DEWAN PIMPINAN PUSAT GEMA SADHANA	4.1.4.03.01	TANAH	SARANA IBADAH	JL. BEDUGUL RW 17, KEL. KALIDERES, KEC. KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		16/07/2020 NOMOR 737 TAHUN 2020	44048	84.700.000	5 TAHUN	22/07/2020	21/07/2025	19	1.411.667	26.821.667
109	YAYASAN MUSEUM SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW DAN PERADABAN ISLAM	4.1.4.03.01	TANAH	MUSEUM	JL. LODAN TIMUR NO 7 KEL. ANCOL, KEC. PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		30 TAHUN	07/10/2020 NOMOR 1015 TAHUN 2020	10.704.567.980	30 TAHUN	23/10/2020	22/10/2050	322	29.734.911	9.574.641.360
110	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AT TABAYYUN	4.1.4.03.01	TANAH	MASJID	TAMAN VILLA MERUYA KELURAHAN MERUYA SELATAN KEC. KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		5 TAHUN	9/10/2020 NOMOR 1021 TAHUN 2020	18.327.000	5 TAHUN	26/10/2020	25/10/2025	22	305.450	6.719.900
111	YAYASAN PUSAT PELATIHAN E & P INDONESIA	4.1.04.03.01.0001	TANAH & BANGUNAN	SARANA PENDIDIKAN	JL PULAU SELAYAR PERUMAHAN PERMATA BUANA BLOK B1.1 KEL. KEMBANGAN UTARA, KEC. KEMBANGAN, KOTA ADM JAKARTA BARAT		22/02/2021 NOMOR 182 TAHUN 2021	16/03/2021 NOMOR 557/- 076.11	2.737.728.500	5 TAHUN	24/08/2018	23/08/2023	0	45.628.808	0
112	PT. PLN	4.1.4.03.01	TANAH	INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN	KEPULAUAN SERIBU		02/09/2020 NOMOR 011/- 076.11	04/01/2021 NOMOR 011/- 076.11	5.527.000	5 TAHUN	04/01/2021	31/12/2026	37	92.117	3.408.317
113	YAYASAN PUSAT PELATIHAN E & P INDONESIA	4.1.04.03.01.0001	TANAH	SARANA PENDIDIKAN	JALAN PULAU TIDUNG PERUMAHAN PERMATA BUANA, KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		04/03/2021 NOMOR 211/2021	20/04/2021 NOMOR 922/076.2	1.380.240.000	5 TAHUN	19/09/2018	18/09/2023	0	23.004.000	0
114	PT. JAKARTA TOURISINDO	4.1.04.03.01.0001	TANAH	BIKE LOUNGE	DI BANJIR KANAL BARAT RT 11/20 KEL. KEBON MELATI, KEC. TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT		28/06/2021 NOMOR 51 TAHUN 2021	24/09/2021 NOMOR 7220/- 076.2	274.000.000	5 TAHUN	24/09/2021	24/09/2026	33	4.566.667	150.700.000
115	YAYASAN TAHFIDZ SULAIMANIYAH	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH & BANGUNAN	SARANA PENDIDIKAN	JALAN KRAMAT JAYA RAYA RW 1, KEL. TUGU UTARA, KEC. KOJA, JAKARTA UTARA		16/09/2021 NOMOR 78 TH 2021	22/10/2021 NOMOR 5665/- 076.35	978.134.000	5 TAHUN	22/10/2021	22/10/2026	34	16.302.233	554.275.933
116	PT. PLN UIP JAWA BAGIAN BARAT	4.1.04.03.01.0001	SEBAGIAN TANAH	TAPAK TOWER	JALAN DERMAGA, NO 1 RT 11/22 KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA		SURAT PERINTAH TUGAS 12/07/2021 NOMOR 676/- 082.74	30/07/2021 NOMOR 4783/- 076	406.400.000	5 TAHUN	18/06/2021	18/06/2026	30	6.773.333	203.200.000
117	PALANG MERAH INDONESIA	4.1.04.03.01.0001	TANAH	LAYANAN KESEHATAN	JALAN KRAMATRAYA NO 47										

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	REKENING	JENIS ASET	PERUNTUKAN	LOKASI ASET	DASAR PENGUNAAN			NILAI PKS	JANGKA WAKTU	MASA SEWA		SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
						No / Tanggal MoU	TANGGAL/NO. SK GUBERNUR	TANGGAL / NO. PERJANJIAN			AWAL	AKHIR			
137	PT Mitra Inti Prima	4.1.4.03.01	TANAH & BANGUNAN	Kegiatan Sarana Olahraga dan Perdagangan beserta Fasilitas Pendukungnya	Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat		542 tanggal 7 Agustus 2023	PKS Akta Notaril 3 tanggal 7 November 2023	45.000.000.000	5 TAHUN	07-Nov-23	06-Nov-28	58	750.000.000	1.500.000.000
138	Yayasan Amaliyah Baiturrahman	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	Sarana ibadah dan Sarana Pendidikan	Jalan Masjid Baiturrahman Nomor 1, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	542 tanggal 7 Agustus 2023	542 tanggal 7 Agustus 2023	PKS Akta Notaril 32 tanggal 13 September 2023	241.325.221	5 TAHUN	13-Sep-23	12-Sep-28	56	4.022.087	225.236.873
139	PT Royal Wahana Nusantara (Royal City Hotel)	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	akses jalan masuk menuju basement parkir basement hotel	Jalan Tomang Raya Nomor 88 Cideng, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat		542 tanggal 7 Agustus 2023	PKS Akta Notaril 69 tanggal 27 September 2023	595.000.000	5 TAHUN	24-Dec-22	23-Dec-27	48	9.916.667	476.000.000
140	Badan Pengelola Kegiatan Dakwah Islam	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	Pesantren dan Kantor Sekretariat	Kompleks Perumahan Pulo Gebang Permai Blok B, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur		542 tanggal 7 Agustus 2023	PKS Akta Notaril 74 tanggal 26 Oktober 2023	46.888.050	5 TAHUN	26-Oct-23	25-Oct-28	58	781.468	45.325.115
141	Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kedoya	4.1.4.03.01	TANAH & BANGUNAN		Perumahan Taman Kedoya Baru. Jalan Kedoya Angsana Raya Blok D-8, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat	542 tanggal 7 Agustus 2023	542 tanggal 7 Agustus 2023	PKS Akta Notaril 02 tanggal 6 Oktober 2023	360.000.000	5 TAHUN	15-Nov-22	14-Nov-27	46	6.000.000	276.000.000
142	MUI Kota Administrasi Jakarta Utara	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH		Jalan Melur I No. 4 RT 006 RW 013. Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara	542 tanggal 7 Agustus 2023	542 tanggal 7 Agustus 2023	PKS Akta Notaril 22 tanggal 6 November 2023	30.000.000	5 TAHUN	05-May-20	04-May-25	16	500.000	8.000.000
143	PT Energi Makmur Buana	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	Kantin, Parkir, dan Taman	Jalan Perintis Kemerdekaan, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur		542 tanggal 7 Agustus 2023	PKS Akta Notaril 7 tanggal 3 November 2023	1.385.200.000	5 TAHUN	03-Nov-23	02-Nov-28	58	23.086.667	1.339.026.667
144	MUI Kota Administrasi Jakarta Selatan	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	Kantor Sekretariat	Jalan Ciputat Raya RT 12 RW 8 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamata Kebayoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan		542 tanggal 7 Agustus 2023	PKS Akta Notaril 10 tanggal 7 November 2023	20.000.000	5 TAHUN	07-Nov-23	06-Nov-28	58	333.333	19.333.333
145	PT Central Sudirman Development	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	Pemasangan angkur tanah tanah sebagai perkuatan galian pada proyek Oasis Central Sudirman	Jalan Karet Pasar Baru Timur III, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat		542 tanggal 7 Agustus 2023	PKS Akta Notaril nomor 30 tanggal 7 November 2023	1.152.000.000	5 TAHUN	07-Nov-23	06-Nov-28	58	19.200.000	1.113.600.000
146	PT CATUR MANUNGAL JATI MOTOR	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	area perbengkelan	Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 12, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta selatan		SK nomor 8 tanggal 8 November 2023	851/PKS/JAMC/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023	1.315.579.000	5 TAHUN	4-Dec-2023	03-Dec-28	59	21.926.317	1.293.652.683
147	PT LIVERPOOL INDONESIA	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	Aktivitas Penunjang Pendidikan	Jalan Bantar Jati (Lingkar Luar Selatan), Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur			PKS Akta Notaril 174 tanggal 23 November 2023	3.210.000.000	5 TAHUN	23-Nov-23	22-Nov-28	59	53.500.000	3.156.500.000
148	PT Cahaya Mega Kuningan	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	taman atau ruang terbuka hijau	Kawasan Mega Kuningan, Jalan Besakih, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan		SK Sekda nomor 132 tanggal 13 November 2023	PKS Akta Notaril nomor 53 tanggal 22 November 2023	150.000.000	5 TAHUN	22-Nov-23	21-Nov-28	59	2.500.000	147.500.000
149	PT BANK NEGARA INDONESIA	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	ATM			SK Sekda nomor 129 tanggal 31 Oktober 2023	PKS Akta Notaril tanggal 4 Desember 2023	104.690.000	5 TAHUN	04-Dec-23	03-Dec-28	59	1.744.833	102.945.167
150	PT Astra Honda Motor	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	aktivitas penunjang kegiatan operasional perusahaan	Jalan Pegangsaan Dua, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara		SK Kepala UP JAMC nomor 25 tahun 2023 tanggal 7 Desember 2023	889/PKS/JAMC/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023	1.811.000.000	5 TAHUN	12-Dec-23	11-Dec-28	59	30.183.333	1.780.816.667
151	PT Graha Royal Properti	4.1.4.03.01	SEBAGIAN TANAH	Rumah Makan/Restoran	Jalan Kembangan Raya, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat		SK Kepala UP JAMC nomor 17 tahun 2023 tanggal 29 November 2023	892/PKS/JAMC/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023	4.141.260.000	5 TAHUN	13-Dec-23	12-Dec-28	59	69.021.000	4.072.239.000
152	Erwanto (RW 11)	4.1.4.03.01	TANAH	Sarana Olahraga (Lapangan Bulu Tangkis)	Jl Trimaran Indah Blok II J.2A Pantan Indah Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara		SK Kepala UP JAMC nomor 24 tahun 2023 tanggal 7 Desember 2023	906/PKS/JAMC/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023	80.000.000	5 TAHUN	18-Dec-23	17-Dec-28	60	1.333.333	80.000.000
153	PT. GLD PROPERTY	4.1.4.03.01	TANAH	Jalan	Jalan MHT Gang XI Kebon Sirih Timur, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat		542 tanggal 7 Agustus 2023		1.378.939.000	5 TAHUN	02-Nov-22	01-Nov-27	46	22.982.317	0
TOTAL															112.033.643.034

PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA HASIL DARI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA

PER 31 DESEMBER 2023

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	PKS NO & TANGGAL	JANGKA WAKTU PKS	JANGKA WAKTU SEWA BERJALAN	KONTRIBUSI TAHUN 2023	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN PER 31 DESEMBER 2023	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DESEMBER 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA BANGUN GUNA SERAH								
1	PT. Duta Pertiwi	BOT Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakut (JPO antara Gedung Dusit Mangga Dua & Mal Mangga Dua)	PKS Tgl 13 Maret 2008	25 Tahun	09/11/2023 08/11/2024	336.480.000	10	28.040.000	280.400.000
2	PT. Bakrie Investindo	BOT Kawasan GOR Mahaiswa Soemantri Brodionegoro Kuningan JakSel (sarana olahraga an fasilitas komersil)	PKS Tgl 22 Agustus 1992	48 Tahun	10/12/2014 10/12/2015	2.052.000.000	0	171.000.000	-
3	PT. Fajar Setia Mandiri	BTO Jl. D.I Panaitan Kel. Cipinang Besar Kec. Jatinegara Jakarta Timur (Stasiun Penjualan Bahan Bakar Umum)	PKS No. 734/073.511 Tgl 28 Maret 2003	20 Tahun	28/03/2014 27/04/2022	105.000.000	0	8.750.000	-
4	PT. Metropolitan Kentiana	Antara Pondok Indah Mal I & II Jl.Metro Pondok Indah Kec. Keb lama Jaksel (Jembatan Multiguna)	PKS Tgl 4 April 2008	25 Tahun	01/02/2024	1.085.000.000	1	90.416.667	90.416.667
5	PT. WAHANA	BOT JL. HR RASUNA SAID KAV. C22, KEL. KARET KUNINGAN, KEC. HOTEL	PKS NO. 02/ARG/WN/X/2017	30 TAHUN	09/09/2017 08/09/2047	45.560.339.000	284	126.556.497	35.942.045.211
6	PT Rointa Eka Java	BOT Kawasan Pasar Tanah Abang JakPus (Jembatan Multiguna antara Blok B Pasar Tanah Abang dengan Pertokoan di sisi Timur Jln. Fakhruddin)	PKS No. 27 Tahun 2001 Tgl 30 Maret 2001	30 Tahun	30/03/2014 29/03/2031	41.666.667	87	3.472.222	302.083.333
7	PT. Duta Pertiwi (1999)	BOT Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar JakPus (JPO beserta fasilitas pertokoan antara Gedung ITC dan Gedung Mal Mangga Dua)	PKS No. 65 Tahun 1999 Tgl 13 September 1999	30 Tahun	13/09/2014 12/09/2029	31.666.667	68	3.194.444	217.222.192
8	PT. Duta Pertiwi (2003)	BOT Jln. Aquarium Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar JakPus (jembatan multiguna antara Gedung Harcomas Mangga Dua dengan Mal Mangga Dua)	PKS Tgl 14 Mei 2003 Addendum Tgl 30 Agustus 2005	25 Tahun	29/12/2004 13/05/2028	1.500.000.000	52	5.000.000	260.000.000
9	PT. Gading Raya	BOT Kawasan Pasar Tanah Abang JakPus (jembatan multiguna antara Blok A & Bangunan Sisi Timur & bangunan sisi utara Pasar Tn. Abang JakPus)	PKS Tgl 27 Oktober 2004	25 Tahun	27/10/2014 26/10/2029	3.500.000.000	70	11.666.667	816.666.690
10	PT. AGB Tuna (cold storage)	BOT Jln. Dermaga Kavling I (Muara Angke) Kel. Pluit Kec. Penjaringan JakUtara (pembangunan & pengelolaan Cold Storage beserta sarana pelengkapnnya)	PKS Tgl 28 Feb 2004	20 Tahun	28/02/2014 27/02/2024	600.000.000	2	2.500.000	5.000.000
11	PT. AGB Tuna (pabrik es)	BOT Jln. Pelelangan (Muara Angke) Kel. Pluit Kec. Penjaringan JakUtara (pembangunan & pengelolaan pabrik es beserta sarana pelengkapnnya)	PKS Tgl 21 November 2006	20 Tahun	21/11/2014 20/11/2026	450.000.000	35	1.875.000	65.625.000
12	PT. Pasific Banqun Mas	BOT Jl. Ciledug Raya Jakarta Selatan (Jembatan Multiguna Antara Pasar Cipulir dengan Cipulir Plaza)	PKS No. 40 Tahun 2001 Tgl 1 Mei 2001	25 Tahun	01/05/2014 30/04/2026	250.000.000	28	833.333	23.333.324
13	PT. Perwita Margasakti	BOT Jln. Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi JakSel (jembatan multiguna antara Mal Ambassador & ITC Kuningan Jaksel)	PKS Tgl 8 Oktober 2003	25 Tahun	08/10/2013 08/10/2028	2.500.000.000	57	8.333.333	474.999.981
14	PT. Wahana Cipta	BOT Jl. Letjen Sutoyo Kav.76/ Jl. Dewi Sartika (Eks Terminal Cililitan) Jakarta (Jembatan Multiguna Antara Gedung Pertokoan (Bangunan A) & Gedung	PKS Tgl 7 April 2004	25 Tahun	07/04/2014 06/04/2029	94.000.000	63	7.833.333	493.500.000
15	PT. Grand Indonesia	BOT Jl. Teluk Betung Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat	PKS tanggal 4 Mei 2009 18 JAN 08 S/D 31 DES 2035	28 TAHUN	19/01/2024	2.655.000.000	1	221.250.000	221.250.000
16	Hotel Cikini Realty	BOT Jl. Cikini Raya No. 75 Kec. Menteng Jakarta Pusat	PKS tanggal 17 Juli 2006 8 Agustus 2008 S/D 8 Agustus 2033	25 TAHUN	01/01/2024	300.000.000	0	25.000.000	-
17	PT PERWITA	BOT Jln. Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi JakSel (jembatan multiguna antara Mal Ambassador & ITC Kuningan Jaksel)	PKS tgl 12 April 2010	25 tahun	20/02/2024	209.000.000	2	17.416.667	34.833.333
18	PT JAYA REAL	BOT Jl. Pasar Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat	PKS tanggal 11 Nopember 2011 1 MARET 2012 S.D 28 FEB 2037	25 TAHUN	01/03/2024	232.000.000	2	19.333.333	38.666.667
JUMLAH PDM PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA BANGUN GUNA SERAH (BOT)									39.266.042.398

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	PKS NO & TANGGAL	JANGKA WAKTU PKS	JANGKA WAKTU SEWA BERJALAN	KONTRIBUSI TAHUN 2023	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN PER 31 DESEMBER 2023	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DESEMBER 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA BANGUN SERAH GUNA									
1	Yayasan Tunas Muda	BTO Jl. Kedoya Angsana Raya Blok D-8 No.2 Kompleks Taman Kedoya Baru, Kel. Kedoya Selatan Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat. (Sarana Pendidikan)	PKS Tgl 19 September 2000	25 Tahun	19/09/2014 18/11/2024	108.887.747	11	9.073.979	99.813.768
2	Yayasan Patmos	BTO Perumahan Taman Meruya Ilir (Utara) Blok E.7 Kec. Kembangan Jakarta Barat (sarana pendidikan)	PKS No. 210/073.551 Tgl 6 Pebruari 2003 Addendum No. 25/AK/BP/VI/2006 Tgl 1 Juni 2006	25 Tahun	08/03/2024	172.613.561	2	14.384.463	28.768.927
3	Yayasan Pusat Pelatihan	BTO Jl. Pulau Sebaru Perumahan Permata Buana Blok L4, Kec. Kembangan Jakarta Barat (sarana pendidikan)	PKS No. 130/073.511 Tgl 28 Januari 2003 BAST Bandunan Tgl. 8 Pebruari 2006	25 Tahun	28/01/2014 27/02/2024	818.152.359	2	68.179.363	136.358.727
4	PT. Fajar Setia Mandiri	BTO Jl. D.I Panjaitan Kel. Cipinang Besar Kec. Jatinegara Jakarta Timur (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)	PKS No. 734/073.511 Tgl 28 Maret 2003	20 Tahun	28/03/2014 27/04/2022	105.000.000	0	8.750.000	-
5	PT. Gamma Investa	BTO Kompleks Bola Basket Internasional Sport Mall di Jl. Raya Kelapa Nias Blok HF 3 Kel. Kelapa Gadling Barat, Jakarta Utara. (Sarana Olahraga)	PKS No. 15/AK/BP/III/2006 Tanggal 24 Maret 2006	25 Tahun	13/05/2023 13/05/2024	731.000.000	4	60.916.667	243.666.667
6	Yayasan Pendidikan Bukit	BTO Kompleks Taman Kebon Jeruk Blok G.VII Kel. Srengseng Kec. Kembangan Sarana Pendidikan	PKS No. 37/AK/BP/IX/2006 Tanggal 6 September 2006 PKS Addendum Tanggal 26 Oktober 2010	25 Tahun	06/10/2024	259.963.733	9	21.663.644	194.972.800
7	PT FAJAR SETIA	BTO JL. DANAU SUNTER SELATAN, KEL. SUNTER JAYA KEC. TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA (SPBU)	PKS No. 1500/073.511 Tanggal 10 Mei 2002.	25 TAHUN	09/09/2024	100.000.000	8	8.333.333	66.666.667
8	YAYASAN PENDIDIKAN	BTO KOMPLEKS TAMAN ALFA INDAH BLOK A.9 KEL. JOGLO KEC. KEMBANGAN, JAKARTA BARAT	PKS No. 424/073.511 Tanggal 31 Mei 2001 Addendum No. 05/073.511 Tanggal 23 Juli 2004	25 TAHUN	05/05/2024	44.289.025	4	3.690.752	14.763.008
9	PT PESONA MARGA	BTO JL. PETAK BARU PASAR PAGI, KEL. ROA MALAKA KEC. TAMBORA, JAKARTA BARAT	PKS Tanggal 21 Agustus 2003 Addendum Tanggal 30 Desember 2004	25 TAHUN	12/05/2024	326.095.000	4	27.174.583	108.698.333
10	Yayasan Pendidikan Tiara	BTO Jl. Dharma Grilia Kompleks Taman Semanan Indah Blok C.1 Kel.Semanan	PKS No. 256/073.511 Tanggal 30 Januari 2001. Addendum No. 03/AK/BP/I/2005 Tanggal 3 Januari		30/01/24	203.742.000	1	16.978.500	16.978.500
JUMLAH PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA BANGUN SERAH GUNA (BTO)									910.687.396

**DAFTAR UTANG BELANJA PEGAWAI
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023**

NO URUT	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4-5-6)	8	9 = (7+8)
1	Dinas Pendidikan	295.777.249.748	0	0	295.777.249.748	0	290.346.651.230	290.346.651.230
2	Dinas Kesehatan	124.565.506.350	0	0	124.565.506.350	0	120.763.405.322	120.763.405.322
3	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	629.679.329	0	0	629.679.329	0	-	-
4	Dinas Bina Marga	9.594.306.963	0	0	9.594.306.963	0	9.987.718.969	9.987.718.969
5	Dinas Sumber Daya Air	9.168.812.610	0	0	9.168.812.610	0	9.328.657.233	9.328.657.233
6	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	10.894.959.149	0	0	10.894.959.149	0	10.974.299.964	10.974.299.964
7	Permukiman	7.348.531.247	0	0	7.348.531.247	0	7.277.019.247	7.277.019.247
8	Satuan Polisi Pamong Praja	44.586.451.232	0	0	44.586.451.232	0	46.566.810.330	46.566.810.330
9	Penyelamatan	41.243.951.959	0	0	41.243.951.959	0	43.862.423.773	43.862.423.773
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.604.822.833	0	0	1.604.822.833	0	1.671.132.999	1.671.132.999
11	Dinas Sosial	14.716.118.677	0	0	14.716.118.677	0	14.634.847.714	14.634.847.714
12	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	11.822.936.184	0	0	11.822.936.184	0	11.129.674.061	11.129.674.061
13	Pengendalian Penduduk	9.678.678.707	0	0	9.678.678.707	0	8.740.349.439	8.740.349.439
14	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	8.313.928.223	0	0	8.313.928.223	0	7.699.203.183	7.699.203.183
15	Dinas Lingkungan Hidup	11.921.566.327	0	0	11.921.566.327	0	11.522.584.382	11.522.584.382
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.935.427.619	0	0	9.935.427.619	0	9.941.589.776	9.941.589.776
17	Dinas Perhubungan	24.509.957.058	0	0	24.509.957.058	0	23.500.593.377	23.500.593.377
18	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	6.141.824.761	0	0	6.141.824.761	0	6.226.662.764	6.226.662.764
19	Satu Pintu	30.905.207.452	0	0	30.905.207.452	0	30.546.390.625	30.546.390.625
20	Dinas Pemuda Dan Olahraga	5.365.987.120	0	0	5.365.987.120	0	5.697.400.391	5.697.400.391
21	Dinas Kebudayaan	6.355.481.854	0	0	6.355.481.854	0	6.236.312.697	6.236.312.697
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.211.356.956	0	0	5.211.356.956	0	5.466.822.186	5.466.822.186
23	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5.403.678.297	0	0	5.403.678.297	0	5.263.434.111	5.263.434.111
24	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	10.884.128.164	0	0	10.884.128.164	0	10.688.316.243	10.688.316.243
25	Kecil Dan Menengah	7.480.618.916	0	0	7.480.618.916	0	7.641.077.295	7.641.077.295
26	Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah	15.606.803.077	0	0	15.606.803.077	0	33.011.774.129	33.011.774.129
27	Sekretariat DPRD	2.210.349.510	0	0	2.210.349.510	0	2.241.256.477	2.241.256.477
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.905.835.326	0	0	5.905.835.326	0	5.687.460.754	5.687.460.754
29	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.392.025.493	0	0	6.392.025.493	0	6.060.020.665	6.060.020.665
30	Badan Pengelolaan Aset Daerah	5.957.276.061	0	0	5.957.276.061	0	6.306.529.542	6.306.529.542

NO URUT	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4-5-6)	8	9 = (7+8)
31	Badan Pendapatan Daerah	16.738.777.278	0	0	16.738.777.278	0	16.793.115.966	16.793.115.966
32	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	4.140.763.626	0	0	4.140.763.626	0	4.306.738.601	4.306.738.601
33	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	1.197.049.233	0	0	1.197.049.233	0	1.312.882.959	1.312.882.959
34	Badan Kepegawaian Daerah	6.185.490.813	0	0	6.185.490.813	0	6.058.707.137	6.058.707.137
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.015.838.908	0	0	3.015.838.908	0	2.954.282.802	2.954.282.802
36	Inspektorat	6.864.845.500	0	0	6.864.845.500	0	6.971.901.549	6.971.901.549
37	Kota Administrasi Jakarta Pusat	14.948.265.058	0	0	14.948.265.058	0	14.703.787.037	14.703.787.037
38	Kota Administrasi Jakarta Utara	11.919.859.731	0	0	11.919.859.731	0	12.135.444.927	12.135.444.927
39	Kota Administrasi Jakarta Barat	17.460.058.702	0	0	17.460.058.702	0	17.699.578.704	17.699.578.704
40	Kota Administrasi Jakarta Selatan	22.489.732.588	0	0	22.489.732.588	0	22.878.280.751	22.878.280.751
41	Kota Administrasi Jakarta Timur	23.758.417.329	0	0	23.758.417.329	0	25.036.487.664	25.036.487.664
42	Seribu	4.887.666.035	0	0	4.887.666.035	0	4.733.489.297	4.733.489.297
43	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.992.984.380	0	0	2.992.984.380	0	3.158.019.054	3.158.019.054
UTAN		886.733.206.383	0	0	886.733.206.383	0	897.763.135.326	897.763.135.326

DAFTAR UTANG BELANJA BARANG, BELANJA JASA, DAN BELANJA MODAL
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
Utang Belanja Barang									
1	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	536.040.469	0	421.730.876	0	114.309.593	0	114.309.593
2	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin	63.756.000	0	0	63.756.000	0	0	0
3	Dinas Pendidikan	Unit Pengelola Prasarana Dan Sarana Pendidikan	0	0	0	0	0	421.730.876	421.730.876
4	Dinas Sumber Daya Air	Dinas Sumber Daya Air	1.522.418.774	0	0	0	1.522.418.774	8.818.284.682	10.340.703.456
5	Dinas Sosial	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	21.582.500	0	0	21.582.500	0	0	0
6	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Pengelola Sampah Terpadu	0	0	0	0	0	689.106.175	689.106.175
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	149.993	0	0	149.993	0	0	0
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	0	0	0	0	0	4.370.000	4.370.000
9	Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	0	0	0	0	0	2.268.000	2.268.000
10	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0	0	0	391.000	391.000
11	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Krendang - Jakbar	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
12	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Jembatan Lima - Jakbar	0	0	0	0	0	416.210.210	416.210.210
13	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Jatipadang - Jaksel	0	0	0	0	0	11.442.962	11.442.962
Jumlah Utang Belanja Barang			2.143.947.736	0	421.730.876	85.488.493	1.636.728.367	10.365.603.905	12.002.332.272
Utang Belanja Jasa Non TALI									
1	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	879.946.537	0	879.946.537	0	0	0	0
2	Dinas Kesehatan	Unit Pengelola Prasarana Dan Sarana Pendidikan	0	0	0	0	0	879.946.537	879.946.537
3	Dinas Kesehatan	Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta	0	0	0	0	0	115.735.475.300	115.735.475.300
4	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara - Jaktim	960.000	0	0	960.000	0	745.724.472	745.724.472
5	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok	0	0	0	0	0	595.782.961	595.782.961
6	Dinas Sumber Daya Air	Dinas Sumber Daya Air	96.299.500	0	0	77.000.000	19.299.500	0	19.299.500
7	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	0	0	0	0	0	142.578.079	142.578.079
8	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	98.095.489	93.840.725	0	106.845.714	85.090.500	87.356.826	172.447.326
9	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	21.677.562	0	0	0	21.677.562	0	21.677.562
10	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0	0	0	189.023.225	189.023.225
11	Dinas Sosial	Dinas Sosial	0	0	0	0	0	10.535.412	10.535.412
12	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat	277.964	0	0	277.964	0	0	0
13	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Pusat Pengembangan Benih Dan Proteksi Tanaman	17.504.932	0	0	17.504.932	0	0	0
14	Dinas Lingkungan Hidup	Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	0	0	0	0	0	98.338.826	98.338.826
15	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Pengelola Sampah Terpadu	169.221.078	0	0	169.221.078	0	0	0
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	464.186	0	0	464.186	0	0	0
17	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	705.008.625	0	0	0	705.008.625	0	705.008.625

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
18	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan	91.491.500	0	0	91.491.500	0	18.326.656	18.326.656
19	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung	6.336.191	0	0	6.336.191	0	0	0
20	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Angkutan Perairan	0	0	0	0	0	54.843.268	54.843.268
21	Dinas Perhubungan	Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah	58.750.080	0	0	58.750.080	0	0	0
22	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.864.425.632	0	0	1.864.425.632	0	0	0
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	88.990.000	0	88.990.000	0	0	0	0
24	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	42.633.391	0	0	42.633.391	0	0	0
25	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Gambir - Jakpus	0	0	0	0	0	1.176.314	1.176.314
26	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Tugu Utara - Jakut	5.379.987	0	0	5.379.987	0	0	0
27	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Kelapa Gading Barat - Jakut	65.992.333	0	0	65.992.333	0	0	0
28	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat	58.630.755	0	0	58.630.755	0	0	0
29	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Jembatan Lima - Jakbar	0	0	0	0	0	2.697.300	2.697.300
Jumlah Utang Belanja Jasa Non Tali			4.272.085.742	93.840.725	968.936.537	2.565.913.743	831.076.187	118.561.805.176	119.392.881.363
Utang Belanja TALI									
1	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	200.812.735	0	0	200.812.735	0	4.651.564	4.651.564
2	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakarta	2.421.672	0	0	2.421.672	0	1.218.440	1.218.440
3	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakarta	1.649.570	0	0	1.649.570	0	0	0
4	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakut	12.451.262	0	0	12.451.262	0	11.751.906	11.751.906
5	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakarta	2.551.196	0	0	2.551.196	0	2.692.152	2.692.152
6	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakarta	0	0	0	0	0	165.478	165.478
7	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota - Jakarta	13.274.464	0	0	13.274.464	0	8.079.083	8.079.083
8	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - Jakarta	0	0	0	0	0	7.052.500	7.052.500
9	Dinas Pendidikan	Suku Dinas Pendidikan Kabupaten - Kep. Seribu	26.675.604	0	0	26.675.604	0	69.695.545	69.695.545
10	Dinas Pendidikan	Pusat Pelayanan Pendanaan Personal Dan Operasional Pendidikan	19.429.510	0	0	19.429.510	0	0	

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
28	Dinas Pendidikan	Unit Pengelola Prasarana Dan Sarana Pendidikan	0	0	0	0	0	13.484.782	13.484.782
29	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	18.182.675	0	0	18.182.675	0	0	0
30	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	33.779.227	0	4.053.802	29.725.425	0	0	0
31	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara	7.040.249	0	0	7.040.249	0	6.854.099	6.854.099
32	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	2.574.455	0	0	2.574.455	0	3.705.656	3.705.656
33	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	27.454.485	0	0	27.454.485	0	27.623.262	27.623.262
34	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	11.677.180	0	0	11.677.180	0	11.752.915	11.752.915
35	Dinas Kesehatan	Laboratorium Kesehatan Daerah	0	0	0	0	0	242.388.618	242.388.618
36	Dinas Kesehatan	Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah	24.881.568	0	0	24.881.568	0	0	0
37	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanah Abang - Jakpus	50.448.070	0	0	50.448.070	0	63.754.181	63.754.181
38	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menteng - Jakpus	41.107.551	0	0	41.107.551	0	48.339.183	48.339.183
39	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Senen - Jakpus	39.166.419	0	0	39.166.419	0	33.485.122	33.485.122
40	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus	45.800.192	0	0	45.800.192	0	56.829.993	56.829.993
41	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru - Jakpus	50.228.165	0	0	50.228.165	0	50.435.801	50.435.801
42	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sawah Besar - Jakpus	43.650.189	0	0	43.650.189	0	43.158.066	43.158.066
43	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Gambir - Jakpus	37.938.782	0	0	37.938.782	0	39.310.230	39.310.230
44	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pademangan - Jakut	0	0	0	0	0	26.729.326	26.729.326
45	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok - Jakut	0	0	0	0	0	77.247.158	77.247.158
46	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kelapa Gading - Jakut	0	0	0	0	0	45.625.270	45.625.270
47	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing - Jakut	71.131.564	0	0	71.131.564	0	67.573.904	67.573.904
48	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora - Jakbar	0	0	0	0	0	49.522.711	49.522.711
49	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari - Jakbar	0	0	0	0	0	34.896.380	34.896.380
50	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Lama - Jaksel	48.610.625	0	0	48.610.625	0	0	0
51	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel	36.201.457	0	0	36.201.457	0	36.432.874	36.432.874
52	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel	32.747.051	0	0	32.747.051	0	47.180.061	47.180.061
53	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa - Jaksel	45.561.682	0	0	45.561.682	0	0	0
54	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel	43.088.259	0	0	43.088.259	0	48.960.195	48.960.195

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
55	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran - Jaksel	41.666.582	0	0	41.666.582	0	56.021.161	56.021.161
56	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel	53.007.360	0	0	53.007.360	0	55.605.483	55.605.483
57	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Setiabudi - Jaksel	36.835.449	0	0	36.835.449	0	38.971.331	38.971.331
58	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilandak - Jaksel	44.659.552	0	0	44.659.552	0	47.827.007	47.827.007
59	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim	55.309.775	0	0	55.309.775	0	53.805.554	53.805.554
60	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas - Jaktim	45.722.816	0	0	45.722.816	0	49.294.093	49.294.093
61	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung - Jaktim	67.663.465	0	0	67.663.465	0	90.278.242	90.278.242
62	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati - Jaktim	0	0	0	0	0	71.959.252	71.959.252
63	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makasar - Jaktim	79.740.288	0	0	79.740.288	0	61.338.406	61.338.406
64	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara - Jaktim	73.215.017	0	0	73.215.017	0	75.269.891	75.269.891
65	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman - Jaktim	52.779.219	0	0	52.779.219	0	62.673.331	62.673.331
66	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pulo Gadung - Jaktim	0	0	0	0	0	48.536.957	48.536.957
67	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung - Jaktim	85.695.942	0	0	85.695.942	0	80.277.081	80.277.081
68	Dinas Kesehatan	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu	0	0	0	0	0	20.054.080	20.054.080
69	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu	22.228.840	0	0	22.228.840	0	22.446.730	22.446.730
70	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	1.008.677.130	0	0	1.008.677.130	0	0	0
71	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	0	0	0	0	0	766.400.117	766.400.117
72	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	509.855.816	0	0	509.855.816	0	569.705.970	569.705.970
73	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	526.023.601	0	0	526.023.601	0	0	0
74	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar	67.872.435	0	0	67.872.435	0	0	0
75	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	51.143.190	0	0	51.143.190	0	0	0
76	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	77.306.228	0	0	77.306.228	0	80.604.189	80.604.189
77	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing	0	0	0	0	0	551.001	551.001
78	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan	70.082.866	0	0	70.082.866	0	107.885.100	107.885.100
79	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	73.539.904	0	0	73.539.904	0	303.892.882	303.892.882
80	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	41.804.638	0	0	41.804.638	0	0	0
81	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan	55.805.350	0	0	55.805.350	0	62.342.220	62.342.220
82	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan	66.024.542	0	0	66.024.542	0	65.786.475	65.786.475
83	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Tamansari	115.493.122	0	0	115.493.122	0	56.996.020	56.996.020
84	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok	69.146.235	0	0	69.146.235	0	75.192.275	75.192.275
85	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru	58.466.763	0	0	58.466.763	0	60.801.143	60.801.143
86	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang	81.382.060	0	0	81.382.060	0	71.604.819	71.604.819
87	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama	58.721.800	0	0	58.721.800	0	62.417.380	62.417.380
88	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung	0	0	0	0	0	58.052.290	58.052.290
89	Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga	19.678.146.068	0	0	19.678.146.068	0	20.580.500.451	20.580.500.451
90	Dinas Bina Marga	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakpus	49.723.201	0	0	49.723.201	0	42.354.175	42.354.175
91	Dinas Bina Marga	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakut	0	0	0	0	0	5.639.523	5.639.523

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
92	Dinas Bina Marga	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakbar	16.901.091	0	0	16.901.091	0	21.419.017	21.419.017
93	Dinas Bina Marga	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaksel	50.082.583	0	0	50.082.583	0	50.082.583	50.082.583
94	Dinas Bina Marga	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jaktim	20.189.856	0	0	20.189.856	0	18.402.016	18.402.016
95	Dinas Sumber Daya Air	Dinas Sumber Daya Air	7.010.497.932	0	0	7.010.497.932	0	9.668.833.170	9.668.833.170
96	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	282.825.246	0	0	282.825.246	0	307.977.749	307.977.749
97	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	4.511.137	0	0	4.511.137	0	119.493.912	119.493.912
98	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten - Kep. Seribu	682.650	0	0	682.650	0	0	0
99	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Pusat Data Dan Informasi Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1.048.950	0	0	1.048.950	0	0	0
100	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Unit Pengelola Rumah Susun I	4.122.651	0	0	4.122.651	0	0	0
101	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Unit Pengelola Rumah Susun Ii	743.365	0	0	743.365	0	136.058	136.058
102	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Unit Pengelola Rumah Susun Iii	2.897.096	0	0	2.897.096	0	216.450	216.450
103	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Unit Pengelola Rumah Susun V	89.659.740	0	0	89.659.740	0	106.840.840	106.840.840
104	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Unit Pengelola Rumah Susun Vi	608.883.982	0	0	608.883.982	0	0	0
105	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Unit Pengelola Rumah Susun Vii	8.061.267	0	0	8.061.267	0	0	0
106	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Unit Pengelola Rumah Susun Viii	4.361.345	0	0	4.361.345	0	0	0
107	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	6.621.369	0	0	6.621.369	0	1.042.274	1.042.274
108	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara	189.376	0	0	189.376	0	127.134	127.134
109	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat	11.484.883	0	0	11.484.883	0	7.737.690	7.737.690
110	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan	2.536.488	0	0	2.536.488	0	485.276	485.276
111	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	303.102.206	0	0	303.102.206	0	354.487.083	354.487.083
112	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	42.819.129	0	0	42.819.129	0	0	0
113	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	0	0	0	0	0	47.657.153	47.657.153
114	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	87.745.593	0	0	87.745.593	0	0	0
115	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	0	0	0	0	0	108.513.801	108.513.801
116	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	101.927.357	0	0	101.927.357	0	0	0
117	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	0	0	0	0	0	111.803.753	111.803.753
118	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	106.871.085	0	0	106.871.085	0	0	0
119	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta	0	0	0	0	0	129.028.525	129.028.525

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
120	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	88.204.457	0	0	88.204.457	0	0	0
121	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	0	0	0	94.421.894	94.421.894
122	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Laboratorium Kebakaran Dan Penyelamatan	17.732.203	0	0	17.732.203	0	16.362.513	16.362.513
123	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	65.665.287	0	0	65.665.287	0	87.982.800	87.982.800
124	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pusat Data Dan Informasi Kebencanaan	2.574.206	0	0	2.574.206	0	0	0
125	Dinas Sosial	Dinas Sosial	123.205.535	0	0	123.205.535	0	132.481.120	132.481.120
126	Dinas Sosial	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	0	0	0	0	0	6.539.012	6.539.012
127	Dinas Sosial	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	10.725.286	0	0	10.725.286	0	12.993.654	12.993.654
128	Dinas Sosial	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	0	0	0	0	0	6.383.970	6.383.970
129	Dinas Sosial	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.515.638	0	0	1.515.638	0	0	0
130	Dinas Sosial	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	20.371.714	0	0	20.371.714	0	25.651.848	25.651.848
131	Dinas Sosial	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	24.788.403	0	0	24.788.403	0	31.354.363	31.354.363
132	Dinas Sosial	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	79.686	0	0	79.686	0	8.682.753	8.682.753
133	Dinas Sosial	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	0	0	0	0	0	22.334.812	22.334.812
134	Dinas Sosial	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3	11.064.128	0	0	11.064.128	0	0	0
135	Dinas Sosial	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	0	0	0	0	0	19.830.960	19.830.960
136	Dinas Sosial	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2	0	0	0	0	0	31.991.698	31.991.698
137	Dinas Sosial	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	23.717.365	0	0	23.717.365	0	21.410.153	21.410.153
138	Dinas Sosial	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	15.107.229	0	0	15.107.229	0	16.444.461	16.444.461
139	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Netra Dan Rungu Wicara Cahaya Batin	12.165.113	0	0	12.165.113	0	15.167.818	15.167.818
140	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	11.146.951	0	0	11.146.951	0	16.224.617	16.224.617
141	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	19.831.521	0	0	19.831.521	0	18.831.460	18.831.460
142	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	0	0	0	0	0	24.039.327	24.039.327
143	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	0	0	0	0	0	12.240.563	12.240.563
144	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	0	0	0	0	0	21.331.345	21.331.345
145	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	1.476.725	0	0	1.476.725	0	0	0
146	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	0	0	0	0	0	7.405.761	7.405.761
147	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	10.683.659	0	0	10.683.659	0	10.970.901	10.970.901
148	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	10.238.640	0	0	10.238.640	0	625.836	625.836
149	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	0	0	0	0	0	25.503.217	25.503.217
150	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4	0	0	0	0	0	21.787.209	21.787.209
151	Dinas Sosial	Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia	3.702.216	0	0	3.702.216	0	17.598.661	17.598.661
152	Dinas Sosial	Sekretariat Masjid Raya Kh Hasyim Asy'Ari	0	0	0	0	0	44.783.741	44.783.741
153	Dinas Sosial	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Islam Jakarta	0	0	0	0	0	245.379.489	245.379.489
154	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	93.054.108	0	0	93.054.108	0	82.061.372	82.061.372

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
155	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi Kota - Jakut	23.900.463	0	0	23.900.463	0	22.492.064	22.492.064
156	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakpus	218.448	0	0	218.448	0	238.428	238.428
157	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakut	32.137.957	0	0	32.137.957	0	41.103.196	41.103.196
158	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakbar	35.520.124	0	0	35.520.124	0	31.689.892	31.689.892
159	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaksel	15.571.564	0	0	15.571.564	0	16.870.344	16.870.344
160	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	34.249.955	0	0	34.249.955	0	46.873.744	46.873.744
161	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las	51.734.646	0	0	51.734.646	0	50.930.821	50.930.821
162	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	82.499.896	0	0	82.499.896	0	141.215.087	141.215.087
163	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	21.640.336	0	0	21.640.336	0	19.155.926	19.155.926
164	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah	18.547.131	0	0	18.547.131	0	16.597.787	16.597.787
165	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	132.456.831	0	0	132.456.831	0	101.671.485	101.671.485
166	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk - Jakpus	12.754.101	0	0	12.754.101	0	11.157.223	11.157.223
167	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk - Jakut	8.427.248	0	0	8.427.248	0	10.767.138	10.767.138
168	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk - Jaksel	7.455.979	0	0	7.455.979	0	5.829.698	5.829.698
169	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk - Jaktim	8.926.626	0	0	8.926.626	0	13.859.030	13.859.030
170	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk - Kab. Adm - Kep. Seribu	66.600	0	0	66.600	0	66.600	66.600
171	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	20.459.841	0	0	20.459.841	0	26.113.253	26.113.253
172	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Pusat Pengembangan Dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Serta Keluarga Berencana	5.665.735	0	0	5.665.735	0	6.873.140	6.873.140
173	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	313.230.826	0	0	313.230.826	0	301.592.967	301.592.967
174	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat	16.856.495	0	0	16.856.495	0	3.830.255	3.830.255
175	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan	14.228.646	0	0	14.228.646	0	13.867.839	13.867.839
176	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	331.408	0	0	331.408	0	331.408	331.408
177	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1.648.663	0	0	1.648.663	0	2.512.959	2.512.959

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
178	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Pusat Produksi, Inspeksi Dan Sertifikasi Hasil Perikanan	114.327.795	0	0	114.327.795	0	107.325.567	107.325.567
179	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	104.117.092	0	0	104.117.092	0	95.634.803	95.634.803
180	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Pusat Budidaya Dan Konservasi Laut	31.131.460	0	0	31.131.460	0	30.771.353	30.771.353
181	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Pusat Pengembangan Benih Dan Proteksi Tanaman	58.606.246	0	0	58.606.246	0	65.078.120	65.078.120
182	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Pusat Promosi Dan Sertifikasi Hasil Pertanian	103.337.981	0	0	103.337.981	0	93.564.616	93.564.616
183	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	174.151.411	0	0	174.151.411	0	185.861.454	185.861.454
184	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat	66.554.093	0	0	66.554.093	0	64.565.835	64.565.835
185	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara	45.526.334	0	0	45.526.334	0	0	0
186	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat	61.686.175	0	0	61.686.175	0	54.460.629	54.460.629
187	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan	44.381.168	0	0	44.381.168	0	54.555.331	54.555.331
188	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur	67.984.283	0	0	67.984.283	0	90.575.516	90.575.516
189	Dinas Lingkungan Hidup	Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	10.594.941	0	0	10.594.941	0	0	0
190	Dinas Lingkungan Hidup	Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	57.973.548	0	0	57.973.548	0	61.805.558	61.805.558
191	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Pengelola Sampah Terpadu	236.877.132	0	0	236.877.132	0	989.281.968	989.281.968
192	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Penanganan Sampah Badan Air	103.068.574	0	0	103.068.574	0	132.665.260	132.665.260
193	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	96.343.684	0	0	96.343.684	0	93.921.190	93.921.190
194	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	16.711.608	0	0	16.711.608	0	18.710.998	18.710.998
195	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	33.020.471	0	0	33.020.471	0	29.707.476	29.707.476
196	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	24.128.327	0	0	24.128.327	0	22.475.273	22.475.273
197	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	19.200.366	0	0	19.200.366	0	14.620.114	14.620.114
198	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	71.546.526	0	0	71.546.526	0	65.891.889	65.891.889
199	Dinas Perhubungan	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	12.005.155	0	0	12.005.155	0	12.411.097	12.411.097
200	Dinas Perhubungan	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara	17.427.783	0	0	17.427.783	0	5.197.762	5.197.762
201	Dinas Perhubungan	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat	13.700.851	0	0	12.646.351	1.054.500	14.886.000	15.940.500
202	Dinas Perhubungan	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan	44.509.361	0	0	44.509.361	0	50.547.065	50.547.065
203	Dinas Perhubungan	Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur	183.372	0	91.686	91.686	0	91.686	91.686
204	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan	158.708.617	0	0	158.708.617	0	175.174.551	175.174.551
205	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Angkutan Sekolah	23.815.867	0	0	23.815.867	0	23.162.167	23.162.167
206	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas	581.994.664	0	0	581.994.664	0	496.542.181	496.542.181
207	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	689.769.949	0	0	689.769.949	0	527.418.384	527.418.384

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
208	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke	42.365.326	0	0	42.365.326	0	37.749.800	37.749.800
209	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung	32.300.752	0	0	32.300.752	0	37.573.575	37.573.575
210	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng	48.097.946	0	0	48.097.946	0	48.914.656	48.914.656
211	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing	32.305.471	0	0	32.305.471	0	36.543.956	36.543.956
212	Dinas Perhubungan	Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	6.427.799	0	0	6.427.799	0	6.218.399	6.218.399
213	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Angkutan Perairan	880.008	0	880.008	0	0	0	0
214	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa	22.087.778	0	0	22.087.778	0	24.580.320	24.580.320
215	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	0	0	0	0	0	1.001.497	1.001.497
216	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	145.334.077	0	0	145.334.077	0	0	0
217	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jakpus	5.787.087	0	0	5.787.087	0	0	0
218	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jakut	201.602.898	0	0	201.602.898	0	12.124.845	12.124.845
219	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jaksel	6.802.382	0	0	6.802.382	0	0	0
220	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jakarta	223.344.948	0	0	223.344.948	0	0	0
221	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Suku Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota - Jakarta	7.100.900	0	0	7.100.900	0	0	0
222	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	249.419.895	0	0	249.419.895	0	0	0
223	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat	86.041.092	0	0	86.041.092	0	0	0
224	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat	0	0	0	0	0	922.854	922.854
225	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Utara	388.279.716	0	0	388.279.716	0	0	0
226	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Barat	170.465.786	0	0	170.465.786	0	0	0
227	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Barat	0	0	0	0	0	836.274	836.274
228	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Timur	374.918.357	0	0	374.918.357	0	0	0
229	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Timur	0	0	0	0	0	355.485.075	355.485.075
230	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Selatan	296.574.626	0	0	296.574.626	0	0	0
231	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Selatan	0	0	0	0	0	161.596.064	161.596.064
232	Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	5.584.655	0	0	5.584.655	0	44.400	44.400
233	Dinas Kebudayaan	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jakut	9.767.896	0	0	9.767.896	0	7.105.204	7.105.204
234	Dinas Kebudayaan	Suku Dinas Kebudayaan Kota - Jaksel	0	0	0	0	0	9.040.113	9.040.113
235	Dinas Kebudayaan	Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta	0	0	0	0	0	24.713.702	24.713.702
236	Dinas Kebudayaan	Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	0	0	0	0	0	44.965.373	44.965.373
237	Dinas Kebudayaan	Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi	68.674.530	0	0	68.674.530	0	71.459.571	71.459.571
238	Dinas Kebudayaan	Unit Pengelola Gedung Pertunjukan Seni Budaya	0	0	0	0	0	132.690.456	132.690.456
239	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat	19.212.586	0	0	19.212.586	0	0	0
240	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Utara	34.932.266	0	0	34.932.266	0	0	0
241	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Suku Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan	32.094.357	0	0	32.094.357	0	0	0
242	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0	0	0	0	0	1.089.406	1.089.406
243	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional	0	0	0	0	0	88.168.690	88.168.690
244	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	6.602.052	0	0	6.602.052	0	11.120.349	11.120.349

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
245	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	1.263.264.167	0	0	1.263.264.167	0	1.457.486.709	1.457.486.709
246	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakut	0	0	0	0	0	3.100.915	3.100.915
247	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaksel	4.689.972	0	0	4.689.972	0	0	0
248	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	314.039.892	0	0	314.039.892	0	322.413.127	322.413.127
249	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	34.583.296	0	0	34.583.296	0	39.866.208	39.866.208
250	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	9.107.791	0	0	9.107.791	0	10.322.088	10.322.088
251	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakpus	0	0	0	0	0	13.568.700	13.568.700
252	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakut	8.188.499	0	0	8.188.499	0	0	0
253	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jakbar	0	0	0	0	0	12.900.630	12.900.630
254	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota - Jaktim	0	0	0	0	0	15.436.227	15.436.227
255	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Perinsdustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	5.502.822	0	0	5.502.822	0	6.201.739	6.201.739
256	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan Dan Barang Teknik	0	0	0	0	0	71.706	71.706
257	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, Dan Sertifikasi Produk Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	0	0	0	0	0	108.558	108.558
258	Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah	Biro Umum Dan Administrasi Sekretariat Daerah	2.061.528.277	0	0	2.061.528.277	0	1.945.101.912	1.945.101.912
259	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.183.030	0	0	2.183.030	0	2.184.411	2.184.411
260	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota - Jakpus	150.023.329	0	0	150.023.329	0	0	0
261	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	1.944.903.355	0	0	1.944.903.355	0	1.864.782.554	1.864.782.554
262	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.182.836	0	0	7.182.836	0	14.764.333	14.764.333
263	Inspektorat	Inspektorat	503.448	0	0	503.448	0	470.418	470.418
264	Inspektorat	Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten - Kep. Seribu	16.650	0	0	16.650	0	0	0
265	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat	715.417.353	0	0	715.417.353	0	598.047.491	598.047.491
266	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Tanah Abang - Jakpus	24.032.367	0	0	24.032.367	0	24.660.795	24.660.795
267	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Gelora - Jakpus	0	0	0	0	0	9.095.687	9.095.687
268	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Bendungan Hilir - Jakpus	7.953.946	0	0	7.953.946	0	11.656.248	11.656.248
269	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Karet Tengsin - Jakpus	12.215.767	0	0	12.215.767	0	11.038.336	11.038.336
270	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Petamburan - Jakpus	0	0	0	0	0	8.669.584	8.669.584
271	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kebon Melati - Jakpus	19.923.482	0	0	19.923.482	0	11.745.010	11.745.010
272	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kebon Kacang - Jakpus	12.782.960	0	0	12.782.960	0	11.126.912	11.126.912
273	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kampung Bali - Jakpus	11.377.552	0	0	11.377.552	0	12.643.961	12.643.961

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
274	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Menteng - Jakpus	39.025.728	0	0	39.025.728	0	27.277.217	27.277.217
275	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Menteng - Jakpus	10.132.897	0	0	10.132.897	0	0	0
276	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Pegangsaan - Jakpus	26.298.266	0	0	26.298.266	0	15.221.541	15.221.541
277	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Cikini - Jakpus	9.647.044	0	0	9.647.044	0	0	0
278	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kebon Sirih - Jakpus	8.942.180	0	0	8.942.180	0	9.678.282	9.678.282
279	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Senen - Jakpus	22.593.800	0	0	22.593.800	0	0	0
280	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kenari - Jakpus	655.122	0	0	655.122	0	10.688.354	10.688.354
281	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Paseban - Jakpus	11.947.822	0	0	11.947.822	0	10.049.228	10.049.228
282	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kramat - Jakpus	2.004.754	0	0	2.004.754	0	10.969.688	10.969.688
283	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kwitang - Jakpus	16.358.270	0	0	16.358.270	0	7.688.028	7.688.028
284	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Senen - Jakpus	13.177.981	0	0	13.177.981	0	12.442.887	12.442.887
285	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Bungur - Jakpus	9.075.353	0	0	9.075.353	0	10.259.515	10.259.515
286	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus	23.078.495	0	0	23.078.495	0	23.244.008	23.244.008
287	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Rawasari - Jakpus	8.895.029	0	0	8.895.029	0	0	0
288	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Cempaka Putih Barat - Jakpus	8.813.199	0	0	8.813.199	0	0	0
289	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Johar Baru - Jakpus	0	0	0	0	0	29.421.747	29.421.747
290	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Johar Baru - Jakpus	0	0	0	0	0	12.656.532	12.656.532
291	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kampung Rawa - Jakpus	9.823.193	0	0	9.823.193	0	9.366.867	9.366.867
292	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Tanah Tinggi - Jakpus	12.596.238	0	0	12.596.238	0	11.893.735	11.893.735
293	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Kemayoran - Jakpus	18.631.055	0	0	18.631.055	0	23.970.356	23.970.356
294	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Harapan Mulia - Jakpus	14.652.153	0	0	14.652.153	0	14.408.589	14.408.589
295	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Cempaka Baru - Jakpus	7.312.332	0	0	7.312.332	0	0	0
296	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Sumur Batu - Jakpus	0	0	0	0	0	10.239.091	10.239.091
297	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Serdang - Jakpus	11.152.498	0	0	11.152.498	0	9.181.404	9.181.404
298	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kebon Kosong - Jakpus	9.753.193	0	0	9.753.193	0	11.443.821	11.443.821
299	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kemayoran - Jakpus	11.149.357	0	0	11.149.357	0	11.871.515	11.871.515
300	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Utan Panjang - Jakpus	0	0	0	0	0	14.333.576	14.333.576
301	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Gunung Sahari Selatan - Jakpus	6.906.939	0	0	6.906.939	0	6.997.116	6.997.116
302	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Sawah Besar - Jakpus	22.247.765	0	0	22.247.765	0	23.703.727	23.703.727
303	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Pasar Baru - Jakpus	17.585.655	0	0	17.585.655	0	0	0
304	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Karang Anyar - Jakpus	15.453.887	0	0	15.453.887	0	17.274.928	17.274.928
305	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kartini - Jakpus	12.860.911	0	0	12.860.911	0	13.770.994	13.770.994
306	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Gunung Sahari Utara - Jakpus	11.547.585	0	0	11.547.585	0	11.916.978	11.916.978
307	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Mangga Dua Selatan - Jakpus	13.590.861	0	0	13.590.861	0	0	0
308	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kecamatan Gambir - Jakpus	25.205.476	0	0	25.205.476	0	24.147.405	24.147.405
309	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Cideng - Jakpus	9.721.281	0	0	9.721.281	0	2.539.480	2.539.480
310	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Petojo Selatan - Jakpus	10.903.990	0	0	10.903.990	0	1.838.824	1.838.824
311	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Gambir - Jakpus	7.636.442	0	0	7.636.442	0	10.034.994	10.034.994
312	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Kebon Kelapa - Jakpus	12.434.478	0	0	12.434.478	0	0	0
313	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kelurahan Duri Pulo - Jakpus	8.619.045	0	0	8.619.045	0	10.905.761	10.905.761
314	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara	825.541.670	0	0	825.541.670	0	823.092.232	823.092.232
315	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Kamal Muara - Jakut	8.843.628	0	0	8.843.628	0	8.667.800	8.667.800
316	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Pejagalan - Jakut	0	0	0	0	0	9.029.376	9.029.376
317	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Penjaringan - Jakut	0	0	0	0	0	14.668.986	14.668.986
318	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Pluit - Jakut	0	0	0	0	0	13.214.149	13.214.149
319	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kecamatan Pademangan - Jakut	0	0	0	0	0	19.999.393	19.999.393
320	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Ancol - Jakut	0	0	0	0	0	7.120.078	7.120.078
321	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Pademangan Barat - Jakut	8.494.354	0	0	8.494.354	0	7.906.830	7.906.830
322	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kecamatan Tanjung Priok - Jakut	38.487.190	0	0	38.487.190	0	38.974.054	38.974.054
323	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Sunter Jaya - Jakut	16.892.493	0	0	16.892.493	0	18.355.905	18.355.905
324	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Sunter Agung - Jakut	15.796.502	0	0	15.796.502	0	19.292.812	19.292.812

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
325	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Sungai Bambu - Jakut	0	0	0	0	0	14.880.339	14.880.339
326	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Kebon Bawang - Jakut	0	0	0	0	0	14.161.366	14.161.366
327	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Tanjung Priok - Jakut	15.663.455	0	0	15.663.455	0	16.825.113	16.825.113
328	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kecamatan Koja - Jakut	15.738.623	0	0	15.738.623	0	28.692.816	28.692.816
329	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Tugu Utara - Jakut	0	0	0	0	0	12.573.413	12.573.413
330	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Tugu Selatan - Jakut	0	0	0	0	0	9.917.954	9.917.954
331	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Rawa Badak Utara - Jakut	0	0	0	0	0	12.829.875	12.829.875
332	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Koja - Jakut	0	0	0	0	0	8.452.240	8.452.240
333	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Rawa Badak Selatan - Jakut	9.683.970	0	0	9.683.970	0	8.343.670	8.343.670
334	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Lagoa - Jakut	4.189.675	0	0	4.189.675	0	10.377.407	10.377.407
335	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kecamatan Kelapa Gading - Jakut	25.335.568	0	0	25.335.568	0	247.308	247.308
336	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Kelapa Gading Timur - Jakut	11.124.443	0	0	11.124.443	0	12.328.304	12.328.304
337	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Kelapa Gading Barat - Jakut	10.852.596	0	0	10.852.596	0	13.121.795	13.121.795
338	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Pegangsaan Dua - Jakut	10.570.196	0	0	10.570.196	0	15.156.471	15.156.471
339	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kecamatan Cilincing - Jakut	0	0	0	0	0	13.743.222	13.743.222
340	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Sukapura - Jakut	10.905.549	0	0	10.905.549	0	0	0
341	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Marunda - Jakut	0	0	0	0	0	8.146.049	8.146.049
342	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Semper Barat - Jakut	15.794.653	0	0	15.794.653	0	31.837.467	31.837.467
343	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kelurahan Kalibaru - Jakut	7.807.569	0	0	7.807.569	0	7.901.189	7.901.189
344	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat	900.549.733	0	0	900.549.733	0	920.074.193	920.074.193
345	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar	22.650.289	0	0	22.650.289	0	0	0
346	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Sukabumi Selatan - Jakbar	0	0	0	0	0	8.427.077	8.427.077
347	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Duri Kepa - Jakbar	0	0	0	0	0	12.082.671	12.082.671
348	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Kedoya Selatan - Jakbar	0	0	0	0	0	9.303.863	9.303.863
349	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Kembangan Selatan - Jakbar	0	0	0	0	0	9.768.825	9.768.825
350	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kecamatan Kalideres - Jakbar	21.417.960	0	0	21.417.960	0	0	0
351	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Tomang - Jakbar	47.286	0	0	47.286	0	0	0
352	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Tanjung Duren Utara - Jakbar	1.456.987	0	0	1.456.987	0	0	0
353	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Grogol - Jakbar	7.038.032	0	0	7.038.032	0	0	0
354	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Wijaya Kusuma - Jakbar	7.576.279	0	0	7.576.279	0	0	0
355	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Tanjung Duren Selatan - Jakbar	7.291.585	0	0	7.291.585	0	9.122.529	9.122.529
356	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kecamatan Palmerah - Jakbar	20.894.979	0	0	20.894.979	0	22.578.533	22.578.533
357	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Palmerah - Jakbar	0	0	0	0	0	7.941.353	7.941.353
358	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Slipi - Jakbar	10.224.298	0	0	10.224.298	0	9.130.831	9.130.831
359	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Kota Bambu Utara - Jakbar	0	0	0	0	0	9.257.626	9.257.626
360	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Kota Bambu Selatan - Jakbar	5.354.346	0	0	5.354.346	0	0	0
361	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kecamatan Tambora - Jakbar	24.025.209	0	0	24.025.209	0	0	0
362	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Duri Selatan - Jakbar	0	0	0	0	0	2.638.176	2.638.176
363	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Krukut - Jakbar	0	0	0	0	0	10.403.016	10.403.016
364	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Maphar - Jakbar	0	0	0	0	0	11.023.501	11.023.501
365	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Tangki - Jakbar	0	0	0	0	0	10.797.257	10.797.257
366	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kelurahan Keagungan - Jakbar	8.840.260	0	0	8.840.260	0	66.600	66.600
367	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	698.811.893	0	0	698.811.893	0	842.624.320	842.624.320
368	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Kebayoran Lama - Jaksel	22.587.541	0	0	22.587.541	0	29.439.995	29.439.995
369	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara - Jaksel	14.189.054	0	0	14.189.054	0	14.079.943	14.079.943
370	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan - Jaksel	8.934.854	0	0	8.934.854	0	12.281.357	12.281.357
371	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pondok Pinang - Jaksel	7.549.084	0	0	7.549.084	0	9.096.000	9.096.000
372	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Cipulir - Jaksel	7.536.372	0	0	7.536.372	0	9.238.511	9.238.511
373	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Grogol Selatan - Jaksel	10.673.476	0	0	10.673.476	0	11.717.438	11.717.438
374	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Grogol Utara - Jaksel	11.640.152	0	0	11.640.152	0	12.352.966	12.352.966
375	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel							

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
376	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pesanggrahan - Jaksel	11.514.313	0	0	11.514.313	0	11.113.817	11.113.817
377	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Petukangan Selatan - Jaksel	10.522.052	0	0	10.522.052	0	13.306.834	13.306.834
378	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Petukangan Utara - Jaksel	10.416.281	0	0	10.416.281	0	11.947.520	11.947.520
379	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Ulujami - Jaksel	11.515.336	0	0	11.515.336	0	13.178.913	13.178.913
380	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Bintaro - Jaksel	16.044.285	0	0	16.044.285	0	14.640.521	14.640.521
381	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel	21.489.534	0	0	21.489.534	0	19.585.218	19.585.218
382	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pasar Minggu - Jaksel	8.876.133	0	0	8.876.133	0	10.349.969	10.349.969
383	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Jatipadang - Jaksel	12.487.241	0	0	12.487.241	0	13.154.158	13.154.158
384	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Ragunan - Jaksel	9.649.658	0	0	9.649.658	0	10.169.169	10.169.169
385	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Cilandak Timur - Jaksel	10.025.929	0	0	10.025.929	0	11.355.901	11.355.901
386	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Kebagusan - Jaksel	13.730.657	0	0	13.730.657	0	14.762.521	14.762.521
387	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pejaten Barat - Jaksel	10.844.808	0	0	10.844.808	0	11.410.560	11.410.560
388	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pejaten Timur - Jaksel	8.374.850	0	0	8.374.850	0	9.078.794	9.078.794
389	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Jagakarsa - Jaksel	20.893.358	0	0	20.893.358	0	20.113.246	20.113.246
390	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Jagakarsa - Jaksel	8.218.709	0	0	8.218.709	0	8.386.629	8.386.629
391	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Ciganjur - Jaksel	9.455.236	0	0	9.455.236	0	7.974.949	7.974.949
392	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Srengseng Sawah - Jaksel	13.930.335	0	0	13.930.335	0	33.559.670	33.559.670
393	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Lenteng Agung - Jaksel	9.577.976	0	0	9.577.976	0	10.505.245	10.505.245
394	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Tanjung Barat - Jaksel	13.900.279	0	0	13.900.279	0	15.607.280	15.607.280
395	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Cipadak - Jaksel	14.173.254	0	0	14.173.254	0	13.343.751	13.343.751
396	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel	17.939.648	0	0	17.939.648	0	19.561.997	19.561.997
397	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Tegal Parang - Jaksel	7.040.804	0	0	7.040.804	0	8.946.591	8.946.591
398	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Mampang Prapatan - Jaksel	10.579.359	0	0	10.579.359	0	9.285.530	9.285.530
399	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pela Mampang - Jaksel	10.521.229	0	0	10.521.229	0	10.137.536	10.137.536
400	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Kuningan Barat - Jaksel	12.283.638	0	0	12.283.638	0	14.612.691	14.612.691
401	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Bangka - Jaksel	10.260.447	0	0	10.260.447	0	13.363.601	13.363.601
402	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Pancoran - Jaksel	19.303.719	0	0	19.303.719	0	22.762.961	22.762.961
403	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pancoran - Jaksel	7.977.680	0	0	7.977.680	0	10.364.740	10.364.740
404	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Duren Tiga - Jaksel	11.604.832	0	0	11.604.832	0	11.739.950	11.739.950
405	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Kalibata - Jaksel	10.368.310	0	0	10.368.310	0	10.525.443	10.525.443
406	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Rawajati - Jaksel	6.917.806	0	0	6.917.806	0	8.427.921	8.427.921
407	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pangadegan - Jaksel	7.667.590	0	0	7.667.590	0	11.781.566	11.781.566
408	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Cikoko - Jaksel	8.323.780	0	0	8.323.780	0	8.578.580	8.578.580
409	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel	16.139.420	0	0	16.139.420	0	19.051.887	19.051.887
410	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Gandaria Utara - Jaksel	11.683.441	0	0	11.683.441	0	13.049.936	13.049.936
411	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Cipete Utara - Jaksel	13.323.316	0	0	13.323.316	0	12.292.669	12.292.669
412	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pulo - Jaksel	6.716.535	0	0	6.716.535	0	7.726.974	7.726.974
413	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Petogogan - Jaksel	10.267.908	0	0	10.267.908	0	7.259.049	7.259.049
414	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Melawai - Jaksel	6.868.449	0	0	6.868.449	0	5.380.365	5.380.365
415	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Kramat Pela - Jaksel	7.688.129	0	0	7.688.129	0	10.130.1	

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
427	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Guntur - Jaksel	10.046.114	0	0	10.046.114	0	9.455.201	9.455.201
428	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Setia Budi - Jaksel	8.707.758	0	0	8.707.758	0	9.163.050	9.163.050
429	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Tebet - Jaksel	20.923.816	0	0	20.923.816	0	23.497.139	23.497.139
430	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Menteng Dalam - Jaksel	10.610.633	0	0	10.610.633	0	10.034.827	10.034.827
431	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Tebet Barat - Jaksel	12.206.910	0	0	12.206.910	0	12.610.293	12.610.293
432	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Tebet Timur - Jaksel	9.872.706	0	0	9.872.706	0	10.361.774	10.361.774
433	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Kebon Baru - Jaksel	10.519.547	0	0	10.519.547	0	14.535.593	14.535.593
434	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Bukit Duri - Jaksel	15.173.629	0	0	15.173.629	0	15.909.320	15.909.320
435	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Manggarai Selatan - Jaksel	8.848.695	0	0	8.848.695	0	8.339.472	8.339.472
436	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Manggarai - Jaksel	10.283.782	0	0	10.283.782	0	11.408.455	11.408.455
437	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kecamatan Cilandak - Jaksel	20.299.392	0	0	20.299.392	0	23.143.024	23.143.024
438	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Lebak Bulus - Jaksel	11.731.432	0	0	11.731.432	0	12.921.342	12.921.342
439	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Pondok Labu - Jaksel	10.261.536	0	0	10.261.536	0	10.801.234	10.801.234
440	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Cilandak Barat - Jaksel	11.869.838	0	0	11.869.838	0	11.233.270	11.233.270
441	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Gandaria Selatan - Jaksel	10.231.664	0	0	10.231.664	0	11.508.589	11.508.589
442	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kelurahan Cipete Selatan - Jaksel	7.288.558	0	0	7.288.558	0	7.283.680	7.283.680
443	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur	1.121.020.251	0	0	1.121.020.251	0	1.223.688.010	1.223.688.010
444	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim	27.179.699	0	0	27.179.699	0	22.060.269	22.060.269
445	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pekayon - Jaktim	10.031.738	0	0	10.031.738	0	10.769.058	10.769.058
446	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Kalisari - Jaktim	7.778.706	0	0	7.778.706	0	8.995.979	8.995.979
447	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Baru - Jaktim	7.891.155	0	0	7.891.155	0	9.178.274	9.178.274
448	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cijantung - Jaktim	7.388.837	0	0	7.388.837	0	10.844.015	10.844.015
449	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Gedong - Jaktim	7.685.053	0	0	7.685.053	0	7.948.288	7.948.288
450	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Ciracas - Jaktim	23.968.821	0	0	23.968.821	0	12.175.098	12.175.098
451	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cibubur - Jaktim	11.705.852	0	0	11.705.852	0	11.994.292	11.994.292
452	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Rambutan - Jaktim	9.907.480	0	0	9.907.480	0	11.121.835	11.121.835
453	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Kelapa Dua Wetan - Jaktim	22.248.355	0	0	22.248.355	0	24.095.404	24.095.404
454	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Susukan - Jaktim	12.909.583	0	0	12.909.583	0	15.180.968	15.180.968
455	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Ciracas - Jaktim	18.685.605	0	0	18.685.605	0	20.159.147	20.159.147
456	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Cipayung - Jaktim	24.954.515	0	0	24.954.515	0	35.179.305	35.179.305
457	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cipayung - Jaktim	8.321.579	0	0	8.321.579	0	10.030.815	10.030.815
458	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Lubang Buaya - Jaktim	0	0	0	0	0	8.795.196	8.795.196
459	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Ceger - Jaktim	7.367.956	0	0	7.367.956	0	6.739.266	6.739.266
460	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Bambu Apus - Jaktim	9.224.534	0	0	9.224.534	0	10.023.155	10.023.155
461	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Setu - Jaktim	7.753.028	0	0	7.753.028	0	6.850.761	6.850.761
462	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cilangkap - Jaktim	8.639.729	0	0	8.639.729	0	9.709.298	9.709.298
463	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Munjul - Jaktim	7.432.900	0	0	7.432.900	0	8.811.780	8.811.780
464	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pondok Rang							

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
478	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pinang Ranti - Jaktim	9.025.223	0	0	9.025.223	0	9.265.712	9.265.712
479	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Jatinegara - Jaktim	15.343.632	0	0	15.343.632	0	27.350.236	27.350.236
480	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	10.311.282	0	0	10.311.282	0	10.238.910	10.238.910
481	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Bidara Cina - Jaktim	16.000.624	0	0	16.000.624	0	17.100.445	17.100.445
482	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	8.787.368	0	0	8.787.368	0	8.282.573	8.282.573
483	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	13.355.289	0	0	13.355.289	0	18.424.967	18.424.967
484	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim	8.169.221	0	0	8.169.221	0	9.544.071	9.544.071
485	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	15.317.651	0	0	15.317.651	0	0	0
486	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	15.582.565	0	0	15.582.565	0	18.934.995	18.934.995
487	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang Besar Utara - Jaktim	19.751.849	0	0	19.751.849	0	0	0
488	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Duren Sawit - Jaktim	20.609.488	0	0	20.609.488	0	23.662.149	23.662.149
489	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Klender - Jaktim	35.281.968	0	0	35.281.968	0	15.596.599	15.596.599
490	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pondok Bambu - Jaktim	17.524.586	0	0	17.524.586	0	8.978.463	8.978.463
491	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Duren Sawit - Jaktim	55.296.544	0	0	55.296.544	0	28.425.095	28.425.095
492	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Malaka Sari - Jaktim	8.360.441	0	0	8.360.441	0	0	0
493	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Malaka Jaya - Jaktim	16.152.511	0	0	16.152.511	0	0	0
494	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pondok Kopi - Jaktim	24.745.358	0	0	24.745.358	0	0	0
495	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pondok Kelapa - Jaktim	22.389.426	0	0	22.389.426	0	10.084.112	10.084.112
496	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Matraman - Jaktim	38.137.640	0	0	38.137.640	0	14.906.446	14.906.446
497	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pisangan Baru - Jaktim	17.008.748	0	0	17.008.748	0	8.910.383	8.910.383
498	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Utan Kayu Selatan - Jaktim	16.252.855	0	0	16.252.855	0	8.113.640	8.113.640
499	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Utan Kayu Utara - Jaktim	16.151.501	0	0	16.151.501	0	10.267.613	10.267.613
500	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Kayu Manis - Jaktim	22.646.840	0	0	22.646.840	0	20.545.213	20.545.213
501	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Palmeriam - Jaktim	18.311.486	0	0	18.311.486	0	15.609.792	15.609.792
502	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Kebon Manggis - Jaktim	20.409.564	0	0	20.409.564	0	10.899.381	10.899.381
503	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Pulogadung - Jaktim	34.132.996	0	0	34.132.996	0	8.042.124	8.042.124
504	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pisangan Timur - Jaktim	18.667.056	0	0	18.667.056	0	12.645.925	12.645.925
505	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Cipinang - Jaktim	25.517.820	0	0	25.517.820	0	196.485.308	196.485.308
506	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Jatinegara Kaum - Jaktim	17.024.606	0	0	17.024.606	0	20.402.363	20.402.363
507	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pulogadung - Jaktim	22.784.544	0	0	22.784.544	0	12.259.777	12.259.777
508	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Rawamangun - Jaktim	20.869.128	0	0	20.869.128	0	13.619.421	13.619.421
509	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Jati - Jaktim	18.061.546	0	0	18.061.546	0	195.969.411	195.969.411
510	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Kayu Putih - Jaktim	36.059.547	0	0	36.059.547	0	14.316.422	14.316.422
511	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kecamatan Cakung - Jaktim	84.917.940	0	0	84.917.940	0	57.763.756	57.763.756
512	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Jatinegara - Jaktim	24.925.182	0	0	24.925.182	0	13.849.343	13.849.343
513	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Rawa Terate - Jaktim	17.166.118	0	0	17.166.118	0	10.085.597	10.085.597
514	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Penggilingan - Jaktim	25.605.680	0	0	25.605.680	0	15.099.189	15.099.189
515	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Pulo Gebang - Jaktim	25.790.164	0	0	25.790.164	0	16.010.581	16.010.581
516	Kota Administrasi Jakarta Timur	Kelurahan Ujung Menteng - Jaktim	33.128.144	0	0	33.128.144	0	21.	

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
524	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	Kelurahan P.Pari - Kep. Seribu	9.404.102	0	0	9.404.102	0	0	0
525	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	72.372	0	0	72.372	0	0	0
526	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Suku Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara	921.298	0	0	921.298	0	0	0
Jumlah Utang Belanja TALI			53.612.444.308	0	5.025.496	53.606.364.312	1.054.500	56.800.530.454	56.801.584.954
Utang Belanja Pemeliharaan									
1	Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga	740.304.795	0	0	0	740.304.795	0	740.304.795
2	Dinas Bina Marga	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakpus	6.488.905.438	0	0	0	6.488.905.438	0	6.488.905.438
3	Dinas Sumber Daya Air	Dinas Sumber Daya Air	18.464.285.228	0	0	0	18.464.285.228	0	18.464.285.228
4	Dinas Sumber Daya Air	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara	120.444.144	0	0	120.444.144	0	0	0
5	Dinas Sumber Daya Air	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	424.943.896	0	0	424.943.896	0	0	0
6	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	855.785.737	2.011.711.501	0	2.867.497.238	0	815.682.912	815.682.912
7	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota - Jaktim	445.940.400	0	0	0	445.940.400	0	445.940.400
8	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Unit Pengelola Rumah Susun li	206.537.467	0	0	206.537.467	0	0	0
9	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	0	0	0	0	0	44.794.050	44.794.050
10	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian	Pusat Pengembangan Benih Dan Proteksi Tanaman	496.990.238	0	0	496.990.238	0	0	0
11	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan	300.326.698	0	0	300.326.698	0	0	0
12	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing	248.420.976	0	0	248.420.976	0	93.391.344	93.391.344
13	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat	62.258.767	0	0	62.258.767	0	0	0
Jumlah Utang Belanja Pemeliharaan			28.855.143.784	2.011.711.501	0	4.727.419.424	26.139.435.861	953.868.306	27.093.304.167
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat									
1	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pemuda Dan Olahraga	0	0	0	0	0	1.133.137.500	1.133.137.500
Jumlah Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakL			0	0	0	0	0	1.133.137.500	1.133.137.500
Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa			88.883.621.570	2.105.552.226	1.395.692.909	60.985.185.972	28.608.294.915	187.814.945.341	216.423.240.256

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
Utang Belanja Modal Tanah									
1	Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga	44.374.000	0	0	44.374.000	0	0	0
2	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	311.876.700	0	58.330.500	253.546.200	0	0	0
Jumlah Utang Belanja Modal Tanah			356.250.700	0	58.330.500	297.920.200	0	0	0
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin									
1	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	1.917.400.000	0	1.917.400.000	0	0	0	0
2	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang	0	0	0	0	0	59.200.000	59.200.000
3	Dinas Perhubungan	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas	0	0	0	0	0	175.225.902	175.225.902
Jumlah Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin			1.917.400.000	0	1.917.400.000	0	0	234.425.902	234.425.902
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan									
1	Dinas Pendidikan	Unit Pengelola Prasarana Dan Sarana Pendidikan	1.055.339.525	0	0	11.175.010	1.044.164.515	49.587.435.949	50.631.600.464
2	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	22.771.112.809	0	0	22.771.112.809	0	212.600.000	212.600.000
3	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	125.880.001	0	0	125.880.001	0	0	0
4	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	33.533.273	0	0	33.533.273	0	644.853.304	644.853.304
5	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.576.991.291	0	54.805.000	1.522.186.291	0	7.713.469.037	7.713.469.037
6	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur	115.255.066	0	0	115.255.066	0	274.542.128	274.542.128
7	Dinas Kesehatan	Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	580.766.240	0	0	580.766.240	0	0	0
8	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	0	0	0	0	0	1.652.191.290	1.652.191.290
9	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara	638.735.363	47.064.394	47.064.394	638.735.363	0	0	0
10	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	213.250.959	1.386.448.694	5.552	952.541.503	647.152.598	6.615.298.642	7.262.451.240
11	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	213.945.000	125.545.000	0	339.490.000	0	0	0
12	Dinas Sosial	Dinas Sosial	0	0	0	0	0	5.103.895.017	5.103.895.017
13	Dinas Lingkungan Hidup	Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	0	0	0	0	0	3.952.079.595	3.952.079.595
14	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	2.669.358.864	0	0	2.669.358.864	0	0	0
15	Dinas Perhubungan	Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah	2.753.342.913	0	0	2.753.342.913	0	0	0
16	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	1.779.445.052	0	0	1.779.445.052	0	0	0
17	Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakpus	135.679.033	0	0	135.679.033	0	0	0
18	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	395.324.233	0	0	395.324.233	0	0	0
19	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat	523.092.347	5	0	523.092.348	4	0	4
20	Kota Administrasi Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara	4.550.159.110	3	156.721.070	4.393.438.043	0	0	0
21	Kota Administrasi Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat	2.069.036.852	0	0	2.069.036.852	0	0	0
22	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.533.371.466	0	0	1.533.371.466	0	0	0
Jumlah Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan			43.733.619.397	1.559.058.096	258.596.016	43.342.764.360	1.691.317.117	75.756.364.962	77.447.682.079
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan									
1	Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga	1.140.989.611	0	2.835	1.140.986.776	0	0	0
2	Dinas Sumber Daya Air	Dinas Sumber Daya Air	8.770.020.783	0	560.597.739	7.158.513.804	1.050.909.240	4.961.633.929	6.012.543.169
3	Dinas Sumber Daya Air	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat	340.367.524	0	183.826.562	0	156.540.962		156.540.962
4	Dinas Sumber Daya Air	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	684.267.340	0	0	0	684.267.340	0	684.267.340

NO URUT	SKPD INDUK	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 DESEMBER 2023
				PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
					KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (4+5-6-7)	9	10 = (8+9)
5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	167.863.922	0	0	167.863.922	0	0	0
6	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Pengelola Sampah Terpadu	9.276.842.292	0	0	9.276.842.293	-1	0	-1
7	Dinas Lingkungan Hidup	Unit Penanganan Sampah Badan Air	0	40.172.381.073	97.268.207	0	40.075.112.866	25.880.055.997	65.955.168.863
8	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	483.695.820	0	0	483.695.820	0	0	0
Jumlah Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			20.864.047.292	40.172.381.073	841.695.343	18.227.902.615	41.966.830.407	30.841.689.926	72.808.520.333
Jumlah Utang Belanja Modal			66.871.317.389	41.731.439.169	3.076.021.859	61.868.587.175	43.658.147.524	106.832.480.790	150.490.628.314

DAFTAR UTANG BELANJA BLUD
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023

No	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 30 JUNI 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 Desember 2023
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4-5-6)	8	9 = (7+8)
	Utang Belanja Pegawai BLUD							
1	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	1.819.248.440	0	0	1.819.248.440	0	1.668.188.624	1.668.188.624
2	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	2.840.164.819	0	0	2.840.164.819	0	2.503.789.051	2.503.789.051
3	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	8.513.543.544	0	0	8.513.543.544	0	0	0
4	Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing	386.946.496	0	0	386.946.496	0	276.952.662	276.952.662
5	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	2.390.474.457	0	0	2.390.474.457	0	2.751.757.825	2.751.757.825
6	Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati	290.469.668	0	0	290.469.668	0	270.747.659	270.747.659
7	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	2.270.388.197	0	0	2.270.388.197	0	1.847.428.094	1.847.428.094
8	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	2.896.983.924	0	0	2.896.983.924	0	2.283.748.950	2.283.748.950
9	Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan	176.817.608	0	0	176.817.608	0	175.103.773	175.103.773
10	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	2.869.676.557	0	0	2.869.676.557	0	2.732.596.949	2.732.596.949
11	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	154.992.093	0	0	154.992.093	0	186.442.263	186.442.263
12	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	173.461.229	0	0	173.461.229	0	0	0
	Jumlah Utang Belanja Pegawai BLUD	24.783.167.032	0	0	24.783.167.032	0	14.696.755.850	14.696.755.850
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD							
13	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	101.573	0	0	101.573	0	85.597.872	85.597.872
14	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.776.451.701	0	0	1.776.451.701	0	1.209.684.361	1.209.684.361
15	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanah Abang - Jakpus	10.177.187	0	0	10.177.187	0	7.131.514	7.131.514
16	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Senen - Jakpus	10.318.825	0	0	10.318.825	0	0	0
17	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus	0	0	0	0	0	4.943.656	4.943.656
18	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Johar Baru - Jakpus	3.573.770	0	0	3.573.770	0	3.570.870	3.570.870
19	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemayoran - Jakpus	60.542.190	0	0	60.542.190	0	223.794.812	223.794.812
20	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sawah Besar - Jakpus	3.428.000	0	0	3.428.000	0	190.000	190.000
21	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Gambir - Jakpus	2.556.965	0	0	2.556.965	0	2.282.160	2.282.160
22	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pademangan - Jakut	1.462.446	0	0	1.462.446	0	1.039.695	1.039.695
23	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tanjung Priok - Jakut	1.141.611.069	0	0	1.141.611.069	0	383.846.791	383.846.791
24	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilincing - Jakut	1.006.498.786	0	0	1.006.498.786	0	0	0
25	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar	56.510.652	0	0	56.510.652	0	57.043.240	57.043.240
26	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kembangan - Jakbar	48.872.228	0	48.872.228	0	0	48.714.133	48.714.133
27	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cengkareng - Jakbar	51.204.443	0	0	51.204.443	0	56.063.501	56.063.501
28	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres - Jakbar	74.402.107	0	0	74.402.107	0	82.162.110	82.162.110
29	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar	73.306.789	0	0	73.306.789	0	2.128.980	2.128.980
30	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pal Merah - Jakbar	49.231.677	0	0	49.231.677	0	58.519.627	58.519.627
31	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora - Jakbar	251.255.008	0	0	251.255.008	0	11.115.550	11.115.550
32	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari - Jakbar	6.715.180	0	0	6.715.180	0	5.505.610	5.505.610
33	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel	4.608.277	0	0	4.608.277	0	0	0
34	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel	15.559.425	0	0	15.559.425	0	8.996.590	8.996.590
35	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jagakarsa - Jaksel	0	0	0	0	0	482.932.562	482.932.562
36	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel	4.735.258	0	0	4.735.258	0	74.615.160	74.615.160
37	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran - Jaksel	3.568.650	0	0	3.568.650	0	0	0
38	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Setiabudi - Jaksel	13.484.210	0	0	13.484.210	0	3.681.224	3.681.224

No	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 30 JUNI 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 Desember 2023
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4-5-6)	8	9 = (7+8)
39	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilandak - Jaksel	4.163.606	0	0	4.163.606	0	0	0
40	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim	1.892.550	0	0	1.892.550	0	27.960.000	27.960.000
41	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung - Jaktim	1.781.550	0	0	1.781.550	0	782.945.079	782.945.079
42	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati - Jaktim	412.111.720	0	0	412.111.720	0	6.783.409	6.783.409
43	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Makasar - Jaktim	843.664.621	0	0	843.664.621	0	5.621.050	5.621.050
44	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Jatinegara - Jaktim	154.243.643	0	0	154.243.643	0	2.739.753	2.739.753
45	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit - Jaktim	60.640.106	0	0	60.640.106	0	76.171.251	76.171.251
46	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Matraman - Jaktim	85.765.088	0	0	85.765.088	0	61.694.899	61.694.899
47	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pulo Gadung - Jaktim	1.445.600	0	0	1.445.600	0	12.327.660	12.327.660
48	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung - Jaktim	1.207.684.980	0	0	1.207.684.980	0	1.548.893.666	1.548.893.666
49	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Utara - Kep. Seribu	3.400.000	0	0	2.500.000	900.000	35.268.328	36.168.328
50	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu	62.249.600	0	0	62.249.600	0	168.305.199	168.305.199
51	Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu	148.135.494	0	0	148.135.494	0	10.435.868	10.435.868
52	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	65.147.553.621	0	0	65.147.553.621	0	55.869.065.905	55.869.065.905
53	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	25.335.495.241	0	0	25.335.495.241	0	16.203.100.837	16.203.100.837
54	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	24.056.425.837	0	0	24.056.425.837	0	19.936.963.912	19.936.963.912
55	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	5.135.419.568	0	0	5.135.419.568	0	5.968.719.892	5.968.719.892
56	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	21.728.776.912	0	1.540.000	21.727.236.912	0	8.995.639.775	8.995.639.775
57	Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit	4.266.146.063	0	0	4.266.146.063	0	5.440.944.660	5.440.944.660
58	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	27.947.802.144	0	0	27.947.802.144	0	15.138.289.766	15.138.289.766
59	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	1.370.852.920	0	1	1.250.526.102	120.326.817	1.989.795.134	2.110.121.951
60	Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar	137.050.940	494.720	8.569.000	128.976.660	0	16.573.022	16.573.022
61	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	476.336.504	0	0	476.336.504	0	277.546.923	277.546.923
62	Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru	118.790.099	0	0	118.790.099	0	28.750.000	28.750.000
63	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	2.585.518.342	0	0	2.585.518.342	0	804.712.017	804.712.017
64	Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing	9.628.035.841	0	0	9.628.035.841	0	6.449.244.390	6.449.244.390
65	Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan	3.686.314.318	0	0	3.686.314.318	0	2.087.843.698	2.087.843.698
66	Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan	2.031.146.935	0	0	2.031.146.935	0	23.646.665	23.646.665
67	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	3.242.305.206	0	178.000	3.242.127.206	0	438.137.568	438.137.568
68	Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa	49.661.623	0	0	49.661.623	0	95.768.963	95.768.963
69	Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	6.528.673.682	0	0	6.528.673.682	0	5.404.686.458	5.404.686.458
70	Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan	4.954.340.486	0	2.983.680	4.951.356.806	0	5.764.987.380	5.764.987.380
71	Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan	1.519.555.616	0	900.000	1.518.655.616	0	1.076.666.850	1.076.666.850
72	Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati	2.114.101.670	0	0	2.114.101.670	0	1.732.023.149	1.732.023.149
73	Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas	1.495.806.667	0	0	1.495.806.667	0	2.449.943.263	2.449.943.263
74	Rumah Sakit Umum Daerah Matraman	1.058.514.131	0	0	1.058.514.131	0	4.157.873.589	4.157.873.589
75	Rumah Sakit Umum Daerah Tamansari	3.243.445.116	0	0	3.243.445.116	0	901.961.281	901.961.281
76	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok	3.658.856.741	0	0	3.658.856.741	0	394.831.077	394.831.077
77	Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang	119.368.022	0	0	119.368.022	0	114.237.781	114.237.781
78	Rumah Sakit Umum Adhyaksa	39.531.590	0	0	39.531.590	0	7.892.189.410	7.892.189.410
79	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru	1.422.020.748	0	0	1.422.020.748	0	435.919.861	435.919.861
80	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang	1.280.749.505	0	0	1.280.749.505	0	51.430.000	51.430.000
81	Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama	282.058.654	0	0	282.058.654	0	69.467.021	69.467.021
82	Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung	367.531.657	0	0	367.531.657	0	18.701.194	18.701.194
83	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Peternakan	260.648.309	0	0	260.648.309	0	235.704.938	235.704.938
84	Unit Pengelola Perparkiran	663.033.658	0	0	663.033.658	0	41.473.625	41.473.625
85	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	3.590.850	0	0	3.590.850	0	0	0
86	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah	601.657.355	0	0	96.579.201	505.078.154	94.483.341	599.561.495
87	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Koja - Jakut	0	0	0	0	0	4.852.780	4.852.780

No	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	MUTASI UTANG AUDITED 31 DES 2022			SALDO UTANG 2022 PER 30 JUNI 2023	PENAMBAHAN UTANG TAHUN 2023	SALDO UTANG PER 31 Desember 2023
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				KOREKSI	PEMBAYARAN			
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4-5-6)	8	9 = (7+8)
88	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas - Jaktim	0	0	0	0	0	5.413.480	5.413.480
89	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menteng - Jakpus	0	0	0	0	0	3.166.830	3.166.830
90	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet - Jaksel	0	0	0	0	0	14.604.000	14.604.000
	Jumlah Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	234.214.471.547	494.720	63.042.909	233.525.618.385	626.304.971	176.182.066.615	176.808.371.586
	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD							
91	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemayoran - Jakpus	36.471.270	0	0	36.471.270	0	0	0
92	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cakung - Jaktim	128.982.000	0	0	128.928.000	54.000	0	54.000
93	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	5.437.351.440	0	0	5.437.351.440	0	0	0
94	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	194.549.700	0	0	194.549.700	0	0	0
95	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	4.087.117.037	0	0	4.087.117.037	0	296.400.000	296.400.000
96	Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	125.404.507	1	0	125.404.507	1	0	1
97	Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih	1.854.000.000	0	0	1.854.000.000	0	0	0
98	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	239.355.549	0	0	239.355.549	0	0	0
99	Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing	160.764.830	0	0	160.764.830	0	78.000.000	78.000.000
100	Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan	87.432.622	0	0	87.432.622	0	0	0
101	Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres	3.153.903.300	0	0	3.153.903.300	0	625.521.200	625.521.200
102	Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan	767.474.687	0	0	767.474.687	0	0	0
103	Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan	538.423.401	0	0	538.423.401	0	0	0
104	Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas	552.497.952	0	0	552.497.952	0	0	0
105	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang	400.135.000	0	0	400.135.000	0	0	0
106	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	21.935.199.292	0	0	21.935.199.292	0	0	0
107	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	501.364.800	0	0	501.364.800	0	943.775.896	943.775.896
108	Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja	199.356.000	0	0	199.356.000	0	0	0
109	Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang	2.854.592.272	0	0	2.854.592.272	0	0	0
110	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	174.677.065	0	0	0	174.677.065	0	174.677.065
	Jumlah Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	43.429.052.724	1	0	43.254.321.659	174.731.066	1.943.697.096	2.118.428.162

MONITORING ATAS PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN 2023
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Kode SKPD	Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama/ Lokasi Pekerjaan	Nilai Kontrak Awal atau Addendum (jika ada)	Bobot Pekerjaan s.d terakhir dibayarkan di 2023 (%)		Nilai pada saat SP2D Cair s.d terakhir dibayarkan di 2023 (Rp)	Bobot pekerjaan s.d 31 Des 2023		Penambahan Bobot pekerjaan tanggal SP2D Terakhir dykrn s.d 31 Desember 2023		Pengkakuan Hutang per 31 Des 2023 (Rp)	Pengkakuan nilai KDP per 31 Des 2023 (Rp)		Rencana Penyelesaian Sisa Pekerjaan di tahun 2024 (%)		Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 100%	Nilai Retensi / Jaminan Pemeliharaan	Sumber Pembiayaan
						Bobot (%)	Nilai (Rp)		Bobot (%)	Nilai (Rp)	Bobot (%)	Nilai (Rp)		Bobot (%)	Nilai (Rp)	Bobot (%)	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10 x 6	12 = 10 - 7	13 = 11 - 8	14	15 = 10	16 = 15 x 6	17 = 100% - 15	18	19	20	21
1	1.01.0.00.0.00.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN Cilincing 01	18.559.406.716	23,56%	4.372.596.222	4.372.596.223	27,25%	5.057.438.330	3,69%	684.842.108	684.842.107	27,25%	5.057.438.330	72,75%	13.501.968.396	25 Februari 2024	-	APBD
2	1.01.0.00.0.00.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN Pondok Bambu 07	21.355.515.045	39,56%	8.448.241.752	8.448.241.752	45,93%	9.808.588.060	6,37%	1.360.346.308	1.360.346.308	45,93%	9.808.588.060	54,07%	11.546.926.985	17 Februari 2024	-	APBD
3	1.01.0.00.0.00.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN Cempaka Putih Barat 15 Pg.	20.195.676.908	25,99%	5.248.908.408	5.248.908.408	25,99%	5.248.908.408	0,00%	-	0	25,99%	5.248.908.408	74,01%	14.946.968.500	21 Februari 2024	-	APBD
4	1.01.0.00.0.00.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN Utan Kayu Utara 01	21.047.387.606	45,42%	9.559.723.451	9.559.723.451	54,17%	11.401.369.866	8,75%	1.841.646.415	1.841.646.415	54,17%	11.401.369.866	45,83%	9.646.017.740	16 Februari 2024	-	APBD
5	1.01.0.00.0.00.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN Gatur 01 Pagi. 03 Pagi	25.483.097.523	19,08%	4.864.083.007	4.864.083.007	19,08%	4.864.083.007	0,00%	-	0	19,08%	4.864.083.007	80,92%	20.629.014.516	13 Maret 2024	-	APBD
6	1.01.0.00.0.00.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN Kemayoran 09 Pagi. 11 Pagi. 13 Petang. 14 Petang	34.049.207.997	24,86%	8.464.633.108	8.464.633.108	24,86%	8.464.633.108	0,00%	-	0	24,86%	8.464.633.108	75,14%	25.584.574.889	17 Februari 2024	-	APBD
7	1.01.0.00.0.00.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SD Negeri Cipinang Cempedak 05 Pg	16.325.266.009	45,26%	7.388.815.396	7.388.815.396	53,34%	8.707.896.889	8,06%	1.319.081.493	1.319.081.493	53,34%	8.707.896.889	46,66%	7.617.369.120	10 Februari 2024	-	APBD
8	1.01.0.00.0.00.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Total Gedung SDN Pademangan Barat 03 Pagi	32.487.536.797	24,85%	8.073.152.894	8.073.152.894	31,35%	10.184.842.786	6,50%	2.111.689.892	2.111.689.892	31,35%	10.184.842.786	68,65%	22.302.694.011	12 Maret 2024	-	APBD
9	1.01.0.00.0.00.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.03	Rehab Total Gedung Eks Kantor Dikmen Kecamatan Cilincing Alih fungsi untuk TK Negeri Cilincing 01	7.986.705.398	25,92%	2.070.154.039	2.070.154.039	32,88%	2.626.028.735	6,96%	555.874.696	555.874.696	32,88%	2.626.028.735	67,12%	5.360.676.663	17 Februari 2024	-	APBD

No.	Kode SKPD	Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama/ Lokasi Pekerjaan	Nilai Kontrak Awal atau Addendum (Jika ada)	Bobot Pekerjaan s.d terakhir dibayarkan di 2023 (%)		Nilai pada saat SP2D Cair s.d terakhir dibayarkan di 2023 (Rp)	Bobot pekerjaan s.d 31 Des 2023		Penambahan Bobot pekerjaan tanggal SP2D Terakhir dybrkn s.d 31 Desember 2023		Pengakuan Hutang per 31 Des 2023 (Rp)	Pengakuan nilai KDP per 31 Des 2023 (Rp)		Rencana Penyelesaian Sisa Pekerjaan di tahun 2024 (%)		Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 100%	Nilai Retensi / Jaminan Peneliharaan	Sumber Pembiayaan
						Bobot (%)	Nilai (Rp)		Bobot (%)	Nilai (Rp)	Bobot (%)	Nilai (Rp)		Bobot (%)	Nilai (Rp)	Bobot (%)	Nilai (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10 x 6	12 = 10 - 7	13 = 11 - 8	14	15 = 10	16 = 15 x 6	17 = 100% - 15	18	19	20	21
28	1.01.0.00.0.00.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Berat Gedung SDN Pulogadung 01	1.578.458.859	95,51%	1.507.586.056	1.578.458.859	95,51%	1.507.586.056	0,00%	-	0	95,51%	1.507.586.056	4,49%	70.872.803	10 Januari 2024	78.923.000,00	APBD
29	1.01.0.00.0.00.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.2.01	Rehab Berat Gedung SMA Negeri 31 Jakarta	2.832.843.821	97,39%	2.758.878.269	2.832.843.821	97,39%	2.758.878.269	0,00%	-	0	97,39%	2.758.878.269	2,61%	73.965.552	10 Januari 2024	141.643.000,00	APBD
30	1.01.0.00.0.00.01.0039	UNIT PENGELOLA PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN	1.01.02.1.02	Rehab Berat Gedung SMK Negeri 40 Jakarta	2.818.684.825	97,85%	2.758.195.849	2.818.684.825	97,85%	2.758.195.849	0,00%	-	0	97,85%	2.758.195.849	2,15%	60.488.976	10 Januari 2024	140.935.000,00	APBD
31	1.02.0.00.0.00.01.0003	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1.02.02.2.01.02	Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Puskesmas Duri Utara	5.136.632.401	70,10%	3.544.019.144	3.544.019.144	79,05%	4.060.302.448	8,95%	516.283.304	516.283.304	79,05%	4.060.302.448	20,95%	1.076.329.953	16 Feb 2024	-	APBD
32	1.02.0.00.0.00.01.0003	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1.02.02.2.01.02	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Duri Utara	547.896.000	77,25%	423.243.000	423.243.000	90,44%	495.504.000		72.261.000	72.261.000	90,44%	495.504.000	9,56%	52392000	16 Feb 2024	-	APBD
33	1.02.0.00.0.00.01.0003	SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	1.02.02.2.01.02	Belanja Modal Bangunan Kesehatan TA 2023 Perencanaan Konstruksi Tahap Lelang Dan Pengawasan Berkala Puskesmas Duri Utara	281.545.000	80,00%	225.236.000	225.236.000	80,00%	225.236.000		-	56.309.000	80,00%	225.236.000	20,00%	56309000	16 Feb 2024	-	APBD
34	1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	1.03.02.1.01	Pembangunan Prasarana dan Sarana kali/Sungai dan kelengkapannya (PT Waskita Jaya Purnawa KSO PT Jhuda Citragraha)	82.567.498.339	60,29%	49.540.499.003	82.567.498.339	60,29%	49.777.467.724	0,00%	236.968.721	0	60,29%	49.777.467.724	39,71%	32.787.553.590.42	26 Jan 2024	-	APBD
35	1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	1.03.02.1.01	Pembangunan Potder/Kolam Retensi (PT Adhi Karya)	118.630.715.534	70,60%	83.041.500.873	118.630.715.534	71,75%	85.117.538.396	1,15%	2.076.037.523	0	71,75%	85.117.538.396	28,25%	33.513.177.138.36	3 Apr 2024	-	APBD
36	1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS SUMBER DAYA AIR	1.03.02.1.01	Pembangunan Waduk/Situ/Embung dan Bangunan Kelengkapannya (PT Outiraya - Djaja KSO)	84.478.163.609	65,20%	54.488.955.527	84.478.703.608	65,87%	55.645.935.326	0,67%	1.156.979.799	0	65,87%	55.645.935.326	3				

No.	Kode SKPD	Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama/ Lokasi Pekerjaan	Nilai Kontrak Awal atau Addendum (jika ada)	Bobot Pekerjaan s.d terakhir dibayarkan di 2023 (%)		Nilai pada saat SP2D Cair s.d terakhir dibayarkan di 2023 (Rp)	Bobot pekerjaan s.d 31 Des 2023		Penambahan Bobot pekerjaan tanggal SP2D Terakhir dykrkn s.d 31 Desember 2023		Pengakuan Hutang per 31 Des 2023 (Rp)	Pengakuan nilai KDP per 31 Des 2023 (Rp)		Rencana Penyelesaian Sisa Pekerjaan di tahun 2024 (%)		Tanggal Penyelesaian Pekerjaan 100%	Nilai Retensi / Jaminan Pemeliharaan	Sumber Pembiayaan
1	2	3	4	5	6	Bobot (%)	Nilai (Rp)	9	Bobot (%)	Nilai (Rp)	Bobot (%)	Nilai (Rp)	14	Bobot (%)	Nilai (Rp)	Bobot (%)	Nilai (Rp)	19	20	21
						7	8	10	11 = 10 x 6	12 = 10 - 7	13 = 11 - 8		15 = 10	16 = 15 x 6	17 = 100% - 15	18				
57	1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.1.03	Reencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	3.020.382.372	90,00%	2.718.344.135	2.718.344.135	90,00%	2.718.344.135	0,00%	-	0	90,00%	2.718.344.135	10,00%	302.038.237	30 Januari 2024	-	APBD
58	1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.1.03	Penyusunan Dokumen Lingkungan dan KMRLR Rumah Susun 2 (Rorotan IX)	806.266.000	80,00%	645.012.800	483.759.600	80,00%	645.012.800	0,00%	-	161.253.200	80,00%	645.012.800	20,00%	161.253.200	15 Juni 2024	-	APBD
59	1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05.1.01	Pembangunan Rumah Susun Jagakarsa, Jakarta Selatan (Fiskal)	382.181.226.232	12,05%	46.052.837.761	95.409.006.557	15,72%	60.071.245.139	3,67%	14.018.407.378	0	15,72%	60.071.245.139	84,28%	322.109.981.093	15 Desember 2024	-	APBD
60	1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05.1.01	Pembangunan Rumah Susun Jagakarsa, Jakarta Selatan (Pengawasan)	5.617.293.750	12,05%	676.883.897	561.729.375	15,72%	882.926.232	3,67%	206.042.335	321.196.857	15,72%	882.926.232	84,28%	4.734.367.518	15 Desember 2024	-	APBD
61	1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05.1.01	Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun PIK (Fiskal)	14.087.360.616	66,23%	9.330.058.936	8.452.416.369	76,53%	10.781.197.953	10,30%	1.451.139.017	2.328.781.584	76,53%	10.781.197.953	23,47%	3.306.162.663	03 Februari 2024	-	APBD
62	1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05.1.01	Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun PIK (Pengawasan)	531.961.950	66,23%	352.318.399	319.177.170	76,53%	407.115.800	10,30%	54.797.400	87.938.630	76,53%	407.115.800	23,47%	124.846.150	03 Februari 2024	-	APBD
63	1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05.1.01	Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Rawa Bebek (Fiskal)	13.941.303.743	92,36%	12.876.188.137	12.360.603.368	97,32%	13.567.676.803	4,96%	691.488.666	1.207.073.435	97,32%	13.567.676.803	2,68%	373.626.940	21 Januari 2024	-	APBD
64	1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05.1.01	Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Rawa Bebek (Pengawasan)	370.745.550	92,36%	342.420.590	333.670.995	97,32%	360.809.569	4,96%	18.388.979	27.138.574	97,32%	360.809.569	2,68%	9.935.981	21 Januari 2024	-	APBD
65	1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05.1.01	Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Nagrak (Fiskal)	12.175.000.000	82,92%	10.095.510.000	9.660.752.000	90,27%	10.990.129.000	7,35%	894.619.000	1.329.377.000	90,27%	10.990.129.000	9,73%	1.184.871.000	19 Februari 2024	-	APBD
66	1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05.1.01	Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun Nagrak (Pengawasan)	301.740.180	82,92%	250.202.957	241.392.144	90,27%	272.374.826	7,35%	22.171.868	30.982.682	90,27%	272.374.826	9,73%	29.365.354	19 Februari 2024	-	APBD
67	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehab Total Gedung Pantti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti Pondok Bambu	13.815.090.897	46,20%	6.386.821.583	6.386.821.583	83,60%	11.549.968.594	37,40%	5.163.147.011	5.163.147.011	83,60%	11.549.968.594	16,40%	2.265.122.303	17 Februari 2024	687.940.418,00	APBD
68	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	1.06.04.1.01	Rehab Total Gedung Pantti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti Pondok Bambu	507.194.319	61,50%	311.796.267	311.796.267	63,34%	321.281.714	9.485.447	9.485.447	63,34%	321.281.714	36,66%	185.912.605,00	17 Februari 2024	-	APBD	
69	2.15.0.00.0.00.01.0008	UNIT PENGELOLA SISTEM PENGENDALIAN LALU LINTAS	2.15.02.1.05.02	Provinsi DKI Jakarta	64.898.482.234	75,00%	48.673.861.676	48.673.861.676	75,27%	48.849.087.578	0,27%	175.225.902	175.225.902	75,27%	48.849.087.578	24,73%	16.049.394.656,00	08 Februari 2024	-	APBD
70	2.15.0.00.0.00.01.0023	UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAERAH	2.15.03.2.12	Revitalisasi Pelabuhan Pulau Sebra / Pulau Sebra Kepulauan Sebra	33.761.777.166	81,57%	27.537.793.545	33.761.777.166	81,57%	27.537.793.545	-	-	0	81,57%	27.537.793.545	18,44%	Rp6.223.983,621	20 Februari 2024	1.688.088.858,00	APBD
71	2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03.1.01.03	Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan di Wilayah Jakarta Pusat (Pelaksanaan Jasa Konstruksi)	65.077.777.778	86,05%	55.997.475.444	65.077.777.778	92,00%	59.872.206.333	5,95%	3.874.730.889	0	92,00%	59.872.206.333	8,00%	5.205.571.444	19 Februari 2024	-	APBD
72	2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19.03.1.01.03	Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan di Wilayah Jakarta Timur dan Gelanggang Olahraga (GOR) Cakung Barat (Pelaksanaan Jasa Konstruksi)	191.145.000.000	80,60%	154.055.224.200	191.145.000.000	84,00%	160.561.800.000	3,40%	6.506.575.800	0	84,00%	160.561.800.000	16,00%	30.583.200.000	14 Februari 2024	-	APBD
73	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.1.09	Gedung Dinas Teknis Abdul Muis	12.871.677.000	80,00%	10.297.341.600	12.871.677.000	94,00%	12.099.376.380	14,00%	1.802.034.780	0	94,00%	12.099.376.380	6,00%	772.300.620	20 Januari 2024	-	APBD
74	2.11.0.00.0.00.01.0003	SUKU DINAS LINGKUN																		

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS (DEFISIT)
PER 31 DESEMBER 2023

(dalam ribuan rupiah)

No.	Nama OPD	Pendapatan		Jumlah Pendapatan Sebelum Eliminasi	Beban	Surplus/Defisit Sebelum Eliminasi	Surplus/Defisit Setelah Eliminasi
		Pendapatan Dana BLUD	Pendapatan Alokasi APBD				
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 5 - 6	8 = 3 - 6
1	DINAS KESEHATAN						
	Laboratorium Kesehatan Daerah	18.641.372.794	44.246.272.925	62.887.645.719	85.422.468.864	-22.534.823.145	-66.781.096.070
	Pusat Layanan Kesehatan Pegawai	2.464.010.036	14.512.999.754	16.977.009.790	17.241.209.798	-264.200.008	-14.777.199.762
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU	1.758.581.706	23.085.084.604	24.843.666.310	23.181.120.102	1.662.546.208	-21.422.538.396
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU	236.519.213.022	2.625.070.428	239.144.283.450	362.597.856.892	-123.453.573.442	-126.078.643.870
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMAYORAN	25.369.818.970	14.335.986.205	39.705.805.175	42.194.696.231	-2.488.891.056	-16.824.877.261
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAH BESAR	18.532.224.335	20.409.820.925	38.942.045.260	44.365.226.170	-5.423.180.910	-25.833.001.835
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CEMPAKA PUTIH	13.578.075.746	2.913.177.959	16.491.253.705	43.568.586.460	-27.077.332.755	-29.990.510.714
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU	11.833.376.339	17.173.665.830	29.007.042.169	29.946.812.025	-939.769.856	-18.113.435.686
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA	58.089.260.036	13.187.483.021	71.276.743.057	90.130.287.557	-18.853.544.500	-32.041.027.521
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCING	55.261.715.413	23.602.925.675	78.864.641.088	81.436.286.518	-2.571.645.430	-26.174.571.105
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADEMANGAN	17.091.235.433	14.964.582.603	32.055.818.036	43.793.009.881	-11.737.191.845	-26.701.774.448
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMBANGAN	24.512.777.754	63.894.067.028	88.406.844.782	62.737.619.291	25.669.225.491	-38.224.841.537
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KALIDERES	25.377.743.960	108.956.531.124	134.334.275.084	76.334.134.601	58.000.140.483	-50.956.390.641
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAGAKARSA	22.120.120.259	15.246.640.757	37.366.761.016	40.037.199.458	-2.670.438.442	-17.917.079.199
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET	39.242.230.550	14.567.050.772	53.809.281.322	64.266.097.956	-10.456.816.634	-25.023.867.406
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN	22.557.746.400	24.645.994.067	47.203.740.467	51.011.414.135	-3.807.673.668	-28.453.667.735
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN	34.361.803.374	19.374.832.940	53.736.636.314	55.337.637.721	-1.601.001.407	-20.975.834.347
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI	42.729.862.338	620.750.112	43.350.612.450	72.377.890.029	-29.027.277.579	-29.648.027.691
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIRACAS	16.968.748.749	13.964.753.812	30.933.502.561	45.313.334.594	-14.379.832.033	-28.344.585.845
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MATRAMAN	21.152.786.810	12.679.078.768	33.831.865.578	44.098.920.025	-10.267.054.447	-22.946.133.215
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN SARI	22.635.542.728	17.678.050.446	40.313.593.174	52.917.234.126	-12.603.640.952	-30.281.691.398
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK	18.807.804.464	15.579.743.938	34.387.548.402	42.049.492.686	-7.661.944.284	-23.241.688.222
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG	20.334.932.852	-	20.334.932.852	43.117.888.371	-22.782.955.519	-22.782.955.519
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU	19.613.660.413	15.159.713.124	34.773.373.537	49.856.631.056	-15.083.257.519	-30.242.970.643
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG	19.074.739.624	9.107.176.800	28.181.916.424	50.928.675.233	-22.746.758.809	-31.853.935.609
	RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA	63.144.923.122	11.219.808.960	74.364.732.082	119.912.213.476	-45.547.481.394	-56.767.290.354
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG	19.807.708.980	25.695.537.982	45.503.246.962	41.655.070.825	3.848.176.137	-21.847.361.845
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN LAMA	15.677.056.612	10.021.496.131	25.698.552.743	43.472.452.230	-17.773.899.487	-27.795.395.618
	PUSAT KRISIDAN KEGAWATDARURATAN KESEHATAN DAERAH	26.026.907.554	120.970.104.433	146.997.011.987	152.666.949.767	-5.669.937.780	-126.640.042.213
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANAH ABANG - JAKPUS	13.631.564.848	23.151.859.860	36.783.424.708	39.858.418.878	-3.074.994.170	-26.226.854.030
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MENTENG - JAKPUS	7.262.394.507	19.297.144.966	26.559.539.473	30.356.305.692	-3.796.766.219	-23.093.911.185
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SENEN - JAKPUS	8.883.377.642	18.511.422.595	27.394.800.237	31.656.959.093	-4.262.158.856	-22.773.581.451
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CEMPAKA PUTIH - JAKPUS	8.580.259.507	21.433.286.043	30.013.545.550	34.430.799.102	-4.417.253.552	-25.850.539.595
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JOHAR BARU - JAKPUS	11.476.748.978	22.431.753.015	33.908.501.993	33.836.882.817	71.619.176	-22.360.133.839
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMAYORAN - JAKPUS	16.757.267.072	17.886.029.887	34.643.296.959	40.171.194.928	-5.527.897.969	-23.413.927.856

No.	Nama OPD	Pendapatan		Jumlah Pendapatan Sebelum Eliminasi	Beban	Surplus/Defisit Sebelum Eliminasi	Surplus/Defisit Setelah Eliminasi
		Pendapatan Dana BLUD	Pendapatan Alokasi APBD				
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 5 - 6	8 = 3 - 6
1	DINAS KESEHATAN						
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS	11.005.982.963	22.471.631.346	33.477.614.309	35.027.194.306	-1.549.579.997	-24.021.211.343
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS	7.547.860.609	22.164.551.747	29.712.412.356	29.612.241.641	100.170.715	-22.064.381.032
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PENJARINGAN - JAKUT	18.691.070.490	18.862.081.254	37.553.151.744	42.070.944.451	-4.517.792.707	-23.379.873.961
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PADEMANGAN - JAKUT	12.140.675.873	12.984.765.795	25.125.441.668	28.091.586.548	-2.966.144.880	-15.950.910.675
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG PRIOK - JAKUT	22.807.734.935	21.508.100.794	44.315.835.729	53.295.117.074	-8.979.281.345	-30.487.382.139
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KOJA - JAKUT	22.721.244.974	22.156.153.682	44.877.398.656	50.454.357.792	-5.576.959.136	-27.733.112.818
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KELAPA GADING - JAKUT	9.975.682.350	14.705.932.308	24.681.614.658	28.761.974.789	-4.080.360.131	-18.786.292.439
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILINCING - JAKUT	26.577.552.513	23.683.211.349	50.260.763.862	59.406.203.408	-9.145.439.546	-32.828.650.895
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR	23.406.960.440	28.937.676.759	52.344.637.199	56.763.862.913	-4.419.225.714	-33.356.902.473
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR	20.617.507.155	25.625.013.450	46.242.520.605	49.181.101.466	-2.938.580.861	-28.563.594.311
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CENGKARENG - JAKBAR	33.924.034.032	16.420.822.218	50.344.856.250	61.103.961.214	-10.759.104.964	-27.179.927.182
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KALIDERES - JAKBAR	24.438.456.284	28.275.147.223	52.713.603.507	62.002.124.344	-9.288.520.837	-37.563.668.060
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR	15.033.206.067	27.719.815.158	42.753.021.225	47.542.412.858	-4.789.391.633	-32.509.206.791
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PAL MERAH - JAKBAR	16.602.738.425	26.187.904.033	42.790.642.458	44.404.060.614	-1.613.418.156	-27.801.322.189
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR	17.829.074.718	26.672.447.803	44.501.522.521	53.170.380.248	-8.668.857.727	-35.341.305.530
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMAN SARI - JAKBAR	9.279.500.227	18.086.233.897	27.365.734.124	30.455.615.650	-3.089.881.526	-21.176.115.423
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN LAMA - JAKSEL	19.292.647.608	14.444.888.875	33.737.536.483	37.083.135.795	-3.345.599.312	-17.790.488.187
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PESANGGRAHAN - JAKSEL	15.394.953.751	15.462.458.075	30.857.411.826	35.423.372.744	-4.565.960.918	-20.028.418.993
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR MINGGU - JAKSEL	19.369.006.838	19.846.931.551	39.215.938.389	42.068.373.070	-2.852.434.681	-22.699.366.232
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JAGAKARSA - JAKSEL	18.851.972.627	16.704.857.272	35.556.829.899	42.912.374.612	-7.355.544.713	-24.060.401.985
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN - JAKSEL	10.860.028.840	22.493.217.072	33.353.245.912	37.171.070.242	-3.817.824.330	-26.311.041.402
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PANCORAN - JAKSEL	12.404.496.309	22.042.528.957	34.447.025.266	38.198.950.172	-3.751.924.906	-25.794.453.863
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU - JAKSEL	12.842.320.332	26.553.006.721	39.395.327.053	38.120.648.540	1.274.678.513	-25.278.328.208
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SETIABUDI - JAKSEL	9.709.531.927	20.730.442.094	30.439.974.021	35.234.588.514	-4.794.614.493	-25.525.056.587
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET - JAKSEL	15.822.402.469	24.430.336.067	40.252.738.536	42.099.066.608	-1.846.328.072	-26.276.664.139

No.	Nama OPD	Pendapatan		Jumlah Pendapatan Sebelum Eliminasi	Beban	Surplus/Defisit Sebelum Eliminasi	Surplus/Defisit Setelah Eliminasi
		Pendapatan Dana BLUD	Pendapatan Alokasi APBD				
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 5 - 6	8 = 3 - 6
1	DINAS KESEHATAN						
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILANDAK - JAKSEL	16.384.464.386	24.887.850.495	41.272.314.881	43.708.772.895	-2.436.458.014	-27.324.308.509
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASAR REBO - JAKTIM	14.857.197.771	23.645.220.294	38.502.418.065	39.978.927.323	-1.476.509.258	-25.121.729.552
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIRACAS - JAKTIM	16.544.747.735	23.802.264.396	40.347.012.131	43.098.360.542	-2.751.348.411	-26.553.612.807
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CIPAYUNG - JAKTIM	15.685.377.967	28.452.734.066	44.138.112.033	50.912.842.901	-6.774.730.868	-35.227.464.934
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KRAMAT JATI - JAKTIM	17.426.077.427	28.397.290.899	45.823.368.326	48.764.260.165	-2.940.891.839	-31.338.182.738
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAKASAR - JAKTIM	11.928.594.360	24.216.410.571	36.145.004.931	38.141.659.823	-1.996.654.892	-26.213.065.463
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JATINEGARA - JAKTIM	19.794.715.560	23.884.304.600	43.679.020.160	49.125.199.326	-5.446.179.166	-29.330.483.766
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM	25.210.284.392	24.779.053.598	49.989.337.990	53.590.198.309	-3.600.860.319	-28.379.913.917
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MATRAMAN - JAKTIM	11.681.115.147	27.334.204.467	39.015.319.614	41.002.231.586	-1.986.911.972	-29.321.116.439
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PULO GADUNG - JAKTIM	17.566.094.211	21.278.568.822	38.844.663.033	40.196.008.225	-1.351.345.192	-22.629.914.014
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CAKUNG - JAKTIM	28.678.108.672	27.933.070.371	56.611.179.043	63.195.301.510	-6.584.122.467	-34.517.192.838
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU UTARA - KEP. SERIBU	1.345.315.125	18.860.251.073	20.205.566.198	16.941.209.478	3.264.356.720	-15.595.894.353
	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEP. SERIBU SELATAN - KEP. SERIBU	1.233.916.632	19.194.117.427	20.428.034.059	19.384.083.693	1.043.950.366	-18.150.167.061
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA	373.218.349.187	184.064.688.365	557.283.037.552	565.449.761.835	-8.166.724.283	-192.231.412.648
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN	308.309.340.744	62.778.180.969	371.087.521.713	512.199.905.459	-141.112.383.746	-203.890.564.715
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENGKARENG	250.821.859.899	19.591.801.717	270.413.661.616	462.156.283.615	-191.742.621.999	-211.334.423.716
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO	149.147.778.073	150.967.434.426	300.115.212.499	350.687.734.709	-50.572.522.210	-201.539.956.636
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH	188.318.947.407	74.675.076.606	262.994.024.013	351.392.278.462	-88.398.254.449	-163.073.331.055
	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT	186.572.586.794	1.511.144.737	188.083.731.531	276.160.400.520	-88.076.668.989	-89.587.813.726
	Sub Total 1	3.081.749.107.172	2.162.573.720.888	5.244.322.828.060	6.328.019.116.577	-1.083.696.288.517	-3.246.270.009.405
2	DINAS PENDIDIKAN						
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	891.174.631	4.964.102.418	5.855.277.049	6.144.743.013	-289.465.964	-5.253.568.382
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	425.176.000	3.625.903.405	4.051.079.405	4.631.010.869	-579.931.464	-4.205.834.869
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	2.379.023.929	3.116.321.414	5.495.345.343	6.004.252.548	-508.907.205	-3.625.228.619
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	253.340.723	1.821.959.841	2.075.300.564	3.381.632.413	-1.306.331.849	-3.128.291.690
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	63.370.000	6.410.840.390	6.474.210.390	6.335.929.062	138.281.328	-6.272.559.062
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	152.647.000	1.737.611.067	1.890.258.067	1.622.217.320	268.040.747	-1.469.570.320
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	100.244.750	2.676.799.063	2.777.043.813	2.724.442.662	52.601.151	-2.624.197.912
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	630.024.848	2.011.388.775	2.641.413.623	3.061.598.084	-420.184.461	-2.431.573.236
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	101.862.300	4.007.529.914	4.109.392.214	4.984.963.480	-875.571.266	-4.883.101.180
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	193.299.150	2.754.781.048	2.948.080.198	2.971.347.298	-23.267.100	-2.778.048.148
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	187.897.356	1.732.743.693	1.920.641.049	1.521.349.689	399.291.360	-1.333.452.333
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	78.846.500	3.298.338.892	3.377.185.392	2.902.875.119	474.310.273	-2.824.028.619
	Sub Total 2	5.456.907.187	38.158.319.920	43.615.227.107	46.286.361.557	-2.671.134.450	-40.829.454.370

No.	Nama OPD	Pendapatan		Jumlah Pendapatan Sebelum Eliminasi	Beban	Surplus/Defisit Sebelum Eliminasi	Surplus/Defisit Setelah Eliminasi
		Pendapatan Dana BLUD	Pendapatan Alokasi APBD				
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 5 - 6	8 = 3 - 6
1	DINAS KESEHATAN						
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	UNIT PENGELOLA DANA PERUMAHAN	11.284.910.855	-	11.284.910.855	3.531.186.841	7.753.724.014	7.753.724.014
	Sub Total 3	11.284.910.855	-	11.284.910.855	3.531.186.841	7.753.724.014	7.753.724.014
4	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN						
	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	12.829.880.706	17.074.064.378	29.903.945.084	32.598.736.054	-2.694.790.970	-19.768.855.348
	Sub Total 4	12.829.880.706	17.074.064.378	29.903.945.084	32.598.736.054	-2.694.790.970	-19.768.855.348
5	DINAS PERHUBUNGAN						
	Unit Pengelola Perparkiran	57.368.048.670	-	57.368.048.670	65.507.162.583	-8.139.113.913	-8.139.113.913
	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	3.998.805.997	33.046.645.377	37.045.451.374	54.769.346.522	-17.723.895.148	-50.770.540.525
	Sub Total 5	61.366.854.667	33.046.645.377	94.413.500.044	120.276.509.105	-25.863.009.061	-58.909.654.438
6	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
	UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG	7.444.887.116	3.142.506.180	10.587.393.296	12.068.502.762	-1.481.109.466	-4.623.615.646
	Sub Total 6	7.444.887.116	3.142.506.180	10.587.393.296	12.068.502.762	-1.481.109.466	-4.623.615.646
7	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA						
	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	36.301.571.376	97.964.914.017	134.266.485.393	122.182.671.946	12.083.813.447	-85.881.100.570
	Sub Total 7	36.301.571.376	97.964.914.017	134.266.485.393	122.182.671.946	12.083.813.447	-85.881.100.570
8	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH						
	UNIT PENGELOLA JAKARTA ASSET MANAGEMENT CENTER	143.278.215.776	1.933.178.560	145.211.394.336	4.786.582.240	140.424.812.096	138.491.633.536
	Sub Total 8	143.278.215.776	1.933.178.560	145.211.394.336	4.786.582.240	140.424.812.096	138.491.633.536
9	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1.437.193.338	8.316.138.723	9.753.332.061	9.947.625.308	-194.293.247	-8.510.431.970
	Sub Total 9	1.437.193.338	8.316.138.723	9.753.332.061	9.947.625.308	-194.293.247	-8.510.431.970
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
	UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU	2.310.635.671	408.664.118.119	410.974.753.790	373.757.514.764	37.217.239.026	-371.446.879.093
	Sub Total 10	2.310.635.671	408.664.118.119	410.974.753.790	373.757.514.764	37.217.239.026	-371.446.879.093
11	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK						
	UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY	597.367.248	143.684.497.952	144.281.865.200	242.706.077.441	-98.424.212.241	-242.108.710.193
	Sub Total 11	597.367.248	143.684.497.952	144.281.865.200	242.706.077.441	-98.424.212.241	-242.108.710.193
	TOTAL SELURUH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	3.364.057.531.112	2.914.558.104.114	6.278.615.635.226	7.296.160.884.595	-1.017.545.249.369	-3.932.103.353.483

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2023**

No	Nama OPD	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka	Kewajiban Jangka	Total Kewajiban	Ekuitas
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	UNIT PENGELOLA DANA PERUMAHAN	17.606.272.011,00	1.623.409.395	-	19.229.681.406,00	-	-	-	19.229.681.406,00
	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA								
1	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	9.149.199.567,00	1.796.874.523.208	8.254.015.682,00	1.814.277.738.457,00	5.950.068.762,00	-	5.950.068.762,00	1.808.327.669.695,00
	DINAS PERHUBUNGAN								
1	Unit Pengelola Perparkiran	14.245.108.645,00	161.196.687.458	2.318.317.649,00	177.760.113.752,00	3.273.469.872,00	-	3.273.469.872,00	174.486.543.880,00
2	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	972.707.902,00	387.486.097.252	8.426.250,00	388.467.231.404,00	4.681.176.803,00	-	4.681.176.803,00	383.786.054.601,00
3	Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik	454.170.605,00	548.624.146	490.600,00	1.003.285.351,00	-	-	-	1.003.285.351,00
	DINAS KESEHATAN								
1	Laboratorium Kesehatan Daerah	48.397.452.428,00	68.010.675.791	433.260.260,00	116.841.388.479,00	1.452.072.979,00	-	1.452.072.979,00	115.389.315.500,00
2	PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH	68.391.193,00	11.492.794.037	-	11.561.185.230,00	-	-	-	11.561.185.230,00
3	Pusat Layanan Kesehatan Pegawai	2.190.249.981,00	2.046.318.345	367.400.000,00	4.603.968.326,00	85.597.872,00	-	85.597.872,00	4.518.370.454,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEPULAUAN SERIBU	6.195.163.337,00	10.562.387.057	-	16.757.550.394,00	132.008.520,00	-	132.008.520,00	16.625.541.874,00
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR MINGGU	198.800.712.211,00	283.160.772.662	218.441.826,00	482.179.926.699,00	17.897.704.341,00	-	17.897.704.341,00	464.282.222.358,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMAYORAN	8.860.594.532,00	9.723.913.379	34.852.498,00	18.619.360.409,00	2.115.001.952,00	-	2.115.001.952,00	16.504.358.457,00
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAH BESAR	15.978.234.837,00	28.993.873.609	86.070.845,00	45.058.179.291,00	16.573.022,00	-	16.573.022,00	45.041.606.269,00
8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CEMPAKA PUTIH	15.554.317.863,00	20.014.284.392	33.904.437,00	35.602.506.692,00	277.946.923,00	-	277.946.923,00	35.324.559.769,00
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JOHAR BARU	6.262.213.765,00	21.221.572.878	310.953.062,00	27.794.739.705,00	32.950.000,00	-	32.950.000,00	27.761.789.705,00
10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA	34.683.231.761,00	65.908.227.258	51.892.729,00	100.643.351.748,00	910.161.206,00	-	910.161.206,00	99.733.190.542,00
11	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCING	22.121.275.119,00	50.999.732.294	6.964.800,00	73.127.972.213,00	6.840.420.053,00	-	6.840.420.053,00	66.287.552.160,00
12	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADEMANGAN	12.151.025.445,00	26.511.999.924	19.908.772,00	38.682.934.141,00	2.093.283.698,00	-	2.093.283.698,00	36.589.650.443,00
13	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMBANGAN	4.631.169.484,00	57.647.413.779	19.717.881,00	62.298.301.144,00	131.531.765,00	-	131.531.765,00	62.166.769.379,00
14	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KALIDERES	15.519.552.246,00	133.948.735.065	948.841.950,00	150.417.129.261,00	4.494.596.650,00	-	4.494.596.650,00	145.922.532.611,00
15	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAGAKARSA	15.090.247.736,00	15.149.853.685	164.102.870,00	30.404.204.291,00	101.898.963,00	-	101.898.963,00	30.302.305.328,00
16	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEBET	16.280.996.447,00	27.085.091.882	264.128.231,00	43.630.216.560,00	5.619.923.721,00	-	5.619.923.721,00	38.010.292.839,00
17	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMPANG PRAPATAN	6.156.052.295,00	35.124.597.962	46.146.045,00	41.326.796.302,00	5.833.029.600,00	-	5.833.029.600,00	35.493.766.702,00
18	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESANGGRAHAN	12.324.952.366,00	18.275.021.014	13.079.960,00	30.613.053.340,00	1.330.854.598,00	-	1.330.854.598,00	29.282.198.742,00
19	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI	24.744.936.593,00	51.974.327.876	2.988.553.487,00	79.707.817.956,00	2.022.455.308,00	-	2.022.455.308,00	77.685.362.648,00
20	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIRACAS	7.462.294.981,00	19.113.854.906	190.970.326,00	26.767.120.213,00	2.450.908.263,00	-	2.450.908.263,00	24.316.211.950,00
21	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MATRAMAN	9.440.970.971,00	19.534.475.026	47.866.055,00	29.023.312.052,00	6.589.051.439,00	-	6.589.051.439,00	22.434.260.613,00
22	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN SARI	9.000.455.325,00	39.563.351.052	357.123.045,00	48.920.929.422,00	958.957.301,00	-	958.957.301,00	47.961.972.121,00
23	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK	14.460.656.418,00	25.791.435.154	19.744.853,00	40.271.836.425,00	1.068.131.313,00	-	1.068.131.313,00	39.203.705.112,00
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANAH ABANG	34.239.803.445,00	25.847.758.377	49.772.926,00	60.137.334.748,00	173.437.781,00	-	173.437.781,00	59.963.896.967,00
25	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU	14.869.490.367,00	37.926.231.599	24.873.703,00	52.820.595.669,00	521.436.004,00	-	521.436.004,00	52.299.159.665,00
26	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATI PADANG	11.156.562.113,00	51.743.687.542	6.104.400,00	62.906.354.055,00	128.824.819,00	-	128.824.819,00	62.777.529.236,00
27	RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA	8.208.976.791,00	18.270.591.837	-	26.479.568.628,00	7.896.249.410,00	-	7.896.249.410,00	18.583.319.218,00
28	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG	13.215.254.382,00	51.196.707.503	-	64.411.961.885,00	78.423.484,00	-	78.423.484,00	64.333.538.401,00
29	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN LAMA	11.144.735.211,00	37.942.745.748	-	49.087.480.959,00	165.114.301,00	-	165.114.301,00	48.922.366.658,00
30	PUSAT KRISIS DAN KEGAWATDARURATAN KESEHATAN DAERAH	13.174.414.748,00	114.127.433.076	849.848.598,00	128.151.696.422,00	-	-	-	128.151.696.422,00
31	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANAH ABANG - JAKPUS	8.315.430.944,00	23.321.611.660	124.199.500,00	31.761.242.104,00	70.885.695,00	-	70.885.695,00	31.690.356.409,00
32	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MENTENG - JAKPUS	3.231.162.049,00	43.022.246.665	842.646.096,00	47.096.054.810,00	52.601.013,00	-	52.601.013,00	47.043.453.797,00

No	Nama OPD	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka	Kewajiban Jangka	Total Kewajiban	Ekuitas
33	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SENEN - JAKPUS	4.605.036.741,00	11.306.118.565	16.750.000,00	15.927.905.306,00	33.485.122,00	-	33.485.122,00	15.894.420.184,00
34	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CEMPAKA PUTIH - JAKPUS	4.466.041.478,00	24.496.863.405	-	28.962.904.883,00	61.773.649,00	-	61.773.649,00	28.901.131.234,00
35	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN JOHAR BARU - JAKPUS	7.363.064.769,00	26.538.635.265	603.504.451,00	34.505.204.485,00	54.006.671,00	-	54.006.671,00	34.451.197.814,00
36	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEMAYORAN - JAKPUS	6.141.592.463,00	19.901.491.399	270.834.183,00	26.313.918.045,00	225.212.819,00	-	225.212.819,00	26.088.705.226,00
37	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN SAWAH BESAR - JAKPUS	7.920.794.046,00	16.777.112.967	14.367.000,00	24.712.274.013,00	43.348.066,00	-	43.348.066,00	24.668.925.947,00
38	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GAMBIR - JAKPUS	4.809.523.803,00	20.379.140.482	18.228.500,00	25.206.892.785,00	41.592.390,00	-	41.592.390,00	25.165.300.395,00
39	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PENJARINGAN - JAKUT	6.937.325.053,00	30.994.472.959	614.953.715,00	38.546.751.727,00	-	-	-	38.546.751.727,00
40	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PADEMANGAN - JAKUT	4.514.017.327,00	9.222.528.503	118.935.044,00	13.855.480.874,00	27.769.021,00	-	27.769.021,00	13.827.711.853,00
41	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TANJUNG PRIOK - JAKUT	3.777.334.221,00	32.179.232.703	601.943.033,00	36.558.509.957,00	461.093.949,00	-	461.093.949,00	36.097.416.008,00
42	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KOJA - JAKUT	7.888.000.515,00	22.236.700.610	857.797.626,00	30.982.498.751,00	4.852.780,00	-	4.852.780,00	30.977.645.971,00
43	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KELAPA GADING - JAKUT	4.606.418.710,00	42.119.103.435	1.000.000,00	46.726.522.145,00	45.625.270,00	-	45.625.270,00	46.680.896.875,00
44	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN CILINCING - JAKUT	9.600.079.979,00	28.838.678.010	1.805.518.541,00	40.244.277.530,00	67.573.904,00	-	67.573.904,00	40.176.703.626,00
45	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR	6.351.864.398,00	21.953.593.451	267.496.405,00	28.572.954.254,00	57.043.240,00	-	57.043.240,00	

No	Nama OPD	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka	Kewajiban Jangka	Total Kewajiban	Ekuitas
78	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO	42.053.714.934,00	367.142.435.689	15.081.147.790,00	424.277.298.413,00	8.835.634.812,00	-	8.835.634.812,00	415.441.663.601,00
79	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH	73.193.257.409,00	158.834.541.153	1.844.168.500,00	233.871.967.062,00	11.571.491.091,00	-	11.571.491.091,00	222.300.475.971,00
80	RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DUREN SAWIT	167.196.750.529,00	313.099.138.575	(1.804.421.999,00)	478.491.467.105,00	7.808.544.659,00	-	7.808.544.659,00	470.682.922.446,00
	DINAS PENDIDIKAN								
1	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA	530.046.061,00	200.280.940.600	2.275.196,00	200.813.261.857,00	75.414.285,00	-	75.414.285,00	200.737.847.572,00
2	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 36 JAKARTA	221.950.804,00	7.912.127.200	6.597.500,00	8.140.675.504,00	37.233.889,00	-	37.233.889,00	8.103.441.615,00
3	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 57 JAKARTA	758.643.884,00	145.824.596.771	8.473.737,00	146.591.714.392,00	71.845.137,00	-	71.845.137,00	146.519.869.255,00
4	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 63 JAKARTA	80.445.867,00	2.357.983.872	-	2.438.429.739,00	10.604.548,00	-	10.604.548,00	2.427.825.191,00
5	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 26 JAKARTA	480.943.304,00	55.959.734.567	-	56.440.677.871,00	35.424.580,00	-	35.424.580,00	56.405.253.291,00
6	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 20 JAKARTA	268.194.809,00	12.501.721.000	-	12.769.915.809,00	12.927.375,00	-	12.927.375,00	12.756.988.434,00
7	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 JAKARTA	70.592.622,00	16.777.171.886	-	16.847.764.508,00	24.273.941,00	-	24.273.941,00	16.823.490.567,00
8	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 51 JAKARTA	69.183.629,00	4.251.292.428	-	4.320.476.057,00	13.807.650,00	-	13.807.650,00	4.306.668.407,00
9	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 24 JAKARTA	29.180.687,00	6.709.643.596	-	6.738.824.283,00	23.235.622,00	-	23.235.622,00	6.715.588.661,00
10	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 32 JAKARTA	92.945.616,00	345.623.130	-	438.568.746,00	12.509.865,00	-	12.509.865,00	426.058.881,00
11	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 33 JAKARTA	289.650.111,00	591.663.064	-	881.313.175,00	-	-	-	881.313.175,00
12	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 37 JAKARTA	508.690.757,00	515.363.518	-	1.024.054.275,00	10.213.208,00	-	10.213.208,00	1.013.841.067,00
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
1	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1.038.153.414,00	17.082.000	-	1.055.235.414,00	-	-	-	1.055.235.414,00
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PEMUKIMAN DUKUNGAN	11.221.622.644,00	555.786.095.206	119.917.002.470,00	686.924.720.320,00	1.816.894.495,00	-	1.816.894.495,00	685.107.825.825,00
	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN								
1	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	6.778.146.885,00	42.171.882.516	3.166.624.781,00	52.116.654.182,00	235.704.938,00	-	235.704.938,00	51.880.949.244,00
	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH								
1	UNIT PENGELOLA JAKARTA ASSET MANAGEMENT CENTER	143.278.215.776,00	102.085.346.872	-	3.769.138.667.074,00	-	-	-	3.769.138.667.074,00
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
1	Unit Pengelola Sampah Terpadu	16.515.181.504,00	1.354.574.151.164	7.897.765.397,00	1.378.987.098.065,00	1.678.388.142,00	-	1.678.388.142,00	1.377.308.709.923,00
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK								
1	UNIT PENGELOLA JAKARTA SMART CITY	701.777.542,00	97.022.155.652	44.868.771.201,00	142.592.704.395,00	-	-	-	142.592.704.395,00
	Total	1.829.179.867.761,00	9.576.676.198.494,00	231.548.985.489,00	15.161.180.156.170,00	228.666.683.705,00	-	228.666.683.705,00	14.932.513.472.465,00